PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

BUILDING MOMENTUM THROUGH OPERATIONAL EXCELLENCE

2024

Annual & Sustainability Report
Laporan Tahunan & Keberlanjutan

MIZUHO

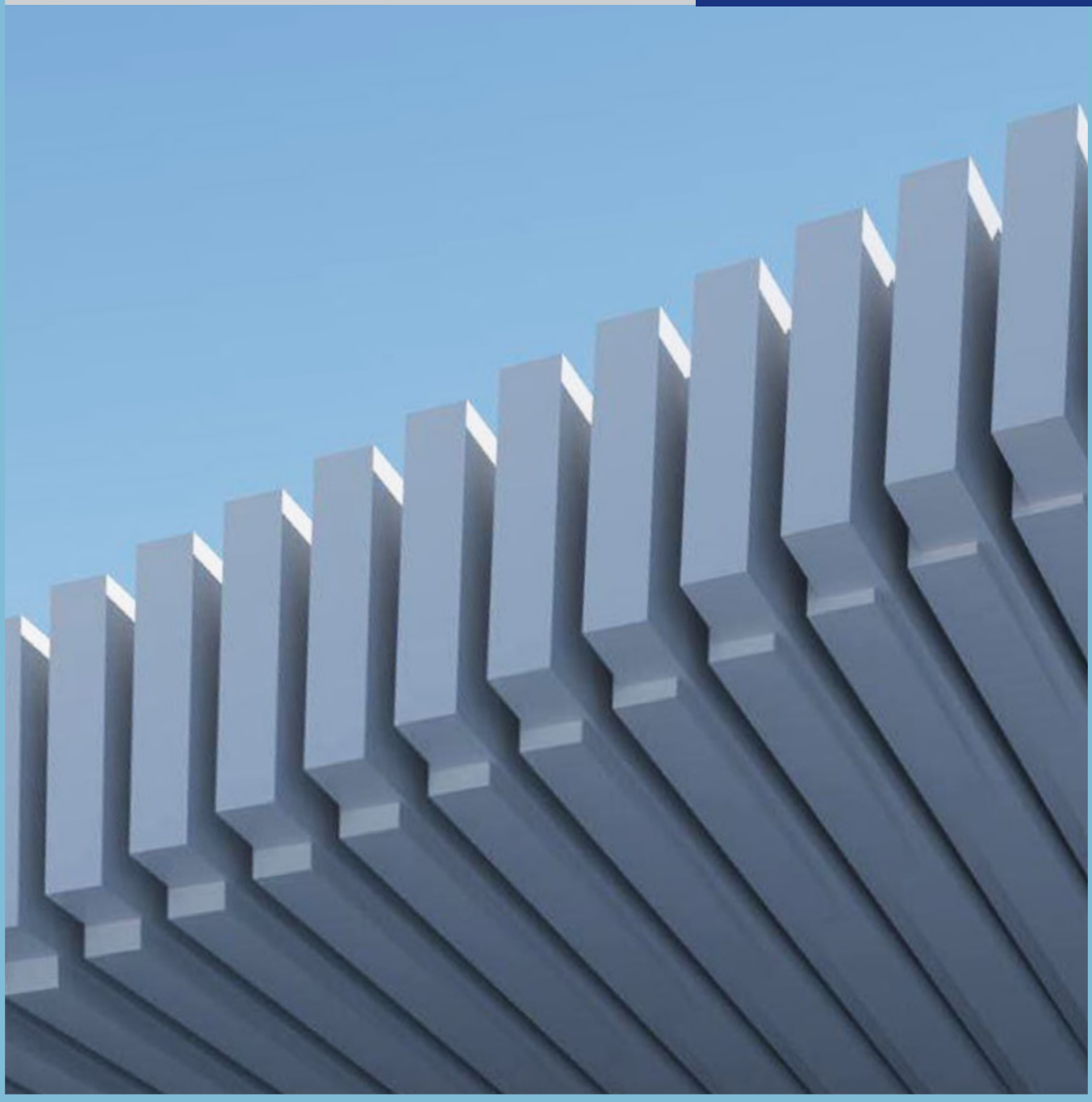

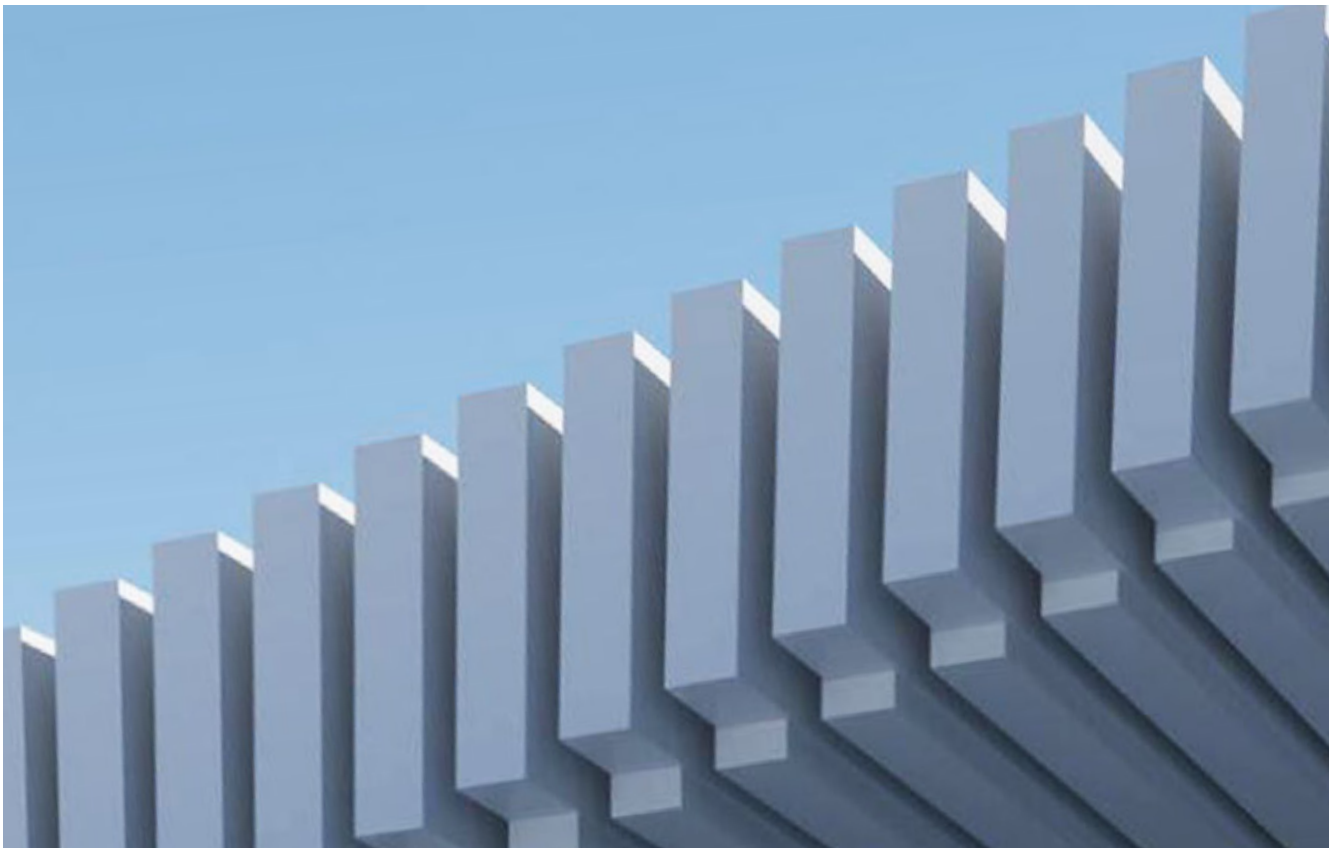

BUILDING MOMENTUM THROUGH OPERATIONAL EXCELLENCE

Komitmen kami terhadap keunggulan operasional menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan mengedepankan efisiensi, inovasi, dan ketepatan dalam setiap proses bisnis, kami menciptakan momentum positif yang memperkuat daya saing serta meningkatkan nilai perusahaan di tengah tantangan industri yang terus berubah.

Melalui optimalisasi sistem, pemanfaatan teknologi terkini, serta pengembangan kapabilitas sumber daya manusia, kami terus memperkuat struktur operasional agar lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil. Upaya ini memungkinkan kami untuk menghadirkan produk dan layanan terbaik bagi pelanggan, serta memberikan kontribusi positif bagi seluruh Pemangku Kepentingan.

Our commitment to operational excellence serves as the foundation for sustainable growth. By prioritizing efficiency, innovation, and precision in every business process, we create positive momentum that strengthens our competitiveness and enhances corporate value amid ongoing industry challenges.

Through system optimization, the use of advanced technology, and human capital development, we continue to reinforce our operational structure to be more adaptive, responsive, and results-oriented. These efforts enable us to deliver the best products and services to our customers and contribute positively to all Stakeholder.

Batasan Tanggung Jawab

Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perseroan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang, serta lingkungan bisnis dimana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini memuat kata “Perseroan” dan “Perusahaan” yang mengacu pada PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk, yang menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang jasa pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Adakalanya kata “kami” digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk.

Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini telah disiapkan dalam bentuk dwibahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bilamana terdapat perbedaan arti atau interpretasi antara keduanya, maka yang berlaku adalah naskah dalam Bahasa Indonesia dalam menentukan tujuan, maksud, dan pengertian dari Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan ini.

Disclaimer

This Annual Report and Sustainability Report contains a statement of the financial condition, results of operations, policies, projections, plans, strategies, and objectives of the Company, which are classified as forward statements in the implementation of applicable legislation, with the exception of historical matters. These statements have the prospect of risks, uncertainties, and can result in actual developments materially different from those reported.

Prospective statements in this Annual Report and Sustainability Report are based on various assumptions regarding current conditions and future conditions, as well as the business environment in which the Company conducts business activities. The Company does not guarantee that documents that have been confirmed as valid will result in certain results as expected.

This Annual Report and Sustainability Report contains the words “the Company” and “the Corporate” which refer to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk, which runs main business activities in the fields of investment, working capital, multipurpose financing services, and/or other financing business activity with the approval of the Financial Services Authority (“OJK”). Sometimes the word “we” is used for convenience to refer to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk.

The Annual Report and Sustainability Report has been prepared in 2 (two) languages, namely bahasa Indonesia and English languages. In the event of any conflict or inconsistency between the two aforementioned versions, the Bahasa Indonesia version shall prevail in determining the spirit, intent and meaning of this Annual Report and Sustainability Report.

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

KINERJA 2024 / 2024 PERFORMANCE **4**

Ikhtisar Keuangan / Financial Highlights 5

Sekilas Kinerja 2024 / 2024 Performance Overview 6

Informasi Saham / Shares Information 7

Grafik Perdagangan Saham Tahun 2023 - 2024 / Share Trading Chart Year 2023 - 2024 8

Aksi Korporasi / Corporate Action 8

Penghentian Sementara Perdagangan Saham dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham / Suspension of Shares Trading and / or Delisting 8

Peristiwa Penting / Event Highlights 9

LAPORAN MANAJEMEN / MANAGEMENT REPORT **16**

Laporan Dewan Komisaris / The Board of Commissioners Report 17

Laporan Direksi / The Board of Directors Report 26

PROFIL PERSEROAN / COMPANY PROFILE **36**

Sekilas Perseroan / Company Overview 37

Kegiatan Usaha / Business Activities 38

Produk & Layanan / Products & Services 39

Jaringan Kantor / Office Network 40

Jejak Langkah Perseroan / Company Milestones 42

Visi, Misi dan Nilai Perseroan / Vision, Mission and Values of The Company 44

Profil Direksi / The Board of Directors Profile 45

Profil Dewan Komisaris / The Board of Commissioners Profile 50

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi / Affiliation Relationship of Members of The Board of Commissioners and The Board of Directors 54

Struktur Organisasi / Organization Structure 56

Struktur Kepemilikan Saham / Shareholding Structure 59

Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Public Accountant Services and Public Accounting Firms 56

Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal / Capital Market Supporting Institutions & Professions 60

Informasi Entitas Anak / Subsidiary Information 60

Informasi Kepemilikan Saham / Share Ownership Information 61

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi / Board of Commissioners and Board of Directors Share Ownership 61

Daftar Pemegang Saham Berdasarkan Klasifikasi / Shareholders List Based on Classification 61

Kronologis Pencatatan Saham / Chronology of Shares Listing 62

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya / Chronology of Other Securities Listings 63

Sumber Daya Manusia / Human Resources 64

Teknologi Informasi / Information Technology 66

Keanggotaan Pada Asosiasi / Association Membership 69

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN / MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS **70**

Uraian Per Segmen / Description Per Segment 71

Uraian Kinerja Keuangan Perseroan / Description of Company Financial Performance 72

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang / Ability to Pay Liabilities and Receivables Collectability 77

Struktur Modal / Capital Structure 78

Kebijakan Struktur Modal / Capital Structure Policy 78

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal / Material Commitments to Capital Goods Investment 79

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan / Material Information and Material Facts that Occured After the Date of the Accountant's Report 79

Prospek Usaha / Business Prospect 79

Unit Bisnis Korporasi & Unit Bisnis Ritel / Corporate Business Unit & Retail Business Unit 82

Target dan Realisasi Tahun Buku / Target and Realization of the Financial Year 84

Investasi Barang Modal yang Direalisasikan pada Tahun Buku Terakhir / Capital Goods Investment Realized at the End of Financial Year 85

Dividen / Dividend 85

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum / Realization of The Use of Funds From Public Offering 85

Informasi Material Lainnya / Other Material Information 86

Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan / Changes to Laws and Regulation with Significant Effects 86

Perubahan Kebijakan Akuntansi / Changes in Accounting Policies 86

TATA KELOLA / CORPORATE GOVERNANCE **88**

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") / General Meeting of Shareholders ("GMS") 89

Pelaksanaan RUPS Tahun 2024 / The Implementation of 2024 GMS 89

Pelaksanaan RUPS Tahun 2023 / The Implementation of 2023 GMS 93

Dewan Komisaris / Board of Commissioners 94

Direksi / Board of Directors 104

Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi / Procedure and Basis for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors 115

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris / Committees Under the Board of Commissioners 117

Komite Audit / Audit Committee 117

Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee 124

Komite Pemantau Risiko / Risk Monitoring Committee 132

Komite Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi / Supporting Committee for Implementing the Duties and Responsibilities of the Board of Directors 135

Penilaian Kinerja Komite dan Unit Kerja yang Berada di Bawah Direksi / Performance Assessment of Committees and Work Units Under the Board of Directors 135

Komite Manajemen Risiko / Risk Management Committee 136

Komite Pengarah Teknologi Informasi / Information Technology Steering Committee 137

Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary 139

Unit Audit Internal / Internal Audit Unit 141

Pengendalian Internal / Internal Control 144

Sistem Manajemen Risiko / Risk Management System 147

Sanksi Administratif / Administrative Sanction 155

Litigasi / Litigation 155

Kode Etik / Code of Conducts 155

Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan Direksi / Share Ownership Program by Employees and Board of Directors 156

Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistleblowing System 156

Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik / Guidelines on The Implementation of Good Corporate Governance 157

Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU,PPT dan PPPSPM) Anti Money Laundering, Counter Terrorism Financing and Counter Proliferation Financing of Mass Destruction Weapons (AML, CTF and CPFMDW) 161

Kebijakan Antikorupsi / Anti-Corruption Policy 163

Penerapan Strategi *Anti-Fraud* / Implementation of Anti-Fraud Strategy 164

Pelindungan Konsumen / Customer Protection 166

Rekomendasi dalam Penerapan Pedoman GCG / Recommendation on GCG Guidelines Implementation 169

TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN / SOCIAL & ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY **172**

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan / Corporate Social and Environmental Responsibility Commitment and Policy 173

Visi, Misi dan Nilai Perseroan / Vision, Mission and Values of The Company 173

Profil Perseroan / Company Profile 173

Keselarasan dengan Tujuan Berkelanjutan / Alignment with Sustainable Development Goals 174

Penjelasan Strategi Keberlanjutan / Elaboration on Sustainability Strategy 177

Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Achievements of Sustainable Finance Action Plan 178

Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Objective of Sustainable Finance Action Plan 180

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 5 (Lima) Tahun / 5 (Five) Years Sustainable Finance Action Plan 181

Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Sustainable Finance Action Plan Preparation Process 184

Faktor Penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Determinative Factors of Sustainable Finance Action Plan 185

Prioritas Uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Priority of Detail of Sustainable Finance Action Plan 187

Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan / Performance Overview of Sustainability Aspect 192

Penjelasan Direksi / The Board of Directors' Remark 194

Tata Kelola Keberlanjutan / Sustainability Governance 204

Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan / Follow Up of Sustainable Finance Action Plan 207

Kinerja Keberlanjutan / Sustainability Performance 208

Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan / Responsibility for Sustainable Finance Product Developments and/or Services 216

Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan / Service and Complaint Resolution Report 216

Survei Kepuasan Pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan / Customer Satisfaction Survey on Sustainable Financial Products and/or Services 217

Keselarasan Laporan Keberlanjutan dengan Metrik ESG / Alignment of Sustainability Report with ESG Metrics 218

REFERENSI KRITERIA POJK NO. 51/POJK.03/2017 / CRITERIA REFERENCE PURSUANT TO POJK NO. 51/POJK.03/2017 **232**

LEMBAR UMPAN BALIK / FEEDBACK SHEET **237**

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2024 / STATEMENT LETTER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE 2024 ANNUAL REPORT **239**

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN YANG TELAH DIAUDIT / AUDITED ANNUAL FINANCIAL STATEMENT **241**

KINERJA 2024

2024 PERFORMANCE

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain
in billion Rupiah except otherwise stated

LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION	2022	2023	2024
Aset / Asset			
Kas dan Setara Kas / Cash and cash equivalents	102.60	50.36	40.66
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih / Consumer financing receivables- net	1,438.26	1,730.18	2,081.77
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih / Finance lease receivables- net	674.83	813.26	879.80
Piutang Lain-Lain - Bersih / Other receivables - net	79.06	82.48	97.22
Biaya dibayar dimuka / Prepaid expenses	1.75	2.61	2.95
Aset pajak tangguhan / Deffered tax assets	11.58	11.66	15.76
Aset Tetap - Bersih / Property and equipment - net	53.03	51.81	48.32
Aset derivatif / Derivative assets	17.53	7.95	3.77
Aset Hak-Guna – Bersih / Right-of-use assets - net	33.76	32.11	29.34
Aset Lain-Lain / Other assets	54.27	11.16	10.93
Jumlah Aset / Total Assets	2,466.67	2,793.58	3,210.52
Liabilitas dan Ekuitas / Liabilities and Equity			
Utang bank / Bank loans	1,661.38	1,939.81	2,347.42
Utang usaha / Trade payables	0.71	0.97	4.49
Liabilitas derivatif / Derivative liabilities	0	0.23	0
Utang lain-lain / Other payables	56.11	46.37	58.23
Biaya masih harus dibayar / Accrued expenses	14.37	11.90	9.36
Utang pajak / Taxes payables	2.25	2.05	0.75
Liabilitas sewa / Lease liabilities	29.54	27.30	24.62
Liabilitas imbalan pasca-kerja / Post-employment benefits liabilities	12.41	14.47	21.66
Jumlah liabilitas / Total liabilities	1,776.77	2,043.10	2,466.53
Jumlah ekuitas / Total equity	689.90	750.48	743.99
Jumlah liabilitas & ekuitas / Total liabilities & equity	2,466.67	2,793.58	3,210.52

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME	2022	2023	2024
Pendapatan / Income			
Pembiayaan konsumen / Consumer financing	224.00	265.37	320.99
Sewa pembiayaan / Finance leases	46.35	55.54	64.71
Administrasi dan provisi / Administration and provision	32.45	45.41	53.01
Penalti / Penalty	14.58	20.75	19.73
Bunga / Interest	0.39	0.33	0.35
Pendapatan lain-lain / Other income	15.29	13.94	9.86
Jumlah pendapatan / Total Income	333.06	401.34	468.65

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (LANJUTAN) STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)	2022	2023	2024
Beban / Expenses			
Bunga dan keuangan / Interest and financing charges	59.24	105.23	134.32
Umum dan administrasi / General and administrative	63.90	69.64	60.68
Kepegawaian / Personnel	102.96	112.20	126.18
Penyisihan kerugian penurunan nilai / Provision for impairment losses	49.55	52.16	152.06
Beban lain-lain / Other expenses	2.07	0.88	0.45
Jumlah beban / Total Expenses	277.72	340.11	473.69
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan / Profit (loss) before income tax	55.34	61.23	(5.04)
(Beban) Manfaat pajak penghasilan / Income Tax (Expense) Benefit	6.71	(0.08)	2.88
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / Net (loss) profit for the year	62.05	61.15	(2.16)
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income			
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain / Total Other comprehensive income (loss)	2.61	(0.56)	(4.33)
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan / Total Comprehensive (Loss) Income for the year	64.65	60.59	(6.49)
Laba (rugi) per saham (dalam Rupiah penuh) / Basic earning per share (in full Rupiah)	10.91	10.75	(0.38)

RASIO KEUANGAN FINANCIAL RATIOS	2022	2023	2024
Rasio Laba (Rugi) Bersih Terhadap Total Aset / Net Profit (Loss) to Total Assets Ratio	2.52%	2.19%	(0.16%)
Rasio Laba (Rugi) Bersih Terhadap Ekuitas / Net Profit (Loss) to Equity Ratio	8.99%	8.15%	(0.28%)
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan / Profit (Loss) on Income Ratio	18.63%	15.24%	(0.46%)
Rasio Lancar / Current Ratio	147.69%	138.45%	132.86%
NPF Neto / NPF Net	2.22%	0.19%	0.42%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional / Operating Expenses to Operating Income	87.29%	85.38%	101.56%
Net Interest Margin	9.88%	8.98%	8.64%
Total Liabilitas terhadap Ekuitas / Total Liabilities to Equity	2.58x	2.72x	3.32x
Total Liabilitas terhadap Total Aset / Total Liabilities to Total Assets	0.72x	0.73x	0.77x
Rasio Piutang terhadap Ekuitas / Accounts Receivable to Equity Ratio	3.06x	3.39x	3.98x
Rasio *Gearing* / Gearing Ratio	2.42x	2.59x	3.14x

Sekilas Kinerja 2024
2024 Performance Overview

Jumlah Pendapatan
Total Income

Rp
468.65
Miliar / Billion

Jumlah Aset
Total Assets

Rp
3,210.52
Miliar / Billion

NPF Neto
NPF Net

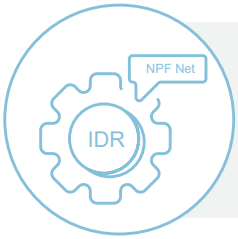

0.42%

Rasio *Gearing*
Gearing Ratio

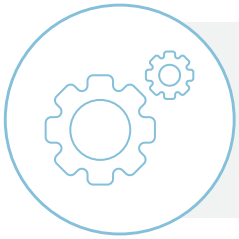

3.14x

Informasi Saham
Shares Information

Data Saham Perkuartal Tahun 2024
2024 Quarterly Shares Information

Bursa Efek / Stock Exchange : PT Bursa Efek Indonesia (IDX)

	Harga Saham / Share Price (Rp)			Volume Perdagangan di Pasar Reguler Trading Volume in Reguler Market (Lembar / Shares)	Jumlah Saham yang Beredar Number of Outstanding Shares (Lembar / Shares)	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization (Dalam Miliar Rupiah / In Billion Rupiah)
	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing			
Kuartal I 1st Quarter	100	84	91	235,602	5,687,353,997	517.55
Kuartal II 2nd Quarter	105	80	86	193,789	5,687,353,997	489.11
Kuartal III 3rd Quarter	110	84	91	316,184	5,687,353,997	517.55
Kuartal IV 4th Quarter	99	85	90	62,967	5,687,353,997	511.86

Data Saham Perkuartal Tahun 2023
2023 Quarterly Shares Information

Bursa Efek / Stock Exchange : PT Bursa Efek Indonesia (IDX)

	Harga Saham / Share Price (Rp)			Volume Perdagangan di Pasar Reguler Trading Volume in Reguler Market (Lembar / Shares)	Jumlah Saham yang Beredar Number of Outstanding Shares (Lembar / Shares)	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization (Dalam Miliar Rupiah / In Billion Rupiah)
	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing			
Kuartal I 1st Quarter	113	88	91	33,660,100	5,687,353,997	517.55
Kuartal II 2nd Quarter	112	85	92	118,271,200	5,687,353,997	523.24
Kuartal III 3rd Quarter	108	85	91	55,665,300	5,687,353,997	517.55
Kuartal IV 4th Quarter	92	83	86	17,719,200	5,687,353,997	489.11

Total jumlah saham Perseroan yang beredar di Bursa Efek Indonesia sepanjang 2023 dan 2024 adalah sebesar 5.687.353.997 lembar saham. Total Kapitalisasi Pasar Saham Perseroan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp511,86 miliar dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp489,11 miliar.

The total number of the Company's shares outstanding on the Indonesia Stock Exchange throughout 2024 was 5,687,353,997 shares. The Company's total market capitalization as of December 31, 2024, increased to Rp511.86 billion compared to Rp489.11 billion as of December 31, 2023.

Grafik Perdagangan Saham Tahun 2023 - 2024
Share Trading Chart Year 2023 - 2024

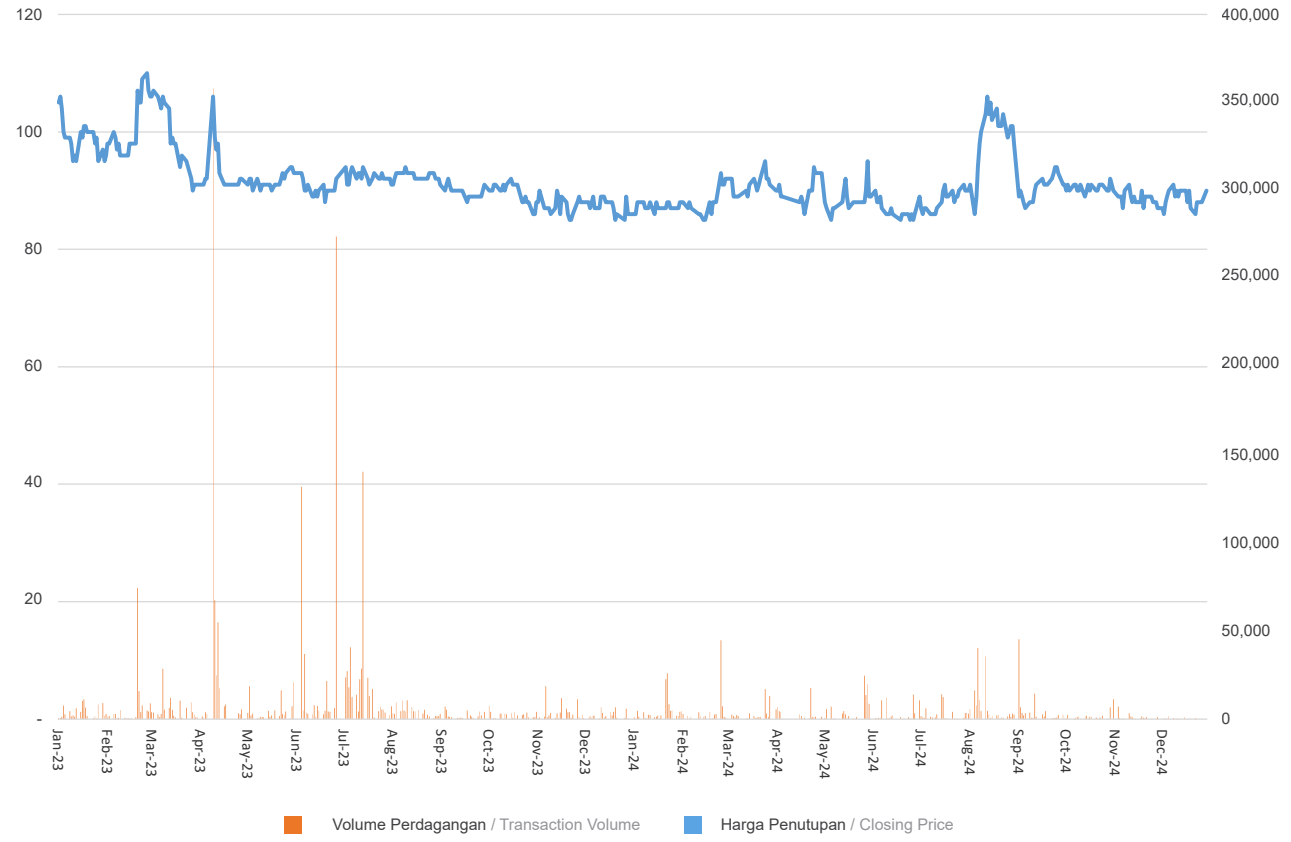

Aksi Korporasi
Corporate Action

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak melaksanakan aksi korporasi, seperti pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham.

Throughout 2024, the Company did not conduct any corporate actions, such as stock split, reverse stock, stock dividend, stock bonus, and changes in the nominal value of shares.

Penghentian Sementara Perdagangan Saham dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham
Suspension of Shares Trading and / or Delisting

Sepanjang tahun 2024, tidak ada penghentian sementara perdagangan saham dan/atau penghapusan pencatatan saham.

Throughout 2024, there was no suspension of shares trading and / or delisting.

Peristiwa Penting
Event Highlights

Wonderful Hongkong Macau 2024

15 - 21 Jan 2024

Pada tanggal 15–21 Januari 2024, Perseroan menyelenggarakan *reward tour bertajuk Wonderful Hongkong Macau* 2024 yang diikuti oleh 33 agen *Multi-Purpose Financing*. Kegiatan ini meliputi kunjungan ke berbagai tempat wisata di Hongkong dan Makau. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi Perseroan terhadap kontribusi agen kepada Perseroan. Perseroan berharap agen dapat meningkatkan kontribusi berkualitas dari waktu ke waktu.

On January 15–21, 2024, the Company held a reward tour titled Wonderful Hongkong Macau 2024, attended by 33 Multi-Purpose Financing agents. The event included visits to tourist attractions in Hongkong and Macau. This activity is a form of appreciation from the Company for the agent's contribution to the Company. The Company hopes that agents can improve their quality contribution from time to time.

Discover Beijing & Shanghai 2024

1 - 8 Mar 2024

Pada tanggal 1–8 Maret 2024, Perseroan menyelenggarakan *reward tour bertajuk Discover Beijing & Shanghai* 2024 yang diikuti oleh 43 pemilik *showroom*. Kegiatan ini mencakup kunjungan ke berbagai tempat wisata di dua kota besar Tiongkok tersebut. Program ini bertujuan untuk mempererat hubungan dengan para pemilik *showroom* serta mendorong peningkatan kontribusi dan daya saing terhadap kompetitor.

On March 1–8, 2024, the Company organized a reward tour titled Discover Beijing & Shanghai 2024, attended by 43 showroom owners. The agenda included sightseeing in the two major Cities in China. The program aimed to strengthen the relationship with showroom owners and to enhance their contribution and competitiveness in the market.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Extraordinary General Meeting of Shareholders

21 Mar 2024

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") diadakan di Catur Dharma Hall, Menara Astra lantai 5, Jakarta. RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan para Pemegang Saham. Risalah RUPSLB telah dimuat dalam situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") was held at Catur Dharma Hall, Menara Astra 5th floor, Jakarta. The EGMS was attended by members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders. The minutes of the EGMS have been published on the e-RUPS provider's website, the Indonesia Stock Exchange's website, and the Company's website.

National Gathering 2024 Steady Go

24 - 26 Apr 2024

Berlokasi di Marriott Yogyakarta, *National Gathering* 2024 *Steady Go* diselenggarakan pada 24–26 April 2024 dan diikuti oleh 200 pemilik *showroom* dari seluruh Indonesia. Acara ini mencakup penyampaian program strategis, pemberian penghargaan, makan malam, serta hiburan. Pada hari kedua, peserta mengikuti berbagai aktivitas yang dirancang untuk mempererat kebersamaan. Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara para pemilik *showroom* dan Perseroan.

Held at Marriott Yogyakarta, National Gathering 2024 titled Steady Go took place on April 24–26, 2024, and was attended by 200 showroom owners from across Indonesia. The event featured program presentations, award ceremonies, dinner, and entertainment. On the second day, participants engaged in various team-building activities. This event served as a valuable opportunity to strengthen synergy between showroom owners and Company.

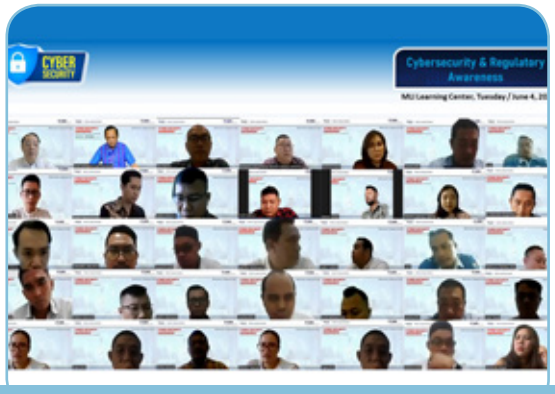

Pelatihan *Cyber Security*
Cyber Security Training

4 Jun 2024

Pada tanggal 4 Juni 2024, Perseroan menyelenggarakan *Training Cyber Security* yang berlangsung di Kantor Pusat. Acara ini dihadiri oleh Direksi, Kepala Divisi, Kepala Departemen, serta *Section Head* dari Kantor Pusat dan Kantor Cabang, dengan total peserta sebanyak 100 orang.

Pelatihan ini diadakan oleh PT Sarana Mutu Edukasi Indonesia (SMEI). Kegiatan ini mencakup pemberian materi oleh Ardi Sutedja K., Ketua Indonesia *Cyber Security Forum* (ICSF). Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran karyawan dalam mengenali ancaman siber, memahami cara melindungi informasi penting perusahaan, serta menanamkan tanggung jawab dalam menjaga keamanan *digital* perusahaan.

On June 4, 2024, the Company held a Cybersecurity Training session at the Head Office. The event was attended by the Board of Directors, Division Heads, Department Heads, and Section Heads from both the Head Office and Branch Offices, with a total of 100 participants.

This training is organized by PT Sarana Mutu Edukasi Indonesia (SMEI). The training featured a presentation by Ardi Sutedja K., Chairman of the Indonesia Cyber Security Forum (ICSF). The session aimed to raise employees' awareness of cyber threats, provide insights on protecting the company's critical information, and instill a sense of responsibility in maintaining the company's digital security.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Annual General Meeting of Shareholders

20 Jun 2024

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") diadakan di Catur Dharma Hall, Menara Astra lantai 5, Jakarta. RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, para Pemegang Saham, dan Undangan. Risalah RUPST telah dimuat dalam situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") was held at Catur Dharma Hall, Menara Astra 5th floor, Jakarta. The AGMS was attended by members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Shareholders, and Guests. The minutes of the AGMS have been published on the e-RUPS provider's website, the Indonesia Stock Exchange's website, and the Company's website.

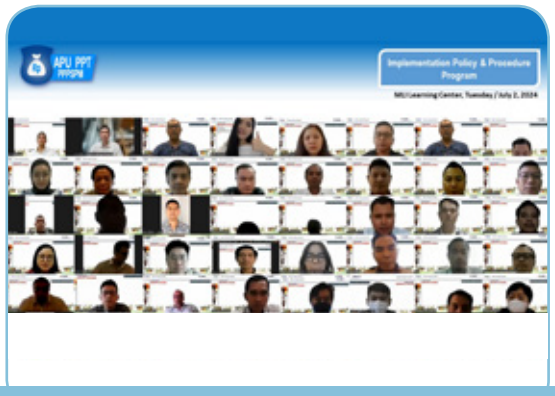

Kegiatan Program Training APU PPT & PPPSPM
APU PPT & PPPSPM Training Program Activities

2 Jul 2024

Pada tanggal 2 Juli 2024, Perseroan menyelenggarakan Program Training APU PPT & PPPSPM yang berlangsung di Kantor Pusat. Acara ini dihadiri oleh *Deputy Director*, Kepala Divisi, Kepala Departemen, serta *Section Head* dari Kantor Pusat dan Kantor Cabang, dengan total peserta sebanyak 100 orang.

Pelatihan ini diadakan oleh PT Sarana Mutu Edukasi Indonesia (SMEI). Kegiatan ini mencakup pemberian materi oleh Ibu Esther Rosaline, SH., MA., CFE., CBE. dari Lembaga Pengembangan *Fraud Auditing*. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT & PPPSPM, serta memperjelas peran dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPPSPM.

On July 2, 2024, the Company held the APU PPT & PPPSPM Training Program at the Head Office. The event was attended by the Deputy Director, Division Heads, Department Heads, and Section Heads from both the Head Office and Branch Office with a total of 100 participants.

This training is organized by PT Sarana Mutu Edukasi Indonesia (SMEI). The training included a presentation by Mrs. Esther Rosaline, SH., MA., CFE., CBE., from the Fraud Auditing Development Institute. The training aimed to enhance understanding of policies and procedures related to the implementation of the APU PPT & PPPSPM program, as well as clarify roles and responsibilities in the prevention and eradication of ML (Money Laundering), TF (Terrorism Financing), and/or PPPSPM-related offenses.

Explore Japan 2024

8 - 16 Jul 2024

Pada tanggal 8–16 Juli 2024, Perseroan mengadakan *reward tour* bertajuk *Explore Japan* 2024 yang diikuti oleh 19 pemilik *showroom.* Kegiatan ini meliputi kunjungan ke berbagai destinasi wisata di Jepang. Program ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara Perseroan dan para pemilik *showroom* guna meningkatkan kontribusi serta daya saing di pasar yang kompetitif.

On July 8–16, 2024, the Company held a reward tour titled Explore Japan 2024, attended by 19 showroom owners. The tour included visits to iconic tourist destinations throughout Japan. This initiative aimed to foster closer relationships between the Company and showroom owners, enhancing their contribution and competitive edge.

Kegiatan CSER
CSER Activities

18 Oct 2024

Sebagai bagian dari inisiatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, Perusahaan mengadakan kegiatan literasi keuangan yang melibatkan 250 siswa dan guru. Program ini juga mendukung implementasi ketentuan OJK sebagaimana tercantum dalam POJK No. 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat, dengan pendekatan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Sebagai wujud nyata komitmen Perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024 di SMAN 91, Jakarta Timur. Dalam kegiatan tersebut, Perusahaan menyerahkan bantuan berupa sarana pendukung proses belajar mengajar. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Sekolah, Ibu Widyandari Eka Dhewadjanti, MPd. Perusahaan berharap kontribusi ini dapat memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan, memperkuat kualitas pembelajaran, serta mendukung pengembangan sumber daya manusia, khususnya di kalangan generasi muda.

As part of its efforts to improve public understanding of financial products and services, the Company conducted a financial literacy program involving 250 students and teachers. This initiative also supports the implementation of the POJK No. 3 of 2023 on Enhancing Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the General Public, through the utilization of information and communication technology.

Demonstrating its strong commitment to social and environmental responsibility, the Company held the event on October 18, 2024, at SMAN 91, East Jakarta. During the event, the Company donated supporting facilities for the school's teaching and learning activities. The donation was received directly by the School Principal, Mrs. Widyandari Eka Dhewadjanti, MPd. Through this contribution, the Company hopes to make a positive impact on the community, enhance educational quality, and foster the development of human capital, particularly among the younger generation.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Extraordinary General Meeting of Shareholders

7 Nov 2024

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") diadakan di Function Hall C, Wisma 46 lantai 3, Jakarta. RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan para Pemegang Saham. Risalah RUPSLB telah dimuat dalam situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") was held at Function Hall C, Wisma 46 3rd floor, Jakarta. The EGMS was attended by members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders. The minutes of the EGMS have been published on the e-RUPS provider's website, the Indonesia Stock Exchange's website, and the Company's website.

Wonderful East Europe & Germany 2024

12 - 24 Dec 2024

Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para pemilik *showroom,* Perseroan menyelenggarakan *reward tour* bertajuk *Wonderful East Europe & Germany* 2024 pada 12–24 Desember 2024. Acara ini diikuti oleh 19 peserta dan mencakup kunjungan ke tempat-tempat wisata di kawasan Eropa Timur dan Jerman. Melalui program ini, Perseroan berharap dapat memperkuat hubungan kemitraan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar.

As a form of appreciation for showroom owners, the Company organized a reward tour titled Wonderful East Europe & Germany 2024 on December 12–24, 2024. The event, attended by 19 participants, included sightseeing in Eastern Europe and Germany. Through this program, the Company aimed to strengthen business partnerships and improve competitiveness in the market.

Public Expose Tahunan
Annual Public Expose

27 Dec 2024

Perseroan mengadakan acara *Public Expose* pada tanggal 27 Desember 2024 bertempat di Hall B, Gedung Bank Panin Lantai 4, Jakarta. Paparan Public Expose Tahunan ini disampaikan oleh anggota Direktur Perseroan.

The Company held a Public Expose event on December 27, 2024, located at Hall B, Gedung Bank Panin 4th floor , Jakarta. The Annual Public Expose presentation is delivered by members of the Company's Board of Directors.

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

Laporan Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Report

Tantangan global yang terjadi sepanjang tahun 2024 memberikan dampak terhadap Perseroan. Perseroan beralih ke strategi yang konservatif dan realistis untuk mempertahankan pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan. Stimulus ekonomi dan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah turut mendukung kelangsungan usaha Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menjunjung tinggi budaya risiko dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("GCG") sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan berusaha meningkatkan efisiensi dengan pengendalian biaya operasional serta senantiasa melakukan pengendalian internal di setiap fungsi dalam organisasi.

Global challenges that occurred throughout 2024 have an impact on the Company. The Company pivoted to a conservative and realistic strategy to maintain the Company's sustainable growth. Economic stimulus and policies issued by the Government also support the Company's business continuity. In carrying out its business activities, the Company upholds a risk culture and Good Corporate Governance ("GCG") in accordance with applicable laws and regulations. The Company strives to increase efficiency by controlling operational costs and continuously implementing internal controls in every function within the organization.

Yasuo Imaizumi

Komisaris Utama
President Commissioner

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dewan Komisaris menyampaikan laporan tugas dan tanggung jawab pengawasan Perseroan sejalan dengan arahan Rapat Umum Pemegang Saham dan Anggaran Dasar yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan selama tahun 2024. Kami juga menyampaikan penilaian kinerja Direksi yang mencakup antara lain, kinerja pengelolaan Perseroan, pengawasan terhadap perumusan dan implementasi strategi Perseroan, pandangan atas prospek usaha yang disusun Direksi serta pandangan atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ("GCG").

Penilaian Atas Kinerja Direksi

Sepanjang tahun 2024, berbagai tantangan dapat dirasakan secara global. Efek perang Ukraina-Rusia serta konflik geopolitik di Timur Tengah dan di Laut Cina Selatan yang masih belum usai. Meningkatnya ketegangan dan konflik geopolitik berisiko

Dear Respected Shareholders and Stakeholders,

The Board of Commissioners submitted a report on the duties and responsibilities of the Company's supervision in line with the direction of the General Meeting of Shareholders and the Articles of Association realized through various activities in 2024. We also submitted an assessment of the performance of the Board of Directors which includes, performance of the Company's management, supervision of the formulation and implementation of the Company's strategy, view of business prospects prepared by the Board of Directors and the view of the implementation of Good Corporate Governance ("GCG").

Assessment of the Performance of the Board of Directors

Throughout 2024, various challenges can be felt globally. The effects of the Ukraine-Russia war and geopolitical conflicts in the Middle East and the South China Sea are still ongoing. Increasing geopolitical tensions and conflicts risk disrupting

mengganggu perdagangan dan pasar energi, yang berpotensi memicu kenaikan harga energi. Perekonomian global juga belum pulih sepenuhnya imbas dari pandemi Covid-19. Namun secara keseluruhan, kondisi ekonomi dunia dapat dikatakan cukup tangguh.

trade and energy markets, potentially triggering higher energy prices. The global economy has also not fully recovered from the impact of the Covid-19 pandemic. However, overall, the world's economic conditions can be said to be quite resilient.

Inflasi yang terus menurun memberikan dorongan pada pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga riil, meskipun kepercayaan konsumen belum pulih seperti sebelum pandemi di banyak negara. Pengangguran secara umum tetap pada atau mendekati level terendah dalam sejarah.

With inflation continuing to lower is providing a boost to real household income growth and spending, although customer confidence has yet to recover to pre-pandemic levels in many countries. Unemployment generally remains at or near historical lows.

Berdasarkan data Kementrian Keuangan Republik Indonesia, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terakselerasi menjadi sebesar 5,40% yoy pada triwulan IV-2024, didorong oleh stimulus ekonomi. Arah kebijakan Pemerintah Amerika Serikat ("AS") dan Bank Sentral AS berpengaruh pada ketidakpastian pasar keuangan global. Kuatnya ekonomi AS dengan pasar tenaga kerja yang membaik, serta dampak kebijakan tarif menahan proses disinflasi di AS yang meningkatkan ketidakpastian terhadap ekspektasi penurunan *Fed Funds Rate* (FFR). Kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong *yield Treasury* AS tetap tinggi, baik pada tenor jangka pendek maupun panjang. Bersamaan dengan ketegangan politik global yang meningkat, preferensi investor makin besar terhadap aset keuangan AS. Indeks Dolar AS (DXY) masih berada dalam tren meningkat yang semakin menambah tekanan pelemahan berbagai mata uang dunia.

Based on data from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, China's economic growth accelerated to 5.40% yoy in the fourth quarter of 2024, driven by economic stimulus. The policy direction of the United States ("US") Government and the US Central Bank of the has an impact on the uncertainty of the global financial market. The strength of the US economy with an improving labor market, as well as the impact of tariff policies holding back the disinflation process in the US, has increased uncertainty regarding expectations of a reduction in the Fed Funds Rate (FFR). A more expansionary US fiscal policy has pushed US Treasury yields to remain high, both in short-term and long-term tenors. Along with increasing global political tensions, investor preference is increasing for US financial assets. The US Dollar Index (DXY) is still on an upward trend, which is adding to the weakening pressure on various world currencies.

Disruspsi ekonomi global ini juga dapat dirasakan dampaknya di Indonesia. Pesta demokrasi Pemilihan Umum Presiden dan Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2024 berkontribusi dalam ketidakstabilan iklim ekonomi Indonesia. Pada bulan Agustus 2024 muncul demonstrasi di berbagai daerah dengan tajuk "Peringatan Darurat" yang dipicu oleh upaya menganulir putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas pencalonan kepala daerah. Hal ini memicu investor untuk *wait-and-see* hingga iklim investasi Indonesia membaik.

The impact of this global economic disruption can also be felt in Indonesia. The democratic celebration of the Presidential and Regional Head Elections held in 2024 contributed to the instability of Indonesia's economic climate. In August 2024, demonstrations emerged in various regions under the title "Emergency Warning" triggered by efforts to annul the Constitutional Court's ruling on the regional head nomination limit. This prompted investors to wait-and-see until Indonesia's investment climate improved.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ("BPS"), pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03% (c-to-c). Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah jasa lainnya sebesar 9,80%, diikuti transportasi dan pergudangan sebesar 8,69%, dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,56%. Sementara itu, industri pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,43%. Sedangkan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta pertanian, kehutanan, dan perikanan masing-masing tumbuh sebesar 4,86% dan 0,67%.

Based on data from the Central Statistics Agency ("BPS"), Indonesia's economic growth grew by 5.03% (c-to-c). The business sectors that experienced the highest growth were other services at 9.80%, followed by transportation and warehousing at 8.69%, and accommodation and food and beverage provision at 8.56%. Meanwhile, the manufacturing industry, which has a dominant role, grew by 4.43%. Meanwhile, wholesale and retail trade, car and motorcycle repairs, and agriculture, forestry, and fisheries grew by 4.86% and 0.67% respectively.

Pelemahan daya beli masyarakat dan kenaikan tarif pajak progresif kendaraan bermotor merupan faktor utama penurunan penjualan mobil di Indonesia. Kenaikan tarif pajak ini dilakukan Pemeritah guna mendorong masyarakat menggunakan moda transportasi umum. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merevisi target penjualan mobil baru 2024 yang dicanangkan sebesar 1,1 juta unit menjadi sebesar 850 ribu sepanjang tahun 2024. Dan pada realisasinya, penjualan mobil baru pada tahun 2024 adalah sebesar 865.723 unit, turun 13,90% dibandingkan tahun 2023. Adapun, penjualan mobil bekas mencapai 1,8 juta unit di sepanjang 2024.

The weakening of people's purchasing power and the increase in progressive motor vehicle tax rates are the main factors in the decline in car sales in Indonesia. The increase in tax rates was carried out by the Government to encourage people to use public transportation. The Association of Indonesian Automotive Industries (Gaikindo) revised the target for new car sales in 2024, which was set at 1.1 million units, to 850 thousand throughout 2024. And in realization, new car sales in 2024 were 865,723 units, down 13.90% compared to 2023. Meanwhile, used car sales reached 1.8 million units throughout 2024.

Ditengah ketidakstabilan ekonomi pada tahun 2024, Unit Bisnis Korporasi tetap tumbuh pada produk investasi yaitu pembiayaan dengan pembayaran secara angsuran dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK yaitu masing-masing sebesar 512,87% dan 55,22%, namun Unit Bisnis Korporasi tidak mencapai target pada produk investasi yaitu sewa pembiayaan dan jual dan sewa balik dikarenakan ketidakpastian dari kondisi global dan domestik telah mendorong pelanggan Unit Bisnis Korporasi untuk lebih berhati-hati dalam berekspansi selama tahun 2024. Dari sisi Unit Bisnis Ritel, target tercapai sebesar 85,02% pada produk modal kerja yaitu jual dan sewa balik, namun Unit Bisnis Ritel gagal mencapai target pada produk multiguna yaitu pembelian dengan pembayaran secara angsuran dan fasilitas dana. Menurunnya daya beli masyarakat merupakan faktor utama dari tidak tercapainya target Unit Bisnis Ritel. Perseroan senantiasa berusaha meningkatkan portofolio pembiayaan Unit Bisnis Ritel dan Unit Bisnis Korporasi yang berkualitas berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan produk-produk yang dikurasi untuk memenuhi kebutuhan debitur.

Amid economic instability in 2024, the Corporate Business Unit continued to grow in investment products, namely financing with installment payments and other financing business activities based on OJK approval, namely 512.87% and 55.22% respectively, but the Corporate Business Unit did not achieve the target in investment products, namely finance leases and sale and leaseback due to the uncertainty of global and domestic conditions that have encouraged Corporate Business Unit customers to be more careful in expanding during 2024. From the Retail Business Unit side, the target was achieved by 85.02% in working capital products, namely sale and leaseback, but the Retail Business Unit failed to achieve the target in multipurpose products, namely purchases with installment payments and funding facilities. The decline in people's purchasing power is the main factor in the failure to achieve the Retail Business Unit's target. The Company continues to strive to improve the quality financing portfolio of the Retail Business Unit and Corporate Business Unit based on the principle of prudence with products that are curated to meet the needs of debtors.

Perseroan juga mengimplementasikan strategi-strategi konservatif untuk dapat terus menunjukkan eksistensinya dalam dunia pembiayaan serta senantiasa melakukan penilaian sendiri (*control self-assessment*) dalam setiap aktivitas bisnis guna mencapai efisiensi dalam operasional bisnis, menjaga kepercayaan dan reputasi Perseroan dengan layanan yang andal dan transparan, serta mematuhi regulasi OJK. Unit Bisnis Ritel berfokus memberikan fasilitas pembiayaan pada produk-produk yang memiliki tingkat risiko yang lebih baik dengan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian secara ketat. Dan untuk menekan biaya pencadangan kredit bermasalah, Unit Bisnis Ritel terus melakukan perbaikan proses kerja untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja tim penagihan. Selain itu dalam rangka memperkuat pengendalian internal, perbaikan sistem dan proses lainnya juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi biaya, memaksimalkan tingkat produktivitas dan kualitas standar layanan termasuk dengan penerapan strategi anti fraud di semua lini.

The Company also implements conservative strategies to continue to demonstrate its existence in the world of financing and always conduct control self-assessments in every business activity in order to achieve efficiency in business operations, maintaining the Company's trust and reputation with reliable and transparent services, and complying with OJK regulations. The Retail Business Unit focuses on providing financing facilities for products that have a better risk level by strictly implementing prudent principles. And to reduce the cost of providing bad credit reserves, the Retail Business Unit continues to improve work processes to increase productivity and effectiveness of the collection team. In addition, in order to strengthen internal control, improvements to other systems and processes are also carried out to increase cost efficiency, maximize productivity levels and quality of service standards including the implementation of anti-fraud strategies in all lines.

Unit Bisnis Korporasi telah mengimplementasikan strategi seperti menawarkan produk pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan korporasi, meningkatkan hubungan dengan pelanggan melalui komunikasi intensif dan layanan pelanggan yang lebih baik serta memberikan solusi dan saran keuangan yang dipersonalisasi dan proaktif, bekerjasama dengan Bank Mizuho Indonesia dan Marubeni Indonesia untuk memperluas jaringan (*network*) untuk menyediakan pembiayaan bagi pelanggan korporasi, melakukan kunjungan ulang (*re-visit*) kepada pelanggan korporasi yang telah menyelesaikan kontraknya agar Unit Bisnis Korporasi mendapatkan pembiayaan kembali (*repeat order*) dari pelanggan tersebut serta terus menawarkan produk keuangan yang kompetitif dan skema pembiayaan fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan debitur, yaitu skema pembiayaan investasi sewa pembiayaan, jual dan sewa balik, serta pembiayaan modal kerja dengan skema pembiayaan tagihan pembelian barang dan/atau jasa.

Corporate Business Unit has implemented strategies among others offering more flexible financing products that are in accordance with the needs of corporate customers, improving customer relationships through intensive communication and better customer service as well as providing personalized and proactive financial solutions and advice, cooperating with Bank Mizuho Indonesia and Marubeni Indonesia to expand the network to provide financing for corporate customers, conducting re-visits to corporate customers who have completed their contracts so that the Corporate Business Unit can get repeat orders from these customers, also continued to offer competitive financial products and flexible financing schemes that are tailored to the needs of debtors, namely investment financing schemes for financing leases, sale and leaseback, and working capital financing with a financing scheme for purchasing goods and/or services.

Jumlah Aset Perseroan pada tahun 2024 mencapai Rp3.210,52 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar 14,92% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya. Jumlah Liabilitas pada tahun 2024 mencapai Rp2.466,53 miliar, atau

The Company's Total Assets in 2024 reached Rp3,210.52 billion, or increased by 14.92% compared to the position in the previous year. The Total Liabilities in 2024 reached Rp2,466.53 billion, or increased by 20.72% compared to the position in the previous

meningkat sebesar 20,72% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Jumlah Ekuitas pada tahun 2024 mencapai Rp743,99 miliar, menurun sebesar 0,86% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya.

Pada sisi profitabilitas, Jumlah Pendapatan Perseroan selama tahun 2024 tercatat sebesar Rp468,65 miliar, meningkat sebesar 16,77%, dan Jumlah Beban Perseroan sebesar Rp473,69 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 39,28%. Per 31 Desember 2024, Perseroan mencatatkan Rugi Tahun Berjalan sebesar –Rp2,16 miliar atau menurun sebesar 103,53% dari tahun sebelumnya. Dari segi kualitas aset, Perseroan masih dapat menjaga kualitas piutang pembiayaan sesuai ketentuan OJK yang berlaku dengan mencatatkan Rasio Piutang Pembiayaan Bermasalah (NPF-neto) sebesar 0,42% di tahun 2024 atau mengalami sedikit penurunan kualitas dibandingkan dengan tahun 2023.

Target dan Realisasi

Dari sisi neraca, pada tahun 2024 Perseroan mencatatkan Jumlah Aset sebesar Rp3.210,52 miliar, dengan target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp3.463.05 miliar. Dari sisi Jumlah Pendapatan Perseroan selama tahun 2024 tercatat sebesar Rp468,65 miliar, kurang dari target pendapatan yang ditetapkan yaitu sebesar Rp496,89 miliar. Realisasi Profitabilitas Perseroan selama tahun 2024 yang tercatat dalam Rugi Tahun Berjalan sebesar -Rp2,16 miliar, jumlah tidak mencapai target yang ditetapkan sebelumnya yaitu Laba Tahun Berjalan sebesar Rp14,51 miliar.

Berdasarkan aspek kuantitatif, Dewan Komisaris menilai Direksi belum berhasil mencapai target bisnis yang telah dicanangkan dalam Perubahan Rencana Bisnis Tahun 2024. Dengan memperhatikan kondisi perekonomian saat ini, kinerja tersebut perlu menjadi perhatian bagi Direksi agar dapat mengupayakan optimal perbaikan kinerja bisnis dapat tercapai dengan mempertimbangkan aspek manajemen risiko dan pengendalian internal untuk mendukung tercapainya aspek profitabilitas dan efisiensi operasional yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan berdasarkan aspek kualitatif, Perseroan telah melaksanakan bisnisnya sesuai dengan Perubahan Rencana Bisnis. Namun demikian, mulai akhir triwulan II tahun 2024 Perseroan menghadapi dan menyadari adanya perubahan lingkungan bisnis yang membuat Perseroan harus melakukan penyesuaian proses dan kebijakan bisnis untuk mengatasi tantangan perekonomian. Penerapan GCG telah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris menilai, Perseroan perlu mendorong kinerja bisnisnya dengan senantiasa menjaga kualitas portofolio pembiayaan yang sehat bagi perusahaan pembiayaan dengan menerapkan strategi yang lebih cermat dan konservatif dalam melaksanakan penetrasi pasar ke depannya. Selain itu, Perseroan perlu memperhatikan secara intensif dan berkala untuk mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis guna memaksimalkan profitabilitasnya, mengoptimalkan efisiensi operasional dan meningkatkan produktivitas karyawan untuk mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2025.

year. Meanwhile, the Total Equity in 2024 reached Rp743.99 billion, decreased by 0.86% compared to the position in the previous year.

In terms of profitability, the Company's Total Income during 2024 was recorded at Rp468.65 billion, an increase of 16.77%, and the Company's Total Expenses were Rp473.69 billion or an increase of 39.28%. As of December 31, 2024, the Company recorded a Current Year Loss of -Rp2.16 billion or decreased by 103.53% from the previous year. In terms of asset quality, the Company is still able to maintain the quality of financing receivables in accordance with the applicable provisions of the OJK by recording a Non-Performing Financing Receivables Ratio (NPF-net) of 0.42% in 2024 or experiencing a slight decline in quality compared to 2023.

Target and Realization

In terms of balance sheet, in 2024 the Company recorded Total Assets of Rp3,210.52 billion, with a previously set target of Rp3,463.05 billion. In terms of Total Income, the Company during 2024 was recorded at Rp468.65 billion, less than the set income target of Rp496.89 billion. The Company's Profitability Realization during 2024 recorded in the Current Year Loss of -Rp2.16 billion, this amount not achieving the set target of Current Year Profit of Rp14.51 billion.

Based on the quantitative aspect, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has not succeeded in achieving the business targets set out in the Revised 2024 Business Plan. By considering the current economic conditions, this performance needs to be a concern for the Board of Directors so that they can strive for optimal improvements in business performance that can be achieved by considering aspects of risk management and internal control to support the achievement of previously determined profitability and operational efficiency aspects.

Meanwhile, based on the qualitative aspect, the Company has carried out its business in accordance with the Revised Business Plan. However, starting at the end of the second quarter of 2024, the Company has faced and realized changes in the business environment that have required the Company to adjust business processes and policies to overcome economic challenges. The implementation of GCG has been carried out in accordance with applicable laws and regulations.

The Board of Commissioners assesses that the Company needs to encourage its business performance by always maintaining the quality of a healthy financing portfolio for financing company by implementing a more careful and conservative strategy in implementing market penetration in the future. In addition, the Company needs to pay intensive and regular attention to anticipating changes in the business environment in order to maximize its profitability, optimize operational efficiency and increase employee productivity to achieve the targets set in 2025.

Penilaian atas Kinerja Komite

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris telah membentuk beberapa komite yang berada di bawahnya yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko.

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit secara independen telah melakukan tinjauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal untuk pemeriksaan Laporan Keuangan tahunan.

Komite Audit juga telah senantiasa melakukan penelaahan atas Laporan Keuangan berkala Perseroan. Selanjutnya, Komite Audit juga telah melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal, mengawasi pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan Direksi terhadap hasil pemeriksaan Unit Audit Internal, serta melakukan pemantauan terhadap sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).

Komite Nominasi dan Remunerasi telah secara independen melakukan penilaian kinerja, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Disamping itu, Komite Pemantau Risiko telah secara independen melakukan pemantauan dan penelaahan atas profil risiko Perseroan dan penerapan kepatuhan Perseroan. Komite Pemantau Risiko juga telah senantiasa melakukan evaluasi Laporan hasil penilaian sendiri terhadap tingkat kesehatan Perseroan.

Berdasarkan pembahasan realisasi kerja, Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh komite yang berada di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup baik.

Prospek Usaha 2025

Kebijakan Tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 akan menjadi sumber risiko dan ketidakpastian akut terhadap ekonomi dan keuangan global. J.P.Morgan menyatakan kenaikan peluang resesi ekonomi global naik menjadi sebesar 60% dari 40% sebelumnya. S&P Global, Goldman juga menaikkan peluang terjadinya resesi AS. Respon negara-negara terhadap kebijakan ini beragam, negara besar cenderung melakukan retaliasi, negara *emerging markets* termasuk Indonesia cenderung memilih jalur pendekatan diplomatik yaitu negosiasi. Pemerintah juga mempertimbangkan opsi *trade diversion* ke negara yang lebih efisien (biaya lebih rendah).

Berdasarkan data dari OECD *economic outlook,* secara triwulanan, pertumbuhan diperkirakan akan melambat sejak triwulan pertama tahun 2025 dan akan tetap rendah setelahnya. Pemberlakuan kebijakan tarif resiprokal dan dampak konflik geopolitik akan menjadi penghambat, khususnya pada investasi bisnis dan perdagangan. Selain itu, peningkatan biaya

Committees Performance Assessment

In order to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners established several committees under it, namely the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee and the Risk Monitoring Committee.

Throughout 2024, the Audit Committee independently conducted reviews, evaluations, and provided recommendations for the appointment of external auditors to examine the annual Financial Statements.

The Audit Committee also consistently reviewed the Company's periodic Financial Statements. Furthermore, the Audit Committee has also monitored the performance of the Internal Audit Unit's duties and responsibilities, overseeing the implementation of follow-up actions taken by the Board of Directors regarding the Internal Audit Unit's findings, as well as monitored the whistleblowing system.

The Nomination and Remuneration Committee independently assessed performance, providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the structure, policies, and remuneration amounts for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Additionally, the Risk Monitoring Committee independently monitored and reviewed the Company's risk profile and compliance implementation. The Risk Monitoring Committee also consistently evaluated the results of its own assessments of the Company's soundness level.

Based on the discussion of work realization, the Board of Commissioners assessed that all committees under the Board of Commissioners had performed their duties and responsibilities quite well.

Business Prospects 2025

The reciprocal tariff policy announced by US President Donald Trump on April 2, 2025 will be a source of acute risk and uncertainty for the global economy and finance. J.P. Morgan stated that the chance of a global economic recession has increased to 60% from the previous 40%. S&P Global, Goldman also increased the chance of a US recession. The responses of countries to this policy are varied, large countries tend to retaliate, emerging market countries including Indonesia tend to choose a diplomatic approach, namely negotiation. The Government is also considering the option of trade diversion to more efficient countries (lower costs).

Based on data from the OECD economic outlook, in quarterly terms, growth is expected to slower from the first quarter of 2025 and to remain subdued thereafter. The imposition of new reciprocal tariff policy and impact of geopolitical conflict will act as an obstacle, particularly on business investment and trade. In addition, increased trade costs are expected to feed

perdagangan diperkirakan akan berdampak secara bertahap pada harga barang akhir, yang akan memberikan tekanan tambahan pada inflasi di banyak negara dan mengharuskan kebijakan moneter tetap ketat lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya.

through gradually to final goods prices, putting additional upward pressure on inflation in many countries and requiring monetary policy to remain restrictive for longer than previously expected.

Pada Januari 2025, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan global 2025 sebesar 3,30%. Berdasarkan data *World Economic Outlook* edisi April 2025 yang diterbitkan pada tanggal 22 April 2025, IMF menilai bahwa tekanan ekonomi global masih akan berlanjut pada 2025. Untuk itu IMF merevisi proyeksi pertumbuhan global turun menjadi 2,80%.

In January 2025, the International Monetary Fund (IMF) projected global growth in 2025 at 3.30%. Based on data from the April 2025 edition of the World Economic Outlook published on April 22, 2025, the IMF assessed that global economic pressures would continue in 2025. For this reason, the IMF revised its global growth projection down to 2.80%.

Sedangkan pertumbuhan Indonesia di tahun 2025 diproyeksikan IMF mencapai 4,70%. Potensi keuangan Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap menjanjikan, didorong oleh reformasi kebijakan, adopsi digitalisasi, serta investasi pada sektor-sektor strategis.

Meanwhile, Indonesia's growth in 2025 is projected by the IMF to reach 4.70%. Indonesia's financial potential in 2025 is expected to remain promising, driven by policy reforms, adoption of digitalization, and investment in strategic sectors.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam konferensi persnya menyatakan Pemerintah perlu memperkuat kebijakan reformasi struktural khususnya pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta menyerap dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan konsumsi masyarakat, investasi, serta belanja pemerintah menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Governor of Bank Indonesia, Perry Warjiyo in his press conference stated that the Government needs to strengthen structural reform policies, especially in sectors that support economic growth and absorb and increase labor productivity. Increased public consumption, investment, and government spending are the main driving factors for Indonesia's future economic growth.

Tahun 2025, OJK masih memproyeksikan pertumbuhan yang positif perusahaan pembiayaan, dengan pertumbuhan pembiayaan mencapai 8-10% (yoy) dengan senantiasa melakukan pemantauan terhadap *outlook* secara berkala untuk diselaraskan dengan perkembangan *outlook* pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) memproyeksikan pertumbuhan pembiayaan di angka 7%-8% pada tahun 2025. Perseroan menyusun Perubahan Rencana Bisnis secara adaptif dan konservatif dengan memperhatikan kondisi iklim perekonomian Indonesia.

In 2025, OJK is still projecting positive growth in 2025 of financing company, with financing growth reaching 8-10% (yoy) by continuously monitoring the outlook periodically to align it with the development of the national economic growth outlook. Meanwhile, the Association of Indonesian Financing Companies (APPI) projects financing growth at 7%-8% in 2025. The Company has prepared a Business Plan Revision adaptively and conservatively by considering the climate conditions of the Indonesian economy.

Dewan Komisaris menilai Perubahan Rencana Bisnis yang disusun Direksi cukup konservatif dan realistis dengan memberi perhatian khusus pada rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Perseroan serta implementasi strategi yang lebih cermat dan konservatif untuk melaksanakan penetrasi pasar. Pertimbangan aspek manajemen risiko dan pengendalian internal juga diharapkan senantiasa menjadi perhatian utama Direksi Perseroan. Dewan Komisaris percaya bahwa strategi yang ditetapkan Direksi mampu mendorong Perseroan untuk dapat tumbuh dengan berkualitas.

The Board of Commissioners considers the Business Plan Revision prepared by the Board of Directors to be quite conservative and realistic by paying special attention to the Company's Operating Expenses to Operating Income (BOPO) ratio and implementing a more careful and conservative strategy to carry out market penetration. Consideration of risk management and internal control aspects is also expected to always be the main concern of the Company's Board of Commissioners. The Board of Commissioners believes that the strategy set by the Board of Directors is able to encourage the Company to grow with quality.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dewan Komisaris menilai bahwa Perseroan telah menerapkan GCG sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan manajemen risiko yang komprehensif dan sistem pengendalian internal oleh harus senantiasa menjadi fokus utama Direksi dalam melaksanakan kepengurusannya.

Tugas pengawasan Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan efektif dan memenuhi prinsip-prinsip GCG. Selain itu Rapat Dewan Komisaris, serta Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris terselenggara secara efektif.

Berdasarkan pada Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan yang sesuai dengan arahan dari OJK mengenai penilaian mandiri Perusahaan terhadap GCG menghasilkan peringkat pertama. Hal ini mengindikasikan telah diterapkannya GCG dengan sangat baik.

Selanjutnya, Dewan Komisaris mengamanahkan kepada Direksi Perseroan agar memastikan penerapan strategi *anti fraud* sesuai yang diamanahkan OJK melalui Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka pengendalian intenal Perseroan serta mengamanahkan penyesuaian implementasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 48 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pandangan atas Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sebagai bagian dalam penerapan GCG, Perseroan sudah memiliki kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing reporting system*) yaitu sistem penyampaian informasi terkait terjadinya penyimpangan pada proses bisnis Perseroan. Penyimpangan yang dimaksud bisa berupa *fraud* ataupun *non-fraud* yang terjadi di unit-unit kerja Perseroan, baik di Kantor Pusat ataupun di Kantor Cabang.

Sistem pelaporan ini memungkinkan pelapor tidak hanya dari karyawan internal namun juga dari pihak eksternal atau *intermediary* dan masyarakat umum yang memiliki kepentingan dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung. Identitas pelapor bersifat rahasia dan laporan dapat disampaikan oleh pelapor tanpa mencantumkan identitasnya (anonim).

Implementation of Good Corporate Governance

The Board of Commissioners assesses that the Company has implemented GCG in accordance with applicable laws and regulations. The implementation of comprehensive risk management and internal control systems must always be the main focus of the Board of Directors in carrying out its management.

The supervisory duties of the Board of Commissioners have been carried out effectively and meet the principles of GCG. In addition, the Board of Commissioners Meetings, as well as Joint Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners were held effectively.

Based on the Soundness Level of the Financing Company in accordance with the direction of the OJK regarding the Company's self-assessment of GCG, it resulted in the first rank. This indicates that GCG has been implemented very well.

Furthermore, the Board of Commissioners mandates the Board of Directors of the Company to ensure the implementation of anti-fraud strategies as mandated by the OJK through OJK Regulation Number 12 of 2024 dated July 31, 2024 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions in the context of the Company's internal control and mandates adjustments to the implementation of Good Corporate Governance in accordance with OJK Regulation Number 48 of 2024 dated December 31, 2024 concerning Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions.

Views on the Implementation of the Whistleblowing System

As part of the implementation of GCG, the Company already has a whistleblowing Reporting System policy namely an information system related to the occurrence of irregularities in the Company's business processes. The deviation in question can be in the form of fraud or non-fraud that occurs in the Company's work units, both at the Head Office and Branch Office.

This reporting system supports whistleblowers not only from internal employees but also from external parties or intermediaries and the general public who have an interest in the Company, either directly or indirectly. The identity of the reporter is confidential and the report can be submitted by the reporter without his identity (anonymous).

Fungsi sistem pelaporan ini diawasi dan dikelola oleh Unit Audit Internal. Dewan Komisaris melalui Komite Audit terkait melakukan pemantauan atas proses dan penyelesaian dari setiap pengaduan atau pelaporan yang ada. Dengan mekanisme dan sistem yang telah diterapkan Perseroan, pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran diharapkan senantiasa mendukung pelaksanaan tugas pengawasan aktif dari Dewan Komisaris.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 21 Maret 2024, RUPS menyetujui perubahan anggota Dewan Komisaris, yaitu pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki dari jabatannya selaku Komisaris Utama yang digantikan oleh Bapak Yasuo Imaizumi yang berlaku efektif pada tanggal 21 Maret 2024, berakhirnya masa jabatan almarhum Ibu Roosniati Salihin selaku Komisaris sesuai ketentuan pasal 18 Ayat 18 huruf a. Anggaran Dasar Perseroan, serta pengangkatan ibu Bhindawati Gunawan selaku Komisaris yang berlaku efektif pada tanggal 30 Mei 2024.

Hingga saat diterbitkannya Laporan Tahunan ini, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Yasuo Imaizumi
Komisaris	: Bhindawati Gunawan
Komisaris Independen	: Mohammad Syahrial

Frekuensi dan Metode Pemberian Saran Kepada Direksi

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah memberikan arahan dan saran yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk di antaranya pengawasan atas penerapan strategi Perseroan, melalui berbagai forum antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris;
2. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi; dan

Di tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 kali dan juga mengadakan 6 kali rapat gabungan bersama dengan Direksi.

The function of this reporting system is supervised and managed by the Internal Audit Unit. The Board of Commissioners through the relevant Audit Committee monitors the process and resolution of any existing complaints or reports. With the mechanism and system that have been implemented by the Company, the implementation of the Whistleblowing Reporting System is expected to always support the implementation of the active supervisory duties of the Board of Commissioners.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") held on March 21 2024, the GMS approved changes to the members of the Board of Commissioners, namely the resignation of Mr. Takeshi Sasaki from his position as President Commissioner who was replaced by Mr. Yasuo Imaizumi which was effective on March 21, 2024, the end of the term of office of the late Mrs. Roosniati Salihin as Commissioner in accordance with the provisions of Article 18 Paragraph 18 letter a. of the Company's Articles of Association, and the appointment of Mrs. Bhindawati Gunawan as Commissioner which was effective on May 30, 2024.

As of the issuance of this Annual Report, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

President Commissioner	: Yasuo Imaizumi
Commissioner	: Bhindawati Gunawan
Independent Commissioner	: Mohammad Syahrial

Frequency and Method of Advice Submission to the Board of Directors

Throughout 2024, the Board of Commissioners provided direction and advice related to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, including supervision of the implementation of the Company's strategy, through various forums as follows:

1. Board of Commissioners Meeting;
2. Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors; and

In 2024, the Board of Commissioners held 6 meetings of the Board of Commissioners and also 6 joint meetings with the Board of Directors.

Apresiasi

Akhir kata, perkenankan saya, mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemegang Saham atas dukungan dan pengertiannya, serta jajaran manajemen atas dedikasinya. Kami berharap, ditengah ketidakpastian ekonomi global, Perseroan dapat terus memperbaiki kinerjanya secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

Jakarta, April 2025
Atas nama Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Appreciation

Finally, on behalf of the Board of Commissioners, allow me to express my deepest gratitude to the Shareholders for their support and understanding, as well as the management for their dedication. We hope that, amid global economic uncertainty, the Company can continuously improve its performance in the coming year.

Jakarta, April 2025
On behalf of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Yasuo Imaizumi
Komisaris Utama / President Commissioner

Laporan Direksi

The Board of Directors Report

Ketidakstabilan ekonomi yang terjadi di tahun 2024 berdampak pada kinerja Perseroan. Untuk itu Direksi secara berkala melakukan perbaikan dalam berbagai variabel kunci yang mempengaruhi kinerja bisnis Perseroan. Dalam melaksanakan tugas pengurusannya, Direksi senantiasa memperkuat pengendalian internal pada setiap proses bisnis untuk meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan dengan mengutamakan aspek manajemen risiko dan memantau kinerja bisnis dengan pendekatan yang tangkas. Upaya pengendalian rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional ("BOPO") juga dilakukan Perseroan dalam rangka mengoptimalkan pertumbuhan bisnis. Direksi percaya dengan strategi-strategi yang telah ditetapkan secara adaptif, konservatif, sumber daya yang dimiliki Perseroan serta budaya Perusahaan yang proaktif dan kolaboratif, Perseroan dapat terus menunjukkan eksistensinya di industri pembiayaan.

The economic instability that occurred in 2024 has an impact on the Company's performance. For this reason, the Board of Directors periodically make improvements to various key variables that affect the Company's business performance. In carrying out its management duties, the Board of Directors continues to strengthen internal control in every business process to improve the financing portfolio quality by prioritizing risk management aspects and monitoring business performance with an agile approach. Efforts to control the Operating Expense to Operating Income ("BOPO") ratio are also carried out by the Company in order to optimize business growth. The Board of Directors believes that with the strategies that have been determined adaptively, conservatively, the resources owned by the Company and the Company's proactive and collaborative culture, the Company can continue to demonstrate its existence in the financing industry

Konosuke Mizuta

Direktur Utama
President Director

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Pergejolakan ekonomi yang terjadi di tahun 2024 merupakan kelanjutan dari tantangan global yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Konflik geopolitik, perubahan iklim, disrupsi pasokan, kenaikan harga komoditas masih mempengaruhi kondisi perekonomian di tahun 2024. Ketidakstabilan ini diperparah oleh tahun politik yang terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di beberapa negara di dunia seperti Amerika Serikat (AS) dan dilanjutkan dengan periode transisi kekuasaan yang membuat sentimen "*wait and see*" oleh sektor swasta.

Berdasarkan data Bank Indonesia ("BI"), hingga 31 Desember 2024, Rupiah tercatat di level Rp16.095, melemah 4,34% yoy secara *point to point* (ptp). Perkembangan Rupiah tersebut lebih baik dibandingkan dengan mata uang sejumlah negara lain seperti won Korea, peso Mexico, real Brasil, yen Jepang, dan lira Turki. Sebaliknya, nilai tukar Rupiah menguat terhadap mata uang kelompok negara maju di luar dolar AS, dan stabil terhadap mata uang kelompok negara berkembang. Perkembangan tersebut sejalan dengan kebijakan stabilisasi BI serta didukung oleh aliran masuk modal asing yang masih berlanjut, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik, serta prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik. Inflasi inti terkendali pada level 2,26% (yoy) sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan BI (*BI-Rate*) untuk mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya. Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* di tengah gejolak perekonomian global dan memformulasikan beberapa stimulus kebijakan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh 5,03% (ctc), melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05% (ctc), serta di bawah target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,20%.

Industri pembiayaan pun tidak terlepas dari faktor makro ekonomi global dan domestik. Resiliensi perekonomian domestik menjadi faktor optimisme bagi industri pembiayaan. Untuk Perusahaan Pembiayaan Konvensional, piutang pembiayaan tetap tumbuh positif sepanjang tahun 2024 yaitu sebesar Rp476 triliun, dimana pada tahun 2023 piutang pembiayaan yaitu sebesar Rp445,95 triliun, dengan produk investasi sebagai penyumbang pertumbuhan terbesar. Rasio piutang bermasalah (NPF neto) Perusahaan Pembiayaan meningkat menjadi 0,75% dimana rasio NPF net di tahun 2023 adalah sebesar 0,64%.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan menerapkan strategi adaptif dan konservatif dengan mengedepankan budaya risiko, prinsip kehati-hatian serta pelindungan konsumen.

Dear Respected Shareholders and Stakeholders,

The economic turmoil that occurred in 2024 is a continuation of the global challenges that occurred in previous years. Geopolitical conflicts, climate change, supply disruption, rising commodity prices still affect economic conditions in 2024. This instability is exacerbated by the political year that occurred not only in Indonesia but also in several countries in the world such as the United States (US) and continued with a period of transition of power that created a "wait and see" sentiment by the private sector.

Based on Central Bank of Indonesia's ("BI") Bank Indonesia data, as of December 31, 2024, the Rupiah was recorded at Rp16,095, weakening 4.34% yoy point to point (ptp). The development of the Rupiah is better compared to the currencies of several other countries such as the Korean won, Mexican peso, Brazilian real, Japanese yen, and Turkish lira. Conversely, the Rupiah exchange rate strengthened against the currencies of developed countries outside the US dollar, and was stable against the currencies of developing countries. This development is in line with BI stabilization policy and supported by continued foreign capital inflows, attractive domestic financial instrument yields, and Indonesia's economic prospects that remain good. Core inflation is under control at 2.26% (yoy) in line with the consistency of BI's policy interest rate (BI-Rate) to direct inflation expectations in line with its target. The government continues to optimize the role of the APBN as a shock absorber amidst global economic turmoil and formulate several policy stimuli.

Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), the Indonesian economy grew 5.03% (ctc), slowing down compared to the 2023 achievement which experienced growth of 5.05% (ctc), as well as below State Budget (APBN) target of 5.20%.

The financing industry is also inseparable from global and domestic macroeconomic factors. Domestic economic resilience is a factor of optimism for the financing industry. For Conventional Financing Companies, financing receivables continued to grow positively throughout 2024, namely Rp476 trillion, where in 2023 financing receivables were Rp 445.95 trillion, with investment products as the largest contributor to growth. The non-performing receivables ratio (NPF net) of the Financing Company increased to 0.75% where the NPF net ratio in 2023 was 0.64%.

In carrying out its business activities, the Company implements adaptive and conservative strategies by prioritizing risk culture, the principle of prudence and consumer protection.

Beberapa hal strategis yang telah dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2024, diantaranya yaitu:

- Fokus memperkuat pengendalian internal pada setiap proses bisnis khususnya pada Unit Bisnis Ritel untuk meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan dengan mengutamakan aspek manajemen risiko dan memantau kinerja bisnis dengan pendekatan yang tangkas.
- Meningkatkan dan memperluas basis pelanggan dengan memantau dan menganalisis tren pasar secara cermat serta mengembangkan produk pembiayaan yang mendukung keuangan berkelanjutan.
- Melakukan *streamline* proses bisnis yang mengutamakan aspek *control self assesment* berbasis risiko.
- Sehubungan dengan POJK 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan, Perseroan telah menyesuaikan kebijakan yang berlaku serta mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan penerapan strategi *Anti-Fraud* dalam setiap proses bisnis.
- Dalam rangka meningkatkan keamanan data dan informasi, Perseroan terus meningkatkan kesadaran keamanan siber di kalangan karyawan Perseroan melalui program pelatihan dan sosialiasi yang dilakukan secara terus menerus kepada seluruh karyawan baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.
- Terus melanjutkan pengawasan intensif terhadap konsumen bermasalah dengan pendekatan persuasif dan tetap melanjutkan program restrukturisasi pembiayaan terhadap konsumen-konsumen yang dianggap layak dan kooperatif.
- Melaksanakan rapat diskusi secara intensif dan berkala pada setiap direktorat untuk memaksimalkan profitabilitas dan mengelola pengendalian biaya.
- Mengupayakan perubahan budaya kerja yang positif dengan mengedepankan *control self assessment* dalam setiap proses kerja dalam rangka memperkuat *internal control* secara keseluruhan melalui penerapan prinsip *zero base approach.* Selain itu, Perseroan juga terus mengupayakan peningkatan produktivitas karyawan dan efisiensi kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan menganalisis beban pekerjaan serta memastikan pemisahan tugas dan tanggung jawab pada setiap fungsi dalam Perseroan.
- Unit Bisnis Ritel telah merealisasikan 3 Kantor Cabang baru yang berlokasi di kota Surakarta, Yogyakarta dan Semarang. Selain itu, Perseroan juga telah merealisasi perubahan alamat Kantor Cabang Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Tangerang dan Bekasi serta melakukan penutupan Kantor Cabang Serang.

Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi

Dalam mengemban fungsi kepengurusan Perseroan, Direksi memiliki peran strategis terkait perumusan dan implementasi strategi Perseroan. Direksi secara konsisten melakukan kajian atas pelaksanaan strategi bisnis dengan mempertimbangkan dinamika yang ada. Selain itu, Direksi juga melakukan evaluasi secara berkala atas implementasi strategi Perseroan guna mengawal kinerja yang optimal dalam jangka panjang. Strategi Perseroan dirancang dengan mempertimbangkan berbagai dinamika baik global, domestik, hingga industri,

Several strategic things that have been carried out by the Company in 2024, including:

- Focus on strengthening internal control in every business process, especially in the Retail Business Unit to increase the financing portfolio quality by prioritizing risk management aspects and monitoring business performance with an agile approach.
- Increase and expand the customer base by carefully monitoring and analyzing market trends and developing financing products that support sustainable finance.
- Streamline business processes that prioritize risk-based control self assessment aspects.
- In connection with POJK 12 of 2024 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions, the Company has adjusted the applicable policies and prepared strategic steps to ensure the implementation of Anti-Fraud strategies in every business process.
- In order to improve data and information security, the Company continues to increase cybersecurity awareness among the Company's employees through training and socialization programs that are carried out continuously to all employees both at the Head Office and Branch Offices.
- Continue to carry out intensive supervision of problematic customers with a persuasive approach and continue the financing restructuring program for customers who are considered worthy and cooperative.
- Carry out intensive and regular discussion meetings in each directorate to maximize profitability and manage cost control.
- Strive for positive work culture changes by prioritizing control self assessment in every work process in order to strengthen overall internal control through the application of the zero base approach principle. In addition, the Company also continues to strive to increase employee productivity and work efficiency by utilizing information technology and analyzing workloads as well as ensure the seggregation of duties and responsibilities for each function in the Company.
- The Retail Business Unit has realized 3 new Branch Offices located in the cities of Surakarta, Yogyakarta and Semarang. In addition, the Company has also realized changes in the addresses of the South Jakarta, North Jakarta, Tangerang and Bekasi Branch Offices and closed the Serang Branch Office.

The Role of the Board of Directors in Strategy Formulation

In carrying out the Company's management function, the Board of Directors has a strategic role related to the formulation and implementation of the Company's strategy. The Board of Directors consistently conducts reviews of the implementation of business strategies by considering existing dynamics. In addition, the Board of Directors also periodically evaluates the implementation of the Company's strategy in order to oversee optimal performance in the long term. The Company's strategy is designed by considering various dynamics, both global,

guna memastikan perumusan strategi yang relevan dengan perkembangan ekosistem bisnis pembiayaan konsumen. Direksi mengedepankan aspek manajemen risiko yang terukur untuk dapat menjawab setiap tantangan seraya beradaptasi dengan dinamika industri.

Perseroan menetapkan rencana bisnis secara konservatif, realistis, dan adaptif guna memberikan nilai lebih bagi para Pemangku Kepentingan.

domestic, and industrial, in order to ensure the formulation of strategies that are relevant to the development of the consumer financing business ecosystem. The Board of Directors prioritizes measurable risk management aspects to be able to answer every challenge while adapting to industry dynamics.

The Company establishes a conservative, realistic, and adaptive business plan in order to provide added value to Stakeholders.

Proses yang Dilakukan Direksi dalam Implementasi Strategi

Terkait implementasi strategi bisnis Perseroan, Direksi secara berkala memperhatikan berbagai variabel kunci yang mencerminkan kinerja bisnis Perseroan. Mulai dari perkembangan terkait pencapaian target, laporan keuangan berkala, rasio-rasio keuangan, hingga hasil rapat koordinasi dengan setiap unit bisnis dan fungsi pendukung lainnya. Direksi senantiasa mengupayakan untuk menjalin komunikasi yang baik dan mengawal rantai koordinasi antar unit bisnis guna memastikan implementasi strategi telah berjalan dengan efektif.

Processes Carried Out by the Board of Directors in Strategy Implementation

Regarding the implementation of the Company's business strategy, the Board of Directors periodically pays attention to various key variables that reflect the Company's business performance. Starting from developments related to target achievement, periodic financial reports, financial ratios, to the results of coordination meetings with each business unit and other supporting functions. The Board of Directors always strives to establish good communication and monitor the chain of coordination between business units to ensure that the implementation of the strategy has been running effectively.

Kinerja Perseroan 2024

Dalam perspektif kinerja keuangan, Jumlah Aset Perseroan pada tahun 2024 mencapai Rp3.210,52 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar 14,92% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya. Jumlah Liabilitas pada tahun 2024 mencapai Rp2.466,53 miliar, atau meningkat sebesar 20,72% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Jumlah Ekuitas pada tahun 2024 mencapai Rp743,99 miliar, menurun sebesar 0,86% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya.

Selama tahun 2024, Perseroan berhasil membukukan Jumlah Pendapatan sebesar Rp468,65 miliar, meningkat sebesar 16,77%, dan Jumlah Beban Perseroan sebesar Rp473,69 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 39,28%. Per 31 Desember 2024, Perseroan mencatatkan Rugi Tahun Berjalan sebesar –Rp2,16 miliar atau menurun sebesar 103,53% dari tahun sebelumnya. Dari segi kualitas aset, Perseroan masih dapat menjaga kualitas piutang pembiayaan sesuai ketentuan OJK yang berlaku dengan mencatatkan NPF neto sebesar 0,42% di tahun 2024 atau mengalami sedikit penurunan kualitas dibandingkan dengan tahun 2023.

Pada tahun 2024, jaringan usaha Perseroan didukung oleh 31 Kantor Cabang di beberapa kota besar yang tersebar di pulau Jawa, Kalimantan, Bali, Sumatera dan Sulawesi.

Company Performance 2024

From a financial performance perspective, the Company's Total Assets in 2024 reached Rp3,210.52 billion, or increased by 14.92% compared to the position in the previous year. The Total Liabilities in 2024 reached Rp2,466.53 billion, or increased by 20.72% compared to the position in the previous year. Meanwhile, the Total Equity in 2024 reached Rp743.99 billion, decreased by 0.86% compared to the position in the previous year.

During 2024, the Company managed to record Total Income of Rp468.65 billion, an increase of 16.77%, and the Company's Total Expenses were Rp473.69 billion or an increase of 39.28%. As of December 31, 2024, the Company recorded a Current Year Loss of -Rp2.16 billion or decreased by 103.53% from the previous year. In terms of asset quality, the Company is still able to maintain the quality of financing receivables in accordance with the applicable provisions of OJK by recording NPF net of 0.42% in 2024 or experiencing a slight decline in quality compared to 2023.

In 2024, the Company's business network is supported by 31 Branch Offices in several major cities spread across the islands of Java, Kalimantan, Bali, Sumatra and Sulawesi.

Target dan Realisasi

Dari sisi neraca, pada tahun 2024 Perseroan mencatatkan Jumlah Aset sebesar Rp3.210,52 miliar, dengan target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp3.463.05 miliar. Jumlah Pendapatan Perseroan selama tahun 2024 tercatat sebesar Rp468,65 miliar, kurang dari target pendapatan yang ditetapkan yaitu sebesar Rp496,89 miliar. Realisasi Profitabilitas Perseroan selama tahun 2024 yang tercatat dalam Rugi Tahun Berjalan sebesar -Rp2,16 miliar lebih kecil dari target yang ditetapkan sebelumnya yaitu Laba Tahun Berjalan sebesar Rp14,51 miliar.

Target and Realization

In terms of balance sheet, in 2024 the Company recorded Total Assets of Rp3,210.52 billion, with a previously set target of Rp3,463.05 billion. The Company's total income during 2024 was recorded at Rp468.65 billion, less than the set income target of Rp496.89 billion. The Company's Profitability Realization during 2024 recorded in the Current Year Loss of -Rp2.16 billion is smaller than the previously set target of Current Year Profit of Rp14.51 billion.

Kendala yang Dihadapi Perseroan di 2024

Tahun 2024 merupakan periode yang lebih menantang bagi semua pelaku industri. Ketidakpastian dari kondisi global dan domestik telah mendorong pelanggan korporasi untuk lebih berhati-hati dalam berinvestasi selama tahun 2024. Sedangkan dari sisi Unit Bisnis Ritel, menurunnya pendapatan per kapita masyarakat menjadi faktor utama penyebab menurunnya daya beli masyarakat dan ketidakmampuan membayar angsuran.

Obstacles Faced by the Company in 2024

2024 is a more challenging period for all industry players. The uncertainty of global and domestic conditions has prompted corporate customers to be more careful in investing during 2024. Meanwhile, from the Retail Business Unit side, the decline in per capita income of the community is the main factor causing the decline in people's purchasing power and the inability to pay installments.

Prospek Usaha 2025

Dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Bapak Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto menyatakan risiko ketidakpastian ekonomi global di tahun 2025 semakin meningkat imbas penetapan kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan AS. Instabilitas geopolitik, proteksionisme negara maju yang mempengaruhi rantai pasok dan perdagangan global, serta pengetatan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi yang masih tinggi merupakan pemicu utama ketidakpastian ekonomi. Kebijakan ini akan menyebabkan gejolak pasar keuangan global seperti kejatuhan bursa saham dunia serta pelemahan mata uang emerging markets. Perdagangan dunia juga terganggu yang disebabkan retaliasi tarif mitra dagang AS, terganggunya rantai pasok global, penurunan volume perdagangan dunia. Perlambatan ekonomi kawasan dan dunia seperti penurunan konsumsi global dan penundaan investasi perusahaan merupakan efek domino dari kebijakan ini.

Business Prospects 2025

In the Joint Economic Discussion with the President of the Republic of Indonesia, the Coordinating Minister for Economic Affairs, Airlangga Hartanto stated that the risk of global economic uncertainty in 2025 is increasing due to the impact of the reciprocal tariff policy imposed by the US. Geopolitical instability, protectionism of developed countries that affect the global supply chain and trade, and tightening of monetary policy to overcome high inflation are the main triggers of economic uncertainty. This policy will cause global financial market turmoil such as the fall of world stock exchanges and the weakening of emerging market currencies. World trade is also disrupted due to tariff retaliation by US trading partners, disruption of the global supply chain, and a decrease in world trade volume. The slowdown in regional and world economies such as declining global consumption and delays in corporate investment are domino effects of this policy.

Pemerintah Indonesia sendiri masih akan melakukan negosiasi bilateral terhadap kebijakan ini. Salah satu jalur negoisasi melalui revitalisasi Perjanjian Kerjasama Perdagangan dan Investasi (TIFA).
Sejumlah Kebijakan dalam Paket Negosiasi:

- Deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui:
  a. Relaksasi TKDN sektor ICT dari AS (GE, Apple, Oracle, dan Microsoft).
  b. Evaluasi Lartas (*Import License*), percepatan Halal, dst.
- Meningkatkan impor dan investasi dari AS. Menyeimbangkan Neraca Perdagangan dengan pembelian produk Agri dari AS (kedelai & gandum dari negara bagian penghasil pertanian AS, pembelian peralatan *Engineering,* pembelian LPG, LNG, dan Migas oleh Pertamina dll).
- Menyiapkan Insentif Fiskal/ Non-Fiskal, untuk mendorong impor dari AS dan menjaga daya saing ekspor ke AS.

The Indonesian government itself will still conduct bilateral negotiations on this policy. One of the negotiation channels is through the revitalization of the Trade and Investment Cooperation Agreement (TIFA).
Several Policies in the Negotiation Package:

- Deregulation of Non-Tariff Measures (NTMs) through:
  a. Relaxation of TKDN in the ICT sector from the US (GE, Apple, Oracle, and Microsoft).
  b. Evaluation of Lartas (Import License), acceleration of Halal, etc.
- Increasing imports and investment from the US. Balancing the Trade Balance with the purchase of Agri products from the US (Soya Bean & Wheat from US Agriculture producing states, purchase of Engineering equipment, purchase of LPG, LNG, and Oil and Gas by Pertamina, etc.).
- Preparing Fiscal/Non-Fiscal Incentives, to encourage imports from the US and maintain the competitiveness of exports to the US.

Langkah taktis melalui pertemuan kenegaraan juga ditempuh Pemerintah Indonesia dalam upaya penurunan tarif yang ditetapkan AS ini. Banyak negara berkembang masih merasakan dampak dan masih dalam proses pemulihan dari Pandemi Covid-19 dan bencana-bencana alam di tahun sebelumnya. Meskipun perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) diharapkan dapat menggenjot pertumbuhan perekonomian, namun dipastikan belum dapat mengakselerasi pertumbuhan perekonomian terutama di negara berkembang. Daya beli masyarakat pun masih diproyeksikan melemah di tahun 2025 meskipun harga komoditas cenderung turun, namun permintaan konsumen juga cenderung menurun.

Tactical steps through state meetings are also taken by the Indonesian Government in an effort to reduce the tariffs set by the US. Many developing countries are still experiencing the impact and are still in the process of recovering from the Covid-19 Pandemic and natural disasters in the previous year. Although the development of technology and artificial intelligence (AI) is expected to boost economic growth, it is certain that it cannot accelerate economic growth, especially in developing countries. People's purchasing power is also projected to weaken in 2025 even though commodity prices tend to fall, but consumer demand also tends to decline.

Pada Januari 2025, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan global 2025 sebesar 3,30%. Berdasarkan data World Economic Outlook edisi April 2025 yang diterbitkan pada tanggal 22 April 2025, IMF menilai bahwa tekanan ekonomi global masih akan berlanjut pada 2025. Untuk itu IMF merevisi proyeksi pertumbuhan global turun menjadi 2,80%.

In January 2025, the International Monetary Fund (IMF) projected global growth in 2025 at 3.30%. Based on data from the April 2025 edition of the World Economic Outlook published on April 22, 2025, the IMF assessed that global economic pressures would continue in 2025. For this reason, the IMF revised its global growth projection down to 2.80%.

Sedangkan pertumbuhan Indonesia di tahun 2025 diproyeksikan IMF mencapai 4,70%. Potensi keuangan Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap menjanjikan, didorong oleh reformasi kebijakan, adopsi digitalisasi, serta investasi pada sektor-sektor strategis.

Meanwhile, Indonesia's growth in 2025 is projected by the IMF to reach 4.70%. Indonesia's financial potential in 2025 is expected to remain promising, driven by policy reforms, adoption of digitalization, and investment in strategic sectors.

Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto membentuk berbagai kebijakan untuk memperkuat ketahanan nasional, memperkuat cadangan devisa negara dan meningkatkan stabilitas ekonomi salah satunya yaitu kebijakan pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam ("DHE SDA"). Kebijakan ini mengatur eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional, diharapkan pada akhir tahun cadangan devisa negara dapat bertambah 80 miliar dolar AS.

The President of the Republic of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto, has formed various policies to strengthen national resilience, strengthen Indonesia's foreign exchange reserves and boost economic stability one of which is the policy for managing foreign exchange earnings from natural resource exports ("DHE SDA"). This policy stipulates that exporters in the mining sector (except oil and gas), plantations, forestry, and fisheries are required to place 100 percent of DHE SDA in the national financial system for 12 months in a special account at a national bank, it is hoped that by the end of the year the country's foreign exchange reserves can increase by 80 billion US dollars.

Prabowo juga berkomitmen untuk mengelola keuangan negara dengan efektif dan efisien yaitu dengan mengubah cara pemerintah mengelola anggaran dengan melakukan efisiensi hingga 90% dari total anggaran. Ketahanan pangan pun menjadi fokus utama Prabowo dan ia pun berkomitmen untuk tetap menjaga harga pangan stabil dan terkendali.

Prabowo is also committed to managing state finances effectively and efficiently, namely by changing the way the government manages the budget by making efficiency of up to 90% of the total budget. Food security is also Prabowo's main focus and he is committed to maintaining stable and managable food prices.

Langkah strategis yang ditetapkan oleh Prabowo diharapkan dapat mereformasi ekonomi dan sosial dalam rangka menjaga stabilitas dan meningkatkan daya beli masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa kebijakan strategis telah dibuat oleh Prabowo seperti kenaikan Upah Minimum Pekerja (UMP), optimalisasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), stimulus pada bulan Ramadhan yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, dan stabilitas harga pangan. Pemerintah menyiapkan kebijakan strategis dalam hal penyiapan paket stimulus ekonomi, serta optimalisasi program makan bergizi gratis (MBG), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan realisasi Panen Padi. Presiden menuturkan bahwa terdapat laporan peningkatan produksi beras secara signifikan.

The strategic steps set by Prabowo are expected to reform the economy and society in order to maintain stability and increase people's purchasing power to encourage economic growth. Several strategic policies have been made by Prabowo such as increasing the Minimum Wage of Workers (UMP), optimizing the distribution of Social Assistance (Bansos), stimulus during the month of Ramadan, namely discounts on airline tickets, discounts on toll rates, shopping discount programs, Eid homecoming tourism programs, and food price stability. The Government has prepared strategic policies in terms of preparing economic stimulus packages, as well as optimizing the free nutritious meal program (MBG), distributing People's Business Credit (KUR) and realizing the Rice Harvest. The President said that there were reports of a significant increase in rice production.

Dalam konferensi persnya terkait kewajiban menyimpan DHE SDA di dalam negeri, pada Senin, 17 Februari 2025 di Jakarta, Prabowo mengatakan bahwa paket stimulus ekonomi seperti diskon tarif listrik, PPN DTP pembelian properti dan otomotif, PPnBM DTP otomotif electronic vehicle (EV) dan hibdrida, subsidi pajak DTP motor listrik, PPh DTP sektor padat karya, optimalisasi program makan bergizi gratis, optimalisasi penyaluran KUR, panen padi terealisasi secara optimal.

In his press conference regarding the obligation to store Foreign Exchange from DHE SDA domestically, on Monday, February 17, 2025 in Jakarta, Prabowo said that economic stimulus packages such as electricity tariff discounts, VAT DTP for property and automotive purchases, PPnBM DTP for automotive electronic vehicles (EV) and hybrids, tax subsidies DTP for electric motors, PPh DTP for labor-intensive sectors, optimizing the free nutritious meal program, optimizing the distribution of KUR, rice harvests were realized optimally.

Selain kebijakan jangka pendek, Presiden Prabowo juga menyoroti upaya transformasi ekonomi melalui beberapa

In addition to short-term policies, President Prabowo also highlighted economic transformation efforts through several

kebijakan pendorong daya saing, seperti program makan bergizi gratis, program ketahanan pangan dan energi, dan optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Danantara. Selanjutnya, Presiden Prabowo menuturkan pemerintah menyiapkan kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembangunan kawasan industri, serta pembentukan bank emas.

Di tingkat global, Presiden Prabowo mengatakan bahwa Indonesia juga tengah mempercepat keanggotaan dalam BRICS, menyelesaikan perjanjian Indonesia-Canada *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), Uni Eropa-CEPA, serta melanjutkan proses pendaftaran ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Dari segi perusahaan pembiayaan, OJK masih memproyeksikan positif di tahun 2025, dengan pertumbuhan pembiayaan mencapai 8-10% (yoy) dengan senantiasa melakukan pemantauan terhadap *outlook* secara berkala untuk diselaraskan dengan perkembangan *outlook* pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) memproyeksikan pertumbuhan pembiayaan di angka 7%-8% pada tahun 2025.

Di tengah ketidakpastian ekonomi baik global dan domestik, Perseroan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan Unit Bisnis Ritel dan Unit Bisnis Korporasi berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan produk-produk yang dikurasi untuk memenuhi kebutuhan debitur berbasis risiko dan senantiasa memastikan pelaksanaan pengendalian internal khususnya untuk Unit Bisnis Ritel. Untuk Unit Bisnis Korporasi, Perseroan akan meningkatkan *operating asset balance* dengan meningkatkan jumlah klien Unit Bisnis Korporasi melalui akuisisi dan berkolaborasi dengan Marubeni Corporation & Mizuho Bank, Ltd. yang merupakan aliansi mitra bisnis strategis Mizuho Leasing Co., Ltd., serta dalam rangka penanganan klien bermasalah, Perseroan akan senantiasa memantau kinerja klien bermasalah dan menerapkan strategi konservatif dalam melakukan penyelesaian. Perseroan berkomitmen mengedepankan pelayanan yang cepat, tepat, dan prima dengan senantiasa meningkatkan *service level agreement* (SLA) dengan orientasi pada kepuasan debitur.

Dalam menjalankan operasionalnya, Perseroan mengupayakan pengendalian rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional ("BOPO") dalam rangka mengoptimalkan pertumbuhan bisnis. Dari sisi pendanaan, Perseroan melakukan analisis *Asset Liability Management* dan mengoptimalkan sumber pendanaan dengan suku bunga kompetitif dalam menghadapi kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI7DRRR) serta menjaga ketersediaan likuiditas dan pengelolaan arus kas yang memadai. Perseroan juga akan senantiasa memperkuat pengendalian internal dengan mengaplikasikan *Control Self Assessment* ("CSA") untuk memastikan pemisahan tugas dan tanggung jawab setiap fungsi yang ada di Kantor Pusat dan Kantor Cabang telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan. Perseroan juga akan senantiasa memastikan model pertahanan 3 lini (*3 lines model*) diimplementasikan berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("GCG"). Sebagai tindakan pencegahan Perseroan dalam mencegah terjadinya *fraud*, Perseroan akan

policies to boost competitiveness, such as the free nutritious meal program, food and energy security program, and optimization of State-Owned Enterprises (SOE) management through Danantara. Furthermore, President Prabowo said that the government is preparing a Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) policy, development of industrial areas, and the establishment of a bullion bank.

At the global level, President Prabowo said that Indonesia is also accelerating membership in BRICS, completing the Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), the European Union-CEPA, and continuing the registration process with the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

In terms of financing company, OJK still projects positive in 2025, with financing growth reaching 8-10% (yoy) by continuously monitoring the outlook periodically to align it with the development of the national economic growth outlook. Meanwhile, the Indonesian Financing Companies Association (APPI) projects financing growth at 7%-8% in 2025.

In the midst of global and domestic economic uncertainty, the Company continues to strive to improve the quality financing portfolio of the Retail Business Unit and Corporate Business Unit based on the principle of prudence with products that are curated to meet the needs of debtors based on risk and always ensure the implementation of internal control, especially for the Retail Business Unit. For the Corporate Business Unit, the Company will increase the operating asset balance by increasing the number of Corporate Business Unit clients through acquisitions and collaboration with Marubeni Corporation & Mizuho Bank, Ltd. which are strategic business alliance partner of Mizuho Leasing Co., Ltd., and in order to handle problematic clients, the Company will continue to monitor the performance of problematic clients and implement a conservative strategy in making settlements.The Company is committed to prioritizing fast, precise, and excellent service by continuously improving the service level agreement (SLA) with an orientation towards debtor satisfaction.

In carrying out its operations, the Company strives to control the ratio of Operating Expenses to Operating Income ("BOPO") in order to optimize business growth. In terms of funding, the Company conducts an Asset Liability Management analysis and optimizes funding sources with competitive interest rates in facing the increase in Bank Indonesia's benchmark interest rate (BI7DRRR) and maintaining the availability of liquidity and adequate cash flow management. The Company will also continue to strengthen internal control by implementing Control Self Assessment ("CSA") to ensure that the separation of duties and responsibilities of each function in the Head Office and Branch Offices is in accordance with the duties and responsibilities of the work assigned. The Company will also continue to ensure that the 3 lines defense model is implemented based on the principles of Good Corporate Governance ("GCG"). As a preventive measure for the Company to prevent fraud, the Company will utilize a shared database that will be facilitated by the OJK in the Financial Services Sector Actors Information

memanfaatkan *shared database* yang akan difasilitasi oleh OJK dalam Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU) mengenai kejadian *fraud* yang terjadi di Sektor Jasa Keuangan untuk melakukan pengecekan calon karyawan dan calon debitur Perseroan.

System (SIPELAKU) regarding fraud incidents that occur in the Financial Services Sector to conduct checks on prospective employees and prospective debtors of the Company.

Dalam meningkatkan efisiensi proses bisnis, meningkatkan kualitas kerja serta menurunkan tingkat kesalahan manusia, Perseroan juga melakukan berbagai pengembangan teknologi informasi. Perseroan juga melakukan pengembangan *Robot Process Automation* (RPA) dengan senantiasa mengacu pada pedoman Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) serta memperkuat pertahanan dari serangan siber. Tahun 2025 Perseroan akan meningkatkan sertifikasi ISO 27001:2013 menjadi ISO 27001:2022.

In improving the efficiency of business processes, improving work quality and reducing the level of human error, the Company also carries out various information technology developments. The Company also develops Robot Process Automation (RPA) by always referring to the Information Security Management System (ISMS) guidelines and strengthening defenses against cyber attacks. In 2025, the Company will upgrade its ISO 27001:2013 certification to ISO 27001:2022.

Direksi percaya dengan strategi-strategi yang telah ditetapkan secara adaptif, konservatif, sumber daya yang dimiliki Perseroan serta budaya Perusahaan yang proaktif dan kolaboratif, didukung oleh permodalan yang kuat oleh Pemegang Saham Pengendali sekaligus salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan yaitu Mizuho Leasing Co.,Ltd., Perseroan dapat terus menunjukkan eksistensinya di industri pembiayaan.

The Board of Directors believes that with the strategies that have been determined adaptively, conservatively, the resources owned by the Company and the proactive and collaborative corporate culture, supported by strong capital from the Controlling Shareholder and one of the Company's Major Shareholders, namely Mizuho Leasing Co., Ltd., the Company can continue to demonstrate its existence in the financing industry.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perseroan memiliki komitmen penuh untuk terus meningkatkan penerapan GCG dalam setiap proses bisnis maupun seluruh aspek pengelolaan Perseroan sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan.

Implementation of Good Corporate Governance

The Company is fully committed to continuously improving the implementation of GCG in every business process and all aspects of the Company's management so that it can provide added value to all stakeholders.

Dalam pelaksanaan penerapan GCG, Perseroan telah membentuk struktur GCG yang memadai dimana Perseroan mengklasifikasikan menjadi 2 (dua) organ yakni organ utama dan organ penunjang. Organ utama merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), yang merupakan organ tertinggi Perseroan Dewan Komisaris, dan Direksi. Dalam mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi didukung oleh organ pendukung yaitu Komite Manajemen Risiko dan Komite Pengarah Teknologi Informasi.

In implementing GCG, the Company has formed an adequate GCG structure where the Company classifies it into 2 (two) organs, namely the main organ and the supporting organ. The main organ refers to the provisions of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which consists of the General Meeting of Shareholders ("GMS"), which is the highest organ of the Company, the Board of Commissioners, and the Board of Directors. In supporting the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Directors is supported by supporting organs, namely the Risk Management Committee and the Information Technology Steering Committee.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan dengan efektif dan memenuhi prinsip-prinsip GCG. Anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen, memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu Rapat Direksi, serta Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris terselenggara secara efektif.

The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors has been carried out effectively and meets the principles of GCG. Members of the Board of Directors are able to act and make decisions independently, have competence and integrity in accordance with the size and complexity of the Company and have met applicable provisions. In addition, the Board of Directors Meeting, as well as the Joint Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners were held effectively.

Secara berkala, Perseroan terus melakukan evaluasi dan langkah perbaikan untuk meningkatkan penerapan GCG. Perseroan juga secara berkala memantau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk menjamin terpenuhinya kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Periodically, the Company continues to evaluate and take corrective steps to improve the implementation of GCG. The Company also periodically monitors changes in the provisions of laws and regulations that are set to ensure that the Company complies with applicable laws and regulations.

Perubahan Komposisi Direksi

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 7 November 2024, RUPS menyetujui menerima pengunduran diri Ibu Ade Rafida S. dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 30 Agustus 2024.
Hingga saat diterbitkannya Laporan Tahunan ini, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Konosuke Mizuta
Direktur : Shunsuke Kojima
Direktur : Andi Harjono
Direktur : Yudi Gustiawan

Changes in the Composition of the Board of Directors

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") held on November 7, 2024, the GMS approved the resignation of Mrs. Ade Rafida S. from her position as Director of the Company effective from August 30, 2024.

As of the issuance of this Annual Report, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:

President Director : Konosuke Mizuta
Director : Shunsuke Kojima
Director : Andi Harjono
Director : Yudi Gustiawan

Frekuensi Rapat Direksi dan Metode Pengambilan Keputusan Direksi

Untuk pengambilan keputusan yang sah dan mengikat, Direksi dapat mengadakan Rapat Direksi atau dengan cara menandatangani persetujuan tertulis. Keputusan yang diambil secara tertulis mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Direksi.

Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi juga diadakan secara berkala untuk memberikan arahan dan saran atas penerapan strategi Perseroan.

Di tahun 2024, Direksi telah melaksanakan Rapat Direksi sebanyak 13 kali dan 6 kali rapat gabungan bersama dengan Dewan Komisaris.

Frequency of Board of Directors Meetings and Board of Directors Decision-Making Methods

To make valid and binding decisions, the Board of Directors may hold a Board of Directors Meeting or by signing a written resolution. Decisions taken in writing have the same force as decisions taken legally in a Board of Directors Meeting.

Meetings of the Board of Commissioners together with the Board of Directors are also held periodically to provide direction and advice on the implementation of the Company's strategy.

In 2024, the Board of Directors has held 13 Board of Directors Meetings and 6 joint meetings with the Board of Commissioners.

Apresiasi

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan yang diberikan dan kepada OJK atas pengarahan yang selalu diberikan. Kami percaya dengan dukungan yang positif dan terus-menerus dari seluruh pemangku kepentingan, Perseroan akan terus dapat meningkatkan kinerjanya dan tumbuh secara berkesinambungan dan meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun mendatang.

Jakarta, April 2025
Atas nama Direksi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Appreciation

On this occasion, allow us to express our gratitude to all stakeholders for the trust given and to the OJK for the direction always given. We believe that with positive and continuous support from all stakeholders, the Company will continue to be able to improve its performance and grow sustainably and improve its performance in the years to come.

Jakarta, April 2025
On behalf of the Board of Directors of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

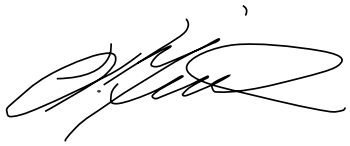

Konosuke Mizuta
Direktur Utama / President Director

PROFIL PERSEROAN
COMPANY PROFILE

Mizuho Leasing Indonesia

Nama Perseroan / Company's Name	PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Tanggal Pendirian / Date of Establishment	21 Juli 1993
Alamat Kantor Pusat / Head Office Address	Menara Astra Lantai 32 / Menara Astra 32nd Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220
Nomor Telepon / Phone Number	021- 50851848
Faksimili / Fax	021- 50851849
Alamat Surel / Email Address	investor@mizuho-ls.co.id cs@mizuho-ls.co.id
Situs Web / Website	www.mizuho-ls.co.id
Bidang Usaha / Line of Business	Industri Keuangan / Finance Industry Perusahaan Pembiayaan / Financial Institution
Pencatatan Saham / Stock Listing	25 Juni 2008- Bursa Efek Indonesia / 25 June 2008 Indonesia Stock Exchange

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk ("Perseroan") didirikan dengan nama PT Maxima Perdana Finance berdasarkan akta No. 43 tanggal 21 Juli 1993 dari Sri Nanning, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-11503.HT.01.01.Th.93 tanggal 29 Oktober 1993 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 4 November 1994, Tambahan No. 8832.

Perseroan telah melakukan perubahan nama beberapa kali, terakhir dari PT Verena Multi Finance Tbk menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Verena Multi Finance Tbk No. 8 tanggal 19 September 2022 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068946.AH.01.02.Tahun 2022 Tanggal 24 September 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Perseroan dengan nama sebelumnya yaitu PT Maxima Perdana Finance memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No.994/KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993. Perseroan

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk ("the Company") was established under the name PT Maxima Perdana Finance based on deed No. 43 dated July 21, 1993 from Sri Nanning, S.H., notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia under the Decree No. C2-11503.HT.01.01.Th.93 dated October 29, 1993 and was reported in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 88 November 4, 1994, Supplement No. 8832.

The Company has changed its name several times, most recently from PT Verena Multi Finance Tbk became PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk based on the deed of Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Verena Multi Finance Tbk No. 8 dated 19 September 2022 from Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta. This change has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0068946.AH.01.02.Year 2022 dated September 24, 2022 concerning Approval of Amendment to the Articles of Association of a Limited Liability Company.

The Company, under its previous name PT Maxima Perdana Finance, obtained business license for financial institution from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia with Decree No.994/KMK.017/1993 dated December 30, 1993. The Company

mulai beroperasi pada tanggal 21 Juni 2003, dengan izin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 Jo. No. KEP-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010 Jo. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.KEP-806/NB.11/2022 tanggal 12 Desember 2022.

started operating on June 21, 2003, with a business license based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-161/KM.6/2004 dated 4 May 2004 Jo. No. KEP-654/KM.10/2010 dated 9 December 2010 Jo. Copy of Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority ("OJK") No.KEP-806/NB.11/2022 dated 12 December 2022.

Perseroan pertama kali mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 dengan jumlah saham sebanyak 460.000 lembar saham, kemudian pada tahun 2017 melakukan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dengan jumlah saham sebanyak 1.583.160.556 lembar saham dan pada tanggal 28 Desember 2018, Perseroan telah memperoleh surat pernyataan efektif dari OJK untuk melaksanakan Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD ("PMHMETD II") sebanyak 3.102.193.089 lembar saham dan pada bulan Januari 2019 Perseroan telah menerbitkan sebanyak 3.102.193.089 saham. Sampai dengan akhir tahun 2022 jumlah saham beredar Perseroan yang beredar adalah sebesar 5.687.353.997 saham.

The Company first listed its shares on the Indonesia Stock Exchange in 2008 with a total of 460,000 shares, then in 2017 the Company conducted a Limited Public Offering I ("PUT I") and to issue pre-emptive rights ("HMETD") with a total of 1,583,160,556 shares. On December 28, 2018, the Company obtained effective statement from the OJK to conduct a Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II ("PMHMETD II") of 3,102,193,089 shares and in January 2019 the Company has issued 3,102,193,089 shares. Therefore, by the end of 2022 the number of outstanding shares of the Company is 5,687,353,997 shares.

Perseroan merupakan anak perusahaan dari Mizuho Leasing Co.,Ltd. yang merupakan bagian dari Mizuho Financial Group salah satu lembaga keuangan ternama di Jepang. Kepemilikan saham Mizuho Leasing Co.,Ltd. 31 Desember 2024 yaitu sebesar 67,44%.

The Company was a subsidiary of Mizuho Leasing Co.,Ltd. which was part of the Mizuho Financial Group, one of the leading financial institutions in Japan.The share ownership of Mizuho Leasing Co.,Ltd. as of December 31, 2024 is 67.44%.

Pada tahun 2019, Perseroan juga melakukan penggabungan usaha dengan entitas asosiasi yaitu PT IBJ Verena Finance dimana PT IBJ Verena Finance menggabungkan diri ke dalam Perseroan dan Perseroan menjadi *surviving entity*. Saat ini, kegiatan usaha utama Perseroan yaitu melakukan pembiayaan dibidang Ritel dan Korporasi.

In 2019, the Company merged with an associated entity, PT IBJ Verena Finance, where PT IBJ Verena Finance merged into the Company and the Company turned into a surviving entity. Currently, the Company's main business activity was financing in the Retail and Corporate sectors.

Kegiatan Usaha
Business Activities

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana tersebut dalam Akta No. 8 tanggal 19 September 2022 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068946. AH.01.02.Tahun 2022 Tanggal 24 September 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment to the Company's Articles of Association is as stated in Deed No. 8 dated September 19, 2022 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0068946. AH.01.02. Year 2022 Dated September 24, 2022 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of a Limited Liability Company.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan utama Perseroan meliputi usaha pembiayaan:

1. Kegiatan Usaha Utama
   - Pembiayaan Investasi
   - Pembiayaan Modal Kerja
   - Pembiayaan Multiguna
   - Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK
2. Selain kegiatan usaha utama diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's main activities includes

1. Main Business Activities
   - Investment Financing
   - Working Capital Financing
   - Multipurpose Financing
   - Other Financing Business Activities Based on OJK Approval
2. In addition to the main business activities above, the Company can carry out supporting business activities to

sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa (*fee*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

conduct operating leases and/or fee-based activities as long as they do not conflict with the laws and regulations in the financial services sector.

Perseroan memiliki 2 pilar bisnis, sebagai berikut:
1. Pembiayaan Ritel
2. Pembiayaan Korporasi

The Company has 2 business pillars, as follows:
1. Retail Financing
2. Corporate Financing

Produk & Layanan
Products & Services

Perseroan bergerak di bisnis Ritel dan Korporasi dengan layanan Pembiayaan yaitu :

The Company is engaged in Retail and Corporate business with financing services namely:

Pembiayaan Ritel

- **Pembiayaan Mobil Bekas**
  Pembiayaan kepemilikan mobil merupakan solusi bagi Calon Debitur untuk memiliki mobil impian. Perseroan memberikan pembiayaan mobil bekas kepada Calon Debitur dengan cara menghubungi *dealer* yang bekerja sama dengan Perseroan

- **Pembiayaan *Showroom* Mobil Bekas**
  Perseroan dapat memberikan pembiayaan modal kerja bagi rekanan *showroom* mobil bekas yang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya dan menjadi solusi untuk meningkatkan kapasitas penjualan

- **Pembiayaan Multiguna**
  Perseroan dapat memberikan pembiayaan untuk renovasi rumah, biaya perjalanan, biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya kesehatan dan biaya lainnya dengan menjaminkan BPKB mobil

Retail Financing

- **Used Car Financing**
  Car ownership financing is a solution for Potential Debtor to have dream car. The Company provides used car financing to Potential Debtor by contacting the dealer partners

- **Used Car Showroom Financing**
  The Company can provide working capital financing for used car showroom partners who need funds to develop their business and be solution to increase sales capacity.

- **Multipurpose Financing**
  The Company can provide financing for home renovations, travel expenses, education costs, wedding expenses, medical expenses and other costs by pledging car BPKB

Pembiayaan Korporasi

- **Pembiayaan Investasi**
  Perseroan memberikan jasa pembiayaan investasi baik skema sewa pembiayaan langsung atau jual & sewa balik dengan pembelian aset seperti kendaraan, mesin, alat berat, peralatan IT, peralatan medis, dan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan klien korporasi ("*corporate client*") dari Produsen/Distributor/*Dealer* dan menyewa guna usahakannya kepada klien

  Kelebihan dari pembiayaan investasi adalah memungkinkan para klien untuk mempercepat penyusutan aktiva tetap

- **Pembiayaan Modal Kerja**
  Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada klien korporasi dalam memenuhi kebutuhan modal kerja jangka pendek dan mengatur arus kas agar lebih baik. Adapun produk pembiayaan fasilitas bisnis yang Perseroan tawarkan sebagai berikut
  i. Pembiayaan piutang/hutang
  ii. Pembiayaan tagihan

- **Kegaiatan Usaha Pembiayaan Lain berdasarkan persetujuan OJK**

Corporate Financing

- **Investment Financing**
  The Company provides investment financing through direct lease or sale & lease back scheme by purchasing assets such as vehicle,machinery, heavy equipment, IT equipment, medical equipment, and others that are needed by corporate client from Manufacturers/ Distributors/ Dealers and lease them to client

  The advantage of the investment financing enables the client to accelerate the depreciation of fixed assets

- **Working Capital Financing**
  Financing facilities are provided to the corporate client to meet short-term working capital needs and better manage cash flows. The business facility financing products the Company offer are as follows
  i. Accounts Payable financing / Account Receivable financing
  ii. Invoice financing

- **Other Financing Business Activities based on OJK Approval**

Jaringan Kantor
Office Network

Kantor Pusat
Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220
Telp : 021- 50851848
Faksimili: 021- 50851849
Alamat Surel : investor@mizuho-ls.co.id, cs@mizuho-ls.co.id
Situs Web : www.mizuho-ls.co.id

Head Office
Menara Astra 32nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Jakarta 10220
Telp No. : 021- 50851848
Faximile : 021- 50851849
Email : investor@mizuho-ls.co.id, cs@mizuho-ls.co.id
Website : www.mizuho-ls.co.id

Kantor Cabang
Per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki 31 Kantor Cabang.

Branch Offices
As of 31 December 2024, the Company has 31 Branch Offices.

No.	Lokasi Location	Alamat Address	Kontak Contact
1.	Bandung	Jl. Karawitan No. 27A RT.001 / RW.010 Kel. Turangga, Kec. Lengkong Bandung	Telp : 022-87354632 Fax : 022-87327705
2.	Bekasi	Ruko Grand Mall Jl Jenderal Sudirman Kav. A-16 Kel. Harapan Mulya, Kec Medan Satria Bekasi – Jawa Barat	Telp : 021-38317173
3.	Bogor	Jl. Soleh Iskandar No. 89B Kel. Kadung Badak, Kec. Tanah Sareal Bogor - Jawa Barat	Telp: 0251-8203275 Fax : 0251-8203515
4.	Cikarang	Komp Ruko CBD Blok E1 Jl. Niaga Raya Kav. AA3, Jababeka Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan – Kab. Bekasi Bekasi - Jawa Barat	Telp : 021-29082848
5.	Jakarta Barat	Jl. Raya Kedoya, Nomor 37, Rt 008 Rw 007 Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat - Provinsi DKI Jakarta	Telp: 021-22282023
6.	Jakarta Pusat	Komplek Rukan Red Top Blok A No. 3-3A Jl. Pecenongan 72 Kel. Kebon Kelapa - Kec. Gambir	Telp : 021-3524243
7.	Jakarta Selatan	Jakarta Pusat Komp. Rajawali Center No B24 Jl. Raya Pasar Minggu, Gang Gaya RT 007 / RW 001Kel Pasar Minggu, Kec Pasar Minggu Jakarta Selatan	Telp : 021-38820075
8.	Jakarta Timur	Jl. Raden Inten II No. 53D RT.004 / RW.04 Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur	Telp : 021-22322110
9.	Jakarta Utara	Ruko Grand Orchard Square Blok F9 Jl. Terusan Kelapa Hybrida Kel Sukapura, Kec. Cilincing Jakarta Utara	Telp : 021-38865175
10.	Kabupaten Lamongan	Komp. Ruko Permata Kav. No.27 Jl. Panglima Sudirman. Kel. Sidokumpul, Kec. Lamongan Kab. Lamongan - Jawa Timur	Telp: 0322-3104062
11	Kota Balikpapan	Komp. Balikpapan Permai Blok F-2 No. 21 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. Kalimantan Timur Kota Balikpapan - Kalimantan Timur	Telp : 0542-5463009
12	Kota Bandar Lampung	Jl. Pangeran Antasari No. 162A Kel. Tanjung Baru, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung	Telp: 0721-5606551
13.	Kota Banjarmasin	Jl. Pangeran Hidayatullah RT 017 RW 001 Kel. Banua Anyar Kec. Banjarmasin Timur Banjarmasin - Kalimantan Selatan	Telp: 0511-6742011
14.	Kota Cimahi	Jl Kota Mas Raya Nomor 11 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi - Jawa Barat	Telp: 022-63190014

No.	Lokasi Location	Alamat Address	Kontak Contact
15.	Kota Denpasar	Jl. Gatot Subroto Timur No. 323 Ds. Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur Denpasar - Bali	Telp: 03614762477
16.	Kota Depok	Jl. Dewi Sartika No. 33B RT.001 / RW.001 Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas Kota Depok - Jawa Barat	Telp : 021-38750030 Fax : 021-38750022
17.	Kota Jambi	JL.Hayam Wuruk No.47 C Kel.Talang Jauh, Kec.Jelutung Kota Jambi, Provinsi Jambi	Telp: 0741-3620887 Fax: 0741-3619493
18.	Kota Kediri	Jl. Urip Sumoharjo No. 167 Kel. Ngronggo, Kec. Kediri Kota Kediri - Jawa Tengah	Telp: 0354-2809990 Fax: 0354-2809700
19.	Kota Pontianak	Jl. A. Yani, Sentra Bisnis Komplek Ruko Mega Mall Blok H No. 9 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Pontianak - Kalimantan Barat	Telp: 0561-8242133
20.	Kota Samarinda	Jl. Abdul Wahab Syahrani, No. 88A RT 024 Kel. Air Hitam,Kec. Samarinda Ulu Samarinda - Kalimantan Timur	Telp : 0541-2526384
21.	Kota Semarang	Jl. Candi Prambanan Raya Ruko F Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang - Jawa Tengah	Telp : 024-35320092
22.	Kota Surakarta	Jl. Dewi Sartika No 23b Kel. Danukusuman Kec. Serengan Kota Surakarta - Jawa Tengah	Telp : 0271-6008033
23.	Kota Yogyakarta	Jl. Raya Magelang No 43, RT/RW: 46/10, Kel. Kricak Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta - Jawa Tengah	Telp : 0274-5059074
24.	Makassar	Jl. Gunung Latimojong Komp Ruko Metro Square Blok C No. 38 Kel. Lariangbangi - Kec. Makassar Makassar - Sulawesi Selatan	Telp : 0411-3634355 Fax : 0411-335562
25.	Malang	Jl. Letjen S. Parman No. 56 - B3 Kel. Purwanto – Kec. Blimbing Malang - Jawa Timur	Telp : 0341-479107
26.	Medan	Ruko Premiere 9 Jl. Sultan Iskandar Muda No. 83-83 A Kel. Babura - Medan Petisah Medan – Sumatera Utara	Telp : 061-4562555 Fax : 061-4568550
27.	Palembang	Komp. Graha Dempo Mas Blok F5 Jl. Mayor H.M. Rasyad Nawawi No. 549, RT08 RW02,Kel. 9 Ilir - Kec. Ilir Timur II Palembang - Sumatera Selatan	Telp : 0711-359292 Fax : 0711-366828
28.	Pekanbaru	Jl. Arifin Achmad No. 75 A-B, RT.001 / RW.015 Kel. Tengkareng Tengah - Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru - Riau	Telp : 0761-8415689 Fax : 0761-8417664
29.	Surabaya	Jl. Baratajaya XIX No. 54 B RT 009 / RW 005 Kel Baratajaya, Kec Gubeng Surabaya - Jawa Timur	Telp: 031-99453772
30.	Tangerang	Ruko Great Western Resort Blok AA2 No 22 Jl. MH Thamrin KM7, RT 001 / RW 004 Kel. Penunggangan Utara, Kec Pinang Tangerang - Banten	Telp : 021-38951041
31.	Tangerang	Ruko Mendrisio 1 Blok E No. 09 Kel. Medang. Kec. Pagedangan Kab. Tangerang - Banten	Telp: 021-59599028

Perseroan menerima Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-135/PL.021/2024 tanggal 07 November 2024 Perihal Pencabutan Izin Pembukaan Cabang PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Serang.

The Company received a copy of the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. Kep-135/PL.021/2024 dated November 7, 2024 regarding the Revocation of the Permit to Open a Branch of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Serang.

Jejak Langkah Perseroan
Company Milestones

1993	Perseroan didirikan pertama kali sebagai PT Maxima Perdana Finance.	The Company was first established as PT Maxima Perdana Finance.
2003	Perseroan berubah nama menjadi PT Verena Oto Finance dengan fokus pada pembiayaan mobil.	The Company changed its name to PT Verena Oto Finance and focused on car financing.
2008	Perseroan mengadakan Penawaran Umum Perdana, dengan kepemilikan Bank Panin sebesar 42,87%.	The Company connducted an Initial Public Offering, with Bank Panin ownership of 42.87%.
2010	Perseroan berubah nama menjadi PT Verena Multi Finance Tbk.	The Company changed its name to PT Verena Multi Finance Tbk.
2011	• Perseroan menerbitkan Obligasi Verena Multi Finance I Tahun 2011 sejumlah Rp300 miliar dalam 3 (tiga) seri. • Perseroan menerbitkan Medium Term Notes (“MTN”) sejumlah Rp200 miliar.	• The Company issued 2011 Verena Multi Finance Bond I Year 2011 the amount of Rp300 billion in 3 (three) series. • The Company issued Rp200 billion Medium Term Notes (MTN).
2012	• Perseroan melunasi Obligasi Verena Multi Finance I tahun 2011 seri A sebesar Rp65 miliar. • Perseroan mendapatkan izin untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I senilai Rp1 triliun. • Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 sebesar Rp300 miliar dalam 3 (tiga) seri.	• The Company paid off Verena Multi Finance Bond I Year 2011 series A amounting to Rp65 billion. • The Company obtained a permit to issue Shelf Registration Bonds I worth Rp1 trillion. • The Company issued Verena Multi Finance Phase I Shelf Registration Bonds I Year 2012 amounting to Rp300 billion in 3 (three) series.
2013	• Perseroan melunasi Obligasi Verena Multi Finance I tahun 2011 seri B sebesar Rp135 miliar dan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 seri A sebesar Rp50 miliar. • Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 sebesar Rp153 miliar dalam 2 (dua) seri.	• The Company paid off Verena Multi Finance Bond I Year 2011 series B amounting to Rp135 billion and Verena Multi Finance Phase I Shelf Registration Bonds 1 Year 2012 series A in the amount of Rp50 billion. • The Company issued 2013 Verena Multi Finance Phase II Shelf Registration Bonds 1 Year 2013 amounting to Rp153 billion in 2 (two) series.
2014	• Perseroan melunasi Obligasi Verena Multi Finance I tahun 2011 seri C sebesar Rp300 miliar dan MTN Verena Multi Finance I tahun 2011 sebesar Rp200 miliar. • Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 sebesar Rp135 miliar dalam 2 (dua) seri.	• The Company paid off Verena Multi Finance Bond I Year 2011 series C in the amount of Rp300 billion and MTN Verena Multi Finance I Year 2011 in the amount of Rp200 billion. • The Company issued Verena Multi Finance Phase III Shelf Registration Bonds I Year 2014 in the amount of Rp135 billion in 2 (two) series.

2015

Perseroan melunasi Obligasi Verena Multi Finance I tahun 2011 seri B sebesar Rp135 miliar dan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 seri B sebesar Rp227 miliar serta Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 seri A sebesar Rp3 miliar.

The Company paid off Verena Multi Finance Bond I Year 2011 series B in the amount of Rp135 billion and Verena Multi Finance Phase I Shelf Registration Bonds I Year 2012 series B in the amount of Rp227 billion and Verena Multi Finance Phase III Shelf Registration Bonds I Year 2014 series A in the amount of Rp3 billion.

2016

Perseroan melunasi Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 seri C sebesar Rp23 miliar dan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 seri A sebesar Rp113 miliar.

The Company paid off Verena Multi Finance Phase I Shelf Registration Bonds I Year 2012 series C amounting to Rp23 billion and Verena Multi Finance Phase II Shelf Registration Bonds I Year 2013 series A amounting to Rp113 billion.

2017

- Perseroan melunasi Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 seri B sebesar Rp40 miliar dan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 seri B sebesar Rp132 miliar.
- Perseroan memperoleh izin dan melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dengan dana yang diperoleh untuk penambahan modal senilai Rp177,3 miliar.
- Penerbitan MTN II Verena Multi Finance Tahun 2017 sebesar Rp100 miliar.

- The Company paid off Verena Multi Finance Phase II Shelf Registration Bonds I Year 2013 series B in the amount of Rp40 billion and Verena Multi Finance Phase III Shelf Registration Bonds I Year 2014 series B in the amount of Rp132 billion.
- The Company obtained a license and carried out a Limited Public Offering I ("PUT I") to issue Pre-emptive Rights ("Rights") with funds obtained for additional capital of Rp177.3 billion.
- Issuance of MTN II Verena Multi Finance Year 2017 amounting to Rp100 billion.

2018

- Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melaksanakan aksi korporasi Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II ("PMHMETD II").
- Susunan pemegang saham Perseroan, pada tanggal 5 Oktober 2018 mengalami perubahan dimana IBJ Leasing Co.,Ltd. (sekarang Mizuho Leasing Co.,Ltd) membeli seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh DEG - Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH dengan mekanisme pasar modal melalui Bursa Efek Indonesia.

- The Company obtained an effective statement from the Financial Services Authority ("OJK") to carry out corporate actions of Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II ("PMHMETD II").
- The composition of the Company's shareholders changed on October 5, 2018 in which IBJ Leasing Co.,Ltd. (now Mizuho Leasing Co.,Ltd) bought all shares owned by DEG - Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH through a capital market mechanism via the Indonesia Stock Exchange.

2019

- Perseroan melaksanakan PMHMETD II dengan dana yang diperoleh untuk penambahan modal senilai Rp434,3 miliar.
- Mizuho Leasing Co.,Ltd (d/h IBJ Leasing Co.,Ltd) menjadi Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan sebesar 67,44%.
- Penggabungan usaha dengan entitas asosiasi PT IBJ Verena Finance (IBJV), dimana Perseroan menjadi *surviving entity*.
- Perseroan melunasi MTN II Verena Multi Finance Tahun 2017 sebesar Rp100 miliar.

- The Company carried out PMHMETD II with total funding obtained for additional capital of Rp434.3 billion.
- Mizuho Leasing Co.,Ltd (formerly IBJ Leasing Co.,Ltd) became the Controlling Shareholder of the Company with an ownership of 67.44%.
- Merger with associate entity PT IBJ Verena Finance (IBJV), whereas the Company becomes the surviving entity.
- The Company paid off MTN II Verena Multi Finance Year 2017 in the amount of Rp100 billion.

2022

Perseroan berubah nama menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk dengan alamat Kantor Pusat baru di Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220.

The Company changed its name to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk with a new Head Office address at Menara Astra 32nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Jakarta 10220.

Visi Misi, dan Nilai Perseroan
Vision, Mission and Values of The Company

Visi
Vision

“Menjadi Perusahaan yang Menciptakan Dunia yang Berkelanjutan”

“Be a Creator of a Sustainable World”

Misi
Mission

“Menghubungkan Kebutuhan untuk Menciptakan Masa Depan”

“Connect Needs to Create the Future”

Nilai-Nilai Perseroan
Company’s Values

CHALLENGE **CREATE** **CHANGE**

COLLABORATE

Melalui kolaborasi, kami akan menghadapi tantangan, membuat perubahan, dan mempercepat penciptaan

Through collaboration, we will take on challenges, enact change and accelerate creation

Profil Direksi
The Board of Directors Profile

KONOSUKE MIZUTA

Direktur Utama
President Director

Warga Negara Jepang, 59 tahun, berdomisili sementara di Jakarta. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2022, beliau diangkat kembali sebagai Direktur Utama untuk periode 2022-2024. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Kwansei Gakuin University, Hyogo, Jepang, pada tahun 1990 dan memperoleh gelar Master in Leadership & Strategy dari London Business School Sloan, London, Inggris, pada tahun 2011. Beliau telah dianugerahi sebagai profesional *Certified Internal Auditor (CIA)* dari *The Institute of Internal Auditors* sejak November 2023.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 54.

Japanese citizen, 59 years old, domiciled temporarily in Jakarta. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 29 July 2022, he was reappointed as President Director for the 2022-2024 period. He obtained a Bachelor of Economics degree from Kwansei Gakuin University, Hyogo, Japan in 1990 and obtained a Master in Leadership & Strategy from London Business School Sloan, London, England, in 2011. He has been awarded the professional designation of Certified Internal Auditor (CIA) from The Institute of Internal Auditors since November 2023.

The Disclosurement of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 54.

*) Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan No. 23 tanggal 17 Juli 2019 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan Akta Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkular IBJV No. 24 pada tanggal dan dari Notaris yang sama dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.10-0008953 tanggal 23 Juli 2019, efektif sejak tanggal 23 Juli 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (d/h PT Verena Multi Finance Tbk) melakukan penggabungan usaha dengan entitas asosiasi yaitu PT IBJ Verena Finance dimana PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk menjadi *surviving entity*.
Based on the Deed of Decision of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 23 dated July 17, 2019 from Notary Fathiah Helmi, S.H., and Deed of Circular IBJV Shareholders Decree No. 24 on the date and from the same Notary and has been recorded in the Legal Entity Administration System at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-AH.01.10-0008953 dated 23 July 2019, effective from 23 July 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (formerly PT Verena Multi Finance Tbk) entered into a business merger with an associated entity, namely PT IBJ Verena Finance where PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk becomes a surviving entity.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2019 – to date	President Director PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2017 – 2019	Director PT IBJ Verena Finance*
2017	Deputy General Manager, International Division, Tokyo, Head Office IBJ Leasing Co, Ltd. (now Mizuho Leasing Co, Ltd)
2015 – 2017	General Manager, International Trade Business Promotion Division, Tokyo, Head Office, Mizuho Bank, Ltd.
2011 – 2015	Deputy General Manager, Global Trade Finance Division, Europe Office, London, Mizuho Bank, Ltd.
2006 – 2009	Senior Manager, Corporate Banking Division No.18, Tokyo, Head Office, Mizuho Corporate Bank, Ltd.
1999 – 2006	Manager Bangkok Branch Mizuho Corporate Bank, Ltd.
1999	Manager International Coordination Division Tokyo, Head Office The Industrial Bank of Japan, Ltd.
1996 – 1999	Corporate Banking No. 9 Tokyo Head Office The Industrial Bank of Japan, Ltd.
1990 – 1996	Osaka Corporate Banking Division No. 3 Osaka Branch The Industrial Bank of Japan, Ltd.

SHUNSUKE KOJIMA

Direktur
Director

Warga Negara Jepang, 58 tahun, berdomisili sementara di Jakarta. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2022, beliau diangkat kembali menjadi Direktur untuk periode 2022-2024. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Rikkyo, Tokyo, Jepang, pada tahun 1989. Beliau merupakan Direktur yang membawahi fungsi Akunting dan *Finance & Treasury.*

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 54.

Japanese citizen, 58 years old, residing domiciled in Jakarta. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 29 July 2022, he was reappointed as Director for the 2022-2024 period. Obtained his Bachelor of Economics degree from Rikkyo University, Tokyo, Japan, in 1989. He is the Director in charge of the Accounting and Finance & Treasury functions.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 54.

*) Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan No. 23 tanggal 17 Juli 2019 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan Akta Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkular IBJV No. 24 pada tanggal dan dari Notaris yang sama dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.10-0008953 tanggal 23 Juli 2019, efektif sejak tanggal 23 Juli 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (d/h PT Verena Multi Finance Tbk) melakukan penggabungan usaha dengan entitas asosiasi yaitu PT IBJ Verena Finance dimana PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk menjadi *surviving entity*.
Based on the Deed of Decision of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 23 dated July 17, 2019 from Notary Fathiah Helmi, S.H., and Deed of Circular IBJV Shareholders Decree No. 24 on the date and from the same Notary and has been recorded in the Legal Entity Administration System at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-AH.01.10-0008953 dated 23 July 2019, effective from 23 July 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (formerly PT Verena Multi Finance Tbk) entered into a merger with an associated entity, namely PT IBJ Verena Finance where PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk becomes a surviving entity.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2019 – to date	Director PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2019	Deputy General Manager International Business Administration Department IBJ Leasing Co, Ltd. (now Mizuho Leasing Co, Ltd)
2016 – 2019	Deputy General Manager Corporate Business Department (Metropolitan Area No.1), IBJ Leasing Co, Ltd. (now Mizuho Leasing Co, Ltd)
2011 – 2016	Deputy General Manager International Department, IBJ Leasing Co, Ltd. (now Mizuho Leasing Co, Ltd)
2010 – 2011	Director PT IBJ Verena Finance*
2010	Vice Chairman of Establishment Preparation Committee of PT. IBJ Verena Finance, IBJ Leasing Co, Ltd. (now Mizuho Leasing Co, Ltd)
2002 – 2010	Deputy General Manager International Department IBJ Leasing Co., Ltd. Head Office (now Mizuho Leasing Co, Ltd)
2002	Senior Manager International Business Development Department, IBJ Leasing Co., Ltd, Head Office (now Mizuho Leasing Co, Ltd)
1999 – 2002	Director PT. Bumi Daya - IBJ Leasing
1998 – 1999	General Manager PT Bumi Daya – IBJ Leasing
1994 – 1998	Head Office Computer & OA Business Department Manager IBJ Leasing Co., Ltd (now Mizuho Leasing Co, Ltd)
1989 – 1994	Osaka Branch IBJ Leasing Co., Ltd (now Mizuho Leasing Co, Ltd)

ANDI HARJONO

Direktur
Director

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, berdomisili di Jakarta. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2022, beliau diangkat kembali sebagai Direktur untuk periode 2022-2024. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, pada tahun 1992 dan memperoleh gelar Master of International Management dari Thunderbird School of Global Management, Arizona, Amerika Serikat pada tahun 1994. Beliau merupakan Direktur yang membawahi fungsi Sumber Daya Manusia, Bagian Umum dan Teknologi Informasi.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 54.

Indonesian citizen, 55 years old, domiciled in Jakarta. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 29 July 2022, he was reappointed as Director for the 2022-2024 period. Obtained a Bachelor of Industrial Engineering degree from Trisakti University, Jakarta, Indonesia, in 1992 and a Master of International Management degree from Thunderbird School of Global Management, Arizona, United States in 1994. He is the Director in charge of Human Resources, General Affair and Information Technology.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 54.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2019 – to date	Director PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2016 – 2019	President Director PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2007 – 2016	Director PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2002 – 2007	Vice President PT Indofood Sukses Makmur Tbk Bogasari Flour Mills
2001 – 2002	Financial & Operational Advisor for Sekar Group PT Tri Panji Anugrah
1999 – 2001	Manager PT Tunas Sepadan Investama
1998 – 1999	Manager Carbonless Paper Export Marketing Division PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills
1995 – 1998	Finance & Accounting Manager PT Bentala Mahaya
1993	Finance Officer PT Astra Graphia Tbk

YUDI GUSTIAWAN

Direktur
Director

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, berdomisili di Tangerang. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2022, Beliau diangkat kembali sebagai Direktur untuk periode 2022 - 2024. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi INABA, Bandung, Indonesia, pada tahun 1996 dan memperoleh gelar Sarjana Statistik dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, pada tahun 1999, serta memperoleh gelar Magister Management dari Bina Nusantara Business School, Jakarta, Indonesia pada tahun 2015. Beliau merupakan Direktur yang membawahi Unit Bisnis Ritel.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 54.

Indonesian citizen, 51 years old, residing in Tangerang. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 29 July 2022, he was reappointed as Director for the 2022-2024 period. He obtained a Bachelor of Accounting degree from the INABA College of Economics, Bandung, Indonesia, in 1996; obtained a Bachelor of Statistics from Padjadjaran University, Bandung, Indonesia, in 1999; and obtained a Master degree in Management from Bina Nusantara Business School, Jakarta, Indonesia in 2015. He is the Director in charge of the Retail Business Unit.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 54.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2019 – to date	Director PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2018 – 2019	Vice President Director PT Jtrust Olympindo Multifinance
2016 – 2018	President Director PT Olympindo Multifinance (now PT Jtrust Olympindo Multifinance)
2015 – 2016	Operations Director PT Radana Bhaskara Finance Tbk
2012 – 2014	Director of Strategic Support PT HD Finance Tbk (now PT Radana Bhaskara Finance Tbk)
2011 – 2012	Deputy Director of Strategic Support PT HD Finance Tbk (now PT Radana Bhaskara Finance Tbk)
2009 – 2011	Head of Business Support Division PT HD Finance Tbk (now PT Radana Bhaskara Finance Tbk)
2005 – 2009	Head of Operation Division PT HD Finance (now PT Radana Bhaskara Finance Tbk)
2002 – 2005	Accounting Manager PT Arta Boga Cemerlang
2001 – 2002	Regional Internal Auditor for Java Area II PT. Alfa Retailindo Tbk
1999 – 2001	PPIC (Production Planning & Inventory Control) PT. Ateja Tritunggal Corporation Padalarang

ADE RAFIDA SAULINA S*

Direktur
Director

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, berdomisili di Tangerang. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2022, beliau diangkat kembali menjadi Direktur untuk periode 2022- 2024. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Nommensen, Medan, Indonesia pada tahun 1987. Beliau merupakan Direktur yang membawahi Unit Bisnis Korporasi.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 54.

Indonesian citizen, 60 years old, domiciled in Tangerang. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 29 July 2022, he was reappointed as Director for the 2022-2024 period. She obtained a Bachelor of Accounting degree from Nommensen University, Medan, Indonesia in 1987. She is the Director in charge of the Corporate Business Unit.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 54.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2019 – 2024 (August)	Director PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2016 – 2019	Director PT IBJ Verena Finance**
2015 – 2016	Business Development General Manager PT IBJ Verena Finance**
2011 – 2015	Business Development Manager PT IBJ Verena Finance**
2006 – 2011	Business Analyst PT Sigma Cipta Caraka
1997 – 2006	Marketing Manager PT GE Finance Indonesia
1995 – 1997	Marketing Senior Executive PT GE Astra Finance
1989 – 1994	Marketing Officer PT Bumi Daya – IBJ Leasing
1986 – 1988	Chief Accountant PT Abdi Rakyat Bakti

*) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 7 November 2024, RUPS menyetujui Perubahan Anggota Direksi Perseroan yaitu menerima pengunduran diri Ibu Ade Rafida S. dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 30 Agustus 2024.
Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") on November 7, 2024, the GMS approved the Changes of the Company's Member of the Board of Directors, namely to accept the resignation of Mrs. Ade Rafida S. from her position as Director of the Company's effective as of August 30, 2024.

**) Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan No. 23 tanggal 17 Juli 2019 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan Akta Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkular IBJV No. 24 pada tanggal dan dari Notaris yang sama dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.10-0008953 tanggal 23 Juli 2019, efektif sejak tanggal 23 Juli 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (d/h PT Verena Multi Finance Tbk) melakukan penggabungan usaha dengan entitas asosiasi yaitu PT IBJ Verena Finance dimana PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk menjadi *surviving entity*.
Based on the Deed of Decision of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 23 dated July 17 2019 from Notary Fathiah Helmi, S.H., and Deed of Circular IBJV Shareholders Decree No. 24 on the date and from the same Notary and has been recorded in the Legal Entity Administration System at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-AH.01.10-0008953 dated 23 July 2019, effective from 23 July 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (formerly PT Verena Multi Finance Tbk) entered into a merger with an associated entity, namely PT IBJ Verena Finance where PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk becomes a surviving entity.

Profil Dewan Komisaris
The Board of Commissioners Profile

YASUO IMAIZUMI

Komisaris Utama
President Commissioner

Warga Negara Jepang, 59 tahun, berdomisili di Jepang. Sesuai keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, beliau diangkat sebagai Komisaris Utama untuk periode 2024. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Sophia University, pada tahun 1990 serta memperoleh gelar *Megister of law* dari University of Pennsylvania Carey Law School pada tahun 1997.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali, serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 54.

Japanese citizen, 59 years old, domiciled in Japan. In accordance with the decision of the Extraordinary GMS on March 21 2024, he was appointed as President Commissioner for the period 2024. Obtained a Bachelor of Laws degree from Sophia University in 1990 and obtained a Masters of Laws degree from the University of Pennsylvania Carey Law School in 1997.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 54.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2024 (March) – to date	President Commissioner PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2024 (March) – to date	Member of the Nomination and Remuneration Commitee PT Mizuho LeasingIndonesia Tbk
2022 – to date	Director of Overseas Subsidiaries International Business Administration Department Mizuho Leasing Co.,Ltd
2019 – to date	Relationship Manager International Business Development Department Mizuho Leasing Co.,Ltd
2018 – to date	Senior Deputy General Manager in International Business Administration Department Mizuho Leasing Co., Ltd
2013 – 2018	Deputy General Manager Legal Department Mizuho Bank Co., Ltd
2012 – 2013	Deputy General Manager Legal Department Mizuho Corporate Bank, Co., Ltd.
2010 - 2012	Deputy General Manager Americas Corporate Finance Div.#2 Mizuho Corporate Bank, Co., Ltd.
2008 – 2010	Senior Vice President Credit Engineering Department Mizuho Corporate Bank, Co., Ltd.
2008	Senior Vice President Corporate Banking Department. No.14 Mizuho Corporate Bank, Co., Ltd.
2002 - 2008	Senior Vice President Corporate Banking Department. No.2 Mizuho Corporate Bank, Co., Ltd.
1990 - 2002	Senior Vice President at Legal Department & Vice President at International Business Department Industrial Bank of Japan Co., Ltd.

MOHAMMAD SYAHRIAL

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, berdomisili di Jakarta. Sesuai keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 17 Juli 2019, Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen terhitung sejak tanggal efektifnya penggabungan usaha yaitu tanggal 23 Juli 2019 untuk periode 2019-2021. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2022, beliau diangkat kembali sebagai Komisaris Independen untuk periode 2022-2024. Memperoleh gelar Sarjana Corporate Finance dari Universitas Florida Atlantic, Florida, Amerika Serikat, pada tahun 1988 dan memperoleh gelar Master of Corporate Finance Investment dari Universitas Golden Gate, San Fransisco, Amerika Serikat, pada tahun 1989.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali, serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 54.

Indonesian Citizen, 58 years old, domiciled in Jakarta. In accordance with the decision of the Extraordinary GMS on 17 July 2019, he was appointed as Independent Commissioner as of the effective date of the business merger, namely 23 July 2019 for the 2019-2021 period. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 29 July 2022, he was reappointed as Independent Commissioner for the 2022-2024 period. Obtained his Bachelor of Corporate Finance from Florida Atlantic University, Florida, USA, in 1988 and obtained his Master of Corporate Finance Investment from Golden Gate University, San Francisco, USA, in 1989.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 54.

*) Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan No. 23 tanggal 17 Juli 2019 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan Akta Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkular IBJV No. 24 pada tanggal dan dari Notaris yang sama dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.10-0008953 tanggal 23 Juli 2019, efektif sejak tanggal 23 Juli 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (d/h PT Verena Multi Finance Tbk) melakukan penggabungan usaha dengan entitas asosiasi yaitu PT IBJ Verena Finance dimana PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk menjadi *surviving entity*.
Based on the Deed of Decision of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 23 dated July 17 2019 from Notary Fathiah Helmi, S.H., and Deed of Circular IBJV Shareholders Decree No. 24 on the date and from the same Notary and has been recorded in the Legal Entity Administration System at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-AH.01.10-0008953 dated 23 July 2019, effective from 23 July 2019, PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (formerly PT Verena Multi Finance Tbk) entered into a merger with an associated entity, namely PT IBJ Verena Finance where PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk becomes a surviving entity.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2021 – to date	Chairman of the Nomination and Remuneration Committee PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2021 – to date	Chairman of the Audit Committee PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2020 – to date	Chairman of the Risk Monitoring Committee PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2019 – to date	Independent Commissioner PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2016 – to date	Chief Executive Officer Moya Holdings Asia Limited
2011 – to date	President Director PT Tamaris Hidro
2008 – to date	Managing Partner PT Nura Kapital
2010 – 2019	Independent Commissioner PT IBJ Verena Finance*
2008 – 2011	Commissioner PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
2004 – 2008	President Director PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
2003 – 2004	Commissioner PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2002 - 2003	Commissioner PT Bank Niaga Tbk
2002	Commissioner PT Bank Permata Tbk
1999 – 2004	Deputy Chairman AMK (2002 – 2004) Senior Vice President (2001 – 2002) Vice President (2000 – 2001) Assistant Vice President (1999 – 2000) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
1997 – 1999	Vice President Research PT Pentasena Artha Sentosa
1996 – 1997	Vice President Research PT Amsteel Securities Indonesia
1992 – 1996	Head Research IBJ Indonesia Bank
1990 - 1992	Analyst PT Sun Hung Kai
1988	Credit Officer Bank of America, San Fransisco (USA)

BHINDAWATI GUNAWAN

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, 63 tahun, berdomisili di Jakarta. Sesuai keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, beliau diangkat sebagai Komisaris untuk periode 2024. Beliau merupakan lulusan jurusan Ekonomi Bisnis dari University of San Fransisco, pada tahun 1983.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 54.

Indonesian citizen, 63 years old, domiciled in Jakarta. In accordance with the decision of the Extraordinary GMS on March 21, 2024, She was appointed as Commissioner for the 2024 period. She is a graduate of Business Economics from the University of San Fransisco in 1983.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 54.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2024 – to date	Commissioner PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2024 – to date	President Commissioner PT Clipan Finance Indonesia Tbk
2016 – to date	Executive Management/Bancassurance Strategic Advisor PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
2010 – 2024	Vice President Director PT Panin Financial Tbk
2008 – 2016	Executive Vice President PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
1992 – 2008	Director PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
1986 – 1992	Deputy General Manager PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
1985 – 1986	Assistant Account Officer Bank of America NT & SA
1984 – 1985	Management Trainee Bank of America NT & SA

TAKESHI SASAKI*

Komisaris Utama
President Commissioner

Warga Negara Jepang, 63 tahun, berdomisili di Jepang. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juli 2022, Beliau diangkat kembali sebagai Komisaris Utama untuk periode 2022-2024. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Seikei, Tokyo, Jepang, pada tahun 1984.

Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali, serta Pemegang Saham Utama dapat dilihat pada halaman 54.

Japanese citizen, 63 years old, domiciled in Japan. In accordance with the resolution of the Annual GMS on 29 July 2022, he was reappointed as President Commissioner for the 2022-2024 period. He obtained a Bachelor of Economics degree from Seikei University, Tokyo, Japan, in 1984.

The Disclosure of affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Controlling Shareholder and Main Shareholders can be referred on page 54.

*) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, RUPS menyetujui pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.
Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") on March 21 2024, the GMS approved the resignation of Mr. Takeshi Sasaki as President Commissioner effective from the closing of the Extraordinary GMS.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2021 – 2024 (March)	President Commissioner PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2021 – 2024 (March)	Member of the Nomination and Remuneration Committee PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2019 – 2024 (March)	International Business Administration Department Mizuho Leasing Co., Ltd
2019 – 2021	Commissioner PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2016 – 2019	General Manager of International Dept. IBJ Leasing Co., Ltd (now Mizuho Leasing Co., Ltd)
2009	President & Director Japan-PNP Leasing & Finance Corp. (now PNB-Mizuho Leasing & Finance Corp.)
2006	General Manager of Computer & OA Dept. IBJ Leasing Co, Ltd (now Mizuho Leasing Co., Ltd)
2001	Executive Vice President Krung Thai IBJ Leasing Co, Ltd.
1989	Manager IBJ Leasing (USA) Inc.
1984	IBJ Leasing Co, Ltd. (now Mizuho Leasing Co., Ltd)

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi
Affiliation Relationship of Members of The Board of Commissioners and The Board of Directors

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relation with								Hubungan Keluarga dengan Family Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Komisaris / Board of Commissioners																
Yasuo Imaizumi*		√		√	√		√			√		√		√		√
Mohammad Syahrial		√		√		√		√		√		√		√		√
Bhindawati Gunawan**		√		√		√		√		√		√	√			√
Takeshi Sasaki***		√		√	√		√			√		√		√		√
Direksi / Board of Directors																
Konosuke Mizuta		√		√		√		√		√		√		√		√
Shunsuke Kojima		√		√		√		√		√		√		√		√
Andi Harjono		√		√		√		√		√		√		√		√
Ade Rafida Saulina S****		√		√		√		√		√		√		√		√
Yudi Gustiawan		√		√		√		√		√		√		√		√

*) Berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, RUPS menyetujui pengangkatan Bapak Yasuo Imaizumi selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.
Beliau memiliki hubungan afiliasi yang bersifat keuangan dengan Mizuho Leasing Co., Ltd selaku Pemegang Saham Pengendali dan salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan.
Saat ini Beliau menjabat sebagai *Senior Deputy General Manager in International Business Administration Department, Relationship Manager International Business Development Department, Director of Overseas Subsidiaries International Business Administration Department* di Mizuho Leasing Co., Ltd.
Based on the Extraordinary GMS dated March 21, 2024, the GMS approved the appointment of Mr. Yasuo Imaizumi as President Commissioner effective as of the closing of the Extraordinary GMS.
He has a financial affiliation with Mizuho Leasing Co., Ltd as the Controlling Shareholder and one of the Main Shareholders of the Company.
He currently serves as Senior Deputy General Manager in International Business Administration Department, Relationship Manager International Business Development Department, Director of Overseas Subsidiaries International Business Administration Department at Mizuho Leasing Co., Ltd.

**) Beliau memiliki hubungan afiliasi yaitu hubungan keluarga dengan Penerima Manfaat Akhir (UBO) PT Bank Pan Indonesia Tbk yang merupakan salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan.
She has affiliation which is family relation with the Ultimate Beneficiary (UBO) of PT Bank Pan Indonesia Tbk which is one of the Company's Main Shareholders.

***) Berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, RUPS menyetujui pengangkatan Bapak Yasuo Imaizumi selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.
Beliau memiliki hubungan afiliasi yang bersifat keuangan dengan Mizuho Leasing Co., Ltd selaku Pemegang Saham Pengendali dan salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan. Beliau menjabat sebagai *International Business Administration Department* di Mizuho Leasing Co., Ltd untuk periode 2019 – 2024 (Maret).
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, RUPS Luar Biasa menyetujui pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.
Based on the Extraordinary GMS dated March 21, 2024, the GMS approved the appointment of Mr. Yasuo Imaizumi as President Commissioner effective as of the closing of the Extraordinary GMS.
He has a financial affiliation with Mizuho Leasing Co., Ltd as the Controlling Shareholder and one of the Main Shareholders of the Company. He served as the International Business Administration Department at Mizuho Leasing Co., Ltd for period 2019 – 2024 (March).
Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") dated March 21, 2024, the Extraordinary GMS approved the resignation of Mr. Takeshi Sasaki as President Commissioner as of the closing of the Extraordinary GMS.

****) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 7 November 2024, RUPS menyetujui Perubahan Anggota Direksi Perseroan yaitu menerima pengunduran diri Ibu Ade Rafida S. dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 30 Agustus 2024.
Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") on November 7, 2024, the GMS approved the Changes of the Company's Member of the Board of Directors, namely to accept the resignation of Mrs. Ade Rafida S. from her position as Director of the Company's effective as of August 30, 2024.

Struktur Organisasi
Organization Structure

Per 21 April 2025 / As of April 21, 2025

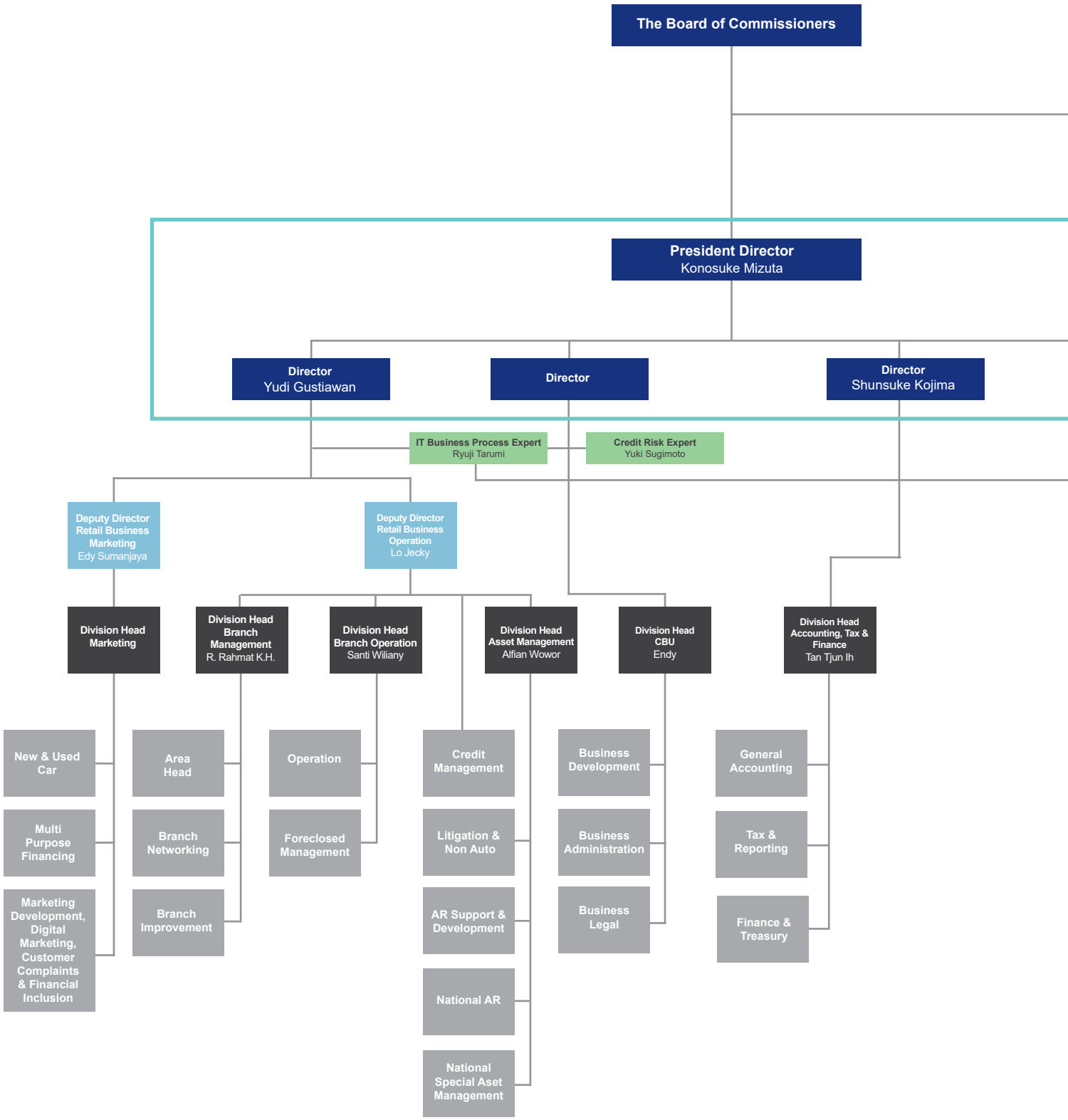

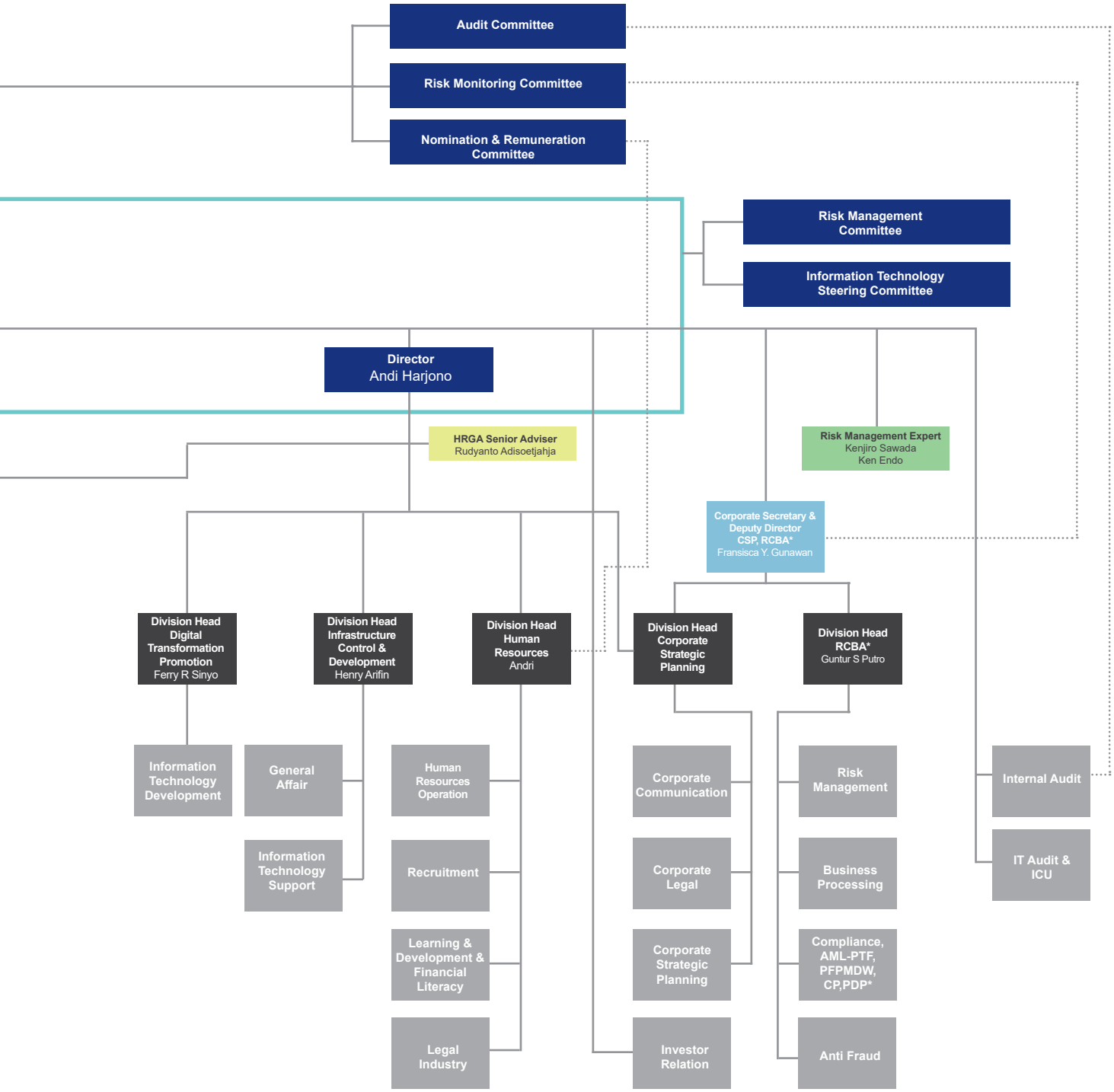

Notes :
CSP : Corporate Strategic Planning
RCBA : Risk Management, Business Processing, Compliance, AML-PTF, PFPMDW, CP, PDP & Anti Fraud
AML-PTF : Anti Money Laundering – Prevention of the Terrorist Financing
PFPMDW : Prevention of Financing of Proliferation of Mass Destruction Weapons
CP : Customer Protection
PDP : Personal Data Protection

Struktur Kepemilikan Saham
Shareholding Structure

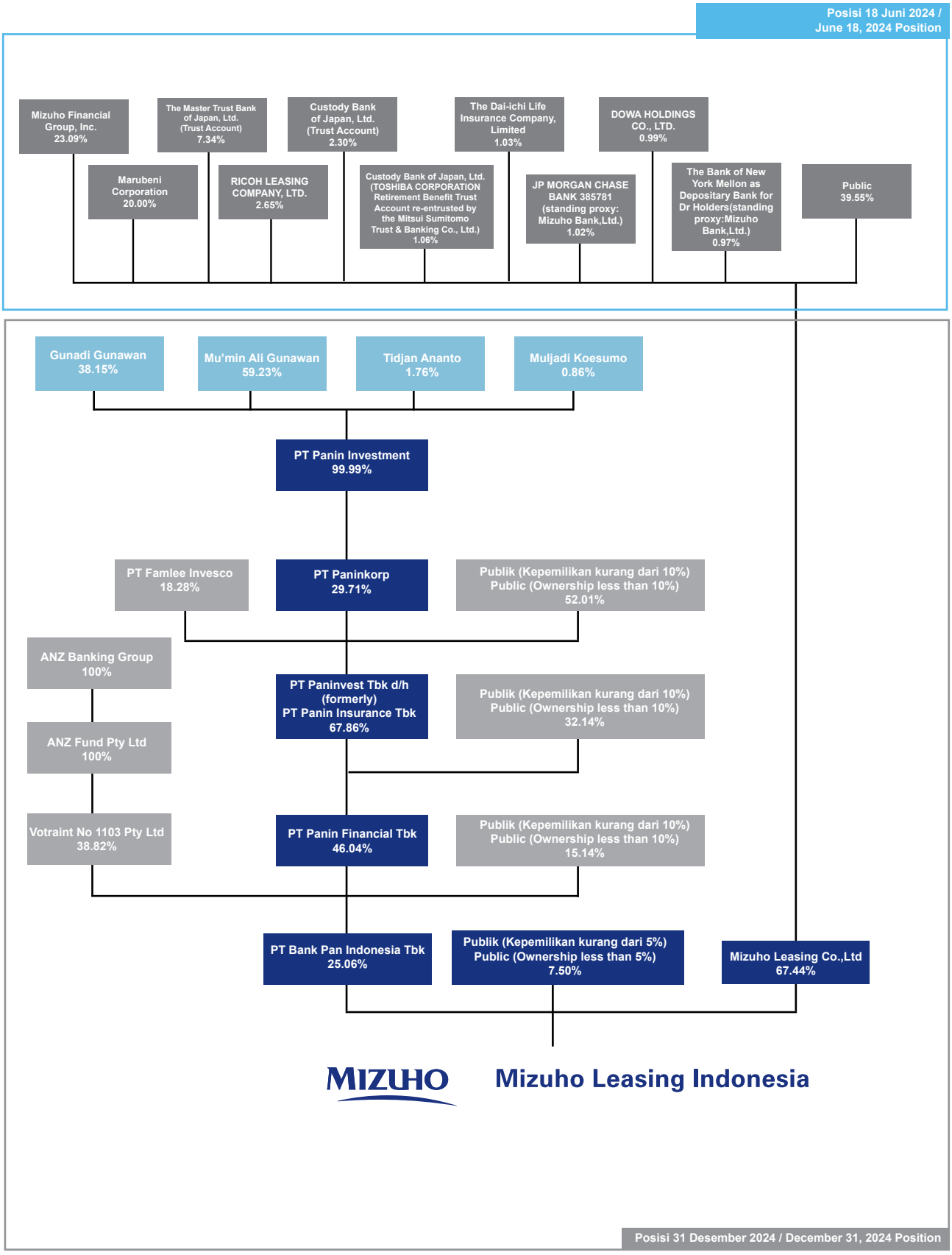

Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Public Accountant Services and Public Accounting Firms

Periode Period	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firms	Akuntan Publik Public Accountant	Alamat Kantor Akuntan Publik Public Accountant Office Address	Jasa yang Diberikan Services Provided	Biaya Jasa Service Fee
2024	Liana Ramon Xenia & Rekan (Anggota Jaringan Deloitte Asia Pacific bagian Jaringan Deloitte) Liana Ramon Xenia & Partners (Member Firm of Deloitte Asia Pacific part Deloitte Network)	Bayu M Dayat	The Plaza Office Tower, Lantai 32, Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat 10350 - Indonesia Telp. : +6221-50818000 Fax. : +6221-29928300	• Audit Laporan Keuangan Posisi Desember 2024 Audit Financial Report Position December 2024 • Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPKK) Report on Implementing the Prudence Principle	Rp1,809,300,000 Rp58,275,000

Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal
Capital Market Supporting Institutions and Professions

Notaris / Notary
Fathiah Helmi, SH
Graha Irama Lt.6 – Blok C
Jl. H.R Rasuna Said Kav 1–2 Blok X–1
Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
Telp. : +6221-52907304

Biro Administrasi Efek / Share Registrar
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47–48.
Jakarta Selatan 12930 - Indonesia
Telp. : +6221-2525666
Fax. : +6221-2525028
Email : rsrbae@registra.co.id
Website : www.registra.co.id

Kustodian / Custodian
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53
Jakarta Selatan 12190 - Indonesia
Telp. : +62 21 515 2855
Fax. : +62 21 5299 1199
Website : www.ksei.co.id

Informasi Entitas Anak
Subsidiary Information

Per 31 Desember 2024, Perseroan tidak memiliki Entitas Anak.

As of December 31, 2024, The Company did not have any Subsidiaries.

Informasi Kepemilikan Saham
Share Ownership Information

Informasi kepemilikan saham per 31 Desember 2024, sebagai berikut :

Information on share ownership per December 31, 2024, was as follows:

Nama Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Percentage
Mizuho Leasing Co.,Ltd.	3,835,346,804	67.44
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1,425,455,604	25.06
Masyarakat	426,551,589	7.50
Total	**5,687,353,997**	**100.00**

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Share Ownership

Per 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024, tidak ada kepemilikan saham Perseroan oleh Dewan Komisaris maupun Direksi yang menjabat pada saat buku Laporan Tahunan ini diterbitkan.

As of January 1, 2024 to December 31, 2024, there was no ownership of the Company's shares by the Board of Commissioners or Board of Directors who served at the time this Annual Report was published.

Daftar Pemegang Saham Berdasarkan Klasifikasi
Shareholders List Based on Classification

Pemegang Saham Lokal Local Shareholders	Jumlah Pemegang Efek Number of Securities Holders	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Percentage
Individu Individual	1,040	110,211,659	1.94
Institusi Institution	8	1,732,415,444	30.46
Sub Total	**1,048**	**1,842,627,103**	**32.40%**
Pemegang Saham Asing **Foreign Shareholders**	**Jumlah Pemegang Efek** **Number of Securities Holders**	**Jumlah Saham** **Number of Shares**	**Persentase** **Percentage**
Individu Individual	2	33,000	0.00
Institusi Institution	6	3,844,693,894	67.60
Sub Total	**8**	**3,844,726,894**	**67.60**
TOTAL	**1,056**	**5,687,353,997**	**100.00%**

Kronologis Pencatatan Saham
Chronology of Shares Listing

Perseroan melakukan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada 25 Juni 2008 sejumlah 1.002.000.000 lembar saham melalui Penawaran Umum Perdana atas 460.000.000 lembar saham Perseroan kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp100,- per lembar saham dan harga penawaran sebesar Rp100,-. Penawaran Umum Perdana tersebut juga disertai dengan penerbitan 46.000.000 Waran Seri I. Berikut ini adalah kronologis pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia hingga akhir tahun buku.

The Company listed its initial shares on the Indonesia Stock Exchange on June 25, 2008 totaling 1,002,000,000 shares through an Initial Public Offering of 460,000,000 shares of the Company to the public with a nominal value of Rp100.- per share and an offer price of Rp100.-. The Initial Public Offering was also accompanied by the issuance of 46,000,000 Series I Warrants. The following is a chronology of the listing of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange until the end of the fiscal year.

Tanggal Date	Aksi Korporasi Corporate Actions	Nominal Nominal	Harga Pelaksanaan Exercised Price	Saham Tambahan Additional Shares	Jumlah Saham Number of Shares
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Before Initial Public Offering	Rp100	-	Rp100	542,000,000
25 Jun 2008	Penawaran Umum Perdana Initial Public Offering	Rp100	Rp100	460,000,000	1,002,000,000
4 Sep 2009	Konversi Waran Warrant Conversion	Rp100	Rp110	20	1,002,000,020
24 Jun 2010	Konversi Waran Warrant Conversion	Rp100	Rp110	332	1,002,000,352
18 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	18,590	1,002,018,942
19 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	101,958	1,002,120,900
22 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	872,367	1,002,993,267
23 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	4,702,146	1,007,695,413
24 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	213,918,728	1,221,614,141
26 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	467,477,166	1,689,091,307
29 May 2017	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	Rp100	Rp112	896,069,601	2,585,160,908
15 Jan 2019	Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II	Rp100	Rp140	283	2,585,161,191
16 Jan 2019	Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II	Rp100	Rp140	2,491	2,585,163,682
18 Jan 2019	Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II	Rp100	Rp140	2,522,210,381	5,107,374,063
21 Jan 2019	Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II	Rp100	Rp140	20	5,107,374,083
24 Jan 2019	Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II Public Offering for Capital Increase by Giving Pre-emptive Rights II	Rp100	Rp140	579,979,914	5,687,353,997

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Other Securities Listings

Pada tahun 2024, Perseroan tidak menerbitkan atau mencatatkan efek lainnya. Berikut ini adalah kronologis pencatatan efek lainnya.

In 2024, the Company did not issue or list any other securities. The chronology of other securities listings were as follow.

No.	Obligasi Bonds	Seri Series	Nilai Amount	Bunga Interest	Jangka Waktu Tenor	Peringkat Rating	Jatuh Tempo Due Date	Status Status	Bursa Stock Exchange
1	Obligasi Verena Multi Finance I Tahun 2011 Verena Multi Finance Bond I Year 2011	A	Rp65 miliar/billion	9.5%	370 hari/days	idA (Single A)	22 Mar 2012	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
		B	Rp135 miliar/billion	10.5%	24 bulan/months	idA (Single A)	18 Mar 2013	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
		C	Rp300 miliar/billion	11.25%	36 bulan/months	idA (Single A)	18 Mar 2014	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
	Total Rp500 miliar/billion								
2	Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012 Verena Multi Finance Phase I Shelf Registration Bonds I Year 2012	A	Rp50 miliar/billion	7.25%	370 hari/days	idA (Single A)	21 Dec 2013	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
		B	Rp227 miliar/billion	9.00%	36 bulan/months	idA- (Single A Minus)	11 Dec 2015	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
		C	Rp23 miliar/billion	9.05%	48 bulan/months	idA- (Single A Minus)	11 Dec 2016	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
	Total Rp300 miliar/billion								
3	Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 Verena Multi Finance Phase II Shelf Registration Bonds I Year 2013	A	Rp113 miliar/billion	11.84%	36 bulan/months	idA- (Single A Minus; Stable Outlook)	24 Dec 2016	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
		B	Rp40 miliar/billion	12.15%	48 bulan/months	idA- (Single A Minus; Stable Outlook)	24 Dec 2017	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
	Total Rp153 miliar/billion								
4	Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 Verena Multi Finance Phase III Shelf Registration Bonds I Year 2014	A	Rp3 miliar/billion	11.00%	370 hari/days	idA- (Single A Minus)	29 Mar 2015	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
		B	Rp132 miliar/billion	12.55%	36 bulan/months	idA- (Single A Minus)	19 Mar 2017	Sudah Lunas /Paid	PT Bursa Efek Indonesia
	Total Rp135 miliar/billion								

No.	Medium Term Notes (MTN)	Nilai Amount	Bunga Interest	Jangka Waktu Tenor	Peringkat Rating	Jatuh Tempo Due Date	Status Status	Bursa Stock Exchange
1	Medium Term Notes I Verena Multi Finance Tahun 2011 dengan Tingkat Bunga Tetap	Rp200 miliar/billion	11.00%	3 tahun/years	idA- (Single A Minus)	15 Dec 2014	Sudah Lunas /Paid	-
2	Medium Term Notes II Verena Multi Finance Tahun 2017	Rp.100 miliar/billion	10.00%	2 tahun/years	idA (Single A)	5 Dec 2019	Sudah Lunas /Paid	-

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Kunci sukses Perseroan untuk terus tumbuh dan menciptakan nilai jangka panjang secara maksimal terletak pada kemampuan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talenta-talenta kompeten dan memiliki loyalitas tinggi.

Karena itu, Perseroan menyadari rekrutmen, pengembangan Sumber Daya Manusia ("SDM") dan kesempatan berkarir sangatlah penting dan memiliki peran penting dengan pertumbuhan dan kesuksesan Perseroan.

Untuk itu, penerapan budaya perusahaan dalam bentuk penanaman nilai dan prinsip serta pelaksanaannya akan membawa manfaat tidak hanya terhadap Perseroan tetapi juga bagi individu karyawan. Perseroan secara terencana dan berkesinambungan melakukan pengembangan SDM dan potensi-potensinya, yaitu:

Perencanaan SDM
- Rekrutmen
- Pelatihan dan pengembangan potensi karyawan
- Kaderisasi dan *talent management*
- Penilaian pekerjaan, penghargaan, dan sanksi

Komposisi dan Jenjang Karyawan
Pada 2024, jumlah karyawan Perseroan bertambah dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 767 orang dari sebelumnya 711 orang. Detail dari struktur karyawan pada 2022, 2023 dan 2024 tersaji dalam gambaran di bawah ini:

The key factors toward the Company's success in maintaining its growth and creating maximum long-term values were based on the ability to attract, develop, and retain competent personnels with high loyalty.

Therefore, the Company realized that Recruitment, Human Resource ("HR") development, and career opportunities are essential and played a major role to the Company's development and success.

For such objectives, the implementation of co rporate culture by instilling values and principles, would bring benefits not only for the Company but also to them as individuals. The Company had planned and continuously developed HR and their potentials, namely:

HR Planning
- Recruitment
- Training and developing employee potential
- Regeneration and talent management
- Job assessments, rewarding and sanctioning

Employee Composition and Level
In 2024, the number of the Company's employees increased from the previous year, namely to 767 people from the previous 711 people. The details of the employee structure in 2022, 2023 and 2024 are presented in the picture below:

Komposisi Menurut Jabatan
Composition Based on Positions

Jabatan Position	2022		2023		2024	
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
Deputy Director	3	0.5%	2	0.3%	3	0.4%
General Manager	10	1.5%	11	1.6%	10	1.3%
Manager	56	8.4%	58	8.2%	61	8.0%
Supervisor	145	21.8%	166	23.3%	179	23.3%
Officer	410	61.7%	431	60.6%	467	60.9%
Staff	40	6.0%	43	6.0%	47	6.1%
Total	**664**	**100.0%**	**711**	**100.0%**	**767**	**100.0%**

Komposisi Menurut Jenjang Pendidikan
Composition Based on Academic Backgrounds

Pendidikan Academic Backgrounds	2022		2023		2024	
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
S2 / Master	5	0.8%	5	0.7%	7	0.9%
S1 / Bachelor	419	63.1%	453	63.7%	494	64.4%
DIPLOMA	84	12.7%	93	13.1%	98	12.8%
SMU/SMK/SMEA/STM High School/Vocational School/Economic Vocational School/Technical High School	154	23.2%	158	22.2%	163	21.3%
SD & SMP Elementary School Junior & High School	2	0.3%	2	0.3%	5	0.7%
Total	**664**	**100.0%**	**711**	**100.0%**	**767**	**100.0%**

Komposisi Menurut Jenjang Usia
Composition Based on Ages

Usia Ages	2022		2023		2024	
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
18 - 25	59	8.9%	70	9.8%	51	6.6%
26 - 35	285	42.9%	294	41.4%	311	40.5%
36 - 45	247	37.2%	269	37.8%	284	37.0%
> 45	73	11.0%	78	11.0%	121	15.8%
Total	**664**	**100.0%**	**711**	**100.0%**	**767**	**100.0%**

Komposisi Menurut Status Kepegawaian
Composition Based on Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	2022		2023		2024	
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
Pegawai Tetap / Permanent Employee	502	75.6%	563	79.2%	631	82.2%
Pegawai Kontrak / Contract Employee	162	24.4%	148	20.8%	136	17.7%
Total	**664**	**100.0%**	**711**	**100.0%**	**767**	**100.0%**

Komposisi Menurut Jenis Kelamin
Composition Base on Gender

Jenis Kelamin Gender	2022		2023		2024	
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
Laki-laki / Male	526	79.2%	565	79.5%	614	80.0%
Perempuan / Female	138	20.8%	146	20.5%	153	19.9%
Total	**664**	**100.0%**	**711**	**100.0%**	**767**	**100.0%**

Pengembangan Kompetensi Karyawan

Perseroan senantiasa mengembangkan materi dan sarana pelatihan untuk semua pekerja. Beberapa metode yang digunakan dalam penyampaian materi-materi pelatihan, yaitu melalui *video learning*, *video conference,* dan *e-learning*. Pengembangan SDM tidak hanya dilakukan melalui pelatihan tatap muka, baik secara langsung maupun virtual, namun juga melalui on *job training, tutoring, rotasi, coaching, counseling, dan mentoring*. Materi-materi yang disiapkan tidak hanya berorientasi pada industri pembiayaan saja, namun juga materi *soft skills* seperti kepemimpinan, pengembangan kepribadian, dan komunikasi. Media *e-learning* menjadi salah satu solusi dan strategi yang ditempuh untuk pembelajaran yang berkelanjutan.

Perseroan senantiasa menyelenggarakan kegiatan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing ("TKA") kepada Tenaga Kerja Lokal lainnya guna proses didalam Alih Pengetahuan (*Transfer Knowledge*).

Berikut adalah program pelatihan yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2024:

Employee Development Trainings

The Company continues to develop training materials and tools for all employees. Several methods are used in the delivery of training materials, namely through video learning, video conferencing, e-learning. HR development is not only done through face-to-face training, both in person and virtual, but also through on-job training, tutoring, rotation, coaching, counseling, and mentoring. The materials prepared are not only oriented towards the financing industry, but also soft skills materials such as leadership, personality development, and communication. e-learning media is one of the solutions and strategies adopted for continuous learning.

The Company always organizes knowledge transfer activities for foreign workers ("TKA") to other local workers for the process of Transfer Knowledge.

These were the training programs that had been carried out throughout the year of 2024:

	Klasifikasi Training Classification	Program	Peserta Participant
1	Pelatihan Sertifikasi Certification Training	26	82
2	Program Perencanaan Pengembangan Individu Individual Development Planning Program	36	266
3	Program Orientasi Karyawan Baru New Employee Orientation Program	12	185
4	Program Pengembangan Karakter dan Budaya Character and Culture Building Program	28	2308
5	Pelatihan *Hard Skill* Hard Skill Training	15	400
6	Program Alih Pengetahuan TKA Foreign Worker Transfer Knowledge	3	20
	Total	**120**	**3261**

Teknologi Informasi
Information Technology

Dukungan Teknologi Informasi

Dalam era digital yang terus berkembang pesat, Teknologi Informasi ("TI") memegang peranan krusial dalam menunjang kelancaran operasional dan daya saing Perseroan. Perseroan menyadari betul pentingnya investasi dan pengelolaan TI yang efektif. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya untuk menghadirkan dukungan TI yang handal dan inovatif guna mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan.

Information Technology Support

In today's rapidly evolving digital era, Information Technology (IT) plays a crucial role in supporting smooth operations and enhancing the Company's competitiveness. We fully recognize the importance of effective IT investment and management. Therefore, we continuously strive to provide reliable and innovative IT support to help achieve the Company's business objectives.

Pengembangan Teknologi Informasi

Pengembangan teknologi informasi merupakan bagian integral dari strategi bisnis Perseroan. Perseroan berupaya untuk memanfaatkan teknologi terkini guna mencapai tujuan-tujuan strategis Perseroan, seperti meningkatkan pangsa pasar, memperluas jangkauan layanan, dan memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Laporan ini akan menjelaskan bagaimana pengembangan teknologi informasi telah berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Pengembangan 2024

Sepanjang tahun 2024, Perseroan telah mencapai beberapa pencapaian signifikan dalam bidang dukungan teknologi informasi, antara lain:

1. Pengembangan Sistem: Perseroan telah mengembangkan dan mengimplementasikan beberapa sistem maupun fungsi baru yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis perusahaan. Sistem-sistem ini mencakup:
   - Memperluas kanal pembayaran ke Bank BNI dan BRI.
   - Digitalisasi dan meningkatkan efisiensi dalam proses *Know-Your-Customer* (“KYC”) menjadi proses yang lebih terintegrasi dengan pihak ketiga dan penggunaan pengenalan wajah terintegrasi dengan DUKCAPIL.
   - Meningkatkan proses kontrol dan pengawasan terhadap anggaran sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi *fraud*.
   - Menyesuaikan terhadap perhitungan untuk PPh-21 (Pajak Penghasilan)
   - Mengakomodir ruang kerja sama dengan pihak ketiga berupa penawaran produk barang atau jasa yang ditawarkan bersamaan dengan produk pembiayaan.
   - Melakukan serangkaian kegiatan evaluasi atas proses penarikan unit yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan pengendalian internal guna meningkatkan kualitas pengawasan agar dapat berjalan secara lebih efisien.
2. Modifikasi HRIS (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia) untuk memfasilitasi perhitungan, penerapan dan pelaporan PPh 21 yang menggunakan skema TER (Tarif Efektif Rata-Rata).
3. Pengembangan Infrastruktur: Perseroan telah berhasil meningkatkan kapasitas dan keandalan infrastruktur TI Perseroan, termasuk jaringan, *server*, dan perangkat keras lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan kinerja sistem TI yang optimal bagi seluruh karyawan.

Information Technology Development

The development of information technology is an integral part of the Company’s business strategy. The Company seeks to leverage the latest technologies to achieve strategic goals, such as increasing market share, expanding service reach, and delivering the best possible customer experience. This report outlines how our IT development initiatives have contributed to the achievement of these objectives.

2024 Development

Throughout 2024, the Company achieved several significant milestones in the area of IT support, including:

1. System Development: The Company developed and implemented several new systems and functionalities to improve the efficiency and effectiveness of business processes. These systems include:
   - Expansion of payment channels to Bank BNI and BRI.
   - Digitalization and improved efficiency of the Know-Your-Customer (“KYC”) process, enabling better integration with third parties and the use of facial recognition integrated with the national civil registry (DUKCAPIL).
   - Enhanced control and monitoring of budget processes to improve efficiency and reduce the risk of fraud.
   - Adjustment to accommodate PPh-21 (Article 21 Income Tax) calculations.
   - Facilitated cooperation opportunities with third parties offering products or services bundled with financing products;
   - Conducted a series of evaluations of the unit repossession process, serving as a reference to improve internal controls and enhance the efficiency of the supervisory functions.
2. HRIS Modifications (Human Resources Information System) to support the calculation, application, and reporting of PPh 21 using the Average Effective Rate TER (Average effective rate).
3. Infrastructure Development: The Company successfully enhanced the capacity and reliability of its IT infrastructure including networks, servers, and other hardware this is to ensure optimal availability and performance for all employees.

Pengembangan ke Depan

Perseroan akan terus fokus pada pengembangan dan peningkatan dukungan teknologi informasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan. Beberapa inisiatif yang akan Perseroan lakukan antara lain:

1. *CI/CD (Continuous Improvement/Continuous Development) pada:*
   a. *Core System*
   b. *Mobile Order - Survey - Collection*
   c. *Telephony System: Service - Marketing - Verification - Collection.*
   d. *RepoLink*
2. Untuk meningkatkan kualitas kerja dari Pekerja dan menurunkan tingkat *human error*, Perseroan akan memanfaatkan *Robot Process Automation* (RPA) dalam membantu aktivitas pekerjaan yang bersifat rutin, masif, dan *time consuming*.
3. Melakukan transformasi digital pada proses kerja operasional yang masih dilakukan manual diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produktivitas serta mengurangi potensi *fraud*.
4. Otomatisasi beberapa proses *soft reminder* seperti untuk *collection*, *marketing campaign*, dan proses KYC.
5. Melakukan evaluasi pada beberapa sistem informasi yang digunakan yang bertujuan untuk pembaharuan teknologi, peningkatan fungsi, dan efisiensi proses.

Future Development

The Company will continue to focus on the development and enhancement of IT support to foster business growth. Some intiatives will be implemented by the Company include:

1. CI/CD (Continuous Improvement/Continuous Development) pada:
   a. Core System
   b. Mobile Order - Survey - Collection
   c. Telephony System: Service - Marketing - Verification - Collection.
   d. RepoLink
2. To improve employee performance and reduce human error, the Company will utilize Robotic Process Automation (RPA) to assist in repetitive, high-volume, and time-consuming tasks.
3. Digital transformation of operational processes that are still performed manually is expected to improve productivity efficiency and effectiveness while minimizing the potential for fraud.
4. Automation of several soft reminder processes, such as for collections, marketing campaigns, and KYC.
5. Evaluation of existing information systems for the purpose of technology upgrades, functionality enhancement, and process efficiency.

6. Melakukan pengkinian terhadap sertifikat ISO 27001:2013 menjadi ISO 27001:2022.
7. Melakukan peningkatan keamanan siber secara berkesinambungan melalui kesadaran akan penggunaan TI, penyempurnaan SOP, penambahan perangkat keras maupun pemutakhiran perangkat lunak.

6. Upgrading ISO certification from ISO 27001:2013 to ISO 27001:2022.
7. Continuous improvement of cybersecurity through increased awareness in IT usage, refinement of SOPs, and upgrades in both hardware and software systems.

Keanggotaan Pada Asosiasi
Association Membership

No.	Nama Asosiasi Association Name	Keterangan Description
1.	APPI	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Sebagai anggota No. 1191/JKT/05 Association of Indonesian Financing Companies As member No. 1191/JKT/05
2.	RAPINDO	PT. Rapi Utama Indonesia Sebagai anggota No.041/Rapindo-1/12/2024 PT. Rapi Utama Indonesia As member No.041/Rapindo-1/12/2024
3.	ICSA	Indonesia *Corporate Secretary Association* Sebagai anggota No.28417 Indonesia Corporate Secretary Association As member No.28417
4.	LAPS SJK	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Sebagai anggota No. K/157/IX/2023 Alternative Institution for Dispute Resolution in the Financial Service Sector No. K/157/IX/2023

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION
AND ANALYSIS

Uraian Per Segmen
Description Per Segment

Ruang lingkup kegiatan utama Perseroan meliputi:
1. Kegiatan Usaha Utama
   - Pembiayaan Investasi
   - Pembiayaan Modal Kerja
   - Pembiayaan Multiguna
   - Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK
2. Selain kegiatan usaha utama diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa (*fee*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perseroan memiliki 2 pilar bisnis, sebagai berikut:
1. Unit Bisnis Ritel
2. Unit Bisnis Korporasi

Izin usaha sebagai lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.994/ KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993 yang kemudian telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 Jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010 Jo. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-806/NB.11/2022 tanggal 12 Desember 2022.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan nasional, Perseroan dapat meningkatkan kinerjanya secara signifikan pada tahun 2024 yang dapat dilihat dari peningkatan jumlah piutang dan pendapatan per uraian segmen usaha yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

The scope of the Company's main activities includes:
1. Main Business Activities
   - Investment Financing
   - Working Capital Financing
   - Multipurpose Financing
   - Other Financing Business Activities Based on OJK Approval
2. In addition to the main business activities above, the Company can carry out supporting business activities to conduct operating leases and/or fee-based activities as long as they do not conflict with the laws and regulations in the financial services sector.

The Company has 2 business pillars, as follows:
1. Retail Business Unit
2. Corporate Business Unit

The business license as a financial institution owned by the Company is as stated in the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.994 / KMK.017 / 1993 dated December 30, 1993 which has subsequently been amended by the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. Kep-161 / KM.6 / 2004 dated 4 May 2004 Jo. Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. Kep-654 / KM.10 / 2010 dated 9 December 2010 Jo. Copy of Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-806/NB.11/2022 dated December 12, 2022.

In the midst of global and national economic uncertainty, the Company can significantly improve its performance in 2024 which can be seen from the increase in total receivables and income per business segment description which can be seen in the table below.

Total Piutang Pembiayaan / Total Financing Receivables

Keterangan Description	2022	2023	2024
Piutang Pembiayaan (dalam miliar Rupiah) Financing Receivables (in billion Rupiah)	2,183.49	2,615.29	3,094.02
Volume (dalam unit) Volume (in units)	17,089	18,327	19,596
Pendapatan Pembiayaan (dalam miliar Rupiah) Financing Income (in billion Rupiah)	270.35	320.91	385.70

Pembiayaan Konsumen / Consumer Financing

Keterangan Description	2022	2023	2024
Piutang Pembiayaan Konsumen (dalam miliar Rupiah) Finance Lease Receivables (in billion Rupiah)	1,472.68	1,764.76	2,137.77
Volume (dalam unit) Volume (units)	16,768	18,069	19,245
Pendapatan Pembiayaan Konsumen (dalam miliar Rupiah) Finance Lease Income (in billion Rupiah)	224.00	265.37	320.99

Sewa Pembiayaan / Finance Lease

Keterangan Description	2022	2023	2024
Puitang Sewa Pembiayaan (dalam miliar Rupiah) Finance Lease Receivables (in billion Rupiah)	710.81	850.53	956.25
Volume (dalam unit) Volume (units)	321	258	351
Pendapatan Sewa Pembiayaan (dalam miliar Rupiah) Finance Lease Income (in billion Rupiah)	46.35	55.54	64.71

Uraian Kinerja Keuangan Perseroan
Description of Company Financial Performance

Aset

Per 31 Desember 2024, Perseroan mencatat total aset sebesar Rp3.210,52 miliar, naik sebesar 14,92% dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.793,58. Kenaikan aset terutama disebabkan oleh peningkatan piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan. Di sisi lain, kas dan setara kas mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, demikian juga aset derivatif.

Piutang pembiayaan konsumen - bersih naik sebesar 20,32% dari Rp1.730,18 miliar naik menjadi Rp2.081,77 miliar sejalan dengan peningkatan piutang pembiayaan konsumen baru Unit Bisnis Ritel di tahun 2024. Piutang sewa pembiayaan - bersih naik sebesar 8,18% dari Rp813,26 miliar naik menjadi Rp879,80 miliar sejalan dengan peningkatan piutang sewa pembiayaan baru Unit Bisnis Korporasi di tahun 2024. Kas dan setara kas turun sebesar 19,26% dari Rp50,36 miliar menjadi Rp40,66 miliar. Aset derifativ turun sebesar 52,58% dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp7,95 miliar menjadi Rp3,77 milliar per 31 Desember 2024.

Rincian dan komposisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Asset

As of December 31, 2024, the Company recorded total assets of Rp3,210.52 billion, an increase of 14.92% compared to the previous year as of December 31, 2023 of Rp2,793.58 billion. The increase in assets was mainly due to an increase in consumer financing receivables and finance lease receivable. On the other hand, cash and cash equivalents decreased compared to 2023, as well as derivative assets.

Consumer financing receivables - net increased by 20.32% from Rp1,730.18 billion to Rp2,081.77 billion in line with the increasing in new consumer financing receivables of Retail Business Unit in 2024. Finance lease receivables - net increased by 8.18% from Rp813.26 billion to Rp879.80 billion in line with the increasing in new Finance lease receivables of Corporate Business Unit in 2024. Cash and cash equivalents increased by 19.26% from Rp50.36 billion to Rp40.66 billion. Derivative assets decreased by 52.58% compared to the previous year as of December 31, 2023, which was Rp7.95 billion become Rp3.77 billion as of 31 December 2024.

Details and composition of the Company's assets as at 31 December 2024 and 2023 are as follows:

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain / in billion Rupiah except otherwise stated)

Aset Assets	2023	2024	Perubahan / Changes
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalent	50.36	40.66	(19.26%)
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih / Consumer Financing Receivables - Net	1,730.18	2,081.77	20.32%
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih / Finance Lease Receivables - Net	813.26	879.80	8.18%
Piutang lain-lain - Bersih / Other Receivables - Net	82.48	97.22	17.87%
Biaya Dibayar di Muka / Prepaid Expenses	2.61	2.95	13.03%
Aset Pajak Tangguhan / Deferred Tax Assets	11.66	15.76	35.16%
Aset Tetap - Bersih / Property and equipment - Net	51.81	48.32	(6.74%)
Aset Derivatif / Derivative Assets	7.95	3.77	(52.58%)
Aset Hak Guna - Bersih / Right-of-Use Assets - Net	32.11	29.34	(8.63%)
Aset Lain-lain / Other Assets	11.16	10.93	(2.06%)
Jumlah Aset / Total Assets	**2,793.58**	**3,210.52**	**14.92%**

Liabilitas dan Ekuitas

Per 31 Desember 2024, Perseroan mencatat total liabilitas sebesar Rp2.466,53 miliar, naik sebesar 20,72% dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.043,10 miliar. Kenaikan liabilitas terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank sebesar 21,01% dari Rp1.939,81 miliar menjadi Rp2.347,42 miliar sejalan dengan kenaikan piutang pembiayaan. Di sisi lain, utang lain-lain naik sebesar 25,58% dari Rp46,37 miliar menjadi Rp58,23 miliar. Total ekuitas sebesar Rp743,99 miliar juga mengalami penurunan sebesar 0,86% dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp750,48 miliar. Penurunan ekuitas terutama disebabkan oleh menurunnya saldo laba sehubungan dengan rugi bersih tahun berjalan tahun 2024.

Liability and Equity

As of 31 December 2024, the Company recorded total liabilities of Rp2,466.53 billion, an increase of 20.72% compared to the previous year as of 31 December 2023 of Rp2,043.10 billion. The increase in liabilities was due to the 21.01% increase in bank loan from Rp1,939.81 billion to Rp2,347.42 billion which in line with increasing in financing receivables. On the other hand, other payables increase by 25.58% from Rp46,37 billion to Rp58,23 billion. Total equity, which is Rp743.99 billion as of December 31, 2024 also decreasing by 0.86% compared to the previous year as of December 31, 2023, which was Rp750.48 billion. The decreasing equity was mainly due to a decreasing of retained earning in connection with net loss for the year 2024.

Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Details of the Company's total liabilities as of December 31 2024 and 2023 as follows:

Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity	2023	2024	Perubahan Changes
Utang Bank / Bank Loans	1,939.81	2,347.42	21.01%
Utang Usaha / Trade Payables	0.97	4.49	362.89%
Liabilitas Derivatif / Derivative Liabilities	0.23	0	(100.00%)
Utang Lain-lain / Other Payables	46.37	58.23	25.58%
Biaya masih harus dibayar / Accrued Expenses	11.90	9.36	(21.34%)
Utang Pajak / Taxes Payable	2.05	0.75	(63.41%)

Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity	2023	2024	Perubahan Changes
Liabilitas Sewa / Lease Liabilities	27.30	24.62	(9.82%)
Liabilitas Imbalan pasca-Kerja / Post-employment Benefits Liabilities	14.47	21.66	49.69%
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	2,043.10	2,466.53	20.72%
Jumlah Ekuitas / Total Equity	750.48	743.99	(0.86%)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	**2,793.58**	**3,210.52**	**14.92%**

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

Jumlah Rugi komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp6,49 miliar, turun sebesar 110,71% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 laba sebesar Rp60,59 miliar. Penurunan terutama disebabkan penurunan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp3,77 miliar dan penurunan laba bersih Perseroan sebesar Rp63,31 miliar.

Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

The Company's total comprehensive loss for the year ended December 31, 2024 was Rp6.49 billion, a decrease of 110.71% compared to the year ended December 31, 2023 which was net profit Rp60.59 billion. The decrease was mainly due to the decrease in other comprehensive income of Rp3.77 billion and an decrease in the Company's net profit of Rp63.31 billion.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income			
Pendapatan Revenues	2023	2024	Perubahan Changes
Pembiayaan Konsumen / Consumer Financing	265.37	320.99	20.96%
Sewa Pembiayaan / Finance Lease	55.54	64.71	16.51%
Administrasi dan provisi / Administration and provision	45.41	53.01	16.74%
Penalti / Penalty	20.75	19.73	(4.92%)
Bunga / Interest	0.33	0.35	6.06%
Pendapatan Lain-lain / Other Income	13.94	9.86	(29.27%)
Jumlah / Total	**401.34**	**468.65**	**16.77%**
Beban Expenses	2023	2024	Perubahan Changes
Bunga dan keuangan / Interest and financing charges	105.23	134.32	27.64%
Umum dan administrasi / General and administrative	69.64	60.68	(12.87%)
Kepegawaian / Personnel	112.20	126.18	12.46%
Penyisihan kerugian penurunan nilai / Provision for impairment losses	52.16	152.06	191.53%
Beban lain-lain / Other expenses	0.88	0.45	(48.86%)
Jumlah beban / Total Expenses	340.11	473.69	39.28%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan / Profit (loss) before income tax	61.23	(5.04)	(108.23%)
(Beban) Manfaat pajak penghasilan / Income Tax (Expense) Benefit	(0.08)	2.88	(3700.00%)
Laba (rugi) tahun berjalan / Net (loss) profit for the year	61.15	(2.16)	(103.53%)

Beban Expenses	2023	2024	Perubahan Changes
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain Total Oher comprehensive income (loss)	(0.56)	(4.33)	673.21%
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan Total Comprehensive (Loss) Income for the Year	60.59	(6.49)	(110.71%)
Laba (rugi) per saham (dalam Rupiah penuh) Basic earning per share (in full Rupiah)	10.75	(0.38)	(103.53%)

Pendapatan

Pendapatan Perseroan berasal dari pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan, pendapatan administrasi, pendapatan penalti, pendapatan bunga, dan pendapatan lain-lain.

Per 31 Desember 2024, Perseroan mencatat total pendapatan sebesar Rp468,65 miliar, naik sebesar 16,77% dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp401,34 miliar. Kenaikan pendapatan terutama disebabkan kenaikan pendapatan pembiayaan konsumen sebesar 20,96% dari Rp265,37 miliar menjadi Rp320,99 miliar sejalan dengan kenaikan piutang pembiayaan konsumen. Selain itu pendapatan sewa pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 16,51% dari Rp55,54 miliar menjadi Rp64,71 miliar sejalan dengan kenaikan piutang sewa pembiayaan. Pendapatan administrasi juga mengalami kenaikan sebesar 16,74% dari Rp45,41 miliar menjadi Rp53,01 miliar karena pendapatan administrasi dari pembiayaan baru di tahun 2024.

Beban

Beban Perseroan berasal dari penyisihan kerugian penurunan nilai, bunga dan keuangan, kepegawaian, umum dan administrasi, dan beban lain-lain.

Per 31 Desember 2024, Perseroan mencatat total beban Rp473,69 miliar naik sebesar 39,28% dibandingkan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp340,11 miliar. Kenaikan total beban terutama disebabkan oleh beban penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar 191,53% menjadi Rp152,06 miliar dari Rp52,16 miliar. Kenaikan beban bunga dan keuangan sebesar 27,64% menjadi Rp134,32 miliar dari Rp105,23 miliar terutama karena kenaikan utang bank di tahun 2024.

Beban kepegawaian juga mengalami kenaikan, sebesar 12,46% menjadi Rp126,18 miliar dari Rp112,20. Sementara beban umum dan administrasi mengalami penurunan sebesar 12,87% di tahun 2024.

Arus Kas

Analisa arus kas untuk aktivitas operasi pada perusahaan pembiayaan berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain pada umumnya, yang mana nilai negatif atau penggunaan kas yang berlebihan terutama untuk pembiayaan baru menunjukkan kemampuan dari perusahaan pembiayaan tersebut dalam mendapatkan pembiayaan baru. Atau dengan kata lain, semakin besar penggunaan kas dari aktivitas operasi terutama pada pembiayaan baru mencerminkan pertumbuhan perusahaan tersebut semakin baik.

Income

The Company's Income is derived from consumer financing, finance leases, administration, penalty, interest income and other Income.

As of December 31, 2024, the Company recorded total Income of Rp468.65 billion, an increase of 16.77% compared to the previous year as of December 31, 2023 of Rp401.34 billion. The increase in Income was mainly due to increased of consumer financing Income increase by 20.96% from Rp265.37 billion to Rp320.99 billion inline with the increase in consumer financing receivables. In addition, finance lease Income increase by 16.51% from Rp55.54 billion to Rp64.71 billion inline with the increase in finance lease receivables. Administration income also increase by 16.74% from Rp45.41 billion to Rp53.01 billion due to administration income from new financing in 2024.

Expenses

The Company's expenses come from provision for impairment losses, interest and financing charge, personnel, general and administration, and other expense.

As of December 31, 2024, the Company recorded total expenses of Rp473.69 billion, an increase of 39.28% compared to December 31, 2023, which was Rp340.11 billion. The increase in total expenses was mainly due to provision for impairment losses, which rise 191.53% become Rp152.06 billion from Rp52.16 billion. The increase of interest and financial charges, which rise 27.64% become Rp134.32 billion from Rp105.23 billion due to increasing bank loan in 2024.

Personnel expense also increased. Which rise 12.46% become Rp126.18 billion from Rp112.20. Meanwhile General & administration expense decreased by 12.87% in 2024.

Cash Flows

Analysis of cash flows for operating activities in finance companies is different from other companies in general, where the negative value or excessive use of cash, especially for new financing shows the ability of the finance company to acquire new financing. In other words, the bigger the use of cash from operating activities, especially in new financing reflects better growth of the company.

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain / in billion Rupiah except otherwise stated)

Arus Kas Cash Flows	2023	2024	Perubahan Changes
Arus kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi / Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities	(310.99)	(407.58)	31.06%
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi / Cash Flows Used in Investing Activities	(9.57)	(7.05)	(26.29%)
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan / Net Cash Flows Provided from (Used in) Financing Activities	268.32	404.93	50.91%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas / Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(52.24)	(9.70)	(81.43%)
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun / Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	102.60	50.36	(50.92%)
Kas dan Setara Kas pada Akhir tahun / Cash and Cash Equivalents at End of the Year	50.36	40.66	(19.27%)

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp407,58 miliar naik 31,06% dibandingkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp310,99 miliar.

Kenaikan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan.

Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities

Net cash flows have used in operating activities for the year ended December 31, 2024 was Rp407.58 billion, an increase of 31.06% compared to net cash flows used in operating activities for the year ended December 31, 2023 of Rp310.99 billion.

The increase in net cash flows used in operating activities was mainly due to the increased disbursement of new consumer financing and finance lease.

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp7,05 miliar turun 26,29% dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp9,57 miliar.

Penurunan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi terutama disebabkan penurunan perolehan aset tetap dan aset hak-guna.

Net Cash Flows Used in Investing Activities

Net cash flows used in investing activities for the year ended December 31, 2024 was Rp7.05 billion, decrease of 26.29% compared to net cash flows used in investing activities for the year ended December 31, 2023 of Rp9.57 billion.

The decrease in net cash flows used in investing activities was mainly due to a decline in acquisition of fixed asset and right-of-use asset.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Arus Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp404,93 miliar naik 50,91% dibandingkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp268,32 miliar.

Peningkatan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan terutama karena penerimaan utang bank lebih besar daripada pembayaran utang bank, sejalan dengan kenaikan piutang pembiayaan.

Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities

Net cash flows provided by financing activities for the year ended December 31, 2024 was Rp404,93 billion, an increase of 50,91% compared to net cash flows used in financing activities for the year ended December 31, 2023 of Rp268,32 billion.

The increase in net cash flows provided by financing activities was mainly due to receipt from bank loans is bigger than payment of bank loans, in line with the increase in financing receivables.

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang
Ability to Pay Liabilities and Receivables Collectability

Perseroan selalu memantau proyeksi arus kas dan ketersediaan dana untuk melunasi utang jangka pendek dan jangka panjang. Selama tahun 2024, Perseroan tidak memiliki tunggakan pembayaran pokok, bunga, ataupun pelanggaran lainnya berkaitan dengan utang bank. Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai dan agunan yang diterima dari *customer* telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

The Company always monitors cash flow projections and the availability of funds to pay off short-term and long-term debt. During 2024, the Company did not have arrears in payment of principal, interest, or other violations relating to bank loans. Management believes that the allowance for impairment losses and collateral received from costumers are adequate to cover possible losses from uncollectible receivables.

Rincian umur piutang pembiayaan tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The details of the aging of financing receivables in 2024 and 2023 were as follows:

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain / in billion Rupiah except otherwise stated)

Umur Age	2023		2024	
	Jumlah Amount	Persentase Percentage	Jumlah Amount	Persentase Percentage
Belum Jatuh Tempo Not yet due	3,169.63	98.72%	3,570.91	92.81%
1-30 Hari 1-30 Days	1.66	0.05%	86.42	2.25%
31-60 Hari 31-60 Days	1.60	0.05%	41.29	1.07%
61-90 Hari 61-90 Days	0.82	0.03%	20.38	0.53%
Lebih dari 90 Hari 90 Days Up	36.86	1.15%	128.47	3.34%
Jumlah **Total**	**3,210.56**	**100.00%**	**3,847.47**	**100.00%**

Rasio Keuangan Yang Relevan Lainnya

Perseroan secara konsisten menjalankan aktivitas bisnis pembiayaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan taat kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mampu memenuhi rasio-rasio keuangan yang diatur oleh regulator.

Other Relevant Financial Ratios

The Company consistently runs financing business activities in accordance with the principle of prudence and comply to the Financial Services Authority regulations and applicable laws. The Company is able to meet financial ratios set by the regulator.

Perbandingan kinerja rasio keuangan utama Perseroan dibandingkan dengan kinerja industri pembiayaan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The comparison of the performance of the Company's main financial ratios compared to the performance of the industry in 2024 is as follows:

Rasio Ratio	Industri Industry	Perseroan The Company
Financing Asset Ratio (FAR)	85.48%	92.25%
Rasio *Gearing* / Gearing Ratio	2.31x	3.14x
Rasio Modal Sendiri – Modal Disetor (MSMD) / Paid-up Capital - Equity Ratio	319.77%	131.50%
NPF- Net	0.75%	0.42%
Rasio Laba (Rugi) Bersih terhadap aset Return on Asset (ROA)	5.02%	(0.16%)
Rasio Laba (Rugi) bersih terhadap ekuitas Return on Equit (ROE)	13.78%	(0.28%)
Beban Operasional – Pendapatan Operasional (BOPO) / Operating Expense to Operating Income Ratio	79.36%	101.56%

Struktur Modal
Capital Structure

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tahun 2024 sebesar Rp568,74 miliar, tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023.

The Company's issued and paid-up capital in 2024 amounted to Rp568.74 billion, did not increase compared to 2023.

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain / in billion Rupiah except otherwise stated)

Keterangan / Information	2023	2024	Perubahan Changes
Utang Bank / Bank Loans	1,939.81	2,347.42	21.01%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / Issued and Fully Paid	568.74	568.74	-
Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-in Capital	97.58	97.58	-
Komponen Ekuitas Lain / Other Equity Components	0.47	(3.87)	(930.66%)
Saldo Laba / Retained Earnings	83.70	81.54	(2.58%)

Kebijakan Struktur Modal
Capital Structure Policy

Manajemen Perseroan merancang struktur modal yang optimal dalam proses perencanaan modal dan memantau kebutuhan permodalan secara rutin. Struktur modal yang optimal akan senantiasa dipertahankan untuk memastikan tingkat permodalan yang kuat dan pada saat bersamaan tetap menyediakan ruang yang memadai untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

The Company's management designs an optimal capital structure in the capital planning process and regularly monitors capital requirements. The optimal capital structure will always be maintained to ensure a strong capital level while at the same time providing adequate space to support business growth.

Dalam mengelola struktur modal, Perseroan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, di antaranya mengatur ketentuan sebagai berikut:

- Ekuitas minimum Rp200 miliar;
- Ekuitas minimum 50% dari jumlah modal disetor; dan
- Rasio *Gearing*, yaitu rasio seluruh pinjaman terhadap ekuitas dikurangi pinjaman subordinasi dan penyertaan sebesar maksimal 10 kali.

In managing capital structure, the Company refers to the applicable Financial Services Authority Regulation, which regulates the following:

- Minimum equity of Rp200 billion;
- Minimum equity of 50% of the total paid-up capital; and
- Gearing Ratio, the ratio of all loans to equity minus subordinated loans and investments, a maximum of 10 times.

Perseroan telah memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana telah ditetapkan oleh regulasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

The Company has fulfilled the capital requirements as stipulated by the regulation, which are as follows:

Keterangan Information	2023	2024
Ekuitas / Equity	Rp750.48 miliar / billion	Rp744.00 miliar / billion
Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor Equity Ratio to Paid-up Capital	131.87%	131.50%
Rasio *Gearing* *Gearing ratio*	2.59x	3.14x

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments to Capital Goods Investment

Pada tahun 2024, Perseroan tidak mempunyai ikatan material terkait investasi barang modal.

In 2024, the Company has no material commitments related to capital goods investment.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Material Facts That Occured After The Date of The Accountant's Report

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Tahunan ini, Perseroan tidak memiliki informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

As of the issuance date of this Annual Report, the Company has no material information and facts that occurred after the date of accountant's report.

Prospek Usaha
Business Prospect

Disinflasi diproyeksikan masih akan terus berlanjut di tahun 2025. Gagalnya gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina yang didukung AS mengindikasikan ketegangan geopolitik masih akan terus berlanjut di tahun 2025. Banyak negara berkembang masih merasakan dampak dan masih dalam proses pemulihan dari Pandemi Covid-19 dan bencana-bencana alam di tahun sebelumnya. Meskipun perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) diharapkan dapat menggenjot pertumbuhan perekonomian, namun dipastikan belum dapat mengakselerasi pertumbuhan perekonomian terutama di negara berkembang. Daya beli masyarakat pun masih diproyeksikan melemah di tahun 2025 meskipun harga komoditas cenderung turun, namun permintaan konsumen juga cenderung menurun.

Disinflation is projected to continue in 2025. The failure of the US-backed ceasefire between Russia and Ukraine indicates that geopolitical tensions will continue in 2025. Many developing countries are still feeling the impact and are still in the process of recovering from the Covid-19 Pandemic and natural disasters in the previous year. Although the development of technology and artificial intelligence (AI) is expected to boost economic growth, it is certain that it cannot accelerate economic growth, especially in developing countries. People's purchasing power is also projected to weaken in 2025 even though commodity prices tend to fall, but consumer demand also tends to decline.

Pada Januari 2025, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan global 2025 sebesar 3,30%. Berdasarkan data *World Economic Outlook* edisi April 2025 yang diterbitkan pada tanggal 22 April 2025, IMF menilai bahwa tekanan ekonomi global masih akan berlanjut pada 2025. Untuk itu IMF merevisi proyeksi pertumbuhan global turun menjadi 2,80%.

In January 2025, the International Monetary Fund (IMF) projected global growth in 2025 at 3.30%. Based on data from the April 2025 edition of the World Economic Outlook published on April 22, 2025, the IMF assessed that global economic pressures would continue in 2025. For this reason, the IMF revised its global growth projection down to 2.80%.

Sedangkan pertumbuhan Indonesia di tahun 2025 diproyeksikan IMF mencapai 4,70%. Potensi keuangan Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap menjanjikan, didorong oleh reformasi kebijakan, adopsi digitalisasi, serta investasi pada sektor-sektor strategis.

Meanwhile, Indonesia's growth in 2025 is projected by the IMF to reach 4.70%. Indonesia's financial potential in 2025 is expected to remain promising, driven by policy reforms, adoption of digitalization, and investment in strategic sectors.

Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto membentuk berbagai kebijakan untuk memperkuat ketahanan nasional, memperkuat cadangan devisa negara dan meningkatkan stabilitas ekonomi salah satunya yaitu kebijakan pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam ("DHE SDA"). Kebijakan ini mengatur eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam

The President of the Republic of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto, has formed various policies to strengthen national resilience, strengthen Indonesia's foreign exchange reserves and boost economic stability one of which is the policy for managing foreign exchange earnings from natural resource exports ("DHE SDA"). This policy stipulates that exporters in the mining sector (except oil and gas), plantations, forestry, and fisheries are required to place 100 percent of DHE SDA in the

sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional, diharapkan pada akhir tahun cadangan devisa negara dapat bertambah 80 miliar dolar AS.

Prabowo juga berkomitmen untuk mengelola keuangan negara dengan efektif dan efisien yaitu dengan mengubah cara pemerintah mengelola anggaran dengan melakukan efisiensi hingga 90% dari total anggaran. Ketahanan pangan pun menjadi fokus utama Prabowo dan ia pun berkomitmen untuk tetap menjaga harga pangan stabil dan terkendali.

Langkah strategis yang ditetapkan oleh Prabowo diharapkan dapat mereformasi ekonomi dan sosial dalam rangka menjaga stabilitas dan meningkatkan daya beli masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa kebijakan strategis telah dibuat oleh Prabowo seperti kenaikan Upah Minimum Pekerja (UMP), optimalisasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), stimulus pada bulan Ramadhan yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, dan stabilitas harga pangan. Pemerintah menyiapkan kebijakan strategis dalam hal penyiapan paket stimulus ekonomi, serta optimalisasi program makan bergizi gratis (MBG), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan realisasi Panen Padi. Presiden menuturkan bahwa terdapat laporan peningkatan produksi beras secara signifikan.

Dalam konferensi persnya terkait kewajiban menyimpan DHE SDA di dalam negeri, pada Senin, 17 Februari 2025 di Jakarta, Prabowo mengatakan bahwa paket stimulus ekonomi seperti diskon tarif listrik, PPN DTP pembelian properti dan otomotif, PPnBM DTP otomotif electronic vehicle (EV) dan hibdrida, subsidi pajak DTP motor listrik, PPh DTP sektor padat karya, optimalisasi program makan bergizi gratis, optimalisasi penyaluran KUR, panen padi terealisasi secara optimal.

Selain kebijakan jangka pendek, Presiden Prabowo juga menyoroti upaya transformasi ekonomi melalui beberapa kebijakan pendorong daya saing, seperti program makan bergizi gratis, program ketahanan pangan dan energi, dan optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Danantara. Selanjutnya, Presiden Prabowo menuturkan pemerintah menyiapkan kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembangunan kawasan industri, serta pembentukan bank emas.

Di tingkat global, Presiden Prabowo mengatakan bahwa Indonesia juga tengah mempercepat keanggotaan dalam BRICS, menyelesaikan perjanjian Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Uni Eropa-CEPA, serta melanjutkan proses pendaftaran ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Dari segi perusahaan pembiayaan, OJK masih memproyeksikan positif di tahun 2025, dengan pertumbuhan pembiayaan mencapai 8-10% (yoy) dengan senantiasa melakukan pemantauan terhadap *outlook* secara berkala untuk diselaraskan dengan perkembangan *outlook* pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) memproyeksikan pertumbuhan pembiayaan di angka 7%-8% pada tahun 2025.

national financial system for 12 months in a special account at a national bank, it is hoped that by the end of the year the country's foreign exchange reserves can increase by 80 billion US dollars.

Prabowo is also committed to managing state finances effectively and efficiently, namely by changing the way the government manages the budget by making efficiency of up to 90% of the total budget. Food security is also Prabowo's main focus and he is committed to maintaining stable and managable food prices.

The strategic steps set by Prabowo are expected to reform the economy and society in order to maintain stability and increase people's purchasing power to encourage economic growth. Several strategic policies have been made by Prabowo such as increasing the Minimum Wage of Workers (UMP), optimizing the distribution of Social Assistance (Bansos), stimulus during the month of Ramadan, namely discounts on airline tickets, discounts on toll rates, shopping discount programs, Eid homecoming tourism programs, and food price stability. The Government has prepared strategic policies in terms of preparing economic stimulus packages, as well as optimizing the free nutritious meal program (MBG), distributing People's Business Credit (KUR) and realizing the Rice Harvest. The President said that there were reports of a significant increase in rice production.

In his press conference regarding the obligation to store Foreign Exchange from DHE SDA domestically, on Monday, February 17, 2025 in Jakarta, Prabowo said that economic stimulus packages such as electricity tariff discounts, VAT DTP for property and automotive purchases, PPnBM DTP for automotive electronic vehicles (EV) and hybrids, tax subsidies DTP for electric motors, PPh DTP for labor-intensive sectors, optimizing the free nutritious meal program, optimizing the distribution of KUR, rice harvests were realized optimally.

In addition to short-term policies, President Prabowo also highlighted economic transformation efforts through several policies to boost competitiveness, such as the free nutritious meal program, food and energy security program, and optimization of State-Owned Enterprises (SOE) management through Danantara. Furthermore, President Prabowo said that the government is preparing a Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) policy, development of industrial areas, and the establishment of a bullion bank.

At the global level, President Prabowo said that Indonesia is also accelerating membership in BRICS, completing the Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), the European Union-CEPA, and continuing the registration process with the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

In terms of financing company, OJK still projects positive in 2025, with financing growth reaching 8-10% (yoy) by continuously monitoring the outlook periodically to align it with the development of the national economic growth outlook. Meanwhile, the Indonesian Financing Companies Association (APPI) projects financing growth at 7%-8% in 202

Di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi baik global dan domestik, Perseroan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan Unit Bisnis Ritel dan Unit Bisnis Korporasi berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan produk-produk yang dikurasi untuk memenuhi kebutuhan debitur berbasis risiko dan senantiasa memastikan pelaksanaan pengendalian internal khususnya untuk Unit Bisnis Ritel. Untuk Unit Bisnis Korporasi, Perseroan akan meningkatkan *operation asset balance* dengan meningkatkan jumlah klien Unit Bisnis Korporasi melalui akuisisi dan berkolaborasi dengan Marubeni Corporation & Mizuho Bank, Ltd. yang merupakan aliansi mitra bisnis strategis Mizuho Leasing Co., Ltd., serta dalam rangka penanganan klien bermasalah, Perseroan akan senantiasa memantau kinerja klien bermasalah dan menerapkan strategi konservatif dalam melakukan penyelesaian. Perseroan berkomitmen mengedepankan pelayanan yang cepat, tepat, dan prima dengan senantiasa meningkatkan *service level agreement* (SLA) dengan orientasi pada kepuasan debitur.

In the midst of global and domestic economic uncertainty, the Company continues to strive to improve the quality financing portfolio of the Retail Business Unit and Corporate Business Unit based on the principle of prudence with products that are curated to meet the needs of debtors based on risk and always ensure the implementation of internal control, especially for the Retail Business Unit. For the Corporate Business Unit, the Company will increase the operation asset balance by increasing the number of Corporate Business Unit clients through acquisitions and collaboration with Marubeni Corporation & Mizuho Bank, Ltd. which are strategic business alliance partner of Mizuho Leasing Co., Ltd., and in order to handle problematic clients, the Company will continue to monitor the performance of problematic clients and implement a conservative strategy in making settlements.The Company is committed to prioritizing fast, precise, and excellent service by continuously improving the service level agreement (SLA) with an orientation towards debtor satisfaction.

Dalam menjalankan operasionalnya, Perseroan mengupayakan pengendalian rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional ("BOPO") dalam rangka mengoptimalkan pertumbuhan bisnis. Dari sisi pendanaan, Perseroan melakukan analisis *Asset Liability Management* dan mengoptimalkan sumber pendanaan dengan suku bunga kompetitif dalam menghadapi kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI7DRRR) serta menjaga ketersediaan likuiditas dan pengelolaan arus kas yang memadai. Perseroan juga akan senantiasa memperkuat pengendalian internal dengan mengaplikasikan *Control Self Assessment* ("CSA") untuk memastikan pemisahan tugas dan tanggung jawab setiap fungsi yang ada di Kantor Pusat dan Kantor Cabang telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan. Perseroan juga akan senantiasa memastikan model pertahanan 3 lini (3 *lines model*) diimplementasikan berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("GCG"). Sebagai *preventive measure* Perseroan dalam mencegah terjadinya *fraud*, Perseroan akan memanfaatkan *shared database* yang akan difasilitasi oleh OJK dalam Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU) mengenai kejadian *fraud* yang terjadi di Sektor Jasa Keuangan untuk melakukan pengecekan calon karyawan dan calon debitur Perseroan.

In carrying out its operations, the Company strives to control the ratio of Operating Expenses to Operating Income ("BOPO") in order to optimize business growth. In terms of funding, the Company conducts an Asset Liability Management analysis and optimizes funding sources with competitive interest rates in facing the increase in Bank Indonesia's benchmark interest rate (BI7DRRR) and maintaining the availability of liquidity and adequate cash flow management. The Company will also continue to strengthen internal control by implementing Control Self Assessment ("CSA") to ensure that the separation of duties and responsibilities of each function in the Head Office and Branch Offices is in accordance with the duties and responsibilities of the work assigned. The Company will also continue to ensure that the 3 lines defense model is implemented based on the principles of Good Corporate Governance ("GCG"). As a preventive measure for the Company to prevent fraud, the Company will utilize a shared database that will be facilitated by the OJK in the Financial Services Sector Actors Information System (SIPELAKU) regarding fraud incidents that occur in the Financial Services Sector to conduct checks on prospective employees and prospective debtors of the Company.

Dalam meningkatkan efisiensi proses bisnis, meningkatkan kualitas kerja serta menurunkan tingkat kesalahan manusia, Perseroan juga melakukan berbagai pengembangan teknologi informasi. Perseroan juga melakukan pengembangan *Robot Process Automation* (RPA) dengan senantiasa mengacu pada pedoman Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) serta memperkuat pertahanan dari serangan siber. Tahun 2025 Perseroan akan meningkatkan sertifikasi ISO 27001:2013 menjadi ISO 27001:2022.

In improving the efficiency of business processes, improving work quality and reducing the level of human error, the Company also carries out various information technology developments. The Company also develops Robot Process Automation (RPA) by always referring to the Information Security Management System (ISMS) guidelines and strengthening defenses against cyber attacks. In 2025, the Company will upgrade its ISO 27001:2013 certification to ISO 27001:2022.

Direksi percaya dengan strategi-strategi yang telah ditetapkan secara adaptif, konservatif, sumber daya yang dimiliki Perseroan serta budaya Perusahaan yang proaktif dan kolaboratif, didukung oleh permodalan yang kuat oleh Pemegang Saham Pengendali sekaligus salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan yaitu Mizuho Leasing Co.,Ltd., Perseroan dapat terus menunjukkan eksistensinya di industri pembiayaan.

The Board of Directors believes that with the strategies that have been determined adaptively, conservatively, the resources owned by the Company and the proactive and collaborative corporate culture, supported by strong capital from the Controlling Shareholder and one of the Company's Major Shareholders, namely Mizuho Leasing Co., Ltd., the Company can continue to demonstrate its existence in the financing industry.

Unit Bisnis Korporasi & Unit Bisnis Ritel
Corporate Business Unit & Retail Business Unit

Kegiatan pemasaran memegang peranan penting, baik untuk memperluas kegiatan usaha maupun untuk mempertahankan pangsa pasar dalam industri pembiayaan. Langkah-langkah pemasaran yang dilakukan Perseroan diklasifikasikan berdasarkan 2 (dua) pilar bisnis yaitu Unit Bisnis Ritel dan Unit Bisnis Korporasi.

Unit Bisnis Korporasi

Langkah dan strategi Unit Bisnis Korporasi pada tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan domestik, peraturan pemerintah, dan sektor industri yang konsisten melakukan pengembangan usaha. Ada beberapa strategi umum yang dipertimbangkan oleh Unit Bisnis Korporasi:

1. **Diversifikasi Portofolio:** Perseroan dapat mengurangi risiko dengan mendiversifikasi portofolio mereka. Ini dapat dilakukan dengan menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan seperti sewa guna usaha *(finance lease)* baik secara pembiayaan langsung *(direct lease)* atau pembiayaan *sale and lease back,* pembiayaan pembelian secara angsuran dan pembiayaan modal usaha.
2. **Analisis Risiko yang Lebih Baik:** Melakukan analisa data keuangan dari pelanggan korporasi yang lebih baik sehingga dapat membantu Perseroan mengidentifikasi risiko dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih informasional dalam memberikan pinjaman.
3. **Fokus pada Layanan:** Memperkuat hubungan dengan klien dan memberikan layanan yang unggul dapat membantu perusahaan pembiayaan mempertahankan basis klien yang loyal dan meningkatkan retensi klien. Ini termasuk menyediakan layanan pelanggan yang responsif, proses aplikasi yang mudah, dan solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan klien.
4. **Fleksibilitas dan Responsivitas:** Di tengah perubahan cepat dalam kondisi ekonomi dan pasar, penting bagi Unit Bisnis Korporasi untuk tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Ini mungkin melibatkan penyesuaian cepat terhadap strategi bisnis, kebijakan pinjaman, atau produk dan layanan yang ditawarkan.
5. **Kemitraan Strategis:** Membangun kemitraan strategis dengan lembaga keuangan lainnya, menjalin kerjasama dengan berbagai penyedia *(supplier)* untuk peralatan berat, peralatan informasi teknologi, dan penyedia mesin-mesin, atau bahkan dengan bisnis-bisnis di sektor lain dapat membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan inovasi.
6. **Peningkatan Kepatuhan Regulasi:** Perseroan perlu memastikan bahwa dalam pelaksanaan operasional selalu mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku. Ini termasuk peraturan terkait privasi data, perlindungan konsumen, dan peraturan yang berkaitan dengan produk pembiayaan.

Marketing activities play an important role, both to expand business activities and to maintain market share in the financing industry. The marketing steps taken by the Company are classified based on 2 (two) business pillars, namely the Retail Business Unit and the Corporate Business Unit.

Corporate Business Unit

The steps and strategies of Corporate Business Unit in 2024 are greatly influenced by global and domestic economic cond tions, government regulations, and the industrial sector which consistently carries out business development. There are several general strategies considered by Corporate Business Units:

1. **Portfolio Diversification:** Corporate business units can reduce their risk by diversifying their portfolios. This can be done by offering various types of financing products such as finance lease, both direct financing and sale and leaseback financing, installment purchase financing, and business capital financing.
2. **A Better Risk Analysis:** Conducting a more thorough financial data analysis of corporate clients to help the Company better identify risks and make more informed decisions when providing loans.
3. **Focus on Service:** Strengthening relationships with client and delivering excellent service can help financing companies maintain a loyal client base and enhance client retention. This includes providing responsive client service, easy application processes, and financing solutions tailored to client needs.
4. **Flexibility and Responsiveness:** Amid rapid changes in economic conditions and markets, it's crucial for Corporate Business Units to remain flexible and responsive to change. This may involve quickly adjusting business strategies, loan policies, or the products and services offered.
5. **Strategic Partnerships:** Building strategic partnerships with other financial institutions, collaborating with various suppliers for heavy equipment, information technology, and machinery, or even with businesses in other sectors can open up new opportunities for growth and innovation.
6. **Regulatory Compliance Enhancement:** The Company need to ensure that in their operational execution, they consistently adhere to all applicable rules and regulations. This encompasses regulations concerning data privacy, consumer protection, and those related to financing products.

Unit Bisnis Ritel

Langkah pemasaran untuk segmen Unit Bisnis Ritel adalah dengan terus meningkatkan jalinan kerja sama dengan dealer, mitra strategis pembiayaan, dan pembukaan jaringan cabang baru.

Langkah pemasaran lainnya adalah menjalin hubungan baik dengan konsumen dengan berbagai metode peningkatan pelayanan yang bertujuan agar konsumen merasakan banyak keuntungan dan kemudahan yang dapat diperoleh melalui pembiayaan di Perseroan.

Adapun strategi pemasaran yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Fokus Kepada Portofolio Dengan Tingkat Pengembalian yang Wajar Sesuai Dengan Tingkat Risiko yang Ditentukan**
   Perseroan memfokuskan aktivitas pembiayaannya pada aset yang memiliki tingkat pengembalian yang wajar sesuai dengan tingkat risiko yang telah ditentukan oleh Perseroan, namun dengan tetap memperhatikan kualitas dari aset tersebut.
2. **Komitmen untuk Produktifitas dan Efisiensi**
   Penyempurnaan sistem dan prosedur secara terus menerus untuk meningkatkan produktifitas, mendukung aktivitas keuangan dan meningkatkan efisiensi.
3. **Hubungan yang Kuat dan Erat**
   Perseroan sangat menyadari bahwa hubungan yang kuat dan erat dengan konsumen dan rekan usaha merupakan salah satu kunci kesuksesan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya menjaga hubungan baik serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan baik bagi konsumen maupun rekan usaha.
4. **Perluasan Layanan Usaha**
   Dalam upaya untuk menjangkau dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen dan rekan usaha, Perseroan terus mengembangkan layanan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan keuangan konsumen dan rekan usaha.
5. **Pengembangan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia**
   Perseroan sangat memahami bahwa teknologi informasi dan sumber daya manusia memegang peranan penting untuk mendukung pertumbuhan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya untuk mengembangkan teknologi informasi dan sumber daya manusianya secara berkesinambungan.
6. **Pengembangan Pemasaran *Digital***
   Dalam upaya meningkatkan kegiatan pemasaran yang lebih efektif dan efisien, Perseroan mempersiapkan langkah menuju pemasaran digital, baik secara langsung untuk pembiayaan konsumen maupun berkolaborasi dengan beberapa *marketplace* yang ada di Indonesia.

Retail Business Unit

The marketing step for the Retail Business Unit segment is to continue to improve cooperation with dealers, strategic financing partners, and open new branch networks.

Another marketing step is to establish good relations with consumers with various methods of service improvement aimed at making consumers feel the many advantages and conveniences that can be obtained through financing at the Company.

The marketing strategies undertaken are as follows:

1. **Focus on Portfolios with Reasonable Returns in Accordance with Specified Risk Levels**
   The Company focuses its financing activities on assets that have a reasonable rate of return in accordance with the risk levels determined by the Company, while still paying attention to the quality of these assets.
2. **Commitment to Productivity and Efficiency**
   Continuous improvement of systems and procedures to increase productivity, support financial activities and improve efficiency.
3. **Strong and Tight Relationships**
   The Company is very aware that a strong and close relationship with consumers and business partners is one of the keys to the success of the Company. Therefore, the Company always strives to maintain good relations and increase the trust and satisfaction of both consumers and business partners.
4. **Business Service Expansion**
   In an effort to reach and provide the best service for consumers and business partners, the Company continues to develop its business services in order to meet the financial needs of consumers and business partners.
5. **Development of Information Technology and Human Resources**
   The Company fully understands that information technology and human resources play an important role in supporting the growth of the Company. Therefore, the Company always strives to develop its information technology and human resources on an ongoing basis.
6. **Digital Marketing Development**
   In an effort to improve marketing activities that are more effective and efficient, the Company is preparing steps towards digital marketing, both directly for consumer financing and in collaboration with several marketplaces in Indonesia.

Pangsa pasar Perseroan terhadap industri pembiayaan secara nasional selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

The Company's market share in the national financing industry for the last 3 (three) years is as follows:

(dalam miliar Rupiah kecuali dinyatakan lain / in billion Rupiah except otherwise stated)

Keterangan Information	2022	2023	2024
Total Aset Total Asset			
Industri Pembiayaan (triliun) / Financing Industry (trillion)	Rp487.92	Rp552.89	Rp588.94
Perseroan (triliun) / The Company (trillion)	Rp2.47	Rp2.79	Rp3.21
Pangsa Pasar* / Market Share	0.51%	0.50%	0.55%
Total Piutang Pembiayaan - Bersih Total Financing Receivables - Net			
Industri Pembiayaan (triliun) / Financing Industry (trillion)	Rp397.12	Rp470.86	Rp476.00
Perseroan (triliun) / The Company (trillion)	Rp2.11	Rp2.54	Rp3.09
Pangsa Pasar* / Market Share*	0.53%	0.54%	0.65%

* Sumber: Statistik Lembaga Pembiayaan periode Desember 2024 dan diolah oleh Perseroan (Tanpa jenis Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah)
Source: Multifinance Statistic for December 2024 and prepared by the Company (Excluding Sharia Financing)

Target dan Realisasi Tahun Buku
Target and Realization of the Financial Year

Di tengah perlambatan ekonomi global, meningkatnya tensi geopolitik, risiko inflasi, dan perubahan iklim, ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tumbuh 5,03%, lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2023 yang tumbuh 5,05%. Seperti halnya industri pembiayaan, pertumbuhan Perseroan tidak sesuai dengan yang diproyeksikan sebelumnya. Pencapaian target dan proyeksi kinerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

Amid global economic slowdown, rising geopolitical tension, inflation risk, and climate change, Indonesia's economy in 2024 grew by 5.03%, lower than the achievement in 2023, which grew by 5.05%. Like the financing industry, the Company's growth did not match what was previously projected. Target achievement and projections of the Company's performance are as follows:

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Keterangan Information	Target 2024	Realisasi 2024 2024 Realization
Piutang Pembiayaan - Bersih / Financing Receivables - Net	3,127.98	2,961.57
Total Aset / Total Assets	3,463.05	3,210.52
Total Liabilitas / Total Liabilities	2,698.04	2,466.53
Pendapatan / Income	496.89	468.65
Laba (rugi) tahun berjalan / Net (loss) profit for the year	14.51	(2.16)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for The Year	14.51	(6.49)
Modal Ditempatkan & Disetor / Paid-up Capital	568.74	568.74
Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-up Capital	97.59	97.59
Total Ekuitas / Total Equity	765.01	743.99

Target 2025

Manajemen Perseroan telah menyusun rencana untuk tahun 2025 dengan mempertimbangkan perkembangan industri otomotif, kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian baik dari segi makro maupun mikro.

2025 Targets

The Company's management has drawn up a plan for 2025 by considering the development of the automotive industry, current economic conditions and economic projections both in macro and micro terms.

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Keterangan Information	Target 2025
Piutang Pembiayaan - Bersih / Financing Receivables - Net	3,019.72
Total Aset / Total Assets	3,254.19
Total Liabilitas / Total Liabilities	2,509.66
Pendapatan / Income	463.51
Laba (rugi) tahun berjalan / Net (loss) profit for the year	1.88
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for The Year	1.88
Modal Ditempatkan & Disetor / Paid-up Capital	568.74
Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-up Capital	97.59
Total Ekuitas / Total Equity	744.54

Investasi Barang Modal yang Direalisasikan pada Tahun Buku Terakhir
Capital Goods Investment Realized at the End of Financial Year

Investasi barang modal yang dilakukan Perseroan sepanjang tahun 2024 dilakukan untuk menunjang kegiatan operasional. Investasi barang modal tersebut berupa bangunan, prasarana, kendaraan, peralatan, perabotan kantor, dan komputer. Adapun nilainya mencapai sebesar Rp8,11 miliar.

Capital goods investments made by the Company throughout 2024 were carried out to support operational activities. The investment in capital goods is in the form of buildings, infrastructure, vehicles, equipment, office furniture, and computers. The value reached Rp8.11 billion.

Dividen
Dividend

Memperhatikan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dan modal kerja dalam rangka pengembangan usaha maka Perseroan tidak membagikan dividen selama 2 tahun terakhir. Hal ini telah disetujui masing-masing dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 23 Juni 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 20 Juni 2024.

In regard to funding requirements needed for investment and working capital in the context of business development, the Company has not distributed dividends for the past 2 years. This was approved at the Annual General Meetings of Shareholders on 23 June 2023, and the Annual General Meetings of Shareholders on 20 June 2024.

Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dalam tunai kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Dengan tetap memperhatikan keuntungan dan/atau kondisi keuangan Perseroan dalam tahun buku yang bersangkutan serta dengan memperhatikan kebutuhan dana yang akan diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan memiliki kebijakan dividen kas atas laba bersih Perseroan mulai tahun buku 2018 setelah ketentuan-ketentuan diatas terpenuhi yaitu minimal 20% dari laba bersih setelah pajak.

The Company has a policy to pay dividends in cash to all Shareholders of the Company at least once in 1 (one) year. By taking into account the profit and / or financial condition of the Company in the relevant fiscal year and by taking into account the funding requirements that will be needed for investment in the context of business development as long as it does not conflict with the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, without prejudice to the right of the Company's GMS to determine others in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association. The Company has a cash dividend policy on the Company's net income starting in the fiscal year 2018 after the provisions of the above conditions are met, namely at least 20% of net profit after tax.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of The Use of Funds from Public Offering

Pada tahun 2024, Perseroan tidak melakukan penawaran umum dan sudah tidak ada kewajiban penyampaian realisasi pengunaan dana.

In 2024, the Company does not do a public offering and there is no obligation to submit the realization of the use of funds.

Informasi Material Lainnya
Other Material Information

Informasi material terkait transaksi afiliasi sepanjang tahun 2024 telah dipaparkan di dalam Laporan Keuangan 31 Desember 2024 (Audited) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Material information related to affiliated transactions throughout 2024 had been presented in the Financial Statements of 31 December, 2024 (Audited) which was an integral part of this Annual Report.

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat informasi material lainnya terkait dengan investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Throughout 2024, there was no other material information related to investments, expansions, divestments, business mergers/consolidations, acquisitions, debt/capital restructuring, Material transactions and transactions containing conflicts of interest.

Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan
Changes to Laws and Regulation with Significant Effects

Pada 10 Oktober 2024 telah dterbitkan PMK No.74 tentang pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini berdampak pada perhitungan fiskal Perseroan.

On October 10, 2024 PMK No.74 was issued regarding reserved for bad debts that can be deducted from gross income. This has an impact on the Company's fiscal calculations.

Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policies

Dalam tahun berjalan, Perseroan telah menerapkan sejumlah amendemen/penyesuaian PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023.

In the current year, the Company has applied a number of amendments/improvements to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2023.

- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12 *Income Taxes* tentang *Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*; dan

- Amendment to PSAK 1 "Presentation of Financial Statement" related to Liabilities Classification as Short or Long-term and Disclosure of Accounting Policies;
- Amendment to PSAK 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" related to Definition of Accounting Estimates;
- Amendment of PSAK 46 "Income Tax" on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction which adopted from Amended IAS 12 Income Taxes on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and

Penerapan atas PSAK baru/revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

The adoption of these new/revised PSAKs does not result in changes to the Company's accounting policies and has no material effect on the amounts reported in these financial statements.

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan Perseroan, standar, interpretasi dan amandemen-amandemen atas PSAK yang relevan bagi Perseroan, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

At the date of authorization of these the Company's financial statements, the following standard, interpretation and amendments to PSAK relevant to the Company were issued but not effective, with early application permitted, as follows:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- PSAK 73 (amendemen) Sewa: Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik

Effective for periods beginning on or after January 1,2024

- PSAK 1 (amendment) Presentation of financial statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current
- PSAK 73 (amendment) Leases: Lease Liability in a Sale and Leaseback

- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Penyajian Laporan Keuangan terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- PSAK 2 (amandemen) Laporan arus kas dan PSAK 60 (amandemen) Instrumen Keuangan: Pengungkapan: Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

- PSAK 10 (amandemen) Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing : Kekurangan Ketertukaran

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK - IAI”).

- PSAK 1 (amendment) Presentation of financial statements: Non-current Liabilities with Covenants

- PSAK 2 (amandement) Statement of cash flows and PSAK 60 (amandement) Financial Instruments: Disclosures: Supplier Finance Arrangements

Effective for periods beginning on or after January 1, 2025

- PSAK 10 (amendment) The effects of changes in foreign exchange rates: Lack of Exchangeability

As of the issuance date of the financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretations on the financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

Beginning January 1, 2024, references to the individual PSAKs and ISAKs will be changed as published by Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (“DSAK - IAI”).

TATA KELOLA
CORPORATE GOVERNANCE

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")
General Meeting of Shareholders ("GMS")

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") menguraikan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sebagai Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Peraturan mengenai RUPS juga terdapat di dalam UUPT Bab VI mengenai RUPS Pasal 75 sampai dengan Pasal 91.

Article 1 point 4 of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies ("UUPT") describes the General Meeting of Shareholders ("GMS") as a Company Organ that has authority not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in this Law and/or the Articles of Association. Regulations regarding the GMS are also contained in the UUPT Chapter VI regarding GMS Article 75 through Article 91.

Pemegang Saham memiliki hak untuk memperoleh keterangan berkaitan tentang Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang keterangan yang diminta tersebut berhubungan dengan mata acara rapat dalam RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Mata acara rapat lain-lain tidak berhak disetujui oleh RUPS, kecuali semua pemegang saham yang hadir atau wakilnya menyetujui adanya penambahan mata acara rapat.

Shareholders have the right to obtain information related to the Company from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, as long as the information requested is related to the agenda meeting in the GMS and does not conflict with the interests of the Company. Other meeting agenda items are not entitled to be approved by the GMS, unless all shareholders present or their representatives agree to the addition of meeting agenda.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2024
The Implementation of 2024 GMS

Pada tahun 2024, Perseroan telah melaksanakan 3 (tiga) kali RUPS dan seluruh keputusan pada RUPS tahun 2024 telah direalisasikan. Pelaksanaan RUPS tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

In 2024, the Company held 3 (three) GMS, and all resolutions made during the 2024 GMS have been implemented. The implementation of the 2024 GMS is described as follows:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

RUPST tanggal 20 Juni 2024 diselenggarakan di Catur Dharma Hall 3, Menara Astra, Lantai 5 – Jakarta Jl. Jend. Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220 pada pukul 09.41 – 10.25 WIB. RUPST telah memenuhi korum karena dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili 5.264.496.608 saham atau 92,565% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS")

The AGMS on 20 June 2024 was held at Catur Dharma Hall 3, Menara Astra, 5th Floor – Jakarta Jl. Jend. Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220 at 09.41 – 10.25 WIB. The AGMS met the quorum because it was attended by Shareholders representing 5,264,496,608 shares or 92.565% of all shares with valid voting rights that had been issued by the Company.

Hasil RUPST tanggal 20 Juni 2024, pada pokoknya menyetujui hal-hal sebagai berikut:

The results of the AGMS on 20 June 2024, basically approved to the following matters:

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Anggota Jaringan Deloitte Asia Pacific bagian Jaringan Deloitte), sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00052/2.1265/AU.1/09/1626-2/1/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 dengan "pendapat wajar dalam semua hal yang material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan tahun buku 2023, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.

First Meeting Agenda:

1. Well receive and approve the Company's Annual Report for the fiscal year of 2023, including the Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company;
2. Approve the ratification of the Financial Report for the fiscal year of 2023 which was audited by Public Accountant Bayu M Dayat and Public Accounting Firm Imelda & Partners (Member of Deloitte Asia Pacific Network part Deloitte Network) as contained in its report No.00052/2.1265/AU.1/09/1626-2/1/III/2024 dated 13 March 2024 with "opinion of present fairly in all material respects", thus releasing members of the Board of Directors and Board of Commissioners of responsibility and any dependents (acquit et de charge) for the actions of management and supervision taken during the fiscal year of 2023, as long as all of their actions were reflected in the Financial Report for the fiscal year of 2023 except for embezzlement, fraud and other criminal acts.

Mata Acara Rapat Kedua :
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp 61.149.828.459,- (enam puluh satu miliar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah) digunakan untuk:

1. Sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
2. Sisanya sebesar Rp 60.849.828.459,- (enam puluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.

Dengan demikian untuk tahun buku 2023 Perseroan tidak membagikan dividen.

Mata Acara Rapat Ketiga :
1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik ("AP") Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik ("KAP") Imelda & Rekan (dengan nama KAP tersebut atau dengan nama lainnya sebagaimana mungkin diubah di masa depan, ataupun para penerus dan penggantinya yang juga merupakan afiliasi dari Deloitte Southeast Asia Limited yang merupakan anggota dari Deloitte Asia Pasific Limited dan Jaringan Deloitte), masing-masing sebagai AP dan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan AP dan KAP tersebut.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk AP dan KAP pengganti dalam hal AP dan KAP yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan AP dan KAP tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Mata Acara Rapat Keempat :
1. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan, yaitu Mizuho Leasing Company Limited dengan kepemilikan saham sebesar 67,44% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk menentukan besarnya honorarium, bonus dan tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Second Meeting Agenda:
To determine the use of the Company's net profit for the Fiscal Year of 2023 amounted to Rp 61,149,828,459.- (sixty one billion one hundred forty-nine million eight hundred twenty-eight thousand four hundred fifty-nine Rupiah) for:

1. The amount of Rp 300,000,000.- (three hundred million Rupiah) determined as a reserve, in accordance with the provisions of Article 23 of the Articles of Association of the Company and Article 70 of the Law Number: 40 of 2007 regarding Limited Liabilities Companies ("UUPT");
2. the remaining amount of Rp 60,849,828,459.- (sixty billion eight hundred forty-nine million eight hundred twenty-eight thousand four hundred fifty-nine Rupiah) determined as retained earnings

Thus, for the fiscal year of 2023 the Company does not distribute dividend.

Third Meeting Agenda:
1. Approve to appoint Public Accountant ("AP") Bayu M Dayat and Public Accountant Firm ("KAP") Imelda & Partners (bearing such KAP name or such other name as such entity may have in the future, or the successor and replacement which is an affiliate of Deloitte Southeast Asia Limited that is a member of Deloitte Asia Pacific Limited and of the Deloitte Network), respectively as the AP and KAP to audit the Financial Report of the Company for the fiscal year of 2024.
2. Approve to provide proxy and authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements, with respect to the appointment of the pertinent AP and KAP.
3. Approve to authorize the Board of Commissioners to appoint other AP and KAP in the event of the appointed AP and KAP for any reason unable to perform their duties, provided that in appointing the AP and the KAP, the Board of Commissioners must observe the Recommendations from the Company's Audit Committee and meet the criteria as stipulated in POJK No. 9 Year 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

Fourth Meeting Agenda:
1. Approve to authorize the Controlling Shareholders of the Company, namely Mizuho Leasing Company Limited with a stake of 67.44% of shares issued by the Company, to determine the amount of honorarium, bonuses and allowances for all members of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year of 2024 with regard to the recommendation of the Company's Nomination & Remuneration Committee.

2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan untuk seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

2. Approve to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary, bonuses and allowances for all members of the Company's Board of Directors for the fiscal year of 2024 with regard to the recommendation of the Company's Nomination & Remuneration Committee.

Mata Acara Rapat Kelima :

1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atau Masyarakat (melalui penerbitan efek selain efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum) atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal. Penjaminan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Mata Acara Rapat ini, merupakan pengecualian dari Transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
2. Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut diatas berlaku untuk tahun buku 2024.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada angka 1 diatas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, serta memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fifth Meeting Agenda:

1. Approve to pledge more than 50% (fifty percent) or all of the net assets of the Company in order to obtain a loan facility that will be received by the Company from a bank, a venture capital company, a finance company, or an infrastructure financing company both domestically or overseas or Public through the issuance of securities other than equity type securities through a public offering on loans received directly by the Company or Controlled Company with regard to the terms and condition of the prevailing laws and regulations, especially Capital Market regulations. The guarantee for the Company's assets as referred to in this Meeting Agenda, is an exception to Material Transactions as specified in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities and are not Affiliated Transactions or Conflict of Interest Transactions in Certain Transactions as stipulated in OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.
2. Granting of the approval as referred to in number 1 above, for the fiscal year of 2024.
3. Approve to authorize the Board of Directors to carry out any and all actions needed in connection with the said action in number 1 above, with regard to the approval of the Company's Board of Commissioners, with regard to the terms and conditions of the Capital Market provisions and the prevailing laws and regulations.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")
Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS")

Pada tahun 2024 Perseroan mengadakan 2 kali RUPSLB yaitu tanggal 21 Maret 2024 dan 7 November 2024 .

In 2024, the Company held twice EGMS, on March 21, 2024 and November 7, 2024.

RUPSLB tanggal 21 Maret 2024 diselenggarakan di Catur Dharma 1, Menara Astra, Lantai 5 - Jakarta Jl. Jend. Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220 pada pukul 10.05 – 10.22 WIB. Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili 5.260.805.908 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 92,5001% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

The EGMS - 21 March 2024 was held at Catur Dharma 1, Menara Astra, 5th Floor - Jakarta Jl. Jend. Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10220 at 10.05 – 10.22 WIB. The meeting was attended by Shareholders representing 5,260,805,908 shares, which have valid voting rights or equivalent to approximately 92.5001% of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

Hasil RUPSLB tanggal 21 Maret 2024, pada pokoknya menyetujui hal-hal sebagai berikut:

The results of the EGMS on 21 March 2024 in principle agreed on the following matters:

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki dari jabatannya selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama

First Meeting Agenda:

1. Approved to accept the resignation of Mr. Takeshi Sasaki from his position as President Commissioner as of the closing of the Meeting, with gratitude for the contribution of energy and thoughts given while serving as President

menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.

2. Menyetujui untuk mengangkat:
   - Bapak YASUO IMAIZUMI selaku KOMISARIS UTAMA Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari Bapak Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama Perseroan yang digantikannya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

   - Ibu BHINDAWATI GUNAWAN selaku KOMISARIS Perseroan, terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari Ibu Roosniati Salihin selaku Komisaris Perseroan yang digantikannya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

   Untuk memenuhi Pasal 18 ayat 5. dan 8. Anggaran Dasar Perseroan, calon Komisaris Utama dan Komisaris telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 26 Februari 2024.

   Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

   DEWAN KOMISARIS
   - Bapak Yasuo Imaizumi selaku Komisaris Utama
   - Ibu Bhindawati Gunawan selaku Komisaris*)
   - Bapak Mohammad Syahrial selaku Komisaris Independen

   *) Bahwa pengangkatan Ibu Bhindawati Gunawan selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan *(fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggota Dewan Komisaris dalam suatu akta Notaris tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Commissioner of the Company.

2. Approved to appoint:
   - Mr. YASUO IMAIZUMI as the PRESIDENT COMMISSIONER of the Company, as of the closing of the Meeting, with a term of office for the remaining term of office of Mr. Takeshi Sasaki as the President Commissioner of the Company who he replaced, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 financial year which will be held in 2025.
   - Mrs. BHINDAWATI GUNAWAN as COMMISSIONER of the Company, as of the receipt of approval from the OJK for the fit & proper test and in compliance with applicable laws and regulations, with a term of office for the remaining term of office of Mrs. Roosniati Salihin as Commissioner of the Company, who she replaced namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 financial year which will be held in 2025.

   To comply with Article 18 paragraphs 5. and 8. of the Company's Article Of Association, the candidates for President Commissioner and Commissioner have signed a Statement Letter dated 26 February 2024.

   Thus, starting from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 financial year which will be held in 2025, taking into account regulations in the Capital Market sector and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, the composition of the members the Board of Commissioners are as follows:

   BOARD OF COMMISSIONERS
   - Mr.Yasuo Imaizumi as President Commissioner
   - Mrs.Bhindawati Gunawan as Commissioner*)
   - Mr.Mohammad Syahrial as Independent Commissioner

   *) That the appointment of Mrs. Bhindawati Gunawan as Commissioner of the Company is effective as of the receipt of approval from the OJK for the fit and proper test and in compliance with applicable laws and regulations.

3. Approve to authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare the change the Company's Board of Commissioners in a separate Notarial deed before a Notary and to administer the notification as well as registration to the competent authority, and to undertake all necessary actions in connection therewith.

RUPSLB tanggal 7 November 2024 diselenggarakan di Function Hall C, Wisma 46, Lantai 3 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 pada pukul 09.36 – 09.52 WIB. Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili 5.262.922.125 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 92,54% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Hasil RUPSLB tanggal 7 November 2024 pada pokoknya menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Perubahan Anggota Direksi Perseroan yaitu menerima pengunduran diri Ibu Ade Rafida S. dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 30 Agustus 2024 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan kepada Perseroan. Adapun pembebasan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et decharge*) akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang membahas mengenai persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.

   Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

   DIREKSI
   - Bapak Konosuke Mizuta selaku Direktur Utama
   - Bapak Andi Harjono selaku Direktur
   - Bapak Shunsuke Kojima selaku Direktur
   - Bapak Yudi Gustiawan selaku Direktur

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dalam suatu akta Notaris tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

The EGMS - 7 November 2024 was held at Function Hall C, Wisma 46 , 3rd FloorJl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 at 09.36 – 09.52 WIB. The meeting was attended by Shareholders representing 5.262.922.125 shares, which have valid voting rights or equivalent to approximately 92.54% of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

The results of the EGMS on 7 November 2024 in principle agreed on the following matters:

First Meeting Agenda:

1. Approving the Changes of the Company's Member of the Board of Directors, namely to accept the resignation of Mrs. Ade Rafida S. from her position as Director of the Company's effective as of August 30, 2024 with gratitude for the contribution of energy and thoughts given to the Company. The release from responsibility and all dependents (acquit et decharge) will be decided at the Annual General Meeting of Shareholders which will discuss the approval of the Company's Annual Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company, as well as the ratification of the Company's Financial Statements for the financial year of 2024.

   Thus, starting from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 financial year which will be held in 2025, taking into account regulations in the Capital Market sector and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, the composition of the members of the Board of Directors of the Company are as follows:

   BOARD OF DIRECTORS
   - Mr.Konosuke Mizuta as President Director
   - Mr.Andi Harjono as Director
   - Mr.Shunsuke Kojima as Director
   - Mr.Yudi Gustiawan as Director

2. Approve to authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare the change of Member of the Board of Directors in a separate Notarial deed before the Notary and to administer the notification as well as registration to the competent authority, and to undertake all necessary actions in connection therewith.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2023
The Implementation of 2023 GMS

Pada tahun 2023, Perseroan telah melaksanakan 1 kali RUPST. Seluruh keputusan pada RUPS tahun 2023 telah direalisasikan.

In 2023, the Company held 1 AGMS. All decisions taken at the 2023 GMS were realized.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan baik secara khusus maupun umum sesuai dengan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris juga berwenang memberi nasihat kepada Direksi dalam segala hal terkait pengelolaan Perseroan. Anggota Dewan Komisaris ditunjuk dan diberhentikan melalui RUPS. Masa jabatan setiap anggota Dewan Komisaris berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ketiga setelah tanggal pengangkatan dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatannya.

The Board of Commissioners is the Company's organ that has the duty and authority to supervise both specifically and generally in accordance with the Articles of Association. The Board of Commissioners is also authorized to advise the Board of Directors in all matters related to the management of the Company. Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed through the GMS. The term of office of each member of the Board of Commissioners ends at the closing of the third Annual GMS after the date of appointment by taking into account the Capital Market regulation, without prejudice to the right of the GMS to dismiss any member of the Board of Commissioners at any time before the end of his/her term of office.

Komposisi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Composition

Nama Name	Jabatan Position	Uji Kemampuan & Kepatutan Fit & Proper Test
Yasuo Imaizumi	Komisaris Utama President Commissioner	Surat OJK / OJK Letter No. 48/PL.02/2024 7 Feb 2024
Mohammad Syahrial	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat OJK / OJK Letter No. KEP-358/NB.11/2019 27 Jun 2019
Bhindawati Gunawan	Komisaris Commissioner	Surat OJK / OJK Letter No. KEP-239/PL.02/2024 30 May 2024
Takeshi Sasaki*	Komisaris Utama President Commissioner	Surat OJK / OJK Letter No. KEP-189/NB.11/2021 31 Mar 2021

*) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, RUPS menyetujui pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.
Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") on March 21 2024, the GMS approved the resignation of Mr. Takeshi Sasaki as President Commissioner effective from the closing of the Extraordinary GMS.

Pedoman Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman yang dikaji ulang secara periodik atau dilakukan pengkinian disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman tersebut bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Dasar penyusunan Pedoman Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Juncto Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
3. Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
5. Anggaran Dasar Perseroan.

Board of Commissioners Charter

The Board of Commissioners has Charter which will be reviewed periodically or updated in accordance with the applicable laws and regulations. That Charter is binding for each members of the Board of Commissioners.

The basis for the preparation of the Board of Commissioners Charter are as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Company;
2. OJK Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Company Juncto OJK Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to OJK Regulation Number 30/POJK.05/ 2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Company;
3. OJK Circular Letter Number 15/SEOJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance Implementation Report for Financing Company;
4. OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; and
5. The Company's Articles of Association.

Pada tanggal 31 Desember 2024 telah diundangkan Peraturan OJK Nomor 48 tahun 2024 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Perseroan sedang dalam proses penyesuaian pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris sesuai dengan POJK tersebut pada tahun 2025.

Struktur dan Keanggotaan Dewan Komisaris

1. Jumlah anggota Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang, dengan susunan 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang merupakan Komisaris Independen.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang maka jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
   - anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain,dan
   - anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan lain.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
9. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada Nomor (8) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan lainnya.
10. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan Komisaris tersebut pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir,

On December 31, 2024, OJK Regulation Number 48 of 2024 concerning Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions was enacted and the Company is in the process of adjusting the charter of the Board of Commissioners in accordance with the POJK in 2025.

Structure and Membership of the Board of Commissioners

1. The number of Commissioners shall be at least 2 (two) persons, the composition of 1 (one) President Commissioner and 1 (one) Independent Commissioner.
2. In the event that the Board of Commissioners consists of more than 2 (two) people the number of Independent Commissioners shall be at least 30% (thirty percent) of the total number of members of the Board of Commissioners.
3. At least 1 (one) member of the Board of Commissioners must reside in the territory of the Republic of Indonesia.
4. Any proposal for the appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders must consider the recommendations of the Board of Commissioners or the committee that carries out the nomination function.
5. Each member of the Board of Commissioners must meet the mandatory requirements to pass a fit and proper assessment in accordance with OJK Regulations regarding fit and proper assessment.
6. Members of the Board of Commissioners may hold concurrent positions as:
   - as a member of the Board of Directors at most 2 (two) other Issuers or Public Companies, and
   - as a member of the Board of Commissioners at most 2 (two) other Issuers or Public Companies.
7. In the event that a member of the Board of Commissioners does not hold concurrent position as a member of the Board of Directors, the member of the Board of Commissioners concerned may concurrently serve as a member of the Board of Commissioners in a maximum of 3 (three) other Companies.
8. Members of the Board of Commissioners may concurrently serve as committee members in no more than 5 (five) committees in the Company where the person concerned also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.
9. Concurrent positions as a member of the committee as referred to in Number (8) can only be carried out as long as they do not conflict with other laws and regulations.
10. Members of the Board of Commissioners are appointed for a period commencing as of the date determined by the GMS which appointed them and ending at the closing of the 3rd (third) Annual GMS which was held after the date of the GMS that appointed the members of the Board of Commissioners at the end of 1 (one) term of office as referred to provisions 1 (one) term of office for a member of the Board of Commissioners is 3 (three) years, taking into account the laws and regulations in the Capital Market, however, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the member of the Board of Commissioners at any time before his term of office ends, taking into account the

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

11. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
12. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
    - Meninggal dunia;
    - Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
    - Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.
4. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
5. Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
6. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk:
    - Komite Audit
    - Komite Pemantau Risiko
    - Komite Remunerasi dan Nominasi
8. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
9. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
    - pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
    - kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

applicable laws and regulations and the provisions of the Company's Articles of Association.

11. After their term of office end, the member of the Board of Commissioners may be re- appointed in accordance with a resolution of the GMS.
12. The term of office of a member of the Board of Commissioners automatically ends, if the member of the Board of Commissioners:
    - Pass away;
    - Be placed under interdiction based on a court decision; or
    - No longer fulfills the requirements of the prevailing laws by taking into account the regulations in the Capital Market.

Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners is in charge of supervising and is responsible for supervising management policies and providing advice to the Board of Directors.
2. Under certain conditions, the Board of Commissioners is required to hold an annual GMS and other GMS in accordance with their authority as stipulated in laws and regulations and the Articles of Association.
3. Supervise the Board of Directors in maintaining a balance of the interests of all parties.
4. Prepare reports on the activities of the Board of Commissioners which are part of the report on the implementation of Good Corporate Governance.
5. Monitor the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance.
6. Members of the Board of Commissioners must carry out their duties and responsibilities in good faith, with full responsibility, and prudence.
7. In order to support the effectiveness of carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners must establish:
    - Audit Committee
    - Risk Monitoring Committee
    - Remuneration and Nomination Committee
8. The Board of Commissioners is required to evaluate the performance of the committees that assist in carrying out their duties and responsibilities at the end of each financial year.
9. The Board of Commissioners together with the Board of Directors must prepare:
    - charter that bind each member of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
    - code of conduct that applicable for all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, employees/worker, as well as supporting organs owned by the Company, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
10. Each member of the Board of Commissioners is fully and jointly responsible for the Company's losses caused by the mistakes or negligence of members of the Board of Commissioners in carrying out their duties.

11. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka (10), apabila dapat membuktikan:
    - kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    - telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    - tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
    - telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
12. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
13. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.
14. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
15. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan berlaku pula baginya.
16. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Komisaris Independen wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya:
    - pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/atau
    - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.

11. Members of the Board of Commissioners cannot be held accountable for the Company's losses as referred to in point (10), if they can prove:
    - the loss was not due to his fault or negligence;
    - has conducted management in good faith, full of responsibility and prudence for the benefit and in accordance with the aims and objectives of the Company;
    - has no conflict of interest, either directly or indirectly, for management actions that result in losses; and
    - has taken action to prevent the loss from arising or continuing.
12. The Board of Commissioners at any time during office hours of the Company has the right to enter building and yards or other places used or controlled by the Company and has the right to examine all books, letters and other evidence, examine and match the condition of cash and others and has the right to know all actions that have been carried out by the Board of Directors.
13. The Board of Commissioners are entitled to request an explanation from the Board of Directors regarding all matters that are asked and each member of the Board of Directors is obliged to provide an explanation regarding all matters that are asked by the Board of Commissioners and members of the Board of Commissioners are entitled to obtain information from the Board of Directors regarding the Company in a complete and timely manner.
14. If all members of the Board of Directors are temporarily dismissed or if for any reason the Company does not have a single member of the Board of Directors, the Board of Commissioners are temporarily obliged to manage the Company. In such case the Board of Commissioners are entitled to grant temporary powers to one or more members of the Board of Commissioners at the expense of the Board of Commissioners.
15. In the event that there is only one member of the Board of Commissioners, all duties and authorities given to the President Commissioner or members of the Board of Commissioners in the Company's Articles of Association shall also apply to him.
16. At any time the Board of Commissioners based on a decision of the Board of Commissioners Meeting may temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors from his position (their position) by stating the reasons, taking into account the provisions of the Company's Articles of Association and/or the prevailing laws and regulations.
17. The Independent Commissioner is required to report to OJK no later than 10 (ten) calendar days after the discovery of:
    - violation of laws and regulations in the field of financing; and/or
    - circumstances or estimates of conditions that may endanger the continuity of the Company's business.

Transparansi

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan :

1. Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri
2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham Perseroan
3. Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Perseroan.
4. Jabatan mereka di perusahaan lain

Nilai-Nilai

1. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib mempunyai akhlak dan moral yang baik, mampu melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan di nyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan tidak permah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perseroan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan jabatannya pada Perseroan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
6. Anggota Dewan Komisaris dilarang mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Persyaratan Komisaris Independen

Komisaris Independen wajib memiliki persyaratan, sebagai berikut:

1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
2. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perseroan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Transparency

Members of the Board of Commissioners are required to disclose:

1. Its share ownership which reaches 5% (five percent) both in the Company and in other companies, which domiciled inside and outside the country
2. Financial and family relationship with other members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or shareholders of the Company
3. Remuneration and facilities received from the Company
4. Their positions in other companies

Values

1. Members of the Board of Commissioners must have high integrity, ability, knowledge, experience according to their field of work and be able to communicate well.

2. Members of the Board of Commissioners must have good characters and morals, are able to carry out legal actions, have never been declared bankrupt or become members of the Board of Directors or Board of Commissioners who are found guilty of causing a company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to the appointment and have never been punished for commit a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to appointment.

3. Members of the Board of Commissioners are prohibited from conducting transactions that have a conflict of interest with the activities of the Company where the said member of the Board of Commissioners serves.
4. Members of the Board of Commissioners are prohibited from using their positions in the Company where the said member of the Board of Commissioners serve for personal, family, and/or other party' interests that may harm or reduce the profits of the Company where the said member of the Board of Commissioners serve.
5. Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking and/or receiving personal benefits either directly or indirectly from the Company's activities other than legitimate income.
6. Members of the Board of Commissioners are prohibited from interfering with the Company's operational activities which are the responsibility of the Board of Directors.

Independent Commissioner Requirements

Independent Commissioners must have the following requirements:

1. is not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period.

2. has never served as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, member of the Sharia Supervisory Board (DPS) or held a position 1 (one) level below the Board of Directors in another company affiliated with the Company within the last 6 (six) month.

3. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan
4. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham Perseroan
5. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan
6. memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
7. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat
8. memiliki kewarganegaraan Indonesia
9. berdomisili di Indonesia
10. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya

Fungsi dan Tugas Pokok Komisaris Independen

Komisaris Independen memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut:

1. Menjabat sebagai Ketua Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi
2. Melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya
3. Komisaris Independen wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan

Kebijakan tentang Penilaian terhadap Kinerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

1. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja
   a. **Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**
      Prosedur penilaian dilakukan dengan penilaian mandiri oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

   b. **Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi**

      Proses penilaian Direksi dilakukan secara kolektif dan individual dengan mempertimbangkan beberapa indikator dan kriteria penilaian *Key Performance Indicators* (“KPI”) yang disepakati oleh anggota Direksi Perseroan. Sistem penilaian dilakukan bersama seluruh anggota Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

3. does not own shares either directly or indirectly of the Company
4. does not have affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the shareholder of the Company
5. does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the Company’s business activities

6. understand the laws and regulations in the financing field and other relevant laws and regulations

7. have sufficient knowledge of the financial condition of the Company where the said Independent Commissioner serves
8. have Indonesian citizenship
9. domiciled in Indonesia
10. In the event that an Independent Commissioner serves on the Audit Committee, the relevant Independent Commissioner can only be reappointed to the Audit Committee for the next 1 (one) term of office of the Audit Committee

Independent Commissioners Functions and Duties

The Independent Commissioner has the following functions and duties:

1. Serves as Chair of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Nomination and Remuneration Committee
2. Perform supervisory functions to voice the interests of debtors, creditors, and other stakeholders

3. Independent Commissioners must report to OJK no later than 10 (ten) calendar days from the discovery of violations of laws and regulations in the field of financing and/or circumstances or estimates of circumstances that may jeopardize the Company’s business continuity

Policy on the performance Assessment of the Members of the Board of Directors and Board of Commissioners

1. Performance Appraisal Implementation Procedure
   a. **Procedures for the Implementation of the Board of Commissioners Performance Assessment**
      The assessment procedure is carried out by using self-assessment method by the Board of Commissioners with due observance of recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
   b. **Procedures for the Implementation of the Board of Directors Performance Assessment**
      The Board of Directors assessment process is carried out collectively and individually by taking into account several indicators and assessment criteria for Key Performance Indicators (“KPI”) agreed upon by members of the Company’s Board of Directors. The assessment system is carried out with all members of the Board of Directors to be submitted to the Board of Commissioners by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

2. Kriteria yang digunakan
   a. **Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**

      Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagaimana berikut:
      - Kehadiran dalam rapat internal Dewan Komisaris;
      - Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi;
      - Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dengan Komite;
      - Kehadiran dalam rapat Komite; dan
      - Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

   b. **Kriteria Penilaian Kinerja Direksi**

      Penilaian terhadap kinerja Direksi mencakup hal-hal sebagaimana berikut:
      - Pelaksanaan dari Visi dan Misi Perseroan;
      - Terlaksananya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan;
      - Terlaksananya pencapaian Rencana Bisnis Tahunan; dan
      - Terlaksananya pengawasan atas tindak lanjut rekomendasi audit internal, auditor eksternal atau pengawasan OJK.

3. Pihak yang melakukan penilaian

   Dewan Komisaris
   - Pihak yang terlibat di dalam penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

   Direksi
   - Direksi akan melakukan evaluasi kinerja Direksi secara mandiri untuk kemudian disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Komite Nominasi dan Remunerasi akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris

a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
b. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
c. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
d. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (a), butir (b) dan butir (c) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

2. Criteria used
   a. **Board of Commissioners Performance Assessment Criteria**

      Assessment of the performance of the Board of Commissioners includes the following matters:
      - Attendance at internal Board of Commissioners meetings;
      - Attendance at Board of Commissioners meetings with the Board of Directors;
      - Attendance at Board of Commissioners meetings with Committees;
      - Attendance at Committee meetings; and
      - Implementation of the principles of Good Corporate Governance.

   b. **Board of Directors Performance Assessment Criteria**

      Assessment of the performance of the Board of Directors includes the following matters:
      - Implementation of the Company's Vision and Mission;
      - Implementation of Good Corporate Governance in every business activity of the Company;
      - Achievement of the Annual Business Plan; and
      - Implementation of supervision on the follow-up of internal audit recommendations, external auditors or supervision of the OJK.

3. The party conducting the assessment

   Board of Commissioners
   - The parties involved in evaluating the performance of the Board of Commissioners are the Board of Commissioners with due observance of recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.

   Board of Directors
   - The Board of Directors will evaluate its performance independently to be further submitted to the Nomination and Remuneration Committee for assessment purpose. The assessment results by the Nomination and Remuneration Committee will be submitted to the Board of Commissioners.

Board of Commissioners Meetings

a. Meetings of the Board of Commissioners can be held at any time if deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners or at a written request from the Board of Directors or at the request of 1 (one) or more Shareholders jointly representing 1/10 (one tenth) or more of the total all shares that have been issued by the Company with valid voting rights.
b. Meetings of the Board of Commissioners are held regularly at least 1 (one) time in 2 (two) months.
c. Members of the Board of Commissioners must attend at least 75% (seventy five percent) of the Board of Commissioners' meetings in a period of 1 (one) year.
d. The Board of Commissioners meeting referred to in point (a), point (b) and point (c) can be held if it is attended by a majority of all members of the Board of Commissioners.

e. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
f. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada butir (a), butir (b), butir (c) dan butir (e) wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
g. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam butir (b) dan butir (e) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
h. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir (g) bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
i. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada butir (g), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
j. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Dewan Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
k. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
l. Pemanggilan Rapat harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
m. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dan hasil keputusan Rapat disetujui oleh semua anggota Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
n. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
o. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

e. The Board of Commissioners must hold regular meetings with the Board of Directors at least 1 (one) time in 4 (four) months.
f. The presence of members of the Board of Commissioners at the meetings referred to in points (a), points (b), points (c) and points (e) must be disclosed in the Company's Annual Report.
g. The Board of Commissioners must schedule the meeting referred to in point (b) and point (e) for the following year before the end of the financial year.
h. At the scheduled meeting as referred to in point (g), the meeting materials shall be submitted to the participants no later than 5 (five) days before the meeting is held.
i. In the event that a meeting is held outside the schedule that has been prepared as referred to in point (g), the meeting materials shall be submitted to the meeting participants no later than before the meeting is held.
j. Invitation to the meeting of the Board of Commissioners is carried out by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent for any reason, which does not need to be proven to a third party, then a member of the Board of Commissioners has the right and authority to call for a meeting of the Board of Commissioners.
k. Invitations to the meeting of the Board of Commissioners are sent by any means in written form, which summons must be sent to members of the Board of Commissioners no later than 5 (five) calendar days before the meeting is held or in a shorter time in urgent circumstances, namely no later than 1 (one) year calendar day before the Meeting excluding the date of the summons and the date of the Meeting, the urgency is determined by the President Commissioner. If all members of the Board of Commissioners are present at the meeting, no prior summons is required
l. The summons for the meeting must include the meeting agenda, date, time and place of the meeting.
m. Meetings of the Board of Commissioners are held at the domicile of the Company or at the place of business activity or at the domicile of the Stock Exchange where the Company's shares are listed, or at other places within the territory of the Republic of Indonesia. If all members of the Board of Commissioners are present or represented and the results of the Meeting are approved by all members of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners' meeting can be held at another place as determined by the Board of Commissioners and the meeting has the right to make valid and binding decisions.
n. The meeting of the Board of Commissioners is chaired by the President Commissioner, if the President Commissioner is absent or unable to attend the meeting which does not need to be proven to a third party, then the meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners who is elected by and from the members of the Board of Commissioners present at the meeting.
o. A member of the Board of Commissioners can only be represented at a meeting of the Board of Commissioners by another member of the Board of Commissioners based on a power of attorney.

p. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.

q. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam satu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perusahaan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

r. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

s. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

t. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam butir (a), butir (b) dan butir (c) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

u. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam butir (e) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

v. Perbedaan pendapat *(dissenting opinions)* yang terjadi dalam keputusan Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat *(dissenting opinions)* tersebut.

w. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris.

x. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir (t) dan butir (u), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

y. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada butir (t) dan butir (u) wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

p. Each member of the Board of Commissioners has the right to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Commissioners he represents.

q. Each member of the Board of Commissioners who personally in any way either directly or indirectly has an interest in a proposed transaction, contract or proposed contract, in which the Company becomes one of the parties must state the nature of the interest in a Board of Commissioners Meeting and is not entitled to participate in voting on matters related to the transaction or contract, unless the meeting of the Board of Commissioners determines otherwise.

r. Voting regarding individuals is carried out by means of closed ballots without a signature, while voting on other matters is carried out verbally unless the Chairperson of the Meeting determines otherwise without any objection from those present.

s. Decision-making at the Board of Commissioners' meeting must be made based on deliberation for consensus. In the event that a consensus decision is not reached, the decision is made based on the majority vote.

t. The results of the meeting referred to in point (a), point (b) and point (c) must be recorded in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Commissioners who are present and submitted to all members of the Board of Commissioners.

u. The results of the meeting referred to in point (e) must be recorded in the minutes of the meeting, signed by the attending members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, and submitted to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

v. Dissenting opinions that occur in the decisions of the Board of Commissioners Meeting must be clearly stated in the minutes of the Board of Commissioners meeting along with the reasons for the dissenting opinions.

w. Members of the Company's Board of Commissioners who are present or not present at the meeting of the Board of Commissioners are entitled to receive a copy of the minutes of the meeting of the Board of Commissioners.

x. In the event that a member of the Board of Commissioners does not sign the results of the meeting referred to in point (t) and point (u), the person concerned must state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.

y. The minutes of meeting referred to in point (t) and point (u) must be documented by the Company.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Tahun 2024

Frequency of Board of Commissioners Meeting Year 2024

Nama Name	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting		Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Joint Board of Commissioners Meeting with Board of Directors	
	Kehadiran Attendance	Rasio Kehadiran Attendance Ratio	Kehadiran Attendance	Rasio Kehadiran Attendance Ratio
Yasuo Imaizumi*	2/6	33.33%	3/6	50.00%
Bhindawati Gunawan**	3/6	50.00%	4/6	66.66%
Mohammad Syahrial	6/6	100.00%	6/6	100.00%
Takeshi Sasaki***	2/6	33.33%	1/6	16.66%

*) Berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, RUPS menyetujui pengangkatan Bapak Yasuo Imaizumi selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.
Based on the Extraordinary GMS dated March 21, 2024, the GMS approved the appointment of Mr. Yasuo Imaizumi as President Commissioner effective as of the closing of the Extraordinary GMS.

**) Pengangkatan Ibu Bhindawati Gunawan selaku Komisaris telah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK sesuai Keputusan Dewan Komisioer OJK No. KEP-239/PL.02/2024 Tanggal 30 Mei 2024.
The appointment of Mrs. Bhindawati Gunawan as Commissioner has received approval from the OJK based on the OJK's fit and proper test in accordance with the Decree of the OJK Board of Commissioners No. KEP-239/PL.02/2024 dated May 30, 2024.

***) Berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, RUPS menyetujui pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.
Based on the EGMS held on March 21, 2024, the EGMS approved the resignation of Mr. Takeshi Sasaki as the President Commissioner, effective from the closing of the EGMS.

Pelatihan Dewan Komisaris

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, maka sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan-pelatihan, antara lain:

Board of Commissioners Trainings

In order to expand their knowledge and competence, throughout 2024, the Board of Commissioners had participated in several trainings, including:

Nama Name	Pelatihan Dewan Komisaris The Board of Commissioners Trainings		
	Pelatihan / Trainings	Tanggal / Date	Penyelenggara / Organizer
Takeshi Sasaki*	-	-	-
Yasuo Imaizumi	*Financing Challenges In The Amidst Of Economic Slowdown*	13 Dec 2024	APPI
Bhindawati Gunawan	Seminar Nasional Tantangan Pembiayaan Tahun 2024 National Seminar on Financing Challenges 2024	30 Jan 2024	APPI
Mohammad Syahrial	*How To Mitigate Transition And Physical Risks In Financial Sector*	04 Jul 2024	OJK

*) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, RUPS Luar Biasa menyetujui pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.
Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") dated March 21, 2024, the Extraordinary GMS approved the resignation of Mr. Takeshi Sasaki as President Commissioner as of the closing of the Extraordinary GMS.

Penilaian Kinerja Komite-Komite yang Berada di Bawah Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris telah membentuk beberapa Komite yang berada di bawahnya yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Risiko.

Performance Assessment of Committees Under The Board of Commissioners

In order to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners established several Committees under it, namely the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee and the Risk Monitoring Committee.

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit secara independen telah melakukan tinjauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal untuk pemeriksaan Laporan Keuangan tahunan.

Throughout 2024, the Audit Committee independently conducted reviews, evaluations, and provided recommendations for the appointment of external auditors to examine the annual Financial Statements.

Komite Audit juga telah senantiasa melakukan penelaahan atas Laporan Keuangan berkala Perseroan. Selanjutnya, Komite Audit telah melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal, serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan Direksi terhadap hasil pemeriksaan Unit Audit Internal, serta melakukan pemantauan terhadap sistem pelaporan pelanggaran *(whistleblowing system)*.

The Audit Committee also consistently reviewed the Company's periodic Financial Statements. Furthermore, the Audit Committee monitored the performance of the Internal Audit Unit's duties and responsibilities, overseeing the implementation of follow-up actions taken by the Board of Directors regarding the Internal Audit Units findings, as wellas monitored the whistleblowong system.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah secara independen melakukan penilaian kinerja, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

The Nomination and Remuneration Committee independently assessed performance, providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the structure, policies, and remuneration amounts for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Disamping itu, Komite Pemantau Risiko telah secara independen melakukan pemantauan dan penelaahan atas profil risiko Perseroan dan penerapan kepatuhan Perseroan. Komite Pemantau Risiko juga telah senantiasa melakukan evaluasi Laporan hasil penilaian sendiri terhadap tingkat kesehatan Perusahaan.

Additionally, the Risk Monitoring Committee independently monitored and reviewed the Company's risk profile and compliance implementation. The Risk Monitoring Committee also consistently evaluated the results of its own assessments of the Company's soundness level.

Berdasarkan pembahasan realisasi kerja, Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh komite yang berada di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup baik.

Based on the discussion of work realization, the Board of Commissioners assessed that all committees under the Board of Commissioners had performed their duties and responsibilities quite well.

Direksi
Board of Directors

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

The Board of Directors is an organ of the Company that is authorized and fully responsible for the management of the Company for the interests of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and represents the Company, both inside and outside the court, in accordance with the provisions of the Articles of Association.

Komposisi Direksi
Board of Directors Composition

Nama Name	Jabatan Position	Uji Kemampuan & Kepatutan Fit & Proper Test
Konosuke Mizuta	Direktur Utama President Director	Surat OJK / OJK Letter No. KEP-354/NB.11/2019 27 Jun 2019
Shunsuke Kojima	Direktur Director	Surat OJK / OJK Letter No. KEP-363/NB.11/2019 27 Jun 2019
Andi Harjono	Direktur Director	Surat OJK / OJK Letter No. KEP-355/NB.11/2019 27 Jun 2019
Ade Rafida Saulina S*	Direktur Director	Surat OJK / OJK Letter No. KEP-361/NB.11/2019 27 Jun 2019
Yudi Gustiawan	Direktur Director	Surat OJK / OJK Letter No. KEP-653/NB.11/2019 5 Nov 2019

*) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 7 November 2024, RUPS menyetujui pengunduran diri Ibu Ade Rafida Saulina S selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 30 Agustus 2024.
Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") on November 7, 2024, the GMS approved the resignation of Mrs. Ade Rafida Saulina S as Director the Company effective as of August 30, 2024.

Pedoman Direksi

Direksi memiliki Pedoman yang dikaji ulang secara periodik atau dilakukan pengkinian disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman tersebut bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.

Dasar penyusunan Pedoman Direksi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Juncto Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
3. Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan;
4. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
5. Anggaran Dasar Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 telah diundangkan Peraturan OJK Nomor 48 tahun 2024 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Perseroan sedang dalam proses penyesuaian pedoman dan tata tertib kerja Direksi sesuai dengan POJK tersebut pada tahun 2025.

Struktur dan Keanggotaan Direksi

1. Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang. Dengan susunan 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.
2. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia (lebih dari 50% jumlah anggota Direksi).
4. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
5. Seluruh anggota Direksi harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.
6. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.
7. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain.
8. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan:
   a. sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan lain;

Board of Directors Charter

The Board of Directors has Charter which will be reviewed periodically or updated in accordance with the applicable laws and regulations. That Charter is binding for each members of the Board of Directors.

The basis for the preparation of the Board of Directors Charter are as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Company;
2. OJK Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Company Juncto OJK Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to OJK Regulation Number 30/POJK.05/ 2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Company;
3. OJK Circular Letter Number 15/SEOJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance Implementation Report for Financing Company;
4. OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; and
5. The Company's Articles of Association.

On December 31, 2024, OJK Regulation Number 48 of 2024 concerning Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions was enacted and the Company is in the process of adjusting the charter of the Board of Directors in accordance with the POJK in 2025.

Board of Directors Structure and Membership

1. The number of members of the Board of Directors is at least 3 (three) people. With the composition of 1 (one) President Director and 2 (two) Directors.
2. All members of the Board of Directors must be domiciled in the territory of the Republic of Indonesia.
3. The majority of members of the Board of Directors must be Indonesian citizens (more than 50% of the total members of the Board of Directors).
4. Any proposed appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders must take into account the recommendations of the Board of Commissioners or the committee that carries out the nomination function.
5. All members of the Board of Directors must have relevant knowledge to their position.
6. Each member of the Board of Directors must meet the requirements to pass the fit and proper test in accordance with OJK Regulations regarding the fit and proper test.
7. Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as Directors in other companies.
8. Members of the Board of Directors may hold concurrent positions:
   a. as a member of the Board of Commissioners in at most 3 (three) other companies;

b. sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris;

9. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat mereka pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar.
10. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
11. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
    a. Meninggal dunia;
    b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
    c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.
12. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, maka selambat lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan yang berlaku, Anggota Direksi memiliki Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang sebagai berikut :

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Anggota Direksi Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan internal Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Direksi dapat membentuk komite.

b. as a member of the Committee in at most 5 (five) committees in the Issuer or Public Company where the person concerned also serves as a member of the Board of Commissioners;

9. Members of the Board of Directors are appointed for a period commencing as of the date determined by the GMS which appointed them and ending at the closing of the 3rd (third) Annual GMS which was held after the date of the GMS that appointed them at the end of 1 (one) term of office as referred to provisions 1 (one) term of office of members of the Board of Directors is 3 (three) years, taking into account of laws and regulations in the Capital Market, however, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the member of the Board of Directors at any time before his term of office ends, taking into account the the applicable laws and regulations and the provisions of the Company's Articles of Association.
10. After their term of office end, the member of the Board of Directors may be reappointed in accordance with a resolution of the GMS.
11. The term of office of a member of the Board of Directors automatically ends, if the member of the Board of Directors:
    a. Pass away;
    b. Be placed under interdiction based on a court resolution or
    c. No longer fulfills the requirements of the prevailing laws by taking into account the regulations in the Capital Market.
12. If the position of a member of the Board of Directors is vacant due to any reason that causes the number of members of the Board of Directors to be less than 3 (three) people, then at the latest 90 (ninety) calendar days after the vacancy, a GMS must be held for filling the vacancy, taking into account the prevailing laws and regulations in the Capital Market.

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Directors

Referring to the Company's Articles of Association and the provisions of the applicable laws and regulations, members of the Board of Directors have the following Duties, Responsibilities and Authorities:

1. The Board of Directors is in charge of carrying out and being responsible for the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company set out in the Articles of Association.
2. Members of the Company's Board of Directors must comply with laws and regulations, the Company's Articles of Association and the Company's internal regulations. In carrying out the duties and responsibilities of management, the Board of Directors is required to hold an annual GMS and other GMS as stipulated in the laws and regulations and the Articles of Association.
3. Each member of the Board of Directors must carry out their duties and responsibilities in good faith, full of responsibility and prudence.
4. In order to support the effectiveness of carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors may form a committee.

5. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:

   a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
   b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka (7), apabila dapat membuktikan:
   a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
   b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
   c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
   d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam angka (10) di bawah ini.
10. Direksi mewakili Perseroan sebagaimana yang terdapat pada angka (9), akan tetapi dengan pembatasan untuk:
    a. menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau
    b. mengalihkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang Perseroan yang telah dihapusbukukan, melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau
    c. menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/menjaminkan kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
    d. memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah;
    e. memperoleh atau melepaskan penyertaan modal pada perusahaan lain;
    f. memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk kepentingan pihak lain;
    g. menerima pinjaman uang dari siapapun;

5. In the event that a committee is formed, the Board of Directors is required to evaluate the performance of the committee at the end of each financial year.
6. The Board of Directors together with the Board of Commissioners must prepare:
   a. Guidelines that bind each member of the Board of Directors and Board of Commissioners, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
   b. The code of ethics that applies to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, employees/employees, and supporting organs of the Company, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
7. Each member of the Board of Directors is fully and jointly responsible for the Company's losses caused by errors or negligence of members of the Board of Directors in carrying out their duties.
8. Members of the Board of Directors cannot be held accountable for the Company's losses as referred to in number (7), if they can prove:
   a. the loss was not due to his fault or negliance.
   b. has conducted management in good faith, full of responsibility and prudence for the benefit and in accordance with the aims and objectives of the Company.
   c. has no conflict of interest, either directly or indirectly, for management actions that result in losses, and
   d. has taken action to prevent the loss from arising or continuing.
9. The Board of Directors represents the Company legally and directly both inside and outside the court on all matters and in all events, binds the Company with other parties and other parties with the Company and carries out all actions, both regarding management and ownership, with the limitations as specified in number (10) below.

10. The Board of Directors represent the Company as referred to in point (9), but with limitation for:
    a. deleting or removal the Company's receivables from the books exceeding the amount determined from time to time by the Board of Commissioners; or
    b. transferring or releasing the Company's right to collect the Company's written-off receivables, exceeding the amount determined from time to time by the Board of Commissioners; or
    c. selling or transferring or relinquishing the rights, or pledge/guarantee the Company's assets, either in one transaction or in several independent transactions or related transactions, in the exceeding amount of as determined from time to time by the Board of Commissioners;
    d. obtaining by any means immovable property, including land rights;
    e. obtaining or releasing equity participation in other companies;
    f. Providing a corporate guarantee for the benefit of another party;
    g. receiving the loan from anyone;

h. memberikan pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

Harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal. Ketentuan pada angka (10) ini tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam angka (11) dibawah ini.

11. Perbuatan hukum untuk (1) mengalihkan atau melepaskan hak atau (2) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
12. Perbuatan hukum:
    a. untuk melakukan transaksi material, tunduk pada Peraturan OJK yang mengatur tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    b. untuk melakukan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan tunduk pada Peraturan OJK yang mengatur mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan dan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

    b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.

h. providing the loan to anyone except in the context of carrying out the Company's business activities.

Shall obtain a prior written approval from or the relevant deed is also signed by the Board of Commissioners, such approval can be given to take one action or more than one action and from time to time it can be reviewed, taking into account the regulations in the Capital Market sector. The provisions in point (10) do not reduce what is specified in point (11) below.

11. Legal acts for (1) transfer or relinquish rights or (2) guarantee the debt of all or most of the Company's assets with a value more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) transaction or more, whether they are related to each other or not and the transaction as referred to is a transfer of the Company's net assets that occurs within a period of 1 (one) financial year, must obtain the approval of the GMS with the terms and conditions.

12. Legal action:
    a. to carry out material transactions, comply with OJK Regulations governing Material Transactions and changes in business activities with due observance of the provisions in the applicable laws and regulations.

    b. to carry out affiliated transactions and conflicts of Interest subject to OJK Regulations governing affiliated transactions and conflicts of Interest and with due observance of the provisions in the applicable laws and regulations.
13. a. The President Director has the rights and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company.
    b. In the event that the President Director is absent or unable to attend for any reason whatsoever, which does not need to be proven to the third party, then 2 (two) other members of the Board of Directors has the rights and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.
14. Distribution of duties and authorities of each member of the Board of Directors is determined by the GMS, in the event that the GMS does not determine, then distribution of duties and authorities of each member of the Directors is determined based on the resolution of Meeting of the Board of Directors.
15. If something is occurred where the Company's interests conflict with the personal interests of a member of the Board of Directors, then the Company will be represented by another member of the Board of Directors who has no conflict of interest and in the event that the Company has conflict of interest with the interests of all members of the Board of Directors, then in this case the Company will be represented by the Board of Commissioners or someone who is appointed by the Board of Commissioners. In the event that there is no member of the Board of Commissioners, the GMS appoints one or more persons to represent the Company in performing the tasks as mentioned above.

16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
    a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan dan
    b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana angka (16) diatas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
    a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
    b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan atau
    c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

16. The member of the Board of Directors is not authorized to represent the Company if:
    a. there is a case in the court between the Company and the relevant member of the Board of Directors and
    b. the relevant member of the Board of Directors concerned has a conflict of interests with the Company's interest.
17. In the event that there is a conditions as referred to number (16) above, those entitled to represent the Company are:
    a. other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company.
    b. the Board of Commissioners in case all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company or
    c. other parties appointed by the GMS in the event that all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners have conflict of interest with the Company.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Duties and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Konosuke Mizuta	Direktur Utama President Director	• Bertanggung jawab dalam pengelolaan Perseroan dengan memastikan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, audit internal, penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, legal korporasi, *corporate strategic planning*, *business processing,* sekretaris perusahaan dan hubungan investor sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai, Anggaran Dasar Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Responsible for the management of the Company by ensuring the functions of risk management, compliance, internal audit, anti-money laundering implementation, countering the financing of terrorism, countering the financing of the proliferation of weapons of mass destruction, consumer protection, personal data protection, corporate legal, corporate strategic planning, business processing, corporate secretarial, and investor relations are aligned with the Company's vision, mission, values, Articles of Association, in compliance with applicable laws and regulations, and the application of the principles of Good Corporate Governance. • Bersama dengan anggota Direksi lain, bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan berkelanjutan. Together with other members of the Board of Directors, responsible for the implementation of sustainable finance. • Memastikan pelaporan kepada otoritas terkait sehubungan laporan manajemen risiko, kepatuhan, audit internal, penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal, perlindungan konsumen, sekretaris perusahaan dan hubungan investor disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. Ensuring that reports to the relevant authorities related to risk management, compliance, internal audit, implementation of anti-money laundering, prevention of terrorism financing and financing of the proliferation of weapons of mass destruction, consumer protection, corporate secretary, and investor relations are submitted completely and in a timely manner.
Andi Harjono	Direktur Director	• Bertanggung jawab dalam implementasi strategi Perseroan khususnya dalam bidang teknologi informasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa. Responsible for the implementation of the Company's strategy, particularly in the areas of information technology, human resources, and procurement of goods and services. • Memastikan pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan organisasi Perseroan sejalan dengan arah bisnis Perseroan. Ensure that human resource development and the Company's organizational development are aligned with the Company's business direction. • Mendukung program keuangan berkelanjutan melalui pelaksanaan program literasi keuangan. Supporting sustainable finance programs through the implementation of financial literacy initiatives. • Memastikan pelaporan kepada otoritas terkait sehubungan laporan teknologi informasi dan sumber daya manusia disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. Ensuring that reports to the relevant authorities related to information technology and human resources are submitted completely and in a timely manner.
Yudi Gustiawan	Direktur Director	• Bertanggung jawab dalam merumuskan strategi pengembangan bisnis dan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis khususnya pada Unit Bisnis Ritel termasuk menjalankan fungsi pemasaran dan penyaluran pembiayaan. Responsible for formulating business development strategies and achieving the targets set in the business plan, particularly in the Retail Business Unit, including carrying out marketing functions and financing distribution.

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
		• Memastikan proses analisa kredit dan operasional dalam Unit Bisnis Ritel telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Ensuring that the credit and operational analysis processes in the Retail Business Unit are carried out in accordance with the applicable policies and regulations. • Memastikan pelaksanaan mekanisme penindaklanjutan pengaduan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ensure the implementation of consumer complaint follow-up mechanisms in accordance with the applicable laws and regulations. • Bertanggung jawab dalam manajemen aset, fungsi penagihan hingga penyelesaian perkara litigasi Perseroan. Responsible for asset management, the collections function, and the resolution of the Company's litigation cases. • Mendukung program keuangan berkelanjutan melalui pengembangan produk keuangan berkelanjutan dan pelaksanaan program inklusi keuangan. Supporting sustainable finance programs through the development of sustainable finance products and implementation of financial inclusion initiatives. • Memastikan pelaporan kepada otoritas terkait sehubungan laporan pemasaran dan penyaluran pembiayaan, pengaduan konsumen, penyelesaian perkara litigasi, inklusi keuangan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. Ensuring that reports to the relevant authorities regarding marketing and financing distribution, consumer complaints, litigation resolution, and financial inclusion are submitted completely and in a timely manner.
Shunsuke Kojima	Direktur Director	• Mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan keuangan Perseroan, termasuk penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta peraturan yang ditetapkan, serta memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Directing and supervising all financial activities of the Company, including the preparation of financial statements in accordance with financial accounting standards and applicable regulations, as well as ensuring the fulfillment of tax obligations in compliance with prevailing laws and regulations. • Berperan sebagai mitra bagi seluruh organ Perseroan atas laporan dan analisa kinerja keuangan dan operasional Perseroan. Acting as a partner to all Company organs in providing reports and analysis of the Company's financial and operational performance. • Berperan untuk mengatur mekanisme bagaimana mengelola dan memastikan ketersediaan dana untuk mengelola akun piutang atau pengadaan dana dengan menggunakan instrumen keuangan konvensional atau terstruktur. Responsible for establishing mechanisms to manage and ensure the availability of funds for managing accounts receivable or securing funding through the use of conventional or structured financial instruments. • Mengembangkan dan menerapkan strategi, kebijakan dan rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang Perseroan. Developing and implementing the Company's short-term and long-term financial strategies, policies, and plans. • Memastikan pelaporan kepada otoritas terkait sehubungan dengan laporan keuangan dan perpajakan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. Ensuring that reports to the relevant authorities related to financial and tax reporting are submitted completely and in a timely manner.
Ade Rafida Saulina S*	Direktur Director	• Bertanggung jawab dalam merumuskan strategi pengembangan bisnis dan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis khususnya pada Unit Bisnis Korporasi termasuk menjalankan fungsi pemasaran dan penyaluran pembiayaan. Responsible for formulating business development strategies and achieving the targets set in the business plan, particularly in the Corporate Business Unit, including carrying out marketing functions and financing distribution. • Memastikan proses analisa kredit dan operasional dalam Unit Bisnis Korporasi telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Ensuring that the credit and operational analysis processes in the Corporate Business Unit are carried out in accordance with the applicable policies and regulations. • Memastikan pelaksanaan mekanisme penindaklanjutan pengaduan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ensure the implementation of consumer complaint follow-up mechanisms in accordance with the applicable laws and regulations. • Bertanggung jawab dalam manajemen aset, fungsi penagihan hingga penyelesaian perkara litigasi Perseroan. Responsible for asset management, the collections function, and the resolution of the Company's litigation cases. • Mendukung program keuangan berkelanjutan melalui pengembangan produk keuangan berkelanjutan. Supporting sustainable finance programs through the development of sustainable finance products • Memastikan pelaporan kepada otoritas terkait sehubungan laporan pemasaran dan penyaluran pembiayaan, pengaduan konsumen dan penyelesaian perkara litigasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. Ensuring that reports to the relevant authorities regarding marketing and financing distribution, consumer complaints and litigation resolution are submitted completely and in a timely manner.

*) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 7 November 2024, RUPS menyetujui pengunduran diri Ibu Ade Rafida Saulina S selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 30 Agustus 2024.
Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") on November 7, 2024, the GMS approved the resignation of Mrs. Ade Rafida Saulina S as Director the Company effective as of August 30, 2024.

Transparansi

Anggota Direksi wajib mengungkapkan :

1. Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham Perseroan.
3. Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Perseroan.
4. Jabatan mereka di perusahaan lain.

Nilai-Nilai

1. Anggota Direksi wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Anggota Direksi wajib mempunyai akhlak dan moral yang baik, mampu melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
3. Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perseroan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.
4. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan jabatannya pada Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi Perseroan maupun anak perusahaannya.
5. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

Rapat Direksi

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Rapat Direksi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
3. Anggota Direksi wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.
4. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada nomor (1), nomor (2) dan nomor (3) dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
5. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
6. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada nomor (1), nomor (2), nomor (3) dan

Transparency

Members of the Board of Directors are required to disclose:

1. Its share ownership which reaches 5% (five percent) both in the Company and in other companies, domiciled inside and outside the country.
2. Financial and family relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or shareholders of the Company.
3. Remuneration and facilities received from the Company.
4. Their position in other companies.

Values

1. Members of the Board of Directors must have high integrity, ability, knowledge, experience according to their field of work and be able to communicate well.
2. Members of the Board of Directors must have good characters and morals, are able to carry out legal actions, have never been declared bankrupt or become members of the Board of Directors or Board of Commissioners who are found guilty of causing a company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to the appointment and has never been convicted for committing an act crimes that was detrimental to state finances and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to appointment.
3. Members of the Board of Directors are prohibited from conducting transactions that have a conflict of interest with the activities of the Company where the said member of the Board of Directors serves.
4. Members of the Board of Directors are prohibited from using their positions in the Company for personal, family, and/or other party' interests that may harm or reduce the profits and reputation of the Company and its subsidiaries.
5. Members of the Board of Directors are prohibited from taking and/or receiving personal benefits either directly or indirectly from the Company's activities other than legitimate income.

The Board of Directors Meetings

1. Meetings of the Board of Directors can be held at any time if deemed necessary by one or more members of the Board of Directors or at a written request from the Board of Commissioners or at the written request of 1 (one) or more Shareholders who jointly represent 1/10 (one tenth) or more of the the total number of shares issued by the Company with valid voting rights.
2. Meetings of the Board of Directors are held regularly at least 1 (one) time every month.
3. Members of the Board of Directors must attend at least 50% (fifty percent) of the Board of Directors meetings in a period of 1 (one) year.
4. The Board of Directors meeting as referred to in number (1), number (2) and number (3) can be held, valid and has the right to make binding decisions if attended by more than 1/2 (one half) of the total members of the Board of Directors present or represented at the meeting .
5. The Board of Directors must hold regular meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 4 (four) months.
6. The presence of members of the Board of Directors at the meeting referred to in number (1), number (2), number (3)

nomor (5) wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

7. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor (2) dan nomor (5) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
8. Bahan rapat yang sudah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada nomor (7) harus dibagikan kepada peserta rapat minimal 5 (lima) hari sebelum rapat dilaksanakan.
9. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada nomor (7), bahan rapat harus dibagikan kepada peserta paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
10. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, maka pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
11. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara rapat, tanggal, waktu dan tempat rapat.
12. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili dan hasil keputusan rapat disetujui oleh semua anggota Direksi, rapat Direksi dapat diadakan di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
13. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat Direksi tersebut dapat memimpin rapat Direksi.
14. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
15. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
    b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu rapat

and number (5) must be disclosed in the Company's Annual Report.

7. The Board of Directors must schedule the meeting referred to in number (2) and number (5) for the following year before the end of the financial year.
8. Scheduled meeting materials as referred to in number (7) must be distributed to meeting participants at least 5 (five) days before the meeting is held.
9. In the event that a meeting is held outside the schedule that has been prepared as referred to in number (7), meeting materials must be distributed to participants no later than before the meeting is held.
10. Invitation to the meeting of the Board of Directors is carried out by the President Director. In the event that the President Director is absent for any reason, which does not need to be proven to a third party, then a member of the Board of Directors has the right and authority to call for a meeting of the Board of Directors. Invitations for the Board of Directors. Meeting must be submitted by any means in written form delivered to each member of the Board of Directors no later than 5 (five) calendar days before the Meeting is held, excluding the date of the Invitation and the date of the Meeting. If all members of the Board of Directors are present or represented, then the summons is not required and the meeting of the Board of Directors has the right to make valid and binding decisions.
11. The summons must include the meeting agenda, date, time and place of the meeting.
12. Meetings of the Board of Directors are held at the domicile of the Company or at the place of business activity or at the domicile of the Stock Exchange where the Company's shares are listed, or at other places within the territory of the Republic of Indonesia. If all members of the Board of Directors are present or represented and the results of the meeting are approved by all members of the Board of Directors, the Board of Directors meeting can be held at another place as determined by the Board of Directors and the meeting has the right to make valid and binding decisions.
13. The Board of Directors meeting is chaired by the President Director. In the event that the President Director is absent or unable to attend the Board of Directors Meeting for any reason, which does not need to be proven to a third party, then a member of the Board of Directors who is present and elected at the Board of Directors Meeting may chair the Board of Directors Meeting.
14. A member of the Board of Directors can be represented at a meeting of the Board of Directors only by another member of the Board of Directors based on a power of attorney.
15. a. Each member of the Board of Directors present has the right to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Directors he represents.
    b. Each member of the Board of Directors who personally in any way either directly or indirectly has an interest in a proposed transaction, contract or proposed contract, in which the Company is one of the parties must state the nature of the interest in a Board of Directors Meeting and is not entitled to participate in voting on

Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika rapat Direksi menentukan lain.

16. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari ½ (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.

17. Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam nomor (1), nomor (2) dan nomor (3) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

18. Hasil rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

19. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi, maka yang bersangkutan wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions)* tersebut.
20. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada nomor (17) dan nomor (18), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada nomor (17) dan nomor (18) wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
22. Risalah rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
23. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
24. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

matters related to the transaction or contract, unless the Board of Directors Meeting determines otherwise.

16. The decision making of the Board of Directors meeting is carried out based on deliberation for consensus. In the event that deliberation for consensus does not occur, decisions are made based on a majority vote, which is approved by more than ½ (one-half) of the members of the Board of Directors present.
17. The results of the Board of Directors meeting as referred to in number (1), number (2) and number (3) must be recorded in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Directors who are present and submitted to all members of the Board of Directors.
18. The results of the meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners must be recorded in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who are present and submitted to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
19. Dissenting opinions that occur in the decisions of the Board of Directors Meeting, the parties concerned must be clearly stated in the minutes of the Board of Directors meeting along with the reasons for the dissenting opinions.

20. In the event that a member of the Board of Directors and/ or member of the Board of Commissioners does not sign the results of the meeting referred to in number (17) and number (18), the person concerned must state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.
21. The minutes of meeting referred to in number (17) and number (18) must be documented by the Company.
22. The minutes of the Board of Directors' meeting are valid evidence regarding the decisions taken at the relevant Board of Directors meeting, both for members of the Board of Directors and for third parties.
23. The Board of Directors can also make valid and binding decisions without holding a Board of Directors Meeting, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing about the proposals concerned and all members of the Board of Directors give their approval regarding the proposals submitted in writing and sign the agreement. Decisions taken in this way have the same legal force as decisions taken legally at a meeting of the Board of Directors.
24. Board of Directors Meetings can also be held via teleconference, video conference, or other electronic media facilities that allow all Board of Directors Meeting participants to see and/or hear each other directly and participate in the Board of Directors Meeting, provided that the minutes of the Meeting using a conference telephone or equipment similar communications will be made in writing and circulated among all members of the Board of Directors participating in the meeting to be signed. Decisions taken in this way have the same power as decisions taken legally at a Board of Directors Meeting.

Frekuensi Rapat Direksi Tahun 2024

Frequency of Board of Directors Meeting Year 2024

Nama Name	Rapat Direksi Board of Directors Meeting		Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Joint Board of Directors Meeting with Board of Commissioners	
	Kehadiran Attendance	Rasio Kehadiran Attendance Ratio	Kehadiran Attendance	Rasio Kehadiran Attendance Ratio
Konosuke Mizuta	13/13	100.00%	6/6	100.00%
Shunsuke Kojima	13/13	100.00%	6/6	100.00%
Andi Harjono	13/13	100.00%	6/6	100.00%
Yudi Gustiawan	13/13	100.00%	6/6	100.00%
Ade Rafida Saulina S*	7/13	53.84%	3/6	50.00%

*) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 7 November 2024, RUPS menyetujui pengunduran diri Ibu Ade Rafida Saulina S selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 30 Agustus 2024.
Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") on November 7, 2024, the GMS approved the resignation of Mrs. Ade Rafida Saulina S as Director the Company effective as of August 30, 2024.

Pelatihan Direksi

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, maka sepanjang tahun 2024, Direksi telah mengikuti pelatihan-pelatihan, antara lain:

Board of Directors Trainings

In order to expand their knowledge and competence, throughout 2024, the Board of Directors had participated in several trainings, including:

Nama Name	Pelatihan Direksi The Board of Directors Trainings		
	Pelatihan Trainings	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Konosuke Mizuta	*How to Prevent Greenwashing in Sustainable Finance*	16 May 2024	OJK
	Peluang Pertumbuhan Kredit Pasca Berakhirnya Kebijakan Restrukturisasi Kredit Credit Growth Opportunities After the End of the Credit Restructuring Policy	22 May 2024	OJK
Andi Harjono	Peran UU P2SK Dalam Memberikan Efek Jera Bagi Pelaku Jasa Keuangan Ilegal The Role of the P2SK Law in Deterring perpetrators of Illegal Financial Service Providers	15 Feb 2024	OJK
	Strategi Mencegah Serangan Siber Strategies to Prevent Cyber Attacks	29 Feb 2024	OJK
	Peluang dan Tantangan Pelindungan Data Pribadi Dalam Transaksi di Era Digital Opportunities and Challenges of Personal Data Protection in Digital Era	30 May 2024	OJK
	Cybersecurity Awareness Training Program	04 Jun 2024	PT. SMEI (Sarana Mutu Edukasi Indonesia)
	The Future of Data Analytics In The Financial Industry: Trends and Innovations Confirmation	12 Sep 2024	OJK
	Peran UU P2SK dalam Memberikan Efek Jera Bagi Pelaku Jasa Keuangan Ilegal The Role of the P2SK Law in Deterring perpetrators of Illegal Financial Service Providers	15 Feb 2024	OJK
	Peran Taksonomi Untuk Keuangan Berkelanjutan (TKBI) Dalam Mendorong Transisi Energi Menuju *Net Zero Emission* Indonesia The Role of Taxonomy for Sustainable Finance (TKBI) in Driving the Energy Transition Towards Net Zero Emissions in Indonesia	28 Mar 2024	OJK

Nama Name	Pelatihan Direksi The Board of Directors Trainings Pelatihan Trainings	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Yudi Gustiawan	Peluang Pertumbuhan Kredit Pasca Berakhirnya Kebijakan Restrukturisasi Kredit *Opportunities for Credit Growth After the End of the Credit Restructuring Policy*	22 May 2024	OJK
	Cybersecurity Awareness Training Program	04 Jun 2024	PT. SMEI (Sarana Mutu Edukasi Indonesia)
	Strategi Pemasaran Digital di Era Digital Taktik Dan Langkah Efektif Mencetak Profit Digital Marketing Strategies in the Digital Era: Effective Tactics and Steps to Generate Profit	05 Jun 2024	OJK
	Peluang dan Tantangan *Open Finance* Di Indonesia Opportunities and Challenges of Open Finance In Indonesia	25 Apr 2024	OJK
	How to Prevent Greenwashing in Sustainable Finance	16 May 2024	OJK
	Connecting The Dots	11 Jan 2024	OJK
	Artificial Intelligence Changes The Face Of The Financial Sector	07 Mar 2024	OJK
Shunsuke Kojima	Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah Strategies to Accelerate The Market Share of Sharia Finance	21 Mar 2024	OJK
Ade Rafida S. Samosir*	Peran Taksonomi Untuk Keuangan Berkelanjutan (TKBI). Dalam Mendorong Transisi Energi Menuju *Net Zero Emission* Indonesia The Role of Taxonomy for Sustainable Finance (TKBI) in Driving the Energy Transition Towards Net Zero Emissions in Indonesia	28 Mar 2024	OJK
	How to Prevent Greenwashing in Sustainable Finance	16 May 2024	OJK

*) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 7 November 2024, RUPS menyetujui pengunduran diri Ibu Ade Rafida Saulina S selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 30 Agustus 2024.
Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") on November 7, 2024, the GMS approved the resignation of Mrs. Ade Rafida Saulina S as Director the Company effective as of August 30, 2024.

Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Procedure and Basis for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Prosedur dan dasar penetapan remunerasi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Menelaah remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industri pembiayaan.

2. Dengan memperhitungkan kinerja Perseroan dan penilaian secara mandiri yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, selanjutnya Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pembahasan dan menyiapkan rekomendasi.

3. Rekomendasi disampaikan kepada Komisaris Utama untuk dibahas lebih lanjut dan disetujui oleh Pemegang Saham Pengendali berdasarkan Keputusan RUPST, dimana RUPS memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium, bonus dan tunjangan untuk seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Procedure and Basis for Determination of Commissioners Remuneration

The procedure and basis for determining the remuneration of the Board of Commissioners are as follows:

1. Reviewed industry-standard remuneration practices based on comparable business activities and the Company's scale in the financing sector.

2. Taking into account the Company's performance and the Board of Commissioners' own assessment, the Nomination and Remuneration Committee then discussed and prepared recommendations.

3. Recommendations were submitted to the President Commissioner for further discussion and approval by the Controlling Shareholders through the AGMS, which granted the Controlling Shareholders the authority to determine the amount of honorarium, bonuses, and allowances for all members of the Board of Commissioners.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris sudah termasuk fasilitas lain dalam bentuk natura.

The Board of Commissioners Remuneration Structure

Remuneration for all members of the Board of Commissioners includes other benefit in kind.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners Remuneration Structure		
Jumlah Dewan Komisaris Total of the Board of Commissioners	Remunerasi*) Remuneration*)	Fasilitas lain dalam bentuk Natura**) Benefit in Kind**)
4***)	Rp790,009,041	

Keterangan:
*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura.
**) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya.
***) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, RUPS Luar Biasa menyetujui pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.

Description:
*) Includes salaries and other fixed income: benefits, stock-based compensation, bonus and other remuneration in form of benefit in kind.
**) Housing, transportation, health insurance, etc.
***) Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") dated March 21, 2024, the Extraordinary GMS approved the resignation of Mr. Takeshi Sasaki as President Commissioner as of the closing of the Extraordinary GMS.

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam satu tahun Remuneration Amount Per Person in one year	Jumlah Dewan Komisaris Total of the Board of Commissioners
Di atas Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) Above Rp. 2,000,000,000 (two billion rupiah)	-
Di atas Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Above IDR 1,000,000,000 (one billion rupiah)	-
Di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) From Rp. 500,000,000 (five hundred million rupiah) to Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah)	1
Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke bawah Below Rp 500,000,000 (five hundred million rupiah)	3

Remunerasi yang diperoleh oleh Dewan Komisaris sudah meliputi fasilitas lain dalam bentuk natura, ada 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang mendapatkan remunerasi dengan nilai di bawah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun dan ada 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang mendapatkan remunerasi dengan nilai di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dalam satu tahun.

The remuneration received by the Board of Commissioners includes other benefit in kind, there are 3 (tiga) members of the Board of Commissioners who receive remuneration with a value below Rp500,000,000 (five hundred million rupiah) in one year and there are 1 (one) member of the Board of Commissioners who receive remuneration with a value above Rp500,000,000 (five hundred million rupiah) up to Rp1,000,000,000 (one billion rupiah) in one year.

Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi Direksi

Prosedur dan dasar penetapan remunerasi Direksi adalah sebagai berikut:

- Menelaah remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industri pembiayaan.
- Dengan memperhitungkan kinerja Perseroan dan penilaian secara mandiri yang dilakukan oleh Direksi, selanjutnya Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pembahasan dan menyiapkan rekomendasi.
- Rekomendasi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dibahas lebih lanjut dan disetujui oleh Pemegang Saham berdasarkan Keputusan RUPST, dimana RUPS memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan untuk seluruh Anggota Direksi Perseroan.

Procedure and Basis for Determination of the Board of Directors Remuneration

The procedure and basis for determining the remuneration of the Board of Directors are as follows:

- Reviewed industry-standard remuneration practices based on comparable business activities and the Company's scale in the financing sector.
- Taking into account the Company's performance and the Board of Directors' own assessment, the Nomination and Remuneration Committee then discussed and prepared recommendations.
- Recommendations were submitted to the Board of Commissioners for further discussion and approval by the Shareholders through the AGMS, which granted the Board of Commissioners the authority to determine the amount of salaries, bonuses, and allowances for all members of the Board of Directors.

Struktur Remunerasi Direksi

Remunerasi bagi seluruh anggota Direksi sudah termasuk fasilitas lain dalam bentuk natura.

The Board of Directors Remuneration Structure

Remuneration for all members of the Board of Directors includes other facilities in kind.

Struktur Remunerasi Direksi Board of Directors Remuneration Structure		
Total Direksi Number of the Board of Directors	Remunerasi*) Remuneration*)	Fasilitas lain dalam bentuk Natura**) Benefit in Kind**)
5***)	Rp9,295,703,071	Rp469,976,966 - 726,852,678

Keterangan:
*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk *non natura.*
**) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya.
***) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 7 November 2024, RUPS menyetujui pengunduran diri Ibu Ade Rafida Saulina S selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 30 Agustus 2024.

Description:
*) Includes salaries and other fixed income: benefits, stock-based compensation, bonus and other remuneration in form of benefit in kind.
**) Housing, transportation, health insurance, etc.
***) Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") on November 7, 2024, the GMS approved the resignation of Mrs. Ade Rafida Saulina S as Director the Company effective as of August 30, 2024.

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam satu tahun Remuneration Amount Per Person in one year	Jumlah Direksi Total of the Board of Directors
Di atas Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) Above Rp. 2,000,000,000 (two billion rupiah)	2
Di atas Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Above IDR 1,000,000,000 (one billion rupiah)	1
Di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) From Rp. 500,000,000 (five hundred million rupiah) to Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah)	2
Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke bawah Below Rp 500,000,000 (five hundred million rupiah)	-

Remunerasi yang diperoleh oleh anggota Direksi sudah meliputi fasilitas lain dalam bentuk natura, ada 2 orang anggota Direksi yang mendapatkan remunerasi dengan nilai di atas Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dalam satu tahun dan 1 orang anggota Direksi yang mendapatkan remunerasi dengan nilai di atas Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dalam satu tahun, serta 2 orang anggota Direksi yang mendapatkan remunerasi dengan nilai diatas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Remuneration obtained by members of the Board of Directors includes other benefit in kind, there are 2 members of the Board of Directors who receive remuneration with a value above Rp2,000,000,000 (two billion rupiah) in one year and 1 member of the Board of Directors who receive remuneration with a value above Rp1,000,000,000 (one billion rupiah) in one year and 2 members of the Board of Directors who receive remuneration with a value above Rp500,000,000 (five hundred million rupiah) up to Rp1,000,000,000 (one billion rupiah).

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris
Committees under the Board of Commissioners

Dalam mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris didukung oleh organ pendukung yaitu :

1. Komite Audit
2. Komite Nominasi dan Remunerasi
3. Komite Pemantau Risiko

Sepanjang 2024, Komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik, sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

In supporting the effective implementation of duties and responsibilities, the Board of Commissioners is supported by supporting organs, namely:

1. Audit Committee
2. Nomination and Remuneration Committee
3. Risk Monitoring Committee

Throughout 2024, the Committees under the Board of Commissioners have performed their work well, in accordance with their respective functions and duties.

Komite Audit
Audit Committee

Komite Audit adalah komite yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan

The Audit Committee is a committee tasked with assisting the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the internal control system and the implementation of the duties of internal auditors and external

evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.
Komite Audit juga melakukan pemantauan terhadap sistem pelaporan pelanggaran *(whistleblowing system)*.

Persyaratan Keanggotaan

Berpatokan pada Piagam Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris, anggota Komite Audit memiliki beberapa persyaratan, sebagai berikut:

1. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK.
2. Anggota Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Anggota Komite Audit diangkat melalui prosedur yang sudah ditetapkan yaitu melalui proses rekomendasi oleh Direksi maupun Dewan Komisaris dan dilakukan pengujian atas persyaratan serta persetujuan oleh Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi untuk selanjutnya mendapatkan Surat Keputusan dari Dewan Komisaris.
4. Anggota Komite Audit diberhentikan berkaitan dengan berakhirnya masa periode jabatan maupun disebabkan oleh hal-hal lain yang terjadi dengan mendapatkan persetujuan berupa Surat Persetujuan Dewan Komisaris.
5. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
6. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
7. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
8. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
9. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
10. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
11. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
12. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan setelah diperoleh saham tersebut.

auditors by monitoring and evaluating the planning and implementation of audits in order to assess the adequacy of internal controls including the financial reporting process.
Audit Committee also monitors whistleblowing System.

Member's Requirements

Based on the Audit Committee Charter established by the Board of Commissioners, the Audit Committee members have several requirements, as follows:

1. The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner and is required to meet the criteria as stipulated in the POJK.
2. The Audit Committee must consist of at least three (3) members, comprising individuals from among the Independent Commissioners and external parties outside the Issuer or Public Company.
3. Members of the Audit Committee are appointed through a predetermined procedure, which includes a recommendation process by the Board of Directors or the Board of Commissioners, an assessment of qualifications, and approval by the Chair of the Remuneration and Nomination Committee, followed by an official Appointment Letter issued by the Board of Commissioners.
4. Audit Committee members may be dismissed upon the end of their term of office or due to other reasons, with the approval formalized through an Approval Letter from the Board of Commissioners.
5. Must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with the field of work, and be able to communicate well.
6. Must understand financial reports, company business especially those related to the services or business activities of Issuers or Public Companies, audit processes, risk management, and laws and regulations in the Capital Market sector as well as other relevant laws and regulations.
7. Willing to improve competency continuously through education and training.
8. Must have at least 1 (one) member with educational background and expertise in accounting and finance.
9. Not working in a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Service Office or other party providing assurance services, non assurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Issuer or Public Company concerned within 6 (six) last month.
10. Not working or having the authority and responsibi|ity to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for the Independent Commissioner.
11. Does not own shares directly or indirectly in Issuers or Public Companies.
12. In the event that a member of the Audit Committee acquires shares of an Issuer or Public Company, either directly or indirectly as a result of a legal event, the shares must be transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months after the shares were acquired.

13. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.
14. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

13. Does not have affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Controlling Shareholders of Issuers or Public Companies.
14. Does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the business activities of the Issuer or Public Company.

Susunan, Profil dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Audit

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Audit maka susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut :

Composition, Profile and Work Experience of Audit Committee Members

In accordance with the Decree of the Board of Commissioners of No. 003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 concerning the Determination of the Audit Committee Membership, the composition of the Audit Committee members is as follows:

MOHAMMAD SYAHRIAL

Ketua Komite Audit / Chairman of the Audit Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.

His profile is available in the Board of Commissioners Profile.

GREGORY O.K. ONGKO

Anggota Komite Audit / Member of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Memperoleh gelar sarjana B.SB.A. *Accounting dari Creighton University*, Amerika pada tahun 1982, memperoleh gelar master M.B.A Business Management dari Creighton University, Amerika pada tahun 1984, dan memperoleh gelar master M.B.A *Management Information System* dari University of Dallas, Amerika pada tahun 1986.

Indonesian citizen, 64 years old. He obtained a B.SB.A. degree in Accounting at Creighton University, USA in 1982. He obtained an M.B.A Business master's degree in Management at Creighton University, USA in 1984, and finally he obtained an M.B.A master's degree in Management Information System at University of Dallas, USA in 1986.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2021 – to date	*Member of the Risk Monitoring Committee* PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2020 – to date	*Member of the Audit Committee* PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2012 – to date	*Co-Founder* Vickery Christian Academy Yayasan Pendidikan Vickery
2011	*VP, Finance Accounting, HRD GA* PT Kabelindo Murni Tbk
2002 – 2010	*Co-Founder* Morning Star Academy Yayasan Bintang Pagi PT Trivium Konsultan Pendidikan
2003 – 2006	*Property Consultant, Franchise Owner* Paddy's Property
2002 – 2004	*Co-Owner* Eurocafe Restaurant Food Outlet
1999 – 2001	*Division Head - Investor Relations* PT Tunas Sepadan Investama
1999	*General manager/Division Head* Asia Plup & Paper Company
1998	*Operation Director* PT Hexa Prakarsa Utama
1986 – 1998	*General Manager – Marketing Division* Bentala Sanggrahan Group
1995 – 1996	*Marketing Director* Rainbow Hills Development
1994 – 1995	*Administration & Resources Manager* Mega Guna Group, Holding Company
1988 – 1994	*Market Development Representative* IBM Indonesia
1988	*Internal Auditor* Arco Indonesia Incorporated
1987 – 1988	*Financial Officer* Robert S. Allan and Associates, Inc
1985 – 1987	*Auditor* Hawthorne Suites

BRANTAS

Anggota Komite Audit / Member of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari STEI Indonesia, pada tahun 2007.

Indonesian citizen, 40 years old. Obtained his Bachelor of Accounting degree from STEI Indonesia, in 2007.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2023 – to date	*Member of the Audit Committee* PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Aug 2024 - to date	*Head of Investigation Audit* PT Bank Syariah Indonesia Tbk
2021 – Jul 2024	*Investigation Auditor Manager* PT Bank Syariah Indonesia Tbk
2017 – 2021	*Investigation Auditor Manager* PT Bank Syariah Mandiri
2013 – 2016	*General Auditor* PT Bank Syariah Mandiri
2012 – 2013	*Supervisor Internal Auditor* PT Graha Kerindo Utama
2011 – 2012	*Audit Manager* Apotek Roxy Group
2010	*Credit Marketing Officer* PT Summit Oto Finance
2007 – 2010	*Senior Independent Control Unit* PT Summit Oto Finance
2007	*Junior Auditor* Public Accountant Firm Dolly Bambang Sudarmadji & Dadang

Periode dan Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Ketentuan yang berlaku menjelaskan bahwa masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 dan Piagam Komite Audit, serta dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Masa tugas anggota komite yang diangkat di antara masa jabatan Dewan Komisaris akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris tersebut.

Independensi Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta bekerja berdasarkan Pedoman Kerja Komite Audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Independensi anggota Komite Audit Perseroan dapat dilihat dari data hubungan keuangan, keluarga, kepengurusan dan kepemilikan pada perusahaan pembiayaan lainnya dari tiap-tiap anggota Komite Audit, dimana tiap-tiap anggota tidak memiliki hubungan afiliasi.

Period and Term of Office of the Audit Committee Members

The applicable provisions explain that the term of office of the Audit Committee member may not exceed the term of office of the Board of Commissioners in accordance with POJK No. 55/POJK.04/2015 and the Audit Committee Charter, and may be re-elected for only one subsequent period. The term of office of committee members appointed between the terms of office of the Board of Commissioners will end at the same time as the end of the term of office of the Board of Commissioners.

Audit Committee Independence

The Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities and works based on the Audit Committee Charter been approved by the Board of Commissioners. The independence of members of the Company's Audit Committee is proven with the data of family relations, finance, management, and share in other financing companies that shows that all members of the Committee have no affiliation.

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Mohammad Syahrial		√		√		√		√
Gregory O.K. Ongko		√		√		√		√
Brantas		√		√		√		√

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Family Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Mohammad Syahrial		√		√		√		√
Gregory O.K. Ongko		√		√		√		√
Brantas		√		√		√		√

Nama Name	Kepengurusan dan Kepemilikan di Perusahaan Pembiayaan lain Management and Ownership in Other Financing Companies							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Mohammad Syahrial		√		√		√		√
Gregory O.K. Ongko		√		√		√		√
Brantas		√		√		√		√

Piagam Komite Audit

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dari Komite Audit, maka Perseroan telah menyusun Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 009/BOC-MLI/LEGAL/IX/2022 tanggal 26 September 2022 yang dapat diakses melalui *website* Perseroan.

Dasar Hukum

- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahan Publik.
- POJK No.30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tanggal 29 April 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
- Anggaran Dasar Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 telah diundangkan Peraturan OJK Nomor 48 tahun 2024 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Perseroan sedang dalam proses penyesuaian pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit sesuai dengan POJK tersebut pada tahun 2025.

Audit Committee Charter

In supporting the implementation of the duties of the Audit Committee, the Company has prepared an Audit Committee Charter based on the Board of Commissioners Decree Number 009/BOC-MLI/LEGAL/IX/2022 dated 26 September 2022 which can be accessed through the Company's website.

Legal Basis

- POJK No. 55 / POJK.04 / 2015 concerning the Formation and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee.
- POJK No. 33 / POJK.04 / 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
- POJK No.30/POJK.05/2014 dated 19 November 2014 concerning Good Corporate Governance for finance company jo. the Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.05/2020 dated 29 April 2020 concerning Changes of The Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.05/2014 dated 19 November 2014 concerning Good Corporate Governance for finance Company
- The Company's Articles of Association.

On December 31, 2024, OJK Regulation Number 48 of 2024 concerning Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions was enacted and the Company is in the process of adjusting the charter of the Audit Committee in accordance with the POJK in 2025.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Audit

Terkait fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi :
   a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lain nya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
   b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.
   c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
   d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
   e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
   f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
   g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
   h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
   i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang, sebagai berikut:
   a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
   b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
   c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
   d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Duties, Responsibilities and Authorities of the Audit Committee

Regarding its function, the Audit Committee has duties and responsibilities, as follows:

1. The Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities.
2. In carrying out its functions, the Audit Committee has duties and responsibilities that at least include :
   a. Reviewing the financial information that will be issued by the Issuer or Public Company to the public and/or the authorities, including financial reports, projections, and other reports related to the financial information of the Issuer or Public Company.
   b. Reviewing compliance with laws and regulations related to the activities of the Issuer or Public Company.
   c. Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the accountant on the services provided.
   d. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on independence, scope of assignment, and service fees.
   e. Reviewing the implementation of the audit by the internal auditor and supervising the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of the internal auditor.
   f. Reviewing the risk management implementation activities carried out by the Board of Directors, if the Issuer or Public Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners.
   g. Reviewing complaints related to the accounting and financial reporting processes of Issuers or Public Companies.
   h. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in Issuers or Public Companies.
   i. Maintain the confidentiality of documents, data and information of Issuers or Public Companies.
3. In carrying out its duties, the Audit Committee has the following authorities
   a. Access documents, data, and information of Issuers or Public Companies regarding employees, funds, assets, and necessary company resources.
   b. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and those who carry out the functions of internal audit, risk management, and Accountants regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee.
   c. Involve independent parties other than members of the Audit Committee as needed to assist in carrying out their duties (if needed).
   d. Carry out other authorities given by the Board of Commissioners.

Pendidikan dan/atau Pelatihan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas anggota Komite Audit pada tahun 2024, Komite Audit Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan atas peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas hasil audit.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun 2024 tertuang dalam rapat-rapat berkala dan telah dipaparkan didalam pembahasan mengenai Rapat Komite Audit.

Rapat Komite Audit

Kebijakan mengenai pelaksanaan Rapat Audit dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Education and/or Training

To improve the knowledge and quality of Audit Committee members in 2024, the Company's Audit Committee continues to keep abreast of applicable regulations. This is done to continuously improve the quality of audit results.

Implementation of Audit Committee Activities

The implementation of Audit Committee activities in 2024 is contained in regular meetings and has been described in the discussion of Audit Committee Meetings.

Audit Committee Meeting

The policy regarding the implementation of the Audit Meeting can be described as follows:

1. The Audit Committee holds regular meetings at least 1 (one) time in 3 (three) months.
2. Audit Committee meetings can be held if attended by more than 1/2 (one half) of the total members.
3. Audit Committee meeting decisions are taken based on deliberation for consensus.
4. Each meeting of the Audit Committee is stated in the minutes of the meeting, including if there is a difference of opinion, which is signed by a|l members of the Audit Committee present and submitted to the Board of Commissioners.

Frekuensi Rapat Komite Audit

Audit Comittee Meeting Frequency

Nama Name	Rapat Komite Audit Audit Committee Meetings Kehadiran Attendance	Frekuensi Frequency	Rasio Kehadiran Attendance Ratio
Mohammad Syahrial	6	6	100%
Gregory O.K. Ongko	6	6	100%
Brantas	6	6	100%

No.	Uraian Rapat Komite Audit Audit Committee Meetings Description Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	16 Jan 2024	• Pembahasan hasil pertemuan (*meeting*) komite audit periode 2023 Discussion of the results of the audit committee meeting for the 2023 period • Pembahasan rencana pertemuan (*meeting*) komite audit periode 2024 Discussion of the audit committee meeting plan for the 2024 period • Pembahasan hasil pemeriksaan audit periode 2023 Discussion of audit examination results for the period 2023 • Pembahasan rencana pemeriksaan audit periode 2024 Discussion of the audit examination plan for the period 2024
2.	29 Feb 2024	• Pemaparan dan Pembahasan hasil pemeriksaan Audit Eksternal – Deloitte untuk tahun pemeriksaan 2023 Presentation and discussion of the results of the External Audit - Deloitte for the 2023 audit year
3.	08 May 2024	• Hasil evaluasi penggunaan AP dan KAP Deloitte tahun 2023 – Laporan Keuangan Tahunan Evaluation results of the use of AP and KAP Deloitte in 2023 - Annual Financial Report • Rekomendasi penggunaan AP dan KAP tahun 2024 – Laporan Keuangan Tahunan Recommendation on the use of AP and KAP in 2024 - Annual Financial Report • Laporan Keuangan per akhir Maret 2024 Financial Report as of end of March 2024 • Hasil pemeriksaan Audit per akhir April 2024 Audit result as of end of April 2024

No.	Uraian Rapat Komite Audit Audit Committee Meetings Description Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
4.	03 Sep 2024	• Laporan keuangan per akhir Juli 2024 Financial Report as of end of July 2024 • Hasil pemeriksaan Audit per akhir Agustus 2024 Audit result as of end of August 2024 • Laporan hasil audit eksternal periode 2023 (Deloitte) External audit report 2023 (Deloitte) • Surat dari Direktur Pengaturan Emisi dan Pengawasan Perusahaan Publik – OJK Letter from Director of Emission Regulatory and Public Company Supervision – OJK
5.	12 Nov 2024	• Laporan keuangan per akhir September 2024 Financial Report as of end of September 2024 • Hasil Pemeriksaan Audit per 12 November 2024 Audit Result as of November 12, 2024 • Laporan Kasus Transaksi Produk SCF dari Whistleblower November 2024 SCF Case Report from Whistleblower November 2024
6.	04 Dec 2024	• Pemaparan dan Pembahasan persiapan pemeriksaan Audit Eksternal – Deloitte untuk tahun pemeriksaan 2024 Presentation and discussion on the preparation of the External Audit examination - Deloitte for the audit year 2024

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination dan Remuneration Committee

Komite Nominasi & Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

The Nomination & Remuneration Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners in assisting to carry out the functions and duties of the Board of Commissioners regarding the Nomination and Remuneration of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

Persyaratan Keanggotaan

Berpatokan pada Pedoman Komite Nominasi & Remunerasi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi.

1. Paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
   a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
   b. anggota lainya yang dapat berasal dari:
      1. anggota Dewan Komisaris;
      2. pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau
      3. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
2. Anggota Komite Nominasi & Remunerasi, wajib:
   a. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik;
   b. Memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia; dan
   c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Setiap anggota Komite Nominasi & Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.

Member's Requirements

Based on the Nomination & Remuneration Committee Charter established by the Board of Commissioners,The Nomination and Remuneration Committee.

1. consists of at least 3 (three) members, with the following provisions:
   a. 1 (one) person serving as both chairman and member who is an Independent Commissioner; and
   b. Other members can come from:
      1. members of the Board of Commissioners;
      2. parties from outside the Issuer or Public Company concerned; or
      3. oparties who hold managerial positions under the Board of Directors in charge of human resources.
2. Members of the Nomination & Remuneration Committee are required to:
   a. Possess integrity, good character, and strong moral values;
   b. Have sound knowledge in the field of human resource management; and
   c. Have adequate understanding of labor laws and other relevant regulations.
3. Each member of the Nomination & Remuneration Committee is prohibited from obtaining personal benefits, either directly or indirectly, from the Company's activities, other than lawful compensation.

Susunan, Profil dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Nominasi & Remunerasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/BOC-VMF/LEGAL/III/21 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Nominasi & Remunerasi maka susunan anggota Komite Nominasi & Remunerasi adalah sebagai berikut :

Composition, Profile and Work Experience of Nomination & Remuneration Committee Members

In accordance with the Decree of the Board of Commissioners No. 004/BOC-VMF/LEGAL/III/21 dated 31 March 2021 concerning Determination of Composition of Members of the Nomination & Remuneration Committee, the composition of members of the Nomination & Remuneration Committee is as follows:

MOHAMMAD SYAHRIAL

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.
His profile is available in the Board of Commissioners Profile.

TAKESHI SASAKI*

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.
Her profile is available in the Board of Commissioners Profile.

*) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, RUPS Luar Biasa menyetujui pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.
Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") held on March 21, 2024, the Extraordinary GMS approved the resignation of Mr. Takeshi Sasaki as the President Commissioner, effective from the closing of the Extraordinary GMS.

RUDYANTO ADISOETJAHJA

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Member of the Nomination and Remuneration Committee

Warga negara Indonesia, 55 tahun, memperoleh gelar sarjana Arsitektur dari Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1993.

Indonesian citizen, 55 years old, obtained a bachelor's degree in Architecture from the Indonesian Christian University in 1993.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2021 – November 2024	*Head of Human Resources & General Affair Division* PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2018 – 2021	*Head of Human Resources Operation & General Affair Division* PT Verena Multi Finanace Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2017 – 2018	*Head of Human Resources & General Affair Division* PT Verena Multi Finanace Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2015 – 2017	*Head of Marketing & Business Development Division* PT Verena Multi Finanace Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2013 – 2015	*Head of Human Resources & General Affair Division* PT Verena Multi Finanace Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2011 – 2012	*Head of Human Resources & General Affair Division* PT HD Finance (now PT Radana Bhaskara Finance Tbk)
2008 – 2011	*Human Resources & General Affair Manager* PT Tumbakmas Niagasakti
1994 – 2007	Regional Manager Indonesia Bagian Barat & *Human Resources Development Manager* PT Rodamas

Pada tanggal 21 Maret 2024 telah terjadi perubahan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No. 003/BOC-MLI/III/24 tertanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, maka susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut :

On March 21, 2024, there was a change in the composition of the Nomination and Remuneration Committee in accordance with the Decision Letter of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No. 003/BOC-MLI/III/24 dated March 21, 2024, regarding the Determination of the Composition of the Nomination and Remuneration Committee. The composition of the Nomination and Remuneration Committee is as follows:

MOHAMMAD SYAHRIAL

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.
His profile is available in the Board of Commissioners Profile.

YASUO IMAIZUMI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.
Her profile is available in the Board of Commissioners Profile.

RUDYANTO ADISOETJAHJA

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Member of the Nomination and Remuneration Committee

Profil Beliau tesedia di halaman sebelumnya.

His profile is available on the previous page.

Pada tanggal 20 November 2024 telah terjadi perubahan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No. 011/BOC-MLI/XI/24 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, maka susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut :

On November 20, 2024, there was a change in the composition of the Nomination and Remuneration Committee members in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No. 011/BOC-MLI/XI/24, concerning the Determination of the Composition of the Nomination and Remuneration Committee Members. Therefore, the composition of the Nomination and Remuneration Committee members was as follows:

MOHAMMAD SYAHRIAL

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.
His profile is available in the Board of Commissioners Profile.

YASUO IMAIZUMI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.
Her profile is available in the Board of Commissioners Profile.

ANDRI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Member of the Nomination and Remuneration Committee

Warga negara Indonesia, 39 tahun, memperoleh gelar sarjana Ekonomi dari Trisakti School of Management (d/h STIE Trisakti) pada tahun 2006

Indonesian citizen,39 years old, obtained a bachelor's degree in Economic from Trisakti School of Management (formerly STIE Trisakti) in 2006.

Riwayat Pekerjaan
Career History

Nov 2024 – to date	*Head of Human Resources Division* PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2019 – Nov 2024	*Head of Finance Treasury Department* PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2016 – 2019	*Head of Operational Departement* PT Verena Multi Finanace Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2009 - 2016	*Section Head of Operational Department* PT Verena Multi Finanace Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2007 – 2009	*Credit Analyst Staff* PT Swadharma Indotama Finance (now PT Shinhan Indo Finance)

Periode Masa Jabatan Anggota Komite Nominasi & Remunerasi

Ketentuan yang berlaku menjelaskan bahwa masa jabatan Komite Nominasi & Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014 dan Pedoman Komite Nominasi & Remunerasi, serta dapat dipilih kembali. Masa tugas anggota Komite yang diangkat di antara masa jabatan Dewan Komisaris akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris tersebut.

Period and Term of Office of The Nomination & Remuneration Committee

The applicable provisions explain that the term of office of the Nomination & Remuneration Committee may not exceed the term of office of the Board of Commissioners in accordance with POJK No. 34/POJK.04/2014 and the Nomination & Remuneration Committee Charter, and may be re-elected. The term of office of Committee members appointed between the terms of office of the Board of Commissioners will end at the same time as the end of the term of office of the Board of Commissioners.

Independensi Komite Nominasi & Remunerasi

Komite Nominasi & Remunerasi bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta bekerja berdasarkan Pedoman Kerja Komite Nominasi & Remunerasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Independensi anggota Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan, dapat dilihat dari data hubungan keuangan, keluarga, kepengurusan dan kepemilikan pada perusahaan pembiayaan lainnya dari tiap-tiap anggota Komite Nominasi & Remunerasi dimana tiap-tiap anggota tidak memiliki hubungan afiliasi.

Nomination & Remuneration Committee Independence

Nomination & Remuneration Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities and works based on the Nomination & Remuneration Committee Charter which has been approved by the Board of Commissioners. The independence of members of the Company's Nomination & Remuneration Committee is proven with the data of family relations, finance, management, and share in other financing companies that shows that all members of the Committee have no affiliation.

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Mohammad Syahrial		√		√		√		√
Takeshi Sasaki*		√		√	√		√	
Rudyanto** Adisoetjahja		√		√		√		√
Yasuo Imaizumi***		√		√	√		√	
Andri****		√		√		√		√

*) Takeshi Sasaki memiliki hubungan afiliasi yang bersifat keuangan dengan Mizuho Leasing Co., Ltd., selaku Pemegang Saham Pengendali dan salah satu Pemegang Saham Utama. Saat ini Beliau menjabat sebagai International Business Administration Department di Mizuho Leasing Co, Ltd. untuk periode 2019 – 2024 (Maret).
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, RUPS Luar Biasa menyetujui pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.
Takeshi Sasaki has a financial affiliation relationship with Mizuho Leasing Co., Ltd, as the Controlling Shareholder and one of the Main Shareholders. Currently he serves as International Business Administration Department at Mizuho Leasing Co., Ltd. for period 2019-2024 (March).
Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") dated March 21, 2024, the Extraordinary GMS approved the resignation of Mr. Takeshi Sasaki as President Commissioner as of the closing of the Extraordinary GMS.

**) Masa jabatan telah berakhir sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.011/BOC-MLI/XI/24 tentang penetapan susunan komite anggota Nominasi dan Remunerasi yang berlaku efektif sejak 20 November 2024.
The term of office has ended in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No. 011/BOC-MLI/XI/24 concerning the determination of the composition of the Nomination and Remuneration committee members which is effective since November 20, 2024.

***) Yasuo Imaizumi memiliki hubungan afiliasi yang bersifat keuangan dengan Mizuho Leasing Co., Ltd., selaku Pemegang Saham Pengendali dan salah satu Pemegang Saham Utama. Saat ini Beliau menjabat sebagai Senior Deputy General Manager in International Business Administration Department, Relationship Manager International Business Development Department, Director of Overseas Subsidiaries International and Business Administration Department di Mizuho Leasing Co., Ltd.
Yasuo Imaizumi has a financial affiliation with Mizuho Leasing Co., Ltd., as the Controlling Shareholder and one of the Major Shareholders. Currently, he holds positions as Senior Deputy General Manager in the International Business Administration Department, Relationship Manager in the International Business Development Department, and Director of Overseas Subsidiaries in the International and Business Administration Department at Mizuho Leasing Co., Ltd.

****) Anggota Nominasi dan Remunerasi yang efektif menjabat sejak tanggal 20 November 2024 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.011/BOC-MLI/XI/24 tentang penetapan susunan komite anggota Nominasi dan Remunerasi.
Nomination and Remuneration Members who have been effective since November 20, 2024 based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No. 011/BOC-MLI/XI/24 concerning the determination of the composition of the Nomination and Remuneration Committee members.

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Family Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Mohammad Syahrial		√		√		√		√
Takeshi Sasaki*		√		√		√		√
Rudyanto** Adisoetjahja		√		√		√		√
Yasuo Imaizumi		√		√		√		√
Andri***		√		√		√		√

*) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, RUPS Luar Biasa menyetujui pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.
Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") held on March 21, 2024, the Extraordinary GMS approved the resignation of Mr. Takeshi Sasaki as the President Commissioner, effective from the closing of the Extraordinary GMS.

**) Masa jabatan telah berakhir sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.011/BOC-MLI/XI/24 tentang penetapan susunan komite anggota Nominasi dan Remunerasi yang berlaku efektif sejak 20 November 2024.
The term of office has ended in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No. 011/BOC-MLI/XI/24 concerning the determination of the composition of the Nomination and Remuneration committee members which is effective since November 20, 2024.

***) Anggota Nominasi dan Remunerasi yang efektif menjabat sejak tanggal 20 November 2024 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.011/BOC-MLI/XI/24 tentang penetapan susunan komite anggota Nominasi dan Remunerasi.
Nomination and Remuneration Members who have been effective since November 20, 2024 based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No. 011/BOC-MLI/XI/24 concerning the determination of the composition of the Nomination and Remuneration Committee members.

Nama Name	Kepengurusan dan Kepemilikan di Perusahaan Pembiayaan lain Management and Ownership in Other Financing Companies							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Mohammad Syahrial		√		√		√		√
Takeshi Sasaki*		√		√		√		√
Rudyanto** Adisoetjahja		√		√		√		√
Yasuo Imaizumi		√		√		√		√
Andri***		√		√		√		√

*) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, RUPS Luar Biasa menyetujui pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.
Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") held on March 21, 2024, the Extraordinary GMS approved the resignation of Mr. Takeshi Sasaki as the President Commissioner, effective from the closing of the Extraordinary GMS.

**) Masa jabatan telah berakhir sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.011/BOC-MLI/XI/24 tentang penetapan susunan komite anggota Nominasi dan Remunerasi yang berlaku efektif sejak 20 November 2024.
The term of office has ended in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No. 011/BOC-MLI/XI/24 concerning the determination of the composition of the Nomination and Remuneration committee members which is effective since November 20, 2024.

***) Anggota Nominasi dan Remunerasi yang efektif menjabat sejak tanggal 20 November 2024 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.011/BOC-MLI/XI/24 tentang penetapan susunan komite anggota Nominasi dan Remunerasi.
Nomination and Remuneration Members who have been effective since November 20, 2024 based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No. 011/BOC-MLI/XI/24 concerning the determination of the composition of the Nomination and Remuneration Committee members.

Pedoman Komite Nominasi & Remunerasi

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dari Komite Nominasi & Remunerasi, maka Perseroan telah menyusun Pedoman Nominasi & Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 007/BOC-MLI/LEGAL/IX/2022 tanggal 26 September 2022 yang dapat diakses melalui *website* Perseroan.

Dasar Hukum

- POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahan Publik.
- POJK No.30/POJK.05/2014 Tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2020 Tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2014 Tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- Anggaran Dasar Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 telah diundangkan Peraturan OJK Nomor 48 tahun 2024 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Perseroan sedang dalam proses penyesuaian pedoman dan tata tertib kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan POJK tersebut pada tahun 2025.

Nomination & Remuneration Committee Charter

In supporting the implementation of the duties of the Nomination & Remuneration Committee, the Company has prepared the Nomination & Remuneration Guidelines based on the Decree of the Board of Commissioners Number 007/BOC-MLI/LEGAL/IX/2022 dated September 26, 2022 which can be accessed through the Company's website.

Legal Basis

- POJK No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
- POJK No.30/POJK.05/2014 dated 19 November 2014 concerning Good Corporate Governance for Finance Company jo. the Financial Services Authority Regulation No.29/POJK.05/2020 dated 29 April 2020 concerning Changes of The Financial Services Authority Regulation No.30/POJK.05/2014 dated November 19, 2014 concerning Good Corporate Governance for Finance Company.
- The Company's Articles of Association.

On December 31, 2024, OJK Regulation Number 48 of 2024 concerning Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions was enacted and the Company is in the process of adjusting the charter of the Nomination and Remuneration Committee in accordance with the POJK in 2025.

Tugas,Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Nominasi & Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya komite ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Dalam mekanisme pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki rincian tugas dan tanggung jawab sebagaimana juga diatur dalam POJK 34/POJK.04/2014 Tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi Komite Nominasi, sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, komite ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Dalam mekanisme pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
    a. Terkait dengan fungsi Komite Nominasi, sebagai berikut:
        1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
            a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
            b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
            c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
        2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
        3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
        4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
    b. Terkait dengan fungsi Komite Remunerasi, sebagai berikut:
        1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
            a) Struktur Remunerasi;
            b) Kebijakan atas Remunerasi; dan
            c) Besaran atas Remunerasi
        2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang di terima tiap – tiap anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.

Pendidikan dan/atau Pelatihan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan atas peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas kinerja yang dihasilkan.

Duties, Responsibilities and Authorities of the Nomination & Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee shall act independently in carrying out its duties. In carrying out its duties, this committee is responsible to the Board of Commissioners.

In the mechanism of implementing its duties, the Nomination and Remuneration Committee has detailed duties and responsibilities as also stipulated in the POJK Number 34/POJK.04/2014 Dated December 8, 2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, as follows:

Related to the functions of the Nomination Committee, as follows:

1. The Nomination and Remuneration Committee is required to act independently in carrying out its duties.
2. In carrying out its duties, this committee is responsible to the Board of Commissioners.
3. In the mechanism of carrying out its duties, the Nomination and Remuneration Committee has detailed duties and responsibilities as follows:
    a. Related to the function of the Nomination Committee, as follows:
        1. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
            a. Composition of the positions of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
            b. Policies and criteria required in the nomination process; and
            c. Performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
        2. Assist the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members the Board of Commissioners is based on the benchmarks that have been prepared as evaluation material;
        3. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding capability development programs members of the Board of Directors and/ or members of the Board of Commissioners; and
        4. Provide proposals for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board Commissioner to be submitted to the GMS.
    b. In relation to the functions of the Remuneration Committee, as follows:
        1. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
            a) Remuneration Structure;
            b) Policy on Remuneration; and
            c) Amount of Remuneration
        2. Assist the Board of Commissioners in assessing performance in accordance with the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners.

Education and /or Training

To improve the knowledge and quality of the Nomination and Remuneration Committee members in 2024, the Company's Nomination and Remuneration Committee continues to follow the development of applicable regulations. This is done to continuously improve the quality of the resulting performance.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi & Remunerasi

Pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi & Remunerasi pada tahun 2024 tertuang dalam rapat-rapat berkala dan telah dipaparkan didalam pembahasan mengenai Rapat Komite Nominasi & Remunerasi.

Rapat Komite Nominasi & Remunerasi

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
   a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
   b. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
3. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
7. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat Komite Nominasi & Remunerasi

The Implementation of Nomination & Remuneration Committee Activities

The implementation of the Nomination & Remuneration Committee activities in 2024 is contained in periodic meetings and has been described in the discussion of the Nomination & Remuneration Committee Meeting.

Nomination & Remuneration Committee Meeting

1. Nomination and Remuneration Committee meetings are held periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months.
2. The Nomination and Remuneration Committee meeting can only be held if:
   a. Attended by a majority of the members of the Nomination and Remuneration Committee; and
   b. andone of the majority of the members of the Nomination and Remuneration Committee as referred to in letter a is the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
3. Nomination and Remuneration Committee meeting decisions are made based on deliberation and consensus.
4. In the event that a decision based on deliberation and consensus is not reached, the decision is made based on a majority vote.
5. If in the decision making by voting occurs the same number of votes, decisions are taken through the mechanism regulated in the charter of the Nomination and Remuneration Committee.
6. In the event that there is a dissenting opinion in the decision-making process, the dissenting opinion must be contained in the minutes of the meeting along with the reasons for the dissenting opinion.
7. The results of the Nomination and Remuneration Committee meeting must be stated in the minutes of the meeting and documented by the Issuer or Public Company.
8. Minutes of the Nomination and Remuneration Committee meetings must be submitted in writing to the Board of Commissioners.

Nomination & Remuneration Comittee Meeting Frequency

Nama Name	Rapat Komite Nominasi & Remunerasi Nomination & Remuneration Committee Meetings		
	Kehadiran Attendance	Frekuensi Frequency	Rasio Kehadiran Attendance Ratio
Mohammad Syahrial	4	4	100%
Takeshi Sasaki*	1	4	25%
Yasuo Imaizumi**	3	4	75%
Rudyanto Adisoetjahja***	4	4	100%
Andri****	0	4	0%

*) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, RUPS Luar Biasa menyetujui pengunduran diri Bapak Takeshi Sasaki selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.
Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") held on March 21, 2024, the Extraordinary GMS approved the resignation of Mr. Takeshi Sasaki as the President Commissioner, effective from the closing of the Extraordinary GMS.

**) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 21 Maret 2024, RUPS Luar Biasa menyetujui pengangkatan Bapak Yasuo Imaizumi selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.
Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") held on March 21, 2024, the Extraordinary GMS approved The appointment of Mr. Yasuo Imaizumi as the President Commissioner, effective from the closing of the Extraordinary GMS.

***) Masa jabatan telah berakhir sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.011/BOC-MLI/XI/24 tentang penetapan susunan komite anggota Nominasi dan Remunerasi yang berlaku efektif sejak 20 November 2024.
The term of office has ended in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No. 011/BOC-MLI/XI/24 concerning the determination of the composition of the Nomination and Remuneration committee members which is effective since November 20, 2024.

****) Anggota Nominasi dan Remunerasi yang efektif menjabat sejak tanggal 20 November 2024 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.011/BOC-MLI/XI/24 tentang penetapan susunan komite anggota Nominasi dan Remunerasi.
Nomination and Remuneration Members who have been effective since November 20, 2024 based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No. 011/BOC-MLI/XI/24 concerning the determination of the composition of the Nomination and Remuneration Committee members.

Uraian Rapat Komite Nominasi & Remunerasi Nomination & Remuneration Committee Meetings Description		
No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	14 Mar 2024	1. Rekomendasi bonus untuk Anggota Dewan Komisaris. Bonus recommendation for members of the Board of Commissioners. 2. Rekomendasi bonus untuk Anggota Direksi. Bonus recommendation for members of the Board of Directors. *3. Point refreshment* Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris. Point refreshment for Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners. 4. Program pengembangan kemampuan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2024. Capacity building program for Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners in 2024. 5. Lainnya. Others.
2.	20 Jun 2024	1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), tanggal 20 Juni 2024, Mata acara rapat no.4. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), dated June 20, 2024, meeting agenda no.4. 2. Dasar Penetapan Nilai dan Struktur : Basis for Determining Values and Structure: i. Honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan; Honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners and; ii. Upah dan tunjangan anggota Direksi. Salary and allowances of members of the Board of Directors. Untuk Tahun Buku 2024 For the Financial Year 2024 3. Rekomendasi : Recommendation: i. Honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan; Honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners and; ii. Upah dan tunjangan anggota Direksi. Salary and allowances of members of the Board of Directors. *4. Poin refreshment* Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris. Point refreshment for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. 5. Lainnya. Others.
3.	09 Sep 2024	*1. Poin refreshment* anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Point refreshment for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners 2. Struktur organisasi Per 1 Juli 2024. Organizational structure as of July 1, 2024. 3. Rekomendasi untuk pemberian 1 bulan upah pokok untuk Direktur RBU. Recommendation to give 1-month basic wage for RBU Director. Planned duties of the Nomination and Remuneration Committee in 2024. 4. Perubahan fasilitas supir untuk posisi Direktur. Change of the driver facility for Directors 5. Lainnya. Others.
4.	05 Nov 2024	1. Rekomendasi besarnya kenaikan upah pokok untuk dasar pembuatan rencana bisnis 2025. Recommendation of increase of basic wage for the base of creating the business plan 2025 2. Dasar penentuan struktur Bonus untuk Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk tahun buku 2024. Basis for determining the Bonus structure for Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors for the fiscal year 2024 *3. Poin Refreshment* Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi. Refreshment Points for Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors 4. Program pengembangan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi pada tahun 2025. Capacity development program for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors in 2025 5. Kewajiban pelatihan atau seminar bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi pada tahun 2025. Obligation of training or seminars for Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors in 2025 6. Rencana Tugas Komite Nominasi & Remunerasi pada tahun 2025. Nomination & Remuneration Committee Work Plan in 2025 7. Lainnya. Others

Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait penerapan Manajemen Risiko.

The Risk Monitoring Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners in assisting the functions and duties of the Board of Commissioners regarding the implementation of Risk Management.

Persyaratan Keanggotaan

Berpatokan pada Pedoman Komite Pemantau Risiko yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko beranggotakan paling sedikit terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua.
2. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko yang berkedudukan sebagai anggota.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib:
   a. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
   b. Memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang keuangan dan/atau manajemen risiko.

Member's Requirements

Based on the Risk Monitoring Committee Guidelines established by the Board of Commissioners, the Risk Monitoring Committee shall consist of at least:

1. One (1) Independent Commissioner serving as the chair.
2. One (1) independent party with expertise in finance and/or risk management serving as a member.
3. Members of the Risk Monitoring Committee must:
   a. Possess integrity, good character, and moral values
   b. Have sound knowledge in the fields of finance and/or risk management.

Susunan, Profil dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Pemantau Risiko

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.004/BOC-MLI/LEGAL/III/23 tentang penetapan anggota Komite Pemantau Risiko yang berlaku efektif sejak 1 April 2023, maka susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Composition, Profile and Work Experience of Risk Monitoring Committee Members

In accordance with the Decree of the Board of Commissioners of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.004/BOC-MLI/LEGAL/III/23 concerning the determination of members of the Risk Monitoring Committee which is effective from April 1, 2023 , then the composition of the members of the Risk Monitoring Committee is as follows:

MOHAMMAD SYAHRIAL
Ketua Komite Pemantau Risiko
Chairman of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Dewan Komisaris.
His profile is available in the Board of Commissioners Profile.

GREGORY O.K. ONGKO
Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau tersedia di bagian Profil Komite Audit.
His profile is available in the Audit Committee Profile.

Periode dan Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Period and Term of Office of The Risk Monitoring Committee Member

Members of the Risk Monitoring Committee are appointed and dismissed based on the decision of the Board of Commissioners Meeting. The appointment of Risk Monitoring Committee members is for a specified term and may be renewed.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta bekerja berdasarkan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Independensi anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan, dapat dilihat dari data hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, dan kepemilikan pada perusahaan pembiayaan lainnya dari tiap-tiap anggota Komite Pemantau Risiko dimana tiap-tiap anggota tidak memiliki hubungan afiliasi.

Risk Monitoring Committee Independence

The Risk Monitoring Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities, and operates based on the Risk Monitoring Committee Work Guidelines approved by the Board of Commissioners. The independence of the Company's Risk Monitoring Committee members can be seen from data on family, financial, managerial, and shareholding relationships in other financing companies, where each member does not have any affiliated relationships.

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Mohammad Syahrial		√		√		√		√
Gregory O.K. Ongko		√		√		√		√

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Family Relation with							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Mohammad Syahrial		√		√		√		√
Gregory O.K. Ongko		√		√		√		√

Nama Name	Kepengurusan dan Kepemilikan di Perusahaan Pembiayaan lain Management and Ownership in other Financing Companies							
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Main Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Mohammad Syahrial		√		√		√		√
Gregory O.K. Ongko		√		√		√		√

Pedoman Komite Pemantau Risiko

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dari Komite Pemantau Risiko, maka Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 008/BOC-MLI/LEGAL/IX/2022 tanggal 26 September 2022 yang dapat diakses melalui *website* Perseroan.

Dasar Hukum

- Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan. Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan OJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan *Non Bank*.
- Peraturan OJK Nomor 28/ POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan *Non bank*.
- Surat Edaran OJK Nomor 11/ SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan.
- Anggaran Dasar Perseroan tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Risk Monitoring Committee Charter

In supporting the implementation of the Risk Monitoring Committee's tasks, the Company had drafted the Risk Monitoring Committee Guidelines based on the Board of Commissioners' Decree Number 008/BOC-MLI/LEGAL/IX/2022 dated September 26, 2022, which could be accessed through the Company's website.

Legal Basis

- OJK Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Governance for Financing Companies. OJK Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to OJK Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Governance for Financing Companies.
- OJK Regulation Number 44/POJK.05/2020 concerning Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions.
- OJK Regulation Number 28/POJK.05/2020 concerning Assessment of the Soundness of Non-Bank Financial Services Institutions.
- OJK Circular Letter Number 11/ SEOJK.05/2020 concerning Assessment of the Soundness Level of Financing Companies and Sharia Financing Companies.
- OJK Circular Letter Number 7/SEOJK.05/2021 concerning the Implementation of Risk Management for Financing.
- The Company's Articles of Association concerning the duties and authorities of the Board of Commissioners.

Pada tanggal 31 Desember 2024 telah diundangkan Peraturan OJK Nomor 48 tahun 2024 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Perseroan sedang dalam proses penyesuaian pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko sesuai dengan POJK tersebut pada tahun 2025.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Pemantau Risiko

1. Komite Pemantau Risiko wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya komite ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Dalam mekanisme pelaksanaan tugasnya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perseroan.
   b. Melakukan evaluasi Pedoman Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi.
   c. Melakukan evaluasi laporan hasil penilaian sendiri terhadap tingkat kesehatan Perusahaan.

Pendidikan dan/atau Pelatihan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas anggota Komite Pemantau Risiko pada tahun 2024, Komite Pemantau Risiko Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan atas peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas kinerja yang dihasilkan.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko pada tahun 2024 tertuang dalam rapat-rapat berkala dan telah dipaparkan di dalam pembahasan mengenai Rapat Komite Pemantau Risiko.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Kebijakan mengenai pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.
2. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
3. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko harus terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko harus dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Pemantau Risiko harus dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
7. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.
8. Risalah rapat Komite Pemantau Risiko wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

On December 31, 2024, OJK Regulation Number 48 of 2024 concerning Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions was enacted and the Company is in the process of adjusting the charter of the Risk Monitoring Committee in accordance with the POJK in 2025.

Duties, Responsibilities and Autorities of the Risk Monitoring Committee

1. The Risk Monitoring Committee is required to act independently in carrying out its duties.
2. In carrying out its duties, this committee is responsible to the Board of Commissioners.
3. In the mechanism of carrying out its duties, the Risk Monitoring Committee has detailed duties and responsibilities as follows:
   a. Evaluate the conformity between risk management policies and the implementation of Company policies.
   b. Evaluating the Risk Management Charter prepared by the Board of Directors.
   c. Evaluating the self-assessment report on the Company's soundness level.

Education and/or Training

To improve the knowledge and quality of members of the Risk Monitoring Committee in 2024, the Company's Risk Monitoring Committe continues to follow developments in applicable regulations. This is done to continuously improve the quality of the resulting performance.

Implementation of Risk Management Committee Activities

The implementation of the Risk Monitoring Committee activities in 2024 is contained in regular meetings and has been described in the discussion of the Risk Monitoring Committee Meeting.

Risk Monitoring Committee Meeting

The policy regarding the implementation of the Risk Monitoring Committee Meeting can be described as follows:

1. Risk Monitoring Committee meetings are held periodically at least 4 (four) times a year.
2. Meetings of the Risk Monitoring Committee can only be held if attended by at least 51% (fifty-one percent) of the total members of the Risk Monitoring Committee.
3. Risk Monitoring Committee meeting decisions are made based on deliberation and consensus.
4. In the event that a decision based on deliberation and consensus is not reached, the decision is made based on the majority vote.
5. The results of the meeting of the Risk Monitoring Committee must be stated in the minutes of the meeting and documented in accordance with the laws and regulations.
6. Dissenting opinions that occur in the Risk Monitoring Committee meeting must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the dissenting of opinion.
7. The results of the meeting of the Risk Monitoring Committee must be stated in the minutes of the meeting and documented by the Company.
8. Minutes of the Risk Monitoring Committee meeting must be submitted in writing to the Board of Commissioners.

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Comittee Meeting Frequency

Nama Name	Rapat Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Meetings		
	Kehadiran Attendance	Frekuensi Frequency	Rasio Kehadiran Attendance Ratio
Mohammad Syahrial	4	4	100%
Gregory O.K. Ongko	4	4	100%

No.	Uraian Rapat Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Meetings Description	
	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	02 Apr 2024	• Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Soundness Level Report of Financing Company
2.	13 Jun 2024	• Implementasi Undang - Undang Pelindungan Data Pribadi di PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Implementation of Personal Data Protection Law at PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
3.	4 Sep 2024	• Progres Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pelindungan Data Pribadi di PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Progress of Implementation of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection at PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
4.	18 Dec 2024	• Perubahan Kebijakan Terkait *Anti-Fraud* Berdasarkan POJK no 12 Tahun 2024 Changes in Anti-Fraud Policy Based on POJK No. 12 of 2024

Komite Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Supporting Committee for Implementing the Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Dalam mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi didukung oleh organ pendukung yaitu Komite Manajemen Risiko dan Komite Pengarah Teknologi Informasi.

In supporting the effective implementation of duties and responsibilities, the Board of Directors is supported by supporting organs, namely the Risk Management Committee and Information Technology Steering Committee.

Penilaian Kinerja Komite dan Unit Kerja yang Berada di Bawah Direksi

Performance Assessment of Committees and Work Units Under the Board of Directors

Direksi membentuk komite-komite di bawah Direksi untuk mendukung pelaksanaan tugas kepengurusannya. Komite-komite yang dibentuk diaktifkan sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan dan ketentuan regulasi, yang diharapkan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional. Direksi menilai bahwa selama 2024 komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif.

The Board of Directors established committees under the Board of Directors to support the implementation of its management duties. The established committees are activated in accordance with the Company's business needs and regulatory requirements, which are expected to create operational effectiveness and efficiency. The Board of Directors considers that during 2024 the committees have carried out their duties and responsibilities effectively.

Sepanjang tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah melakukan tinjauan dan evaluasi atas penerapan Manajemen Risiko serta menerima laporan profil risiko yang disusun dan disampaikan oleh fungsi manajemen risiko.

Throughout 2024, the Risk Management Committee has conducted a review and evaluating the implementation of Risk Management as well as receiving risk profile reports prepared and delivered by the risk management function.

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melakukan program pengembangan Teknologi Informasi serta melakukan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.

The Information Technology Steering Committee has implemented an Information Technology development program and monitored Information Technology performance and efforts to improve Information Technology performance.

Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee

Sebagai implementasi dari POJK NO.44/POJK.05/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 4 Maret 2024 Nomor DIR-001/SKD-MLI/III/24 terkait Komite Manajemen Risiko Perseroan dengan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua
Direktur Utama

Anggota Tetap
- Seluruh anggota Direksi selain Direktur Utama

- *Risk Management Expert*
- Kepala Divisi Manajemen Risiko & *Compliance*
- Kepala Departemen Manajemen Risiko
- Kepala Departemen Audit Internal & *Internal Control Unit*

Anggota Tidak Tetap
- *Deputy* Direktur terkait
- Kepala Divisi terkait
- Kepala Departemen terkait yang ditunjuk oleh Direktur, *Deputy* Direktur, Senior Manager atau Kepala Divisi untuk topik – topik tertentu.

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Manajemen Risiko, yang paling sedikit meliputi :
1. Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko, termasuk tingkat risiko yang diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance),* kerangka manajemen risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
2. Melakukan perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko, antara lain menyempurnakan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Perseroan yang mempengaruhi kecukupan pendanaan, profil risiko Perseroan, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi;
3. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti penyaluran pembiayaan yang dilakukan, pengambilan posisi risiko, atau pengambilan eksposur risiko yang melampaui *limit* yang telah ditetapkan; dan
4. Menerima laporan profil risiko yang disusun dan disampaikan oleh fungsi manajemen risiko.

Selanjutnya pada tahun 2021 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor DIR-0014/SKD/VIII/2021 tertanggal 1 September 2021 Perseroan telah menetapkan Pemberlakukan Pedoman Manajemen Risiko yang akan menjadi panduan bagi penanggung jawab penerapan Manajemen Risiko di Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

As an implementation of POJK NO.44/POJK.05/2020 dated August 28, 2020 concerning the Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions, in accordance with the Decree of the Board of Directors dated March 4, 2024 Number DIR-001/SKD-MLI/III/24 concerning the Company's Risk Management Committee with the following membership:

Chairman
President Director

Permanent Member
- All members of the Board of Directors other than the President Director
- Risk Management Expert
- Head of Risk Management & Compliance Division
- Head of Risk Management Department
- Head of Internal Audit & Internal Control Unit Department

Non-Permanent Member
- Related Deputy Director
- Head of related Divisions
- Head of the relevant Department appointed by the Director, *Deputy* Director, Senior Manager or Head of Division for certain topics.

The authority and responsibility of the Risk Management Committee is to provide recommendations to the President Director regarding risk management, which at least includes:
1. Develop policies, strategies, and guidelines for the implementation of risk management, including the level of risk taken (risk appetite) and risk tolerance (risk tolerance), risk management framework and contingency plans to anticipate the occurrence of abnormal conditions;
2. Make improvements or adjustments to the implementation of risk management based on the results of the evaluation of the implementation of risk management, including improving the risk management process periodically or incidentally as a result of a change in the Company's external and internal conditions that affect the adequacy of funding, the Company's risk profile, and ineffective implementation risk management based on evaluation results;
3. Determine matters related to business decisions that deviate from normal procedures, such as disbursing financing, taking risk positions, or taking risk exposures that exceed the predetermined limit; and
4. Receive risk profile reports compiled and submitted by the risk management function.

Furthermore, in 2021 through the Decree of the Board of Directors Number DIR-0014/SKD/VIII/2021 dated September 1, 2021 the Company has determined the Implementation of Risk Management Guidelines which will serve as a guide for those in charge of implementing Risk Management at the Company in carrying out their duties and responsibilities.

Pada tanggal 27 Desember 2024 telah diundangkan POJK Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Perseroan akan menyesuaikan pedoman manajemen risiko sesuai dengan POJK tersebut pada tahun 2025.

On December 27, 2024, OJK Regulation Number 42 of 2024 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions was enacted and the Company will adjust the risk management guidelines in accordance with the OJK Regulation in 2025.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2024 Komite telah melakukan 4 (empat) kali rapat dengan tingkat kehadiran anggota tetap sebesar 100%.

Risk Management Committee Meetings

During 2024 the Committee has conducted 4 (four) meetings with a permanent member attendance rate of 100%.

Uraian Rapat Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee Meetings Description

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	5 Feb 2024	• Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi The Implementation of Law no 27 year 2022 concerning Personal Data Protection
2.	2 Sep 2024	• Progres Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Progress of Implementation of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.
3.	11 Nov 2024	• Analisa Portofolio untuk Retail Business Unit Portfolio Analysis for Retail Business Unit
4.	27 Dec 2024	• Pemaparan Mengenai Cabang Baru – Unit Bisnis Retail The Presentation Regarding New Branch Offices – Retail Business Unit

Komite Pengarah Teknologi Informasi
Information Technology Steering Committee

Sebagai implementasi dari POJK NO.4/POJK.05/2021 tertanggal 9 Maret 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, maka pada tahun 2022 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor No. DIR-004/SKD- MLI/VII/24 Tanggal 3 Juli 2024 telah dibentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan dengan keanggotaan sebagai berikut :

As the implementation of POJK NO. 4/POJK.05/2021 dated March 9, 2021 concerning Implementation of Risk Management on the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions, in 2022, through the Board of Directors Decree Number DIR-004/SKD-MLI/VII/24 dated July 3, 2024, the Company's Information Technology Steering Committee was established with the following membership:

Ketua
Direktur Utama

Chairman
President Director

Wakil Ketua
Direktur IT &HR

Vice Chairman
IT &HR Director

Anggota
- Direksi
- Seluruh Deputi Direktur
- Risk Management Expert
- Seluruh Kepala Divisi
- Kepala Departemen Teknologi Informasi
- Kepala Departemen Manajemen Risiko
- Kepala Departemen Audit Internal & Internal Control Unit

Member
- Board of Directors
- All Deputy Directors
- Risk Management Expert
- All Division Heads
- Head of the Information Technology Department
- Head of the Risk Management Department
- Head of the Internal Audit & Internal Control Unit Department

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Teknologi Informasi, yang paling sedikit meliputi :

The authority and responsibility of the IT Steering Committee is to provide recommendations to the Board of Directors related to Information Technology, which at least includes:

1. Rencana pengembangan Teknologi Informasi yang sejalan dengan kegiatan usaha Perseroan;
2. Perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi;
3. Memastikan kesesuaian proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana pengembangan Teknologi Informasi;

1. Information Technology development plans that are in line with the Company's business activities;
2. Formulation of Information Technology policies and procedures;
3. Ensure the conformity of the approved Information Technology projects with Information Technology development plans;

4. Memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan proyek Teknologi Informasi yang disetujui;
5. Memastikan kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Perseroan;
6. Memastikan efektivitas mitigasi risiko atas investasi Perseroan pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Perseroan pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Perseroan;
7. Melakukan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi;
8. Melakukan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu; dan
9. Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya Teknologi Informasi yang dimiliki Perseroan.

4. Ensure the conformity of the implementation of Information Technology projects with the approved Information Technology projects;
5. Ensure the conformity of Information Technology with the needs of management information systems as well as the needs of Company's business activities;
6. Ensure the effectiveness of risk mitigation on the C ompany's investment in the Information Technology sector so that the Company's investment in the Information Technology sector will contribute to the achievement of Company's business objectives;
7. Monitoring of Information Technology performance and efforts to improve Information Technology performance;
8. Make efforts to resolve various problems related to Information Technology that cannot be resolved by Information Technology operator and user work units in and effective, efficient and timely manner; and
9. Ensure the adequacy and allocation of Information Technology resources owned by the Company.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Pada tahun 2024, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melakukan 4 (empat) kali rapat komite yang dihadiri oleh ketua dan seluruh anggota komite sebagai berikut :

Information Technology Steering Committee Meetings

In 2024, the Information Technology Steering Committee has conducted 4 (four) committee meetings which were attended by the chairman and all committee members as follows:

Uraian Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi
Information Technology Steering Committee Meeting Description

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	
1.	3 Jun 2024	1. Proyek Selesai Finished Projects 2. Proyek Berjalan Running Projects 3. Rencana Proyek 2024 Project Plan 2024 4. Lain-lain Others	8 Proyek sudah mulai berjalan 8 Projects are go live 7 proyek sedang dalam proses 7 Projects currently in progress 7 proyek akan diimplementasikan pada tahun 2024 7 Projects will be implemented in 2024
2.	14 Oct 2024	1. Penjelasan RPA Brief Explanation of RPA 2. Potensi Implementasi RPA Potential Implementation of RPA 3. Aplikasi RPA RPA Applications	UIPath
3.	18 Nov 2024	1. Lama Proses EOM EOM Process Time 2. Informasi *Change Request* (CR) Update Change Request (CR) 3. Perbaikan proses kerja Work Process Improvement	
4.	27 Dec 2024	1. Proyek Selesai Projects – Go Live 2. Proyek Berjalan Projects – In Progress 3. Proyek dalam Pembahasan Projects – On Discussions 4. Proyek ke 2025 Projects – Carry to 2025	28 Proyek sudah mulai berjalan 28 Projects are go live 1 Proyek sedang berlangsung 1 Project in progress 4 Proyek sedang dalam pembahasan 4 Projects are on discussion 5 Proyek akan dilanjutkan hingga 2025 5 Projects will be carried to 2025

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Sekretaris Perusahaan berada di bawah Direksi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi atas permasalahan yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal, dan kegiatan lain yang merupakan agenda kegiatan resmi dari Perseroan.

Corporate Secretary is an individual in charge of a work unit that carries out the function of Corporate Secretary. The Corporate Secretary is appointed and dismissed based on the decision of the Board of Directors. The Corporate Secretary is subordinate to the Board of Directors and is responsible for the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors on issues related to Good Corporate Governance and compliance with the provisions of applicable laws and regulations, particularly Capital Market regulations, and other activities that constitute the official agenda of the Company.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan surat penunjukan No. DIR-001/TK-CORSEC/SKD/ XII/21 tertanggal 1 Desember 2021, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Fransisca Yuliana Gunawan.

Corporate Secretary Profile

In accordance to letter of appointment No. DIR-001/TK-CORSEC/SKDXII/21 dated December 1, 2021, Corporate Secretary is held by Fransisca Yuliana Gunawan.

FRANSISCA YULIANA GUNAWAN

Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia, 42 tahun, berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 1 Desember 2021. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, pada tahun 2006. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham.

Indonesian citizen, 42 years old, domiciled in Jakarta. She has been appointed as Corporate Secretary since 1 December 2021. She obtained Bachelor of Economic from Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia, in 2006. She has no affiliation with other Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors and Shareholders.

Riwayat Pekerjaan
Career History

Jun 2024 – to date	*Corporate Secretary,Deputy Director Corporate Strategic Planning, Risk Management, Compliance, Business Processing, AML-PTF (Anti-Money Laundering – Prevention of the Terrorist Financing), PFPMDW (Prevention of Financing of Proliferation of Mass Destruction Weapons),CP (Customer Protection) Investor Relation* *PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk*
2021 – Jun 2024	*Corporate Secretary & Corporate Strategic Planning Division Head, Investor Relation* *PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk*
2021	*Corporate Strategic Planning Department Head & Investor Relation* PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2016 – 2021	*Investor Relation* PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2013 – 2015	*Corporate Secretary Section Head* PT Bank Victoria International Tbk
2012	*Corporate Finance* PT Victoria Securities Indonesia
2011 – 2012	*Corporate Finance* PT Victoria Investama Tbk (f.k.a PT Victoria Sekuritas)
2007 – 2011	Corporate Finance PT Kresna Graha Sekurindo Tbk

Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Merujuk pada Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi dan tugas, di antaranya:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:

Functions and Duties of the Corporate Secretary

Referring to the OJK Regulation Number 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, the Corporate Secretary has functions and duties, including:

1. Keeping abreast of Capital Market developments, especially the prevailing laws and regulations in the Capital Market.
2. Provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners to comply with the provisions of laws and regulations in the Capital Market.
3. Assist the Board of Directors and Board of Commissioners in the implementation of corporate governance which includes:

- Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs *website* Perseroan.
- Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu.
- Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS.
- Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Pelaksanaan program orientasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Memelihara dan menjamin komunikasi yang intensif dengan para investor.

Kegiatan Sekretaris Perusahaan Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah melakukan beberapa kegiatan, di antaranya:

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 20 Juni 2024.
2. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 21 Maret 2024 dan tanggal 7 November 2024.
3. Menyelenggarakan Paparan Publik Tahunan pada tanggal 27 Desember 2024.
4. *Review* dan melakukan sosialisasi peraturan baru yang diterbitkan oleh regulator di tahun 2024 (OJK dan BEI) dalam penerapan peraturan tersebut di Perseroan.
5. Memantau dan memperbaharui *website* Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan dan keterbukaan informasi kepada publik.
6. Menyiapkan dan melaporkan laporan berkala Perseroan, baik melalui surat elektronik maupun laporan elektronik, kepada regulator (OJK dan BEI), investor, serta kepada para pihak terkait.
7. Penyampaian keterbukaan informasi kepada publik yang disampaikan melalui surat elektronik, laporan elektronik dan situs web Perseroan.

Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2024, guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai berikut :

- Information disclosure to the public, including the availability of information on the Company's website.
- Timely submission of reports to OJK.
- Organization and documentation of the GMS.
- Organization and documentation of Board of Directors and/or Board of Commissioners meetings.
- Implementation of orientation program for the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.

4. As a liason between the Company and shareholders, OJK, and other stakeholders.
5. Maintain and ensure intensive communication with investors.

Activities of the Corporate Secretary in 2024

Throughout 2024, the Corporate Secretary has carried out several activities, including:

1. Annual General Meeting of Shareholders on June 20,2024.
2. Extraordinary General Meeting of Shareholders on March 21, 2024 and on November 7,2024.
3. Held the Annual Public Expose on December 27, 2024.
4. Reviewed and socialized new regulations issued by regulators in 2024 (OJK and IDX) in the application of these regulations in the Company.
5. Monitored and updated the Company's website in accordance with regulatory requirements and information disclosure to the public.
6. Prepared and reported the Company's periodic reports, both by email and electronic reports to regulators (OJK and IDX), Investor and to related parties.
7. Submission of information disclosure to the public submitted by email or electronic reports and the Company's website.

Training of Corporate Secretary

Throughout 2024, in order to improve knowledge and understanding in order to assist the implementation of duties and responsibilities, the Corporate Secretary has attended the following trainings:

Pelatihan Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Trainings

Pelatihan Trainings	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
The Importance of Government Relations in Organizations	2 May 2024	ICSA
Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI): Inovasi untuk Mencapai Tujuan *Net Zero Emission* dalam Transisi Energi di Indonesia Indonesia's Sustainable Finance Taxonomy (TKBI): An Innovation to Achieve Net Zero Emissions Goals in the Energy Transition in Indonesia	28 May 2024	ICSA
Annual Report Awards: Setting the Standard for Corporate Disclosure	19 Jun 2024	ICSA
Understanding the Climate Change Challenge & Mitigation Plan in Sustainability Era	26 Jun 2024	ICSA
Integrated Corporate Communication Strategy	16 Jul 2024	ICSA

Pelatihan Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Trainings		
Pelatihan Trainings	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Pendalaman POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan & POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama In-depth Review of POJK No. 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions & POJK No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Main Business Activities	15 Aug 2024	ICSA
What Investor Want from Sustainability Reports?	17 Sep 2024	ICSA
Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal In-depth Review of Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.04/2021 on the Implementation of Activities in the Capital Market Sector	19 Sep 2024	ICSA
Strategic Finance for Sustainability: The Role of Corporate Secretary as BOD Business Partner to Boost Sustainability Awareness	24 Sep 2024	ICSA
Kriminalisasi Profesi, Apakah bisa? Criminalization of Professions, Is It Possible?	2 Oct 2024	ICSA
Peran dan Jasa Layanan KPEI pada Pasar Modal Indonesia The Role and Services of KPEI in the Indonesian Capital Market	10 Oct 2024	ICSA
Corporate Secretary dalam Era Digital: Tantangan Perlindungan Data Investor Corporate Secretary in the Digital Era Challenges in Investor Data Protection	15 Oct 2024	ICSA
Mastering Arbitration: Case Management, Cost & Time Efficiency, and Effective Enforcement	22 Oct 2024	ICSA
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (E-RUPS) melalui eASY.KSEI Electronic General Meeting of Shareholders (E-GMS) via eASY.KSEI	29 Oct 2024	ICSA
Mastering Greenhouse Gas Emissions: Strategies and Best Practices	17 Oct 2024	ICSA
Pengenalan IFRS 1 & 2: Panduan Praktis bagi Perusahaan di Indonesia Introduction to IFRS 1 & 2: A Practical Guide for Companies in Indonesia	4 Nov 2024	ICSA

Unit Audit Internal
Internal Audit Unit

Unit Audit Internal merupakan unit independen internal yang membantu Dewan Komisaris dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, serta memastikan manajemen yang efektif dan transparan. Unit tersebut melakukan pemeriksaan, penilaian, evaluasi, dan memberikan rekomendasi berkaitan dengan kegiatan unit usaha dan sistem pengendalian internal.

The Internal Audit Unit is an internal independent unit that assists the Board of Commissioners in implementing GCG principles, as well as ensuring effective and transparent management. The unit conducts inspection, assessment, evaluation, and provides recommendations related to business unit activities and internal control systems.

Profil Kepala Unit Audit Internal

Berdasarkan surat penunjukan oleh Direksi Perseroan No.002/HRD&GA/SKD/I/2020 tertanggal 15 Januari 2020, Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh:

Head of Internal Audit Unit Profile

Based on the appointment letter by the Company's Board of Directors No.002/HRD&GA/SKD/I/2020 dated January 15, 2020, the Head of Internal Audit Unit is held by:

GUNTUR SUNARYO PUTRO*

Kepala Unit Audit Internal / Head of Internal Audit

Warga negara Indonesia, 34 tahun, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta tahun 2013.

Indonesian citizen, 34 years old, domiciled in Jakarta. Obtained a bachelor's degree in Economics from the Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta in 2013.

Riwayat Pekerjaan
Career History

2020 – Jun 2024	*Audit Internal Department Head* PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2019 – Jan 2024	*Independent Control Department Head* PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2016 – 2019	*Internal Audit Section Head* PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2014 – 2016	*Audit Officer* PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2014	*Audit Officer* PT Ahad Detha Utama

*) Masa jabatan telah berakhir sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.028/HRD/SKD/VII/2024 tentang penetapan dan penunjukan Kepala Internal Audit yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2024.
The term of office has ended effectively from 1 July 2024 in accordance with the Board of Director Decree of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.028/HRD/SKD/VII/2024 regarding the appointment of Head Internal Audit effective from 1 July 2024.

Pada tanggal 1 Juli 2024 telah terjadi pergantian Kepala Unit Audit Internal. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No. 028/HRD/SKD/VII/2024 tentang penetapan anggota pengangkatan Kepala Unit Audit Internal yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2024, maka Kepala Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

On July 1, 2024, there was a change in the Head of Internal Audit Unit in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No. 028/HRD/SKD/VII/2024 concerning the determination of members of the appointment of the Head of Internal Audit Unit which is effective from July 1, 2024, then the Head of Internal Audit Unit is as follows:

NICHOLAS JOSHUA LAWRENCE*

Kepala Unit Audit Internal / Head of Internal Audit

Warga negara Indonesia, 28 tahun, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar sarjana Akuntansi dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta tahun 2019.

Indonesian citizen, 28 years old, domiciled in Jakarta. Obtained a bachelor's degree in Accounting from the Atma Jaya Catholic University of Indonesia, Jakarta in 2019.

Riwayat Pekerjaan
Career History

Jul 2024 – to date	*Internal Audit Department Head* PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Jan 2024 – Jun 2024	*Internal Audit Regular Supervisor* PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
2022 – 2023	*Coordinator Internal Audit* PT Verena Multi Finance Tbk (now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)
2021 – 2022	*Internal Audit Officer* PT Verena Multi Finance Tbk *(now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)*
2020 – 2021	*Independent Control Unit (ICU) Officer* PT Verena Multi Finance Tbk *(now PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk)*

*) Kepala Internal Audit yang efektif menjabat sejak tanggal 1 Juli 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.028/HRD/SKD/VII/2024 tentang penetapan dan penunjukan Kepala Internal Audit.
Head of Internal Audit who have served effectively since July 1, 2024 based on a Board of Director Decree of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk No.028/ HRD/SKD/VII/24 regarding the appointment of Head Internal Audit.

Pelatihan Unit Audit Internal

Sepanjang tahun 2024, guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Internal Audit telah mengikuti pelatihan/seminar/*workshop* sebagai berikut:

Internal Audit Unit Training

Throughout 2024, in order to improve knowledge and understanding in order to assist the implementation of duties and responsibilities, Internal Audit has participated in the following training/seminars/workshops:

Pelatihan Unit Audit Internal Internal Audit Unit Trainings		
Pelatihan Trainings	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Pengantar audit internal (*Tools & Technique*)	31 Jan 2024	*Learning & Development Department*
Qulaified Internal Auditor : Basic Level	22 Apr – 06 May 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
Peluang dan Tantangan Pelindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Di Era Digital Opportunities and Challenges of Personal Data Protection in Transactions in the Digital Era	09 May 2024	OJK
Cyber Security Awareness	04 Jun 2024	PT Sarana Mutu Edukasi Indonesia
APU PPT & PPPSPM	02 Jul 2024	PT Sarana Mutu Edukasi Indonesia
Anti Gratifikasi dan *Anti-Fraud* Anti-Gratification and Anti-Fraud	08 Aug 2024	OJK
Root Cause Audit	31 Aug 2024	*Learning & Development Department*

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Internal Audit Unit Structure and Position

The Structure and Position of the Internal Audit Unit Company are as follows:

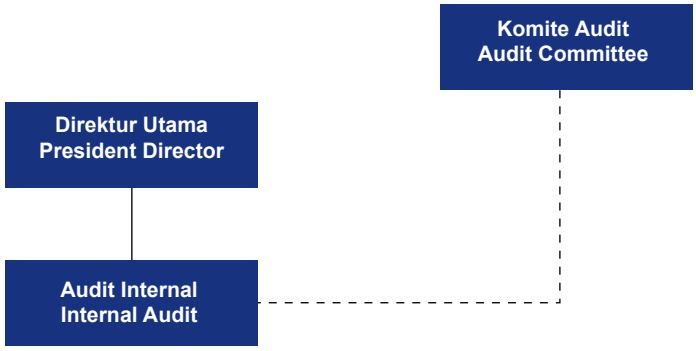

Piagam, Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Piagam Audit Internal Perseroan telah diperbaharui dan ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 26 September 2022.

Unit ini memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengembangkan rencana kerja Audit tahunan yang fleksibel dengan menggunakan metode perencanaan berbasis risiko yang tepat, termasuk risiko dan kontrol yang diidentifikasi oleh Manajemen dan disetujui oleh Direktur Utama.
2. Melaksanakan perencanaan audit tahunan yang telah disetujui, termasuk tugas khusus yang diminta oleh manajemen dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
3. Menjaga staf audit sehingga senantiasa profesional, memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang memadai.

Charter, Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit

In accordance with the provisions of the Financial Services Authority regulation No.56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Unit Charter, the Company's Internal Audit Charter has been ratified by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners on September 26, 2022.

This unit has the following duties and responsibilities:

1. Prepare and develop a flexible annual Audit work plan utilizing appropriate risk-based planning methods, including risks and controls identified by Management and approved by the President Director.
2. Carry out the approved annual audit plan, including special assignments requested by the management and Board of Commissioners through the Audit Committee.
3. Maintain audit staff to be professional, possess adequate knowledge, skills, and experience.

4. Melaksanakan jasa konsultasi, selain dari jasa *assurance* audit internal, untuk membantu manajemen dalam upaya mencapai tujuannya.
5. Mengevaluasi dan menilai penggabungan/ konsolidasi fungsi, perubahan jasa, proses, operasi, dan proses pengendalian sehubungan dengan Standar Profesional Audit Internal dari Institute Internal Audit (IPPF/IIA) serta selaras dengan peraturan OJK.
6. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
7. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan/ atau Komite Audit.
8. Menetapkan dan memastikan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk memonitor dan memastikan bahwa proses perbaikan telah dilakukan secara efektif dan efisien.
9. Melakukan investigasi terhadap dugaan *fraud* yang terjadi di dalam Perseroan termasuk koordinasi dengan unit kerja lain dalam melakukan investigasi.

Pelaksanaan Tugas Unit Audit Internal

Selama tahun 2024, Unit Audit Internal telah melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemeriksaan/audit terhadap unit department/ divisi yang ada Kantor Pusat, Operasional Kantor Cabang, serta Audit IT yang berhubungan dengan teknologi sistem informasi;
2. Melakukan uji test dan evaluasi atas sistem pengendalian internal untuk memastikan efektivitas tata kelola perusahaan sesuai dengan SOP, kebijakan, dan peraturan perusahaan yang berlaku;
3. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap efektivitas sistem dan prosedur sehubungan dengan risiko Perseroan;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa;
5. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan/ atau Komite Audit;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan, menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang telah dilaksanakan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit; dan
8. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal Perseroan yang ditugaskan Direktur Utama.

4. Perform consulting services, other than internal audit assurance services, to assist management in achieving its objectives.
5. Evaluate and assess the possibility of merging/ consolidating functions, changing services, processes, operations, and control processes in relation to the Internal Audit Professional Standards from Institute of Internal Audit (IPPF/IIA) and follow OJK regulation.
6. Provide suggestions for improvement and objective information about the activities examined at all levels of management.
7. Prepare an audit report and submit the report to the President Director and the Board of Commissioners and/or the Audit Committee.
8. Establish and ensure a follow-up process for inspection results to monitor and ensure that the improvement process has been carried out regularly effective and efficient.
9. Conducting investigations into alleged fraud that occurred within the Company, including coordinating with other work units in carrying out investigations.

Implementation of Internal Audit Unit Duties

Throughout 2024, the Internal Audit Unit carried out the following tasks:

1. Conducted audits of departments/divisions at the Head Office, Branch Office operations, and IT audits related to information system technology;
2. Conducted tests and evaluations of the internal control system to ensure the effectiveness of corporate governance in accordance with the Company's SOPs, policies, and applicable regulations;
3. Analyzed and evaluated the effectiveness of systems and procedures concerning the Company's risk exposure;
4. Provided improvement suggestions and objective information on audited activities;
5. Prepared Audit Reports and submitted them to the President Director and the Board of Commissioners and/or Audit Committee;
6. Monitored, analyzed, and reported on the implementation of follow-up actions recommended, and developed programs to evaluate the quality of internal audit activities carried out;
7. Cooperated with the Audit Committee; and
8. Carried out special assignments within the scope of the Company's internal control as assigned by the President Director.

Pengendalian Internal
Internal Control

Uraian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal bagi Perseroan adalah suatu mekanisme yang diterapkan oleh Perseroan yang meliputi pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, metode, dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan Perseroan agar melakukan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Perseroan, Anggaran Dasar, aturan internal Perseroan serta peraturan perundang-undangan.

Description of the Internal Control System

The internal control system for the Company is a mechanism implemented by the Company which includes a clear seggregation of duty and responsibilities, methods and measures to maintain and direct the Company to carry out activities in accordance with the Company's Vision and Mission, Articles of Association, the Company's internal regulations and laws.

Dalam mengerjakan tugas pengurusan Perseroan, Direksi bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan pengendalian internal telah dilaksanakan dalam setiap fungsi.

Dewan Komisaris turut berperan dalam pengawasan pelaksanaan pengendalian internal dalam seluruh jenjang oraganisasi. Tugas pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit dan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Direksi dibantu oleh Komite di bawah Direksi yaitu Komite Manajemen Risiko.

Pengendalian internal diterapkan oleh Perseroan untuk menjamin tercapainya, sebagai berikut:

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Efektivitas dan efisiensi operasi
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Hal tersebut dicapai oleh Perseroan dengan tujuan, sebagai berikut:

- Kepatuhan
  Menjamin bahwa semua kegiatan usaha Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun kebijakan dan prosedur internal yang ditetapkan oleh Perseroan.
- Informasi
  Menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Operasional
  Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Perseroan dari risiko kerugian.

Pengendalian internal yang dilakukan Perseroan meliputi lingkungan pengendalian, pengukuran risiko, aktivitas pengendalian, teknologi informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Lingkungan Pengendalian Internal

Perseroan senantiasa menciptakan lingkungan pengendalian yang mendukung pelaksanaan pengendalian internal dengan cara membuat susunan organisasi yang mencerminkan pengendalian internal yang baik dengan cara pemisahan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi. Perseroan juga memastikan seluruh karyawan Perseroan menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai Perseroan.

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris juga berperan aktif untuk melakukan pengawasan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan.

Pengkajian dan Pengelolaan Risiko Usaha

Perseroan senantiasa mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang akan timbul dari pelaksanaan kegiatan usahanya. Berdasarkan Model 3 Lini (*3 Lines Model*), lini pertama memainkan peran penting dalam manajemen risiko operasional. Mereka bertanggung jawab untuk :

In carrying out the Company's management duties, the Board of Directors is responsible for the implementation of internal control that has been implemented in each function.

The Board of Commissioners also plays a role in supervising the implementation of internal control at all levels of the organization. The supervisory duties of the Board of Commissioners are assisted by the Committees under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee and the Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors is assisted by a Committee under the Board of Directors, namely the Risk Management Committee.

Internal control is implemented by the Company to ensure the achievement of the following:

1. Reliability of financial reporting
2. Effectiveness and efficiency of operations
3. Compliance with applicable laws and regulations

This is achieved by the Company with the following objectives:

- Compliance
  Ensures that all of the Company's business activities have been carried out in accordance with the prevailing laws and regulations, both provisions determined by the government and internal policies and procedures established by the Company.
- Information
  Providing correct, complete, timely, and relevant reports required in order to make informed and accountable decisions.
- Operational
  Improve effectiveness and efficiency in using assets and other resources in order to protect the Company from the risk of loss.

Internal controls implemented by the Company include the control environment, risk measurement, control activities, information and communication technology, and monitoring.

Internal Control Environment

The Company always creates a control environment that supports the implementation of internal control by creating an organizational structure that reflects good internal control by seggregation of duty and responsibilities of each function. The Company also ensures that all employees of the Company uphold the ethics and values of the Company.

The committees under the Board of Commissioners also play an active role in carrying out supervision to assist the Board of Commissioners in carrying out supervision.

Business Risk Assessment and Management

The Company always identifies and manages risks that will arise from the implementation of its business activities. Based on the 3 Lines Model, the first line plays an important role in operational risk management. They are responsible for:

- Mengidentifikasi dan memitigasi risiko
- Menerapkan kebijakan dan prosedur yang berlaku
- Melaporkan setiap masalah yang dihadapi kepada manajemen

Selain itu, mereka memastikan kontrol internal yang efektif dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan etika).

Lini pertama berfungsi sebagai fondasi yang menjaga operasi organisasi berjalan lancar dan membantu mencapai tujuannya.

Lini kedua berfungsi sebagai pengawas dan penasihat dalam manajemen risiko. Mereka bertanggung jawab untuk :

- Memantau dan mengawasi risiko yang dikelola oleh lini pertama, serta memberikan saran dan panduan untuk membantu lini pertama melaksanakan tugasnya.
- Melakukan analisis dan pengujian terhadap efektivitas kontrol yang ada, melaporkan temuan dan rekomendasi kepada manajemen.
- Selain itu, mereka juga dapat terlibat dalam pengembangan kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko dan kepatuhan.

Dengan demikian, Lini kedua memastikan bahwa risiko dikelola secara efektif dan mendukung lini pertama dalam mencapai tujuan organisasi.
Lini ketiga berfungsi sebagai pihak independen yang berfokus untuk memberikan asurans dan nasihat kepada badan pengawas. Bertanggung jawab untuk :

- Mempertahankan akuntabilitas utama kepada badan pengatur dan independen dari tanggung jawab manajemen.
- Mengkomunikasikan penilaian dan saran yang independen dan obyektif kepada manajemen dan badan pengatur mengenai kecukupan dan efektivitas tata kelola dan manajemen risiko (termasuk pengendalian internal) untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dan untuk mendorong serta memfasilitasi perbaikan yang berkesinambungan.

Perseroan juga memiliki fungsi manajemen risiko, yang dalam aktivitasnya didukung oleh Komite Manajemen Risiko yang berada di bawah Direksi, dimana tugas dan wewenang Komite Manajemen Risiko telah diungkapkan pada halaman 136.

Aktivitas Pengendalian Internal

Merupakan kegiatan pengendalian yang dilakukan Perseroan pada seluruh jenjang organisasi. Salah satu parameter ektivitas aktivitas pengendalian adalah berdasarkan ketepatan dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko.

Aktivitas pengendalian internal yang dilakukan Perseroan antara lain:

- Melakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas antara masing-masing fungsi
- Memastikan penerapan tata kelola yang baik dalam melaksakan kegiatan operasional
- Menerapkan kebijakan *document information control* untuk memitigasi risiko penyalahgunaan informasi, menghindari

- Identifying and mitigating risks
- Implementing applicable policies and procedures
- Reporting any problems encountered to management

In addition, they ensure effective internal control and compliance with applicable regulations (Ensuring compliance with laws, regulations, and ethics).

The first line serves as the foundation that keeps the organization's operations running smoothly and helps achieve its goals.

The second line serves as a supervisor and advisor in risk management. They are responsible for:

- Monitoring and supervising the risks managed by the first line, and providing advice and guidance to help the first line carry out its duties.
- Conducting analysis and testing of the effectiveness of existing controls, reporting findings and recommendations to management.
- In addition, they can also be involved in developing policies related to risk management and compliance.

Thus, the second line ensures that risks are managed effectively and supports the first line in achieving the organization's objectives.
The third line functions as an independent party that focuses on providing assurance and advice to the regulatory body. Responsible for:

- Maintaining primary accountability to the regulatory body and independent of management responsibilities.
- Communicating independent and objective assessments and recommendations to management and the regulatory body regarding the adequacy and effectiveness of governance and risk management (including internal control) to support the achievement of the organization's objectives and to encourage and facilitate continuous improvement.

The Company also has a risk management function, which in its activities is supported by the Risk Management Committee under the Board of Directors, where the duties and authorities of the Risk Management Committee have been disclosed on page 136.

Internal Control Activity

Is control activities carried out by the Company at all levels of the organization. One of the parameters of the effectiveness of control activities is based on the accuracy in identifying and measuring risks.

Internal control activities carried out by the Company include:

- Conducting a clear seggregation of duties and responsibilities between each function
- Ensuring the implementation of good governance in carrying out operational activities
- Implementing document information control policies to mitigate the risk of information misuse, avoiding leakage of

kebocoran informasi debitur dari akses yang tidak sah serta menghindari penggunaan informasi secara ilegal
- Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan memperoleh Sertifikasi ISO 27001:2013
- Saat ini Perseroan sedang melakukan pengkinian terhadap sertifikat ISO 27001:2013 menjadi ISO 27001:2022

Sistem Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dalam penerapan pengendalian internal terutama dalam hal menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Sebagai langkah penerapan pengendalian internal, Perseroan telah memiliki kebijakan tentang:
- Pengelolaan *password*
- Akses data ke *Data Center*
- Pembatasan akses *flashdisk* melalui *port* USB
- Pengelolaan pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak

Perseroan secara berkala juga sudah melaksanakan *awareness* tentang serangan siber untuk meningkatkan pemahaman akan keamanan dalam penggunaan jaringan internet bagi seluruh karyawan Perseroan.

Tata Cara Pemantauan

Penerapan pengendalian internal senantiasa dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap lingkungan pengendalian internal, pengkajian dan pengelolaan risiko usaha serta implementasi dari aktivitas pengendalian internal.

Unit Audit Internal bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan penerapan pengendalian internal, sedangkan pemeriksaan juga dilakukan oleh pihak independen seperti Kantor Akuntan Publik untuk menilai kecukupan pengendalian internal Perseroan.

Peran aktif Direksi, Dewan Komisaris, Komite yang berada di bawah Direksi serta Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris pun tak luput dalam upaya pemantauan pelaksanaan pengendalian internal.

Mekanisme Pelaporan kepada Direksi dengan Tembusan kepada Komite Audit

Dalam hal terjadi penyimpangan kualitas sistem pengendalian internal, Unit Audit Internal akan melaporkan hasil temuannya kepada Direksi dengan tembusan kepada Komite Audit secara tepat waktu. Perseroan juga membentuk Internal Control Unit yang ditempatkan pada setiap Kantor Cabang Perseroan untuk memonitoring terjadinya penyimpangan dalam pengendalian internal.

Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System

Manajemen risiko merupakan aspek yang penting dalam memastikan kelangsungan usaha. Terkait hal itu, Perseroan terus meningkatkan kebijakan manajemen risiko dalam identifikasi, pemantauan, pengendalian, dan pengelolaan risiko. Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko adalah untuk menjaga dan melindungi Perseroan melalui pengelolaan risiko

debtor information from unauthorized access and avoiding illegal use of information
- Implementing an Information Security Management System (ISMS) and obtaining ISO 27001:2013 Certification
- The Company is currently updating its ISO 27001:2013 certification to ISO 27001:2022

Information and Communication System

Information and communication system is very much needed in the implementation of internal control, especially in terms of implementing good Corporate Governance.

As a step in implementing internal control, the Company has policies on:
- Password management
- Data access to the Data Center
- Restriction of flash disk access via USB port
- Management of hardware and software updates

The Company has also periodically implemented awareness of cyber attacks to improve understanding of security in the use of internet networks for all employees of the Company.

Monitoring Procedures

The implementation of internal control is always carried out continuously. This is done by assessing the internal control environment, reviewing and managing business risks, and implementing internal control activities.

The Internal Audit Unit is responsible for supervising the implementation of internal control, while examinations are also carried out by independent parties such as Public Accounting Firms to assess the adequacy of the Company's internal control.

The active role of the Board of Directors, Board of Commissioners, Committees under the Board of Directors, and Committees under the Board of Commissioners is also inseparable from efforts to monitor the implementation of internal control.

Reporting Mechanism to the Board of Directors with a Copy to the Audit Committee

In the event of deviations in the quality of the internal control system, the Internal Audit Unit will report its findings to the Board of Directors with a copy to the Audit Committee in a timely manner. The Company also forms an Internal Control Unit which is placed in each of the Company's Branch Offices to monitor deviations in internal control.

Risk management is an important aspect in ensuring business continuity. In this regard, the Company continues to improve its risk management policies in identifying, monitoring, controlling and managing risks. The main purpose of implementing risk management is to maintain and protect the Company through managing the risk of losses that may arise from business

kerugian yang mungkin timbul dari berbagai aktivitas usaha, serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

activities, as well as maintaining the risk level in accordance with the predetermined provisions.

Perseroan senantiasa berusaha membentuk dan mengembangkan budaya risiko yang kuat, penerapan praktik GCG dan kepatuhan terhadap regulasi, yang tentunya harus didukung infrastruktur yang memadai serta proses bisnis yang terstruktur dan sehat.

The Company strives to establish and develop a strong risk culture, GCG practices and compliance with regulations, which must be supported by adequate infrastructure and healthy business processes.

Pelaksanaan Manajemen Risiko Perseroan merujuk kepada Peraturan OJK No.44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

The implementation of the Company's Risk Management refers to OJK Regulation No.44/POJK.05/2020 concerning the Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions and OJK Circular Letter No.7/SEOJK.05/2021 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Companies and Sharia Financing Companies.

Pada tanggal 27 Desember 2024 telah diundangkan POJK Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Perseroan akan menyesuaikan penerapan manajemen risiko sesuai dengan POJK tersebut pada tahun 2025.
Penerapan Manajemen Risiko di Perseroan meliputi:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
2. Kecukupan kebijakan, dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

On December 27, 2024, POJK Number 42 of 2024 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions was enacted and the Company will adjust the implementation of risk management in accordance with the POJK in 2025.
Risk Management Implementation at the Company are as follow:

1. Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners
2. Adequacy of risk management policies and procedures as well as risk limit setting
3. Adequacy of risk identification, measurement, control, and monitoring processes, as well as risk management information system
4. Comprehensive internal control system

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan.
Perseroan mempunyai komitmen yang kuat untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Compliance Risk

Compliance Risk is the risk that the Company does not comply with and/or does not implement what is regulated by the laws and regulations applicable to the Company.
The Company has a strong commitment to comply with the laws and regulations and always takes preventive measures to prevent the violation of the applicable laws and regulations.

Mitigasi Risiko Kepatuhan

1. Perseroan memastikan tidak ada perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang dari atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Perseroan memastikan tidak ada perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum

Compliance Risk Mitigation

1. The Company ensures that there is no behavior or activity of the Company that deviates from or violates the prevailing laws and regulations
2. The Company ensures that there is no behavior or activity that deviates or violates the generally applicable standards

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Kelemahan aspek yuridis tersebut disebabkan antara lain oleh:

1. Kelemahan perjanjian akibat tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian dan pengikatan jaminan secara sempurna

Legal Risk

Legal risk is the risk that arises as a result of lawsuits and/or the weakness of the juridical aspect.

The weakness of the juridical aspect is caused by the following:

1. Weaknesses in the agreement due to not fulfilling the legal requirements of an agreement and binding collateral perfectly

2. Ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Perseroan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan
3. Adanya tuntutan hukum

Mitigasi Risiko Hukum

1. Secara periodik Perseroan melakukan evaluasi *Legal document* untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku
2. Perseroan sudah memiliki Departemen Litigasi untuk menangani kasus-kasus hukum

Risiko Strategis

Risiko strategis adalah potensi kegagalan dalam mencapai tujuan Perseroan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya terhadap perubahan eksternal.

Mitigasi Risiko Strategis

1. Pengelolaan risiko strategis dimulai dengan pembuatan rencana bisnis untuk mengoptimalkan potensi pendapatan Perseroan
2. Perseroan memastikan bahwa struktur organisasi, infrastruktur, kondisi keuangan, permodalan, SDM dan kompetensi manajerial, serta sistem dan pengendalian yang ada telah sesuai dan memadai untuk mendukung implementasi strategi dan rencana bisnis Perseroan. Secara berkala dilakukan analisis pencapaian target-target yang telah ditetapkan untuk dapat ditentukan tindak lanjutnya
3. Setiap Divisi/Departemen memiliki rencana bisnis yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
4. Melakukan evaluasi atas strategi pembiayaan dan pemasaran, operasi, teknologi informasi, dan peningkatan kompetensi karyawan

Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan karena kekurangan dan kegagalan proses internal, *human errors*, kegagalan sistem ataupun permasalahan-permasalahan yang berdampak pada operasional Perseroan.
Penanganan risiko operasional dalam Perseroan dilakukan dengan 3 (tiga) langkah, yaitu:

- Pengidentifikasian risiko
- Pengukuran risiko
- Manajemen, pengawasan dan pengendalian risiko

Ketiga langkah di atas merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan.

Mitigasi Risiko Operasional

1. Pengertian yang jelas oleh semua lini yang terkait terhadap risiko yang melekat pada setiap tahapan proses kegiatan operasional yang berhubungan terutama dengan persetujuan dan pencairan pembiayaan, pelayanan konsumen, pencatatan pembukuan dan penyusunan laporan

2. The absence and/or changes in laws and regulations that cause a transaction that has been carried out by the Company to be against the law
3. A Lawsuit

Legal Risk Mitigation

1. The Company periodically evaluates Legal documents to ensure compliance with applicable regulations
2. The Company has formed a Litigation Department to handle legal cases

Strategic Risk

Strategic risk is the potential failure to achieve the Company's objectives due to inadequacy or failure in planning, determining and implementing strategies, making appropriate business decisions, and/or being less responsive to external changes.

Strategic Risk Mitigation

1. Strategic risk management begins with drawing up a business plan to optimize the Company's income potential
2. The Company ensures that the organizational structure, infrastructure, financial condition, capital, HR and managerial competence, as well as the existing systems and controls are adequate to support the implementation of the Company's strategies and business plans. The Company also periodically carries out an analysis of the targets to determine the follow-up actions
3. Each Division/Department has a business plan composed by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners
4. Evaluate the strategy of financing and marketing, operations, information technology, and improve employee competence

Operational Risk

Operational risk is the risk caused by shortcomings and failures of internal processes, human errors, system failures or problems that could bring impact to the Company's operations.

The operational risks in the Company are handled through 3 (three) steps as follows:

- Risk identification
- Risk measurement
- Risk management, supervision and control

The three steps above are inseparable unified processes.

Operational Risk Mitigation

1. A clear understanding by all lines concerned regarding the risk inherent in each stage of the processes of operational activities relating primarily to the approval and disbursement of financing, customer service, book keeping and reporting

2. Pembagian tugas yang jelas dan terpisah antara pelaksana dan kontrol. Sebagai pelaksana, aktivitas yang dikerjakan berdasarkan *Standard Operating Procedures* ("SOP") baku Perseroan, sedangkan fungsi kontrol memastikan aktivitas sudah memenuhi persyaratan yang digariskan oleh SOP
3. Perseroan menerapkan *Four Eyes Principle* yang merupakan prinsip utama dalam pengambilan keputusan dalam pemberian pembiayaan dimana setiap pemberian kredit/pembiayaan minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pejabat yang masing-masing berasal dari unit bisnis dan unit *credit analyst* yang saling independen satu sama lain
4. Perseroan menggunakan Sistem Teknologi Informasi yang handal agar kelangsungan dan kelancaran pengoperasian sistem dapat terjamin. Perseroan sudah menerapkan sistem *online* dan *real time* sehingga dengan demikian pihak manajemen dapat memonitor seluruh aktivitas operasional secara langsung, dan dengan cepat dapat mengambil keputusan strategis dan tepat untuk memitigasi kemungkinan risiko yang terjadi akibat kelalaian, tidak berfungsinya sistem, maupun penyimpangan dari pelaksanaan SOP dan/atau kebijakan Perseroan
5. Perseroan menerapkan *Risk Control Self Assessment* ("RCSA"), suatu konsep manajemen risiko yang dibentuk berdasarkan SOP yang berlaku dalam Perseroan, untuk menelaah dan mengukur besarnya potensi risiko-risiko yang berlangsung selama proses internal untuk menghasilkan status risiko operasional, dan dilaporkan secara periodik
6. Perseroan secara bersinambungan mengembangkan kompetensi dan pengetahuan karyawan melalui berbagai program pelatihan yang diselenggarakan oleh Departemen *Learning and Development*, dalam rangka meminimalkan potensi kesalahan operasional yang bersumber dari faktor manusia, meningkatkan efektivitas sistem operasional, serta mengurangi risiko kerugian finansial yang mungkin timbul
7. Memastikan bahwa semua lini yang terkait telah memahami risiko pada setiap tahap kegiatan operasional terutama yang berhubungan dengan persetujuan dan pencairan kredit, pelayanan konsumen, pembukuan, dan penyusunan laporan
8. Proses pencatatan transaksi keuangan (*accounting*) dilakukan melalui sistem *built in control* yang berjenjang dan terintegrasi
9. Membuat *back-up* melalui *Disaster Recovery Center* ("DRC") atas data-data operasional untuk menghindari terganggunya kegiatan operasional jika seluruh data hilang akibat gangguan sistem, kebakaran, banjir, huru-hara, atau gempa bumi.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan / atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Risiko pasar antara lain meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko ekuitas. Manajemen risiko pada risiko pasar dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Perseroan.

Mitigasi Risiko Pasar

1. Perseroan menerapkan *natural hedging* untuk antisipasi risiko konversi mata uang sepenuhnya, sehingga

2. A clear segregation of duties between executors and controller. Executors, carry out activities based on the Company's Standard Operating Procedures (SOP), while the control functions ensure that the activities are done in accordance with the requirements outlined by the SOP
3. The Company applies the Four Eyes Principle which is the main principle in decision making in providing financing where each provision of credit/financing is carried out by at least 2 (two) officials, each of whom comes from a business unit and a credit analyst unit which are independent of each other
4. The Company uses a reliable Information Technology System so that the continuity and smooth operation of the system can be guaranteed. The Company has implemented an online and real time system so that management can monitor all operational activities directly, and can quickly make strategic and appropriate decisions to mitigate possible risks that occur due to negligence, system malfunctions, or deviations from SOP implementation and/or Company policy.
5. The Company implements a Risk Control Self Assessment (RCSA), a concept of risk management, which was established based on applicable SOP in the Company, to examine and measure the extent of potential risks occurring throughout the internal processes in order to generate operational risk status, and is reported periodically
6. The Company continuously develops employee competencies and knowledge through various training programs organized by the Learning and Development Department, in order to minimize the potential for human error in operations, enhance the effectiveness of operational systems, and reduce the risk of potential financial losses
7. Ensure that all related lines understand the risks that may occur at every stage of operational activities, especially those related to credit approval and disbursement, customer service, bookkeeping, and reporting
8. The process of recording financial transactions (accounting) is carried out through a tiered and integrated built-in control system
9. Make backups through the Disaster Recovery Center ("DRC") of operational data to avoid disruption of operational activities if all data is lost due to system disruption, fire, flood, riot or earthquake

Market Risk

Market risk is risk in the position of assets, liabilities, equity, and / or administrative accounts including derivative transactions due to overall changes in market conditions. Market risk includes, among others, interest rate risk, exchange rate risk and equity risk. Market risk management is carried out to minimize the possibility of negative impacts due to changes in market conditions on the Company's assets and capital.

Market Risk Mitigation

1. The Company applies natural hedging to anticipate risk of currency conversion, with the purpose that it is protected

terlindungi dari volatilitas nilai tukar yang dilakukan dengan memperoleh pinjaman dan pembiayaan dengan mata uang yang yang sama. *Natural hedging* adalah menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran sehingga tidak terjadi lonjakan keperluan kas. Salah satu cara untuk mengimbangi *long exposure* terus menerus yang sudah diantisipasi terhadap mata uang tertentu adalah mendapatkan utang berdenominasi mata uang tersebut

2. Perseroan menggunakan instrumen derivatif yaitu *swap cross currency* untuk meminimalisir risiko nilai tukar. Melalui *swap cross currency*, Perseroan setuju untuk mempertukarkan pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dengan pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang spesifik pada tanggal dimulainya transaksi, di mana kontrak tersebut memenuhi kriteria dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas
3. Perseroan menggunakan instrumen derivatif yaitu *swap* suku bunga untuk meminimalisir risiko suku bunga. Kontrak *swap* suku bunga mempertukarkan tingkat suku bunga mengambang dengan tingkat suku bunga tetap, dimana kontrak tersebut ditujukan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas

from exchange rate volatility by obtaining loans and financing in the same currency. Natural hedging is balancing income and expenses so there is no spike in cash needs. One way to offset the anticipated continuous long exposure to a particular currency is to acquire debt denominated in that currency

2. The Company uses derivative instruments called cross currency swaps to minimize exchange rate risk. Through cross currency swaps, the Company agreed to exchange loans in foreign currency with loans in Rupiah using a specific exchange rate on the transaction date, in which the contract meets the criteria and is effective as a cash flow hedging instrument
3. The Company uses derivative instruments called interest rate swaps to minimize interest rate risk. Interest rate swap contracts exchange a floating interest rate with a fixed rate, in which the contract is intended and effective as a cash flow hedging instrument

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko kerugian pada akun aset ataupun liabilitas Perseroan akibat perubahan suku bunga. Perseroan mengelola risiko suku bunga dengan menggunakan instrumen derivatif yaitu *swap* suku bunga. Melalui *swap* suku bunga, Perseroan setuju untuk mempertukarkan selisih antara suku bunga tetap dengan suku bunga mengambang yang dihitung sesuai dengan nilai nosional yang telah disepakati. Nilai wajar dari *swap* suku bunga pada akhir periode pelaporan ditentukan dengan mendiskonto nilai arus kas di masa yang akan datang dengan menggunakan kurva pada akhir periode pelaporan dan risiko kredit yang melekat pada kontrak. Nilai rata-rata suku bunga ditentukan dari nilai saldo pada akhir periode pelaporan. Kontrak *swap* suku bunga mempertukarkan tingkat suku bunga mengambang dengan tingkat suku bunga tetap, dimana kontrak tersebut ditujukan dan efektif sebagai instrument lindung nilai arus kas.

Interest Risk

Interest risk is the risk of loss in the Company's financial assets or liabilities due to changes in interest rates. The Company manages interest rate risk using derivative instruments, which is interest rate swaps. Through an interest rate swap, the Company agrees to exchange the difference between a fixed interest rate and a floating interest rate calculated according to the agreed notional value. The fair value of interest rate swaps at the end of the reporting period is determined by discounting the value of future cash flows using a curve at the end of the reporting period and credit risk attached to the contract. The average value of the interest rate is determined from the balance value at the end of the reporting period. An interest rate swap contract exchanges a floating interest rate with a fixed rate, which is designated and effective as a cash flow hedge instrument.

Risiko Mata Uang

Perseroan terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama karena transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing seperti penyaluran piutang pembiayaan dan penerimaan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Perseroan mengelola eksposur mata uang asing dengan mencocokan sebanyak mungkin penerimaan dan pembayaran dalam masing-masing mata uang.

Risiko nilai tukar terhadap mata uang asing adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas di masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi dikarenakan adanya perubahan nilai tukar terhadap mata uang asing. Eksposur risiko Perseroan terhadap nilai tukar berasal dari kas di bank, piutang sewa pembiayaan, aset lain-lain, utang bank, biaya masih harus dibayar dan utang lain-lain.

Pada risiko ini, Perseroan mengelola risiko dengan menyesuaikan kondisi mata uang piutang sewa pembiayaan dengan mata uang pendanaan pinjaman yang ditetapkan oleh bank. Perseroan

Currency Risk

The Company is exposed to the effects of fluctuations in foreign exchange rates mainly due to transactions of denominated foreign currencies such as distribution of finance lease receivables and receipt of loans denominated in foreign currencies. The Company manages foreign currency exposure by matching receipts and payments in each individual currency, as much as possible.

Exchange rate risk against foreign currencies is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in the exchange rate of foreign currencies. The Company's risk exposure to the exchange rate comes from cash in banks, finance lease receivables, other assets, bank loans, accrued expenses and other payables.

At this risk, the Company manages risk by adjusting the condition of the finance lease receivables with the loan funding currency specified by the bank. The Company manages exchange rate

mengelola risiko nilai tukar dengan menggunakan instrumen derivatif yaitu *swap cross currency.* Melalui *swap cross currency*, Perseroan setuju untuk mempertukarkan pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dengan pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang spesifik pada tanggal dimulainya transaksi, di mana kontrak tersebut memenuhi kriteria dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi liabillitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Manajemen risiko pada risiko likuiditas dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Perseroan dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.

Mitigasi Risiko Likuiditas

1. Mempererat hubungan dengan sumber dana, yaitu bank-bank dalam negeri dan asing, serta menjaga kredibilitasnya dan dapat memperoleh dana yang lebih besar dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif
2. Bekerja sama dengan beberapa bank nasional, bank pemerintah, dan bank asing untuk memperoleh berbagai fasilitas pinjaman termasuk pinjaman dalam skema *demand loan* dan *term loan*
3. Menerapkan manajemen aset dan liabilitas dalam hal pemantauan arus kas dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana menganggur agar tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan dana
4. Menagih pinjaman secara efektif untuk meminimalkan tunggakan dan menjaga perputaran kas yang sesuai dengan rencana operasional
5. Menerapkan jadwal pembayaran yang optimal kepada vendor sehingga arus kas tidak terganggu
6. Menganalisis dan memantau pengeluaran dana untuk kegiatan operasional dan belanja modal
7. Melakukan efisiensi biaya di setiap bagian tanpa mengurangi efektivitas kegiatan operasional
8. Menyediakan metode pembayaran:
   - Tunai melalui kasir di setiap Kantor Cabang
   - *Payment point virtual account*
   - Transfer
   - *Autodebet*
   - *Post-dated Cheque* (Cek / Bilyet Giro)
9. Merencanakan dan mengatur pemasukan dana dari angsuran konsumen dan pencairan dana bank dan pengeluaran dana ke *dealer*/*showroom*/vendor/*supplier*, pembayaran kewajiban ke bank
10. Perseroan mengelola risiko likuiditas untuk memastikan bahwa Perseroan akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan usaha, selain memaksimalkan keuntungan para Pemegang Saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan, termasuk risiko kredit

risk by using a derivative instrument, namely cross currency swap. Through cross currency swaps, the Company agrees to exchange loans received in foreign currencies for loans in Rupiah using a specific exchange rate at the date of commencement of the transaction, where the contract meets the criteria and is effective as a cash flow hedge instrument.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk due to the Company's inability to meet its maturing liabilities from cash flow funding sources and/or from liquid assets that can be easily converted into cash, without disrupting the Company's activities and financial condition.

Risk Management on liquidity risk is carried out to minimize the possibility of the Company's inability to obtain cash flow funding sources.

Liquidity Risk Mitigation

1. Strengthen relationships with sources of funds, namely onshore and offshore banks, as well as maintaining their credibility to obtain larger funds with more competitive interest rates
2. Cooperate with national banks, state banks, and foreign banks to obtain loan facilities including demand loans and term loans scheme
3. Implement asset and liability management in terms of monitoring cash flow by optimizing the use of idle funds so that there is no excess or shortage of funds
4. Collect loans effectively to minimize overdue and maintain cash flow in accordance with operational plans
5. Implement optimal payment schedules to vendors so that cash flow is not disrupted
6. Analyze and monitor the expenditure of funds for operational activities and capital expenditures
7. Carry out cost efficiency in each section without reducing the effectiveness of operational activities
8. Providing payment methods:
   - Cash payments through tellers at each branch office
   - Payment point virtual account
   - Transfer
   - Autodebet
   - Post-dated Cheque (Check/Giro Bill)
9. Plan and manage the inflow of funds from customer installments and disbursement of bank funds and disbursement of funds to dealers/showrooms/vendors, payment of obligations to banks of the Company
10. The Company manages liquidity risk to ensure that it will be able to continues as a going concern, in addition to maximizing Shareholder returns through optimizing debt and equity balances

Credit Risk

Credit risk is the risk due to the failure of other parties to fulfill their obligations to the Company, including credit risk due to

akibat kegagalan debitur antara lain risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

Risiko kredit terdapat pada seluruh aktivitas Perseroan yang kinerjanya bergantung pada kinerja debitur, kinerja pihak lawan (*counterparty*), dan/atau penerbit (*issuer*). Secara langsung, Perseroan menghadapi risiko seandainya debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara debitur dengan Perseroan.

Mitigasi Risiko Kredit

1. Perseroan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit yang ketat antara lain survei calon konsumen, verifikasi data konsumen dan persyaratan uang muka yang berlaku. Prinsip 5C dan 1P *(Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral* dan *Purpose)* sudah merupakan standar dalam setiap analisis kelayakan konsumen. Juga pemilihan dan analisis *dealer/ showroom*/ vendor merupakan kesatuan dari analisis persetujuan proses pembiayaan

2. Analisis calon *customer* dan pemantauan *customer* secara menyeluruh. Perseroan menggunakan jasa survei eksternal untuk validasi informasi calon *customer* dan survei yang telah dilakukan oleh *Credit Marketing Officer* ("CMO") tanpa mengurangi kecepatan dalam mengambil keputusan persetujuan pembiayaan. Perseroan pun melakukan pemantauan karakteristik pembayaran angsuran dari *customer*, status jaminan, dan kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi sumber penghasilan *customer* sehingga *customer* yang akan bermasalah dapat diantisipasi lebih awal
3. Untuk pembiayaan Ritel dan Korporasi, proses pembiayaan yang dijalankan ketat, mulai dari survei calon *customer*, verifikasi data *customer*, hingga pemberian uang muka sesuai ketentuan yang berlaku, agar risiko yang mungkin timbul dapat dikendalikan dengan baik
4. Perseroan juga melakukan analisa terhadap *dealer/ showroom/*vendor. Setiap *dealer/showroom/*vendor yang menjadi rekanan Perseroan dibuatkan perjanjian kerja samanya
5. Melaksanakan strategi penagihan yang efektif dan efisien dengan mewajibkan *customer* untuk melakukan pembayaran angsuran melalui metode pembayaran yang telah ditetapkan, serta mengingatkan *customer* atas tagihan yang akan jatuh tempo melalui *Short Message Service* ("SMS"). Perseroan melakukan penagihan (*desk collection, field collection, remedial*) jika *customer* melanggar kontrak pembiayaan dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, untuk mengantisipasi dan mencegah piutang yang tidak tertagih yang dapat menurunkan *margin* usaha
6. Memperkuat pengawasan internal dengan mendayagunakan tim audit internal dan *Independent Control Unit* untuk memantau seluruh aktivitas di Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Setiap penyimpangan ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai peraturan perusahaan dan dicegah dengan menyesuaikan SOP
7. Menganalisis dan memantau calon *customer* secara menyeluruh, baik dengan tim survei internal maupun

debtor failure, such as credit concentration risk, counterparty credit risk, and settlement risk.

Credit risk exists in all of the Company's activities whose performance depends on the performance of the debtor, the counterparty, and/or the issuer. The Company directly faces the risk if debtors are unable to fulfill their obligations in repaying the credit in accordance with the agreement.

Credit Risk Mitigation

1. The Company prioritizes the aspect prudence of in giving a strict credit process, including surveys of prospective customers, verification of consumer data and applicable down payment requirements. The Principles 5C and 1P (Character, Capacity, Capital, Economic Conditions, Collateral and Purpose) has become the standard in every consumer feasibility analysis. Also, dealer/ showroom/ vendor selection and analysis is an integral part of the financing approval process analysis

2. Analysis of potential customer and thorough customer monitoring. The Company uses external survey services to validate prospective customer information and surveys carried out Credit Marketing Officer ("CMO") without reducing the speed in making financing approval decisions. The Company also monitors the characteristics of installment payments from customer, collateral status, and conditions that can affect customer' sources of income so that problematic customer can be anticipated early

3. For the Retail and Corporate, the financing process is very strict, starting from surveys of potential customers, verification of customers data, to providing advances according to applicable regulations, so that risks that may arise can be properly controlled
4. The Company also conducts analysis on dealers/ showrooms/vendors. Each dealer/showroom/vendor partnering with the Company has a cooperation agreement

5. Implement an effective and efficient collection strategy by requiring customers to make installment payments through predetermined payment methods, as well as reminding customers of bills that will be due through the Short Message Service ("SMS"). The Company collects (desk collection, field collection, remedial) if the customers violates the financing contract and does not have good faith to settle their obligations, to anticipate and prevent uncollectible receivables that can reduce operating margins

6. Strengthen internal control by utilizing the internal audit team and Independent Control Unit to monitor all activities at the Head Office and Branch Offices. Every violation is followed up and sanctioned according to the Company's regulations and prevented by complying with the SOPs

7. Analyze and monitor prospective customers thoroughly, both with internal and external survey teams, validate

eksternal, melakukan validasi informasi dari calon *customer* dan survei yang telah dilakukan tanpa mempengaruhi proses persetujuan kredit, serta karakteristik pembayaran angsuran oleh *customer*, status jaminan dan kondisi-kondisi lainnya yang dapat mempengaruhi sumber penghasilan *customer* sehingga masalah dideteksi lebih dini

8. Untuk pembiayaan korporasi, Perseroan menerapkan kebijakan hanya akan bertransaksi dengan rekanan yang memiliki kelayakan kredit dan mendapatkan jaminan yang memadai sebagai sarana mengurangi risiko kerugian atau tunggakan. Perseroan hanya bertransaksi dengan entitas, tergantung pada rating kreditnya, yang mana pemegang saham melakukan bisnis, entitas yang memberikan jaminan memadai, induk perusahaan, pelanggan prospektif dan entitas-entitas yang ditunjuk oleh Mizuho Leasing Co., Ltd
9. Perseroan juga menerapkan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko reputasi timbul karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perseroan yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Perseroan yang kurang efektif.

Mitigasi risiko reputasi:

1. Perseroan memiliki fungsi pengaduan konsumen dengan standar maksimal penyelesaian keluhan 10 hari kerja
2. Perseroan mempunyai unit yang bertugas melakukan monitoring pemberitaan terkait Perseroan di media

Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Perseroan terus berupaya untuk penerapan manajamen risiko Perseroan berjalan secara efektif. Perseroan memandang pengelolaan risiko sangatlah penting. Tugas utama dari Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah melakukan analisa untuk mengindentifikasi risiko-risiko yang dihadapi Perseroan, merumuskan tingkat risiko serta kebijakan pengelolaan risiko untuk menjaga tingkat risiko Perseroan.

Untuk itu Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Perseroan melakukan penilaian sendiri terhadap tingkat kesehatan Perseroan berdasarkan POJK No.28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan SEOJK No.11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah. Salah satu faktor dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan adalah penilaian Faktor Profil Risiko. Penilaian Profil Risiko ini di klasifikasikan berdasarkan 8 (delapan) tipe risiko yang kemudian dilaporkan kepada regulator setiap tahunnya. Penilaian ini mencakup penilaian Risiko Inheren dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

information from prospective customers and surveys carried out without affecting the credit approval process, as well as the characteristics of installment payments by customers, collateral status and other conditions that may affect sources of customers income so that problems are detected early

8. For corporate financing, the Company implements a policy of only transacting with partners that have credit worthiness and obtain adequate collateral as a means of reducing the risk of loss or arrears. The Company only transacts with entities, depending on their credit rating, in which the shareholders do business, entities providing adequate collaterals, holding companies, prospective customers and entities appointed by Mizuho Leasing Co., Ltd
9. The Company also implements the Anti-Money Laundering, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction program as regulated in Financial Services Authority Regulation Number 8 of 2023 concerning Implementation of Anti- Money Laundering Prevention of Terrorism Financing, and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction program in the Financial Services Sector

Reputational Risk

Reputational risk is the risk due to a decrease in the level of stakeholder trust originating from negative perceptions of the Company. Reputation risk arises due to negative media coverage and/or rumors about the Company, as well as the Company's ineffective communication strategy

Reputational risk mitigation:

1. The Company has customer complaints function with a maximum standard of complaint resolution of 10 working days
2. The Company has a unit tasked with monitoring news related to the Company in the media

Effectiveness of Risk Management System

The Company strives to implement risk management effectively. To the Company, risk management is very important. The main task of the Risk Management Unit is to conduct analysis to identify the risks faced by the Company, formulate risk levels and risk management policies to maintain the Company's risk levels.

To that end, the Company does the following:

1. The Company conducts its own soundness assessment based on OJK Regulation No.28/POJK.05/2020 concerning Soundness Level Assessment of the Non-Bank Financial Services Institutions and OJK Circular letter No.11/SEOJK.05/2020 concerning Soundness Level Assessment of the Financing Companies and Sharia Financing Companies. One of the factors used in the Company's Soundness Assessment is the assessment of the Risk Profile Factor. This Risk Profile Assessment is classified based on 8 (eight) types of risk which are then reported to the regulator every year. This assessment includes an assessment of Inherent Risk and an assessment of the Quality of Risk Management Implementation

2. Perseroan membentuk Komite Manajemen Risiko sebagai bentuk implementasi dari pengawasan aktif Direksi terhadap penerapan manajemen risiko di Perseroan. Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk memastikan penerapan manajemen risiko dilakukan secara konsisten dan efektif di Perseroan

3. Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab mengevaluasi pengelolaan risiko serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

2. The Company established a Risk Management Committee as a form of implementation of the active supervision of the Board of Directors on the implementation of risk management in the Company. The Risk Management Committee was formed to ensure the implementation of risk management is carried out consistently and effectively in the Company
3. The Risk Monitoring Committee has duties and responsibilities to evaluate risk management and provide recommendations to the Board of Commissioners

Sanksi Administratif
Administrative Sanction

Sepanjang tahun 2024 Perseroan tidak mendapatkan sanksi administratif dari OJK atau pun dari regulator lainnya.

Throughout 2024, the Company did not receive any administrative sanctions from the OJK or any other regulators.

Litigasi
Litigation

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Tahunan ini, Perseroan tidak menghadapi perkara hukum yang berdampak material.

As of the issuance date of this Annual Report, the Company has not faced any legal cases with any material impact.

Kode Etik
Code of Conducts

Kode etik dan budaya Perseroan merupakan bagian dari prioritas utama bagi insan Perseroan dalam menjaga tanggung jawab dan profesionalisme kerja serta kepercayaan dari konsumen. Pelaksanaan kode etik merupakan bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Kode etik menjadi pedoman dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Perseroan dan etika bisnis yang antara lain mengatur tentang, sebagai berikut:

The Company's code of conduct and culture are top priority for the Company's employees in maintaining work responsibilities and professionalism to gain the trust of the consumers. The code of conduct is part of the implementation of Good Corporate Governance. The code of conduct serves as a guideline for actions that adhere to the Company's values and business ethics, which regulates the following:

Nepotisme
Karyawan Perseroan dilarang untuk melibatkan diri dalam suatu transaksi apabila memiliki hubungan saudara/keluarga dengan rekan usaha, konsumen atau karyawan lain yang terlibat dalam transaksi tersebut. Jika karyawan memiliki hubungan saudara/keluarga dengan karyawan lain, maka karyawan tersebut wajib untuk melaporkan hal tersebut kepada Divisi HR untuk menghindari benturan kepentingan.

Nepotism
The Company's employees are prohibited from engaging in a transaction if they have a family relationship with business partners, customers or other employees involved in the transaction. If the employee has a family relationship with another employee, the employee is required to report the matter to the HR Division to avoid conflicts of interest.

Usaha Pribadi
Karyawan dilarang untuk terlibat dalam usaha pribadi di lingkungan kantor karena mengganggu aktivitas kerja dan dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.

Personal Business
Employees are prohibited from engaging in personal business in the office environment because it interferes with work activities and can lead to abuse of authority and office facilities for personal gain.

Kerahasiaan
Karyawan wajib untuk menjaga dan merahasiakan seluruh informasi milik Perseroan, termasuk rencana dan strategi Perseroan, informasi mengenai pemasaran, keuangan, kegiatan operasional dan informasi strategis lainnya, sejak bergabung sebagai karyawan hingga tidak lagi bekerja sebagai karyawan Perseroan.

Confidentiality
Employees are obliged to maintain and keep confidential all information belonging to the Company, including the Company's plans and strategies, information regarding marketing, finance, operational activities, and other strategic information, from joining as an employee until no longer working as an employee of the Company.

Persaingan yang Sehat

Perseroan selalu mendukung persaingan usaha yang sehat dalam melaksanakan seluruh kegiatan usahanya. Seluruh kegiatan usaha dan kegiatan karyawan harus berdasarkan persaingan yang sehat yang berlandaskan etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Seluruh karyawan wajib untuk mengupayakan agar hal tersebut dilaksanakan dan diwujudkan karena akan berdampak terhadap reputasi dan pertumbuhan Perseroan. Ketentuan mengenai kode etik memuat tentang:

1. Saluran komunikasi
2. Tanggung jawab karyawan utama
3. Perlindungan terhadap harta milik Perusahaan
4. Hubungan dengan pemasok, pelanggan, dan mitra usaha
5. Interaksi dengan Pemerintah
6. Menerapkan kode etik pada setiap aktivitas pekerja
7. Budaya anti korupsi
8. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik

Ketentuan mengenai penerapan kode etik ini berlaku bagi seluruh jajaran Direksi dan karyawan. Guna mendukung penerapan Kode Etik, Perseroan telah melakukan sosialisasi Peraturan Perusahaan beserta Etika Bisnis dan Etika Perilaku kepada seluruh karyawan Perseroan dan bagi karyawan baru di sosialisasikan pada saat *training* orientasi karyawan baru.

Seluruh karyawan wajib mematuhi semua isi dan ketentuan dari Peraturan Perusahaan beserta Etika Bisnis dan Etika Perilaku tersebut, dan apabila ada Pelanggaran yang dilakukan maka akan menerima sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan apabila diperlukan bila pelanggaran itu menyangkut hal yang masuk kategori tindakan melawan hukum akan diserahkan/ dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Fair Competition

The Company always supports fair business competition in carrying out all its business activities. All business activities and employee activities must be based on fair competition based on ethics and morals prevailing in society. All employees are obliged to strive for this to be implemented and realized because it will have an impact on the Company's reputation and growth. The provisions of the code of ethics contain:

1. Communication channels
2. Key employee Responsibilities
3. Protection of company property
4. Relationship with suppliers, customers, and business partners
5. Interaction with the Government
6. Applying the code of ethics to every worker activity
7. Anti-corruption culture
8. Sanctions for violations of the code of ethics

Provisions regarding the implementation of this code of ethics apply to all levels of the Board of Directors and employees. To support the implementation of the Code of Ethics, the Company has socialized the Company Regulations along with the Business Ethics and Code of Conduct to all employees of the Company, and new employees are socialized during the New Employee Orientation training.

All employees are required to comply with all contents and provisions of the Company's Regulations along with the Business Ethics and Code of Conduct, and if there is a violation committed, they will receive sanctions following the applicable rules and if necessary, if the violation involves matters that fall into the category of illegal acts, it will be submitted/reported to the competent authorities.

Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan Direksi
Share Ownership Program by Employees and Board of Directors

Pada tahun 2024, belum terdapat kajian terkait program kepemilikan saham oleh pegawai dan Direksi.

In 2024, there are no study of share ownership program by employees and the Board of Directors yet.

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

Untuk merealisasikan upaya penegakan prinsip GCG dan menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab Perseroan, pada tanggal 29 Agustus 2017 telah menyediakan media komunikasi untuk pelaporan *fraud* dengan nama *Whistleblowing System* (WBS) dan diterbitkan pedoman terkait WBS melalui Kebijakan Nomor P-IA-002/IX/22 tertanggal 26 September 2022 dan Surat Keputusan Direksi dengan Nomor DIR-001/TK-CORSEC/SKD/IX/22 tertanggal 26 September 2022 tentang Mekanisme Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System.*

To realize the implementation of GCG principles and to create a clean and accountable working environment, on 29 August 2017, the Company established a communication channel for reporting fraud, named the Whistleblowing System (WBS). The guidelines for WBS were formalized through Policy No. P-IA-002/IX/22 dated 26 September 2022 and the Board of Directors' Decree No.DIR-001/TK-CORSEC/SKD/IX/22 dated 26 September 2022 concerning the Mechanism for Whistleblowing System Violation Reporting.

WBS merupakan bagian dari pengendalian internal Perseroan untuk mengurangi risiko terhadap adanya pelanggaran dan sebagai salah satu media pelaporan dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran etika dan hukum di Perseroan. Informasi yang disampaikan dalam WBS akan dijamin kerahasiaan baik berupa identitas pelapor maupun informasi yang dilaporkan. Untuk itu akses terhadap WBS

WBS is part of the Company"s internal control to reduce the risk of violations and as one of the reporting media in preventing and detecting potential violations of ethics and law in the Company. Information submitted in the WBS will be guaranteed confidentiality both in the form of the identity of the reporter and the information reported. For this reason, access to the WBS is limited and can only be accessed by the person in charge,

dibatasi dan hanya bisa diakses oleh penanggung jawab yaitu Kepala Unit Audit Internal, *Senior General Manager Risk, Compliance, Internal Audit & Independent Control* dan Direktur Utama Perseroan.

namely the Head of the Internal Audit Unit, Senior General Manager Risk, Compliance, Internal Audit & Independent Control and the President Director of the Company.

Media / sarana untuk penyampaian informasi yang disediakan adalah:

- *Mailbox* : Menara Astra Lt.32
  Jl. Jendral Sudirman
  Kaveling 5-6
  Jakarta 10220
- Alamat Surel : Whistle@mizuho-ls.co.id
- *Mobile Phone (WhatsApp)* : 08111262003

The media / means for delivering information provided are:

- Mailbox : Menara Astra 32nd Floor
  Jl. Jendral Sudirman
  Kaveling 5-6
  Jakarta 10220
- Email : Whistle@mizuho-ls.co.id
- Mobile Phone (WhatsApp) : 08111262003

Pada tahun 2024, jumlah pengaduan yang masuk dan diproses sebagai berikut:

In 2024, the number of reports received and processed is as follows:

Parameter Parameters	Jumlah Pengaduan Total Complaints	Diproses Processed	Tidak Diproses Not Processed	Status Pemeriksaan Examination Status Tahap Investigasi Investigation Stage	Laporan Tidak Terbukti Not Proven Report	Laporan Terbukti Proven Report
Pengaduan Yang Masuk Reports Received	5	4	1*	2	2	0

*) Laporan *whistleblower* tidak diproses disebabkan karena pembuat laporan telah mencabut laporannya
Whistleblower report that was not processed due to the reporter withdrawing the report.

Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Guidelines on The Implementation of Good Corporate Governance

Sepanjang tahun 2024 Perseroan menerapkan dan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (“GCG”) sebagaimana diwajibkan oleh OJK dalam Peraturan OJK Nomor 30/ POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, sebagai mana telah dirubah melalui Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

Throughout 2024, the Company implemented and adhered to Good Corporate Governance (“GCG”) as mandated by OJK under OJK Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies, as amended by OJK Regulation Number 29/POJK.05/2020 on Amendments to OJK Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies.

Selanjutnya OJK menerbitkan POJK Nomor 48 tahun 2024 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024. POJK 48 tahun 2024 ini mencabut POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
Perseroan pada tahun 2025 akan menyesuaikan ketentuan pada POJK 48 tahun 2024.

Subsequently, OJK issued Regulation Number 48 of 2024 concerning Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions, which was enacted on December 31, 2024. Regulation 48 of 2024 repeals OJK Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies as amended by Regulation Number 29/POJK.05/2020 on Amendments to Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies. The Company will adjust its provisions to align with Regulation 48 of 2024 in the year 2025.

Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05/2016 Tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, Perseroan melaporkan Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, meliputi aspek :

Transparency Implementation of Good Corporate Governance

In accordance with OJK Circular No. 15/SEOJK.05/2016 Concerning Reports on the Implementation of Good Corporate Governance for Finance Companies, the Company reports Transparency on the Implementation of Good Corporate Governance, covering aspects of:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Internal
3. Penanganan benturan kepentingan
4. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal
5. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal
6. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan yang belum diungkap dalam laporan lainnya
8. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan
9. Pengungkapan kepemilikan saham bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham
10. Pengungkapan hal-hal penting lainnya
11. Sistem *whistleblowing*

Hasil Laporan Penerapan Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, tidak terdapat kekurangan sehingga tidak memerlukan rencana tindak (*action plan*) atas kekurangan penerapan tata kelola.

Tingkat Kesehatan Perusahaan Faktor Tata Kelola

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan telah melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan untuk posisi 31 Desember 2024 dengan *Risk Based Non-Bank Rating* (RBNBR) dan hasil nilai Peringkat Komposit, yaitu PK-1.

1. Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners
2. Completion and implementation of duties of the Audit Committee or functions that assist the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the Internal Control System
3. Handling conflict of interest
4. Implementation of the compliance function, internal auditors and external auditors
5. Implementation of risk management and internal control systems
6. Implementation of remuneration policies and other facilities for members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees
7. Transparency of the Company's financial and non-financial conditions that have not been disclosed in other reports
8. Long term plan as well as work plan and annual budget
9. Disclosure of share ownership for members of the Board of Directors and Board of Commissioners who reach 5% (five percent) or more, which includes the type and number of shares
10. Disclosure of other important matters
11. Whistleblowing system

The results of the Report on the Implementation of Transparency in the Implementation of Good Corporate Governance, there are no deficiencies so that there is no need for an action plan for deficiencies in the implementation of governance.

Soundness Level the Company GCG Factor

In accordance with OJK Regulation No. 28/POJK.05/2020 concerning Soundness Level Assessment of Non-Bank Financial Services Institutions and OJK Circular Letter No. 11/SEOJK.05/2020 concerning Soundness Level Assessment of Financing Companies and Sharia Financing Companies, the Company has conducted a Soundness level self-assessment for the position of December 31, 2024 with Risk Based Non-Bank Rating (RBNBR) and the resulting Composite Rating value, namely PK-1.

Hasil Penilaian Sendiri Untuk Tata Kelola Perusahaan / Self Assessment on Corporate Governance Result	
Peringkat / Rank	Keterangan / Description
1 Sangat Baik / Excellent	Faktor Tata Kelola Perusahaan yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan peringkat tingkat kesehatan Perseroan di tahun 2024 secara komposit. Komitmen kuat Perseroan untuk secara konsisten memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh regulator dan hukum yang berlaku merupakan salah satu fokus utama Perseroan. Selain itu, Perseroan juga secara konsisten memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dijalankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian Tata Kelola Perusahaan yang baik. The factor of Good Corporate Governance plays a crucial role in maintaining the Company's overall soundness level in 2024. The Company remains strongly committed to consistently complying with applicable laws and regulations set by the regulators, which is one of its key areas of focus. In addition, the Company continuously ensures that all operational activities are conducted in accordance with the prudent principles of Good Corporate Governance.

Nilai ini membuktikan kesehatan Perseroan yang sangat baik sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif signifikan yang disebabkan oleh perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari faktor penilaian, antara lain penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, profil risiko,

This score proves the Company's soundness is very good so that it is considered very capable of facing significant negative influences caused by changes in business conditions and other external factors. This is reflected in the assessment factors, including the implementation of Good Corporate Governance,

rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.

Dari aspek faktor Tata Kelola, Pelaksanaan Tata Kelola dinilai pada peringkat 1 yang mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang secara umum sangat baik.
Penetapan peringkat faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan berdasarkan analisis atas:

a. Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perseroan
b. Kecukupan tata kelola atas struktur (*governance structure*), proses (*governance process*), dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) pada Perseroan; dan
c. Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan

Parameter atau indikator penilaian faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemegang Saham atau yang setara.
4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
5. Penanganan benturan kepentingan
6. Penerapan fungsi kepatuhan Perseroan
7. Penerapan fungsi audit internal
8. Penerapan fungsi audit eksternal
9. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal
10. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan, laporan pelaksanaan tata kelola Perseroan yang baik dan pelaporan internal
11. Hasil analisis penilaian sendiri (*self assessment*) oleh Perseroan menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sangat sesuai dengan kriteria/ indikator

Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perseroan.

Analisis

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan efektif dan memenuhi prinsip-prinsip GCG. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen, memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, serta Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris terselenggara secara efektif

risk profile, profitability, and capitalization which are generally very good. In the event that there are weaknesses, they are generally not significant.

From the aspect of Governance factor, the Governance Implementation is rated at 1 which reflects that the Company's management has implemented Good Corporate Governance which is generally very good.
The determination of the Good Corporate Governance factor rating is based on the above analysis:

a. Implementation of Good Corporate Governance principles in the Company
b. The adequacy of governance structure, governance process, and governance outcome of the implementation of governance in the Company; and
c. Other information related to the Corporate governance based on relevant data and information

Parameters or indicators of assessment of Good Corporate Governance factors include:

1. Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors
2. Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners
3. Implementation of duties and responsibilities of Shareholders or equivalent
4. Completeness and implementation of the Committee's duties
5. Handling conflict of interest
6. Implementation of the Company's compliance function
7. Implementation of internal audit function
8. Implementation of external audit function
9. Implementation of risk management including internal control system
10. Transparency of financial and non-financial conditions, reports on the implementation of good corporate governance and internal reporting
11. The results of the self-assessment analysis by the Company show that the implementation of Good Corporate Governance is in accordance with the criteria/indicators

This is reflected in the very adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. If there are weaknesses in the implementation of Good Corporate Governance principles, then in general these weaknesses are not significant and can be immediately resolved with normal actions by the Company's Management.

Analysis

1. The implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, Board of Commissioners has been carried out effectively and fulfills the principles of GCG. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners are able to act and make decisions independently, have competence and integrity in accordance with the size and complexity of the Company and have fulfilled the applicable regulations. In addition, the Board of Directors Meetings, Board of Commissioners Meetings, and Joint Meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners are effectively organized

2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dinilai baik mengingat pelaksanaan tugas-tugas Komite Audit dan fungsi lain telah berjalan efektif, rekomendasi Komite Audit dan fungsi lain bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan keputusan Dewan Komisaris, serta pelaksanaan rapat-rapat Komite Audit dan fungsi lainnya telah berjalan sesuai pedoman kerja masing-masing

3. Fungsi kepatuhan telah memenuhi kriteria kepatuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Perseroan telah memiliki pedoman audit internal sesuai yang ditetapkan OJK serta dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan audit eksternal telah berjalan efektif, hal ini tercermin dari pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik Bayu M Dayat dan Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (Anggota Jaringan Deloitte Asia Pacific bagian Jaringan Deloitte) telah sesuai dengan persyaratan umum yang ditetapkan dalam ketentuan serta kualitas dan cakupan hasil audit yang sangat baik. Selain itu, Kantor Akuntan Publik bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya sesuai kriteria yang ditetapkan

4. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal telah berjalan baik dan efektif sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Perseroan, serta risiko-risiko yang dihadapinya. Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko

5. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
6. Perseroan selalu transparan dalam menyampaikan kondisi keuangan dan non-keuangan Perseroan. Laporan tersebut disampaikan secara lengkap, akurat, relevan, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku
7. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan disusun dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian, dan ketentuan peraturan yang berlaku
8. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih
9. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, sehingga setiap pengambilan keputusan Direksi dilaksanakan secara independen dan profesional serta sesuai ketentuan yang berlaku
10. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, sehingga setiap pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dilaksanakan secara independen dan profesional serta sesuai ketentuan yang berlaku

2. The completeness and implementation of the duties of the Audit Committee or functions that assist the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the internal control system is considered good considering that the implementation of the duties of the Audit Committee and other functions has been effective, the recommendations of the Audit Committee and other functions are useful and can be used as a reference for the Board of Commissioners' decisions, and the implementation of Audit Committee meetings and other functions has been carried out in accordance with their respective work guidelines
3. The compliance function has met the regulatory compliance criteria in accordance with prevailing laws and regulations. The Company has established internal audit guidelines in accordance with those set by the OJK, and the audits have been carried out effectively and efficiently. External audit activities have also been conducted effectively, as reflected in the audit performed by Public Accountant Bayu M. Dayat and the Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia & Partners (a member of Deloitte Asia Pacific part Deloitte Network). These audits have been conducted in compliance with the applicable general requirements and have delivered high-quality and comprehensive results. Furthermore, the Public Accounting Firm has performed its duties independently, in accordance with established criteria
4. The implementation of risk management and internal control systems has been running well and effectively in accordance with the objectives, size and complexity of the Company's business, as well as the risks it faces. The Board of Commissioners and Board of Directors have actively supervised the implementation of risk management policies and strategies
5. Implementation of remuneration policies and other facilities has been well implemented in accordance with the prevailing laws and regulations
6. The Company is always transparent in conveying the Company's financial and non-financial conditions. The report is submitted in a complete, accurate, relevant and timely manner in accordance with applicable regulations
7. Long-term plans and annual work plans and budgets are prepared by taking into account external and internal factors, aspect of prudence, and applicable regulatory provisions
8. Disclosure of share ownership of members of the Board of Directors and Board of Commissioners reaching 5% (five percent) or more
9. All members of the Board of Directors do not have financial and family relationships with the other member of the Board of Directors, so that every decision-making of the Board of Directors is carried out independently and professionally and in accordance with applicable regulations
10. All members of the Board of Commissioners have no financial and family relationships with the other member of the Board of Commissioners, so that any decision making by the Board of Commissioners is carried out independently and professionally and in accordance with applicable regulations

11. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada OJK telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku

11. Disclosure of other important matters to the OJK has been carried out properly in accordance with applicable rules and regulations

Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU,PPT dan PPPSPM)

Anti Money Laundering, Counter Terrorism Financing and Counter Proliferation Financing of Mass Destruction Weapons (AML, CTF and CPFMDW)

Dalam pelaksanaannya, Perseroan menugaskan unit satuan kerja Kepatuhan sebagai penanggung jawab penerapan program APU, PPT dan PPPSPM. Pejabat yang melaksanakan program-program tersebut dibantu oleh Kepala Kantor Cabang dalam penerapan program APU, PPT dan PPPSPM di Kantor Cabang. Pejabat Program APU,PPT dan PPPSPM ditetapkan bagian dari struktur organisasi dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

In its implementation, the Company has assigned the Compliance Unit as the party responsible for implementing the AML, CFT, and CPFMDW programs. Officers carrying out these programs are supported by Branch Office Heads in implementing AML, CFT, and CPFMDW programs at the Branch Offices. The AML, CFT, and CPFMDW Program Officers are established as part of the organizational structure and report directly to the President Director.

Sesuai dengan POJK Nomor 8 tahun 2023 tentang APU, PPT dan PPPSPM tugas dari penanggung jawab penerapan program APU, PPT dan PPPSPM adalah:

In accordance with the POJK Number 8 of 2023 concerning AML, CTF, and CPFMDW, the responsibilities of the person in charge of implementing these programs include:

1. Menganalisis secara berkala penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (“TPPU”), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“TPPT”), dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (“PPPSPM”) terkait dengan customer, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*distribution channels*), sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
2. Menyusun, melakukan pengkinian, serta mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 1, untuk dimintakan pertimbangan Direksi
3. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh debitur
4. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam angka 2, telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, volume transaksi Perseroan, dan/atau modus TPPU, TPPT, dan/atau PPPSPM
5. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan customer telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM
6. Memantau rekening debitur dan pelaksanaan transaksi debitur
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi customer untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri
8. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi
9. Memastikan pengkinian data dan profil debitur serta data dan profil transaksi debitur
10. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM diidentifikasi

1. Conducting periodic risk assessments at least once a year of Criminal Act of Money Laundering (“CAML”), Criminal Act of Terrorism Financing (“CATF”), and/or Proliferation Financing of Mass Destruction Weapons (“PFMDW”) risks associated with customers, countries or geographic areas, products, services, transactions, or distribution channels; 1 (one) time in 1 (one) year
2. Formulating, updating, and proposing policies and procedures for the implementation of the AML, CFT, and CPFMDW programs that have been prepared to manage and mitigate risks based on the risk assessment as referred to in point 1, to be submitted for the Board of Directors’ consideration
3. Ensuring the existence of a system capable of effectively identifying, analyzing, monitoring, and providing reports on customer profiles, characteristics, or transaction patterns
4. Ensuring that the policies and procedures formulated as referred to in point 2 are aligned with changes and developments, including but not limited to products, services, and technology in the financial services sector, business activities, scale of operations, business complexity, business characteristics, the Company’s transaction volume, and/or methods of money laundering, terrorism financing, and/or CAML, CATF, and/or PFMDW
5. Ensuring that customer-related forms capture all data required for the effective implementation of CAML, CATF, and CPFMDW programs
6. Monitoring customer accounts and their transaction activities
7. Evaluating the results of monitoring and transaction analysis to determine the presence or absence of suspicious financial transactions, large cash transactions, and/or cross-border fund transfers
8. Maintaining records of monitoring and evaluation results
9. Ensuring regular updates of debtor data and profiles, as well as debtor transaction data and profiles
10. Ensuring that high-risk business activities related to CAML, CATF, and/or PFMDW are effectively identified in

secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur POJK serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK
11. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*
12. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU, PPT dan PPPSPM terhadap satuan kerja terkait
13. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU,PPT dan PPPSPM dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai
14. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan tunai yang disampaikan oleh satuan kerja
15. Menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri
16. Memantau secara berkala dan memastikan tindak lanjut terhadap Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris ("DTTOT") dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal ("DPPSPM") telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT dan peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPPSPM
17. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT dan PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai Perseroan
18. Memastikan seluruh kegiatan untuk penerapan program APU, PPT dan PPPSPM terlaksana dengan baik; dan
19. Melakukan tugas lain untuk penerapan program APU, PPT dan PPPSPM

Sepanjang tahun 2024, beberapa langkah dan kebijakan dalam implementasi APU, PPT dan PPPSPM, yaitu :

1. Pelaporan penyaluran pembiayaan setiap triwulan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui sistem SIPESAT
2. Melakukan pelaporan rencana dan realisasi pengkinian data debitur sesuai dengan ketentuan POJK menggunakan sistem pelaporan APOLO
3. Menindaklanjuti permintaan dari Mabes Polri dan OJK terkait DTTOT untuk memastikan apakah ada debitur Perseroan yang masuk dalam DTTOT
4. Menindaklanjuti permintaan dari PPATK terkait dengan PPPSPM memastikan apakah ada debitur Perseroan yang tercantum dalam daftar PPPSPM
5. Melakukan pengayaan pada daftar *watchlist* pada aplikasi SIPENDAR (Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme) setiap triwulan
6. Mengadakan pelatihan dan sosialisasi internal pada tanggal 2 Juli 2024 berkerja sama dengan PT Sarana Mutu Edukasi Indonesia dengan materi penerapan program APU, PPT dan PPPSPM. Pelatihan dan sosialisasi ini diikuti oleh karyawan Kantor Pusat maupun Kantor Cabang

accordance with internal policies and applicable POJK regulations

11. Ensuring effective communication mechanisms between all relevant work units and the designated AML, CTF, and CPFMDW officers, while maintaining the confidentiality of information and complying with anti-tipping-off provisions
12. Supervising the implementation of AML, CTF, and CPFMDW programs across relevant work units
13. Identifying high-risk areas related to the implementation of AML, CTF, and CPFMDW programs, referencing applicable laws and reliable sources of information
14. Receiving, analyzing, and preparing reports on suspicious financial transactions and/or large cash transactions submitted by relevant work units
15. Preparing reports on suspicious financial transactions, large cash transactions, and/or cross-border fund transfers
16. Periodically monitoring and ensuring appropriate follow-up actions regarding the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations ("STTO") and the Proliferation Financing Watch List ("PFWL"), in accordance with laws on the prevention and eradication of CATF and CPFMDW
17. Monitoring, analyzing, and recommending training needs related to the implementation of AML, CTF, and CPFMDW programs for relevant officers and/or employees
18. Ensuring the effective and proper execution of all activities related to the implementation of the AML, CTF, and CPFMDW programs; and
19. Carrying out other duties related to the implementation of the AML, CTF, and CPFMDW programs

Throughout 2024, several measures and policies were implemented in relation to the AML, CTF, and CPFMDW programs, as follows:

1. Quarterly reporting of financing distribution to the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) through the SIPESAT system
2. Reporting of debtor data update plans and realizations in accordance with the POJK, using the APOLO reporting system
3. Following up on requests from the Indonesian National Police Headquarters and the OJK regarding the STTO to ensure whether any of the Company's debtors are listed therein
4. Following up on requests from PPATK regarding the CPFMDW list to verify whether any of the Company's debtors appear on the list
5. Quarterly enrichment of the watchlist within the SIPENDAR (Suspected Terrorism Financing Information System) application
6. Conducting internal training and socialization on July 2, 2024, in collaboration with PT Sarana Mutu Edukasi Indonesia, covering the implementation of AML, CTF, and CPFMDW programs. The session was attended by employees from both the Head Office and Branch Offices

7. Penanggung jawab Fungsi APU, PPT dan PPPSPM melaksanakan training *external* materi APU, PPT dan PPSPM termasuk cara pembuatan Individual Risk Assessment, yang diadakan oleh Rintisan Manajemen Gagas (RMG) pada tanggal 22-23 Februari 2024
8. Menyusun Individual *Risk Assessment* dan telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan

7. The person-in-charge of the AML, CTF, and CPFMDW functions participated in external training on AML, CTF, and CPFMDW, including the preparation of Individual Risk Assessments. This training was organized by Rintisan Manajemen Gagas (RMG) on February 22–23, 2024
8. Preparation and submission of the Individual Risk Assessment to the OJK, in accordance with prevailing regulations

Kebijakan Antikorupsi
Anti-Corruption Policy

Korupsi merupakan tindak pidana dan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang sangat merugikan keuangan negara. Oleh sebab itu, Perseroan mendukung penuh ketegasan Pemerintah untuk memberantas korupsi di segala lini. Kebijakan antikorupsi merujuk pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk memperkuat dukungan antikorupsi, Perseroan telah mengatur larangan korupsi dalam Kode Etik Perseroan, yang di dalamnya antara lain mengatur kebijakan tentang hadiah dan sumbangan (donasi) yang tidak dibenarkan. Untuk itu, seluruh pengurus dan karyawan Perseroan tidak dibenarkan secara hukum dan etika usaha menerima dan memberi hadiah, sumbangan dalam bentuk uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, dan fasilitas lainnya (gratifikasi) yang diterima di dalam maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 B ayat (1).

Corruption is a criminal offense and an extraordinary crime that significantly harms the financial interests of the state. Therefore, the Company fully supports the Government's firm stance in eradicating corruption across all sectors. The Company's anti-corruption policy refers to Law No. 20 of 2001 on the Amendment to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. To reinforce its commitment to anti-corruption, the Company has incorporated a prohibition against corruption within its Code of Ethics, which includes, among others, policies on the prohibition of unauthorized gifts and donations. Accordingly, all members of management and employees of the Company are strictly prohibited, both legally and ethically, from giving or receiving gifts or donations in the form of money, goods, discounts, commissions, interest-free loans, travel tickets, accommodation, leisure travel, medical treatment, or other facilities (gratification), whether within or outside the country, and whether conducted through electronic means or otherwise, as stipulated in Article 12B Paragraph (1) of Law No. 20 of 2001.

Sejalan dengan dukungan terhadap antikorupsi, Perseroan juga memiliki kebijakan terkait anti suap yang tertuang didalam kebijakan nomor P-RCA 009/VI/23 tanggal 30 Juni 2023 tentang Anti Penyuapan dan Korupsi dan juga Perseroan telah melakukan implementasi terhadap POJK 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi lembaga jasa keuangan yang tertuang didalam kebijakan nomor P-RCA 014/XII/24 tanggal 27 Januari 2025 tentang *Anti-Fraud.*

In line with its commitment to anti-corruption efforts, the Company has an anti-bribery policy as stated in Policy No. P-RCA-009/VI/23 dated 30 June 2023 concerning Anti-Bribery and Corruption. The Company has also implemented POJK No. 12 of 2024 on the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions, as stipulated in Policy No. P-RCA-014/XII/24 dated 27 January 2025 on Anti-Fraud.

Dalam hal ini, Perseroan mendefinisikan gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima, baik dengan atau tanpa mengharapkan imbal balik, oleh anggota Dewan Komisaris, DIreksi dan karyawan Perusahaan (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap) serta pihak eksternal termasuk namun tidak terbatas pada konsultan, *advisor, outsourced,* vendor atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Perseroan.

In this context, the Company defines gratification as any form of gift or benefit received, with or without an expectation of return, by members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees of the Company (including permanent, contract, and non-permanent employees), as well as external parties such as consultants, advisors, outsourced personnel, vendors, or other parties acting for or on behalf of the Company.

Sementara korupsi dalam konteks negara didefinisikan sebagai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi dalam konteks lebih luas atau umum sesuai dengan POJK 12 Tahun 2024 diartikan sebagai perbuatan dengan maksud menguntungkan suatu pihak, baik secara sendiri maupun bersama dengan pihak lain, secara melawan hukum dengan menyalahgunakan pengaruhnya dalam suatu transaksi bisnis, atau penyalahgunaan posisi atau kewenangan yang dapat menguntungkan atau merugikan konsumen, Perusahaan, dan/atau pihak lain baik secara langsung maupun

Meanwhile, corruption in the context of state governance, is defined as any act conducted unlawfully to enrich oneself, another person, or a corporation, resulting in losses to state finances or the national economy. More broadly, under POJK No. 12 of 2024, corruption is defined as any unlawful act carried out with the intent to benefit a party either individually or jointly with others by abusing influence in a business transaction or misusing position or authority in a manner that may advantage or disadvantage customers, the Company, and/or other parties, either directly or indirectly. The policies set forth include the principles, commitments, and programs established by the Company concerning anti-corruption and anti-fraud strategies,

tidak langsung. Didalam kebijakan tersebut tertuang prinsip, komitmen, program- program Perseroan yang berkaitan dengan antikorupsi dan strategi *anti-fraud* serta sanksi tegas bagi pihak yang melanggar ketentuan Perseroan.

as well as strict sanctions for any parties found to be in violation of the Company's regulations.

Penerapan Strategi *Anti-Fraud*
Implementation of Anti-Fraud Strategy

Pada tanggal 31 Juli 2024 Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan yang efektif berlaku pada tanggal 31 Oktober 2024. POJK tersebut menggantikan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan BAB XII tentang Pengendalian *Fraud* dan Strategi *Anti-Fraud*.

On July 31, 2024, the OJK issued Regulation of the OJK Number 12 of 2024 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions, which will take effect on October 31, 2024. This POJK replaces POJK Number 35/POJK.05/2018 concerning the Operation of Financing Company Business, Chapter XII on Fraud Control and Anti-Fraud Strategy.

Atas perubahan tersebut Perseroan melakukan penyesuaiaan terhadap kebijakan Penerapan Strategi *Anti-Fraud* Perusahaan dengan Nomor P-RCA-014/XII/24 tentang *Anti-Fraud* mengganti kebijakan sebelumnya dengan nomor P-IA-004/VII/2024 tentang *Anti-Fraud* yang menggantikan kebijakan sebelumnya tentang *Anti-Fraud Charter* 2019.

In response to this change, the Company has adjusted its Anti-Fraud Strategy Implementation Policy with the new policy number P-RCA-014/XII/24 Anti Fraud which replaces the previous policy P-IA-004/VII/2024 regarding. This in turn had replaced the Anti-Fraud Charter of 2019.

Perseroan mendifinisikan *fraud* sebagaimana dijelaskan didalam POJK 12 Tahun 2024 sebagai tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, atau memanipulasi Perseroan, pelanggan, atau pihak lain, yang terjadi dilingkungan Perseroan, menggunakan sarana Perseroan sehingga mengakibatkan Perseroan, pelanggan atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

The Company defines fraud, as stated in POJK 12 of 2024, as a deliberate act of deviation or omission intended to deceive or manipulate the Company, customers, or other parties, occurring within the Company's environment, using the Company's resources, resulting in financial loss to the Company, customers, or other parties, and/or financial gain to the perpetrator either directly or indirectly.

Perseroan melakukan penyesuaikan terhadap kategori jenis-jenis perbuatan yang tergolong *Fraud* sesuai dengan POJK 12 Tahun 2024, yaitu :

1. Korupsi
2. Penyalahgunaan aset
3. Kecurangan Laporan Keuangan
4. Penipuan
5. Pembocoran informasi rahasia
6. Tindakan lain yang dapat disamakan dengan *fraud*

The Company has aligned its fraud categories with those outlined in POJK 12 of 2024, which include:

1. Corruption
2. Asset misuse
3. Financial Statement fraud
4. Deception
5. Disclosure of confidential information
6. Other acts equivalent to fraud

Dalam memastikan pengendalian *fraud* dan manajemen risiko yang kuat, Perseroan telah melakukan beberapa upaya, seperti :

1. Pengawasan Aktif Manajemen
   Pengawasan yang dilakukan oleh manajemen secara aktif akan meningkatkan kualitas pengendalian internal dan meminimalisir potensi terjadinya *fraud*. Manajemen senantiasa membangun budaya *anti-fraud* kepada seluruh jenjang organisasi dibuktikan dengan penandatanganan Deklarasi *anti-fraud* oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh jajaran organisasi. Selain itu pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan dengan berbagai cara seperti pelaksanaan edukasi dan *training* untuk meningkatkan kesadaran dan pengendalian *fraud.*
2. Pembentukan struktur organisasi dan pertanggungjawaban Perseroan menyesuaikan fungsi Penerapan Strategi *Anti-Fraud* dimana sebelumnya berada dibawah Internal Audit menjadi berada dibawah Manajemen Risiko, Kepatuhan

To ensure strong fraud control and risk management, the Company has undertaken several initiatives, including:

1. Active Management Supervision
   Active supervision by management improves the quality of internal controls and minimizes potential fraud risks. Management continuously promotes an anti-fraud culture across all organizational levels, demonstrated by the signing of the anti-fraud Declaration by the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the signing of the Integrity Pact by all members of the organization. Additionally, Human Resources quality is enhanced through training and educational programs to raise fraud awareness and control.
2. The formation of the Company's organizational structure and accountability has aligned its anti-fraud Strategy function, moving it from under Internal Audit to Risk Management, Compliance, and Business Process, which

dan Proses Bisnis yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama, dan pelaporan langsung kepada Dewan Komisaris.

3. Pengendalian dan Pemantauan
   Perseroan melakukan pengendalian dan pemantauan *fraud* untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian yang ada. Langkah-langkah dalam pengendalian dan pemantauan adalah sebagai berikut :
   a. Penetapan kebijakan dan prosedur
   b. Pengendalian dan pemantauan melalui metode *control self assessment*
   c. Kaji ulang oleh manajemen maupun internal audit
   d. Pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas operasional
   e. Pengendalian sistem informasi
   f. Pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan

Perseroan juga menyusun strategi *anti-fraud* dengan memperhatikan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha baik internal Perseroan maupun eksternal Perseroan (konsumen, mitra bisnis maupun pihak lain yang terlibat) serta kompleksitas usaha Perseroan. Berikut adalah Strategi *anti-fraud* yang diterapkan oleh Perseroan :

1. Pencegahan
   A. Anti-Fraud Awareness
      a. Deklarasi *anti-fraud*
      b. Pakta integritas
      c. Penerapan model 3 lini
      d. Pemisahan tugas dan tanggungjawab
      e. Edukasi dan *awareness*
   B. Identifikasi Kerawanan
      a. Control self-assessment
      b. Review berkala kebijakan sistem dan prosedur
   C. *Know Our People*
      a. Sistem dan prosedur rekrutmen yang efektif
      b. Sistem seleksi dengan kualifikasi yang tepat dilakukan secara objektif dan transparan
      c. Wawancara kepada karyawan secara berkala melalui program *Know Our Employee*
2. Deteksi
   A. Whistleblowing system
   B. Surprise audit
   C. Surveillance audit
   D. Departemen Independent Control Unit
3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
   A. Standar investigasi Perseroan
   B. Mekanisme pelaporan kejadian *fraud* kepada pihak internal Perseroan
   C. Kewajiban pelaporan Perseroan kepada pihak Regulator
   D. Penerapan kebijakan sanksi
4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
   A. Pemantauan terhadap tindak lanjut kejadian *fraud*
   B. Memelihara data kejadian *fraud*
   C. Mekanisme tindak lanjut untuk menghindari kejadian *fraud*

now reports directly to the President Director and also reports to the Board of Commissioners.

3. Control and Monitoring
   Fraud control and monitoring are conducted to ensure the effectiveness of the existing control systems. Key step of controlling and monitoring include:
   a. Establishment of policies and procedures
   b. Monitoring through the control self-assessment method
   c. Reviews by management and internal audit
   d. Segregation of duties in operational activities
   e. Information system controls
   f. Follow-up monitoring of audit findings

The Company also develops its anti-fraud Strategy by considering all parties involved in its business activities, both internal and external (customers, business partners, and others), and the complexity of its operations. The anti fraud strategy implemented by the Company strategy includes:

1. Prevention
   A. Anti-Fraud Awareness
      a. Anti-fraud declaration
      b. Integrity pact
      c. Implementation of the three lines model
      d. Segregation of duties and responsibilities
      e. Education and awareness
   B. Vulnerability Identification
      a. Control self-assessment
      b. Periodic policy, system, and procedure reviews
   C. Know Our People
      a. Effective recruitment systems and procedures
      b. Objective and transparent selection processes with appropriate qualifications
      c. Periodic employee interviews through the Know Our Employee program
2. Detection
   A. Whistleblowing system
   B. Surprise audits
   C. Surveillance audits
   D. Independent Control Units Department
3. Investigation, Reporting, and Sanction
   A. The Company investigation standards
   B. Fraud incident reporting mechanisms to internal parties of the Company
   C. Company's mandatory reporting to Regulators
   D. Sanction policy implementation
4. Monitoring, Evaluation, and Follow-Up
   A. Monitoring of follow-up actions on fraud incidents
   B. Maintaining fraud incident data
   C. Follow-up mechanisms to prevent fraud re-ocurrence

Pelindungan Konsumen
Customer Protection

Pada tanggal 22 Desember 2023 OJK mengundangkan POJK Nomor 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. POJK 22 tahun 2023 ini menggantikan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

On December 22, 2023, OJK enacted Regulation of the POJK Number 22 of 2023 concerning Customer and Public Protection in the Financial Services Sector. POJK 22 of 2023 replaces POJK Number 6/POJK.07/2022 concerning Customer and Public Protection in the Financial Services Sector.

POJK 22 tahun 2023 ini bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memperkuat kewenangan OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan untuk meningkatkan sistem pelindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan.

POJK 22 of 2023 is part of the implementation of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector enhances the authority of OJK in regulating and supervising customer and public protection in the financial services sector, with the objective of strengthening a reliable customer protection system, increasing customer and public empowerment, and raising awareness among financial services business actors.

Selain itu terdapat perkembangan aspek pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yang disebabkan oleh penambahan prinsip pelindungan konsumen dan masyarakat, perluasan pelaku usaha jasa keuangan, dan digitalisasi produk dan/atau layanan di sektor jasa keuangan, dan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan dinamis, sehingga perlu dilakukan penguatan pengaturan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

In addition, the development of customer and public protection in the financial services sector is influenced by the introduction of new principles of customer protection and society, the expansion of financial service providers, digitalization of products and/or services, and the increasingly complex and dynamic financial services industry, thus it is necessitate a reinforcement of regulations on customer and public protection in the sector.

POJK 22 tahun 2023 juga merubah beberapa ketentuan pada POJK 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

POJK 22 of 2023 also amends several provisions of POJK 18/POJK.07/2018 concerning Customer Complaint Services in the Financial Services Sector.

Perseroan senantiasa mengimplementasikan prinsip pelindungan konsumen yang diamanahkan oleh OJK melalui POJK 22 tahun 2023, yaitu :

a. edukasi yang memadai
b. keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan
c. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab
d. pelindungan aset, privasi, dan data konsumen
e. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien
f. penegakan kepatuhan
g. persaingan yang sehat

Sesuai dengan pasal 91 POJK 22 tahun 2023 bahwa pegawai Fungsi Pelindungan Konsumen diwajibkan mengikuti pelatihan terkait pelindungan konsumen minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Demikian juga untuk pegawai Perseroan diluar dari fungsi Pelindungan Konsumen juga diwajibakan mengkuti pelatihan pelindungan konsumen paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerja, dan pada pasal 89 Fungsi Pelindungan Konsumen bertugas memberikan sosialisasi kepada seluruh Pegawai Perseroan mengenai pelindungan konsumen.

The Company consistently upholds the principles of customer protection as mandated by OJK through POJK 22 of 2023, which include:

a. adequate education
b. disclosure and transparency of product and/or service information
c. fair treatment and responsible business conduct
d. protection of consumer assets, privacy, and data
e. effective and efficient complaint handling and dispute resolution
f. enforcement of compliance
g. fair competition

In accordance with Article 91 of POJK 22 of 2023, employees under the Customer Protection Function are required to undergo training related to customer protection at least once a year. Furthermore, employees outside the Customer Protection Function are also required to attend customer protection training at least once during their tenure and as stipulated in Article 89, the Customer Protection Function is responsible for disseminating information on customer protection to all Company's employees.

Perseroan telah melaksanakan pelatihan pelindungan konsumen dan sosialisasi pelindungan konsumen pada tahun 2024 sebagai berikut:

The Company has conducted customer protection training and awareness sessions in 2024 as follows:

No	Tema Sosialisasi Socialization Theme	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1	Sosialisasi Pelaporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI). Socialization of Self-Assessment Reporting through the customer Education and Protection Reporting Information System (SiPEDULI).	17 Jul 2024	OJK
2	Sosialisasi Penilaian Sendiri Tahun 2024. Socialization of Self-Assessment for the Year 2024.	11 Sep 2024	OJK & APPI
3	Sosialisasi Pelindungan Konsumen dan Pelindungan Data Pribadi. Socialization of Consumer Protection and Personal Data Protection.	14 Nov 2024	Internal Perseroan Internal Company
4	*Mandatory Training* Panduan Pemenuhan POJK No.22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Mandatory Training on the Guidelines for Compliance with POJK No. 22 of 2023 on Customer and Public Protection in the Financial Services Sector.	5 Dec 2024	Rintisan Manajemen Gagas "RMG"

Pengaduan Konsumen

Sesuai dengan pasal 79 POJK 22 tahun 2023 bahwa Perseroan wajib menyusun dan menyampaikan laporan Layanan Pengaduan secara semesteran kepada OJK melalui sistem Sipeduli paling lambat pada tanggal 10 Juli untuk laporan semester pertama dan 10 Januari untuk semester kedua. Kewajiban laporan ini adalah perubahan dari sebelumnya laporan Layanan Pengaduan secara triwulan.

Sepanjang 2024 Perseroan telah melaksanakan kewajiban laporan Layanan Pengaduan secara tepat waktu, dimana laporan pelayanan dan penyelesaian pengaduan Perseroan dapat dilihat pada halaman 216.

Pelindungan Data Pribadi ("PDP")

Pada tanggal 17 Oktober 2022, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Berdasarkan Pasal 74 UU PDP, Perseroan diwajibkan untuk mematuhi ketentuan dalam UU PDP dalam jangka waktu dua (2) tahun sejak tanggal pengesahan. Artinya, paling lambat pada tanggal 17 Oktober 2024, Perseroan harus menyesuaikan operasionalnya agar sesuai dengan ketentuan dalam UU PDP.

Customer Complaints

In accordance with Article 79 of the POJK No. 22 of 2023, the Company is required to compile and submit a semi-annual Complaint Service Report to the OJK via the Sipeduli system, no later than July 10 for the first semester and January 10 for the second semester. This reporting obligation represents a change from the previous quarterly reporting requirement.

Throughout 2024, the Company has fulfilled its obligation to report on the Complaint Service in a timely manner, with the Company's complaint handling and service reports available on page 216.

Personal Data Protection ("PDP")

On October 17, 2022, the Government of Indonesia enacted Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), to Article 74 of the PDP Law, The Company are required to comply with the provisions of the PDP Law within two (2) years from the date of enactment, which means that by October 17, 2024, the Company must aligned its operations with the requirements of the PDP Law.

Sosialisasi/Pelatihan PDP

Sebagai langkah awal, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah mengikuti sosialisasi/Pelatihan terkait PDP yang diselenggarakan oleh OJK atau institusi lain.

PDP Socialization/Training

As an initial step, the Risk Management and Compliance Division has participated in PDP socialization/training organized by the OJK or other institutions.

Sosialisasi/pelatihan PDP yang diadakan sepanjang tahun 2024 adalah :

The PDP socialization/training held throughout 2024 includes:

No	Tema Sosialisasi Socialization Theme	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1	*Data Privacy & Data Protection Officer*	20 May 2024	Hukum Online
2	*Technical Training Record of Processing Activities (ROPA) & Data Protection Impact Assessment (DPIA)*	20 Jun 2024	APPDI
3	Implementasi dan Pendalaman Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Implementation and Deepening of Law (UU) Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.	10 Jul 2024	ICSA

Fungsi Pelindungan Data Pribadi

Sesuai pasal 53 UU PDP bahwa Perseroan dalam hal ini sebagai pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi. Pada tanggal 27 September 2024 Perseroan telah menunjuk petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dari Divisi Managemen Risiko, Kepatuhan, APU, PPT dan PPPSPM, Pelindungan Konsumen dan *Business Process.*

Personal Data Protection Function

In accordance with Article 53 of the UU PDP, the Company, as both a personal data controller and processor, is required to appoint an officer responsible for implementing the personal data protection function. On 27 September 2024, the Company appointed a Data Protection Officer from the Risk Management, Compliance, AML, CFT, and CPFMDW, Consumer Protection, and Business Process Division.

Petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi memberikan sosialisasi PDP kepada seluruh pegawai Perseroan secara daring, yang diharapkan dengan sosialisasi ini maka seluruh pegawai Perseroan memahami pelaksanaan PDP di Perseroan.

The officer responsible for the Personal Data Protection function provided online PDP socialization to all employees of the Company, with the aim of ensuring that all employees understand the PDP implementation within the Company.

Pedoman PDP

Sebagai bentuk implementasi UU PDP, Perseroan telah menyusun Kebijakan Pelindungan Data Pribadi sebagai pedoman dalam pelaksanaan PDP di lingkungan Perseroan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi privasi debitur dengan menerapkan aturan dan prosedur yang efektif, sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan data yang ditetapkan dalam UU PDP.

PDP Guidelines

As part of its commitment to implementing the UU PDP, the Company has developed a Personal Data Protection Policy to serve as a guideline for PDP implementation throughout the organization. This policy is designed to safeguard debtor privacy by establishing effective rules and procedures aligned with the data protection principles outlined in the UU PDP.

Rekomendasi dalam Penerapan Pedoman GCG
Recommendation on GCG Guidelines Implementation

Berikut ini adalah status rekomendasi dalam Penerapan Pedoman GCG Perusahaan Terbuka sesuai Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

The following is the recommendation status in the Implementation of GCG Guidelines for Public Company in accordance with OJK Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Corporate Governance Guidelines for Public Company.

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Keterangan / Description :
A. Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Public Company Relations With Shareholders In Ensuring Shareholders Rights		
Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Increased the Value of General Meeting of Shareholders (GMS) Implementation	Perusahaan memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara *(voting)* baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan Pemegang Saham. The Company had methods or technical procedures for polling (voting), either open or closed that promoted the independence and the interests of shareholders.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
	Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan hadir dalam RUPS Tahunan. All members of both the Board of Directors and the Board of Commissioners attended the Annual General Meeting of Shareholders.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perseroan paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Minutes of meeting of the GMS were available in the website of the Company for at least one (1) year.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan dengan Pemegang Saham atau Investor Improved the Quality of Company Communications with Shareholders or investors	Perseroan memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor. The Company had methods or a policy of communication with Shareholders or Investors.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
	Perseroan mengungkapkan kebijakan komunikasi Perseroan dengan Pemegang Saham atau Investor dalam situs web. The Company revealed its communication policy with Shareholders or Investors in website.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris The Functions And Roles of The Board of Commissioners		
Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Strengthened the Membership and Compositions of the Board of Commissioners	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan. Determination of the number of members of the Board of Commissioners considered the condition of the Company.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of the Board of Commissioners by considering the competence, knowledge and experience required.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Improved the Quality of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the Board of Commissioners' performance.	**TELAH DITERAPKAN** APPLIED

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Keterangan / Description :
	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed through the Public Company's Annual Report.	**TELAH DITERAPKAN** **APPLIED**
	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of the Board of Commissioners members if they are involved in financial crime.	**TELAH DITERAPKAN** **APPLIED**
	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function shall formulate a succession policy in the nomination process of the Board of Directors members.	**TELAH DITERAPKAN** **APPLIED**
C. Fungsi dan Peran Direksi Board of Directors Functions and Roles		
Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi Strengthened Membership and Composition of the Board of Directors	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perseroan serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. Determination of the number of Board of Directors members by considering the condition of the Company and decision making effectivenes.	**TELAH DITERAPKAN** **APPLIED**
	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of the Board of Directors members considering the diversity of skills, knowledge and experience required.	**TELAH DITERAPKAN** **APPLIED**
	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Member of the Board of Directors in charge in accounting or financial has expertise and / or knowledge in the field of accounting.	**TELAH DITERAPKAN** **APPLIED**
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Improved the Quality of Duties and Responsibilities of Board of Directors	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.	**TELAH DITERAPKAN** **APPLIED**
	Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perseroan. Policy assessment (self-assessment) to assess the performance of the Board of Directors expressed through the Annual Report of the Company.	**TELAH DITERAPKAN** **APPLIED**
	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors had policies related to the resignation of the Board of Directors members if they were involved in financial crimes.	**TELAH DITERAPKAN** **APPLIED**

Prinsip / Principle	Rekomendasi / Recommendation	Keterangan / Description :
D. Partisipasi Pemangku Kepentingan Stakeholders Participation		
Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan Increased Aspects of Corporate Governance through Stakeholder Participation	Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. The Company had a policy to prevent insider trading.	**TELAH DITERAPKAN** **APPLIED**
	Perseroan memiliki kebijakan antikorupsi dan anti-*fraud*. The Company had a policy of anti-corruption and anti-fraud.	**TELAH DITERAPKAN** **APPLIED**
	Perseroan memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*. The Company has a policy regarding the selection and capacity building of the suppliers or vendors.	**TELAH DITERAPKAN** **APPLIED**
	Perseroan memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. The Company had a policy on the fulfillment of the rights of creditors.	**TELAH DITERAPKAN** **APPLIED**
	Perseroan memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. The Company had a policy of whistleblowing systems.	**TELAH DITERAPKAN** **APPLIED**
	Perseroan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. The Company had a policy of long-term incentives for Board of Directors and employees.	**TELAH DITERAPKAN** **APPLIED**
E. Keterbukaan Informasi Information Disclosure		
Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Enhancing the Implementation of Information Disclosure	Perseroan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. The Company utilized the use of information technology more widely besides website as a media of information disclosure.	**TELAH DITERAPKAN** **APPLIED**
	Laporan Tahunan Perseroan mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan melalui Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Annual Report had disclosed the ultimate beneficiary owners in the ownership of Company shares at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the ultimate beneficial owner in the Company's ownership through the Main Shareholder and Controlling.	**TELAH DITERAPKAN** **APPLIED**

TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN

SOCIAL & ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
Corporate Social and Environmental Responsibility Commitment and Policy

Perseroan berkomitmen untuk selalu menjalankan usahanya dengan selalu mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan operasional kantor, Perseroan senantiasa berusaha melindungi dampak keuangan, lingkungan dan sosial dengan bantuan kebijakan yang relevan. Perseroan memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ("RAKB"), yang secara khusus memandu berbagai langkah perlindungan lingkungan dan sosial serta memastikan bahwa para pemangku kepentingan dapat benar-benar merasakan manfaat berkelanjutan dari operasi dan bisnis Perseroan.

The Company is committed to always running its business by always considering economic, social and environmental aspects. Therefore, in carrying out office operational activities, the Company always tries to protect the financial, environmental and social impacts with the support of relevant policies. The Company has a Sustainable Finance Action Plan ("SFAP"), which specifically guides various environmental and social protection measures and ensures that stakeholders can truly feel the sustainable benefits of the Company's operations and business.

Selain itu, Direksi telah melakukan peninjauan yang komprehensif atas penyusunan Laporan Keberlanjutan 2024 ini yang diharapkan menjadi acuan atas komitmen Perseroan terhadap Keberlanjutan. Direksi senantiasa optimis, bahwa ke depan Perseroan dapat mencapai kemajuan dan pertumbuhan terkait implementasi keberlanjutan.

In addition, the Board of Directors has conducted a comprehensive review of the preparation of this 2024 Sustainability Report which is expected to be a reference for the Company's commitment to Sustainability. The Board of Directors is always optimistic that in the future the Company can achieve progress and growth related to the implementation of sustainability.

Visi, Misi dan Nilai Perseroan
Vision, Mission and Values of The Company

Visi
Vision

"Menjadi Perusahaan yang Menciptakan Dunia yang Berkelanjutan"
"Be a Creator of a Sustainable World"

Misi
Mission

"Menghubungkan Kebutuhan untuk Menciptakan Masa Depan"
"Connect Needs to Create the Future"

Nilai-Nilai Perseroan
Company's Values

CHALLENGE **CREATE** **CHANGE**

COLLABORATE

Melalui kolaborasi, kami akan menghadapi tantangan, membuat perubahan, dan mempercepat penciptaan
Through collaboration, we will face challenges, enact change and accelerate creation

Profil Perseroan
Company Profile

Data profil Perseroan dapat ditemukan pada halaman 36.

The Company profile data can be found on page 36.

Keselarasan dengan Tujuan Berkelanjutan
Alignment with Sustainable Development Goals

Perseroan berkomitmen untuk mengintegrasikan program-program keberlanjutan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan prinsip keberlanjutan tidak hanya memberikan keuntungan bagi Perseroan, tetapi juga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi para Pemangku Kepentingan.

The Company is committed to aligning its sustainability initiatives with the Sustainable Development Goals (SDGs). This approach ensures that the implementation of sustainability principles not only creates added value for the Company but also generates sustainable positive impacts for all Stakeholders.

TPB SDG	Penjelasan Explanation	Implementasi Implementation
3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Good Health and Well Being	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.	Dalam rangka menciptakan kehidupan yang sehat bagi karyawan Perseroan, maka digelar acara *mini-soccer* secara rutin. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya kampanye hidup sehat dengan rutin berolahraga. In an effort to promote a healthy lifestyle for the Company's employees, regular mini soccer events are held. This initiative is part of an ongoing campaign to encourage healthy living through regular physical activity.
4 Pendidikan Berkualitas Quality Education	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.	Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, Perseroan berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya dalam hal literasi keuangan. Melalui berbagai program edukatif yang ditujukan bagi pelajar maupun masyarakat umum, Perseroan secara berkelanjutan mendorong peningkatan pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang cerdas dan bertanggung jawab. Inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih paham finansial dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. As part of its social responsibility, the Company is committed to supporting the improvement of education quality in Indonesia, particularly in financial literacy. Through various educational programs aimed at students and the general public, the Company continuously promotes a better understanding of smart and responsible financial management. This initiative aims to build a financially literate society that is prepared to face future economic challenges.

TPB SDG	Penjelasan Explanation	Implementasi Implementation
	Mencapai kesetaraan *gender* dan memberdayakan kaum perempuan. Achieve gender equality and empower all women and girls.	Perseroan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, profesional, dan setara. Perseroan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, tanpa diskriminasi berbasis *gender*. Perseroan senantiasa membuka kesempatan bagi perempuan dalam peran-peran strategis, sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang tangguh dan berkelanjutan. The Company is committed to fostering a fair, professional, and inclusive work environment. It ensures that every individual has equal opportunities to grow, regardless of gender discrimination. The Company continuously opens opportunities for women to occupy strategic roles, as part of its efforts to build a resilient and sustainable organization.
	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.	Sebagai bagian dari upaya mendukung energi terjangkau dan bersih, Perseroan senantiasa mendukung perkembangan portofolio kredit berkelanjutan dengan menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan yang bergerak di bidang energi baru dan terbarukan. In support of affordable and clean energy, the Company consistently promotes the development of a sustainable credit portfolio by providing financing to companies engaged in new and renewable energy.
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.for all.	Perseroan berkomitmen untuk berperan aktif dalam pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("UMKM"), yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Melalui pemberian kredit yang mudah diakses dan bersaing, Perseroan mendukung UMKM dalam mengembangkan usahanya, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja yang kondusif dan produktif. Sebagai bagian dari strategi ekspansi bisnis, tahun 2024 Perseroan membuka Kantor Cabang baru di berbagai daerah di Indonesia. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan, tetapi juga menjadi wujud kontribusi nyata Perseroan dalam menyerap tenaga kerja lokal serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional. Dengan memberikan kesempatan kerja yang layak dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia, Perseroan mendukung pencapaian TPB, khususnya tujuan ke-8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. The Company is actively committed to supporting the development of the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector, which forms the backbone of Indonesia's economy. By offering competitive and accessible credit, the Company supports MSMEs in expanding their businesses, creating jobs, and driving inclusive economic growth. The Company is consistently dedicated to promoting inclusive and sustainable economic growth by creating conducive and productive employment opportunities. As part of its business expansion strategy, on 2024 the Company opened new Branch Offices in various regions across Indonesia. This initiative not only aims to expand service reach but also serves as a tangible contribution to absorbing local labor and enhancing regional economic growth. By offering decent job opportunities and focusing on human resource development, the Company supports the achievement of the 8th SDG: Decent Work and Economic Growth.
	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Make cities and human setilements inclusive, safe, resilient and sustainable.	Selaras dengan tujuan mewujudkan industri, inovasi, dan infrastruktur, kemajuan teknologi memegang peranan kunci dalam memberikan solusi bagi tantangan teknologi dan lingkungan secara lebih efisien. Dalam hal ini, Perseroan mengimplementasikan *Robotic Process Automation* (RPA) yang menjadikan pekerjaan administratif berjalan lebih efisien dan mengurangi potensi *human error.* Aligned with the goal of fostering industry, innovation, and infrastructure, technological advancements play a key role in delivering efficient solutions to technological and environmental challenges. In this regard, the Company has implemented Robotic Process Automation (RPA) to increase the efficiency of administrative processes and reduce the potential for human error.

TPB	Penjelasan Explanation	Implementasi Implementation
10 Berkurangnya Kesenjangan Reduced Inequalities	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Reduce inequality within and among countries.	Guna mengurangi ketimpangan, Perseroan senantiasa mengedepankan semangat non-diskriminatif guna mendorong inklusi ekonomi bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin ras atau etnis. To reduce inequality, the Company consistently promotes a non-discriminatory spirit to encourage economic inclusion for all, regardless of gender, race, or ethnicity.
11 Kota dan Masyarakat Berkelanjutan Sustainable Cities and Communities	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Make cities and human setilements inclusive, safe, resilient and sustainable.	Dalam semangat mewujudkan komunitas yang berkelanjutan, Perseroan senantiasa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pelatihan tanggap bencana kebakaran dan gempa bumi. Hal ini dilakukan guna menciptakan masyarakat yang tangguh dan tanggap bencana. In the spirit of creating a sustainable community, the Company actively participates in various disaster drill activities for fire and earthquake emergencies. These initiatives aim to build a resilient and disaster-aware society.
12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab Responsible Consumption and Production	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Ensure sustainable consumption and production patterns.	Guna mendukung pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, Perseroan menyalurkan pembiayaan atas mesin pengolahan limbah padat maupun cair, seperti minyak oli bekas pakai yang dapat digunakan kembali pada proses produksi. Hal ini tentunya termasuk dalam upaya efisiensi energi berdasarkan asas manfaat limbah. To support responsible consumption and production patterns, the Company provides financing for solid and liquid waste processing machines, such as used oil recycling systems that allow the reuse of materials in production processes. This effort contributes to energy efficiency through waste utilization principles.
16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Peace, Justice and Strong Institutions	Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. Promoting a just, peaceful, and inclusive society.	Sebagai bentuk partisipasi untuk mewujudkan perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat, Perseroan menggelar acara buka puasa bersama yang diperuntukan bagi seluruh karyawan. Acara ini digelar untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. As a form of contribution to peace, justice, and strong institutions, the Company organizes communal iftar (breaking of fast) events for all employees. This event is held to promote interfaith harmony.

Penjelasan Strategi Keberlanjutan
Elaboration on Sustainability Strategy

Ringkasan Eksekutif

Perkembangan kondisi sosial dan lingkungan yang dialami secara global saat ini telah merubah paradigma pembangunan bangsa-bangsa yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata, namun juga perlu memperhatikan aspek sosial, pemerataan kesejahteraan serta kelangsungan lingkungan hidup yang menjadi dambaan manusia.

Sejalan dengan hal itu Indonesia telah berkomitmen untuk mengembangkan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Lembaga Jasa Keuangan sebagai salah satu sektor yang berkontribusi dalam pembangunan nasional perlu juga berpartisipasi dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Pengembangan sistem perekonomian yang selaras tersebut membutuhkan dukungan pendanaan dari lembaga jasa keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut OJK sebagai institusi yang melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Sebelumnya Perseroan juga telah menerbitkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia tahun 2015 – 2019 pada bulan Desember 2014.

Sebagai kelanjutan, di tahun 2021 OJK telah menerbitkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025) sebagai panduan untuk mempercepat penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola di Indonesia yang berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan mendorong pengembangan kerja sama dengan pihak lain. Selanjutnya melalui Siaran Pers tanggal 5 Oktober 2021 OJK juga telah mengumumkan pembentukan *Task Force* Keuangan Berkelanjutan di Sektor Jasa Keuangan (SJK).

Perseroan sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan dan sekaligus Perusahaan Publik menyadari pentingnya masalah pengelolaan keuangan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip *triple bottom line* (*profit-people-planet*) dalam kegiatan usahanya, dimana antara kepentingan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, ketiganya perlu berjalan dengan selaras.

Sebagai wujud komitmen terhadap keberlanjutan, Perseroan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk periode jangka panjang selama lima tahun, yaitu tahun 2025 - 2029 yang telah disampaikan kepada OJK. Selain itu, Perseroan juga telah menyiapkan Laporan Keberlanjutan untuk tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023, yang telah diserahkan kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia, serta dipublikasikan di situs web Perseroan.

Executive Summary

The global development of social and environmental conditions today has shifted the development paradigm of nations. This paradigm now emphasizes not only economic growth, but also the need to address social aspects, ensure equitable distribution of welfare, and promote environmental sustainability principles that align with fundamental human desires.

In this context, Indonesia has committed to developing a national economic system that prioritizes harmony between economic, social, and environmental aspects. As a key sector in national development, Financial Services Institutions also need to actively participate in the implementation of sustainable finance. The realization of a harmonized economic system requires the support of funding from these institutions.

In this regard, the OJK, as the institution responsible for regulating and supervising the financial services sector, has issued OJK Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies. Additionally, the Financial Services Authority had previously published the Sustainable Finance Roadmap for Indonesia 2015-2019 in December 2014.

As a follow-up, in 2021, the OJK issued the Sustainable Finance Roadmap Phase II (2021-2025) to accelerate the implementation of environmental, social, and governance (ESG) principles in Indonesia. This roadmap focuses on creating a comprehensive sustainable finance ecosystem by involving all relevant parties and fostering cooperation with other stakeholders. Furthermore, in a press release dated October 5, 2021, the Financial Services Authority also announced the formation of the Sustainable Finance Task Force in the Financial Services Sector (FSS).

The Company, as both a Financial Services Institution and a Public Company, recognizes the importance of sustainable financial management by applying the triple bottom line principle (profit, people, planet) in its business activities. The Company understands that the interests of economic, social, and environmental aspects must be balanced and pursued in harmony.

As part of the commitment to sustainability, the Company has prepared a Sustainable Finance Action Plan for a five-year period, from 2025 to 2029, which has been submitted to the Financial Services Authority. In addition, the Company has prepared Sustainability Reports for the years 2020, 2021, 2022, and 2023, which have been submitted to the Financial Services Authority and PT Bursa Efek Indonesia, and published on the Company's website.

Dengan disusunnya Rencana Aksi Keuangan Berlanjutan, Perseroan berharap dapat menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan menjaga kepedulian terhadap kondisi lingkungan sekitar. Perseroan percaya bahwa langkah ini akan mendukung perkembangan yang harmonis antara Perseroan dan komunitas.

By preparing the Sustainable Finance Action Plan, the Company hopes to create long- term sustainable value, contribute to the welfare of society, and maintain a commitment to environmental sustainability. We believe that this step will support harmonious development between the Company and the communities.

Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
Achievements of Sustainable Finance Action Plan

Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan di tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

The achievements of the Sustainable Finance Action Plan for the years 2020, 2021, 2022, 2023 and 2024 by the Company are as follows:

Rencana Aktivitas Activity Plan	Indikator Pencapaian Achievement Indicator	Realisasi Waktu Pelaksanaan Actual Implementation Time	Pencapaian Actual Achievement
Seminar konsep dasar Keuangan Berkelanjutan kepada sebagian besar pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) dan karyawan di tingkat manajerial/ pengambil keputusan. Seminar on the basic concepts of Sustainable Finance to most of the management (Board of Commissioners and Directors) and employees at the managerial/decision-making level.	80% dari Dewan Komisaris, Direksi, Wakil Direktur dan Kepala Divisi telah mengikuti seminar Keuangan Berkelanjutan. 80% of the Board of Commissioners, Directors, Deputy Directors and Division Heads have attended the Sustainable Finance seminar.	Triwulan III 2020 Quarter III 2020	100% dari Dewan Komisaris, Direksi, *Deputy Director* dan Kepala Divisi telah mengikuti seminar Keuangan Berkelanjutan. 100% of the Board of Commissioners, Directors, Deputy Directors and Division Heads have attended the Sustainable Finance seminar.
Pelaksanaan edukasi internal kepada karyawan kunci di Kantor Pusat bekerja sama dengan pihak eksternal. Implementation of internal education for key employees at the Head Office in collaboration with external parties.	75% dari *Department Head* dan *Section Head* telah mengikuti *training* Keuangan Berkelanjutan. 75% of Department Heads and Section Heads have attended Sustainable Finance training.	Triwulan IV 2020 Quarter IV 2020	100% dari *Department Head* dan *Section Head* telah mengikuti training Keuangan Berkelanjutan (hanya dilakukan oleh pihak internal) 100% of Department Heads and Section Heads have participated in Sustainable Finance training (only carried out by internal parties)
Melakukan program pelatihan terkait Keuangan Berkelanjutan kepada Kantor Cabang. Conduct training programs related to Sustainable Finance for Branch Offices.	Sebanyak 50% dari Kantor Cabang telah mengikuti pelatihan Keuangan Berkelanjutan. 50% of the Branch Offices have attended Sustainable Finance training.	Triwulan III 2021 Quarter III 2021	Pelatihan *awareness* Keuangan Berkelanjutan telah dilakukan kepada 18 orang kepala cabang (100% dari Kantor Cabang) pada bulan September 2021 melalui media Zoom. Sustainable Finance awareness training was conducted for 18 branch heads (100% of Branch Offices) in September 2021 via Zoom media.
Peningkatan kapasitas manajemen risiko analis kredit untuk sektor usaha yang memiliki risiko sosial dan lingkungan hidup yang tinggi bagi anggota Komite Kredit. Increasing the risk management capacity of credit analysts for business sectors that have high social and environmental risks for members of the Credit Committee.	Sebanyak 50% dari anggota Komite Kredit telah mengikuti *training* terkait manajemen risiko sosial dan lingkungan. As many as 50% of the members of the Credit Committee have attended training related to social and environmental risk management.	Triwulan IV 2022 Quarter IV 2022	Telah dilakukan *training* analisa kredit terkait manajemen risiko sosial dan lingkungan terhadap 31 (tiga puluh satu) orang dari Unit Bisnis Korporasi dan Unit Bisnis Ritel, termasuk Kantor Cabang pada bulan November 2022 melalui media Zoom.

Rencana Aktivitas Activity Plan	Indikator Pencapaian Achievement Indicator	Realisasi Waktu Pelaksanaan Actual Implementation Time	Pencapaian Actual Achievement
			Credit analysis training has been carried out related to social and environmental risk management for 31 (thirty one) people from the Corporate Business Unit and Retail Business Unit, including Branches Office in November 2022 via Zoom media.
• Penyusunan Pedoman Perseroan Keuangan Berkelanjutan yang mendukung praktek ramah lingkungan dalam kegiatan operasional Perseroan. Preparation of Guidelines for Sustainable Finance Companies that support environmentally friendly practices in the Company operations. • Penyusunan SOP Keuangan Berkelanjutan. Preparation the SOP of Sustainable Finance.	• Disusunnya pedoman internal terkait praktek ramah lingkungan dalam kegiatan operasional Perseroan. Developed internal guidelines related to environmentally friendly practices in the Company's operational activities. • *Standard Operasional Procedure* (SOP) Keuangan Berkelanjutan telah disetujui Direksi. The Standard Operating Procedure (SOP) for Sustainable Finance has been approved by the Board of Directors.	Triwulan III 2023 Quarter III 2023	Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur Keuangan Berkelanjutan yang telah disahkan oleh Direksi. Kebijakan dan prosedur tersebut terdiri dari : • Kebijakan Keuangan Berkelanjutan • Strategi Keuangan Berkelanjutan • SOP Keuangan Berkelanjutan dalam proses pembiayaan The Company has Sustainable Finance policy and procedure that have been approved by the Board of Directors. The policy and procedures consist of : • Sustainable Finance Policy • Sustainable Finance Strategy • SOP Sustainable Finance in the financing process
Inisiasi portofolio produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan. Initiation of portofolio od sustainable Finance product and/ or services.	Peluncuran produk pembiayaan berkelanjutan. Launching of the sustainable finance product.	Triwulan III 2023 Quarter III 2023	Perseroan saat ini telah memiliki portofolio yang dapat dikelompokkan ke dalam pembiayaan keuangan berkelanjutan. The Company currently has a portfolio that can be classified into financing of sustainable finance. Pembiayaan dalam kategori keuangan berkelanjutan telah dimasukkan dalam laporan bulanan. The financing in the sustainable finance category has been included in the monthly report.
Refreshment Program Keuangan Berkelanjutan kepada anggota Komite Kredit. Sustainable Finance Refreshment to Credit Committee members.	Sebanyak 50% dari anggota Komite Kredit telah mengikuti refreshment program. 50% of Credit Committee member have attended the refreshment program.	Triwulan IV 2023 Quarter IV 2023	Telah dilakukan *training* kepada 63 peserta yang terdiri dari Unit Bisnis Ritel dan Unit Bisnis Korporasi di Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Training has been conducted for 63 participants from of Retail Business Units and Corporate Business Units at the Head Ofiice and Branch Offices. Materi training antara lain : • *Refreshment* tentang *sustainable finance* • Pengenalan analisa risiko ESG pada pengambilan keputusan pembiayaan • Kategori kegiatan Usaha Berkelanjutan • Taksonomi hijau Training materials include : • Refreshment on sustainable finance • Introduction of ESG risk analysis in financing decision-making.

Rencana Aktivitas Activity Plan	Indikator Pencapaian Achievement Indicator	Realisasi Waktu Pelaksanaan Actual Implementation Time	Pencapaian Actual Achievement
			• Sustainable Finance Business Category • Green Taxonomy
Pelatihan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan kepada *Credit Marketing Officer* di Kantor Cabang. Training in sustainable finance products and/or services to Credit Marketing Officer in Branch Offices.	80% dari total *Credit Marketing Officer* telah mengikuti pelatihan produk dan/jasa keuangan berkelanjutan di Kantor Cabang. 80% of total Credit Marketing Officers have attended the training on sustainable finance product and/or services in Branch Offices.	Triwulan IV 2023 Quarter IV 2023	Telah dilakukannya *training* kepada 82 peserta dengan posisi *Credit Marketing Officer* di Kantor Cabang. Training was conducted for 82 participants with the position of Credit Marketing Officer in Branch Offices.
Pengembangan sistem pelaporan keuangan berkelanjutan. Development of sustainable finance reporting system.	Diluncurkannya sistem pengawasaan dan pelaporan penerapan keuangan berkelanjutan. Launched the supervision and reporting system on sustainable finance implementation.	Triwulan II 2024 Quarter II 2024	Perseroan telah menerapkan prosedur pengawasan berkala dan pelaporan untuk memastikan pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. The Company has implemented regular monitoring procedures and reporting to ensure the achievement of the Sustainable Financial Action Plan.
Peningkatan portofolio produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan. Increasing portfolio of sustainable finance products and/or services.	Jumlah pembiayaan berkelanjutan pada akhir tahun 2024 yaitu sebesar 5% dari total portofolio. Amount of sustainable financing at the end of 2024 will be 5% of the total portfolio.	Triwulan IV 2024 Quarter IV 2024	Realisasi pembiayaan berkelanjutan pada akhir tahun 2024 sebesar 10,78% dari total portofolio. The realization of sustainable financing at the end of 2024 is 10.78% of the total portfolio.

Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
Objective of Sustainable Finance Action Plan

Perseroan telah melaksanakan komitmen terhadap Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Jangka Panjang pertama yang dimulai pada tahun 2020 hingga 2024, sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Saat ini, Perseroan memasuki tahap pelaksanaan Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Jangka Panjang berikutnya untuk periode 2025 hingga 2029. Dalam merencanakan periode mendatang ini, Perseroan mempertimbangkan secara cermat berbagai faktor, baik eksternal maupun internal, termasuk kondisi keuangan, kapasitas teknis, dan kapasitas organisasi.

The Company has committed to the first Long-Term Sustainable Finance Action Plan Goal for the period 2020 to 2024, in alignment with its vision and mission. Currently, the Company is entering the implementation phase of the next Long-Term Sustainable Finance Action Plan Goal for the period 2025 to 2029. In planning for the upcoming period, the Company carefully considers various factors, both external and internal, including financial conditions, technical capacity, and organizational capability.

Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perusahaan adalah sebagai berikut :

“Menjadi Perusahaan yang Menciptakan Dunia yang Berkelanjutan dengan Menyelaraskan Aspek Sosial dan Lingkungan”

The objectives of the Company’s Sustainable Finance Action Plan are as follows :

“To Be A Company That Creates A Sustainable World by Harmonizing Social and Environmental Aspects.”

Strategi yang diterapkan pada periode jangka panjang sebelumnya telah terbukti efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Perseroan memandang bahwa strategi tersebut akan

The strategies implemented in the previous long-term period have proven effective in achieving the objectives set by the Company. Based on the evaluation results, the Company considers that the strategy will continue to be applied and used

terus diterapkan dan digunakan dalam periode berikutnya, yaitu:

- Dukungan penuh manajemen dalam penerapan keuangan berkelanjutan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan tata kelola dalam kegiatan usaha Perseroan;
- Peran aktif karyawan yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya maupun kompetensi penerapan keuangan berkelanjutan sesuai jenjang tugasnya;
- Memperhatikan aspek sosial baik secara internal untuk mewujudkan misi Perseroan dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, maupun secara eksternal lingkungan sosial Kantor Pusat dan Kantor Cabang sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Perseroan dan menjaga risiko reputasi;
- Memperhatikan aspek ramah lingkungan di internal Perseroan dengan berbagai upaya untuk efisiensi energi, efisiensi penggunaan air, kertas dan plastik.

in the next period is :

- Strong management support for the implementation of sustainable finance by integrating economic, social, environmental, and governance aspects into the Company's business activities
- The active role of employees who have the skills needed in carrying out their duties and responsibilities as well as competence in implementing sustainable finance according to their level of duty;
- Paying attention to social aspects both internally to realize the Company's mission in developing competent human resources, as well as externally the social environment of the Head Office and Branch Offices so as to increase public trust in the Company and maintain reputational risk;
- Paying attention to environmentally friendly aspects within the Company with various efforts for energy efficiency, efficient use of water, paper and plastic.

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 5 (Lima) Tahun
5 (Five) Years Sustainable Finance Action Plan

Perseroan telah menyusun program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Berikut adalah penjabarannya :

The Company has developed a Sustainable Finance Action Plan for a period of 5 (five) years. The following is a detailed breakdown:

Tahun Year	No	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Action Plan	Rencana Pelaksanaan Implementation Time	Indikator Keberhasilan Success Indicator
2025	1	Peningkatan portofolio keuangan berkelanjutan : Increased sustainable finance portfolio : a. Melakukan pengembangan produk terhadap pembiayaan untuk kategori keuangan berkelanjutan. Developing products for financing in the sustainable finance category.	Triwulan – IV Quarter – IV	Telah dilakukan pengembangan produk portofolio keuangan berkelanjutan dan tercermin didalam Rencana Bisnis tahun 2026. Development of sustainable finance portfolio products has been carried out and is reflected in the Business Plan for 2026.
		b. Peningkatan portofolio pembiayaan kategori keuangan berkelanjutan di akhir tahun 2025. Increase in the financing portfolio of the sustainable finance category by the end of 2025.	Sepanjang tahun 2025 Throughout the year 2025	Portofolio keuangan berkelanjutan di akhir tahun 2025 menjadi 11,10%. The sustainable finance portfolio at the end of 2025 will be 11.10%.
	2	Melakukan pengembangan kapasitas internal melalui penyelenggaraan program : Developing internal capacity through the implementation of the following programs: a. Pelaksanaan edukasi kepada karyawan kunci di Kantor Cabang terkait efisiensi listrik, air dan kertas. Education for key employees at the Branch Offices regarding electricity, water, and paper efficiency.	Triwulan – I Quarter – I	Terlaksananya pelatihan dengan jumlah kehadiran peserta minimal 80%. Implementation of training with a minimum attendance of 80%.
		b. Training refreshment kredit analis dan kredit komite terkait peluang, analisa risiko,dan mitigasi risiko terkait produk keuangan berkelanjutan. Refresher training for credit analysts and credit committee on opportunities, risk analysis, and risk mitigation related to sustainable finance products.	Triwulan – II Quarter – II	Terlaksananya pelatihan dengan jumlah kehadiran peserta minimal 80% Implementation of training with a minimum attendance of 80%
	3	Pemberian kesempatan yang sama (setara) bagi karyawan tanpa memandang *gender* untuk posisi manajerial di Perseroan. Providing equal opportunities for employees regardless of gender for managerial positions in the Company.		Komposisi karyawan wanita di level manajerial adalah > 0%. The composition of female employees at the managerial level is > 0%.
	4	Penghematan penggunaan listrik, air dan kertas dalam aktifitas operasional Perseroan. Saving in the use of electricity, water, and paper in the Company's operational activities.		Penggunaan atas listrik, air dan kertas pada tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024. The use of electricity, water, and paper in 2025 will be lower than in 2024.

Tahun Year	No	Target Kegiatan Prioritas Priority Activity Targets	Rencana Pelaksanaan Implementation Time	Indikator Keberhasilan Success Indicator
2026	1	Peningkatan portofolio keuangan berkelanjutan : Increased sustainable finance portfolio : a. Melakukan pengembangan produk terhadap pembiayaan untuk kategori keuangan berkelanjutan. Developing products for financing in the sustainable finance category.	Triwulan – IV Quarter – IV	Telah dilakukan pengembangan produk portofolio keuangan berkelanjutan dan tercermin didalam Rencana Bisnis tahun 2027. Development of sustainable finance portfolio products has been carried out and is reflected in the Business Plan for 2027.
		b. Peningkatan portofolio pembiayaan kategori keuangan berkelanjutan di akhir tahun 2026. increase in the financing portfolio of the sustainable finance category by the end of 2026.	Sepanjang tahun 2026 Throughout the year 2026	Portfolio keuangan berkelanjutan di akhir tahun 2026 menjadi 11,55%. The sustainable finance portfolio at the end of 2026 will be 11.55%.
	2	Pelaksanaan penelaahan terhadap kebijakan Perseroan terkait keuangan berkelanjutan. Implementation of a review of the Company's policies related to sustainable finance.	Triwulan – I Quarter - I	Terlaksananya penelaahan terhadap kebijakan Perusahaan terkait keuangan berkelanjutan. Implementation of the review of the Company's policies related to sustainable finance.
	3	Melakukan pengembangan kapasitas internal melalui penyelenggaraan program *training refreshment* kredit analis, kredit komite terkait peluang, analisa risiko,dan mitigasi risiko terkait produk keuangan berkelanjutan. Developing internal capacity through the implementation of refreshment training programs for credit analysts and the credit committee on opportunities, risk analysis, and risk mitigation related to sustainable finance products.	Triwulan – II Quarter – II	Terlaksananya pelatihan dengan jumlah kehadiran peserta minimal 80%. Implementation of training with a minimum attendance of 80%.
	4	Pemberian kesempatan yang sama (setara) bagi karyawan tanpa memandang *gender* untuk posisi manajerial di Perseroan. Providing equal opportunities for employees regardless of gender for managerial positions in the Company.		Komposisi karyawan wanita di level manajerial adalah > 0%. The composition of female employees at the managerial level is > 0%.
	5	Penghematan penggunaan listrik, air dan kertas dalam aktifitas operasional Perseroan. Saving in the use of electricity, water, and paper in the Company's operational activities.		Penggunaan atas listrik, air dan kertas pada tahun 2026 lebih rendah dari tahun 2025. The use of electricity, water, and paper in 2026 will be lower than in 2025.
2027	1	Peningkatan portofolio keuangan berkelanjutan : Increased sustainable finance portfolio: a. Melakukan pengembangan produk terhadap pembiayaan untuk kategori keuangan berkelanjutan. Developing products for financing in the sustainable finance category.	Triwulan – IV Quarter – IV	Telah dilakukan pengembangan produk portofolio keuangan berkelanjutan dan tercermin didalam Rencana Bisnis tahun 2028. Development of sustainable finance portfolio products has been carried out and is reflected in the Business Plan for 2028.
		b. Peningkatan portofolio pembiayaan kategori keuangan berkelanjutan di akhir tahun 2027. increase in the financing portfolio of the sustainable finance category by the end of 2027.	Sepanjang tahun 2027 Throughout the year 2027	Portofolio keuangan berkelanjutan di akhir tahun 2027 menjadi 12,70%. The sustainable finance portfolio at the end of 2027 will be 12.70%.
	2	Melakukan pengembangan kapasitas internal melalui penyelenggaraan program *training refreshment* kredit analis, kredit komite terkait peluang, analisa risiko,dan mitigasi risiko terkait produk keuangan berkelanjutan. Developing internal capacity through the implementation of refreshment training programs for credit analysts and the credit committee on opportunities, risk analysis, and risk mitigation related to sustainable finance products.	Triwulan – I Quarter – I	Terlaksananya pelatihan dengan jumlah kehadiran peserta minimal 80%. Implementation of training with a minimum attendance of 80%.
	3	Pemberian kesempatan yang sama (setara) bagi karyawan tanpa memandang *gender* untuk posisi manajerial di Perseroan. Providing equal opportunities for employees regardless of gender for managerial positions in the Company.		Komposisi karyawan wanita di level manajerial adalah > 0%. The composition of female employees at the managerial level is > 0%.
	4	Penghematan penggunaan listrik, air dan kertas dalam aktifitas operasional Perseroan. Saving in the use of electricity, water, and paper in the Company's operational activities.		Penggunaan atas listrik, air dan kertas pada tahun 2027 lebih rendah dari tahun 2026. The use of electricity, water, and paper in 2027 will be lower than in 2026.

Tahun Year	No	Target Kegiatan Prioritas Priority Activity Targets	Rencana Pelaksanaan Implementation Time	Indikator Keberhasilan Success Indicator
2028	1	Peningkatan portofolio keuangan berkelanjutan: Increased sustainable finance portfolio: a. Melakukan pengembangan produk terhadap pembiayaan untuk kategori keuangan berkelanjutan. Developing products for financing in the sustainable finance category.	Triwulan – IV Quarter – IV	Telah dilakukan pengembangan produk portofolio keuangan berkelanjutan dan tercermin didalam Rencana Bisnis tahun 2029. Development of sustainable finance portfolio products has been carried out and is reflected in the Business Plan for 2029.
		b. Peningkatan portofolio pembiayaan kategori keuangan berkelanjutan di akhir tahun 2028. increase in the financing portfolio of the sustainable finance category by the end of 2028.	Sepanjang tahun 2028 Throughout the year 2028	Portofolio keuangan berkelanjutan di akhir tahun 2028 menjadi 13,85%. The sustainable finance portfolio at the end of 2028 will be 13.85%.
		c. Melakukan pengembangan kapasitas internal melalui penyelenggaraan program *training refreshment* kredit analis, kredit komite terkait peluang, analisa risiko,dan mitigasi risiko terkait produk keuangan berkelanjutan. Developing internal capacity through the implementation of refreshment training programs for credit analysts and the credit committee on opportunities, risk analysis, and risk mitigation related to sustainable finance products.	Triwulan – I Quarter - I	Terlaksananya pelatihan dengan jumlah kehadiran peserta minimal 80%. Implementation of training with a minimum attendance of 80%.
	2	Pemberian kesempatan yang sama (setara) bagi karyawan tanpa memandang *gender* untuk posisi manajerial di Perseroan. Providing equal opportunities for employees regardless of gender for managerial positions in the Company.		Komposisi karyawan wanita di level manajerial adalah > 0%. The composition of female employees at the managerial level is > 0%.
	3	Penghematan penggunaan listrik, air dan kertas dalam aktifitas operasional Perseroan. Saving in the use of electricity, water, and paper in the Company's operational activities.		Penggunaan atas listrik, air dan kertas pada tahun 2028 lebih rendah dari tahun 2027. The use of electricity, water, and paper in 2028 will be lower than in 2027.
2029	1	Peningkatan portofolio keuangan berkelanjutan : Increased sustainable finance portfolio : a. Melakukan pengembangan produk terhadap pembiayaan untuk kategori keuangan berkelanjutan. Developing products for financing in the sustainable finance category.	Triwulan – IV Quarter – IV	Telah dilakukan pengembangan produk portofolio keuangan berkelanjutan dan tercermin didalam Rencana Bisnis tahun 2030. Development of sustainable finance portfolio products has been carried out and is reflected in the Business Plan for 2030.
		b. Peningkatan portofolio pembiayaan kategori keuangan berkelanjutan di akhir tahun 2029. increase in the financing portfolio of the sustainable finance category by the end of 2029.	Sepanjang tahun 2028 Throughout the year 2029	Portofolio keuangan berkelanjutan di akhir tahun 2029 menjadi 15%. The sustainable finance portfolio at the end of 2029 will be 15%.
	2	Pelaksanaan penelaahan terhadap kebijakan Perseroan terkait keuangan berkelanjutan. Implementation of a review of the Company's policies related to sustainable finance.	Triwulan – II Quarter – II	Terlaksananya penelaahan terhadap kebijakan Perusahaan terkait keuangan berkelanjutan. Implementation of the review of the Company's policies related to sustainable finance.
	3	Penyusunan program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk 5 tahun kedepan (2030 – 2034). Development of the Sustainable Finance Action Plan for the next 5 Years (2030 – 2034).	Triwulan – IV Quarter – IV	Tersusunnya program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk 5 tahun berikutnya (2030 – 2034). The Sustainable Finance Action Plan for the next 5 years (2030 – 2034) has been developed.
	4	Melakukan pengembangan kapasitas internal melalui penyelenggaraan program *training refreshment* kredit analis, kredit komite terkait peluang, analisa risiko,dan mitigasi risiko terkait produk keuangan berkelanjutan. Developing internal capacity through the implementation of refreshment training programs for credit analysts and the credit committee on opportunities, risk analysis, and risk mitigation related to sustainable finance products.	Triwulan – I Quarter - I	Terlaksananya pelatihan dengan jumlah kehadiran peserta minimal 80%. Implementation of training with a minimum attendance of 80%.
	5	Pemberian kesempatan yang sama (setara) bagi karyawan tanpa memandang *gender* untuk posisi manajerial di Perseroan. Providing equal opportunities for employees regardless of gender for managerial positions in the Company.		Komposisi karyawan wanita di level manajerial adalah > 0%. The composition of female employees at the managerial level is > 0%.

Tahun Year	No	Target Kegiatan Prioritas Priority Activity Targets	Rencana Pelaksanaan Implementation Time	Indikator Keberhasilan Success Indicator
	6	Penghematan penggunaan listrik, air dan kertas dalam aktifitas operasional Perseroan. Saving in the use of electricity, water, and paper in the Company's operational activities.		Penggunaan atas listrik, air dan kertas pada tahun 2029 lebih rendah dari tahun 2028. The use of electricity, water, and paper in 2029 will be lower than in 2028.

Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
Sustainable Finance Action Plan Preparation Process

Rujukan yang Digunakan Sebagai Acuan

Dalam penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), Perseroan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang diundangkan pada tanggal 27 Juli 2017 beserta dengan petunjuk tekhnis yang dikeluarkan oleh OJK tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Peraturan tersebut mengatur penerapan aksi keuangan berkelanjutan, mencakup berbagai ketentuan terkait kewajiban penyusunan RAKB dan Laporan Keberlanjutan. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong lembaga jasa keuangan dan perusahaan publik dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang mencakup faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dalam setiap aktivitas keuangan dan bisnis yang mereka jalankan. Dengan merujuk pada peraturan ini, Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam pengelolaan dan pelaporan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usaha yang dilakukan.

Keterlibatan Pihak Dalam Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam penyusunan RAKB Tahun 2025, Perseroan memilih untuk melibatkan berbagai pihak internal tanpa menggunakan konsultan eksternal. Proses ini melibatkan Direksi, *Corporate Strategic Planning, Corporate Secretary, Business Development Corporate, Marketing Development Retail Business Unit, Branch Management, Compliance, Risk Management, Business Process, Finance & Accounting, dan Human Resources Recruitment & Development.*

Penyusunan dimulai dengan diskusi yang melibatkan semua pihak terkait untuk membahas langkah-langkah strategis, risiko, dan peluang dalam mencapai keberlanjutan. Hasil dari diskusi tersebut kemudian digunakan untuk menyusun dan merumuskan RAKB, yang akhirnya difinalisasi dan disetujui oleh manajemen. Proses ini memastikan bahwa setiap aspek keberlanjutan terintegrasi dengan baik dalam operasional Perseroan.

Reference Used as a Reference

IIn preparing the Sustainable Finance Action Plan (SFAP), the Company refers to the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, which was issued on July 27, 2017, along with the related technical guidelines issued by the OJK regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.

This regulation governs the implementation of sustainable finance, including provisions related to the obligation of preparing SFAP and Sustainability Reports. It aims to encourage financial services institutions and public companies to integrate sustainability principles, including Environmental, Social, and Governance (ESG) factors, into all financial and business activities. In line with this regulation, the Company is committed to implementing measures that promote sustainable economic development by managing and reporting the social and environmental impacts of its business.

Engagement of Parties in the Development of Sustainable Finance Action Plan

In preparing the 2025 SFAP, the Company decided to engage various internal parties rather than external consultants. This process involved the Board of Directors, Corporate Strategic Planning, Corporate Secretary, Corporate Business Development, Retail Business Unit Marketing Development, Branch Management, Compliance, Risk Management, Business Process, Finance & Accounting, and Human Resources, including Recruitment & Development.

The preparation began with a discussion involving all relevant parties to review strategic steps, risks, and opportunities for achieving sustainability. The results of these discussions were then used to draft the SFAP, which was finalized and approved by management. This process ensures that every aspect of sustainability is effectively integrated into the Company's operations.

Faktor Penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
Determinative Factors of Sustainable Finance Action Plan

Rencana Strategi Bisnis

Rencana Strategis Bisnis memiliki pengaruh besar terhadap RAKB, khususnya dalam pengembangan portofolio Keuangan Berkelanjutan untuk UMKM, yang menjadi prioritas utama Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk memperluas pembiayaan kepada UMKM secara berkelanjutan dengan senantiasa memperhatikan peluang dan hambatan yang mungkin terjadi. Dengan mengintegrasikan keuangan berkelanjutan ke dalam strategi bisnis, Perseroan bertujuan untuk mendukung pertumbuhan UMKM yang lebih hijau dan berkelanjutan, sekaligus berperan dalam menciptakan dampak positif bagi perekonomian dan lingkungan. Inisiatif ini juga sejalan dengan pencapaian TPB, memperkuat komitmen Perseroan terhadap ekonomi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan.

Selain itu Perseroan juga berkomitmen terhadap penerapan efisiensi energi, air dan pengurangan penggunaan kertas yang semuanya menjadi bagian integral dari RAKB yang melibatkan seluruh lini organisasi.

Kapasitas Organisasi

Kapasitas organisasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam implementasi RAKB. Sebuah organisasi yang memiliki kapasitas yang kuat, baik dari segi sumber daya manusia, sistem, maupun infrastruktur, akan lebih mampu merancang dan menjalankan kebijakan yang mendukung tujuan keberlanjutan secara efektif. Kapasitas ini mencakup kemampuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan ke dalam strategi dan operasional sehari-hari, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan standar keberlanjutan.

Peningkatan kapasitas organisasi juga berarti pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola risiko dan peluang yang muncul seiring dengan penerapan RAKB, seperti pemahaman tentang produk keuangan berkelanjutan, pengelolaan risiko lingkungan, serta pengukuran dan pelaporan dampak sosial dan lingkungan. Organisasi yang memiliki kapasitas yang baik dalam hal inovasi, kolaborasi antar unit, serta adaptasi terhadap perubahan pasar dan regulasi, akan lebih mampu menciptakan nilai jangka panjang melalui implementasi keuangan berkelanjutan.

Perseroan dalam mensukseskan RAKB senantiasa meningkatkan kapasitas organisasi baik dalam konteks edukasi maupun struktur organisasi yang telah ada.

Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis

Faktor kondisi keuangan dan kapasitas teknis Perseroan memainkan peran yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan RAKB. Meskipun saat ini Perseroan membukukan kerugian, Perseroan masih memiliki likuiditas yang memadai dan struktur permodalan yang kuat. Hal ini memungkinkan Perseroan senatiasa mengembangkan portofolio keuangan berkelanjutan dan pembiayaan UMKM.

Di sisi lain, kapasitas teknis Perseroan juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi RAKB. Dengan tim yang

Business Strategic Plan

The Business Strategic Plan has a major influence on the SFAP, particularly in developing a green portfolio for MSME, which is the Company's top priority. The Company is committed to expanding financing to MSMEs in a sustainable manner while taking into account the opportunities and obstacles that may occur. By integrating sustainable finance into its business strategy, the Company aims to support greener and more sustainable growth of MSMEs, while playing a role in creating a positive impact on the economy and the environment. This initiative is also in line with the achievement of SDG, strengthening the Company's commitment to a more inclusive and environmentally friendly economy.

In addition, the Company is also committed to the implementation of energy efficiency, water and paper reduction, all of which are an integral part of the SFAP involving all lines of the organization.

Organizational Capacity

Organizational capacity is a key factor in determining success in the implementation of the SFAP. An organization with strong capacity in human resources, systems, and infrastructure is better equipped to design and implement policies that support sustainability goals. This capacity includes the ability to integrate sustainable finance principles into strategy and day-to-day operations, ensuring alignment with sustainability standards.

Improving organizational capacity also involves developing the skills and knowledge needed to manage the risks and opportunities associated with SFAP implementation, such as understanding sustainable financial products, environmental risk management, and the measurement and reporting of social and environmental impacts. Organizations with strong capacity for innovation, inter-unit collaboration, and adaptability to market and regulatory changes will be better positioned to create long-term value through the implementation of sustainable finance.

To ensure the success of the SFAP, the Company continues to enhance its organizational capacity through both education and improvements to its organizational structure.

Financial Condition and Technical Capacity

The Company's financial condition and technical capacity play a crucial role in the successful implementation of the SFAP. Even though the Company is currently posting a loss, the Company still has adequate liquidity and strong capital structure. This allows the Company to continue to develop its sustainable finance portfolio and MSME financing.

Furthermore, the Company's technical capacity is a key factor in the successful implementation of the SFAP. With a team

memiliki keahlian dalam bidang keuangan berkelanjutan, serta dukungan teknologi dan sistem yang memadai, perusahaan dapat mengelola risiko dan peluang yang muncul dengan lebih efektif. Kapasitas teknis yang kuat memungkinkan perseroan untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan keuangan, serta untuk memastikan bahwa pelaporan dan pengelolaan risiko dilakukan sesuai dengan standar keberlanjutan yang berlaku.

possessing expertise in sustainable finance, as well as adequate technology and system support, the Company can more effectively manage the risks and opportunities that arise. Strong technical capacity allows the Company to conduct thorough analysis of the social and environmental impacts of each financial decision and ensures that reporting and risk management comply with relevant sustainability standards.

Kerja Sama dengan Pihak Eksternal

Dalam mendukung pelaksanaan RAKB, terutama dalam hal peningkatan kapasitas, kualitas, dan kompetensi, Perseroan senantiasa terbuka untuk menjajaki peluang kerjasama dengan pihak eksternal yang memiliki keahlian profesional dan dapat memberikan manfaat signifikan bagi kemajuan Perseroan. Meskipun demikian, pemanfaatan potensi dan sumber daya internal Perseroan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap upaya pengembangan, dengan mempertimbangkan bahwa kekuatan internal adalah fondasi yang tak ternilai dalam mewujudkan tujuan jangka panjang yang berkelanjutan.

Cooperation with External Parties

To support the implementation of the SFAP, particularly in enhancing capacity, quality, and competency, the Company remains open to exploring collaboration opportunities with external parties possessing professional expertise, which could provide substantial benefits to the Company's development. However, leveraging the Company's internal potential and resources remains the top priority in every development effort, recognizing that internal strengths are a vital foundation for achieving long-term sustainability goals.

Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi merupakan salah satu elemen penting dalam implementasi RAKB, karena komunikasi yang efektif dapat memastikan pemahaman dan dukungan yang luas dari semua pemangku kepentingan. Dalam konteks RAKB, strategi komunikasi difokuskan untuk membangun kesadaran, transparansi, dan kolaborasi antara pihak internal dan eksternal, termasuk karyawan, pelanggan, investor, regulator, serta masyarakat luas.

Communication Strategy

The communication strategy is a critical element in theimplementation of the SFAP, as effective communication ensures broad understanding and support from all stakeholders. In the context of SFAP, the strategy focuses on building awareness, transparency, and collaboration between internal and external stakeholders, including employees, customers, investors, regulators, and the broader community.

Langkah pertama dalam strategi komunikasi adalah penyusunan pesan yang jelas dan konsisten terkait tujuan dan inisiatif keberlanjutan yang ingin dicapai melalui RAKB. Pesan tersebut harus dapat menggambarkan dengan tepat komitmen Perseroan terhadap keberlanjutan, serta manfaat yang diharapkan tidak hanya bagi Perseroan, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan. Komunikasi ini juga perlu dilakukan secara transparan, dengan menyampaikan kemajuan yang dicapai, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan keberlanjutan.

The first step in the strategy is the development of clear and consistent messages about the sustainability goals and initiatives of the RAKB. The message should clearly convey the Company's commitment to sustainability and the expected benefits for the Company, society, and the environment. This communication should also be transparent, outlining progress, challenges, and the steps to achieve sustainability goals.

Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Mitigasi

Dalam mendukung kelancaran implementasi RAKB, Perseroan telah menetapkan sistem monitoring, evaluasi, dan mitigasi risiko yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan keberlanjutan yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Perseroan mengadopsi pendekatan model 3 lini, yang memisahkan fungsi-fungsi utama untuk menciptakan struktur pengawasan dan pengendalian yang jelas dan efektif. Evaluasi secara berkala dilakukan oleh Perseroan untuk memastikan berjalannya RAKB sesuai dengan program yang telah dicanangkan.

Monitoring, Evaluation and Mitigation System

To facilitate the effective implementation of the SFAP, the Company has established a comprehensive system for monitoring, evaluation, and risk mitigation to ensure alignment with the sustainability goals. As part of this effort, the Company follows the three lines model, which delineates key functions to establish a clear and effective monitoring and control structure. Periodic evaluations are conducted to ensure the SFAP is executed as intended.

Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Isu Keuangan Berkelanjutan

Perseroan senantiasa memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam perencanaan dan penerapan RAKB seperti :

a. Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.
b. Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Peningkatan Literasi dan inklusi Keuangan di Sektor Jasa keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

Government Policies Related to The Sustainable Finance Issues

The Company consistently follows Government policies in the planning and implementation of the SFAP, including the following:

a. OJK Regulation Number 51/POJK.03/2017 dated July 27, 2017 regarding the implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies.
b. OJK Regulation Number 3 Tahun 2023 dated February 28, 2023 concerning Improving Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and/or the Public.

Prioritas Uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
Priority of Detail of Sustainable Finance Action Plan

1. Program Pertama :

Peningkatan Portofolio Keuangan Berkelanjutan Perseroan

a. Dasar Pemikiran

- Perseroan menilai bahwa peningkatan portofolio Keuangan Berkelanjutan merupakan program pertama yang menjadi prioritas utama dalam implementasi RAKB. Keputusan ini didasarkan pada kesadaran dan komitmen Perseroan terhadap pentingnya berkontribusi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

- Uraian Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan portofolio Keuangan Berkelanjutan, Perseroan akan fokus pada ekspansi kemitraan dengan UMKM. Hal ini sejalan dengan rencana bisnis jangka panjang (5 tahun) Perseroan, di mana pengembangan kemitraan strategis ini bertujuan untuk memperkuat kontribusi Perseroan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi dengan mitra-mitra ini, Perseroan berharap dapat menciptakan dampak positif yang lebih besar, baik dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien, maupun dalam mendukung adopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan.

1. First Program :

Sustainable Finance Portfolio Enhancement the Company

a. Rationale

- The Company considers that increasing its Sustainable Financing portfolio is the first program to be prioritized in the implementation of the SFAP. This decision is based on the Company's awareness and commitment to the importance of contributing in supporting sustainable development.

- Description As part of the effort to increase the green portfolio, the Company will focus on expanding partnerships with MSME. This is in line with the Company's long-term (5-year) business plan, where the development of these strategic partnerships aims to strengthen the Company's contribution in supporting sustainable economic growth. Through collaboration with these partners, the Company hopes to create greater positive impact, both in terms of more efficient management of natural resources, as well as in supporting the adoption of environmentally friendly business practices.

b. Kegiatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

b. Sustainable Finance Action Plan Activities

Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Uraian Kegiatan Description	Penanggung Jawab Division In Charge
Triwulan – IV Quarter – IV	Perseroan akan melakukan aktivitas produk *development* terhadap potensi pembiayaan keuangan berkelanjutan. The Company will conduct product development on potential financing for sustainable finance.	*Marketing Development & Business Development Corporate*
Sepanjang tahun 2025 Throughout the year 2025	Penyaluran pembiayaan kepada kategori keuangan berkelanjutan. Disbursement of financing to sustainable finance categories.	*Head of Marketing Retail & Corporate*

c. Sumber Daya

- Dalam rangka menyukseskan program pertama terkait *product development* & penyaluran pembiayaan keuangan berkelanjutan , Perseroan telah memiliki sumber daya berupa Unit Kerja *Marketing Development* untuk *Retail Business Unit* dan *Business Development Corporate* untuk *unit Corporate Business Unit*, serta Perseroan memiliki *Credit Marketing Officer* yang tersebar di seluruh Kantor Cabang Perseroan.
- Perseroan tentunya akan melakukan alokasi dana untuk aktifitas penunjang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka mensukseskan RAKB.
- Dalam pelaksanaan program pertama, Perseroan menilai belum memerlukan mitra kerja sama dalam pelaksanaan aktifitas *product development.*

c. Resource

- In order to successfully implement the first program related to product development and the distribution of sustainable finance, the Company has resources in the form of a Marketing Development Unit for the Retail Business Unit and a Business Development Corporate Unit for the Corporate Business Unit, as well as Credit Marketing Officers who are distributed across all the Company's Branch Offices.
- The Company will certainly allocate funds for supporting activities in accordance with the needs required in order to succeed the SFAP.
- In the implementation of the first program, the Company considers that it does not yet need a cooperation partner in the implementation of product development.

d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Perseroan melakukan evaluasi secara berkala untuk memantau pencapaian program penyaluran pembiayaan keuangan berkelanjutan yang dilakukan setiap bulannya.

d. Program Evaluation Implementation System

The Company conducts periodic evaluations to monitor the progress of the sustainable finance distribution program, which is carried out on a monthly basis.

e. Tantangan dan Rencana ke Depan

Kondisi ekonomi global yang saat ini menyebabkan penurunan daya beli masyarakat menjadi tantangan besar dalam kesuksesan program Keuangan Berkelanjutan di tahun 2025. Dalam menghadapi situasi ini, Perseroan terus berupaya untuk mempersiapkan berbagai skenario strategi yang adaptif dan efektif. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyaluran pembiayaan keuangan berkelanjutan tetap dapat mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun terdapat tantangan eksternal yang signifikan. Dengan kesiapan yang matang, Perseroan berkomitmen untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan program, mendukung keuangan keberlanjutan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

e. Challenges and Future Plans

The current global economic conditions, which have led to a decline in public purchasing power, present a major challenge to the success of the Sustainable Finance program in 2025. In response to this situation, the Company continues to prepare various adaptive and effective strategic scenarios. This is done to ensure that the distribution of sustainable finance remains on track to meet the established targets, despite significant external challenges. With thorough preparedness, the Company is committed to optimizing the achievement of program objectives, supporting sustainable finance, and contributing to more inclusive economic growth.

2. Program Kedua :

Peningkatan Kapasitas Internal Perseroan

a. Dasar Pemikiran

- Perseroan menilai bahwa peningkatan kapasitas internal Perseroan dalam konteks keuangan berkelanjutan sangat penting untuk keberhasilan program yang dicanangkan. Tanpa memiliki pengetahuan yang mencukupi baik terkait produk, pemahaman risiko dan peluang maka rencana yang disusun akan sulit dicapai.
- Perseroan akan melakukan *training refreshment* kepada karyawan yang berkaitan dengan proses penyaluran pembiayaan yaitu *Credit Analys* dan Komite Kredit. Tujuannya agar pihak tersebut mendapatkan penyegaran tentang keuangan berkelanjutan beserta bagaimana menganalisa risiko dan memitigasinya.
- Selain itu Perseroan akan melakukan edukasi terhadap karyawan kunci di Kantor Cabang tentang pentingnya efisiensi energi listrik, air dan kertas dalam aktifitas operasional sehari-hari.

b. Kegiatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Uraian Kegiatan Description	Penanggung Jawab Division In Charge
Triwulan – I Quarter – I Triwulan – II Quarter – II	Pengembangan kapasitas internal Perseroan : Development of the Company's internal capacity: a. Edukasi kepada karyawan kunci di Kantor Cabang terkait efisiensi listrik, air dan kertas. Education for key employees at the Branch Offices regarding electricity, water and paper efficiency. b. Training *refreshment* kredit analis dan kredit komite terkait peluang, analisa risiko, dan mitigasi risiko keuangan berkelanjutan. Refreshment training for credit analysts and credit committee on opportunities, risk analyst and risk mitigation related to sustainable finance product.	Operasional dengan dukungan *Human Resource* Operation with support from Human Resource Branch Management dengan dukungan *Human Resources* Branch Management with support from Human Resources

c. Sumber Daya

- Dalam rangka menyukseskan program kedua yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas internal mengenai keuangan berkelanjutan, Perseroan telah membentuk struktur organisasi yang berada di bawah kendali Direktorat Sumber Daya Manusia, yaitu Departemen *Learning & Development*. Departemen ini akan memberikan dukungan dalam pelaksanaan program edukasi serta pelatihan penyegaran, yang merupakan tanggung jawab fungsi Operasional dan Manajemen Cabang. Fungsi-fungsi tersebut memiliki tanggung jawab langsung atas keberhasilan pelaksanaan aktivitas peningkatan kapasitas internal ini.
- Perseroan tentunya akan melakukan alokasi dana untuk aktivitas penunjang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka mensukseskan RAKB.
- Dalam pelaksanaan program kedua, Perseroan akan mempertimbangkan penggunaan atau kerjasama dengan pihak profesional jika dibutuhkan berdasarkan analisa kebutuhan yang dilakukan oleh Perseroan.

2. Second Program :

Enhancement of the Company's Internal Capacity

a. Rationale

- The Company believes that enhancing its internal capacity in the context of sustainable finance is crucial for the success of the planned program. Without sufficient knowledge related to products, understanding risks, and identifying opportunities, the planned goals will be difficult to achieve.
- The Company will conduct refreshment training for employees involved in the financing distribution process, namely Credit Analysts and the Credit Committee. The goal is to provide these individuals with an update on sustainable finance and how to analyze and mitigate risks.
- In addition, the Company will educate key employees at the Branch Office about the importance of energy, water, and paper efficiency in daily operational activities.

b. Sustainable Finance Action Plan Activities

c. Resource

- In order to successfully implement the second program related to the development of internal capacity concerning sustainable finance, the Company has established an organizational structure under the control of the Human Resources Directorate, specifically the Learning & Development Department. This Department will support the implementation of education programs and refreshment training, which are the responsibility of the Operations and Branch Management functions. These functions have direct accountability for the successful execution of the internal capacity-building activities.
- The Company will certainly allocate funds for supporting activities in accordance with the needs required in order to succeed the SFAP.
- In the implementation of the second program, the Company will consider the use of or collaboration with professional parties if needed, based on a needs analysis conducted by the Company.

d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Dalam melakukan evaluasi atas keberhasilan program peningkatan kapasitas internal, Perseroan akan melaksanakan *pre-test* dan *post-test* selama pelaksanaan pelatihan *refreshment.* Langkah ini bertujuan untuk mengukur pemahaman dan pengetahuan peserta sebelum dan setelah mengikuti pelatihan, sehingga dapat diketahui sejauh mana efektivitas program tersebut dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas internal karyawan. Hasil dari evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan program pelatihan di masa mendatang, serta memastikan pencapaian tujuan peningkatan kapasitas yang diinginkan.

d. Program Evaluation Implementation System

In evaluating the success of the internal capacity-building program, the Company will conduct pre-tests and post-tests during the refreshment training sessions. This step aims to measure participants' understanding and knowledge before and after the training, in order to assess the effectiveness of the program in enhancing employees' competencies and internal capacity. The results of this evaluation will be used as a basis for improving and developing future training programs, as well as ensuring the achievement of the desired capacity-building objectives.

e. Tantangan dan Rencana ke Depan

Perseroan menghadapi tantangan seperti perbedaan tingkat pemahaman karyawan dalam memahami keuangan berkelanjutan, lokasi Kantor Cabang Perseroan yang terletak di berbagai daerah tersebar di beberapa pulau di Indonesia dan juga perkembangan teknologi yang pesat menjadi tantangan bagi Perseroan saat ini.

Ke depan, Perseroan akan memperkuat program pelatihan dengan pendekatan yang lebih fleksibel, seperti pemanfaatan teknologi sebagai langkah Perseroan memastikan pemerataan jangkauan peningkatan kapasitas internal bagi karyawan yang berada di Kantor Cabang. Evaluasi berkala melalui *pre-test* dan *post-test* juga akan dilakukan untuk memastikan efektivitas pelatihan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan langkah ini, Perseroan berharap dapat meningkatkan kompetensi karyawan dan mencapai tujuan jangka panjang yang diinginkan.

e. Challenges and Future Plans

The Company faces challenges such as differing levels of employee understanding of sustainable finance, the location of Branch Offices spread across several islands in Indonesia, and the rapid development of technology, which are current challenges for the Company.

Going forward, the Company will strengthen its training programs with a more flexible approach, such as leveraging technology to ensure equal access to internal capacity-building for employees across Branch Offices. Periodic evaluations through pre-tests and post-tests will also be conducted to ensure the effectiveness of the training and identify areas that need improvement. With these steps, the Company aims to enhance employee competencies and achieve its long-term objectives.

Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan
Performance Overview of Sustainability Aspect

Kinerja Ekonomi Economy Performance	2022	2023	2024
Pembiayaan Konsumen (Rp-miliar) / Consumer Financing (Rp-billion)	224.00	265.37	320.99
Sewa Pembiayaan (Rp-miliar) / Finance Leases (Rp-billion)	46.35	55.54	64.71
Administrasi dan Provisi (Rp-miliar) / Administration and Provision (Rp-billion)	32.45	45.41	53.01
Penalti (Rp-miliar) / Penalty (Rp-billion)	14.58	20.75	19.73
Bunga (Rp-miliar) / Interest (Rp-billion)	0.39	0.33	0.35
Pendapatan lain-lain (Rp-miliar) / Other Income (Rp-billion)	15.29	13.94	9.86
Jumlah Pendapatan (Rp-miliar) / Total Income (Rp-billion)	333.06	401.34	468.65
Kinerja Lingkungan Environmental Performance	**2022***	**2023***	**2024**
Penggunaan Listrik (kWh) / Electricity Usage (kWh)	501,331	548,080	704,684
Penggunaan Air (m^3) / Water Usage (m^3)	3,072	4,193	5,058
Kinerja Sosial Social Performance	**2022**	**2023**	**2024**
Jumlah Karyawan (orang) / Total Employees (person)	664	711	767
Rasio Perputaran Karyawan (%) / Employee Turn Over Ratio (%)	1.90	1.83	1.49
Rasio Karyawan Perempuan (%) / Female Employee Ratio (%)	21	20.5	19.95

*) Dinyatakan kembali sehubungan dengan adanya proses pengkinian data.
Restated due to the ongoing data updating process.

Pendapatan Pembiayaan Konsumen
Consumer Financing Income

Per 31 Desember 2024 / as of 31 December 2024

Rp
320.99
Miliar / Billion

Pendapatan Sewa Pembiayaan
Finance Lease Income

Per 31 Desember 2024 / as of 31 December 2024

Rp
64.71
Miliar / Billion

Administrasi dan Provisi
Administration and Provision

Per 31 Desember 2024 / as of 31 December 2024

Rp
53.01
miliar / billion

Penalti
Penalty

Per 31 Desember 2024 / as of 31 December 2024

Rp
19.73
miliar / billion

Bunga
Interest

Per 31 Desember 2024 / as of 31 December 2024

Rp
0.35
miliar / billion

Pendapatan Lain-lain
Other Income

Per 31 Desember 2024 / as of 31 December 2024

Rp
9.86
miliar / billion

Jumlah Pendapatan
Total Income

Per 31 Desember 2024 / as of 31 December 2024

Rp
468.65
miliar / billion

Penggunaan Listrik
Electricity Usage

Per 31 Desember 2024 / as of 31 December 2024

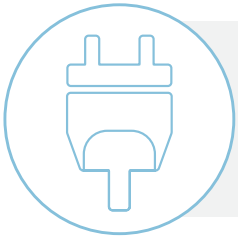

704,684
kWh

Penggunaan Air
Water Usage

Per 31 Desember 2024 / as of 31 December 2024

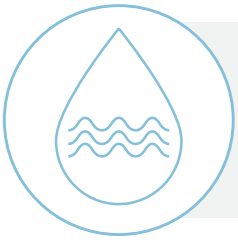

5,058
m^3

Jumlah Karyawan
Number of Employees

Per 31 Desember 2024 / as of 31 December 2024

767
orang / person

Rasio Perputaran Karyawan
Employee Turnover Ratio

Per 31 Desember 2024 / as of 31 December 2024

1.49%

Penjelasan Direksi

The Board of Directors' Remark

"Meskipun berbagai tantangan secara ekonomi dihadapi Perseroan selama tahun 2024, Perseroan tetap berkomitmen menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perseroan optimis melalui kolaborasi dengan para Pemangku Kepentingan, Perseroan akan dapat terus berkembang sehingga dapat berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia.

Despite the various economic challenges faced by the Company during 2024, the Company remains committed to implementing sustainable finance principles in carrying out its business activities. The Company is optimistic that through collaboration with Stakeholders, the Company will be able to continue to grow so that it can contribute to achieving the Sustainable Development Goals (SDG) in Indonesia"

Konosuke Mizuta

Direktur Utama
President Director

Berbagai isu lingkungan masih terus berlanjut sepanjang tahun 2024 seperti perubahan iklim, cuaca ekstrem, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga potensi kenaikan suhu yang akan mengakibatkan banyak bencana alam di berbagai negara di dunia.

Berdasarkan penilaian *United Nations Environment Programme* (UNEP), konflik geopolitik yang terjadi menyebabkan tingkat polusi yang sangat meningkat pada negara-negara yang sedang berkonflik, seperti limbah, puing-puing, dan amunisi yang mencemari tanah, air, dan udara. Degradasi lingkungan ini sangat berpengaruh pada kualitas ekosistemnya.

Pembangunan ekonomi yang menjadi tujuan semua negara di dunia juga sering kali berbanding terbalik dengan kualitas lingkungan hidup. Seiring berkembangnya pembangunan di bidang ekonomi, maka kebutuhan akan energi, lahan, dan sumber daya alam semakin meningkat sehingga menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan hidup.

Various environmental issues whcih continued throughout 2024, such as climate change, extreme weather, loss of biodiversity, and the potential for rising temperatures resulted in many natural disasters in various countries in the world.

Based on the assessment of the United Nations Environment Programme (UNEP), the geopolitical conflicts that occurred have caused very high levels of pollution in countries in conflict, such as waste, debris, and ammunition that pollute the soil, water, and air. This environmental degradation has a significant impact on the quality of its ecosystem.

Economic development, which is the goal of all countries in the world, is also often inversely proportional to the quality of the environment. As economic development develops, the need for energy, land, and natural resources increases, causing environmental degradation.

Kebijakan untuk Merespons Tantangan dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur Keuangan Berkelanjutan. Kebijakan dan prosedur tersebut terdiri dari :

- Kebijakan Keuangan Berkelanjutan
- Strategi Keuangan Berkelanjutan
- Standar Operasional Prosedur ("SOP") Keuangan Berkelanjutan dalam proses pembiayaan

Nilai Keberlanjutan

Nilai Keberlanjutan termaktub dalam visi Perseroan yaitu: "Menjadi Perusahaan yang Menciptakan Dunia yang Berkelanjutan" Dalam mencapai visi tersebut, Perseroan mengimplementasikan strategi antara lain:

- Dukungan penuh manajemen dalam penerapan keuangan berkelanjutan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan tata kelola dalam kegiatan usaha Perseroan;
- Peran aktif karyawan yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya maupun kompetensi penerapan keuangan berkelanjutan sesuai jenjang tugasnya;
- Memperhatikan aspek sosial baik secara internal untuk mewujudkan misi Perseroan dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, maupun secara eksternal di lingkungan sosial Kantor Pusat dan Kantor Cabang sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Perseroan dan menjaga risiko reputasi;
- Memperhatikan aspek ramah lingkungan di internal Perseroan dengan berbagai upaya untuk efisiensi energi, efisiensi penggunaan air, kertas & plastik.

Respon Terhadap Isu Terkait Keuangan Berkelanjutan

Dalam acara *International Sustainability Forum* (ISF) 2024 yang diselenggarakan pada bulan September 2024 di Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan komitmen yang serius terhadap penanganan masalah iklim, yaitu dengan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan cara mengurangi emisi CO2, yaitu menuju net zero emission economy di tahun 2060. Pemerintah merumuskan berbagai kebijakan untuk mendukung komitmen ini. Pemerintah juga berupaya untuk terus membangun infrastruktur dalam program elektrifikasi Pemerintah Indonesia juga telah memberikan berbagai stimulus untuk penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), bea masuk, insentif PPN ditanggung Pemerintah hingga dukungan infrastruktur dengan memperbanyak Stasiun Pengisian Daya Listrik Umum (SPKLU) untuk kendaraan berbasis listrik.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), tren penjualan mobil listrik selama 5 tahun ke belakang meningkat sangat signifikan.

Data Penjualan Mobil Listrik di Indonesia 5 Tahun Terakhir:

Policies to Respond to Challenges in Fulfilling Sustainability Strategy

The Company has policies and procedures for Sustainable Finance. These policies and procedures consist of:

- Sustainable Finance Policy
- Sustainable Finance Strategy
- Sustainable Finance Standard Operating Procedure ("SOP") in the financing process

Sustainability Values

Sustainability Values are contained in the Company's vision, namely: "Becoming a Company that Creates a Sustainable World" In achieving this vision, the Company implements strategies including:

- Full support from management in implementing sustainable finance by balancing economic, social, environmental and governance aspects in the Company's business activities;
- Active role of employees who have the skills needed to carry out their duties and responsibilities as well as competency in implementing sustainable finance according to their level of duty;
- Paying attention to social aspects both internally to realize the Company's mission in developing competent human resources, as well as externally in the social environment of the Head Office and Branch Offices so as to increase public trust in the Company and maintain reputational risk;
- Paying attention to environmentally friendly aspects within the Company with various efforts for energy, water usage, paper & plastic usage efficiency.

Response to Issues Related to Sustainable Finance

At the 2024 International Sustainability Forum (ISF) held in September 2024 in Jakarta, Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati expressed a serious commitment to addressing climate issues, namely by supporting the transition to a low-carbon economy while encouraging inclusive and sustainable economic growth by reducing CO2 emissions, namely towards a net zero emission economy in 2060. The Government has formulated various policies to support this commitment. The Government is also trying to continue building infrastructure in the electrification program. The Indonesian Government has also provided various stimuli for the use of Battery-Based Electric Vehicles (BEV) such as Value Added Tax (VAT) incentives, Luxury Goods Sales Tax (PPnBM), import duties, VAT incentives borne by the Government to infrastructure support by increasing Public Electric Charging Stations (PECS) for electric vehicles.

Based on data from the Association of Indonesian Automotive Industries (Gaikindo), the trend in electric car sales over the past 5 years has increased very significantly.

Electric Car Sales Data in Indonesia for the Last 5 Years:

Tahun Year	Total Penjualan Total Sales
2020	125 unit (0,02% dari total *wholesales* 532.027 unit) 125 unit (0.02% from total wholesales 532,027 unit)
2021	687 unit (0,07% dari total *wholesales* 887.202 unit) 687 unit (0.07% from total wholesales 887,202 unit)
2022	10.327 unit (0,98% dari total *wholesales* 1.048.040 unit) 10,327 unit (0.98% from total wholesales 1,048,040 unit)
2023	17.051 unit (1,69% dari total *wholesales* 1.005.802 unit) 17,051 unit (1.69% from total wholesales 1,005,802 unit)
2024	43.188 unit (4,98% dari total *wholesales* 865.723 unit) 43,188 unit (4.98% from total wholesales 865,723 unit)

Namun berdasarkan angka penjualan tersebut, jika dibandingkan dengan data penjualan mobil nasional, angka tersebut masih sangat minim. Pada tahun 2024, penjualan KLBB hanya 4,98% dari total penjualan mobil di Indonesia.

Untuk itu masih diperlukan kolaborasi antara Pemerintah, pemangku kepentingan dan pihak swasta agar dapat memajukan transisi energi menuju ketahanan energi yang mandiri dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Komitmen Direksi dalam Menerapkan Keuangan Berkelanjutan

Perseroan berkomitmen untuk selalu menjalankan usahanya dengan selalu mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan operasional kantor, Perseroan senantiasa berusaha melindungi dampak keuangan, lingkungan dan sosial dengan bantuan kebijakan yang relevan. Perseroan memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ("RAKB"), yang secara khusus memandu berbagai langkah perlindungan lingkungan dan sosial serta memastikan bahwa para pemangku kepentingan dapat benar-benar merasakan manfaat berkelanjutan dari operasi dan bisnis Perseroan.

Selain itu, Direksi telah melakukan peninjauan yang komprehensif atas penyusunan Laporan Keberlanjutan 2024 ini yang diharapkan menjadi acuan atas komitmen Perseroan terhadap Keberlanjutan. Direksi senantiasa optimis, bahwa ke depan Perseroan dapat mencapai kemajuan dan pertumbuhan terkait implementasi keberlanjutan.

Pencapaian Kinerja

Perseroan memiliki sertifikat ISO 27001:2013 dengan Scope of certification: Processing of data population verification through web service API. Hal ini merupakan komitmen nyata Perseroan terkait sistem manajemen keamanan informasi guna menetapkan, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi.

Pada tahun 2025, Perseroan akan memperbaharui sertifikasi ini dengan ISO 27001:2022 sebagai bentuk komitmen Perseroan untuk meningkatkan pengelolaan risiko terkait keamanan data yang dimiliki atau ditangani oleh Perseroan seraya mewujudkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

However, based on these sales figures, when compared to national car sales data, these figures are still very minimal. In 2024, BEV sales were only 4.98% of total car sales in Indonesia.

Therefore, collaboration between the Government, stakeholders and the private sector is still needed in order to advance the energy transition towards independent energy security and sustainable economic growth.

Board of Directors' Commitment to Implementing Sustainable Finance

The Company is committed to always running its business by always considering economic, social and environmental aspects. Therefore, in carrying out office operational activities, the Company always tries to protect the financial, environmental and social impacts with the help of relevant policies. The Company has a Sustainable Finance Action Plan ("SFAP"), which specifically guides various environmental and social protection measures and ensures that stakeholders can truly feel the sustainable benefits of the Company's operations and business.

In addition, the Board of Directors has conducted a comprehensive review of the preparation of this 2024 Sustainability Report which is expected to be a reference for the Company's commitment to Sustainability. The Board of Directors is always optimistic that in the future the Company can achieve progress and growth related to the implementation of sustainability.

Performance Achievements

The Company has an ISO 27001:2013 certificate with the Scope of certification: Processing of data population verification through web service API. This is a real commitment from the Company regarding the information security management system in order to establish, implement, maintain, and continuously improve the information security management system.

In 2025, the Company will renew this certification with ISO 27001:2022 as a form of the Company's commitment to improve the management of risks related to data security owned or handled by the Company while realizing Good Corporate Governance practices.

Tantangan dalam Menerapkan Keuangan Berkelanjutan

Sebagai langkah proaktif dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang, Perseroan secara adaptif menyesuaikan strategi bisnis serta tata kelola. Perseroan terus mengembangkan diri secara konsisten. Perseroan senantiasa mengedepankan kepentingan seluruh Pemangku Kepentingan untuk mencapai strategi bisnis yang berkelanjutan. Perseroan optimis akan dapat terus berkembang sehingga dapat berkontribusi dalam pencapaian TPB di Indonesia.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Sepanjang tahun 2024, Perseroan telah meningkatkan kinerja dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan.

Jumlah Aset Perseroan pada tahun 2024 mencapai Rp3.210,52 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar 14,92% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya. Jumlah Liabilitas pada tahun 2024 mencapai Rp2.466,53 miliar, atau meningkat sebesar 20,72% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Jumlah Ekuitas pada tahun 2024 mencapai Rp743,99 miliar, menurun sebesar 0,86% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya.

Pada sisi profitabilitas, Jumlah Pendapatan Perseroan selama tahun 2024 tercatat sebesar Rp468,65 miliar, meningkat sebesar 16,77%, dan Jumlah Beban Perseroan sebesar Rp473,69 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 39,28%. Per 31 Desember 2024, Perseroan mencatatkan Rugi Tahun Berjalan sebesar –Rp2,16 miliar atau menurun sebesar 103,53% dari tahun sebelumnya. Dari segi kualitas aset, Perseroan masih dapat menjaga kualitas piutang pembiayaan sesuai ketentuan OJK yang berlaku dengan mencatatkan Rasio Piutang Pembiayaan Bermasalah (NPF-neto) sebesar 0,42% di tahun 2024 atau mengalami sedikit penurunan kualitas dibandingkan dengan tahun 2023.

Sebagai bagian dari upaya mendukung energi terjangkau dan bersih, Perseroan senantiasa mendukung perkembangan portofolio kredit berkelanjutan salah satunya dengan menyalurkan pembiayaan pada kendaraan listrik. Pembiayaan dalam kategori keuangan berkelanjutan telah dimasukkan ke dalam laporan bulanan Data Penyaluran Pembiayaan pada Kendaraan Listrik yang disampaikan ke OJK.

Perseroan juga menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan yang bergerak di bidang energi baru dan terbarukan, penyaluran pembiayaan atas mesin pengolahan limbah padat maupun cair, seperti minyak oli bekas pakai yang dapat digunakan kembali pada proses produksi. Hal ini tentunya termasuk dalam upaya efisiensi energi berdasarkan asas manfaat limbah. Perseroan juga berkomitmen untuk berperan aktif dalam pengembangan sektor UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Melalui pemberian kredit yang mudah diakses dan bersaing, Perseroan mendukung UMKM dalam mengembangkan usahanya, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Salah satu inisiatif Perseroan terkait pengelolaan lingkungan adalah penggunaan gedung yang bersertifikat green building untuk Kantor Pusat Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan

Challenges in Implementing Sustainable Finance

As a proactive step in facing challenges and taking advantage of opportunities, the Company adaptively adjusts its business strategy and governance. The Company continues to develop itself consistently. The Company always prioritizes the interests of all Stakeholders to achieve a sustainable business strategy. The Company is optimistic that it will continue to grow so that it can contribute to achieving the SDG in Indonesia.

Implementation of Sustainable Finance

Throughout 2024, the Company has improved its performance in terms of economy, social and environment.

The Company's Total Assets in 2024 reached Rp3,210.52 billion, or increased by 14.92% compared to the position in the previous year. The Total Liabilities in 2024 reached Rp2,466.53 billion, or increased by 20.72% compared to the position in the previous year. Meanwhile, the Total Equity in 2024 reached Rp743.99 billion, decreased by 0.86% compared to the position in the previous year.

In terms of profitability, the Company's Total Income during 2024 was recorded at Rp468.65 billion, an increase of 16.77%, and the Company's Total Expenses were Rp473.69 billion or an increase of 39.28%. As of December 31, 2024, the Company recorded a Current Year Loss of -Rp2.16 billion or decreased by 103.53% from the previous year. In terms of asset quality, the Company is still able to maintain the quality of financing receivables in accordance with the applicable provisions of the OJK by recording a Non-Performing Financing Receivables Ratio (NPF-net) of 0.42% in 2024 or experiencing a slight decline in quality compared to 2023.

As part of its efforts to support affordable and clean energy, the Company continues to support the development of a sustainable credit portfolio, one of which is by channeling financing for electric vehicles. Financing in the sustainable finance category has been included in the monthly report on Electric Vehicle Financing Distribution Data submitted to the OJK.

The Company also channels financing to companies engaged in new and renewable energy, channeling financing for solid and liquid waste processing machines, such as used oil that can be reused in the production process. This is certainly included in energy efficiency efforts based on the principle of waste benefits. The Company is also committed to playing an active role in the development of the MSME sector, which is the backbone of the Indonesian economy. By providing easily accessible and competitive credit, the Company supports MSMEs in developing their businesses, creating jobs, and encouraging inclusive economic growth.

One of the Company's initiatives related to environmental management is the use of a green building certified building for the Company's Head Office. In carrying out its operational activities,

operasionalnya, Perseroan juga senantiasa memperhatikan aspek ramah lingkungan seperti efisiensi energi, penggunaan air, kertas dan plastik.

the Company also always pays attention to environmentally friendly aspects such as energy efficiency, use of water, paper and plastic.

Sebagai bentuk komitmen Perseroan terhadap sosial dan lingkungan, Perseroan telah melaksanakan kegiatan literasi keuangan untuk penggunaan produk dan layanan jasa keuangan melalui pengembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada tanggal 18 Oktober 2024 bertempat di SMAN 91, Jakarta Timur. Kegiatan ini diikuti 250 Siswa/i beserta guru. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka pemenuhan amanah Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No. 3 Tahun 2023, tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat.

As a form of the Company's commitment to social and environmental issues, the Company has carried out financial literacy activities for the use of financial products and services through the development of the use of information and communication technology on October 18, 2024 at SMAN 91, East Jakarta. This activity was attended by 250 students and teachers. This activity was also carried out in order to fulfill the mandate of the Financial Services Authority through POJK No. 3 of 2023, concerning the Improvement of Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the Community.

Bersamaan dengan kegiatan ini, Perseroan juga memberikan sarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pemberian sarana pendukung kegiatan belajar mengajar ini diterima langsung oleh Ibu Widyandari Eka Dhewadjanti, MPd selaku Kepala Sekolah. Perseroan berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia terutama generasi muda. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Perseroan terhadap pengembangan sosial dan lingkungan Perseroan. Perseroan merealisasikan anggaran biaya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebesar Rp11.952.980.

Along with this activity, the Company also provided facilities to support teaching and learning activities in schools. The provision of supporting facilities for teaching and learning activities was received directly by Mrs. Widyandari Eka Dhewadjanti, MPd as the Principal. The Company hopes that through this activity it can make a positive contribution to the community, improve the quality of education, and develop the quality of human resources, especially the younger generation. This activity was carried out as a form of the Company's commitment to the development of the Company's social and environmental issues. The Company has realized the budget for the Social and Environmental Responsibility program of Rp11,952,980.

Perseroan telah melakukan serangkaian langkah mitigasi risiko sepanjang tahun 2024 seperti:

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi melalui rapat-rapat berkala.
b. Penyusunan Pedoman dan SOP Keuangan Berkelanjutan.
c. Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kompetensi karyawan pada unit kerja terkait.
d. Kecukupan pengendalian internal.

The Company has taken a series of risk mitigation steps throughout 2024 such as:

a. Active supervision of the Board of Commissioners in regards to the implementation of Sustainable Finance Action by Board of Directors through regular meetings.
b. Preparation of Sustainable Finance Guidelines and SOPs.
c. Improving the capacity, quality and competence of employees in related work units.
d. Adequacy of internal control.

Peristiwa Penting Berkaitan dengan Keberlanjutan

Di tahun 2024, Perseroan telah memiliki portofolio yang dapat dikelompokan dalam pembiayaan keuangan berkelanjutan. Hal ini merupakan capaian yang akan menjadi acuan untuk terus dikembangkan ke depan agar portofolio pembiayaan yang berwawasan lingkungan semakin bertumbuh. Adapun kontribusi portfolio Keuangan Berkelanjutan per 31 Desember 2024 tercatat sebesar 10,78% dari keseluruhan portofolio pembiayaan dan meningkat 3,61% dibandingkan tahun sebelumnya.

Important Events Related to Sustainability

In 2024, the Company has a portfolio that can be grouped into sustainable finance financing. This is an achievement that will be a reference for continued development in the future so that there are more environmentally friendly financing portfolio continue to grow. The contribution of the Sustainable Finance portfolio as of December 31, 2024 was recorded at 10.78% of the total financing portfolio and increased by 3.61% compared to the previous year.

Perseroan senantiasa berkomitmen dalam mengimplementasikan strategi keberlanjutan yang diterapkan guna mendukung program Pemerintah, seraya menerapkan strategi yang dapat berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terstruktur dan inklusif.

The Company is always committed to implementing sustainability strategies that are applied to support Government programs, while implementing strategies that can contribute significantly to sustainable, structured and inclusive economic growth.

Ke depan, Perseroan akan senantiasa berupaya meningkatkan portofolio pembiayaan keuangan berkelanjutan dan mengembangkan sistem pelaporan keuangan berkelanjutan.

In the future, the Company will continue to strive to increase the sustainable finance financing portfolio and develop a sustainable finance reporting system.

Strategi Pencapaian Target

Perseroan secara khusus telah berkontribusi untuk mengurangi emisi dengan meningkatkan portofolio yang dapat dikelompokkan dalam Keuangan Berkelanjutan.

Manajemen risiko dalam penerapan keuangan keberlanjutan menjadi semakin krusial bagi Perseroan, khususnya dalam mengelola NPF. Dalam konteks ini, penerapan prinsip keberlanjutan tidak hanya mencakup pertimbangan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST), tetapi juga berperan dalam memperkuat ketahanan portofolio pembiayaan terhadap potensi risiko kredit.

Melalui integrasi faktor keberlanjutan dalam proses penilaian dan seleksi debitur, Perseroan dapat memitigasi kemungkinan terjadinya NPF yang diakibatkan oleh kegiatan usaha yang tidak berkelanjutan atau rentan terhadap perubahan regulasi serta dampak lingkungan yang ekstrem.

Lebih lanjut, manajemen risiko yang selaras dengan prinsip keuangan keberlanjutan tentunya mendorong Perseroan untuk membangun sistem pengendalian internal yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika risiko. Hal ini mencakup penerapan kebijakan pembiayaan yang mendukung sektor-sektor ramah lingkungan, penguatan proses pemantauan atas kualitas pembiayaan, serta peningkatan kapasitas SDM dalam mengenali risiko-risiko keberlanjutan. Dengan demikian, Perseroan tidak hanya mampu menjaga kualitas aset dan menekan rasio NPF, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya sistem keuangan yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Berkaitan dengan komitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, Perseroan menargetkan untuk mencapai visi keuangan berkelanjutan pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan baik faktor eksternal maupun faktor internal seperti kondisi keuangan, kapasitas teknis dan kapasitas organisasi.

Tata Kelola Keberlanjutan

Perseroan terus berusaha meningkatkan kinerja tata kelola keberlanjutan untuk melindungi seluruh pemangku kepentingan. Dalam pengelolaan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, Perseroan telah memiliki dasar kerja yaitu peraturan Perseroan, pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (“GCG”) dan pakta integritas yang harus ditaati oleh segenap manajemen dan karyawan. Seluruh kegiatan usaha Perseroan dilaksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, Perseroan menetapkan beberapa faktor penentu dalam keberhasilan Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Bisnis
   Rencana Strategis Bisnis memiliki pengaruh besar terhadap Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, khususnya dalam pengembangan portofolio Keuangan Berkelanjutan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menjadi prioritas utama Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk memperluas pembiayaan kepada UMKM secara berkelanjutan dengan senantiasa memperhatikan peluang dan hambatan yang mungkin terjadi. Dengan

Target Achievement Strategy

The Company has specifically contributed to reducing emissions by increasing the portfolio that can be grouped into Sustainable Finance.

Risk management in the implementation of sustainable finance became increasingly crucial for the Company, particularly in managing the risk of NPF. In this context, the application of sustainability principles not only involved the consideration of Environmental, Social, And Governance (ESG) aspects, but also played a key role in strengthening the resilience of the financing portfolio against potential credit risks.

By integrating sustainability factors into the debtor assessment and selection process, the Company mitigated the likelihood of NPF arising from unsustainable business activities or those vulnerable to regulatory changes and extreme environmental impacts.

Furthermore, risk management aligned with sustainable finance principles encouraged the Company to develop internal control systems that were more adaptive and responsive to dynamic risks. This included the implementation of financing policies that supported environmentally friendly sectors, the strengthening of monitoring processes over financing quality, and the enhancement of human resource capacity in identifying sustainability-related risks. In doing so, the Company not only maintained asset quality and reduced the NPF ratio, but also contributed to the creation of a more stable, inclusive, and sustainable financial system in the long term.

Related to the commitment to implement sustainable finance, the Company targets to achieve a sustainable finance vision by 2025 by considering both external and internal factors such as financial conditions, technical capacity and organizational capacity.

Sustainability Governance

The Company continues to strive to improve the performance of sustainability governance to protect all stakeholders. In managing environmental, social, and governance aspects, the Company has a working basis, namely the Company’s regulations, Good Corporate Governance (“GCG”) guidelines and an integrity pact that must be adhered to by all management and employees. All of the Company’s business activities are carried out in compliance with applicable laws and regulations.

In preparing the Sustainable Finance Action Plan, the Company has determined several determining factors in the success of the Sustainable Finance Action as follows:

1. Business Strategic Plan
   The Business Strategic Plan has a major influence on the Sustainable Finance Action Plan, especially in developing the Sustainable Finance portfolio for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), which is the Company’s main priority. The Company is committed to expanding financing to MSMEs in a sustainable manner by always paying attention to opportunities and obstacles that may occur. By integrating sustainable finance into its business strategy, the

mengintegrasikan keuangan berkelanjutan ke dalam strategi bisnis, Perseroan bertujuan untuk mendukung pertumbuhan UMKM yang lebih hijau dan berkelanjutan, sekaligus berperan dalam menciptakan dampak positif bagi perekonomian dan lingkungan. Inisiatif ini juga sejalan dengan pencapaian TPB, memperkuat komitmen Perseroan terhadap ekonomi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan

Company aims to support the growth of greener and more sustainable MSMEs, while also playing a role in creating a positive impact on the economy and the environment. This initiative is also in line with the achievement of SDG, strengthening the Company's commitment to a more inclusive and environmentally friendly economy.

Selain itu Perseroan juga berkomitemen terhadap penerapan efisiensi energi, air dan pengurangan penggunaan kertas yang semuanya menjadi bagian integral dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang melibatkan seluruh lini organisasi.

In addition, the Company is also committed to implementing energy, water efficiency and reducing paper use, all of which are integral parts of the Sustainable Finance Action Plan that involves all levels of the organization.

2. Kapasitas Organisasi
Kapasitas organisasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam implementasi RAKB. Sebuah organisasi yang memiliki kapasitas yang kuat, baik dari segi sumber daya manusia, sistem, maupun infrastruktur, akan lebih mampu merancang dan menjalankan kebijakan yang mendukung tujuan keberlanjutan secara efektif. Kapasitas ini mencakup kemampuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan ke dalam strategi dan operasional sehari-hari, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan standar keberlanjutan yang diharapkan. Peningkatan kapasitas organisasi juga berarti pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola risiko dan peluang yang muncul seiring dengan penerapan RAKB, seperti pemahaman tentang produk keuangan berkelanjutan, pengelolaan risiko lingkungan, serta pengukuran dan pelaporan dampak sosial dan lingkungan. Organisasi yang memiliki kapasitas yang baik dalam hal inovasi, kolaborasi antar unit, serta adaptasi terhadap perubahan pasar dan regulasi, akan lebih mampu menciptakan nilai jangka panjang melalui implementasi keuangan berkelanjutan.

2. Organizational Capacity
Organizational capacity is one of the factors that determines the success of implementing the SFAP. An organization that has strong capacity, both in terms of human resources, systems, and infrastructure, will be better able to design and implement policies that support sustainability goals effectively. This capacity includes the ability to integrate sustainable finance principles into daily strategies and operations, and ensure that every step taken is in accordance with the expected sustainability standards. Increasing organizational capacity also means developing the skills and knowledge needed to manage the risks and opportunities that arise along with the implementation of SFAP, such as understanding sustainable financial products, environmental risk management, and measuring and reporting social and environmental impacts. Organizations that have good capacity in terms of innovation, collaboration between units, and adaptation to market and regulatory changes will be better able to create long-term value through the implementation of sustainable finance.

Perseroan dalam mensukseskan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan senantiasa meningkatkan kapasitas organisasi baik dalam konteks edukasi maupun struktur organisasi yang telah ada.

In making the SFAP a success, the Company continues to improve the organization's capacity both in the context of education and the existing organizational structure.

3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis
Faktor kondisi keuangan dan kapasitas teknis Perseroan memainkan peran yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan RAKB. Meskipun saat ini Perseroan membukukan rugi, Perseroan masih memiliki likuiditas yang memadai dan struktur permodalan yang kuat. Hal ini memungkinkan Perseroan senantiasa mengembangkan portofolio Keuangan Berkelanjutan dan pembiayaan UMKM.

3. Financial Condition and Technical Capacity
The Company's financial condition and technical capacity factors play a very important role in the smooth implementation of the SFAP. Although the Company is currently posting a loss, the Company still has adequate liquidity and strong capital structure. This allows the Company to continue to develop its Sustainable Finance portfolio and MSME financing.

Di sisi lain, kapasitas teknis Perseroan juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi RAKB. Dengan tim yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan berkelanjutan, serta dukungan teknologi dan sistem yang memadai, Perseroan dapat mengelola risiko dan peluang yang muncul dengan lebih efektif. Kapasitas teknis yang

On the other hand, the Company's technical capacity is also a determining factor in the success of SFAP implementation. With a team that has expertise in sustainable finance, as well as adequate technology and system support, the Company can manage emerging risks and opportunities more effectively. Strong technical capacity allows the

kuat memungkinkan Perseroan untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan keuangan, serta untuk memastikan bahwa pelaporan dan pengelolaan risiko dilakukan.

4. Kerja Sama dengan Pihak Eksternal
Dalam mendukung pelaksanaan RAKB, terutama dalam hal peningkatan kapasitas, kualitas, dan kompetensi, Perseroan senantiasa terbuka untuk menjajaki peluang kerjasama dengan pihak eksternal yang memiliki keahlian profesional dan dapat memberikan manfaat signifikan bagi kemajuan Perseroan. Meskipun demikian, pemanfaatan potensi dan sumber daya internal Perseroan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap upaya pengembangan, dengan mempertimbangkan bahwa kekuatan internal adalah fondasi yang tak ternilai dalam mewujudkan tujuan jangka panjang yang berkelanjutan.

5. Strategi Komunikasi
Strategi komunikasi merupakan salah satu elemen penting dalam implementasi RAKB, karena komunikasi yang efektif dapat memastikan pemahaman dan dukungan yang luas dari semua pemangku kepentingan. Dalam konteks RAKB, strategi komunikasi difokuskan untuk membangun kesadaran, transparansi, dan kolaborasi antara pihak internal dan eksternal, termasuk karyawan, pelanggan, investor, regulator, serta masyarakat luas.

Langkah pertama dalam strategi komunikasi adalah penyusunan pesan yang jelas dan konsisten terkait tujuan dan inisiatif keberlanjutan yang ingin dicapai melalui RAKB. Pesan tersebut harus dapat menggambarkan dengan tepat komitmen Perseroan terhadap keberlanjutan, serta manfaat yang diharapkan tidak hanya bagi Perseroan, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan. Komunikasi ini juga perlu dilakukan secara transparan, dengan menyampaikan kemajuan yang dicapai, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan keberlanjutan.

6. Sistem Monitoring, Evaluasi dan Mitigasi
Dalam mendukung kelancaran implementasi RAKB, Perseroan telah menetapkan sistem monitoring, evaluasi, dan mitigasi risiko yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan keberlanjutan yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Perseroan mengadopsi pendekatan three lines model, yang memisahkan fungsi-fungsi utama untuk menciptakan struktur pengawasan dan pengendalian yang jelas dan efektif. Evaluasi secara berkala dilakukan oleh Perseroan untuk memastikan berjalannya RAKB sesuai dengan program yang telah dicanangkan.

7. Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Isu Keuangan Berkelanjutan
Perseroan senantiasa memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam perencanaan dan penerapan RAKB seperti:
   a. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 51/ POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga

Company to conduct in-depth analysis of the social and environmental impacts of each financial decision, as well as to ensure that reporting and risk management are carried out.

4. Cooperation with External Parties
In supporting the implementation of the SFAP, especially in terms of increasing capacity, quality, and competence, the Company is always open to exploring opportunities for cooperation with external parties who have professional expertise and can provide significant benefits for the Company's progress. Nevertheless, the utilization of the Company's internal potential and resources remains a top priority in every development effort, considering that internal strength is an invaluable foundation in realizing sustainable long-term goals.

5. Communication Strategy
Communication strategy is one of the important elements in the implementation of the SFAP, because effective communication can ensure broad understanding and support from all stakeholders. In the context of the SFAP, the communication strategy is focused on building awareness, transparency, and collaboration between internal and external parties, including employees, customers, investors, regulators, and the wider community.

The first step in the communication strategy is the preparation of a clear and consistent message related to the sustainability goals and initiatives to be achieved through the SFAP. The message must be able to accurately describe the Company's commitment to sustainability, as well as the benefits expected not only for the Company, but also for society and the environment. This communication also needs to be carried out transparently, by conveying the progress achieved, challenges faced, and steps to be taken to achieve sustainability goals.

6. Monitoring, Evaluation and Mitigation System
In supporting the smooth implementation of the SFAP, the Company has established a comprehensive monitoring, evaluation, and risk mitigation system to ensure that every step taken is in line with the sustainability goals that have been set. As part of this effort, the Company has adopted a three lines model approach, which separates the main functions to create a clear and effective monitoring and control structure. Periodic evaluations are conducted by the Company to ensure that the SFAP is running in accordance with the planned program.

7. Government Policies Related to Sustainable Finance Issues
The Company always pays attention to policies issued by the Government in the planning and implementation of the SFAP such as:

   a. Financial Services Authority Regulation Number 51/ POJK.03/2017 dated July 27, 2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial

Jasa Leuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

b. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Peningkatan Literasi dan inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

Services Institutions, Issuers and Public Companies.

b. Financial Services Authority Regulation Number 3 Year 2023 dated February 28, 2023 concerning the Improvement of Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and/or the Community.

Pemanfaatan Peluang dan Prospek Usaha

Stabilitas Sistem Keuangan tahun 2024 tetap terjaga di tengah risiko perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan ini didukung oleh kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien, serta koordinasi dan sinergi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terus diperkuat. Dengan perkembangan tersebut, kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik secara keseluruhan tahun 2024 terjaga baik dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

OJK sebagai institusi yang melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Sebelumnya OJK juga telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia tahun 2015 – 2019 pada bulan Desember 2014.

Sebagai kelanjutan, di tahun 2021 OJK telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025) sebagai panduan untuk mempercepat penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola di Indonesia yang berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan mendorong pengembangan kerja sama dengan pihak lain. Selanjutnya melalui Siaran Pers tanggal 5 Oktober 2021 OJK juga telah mengumumkan pembentukan Task Force Keuangan Berkelanjutan di Sektor Jasa Keuangan (SJK).

Situasi Eksternal Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Sosial

Kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 membuat prospek ekonomi menjadi tidak menentu dan guncangan perekonomian global. Konflik geopolitik dan perubahan iklim yang berkepanjangan turut menyumbang dampak signifikan pada perekonomian global, nasional, dan berdampak langsung pada Perseroan.

Untuk itu Perseroan mengimplementasikan strgategi-strategi konservatif dan adaptif dengan mengedepankan budaya risiko, prinsip kehati-hatian, pelindungan konsumen serta memastikan terlaksananya pengendalian internal pada setiap fungsi organisasi.

Terkait aspek lingkungan, berbagai infrastruktur kebijakan strategis pada level nasional terus berkembang seiring dengan berprosesnya bursa karbon Indonesia (“IDXCarbon”). Tahun 2024 merupakan tahun pertama beroperasinya IDXCarbon dan berdasarkan Siaran Pers Bursa Efek Indonesia (“BEI”), IDXCarbon telah menorehkan pencapaian positif. BEI akan terus berupaya untuk mendorong likuiditas pasar karbon dari sisi permintaan dan pasokan baik pasar domestik maupun internasional sesuai dengan peraturan dan regulasi pemerintah. Selain itu, BEI berinisiatif untuk menyediakan informasi ESG

Utilization of Business Opportunities and Prospects

Financial System Stability in 2024 remains maintained amidst the risk of a global economic slowdown and uncertainty in the global financial market. This development is supported by resilient domestic economic and financial system conditions, as well as continuously strengthened Financial System Stability Committee (KSSK) coordination and synergy. With these developments, the overall domestic economic and financial system conditions in 2024 are well maintained and able to support inclusive and sustainable economic growth.

OJK as an institution that regulates and supervises the financial services sector has issued OJK Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies. Previously, OJK has also issued a Sustainable Finance Roadmap in Indonesia for 2015-2019 in December 2014.

As a continuation, in 2021 OJK has issued a Sustainable Finance Roadmap Phase II (2021-2025) as a guide to accelerate the implementation of environmental, social, and governance principles in Indonesia that focuses on creating a comprehensive sustainable finance ecosystem, involving all relevant parties and encouraging the development of cooperation with other parties. Furthermore, through a Press Release dated October 5, 2021, OJK has also announced the formation of a Sustainable Finance Task Force in the Financial Services Sector (SJK).

External Economic, Environmental, and Social Situation

The reciprocal tariff policy set by US President Donald Trump on April 2, 2025 has made the economic outlook uncertain and the global economy unstable. Prolonged geopolitical conflicts and climate change have also contributed significantly to the global and national economy and have a direct impact on the Company.

Therefore, the Company implements conservative and adaptive strategies by prioritizing risk culture, the principle of prudence, consumer protection and ensuring the implementation of internal control in every function of the organization.

Regarding the environmental aspect, various strategic policy infrastructures at the national level continue to develop along with the progress of the Indonesian carbon exchange (“IDXCarbon”). 2024 will be the first year of IDXCarbon’s operation and based on the Indonesia Stock Exchange (“IDX”) Press Release, IDXCarbon has made positive achievements. IDX will continue to strive to encourage carbon market liquidity from the demand and supply side of both domestic and international markets in accordance with government rules and regulations. In addition, IDX has taken the initiative to provide ESG Metric information

Metric di pasar modal yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi kinerja ESG perusahaan dan memudahkan proses pengambilan keputusan investasi investor. Pelaporan ESG dapat memberikan pandangan komprehensif tentang kinerja ESG perusahaan kepada para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya yaitu investor, regulator, pelanggan, dan karyawan. Pengembangan ESG Reporting akan membantu dalam mengatasi tantangan integrasi ESG di Pasar Modal Indonesia melalui peningkatan konsistensi data dan peningkatan komparabilitas dari pelaporan ESG Perusahaan Tercatat. ESG Metric yang digunakan dalam pelaporan form E020 telah mengadopsi standar ASEAN Exchanges Common ESG Metric yang diterapkan di platform pelaporan Bursa-Bursa Efek di Kawasan ASEAN. ESG metric tersebut telah dibangun oleh ASEAN Exchanges dan selaras dengan POJK51/POJK.03/2017. Selain itu, dalam pelaporan emisi di form E020, juga menyelaraskan dengan GHG Protocol dan ISO 14064. Dalam menyampaikan Laporan Keberlanjutan ini, Perseroan juga akan menyampaikan ESG Metric melalui SPE-IDXnet form E020.

in the capital market which aims to increase the transparency of the company's ESG performance and facilitate the investor's investment decision-making process. ESG reporting can provide a comprehensive view of the company's ESG performance to stakeholders, including investors, regulators, customers, and employees. The development of ESG Reporting will help overcome the challenges of ESG integration in the Indonesian Capital Market by increasing data consistency and increasing the comparability of Listed Company ESG reporting. The ESG Metric used in the E020 form reporting has adopted the ASEAN Exchanges Common ESG Metric standard which is applied on the reporting platforms of Stock Exchanges in the ASEAN Region. The ESG metric has been built by ASEAN Exchanges and is in line with POJK51/POJK.03/2017. In addition, in reporting emissions in form E020, it also aligns with the GHG Protocol and ISO 14064. In submitting this Sustainability Report, the Company will also submit ESG Metrics through SPE-IDXnet form E020.

Pada dimensi sosial, di tengah kemajuan teknologi finansial serta maraknya pinjaman online yang tidak berizin dan diawasi OJK menyebabkan edukasi dan literasi keuangan sangatlah penting dan menjadi aspek yang sangat krusial bagi masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh oknum tidak bertanggung jawab. Namun demikian, literasi keuangan di Indonesia yang masih tergolong rendah tentunya membutuhkan perbaikan melalui implementasi keberlanjutan dengan beragam kegiatan edukatif terkait peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan yang dilakukan secara berkala sebagai bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan. Ke depan, Perseroan akan senantiasa meningkatkan kegiatan edukatif terkait peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan secara lebih luas.

In the social dimension, amidst advances in financial technology and the rise of online loans that are not licensed and supervised by OJK, financial education and literacy are very important and are very crucial aspects for the community so othat they are not easily deceived by irresponsible individuals. However, financial literacy in Indonesia, which is still relatively low, certainly requires improvement through the implementation of sustainability with various educational activities related to increasing financial literacy and financial inclusion which are carried out periodically as part of the Company's social and environmental responsibility activities. In the future, the Company will continue to increase educational activities related to increasing financial literacy and financial inclusion more broadly.

Apresiasi

Direksi memberikan penghargaan dan apresiasi bagi seluruh karyawan Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan atas dedikasi dan loyalitas dalam melaksanakan komitmen Perseroan dalam aspek keberlanjutan.

Bagi kami, keberlanjutan merupakan cara untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan Perseroan di masa depan dalam mewujudkan visi Perseroan yaitu Menjadi Perusahaan yang Menciptakan Dunia yang Berkelanjutan yang bertujuan menjaga keselarasan antara kinerja aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Jakarta, April 2025
Atas nama Direksi
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Appreciation

The Board of Directors provides awards and appreciation to all employees of the Company and all stakeholders for their dedication and loyalty in implementing the Company's commitment in the aspect of sustainability.

For us, sustainability is a way to drive the Company's growth and development in the future in realizing the Company's vision of Becoming a Company that Creates a Sustainable World which aims to maintain harmony between the performance of economic, social and environmental aspects.

Jakarta, April 2025
On behalf of the Board of Directors
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

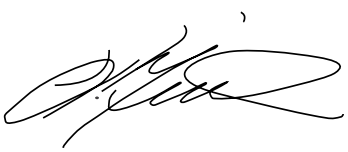

Konosuke Mizuta
Direktur Utama / President Director

Tata Kelola Keberlanjutan
Sustainability Governance

Dalam Pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan Perseroan tidak membentuk departemen khusus atau unit kerja khusus, melainkan seluruh pihak yang terkait bertanggung jawab terhadap penerapan keuangan berkelanjutan.

In Implementation of the Sustainable Finance, the Company does not establish a special department or special work unit, but all related parties will be responsible for implementation of sustainable finance.

Pejabat Official	Tugas dan Wewenang Duties and Authorities
Direksi Board of Directors	• Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program aksi keuangan berkelanjutan secara keseluruhan. To be responsible for the overall implementation of sustainable finance action program. • Setiap Direktur wajib melaksanakan dan mengelola program aksi keuangan berkelanjutan sesuai dengan rencana program yang telah disetujui Perseroan. Each Director is obliged to implement and manage the sustainable finance action program in accordance with the approved planned program.
Corporate Strategic Planning	• Mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan memastikan kolaborasi antar departemen berjalan dengan optimal dan melakukan evaluasi secara berkala dan melaporkannya kepada Direksi. To support the implementation of Sustainable Finance Action Program by ensuring that any collaboration among departments will work optimally and conduct periodic evaluations and report it to the Board of Directors. • Mengkoordinasikan persiapan konsep dengan pengkajian garis besar Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. To coordinate concept preparation by assessing the outline of Sustainable Finance Action Plan.
Corporate Secretary	• Menyusun Laporan Keberlanjutan To prepare Sustainability Report. • Memastikan pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Keberlanjutan ke OJK. To ensure the submission of Sustainable Financial Action Plan and Sustainability Report to OJK.
Business Development Corporate Corporate Business Unit	• Pengkajian produk dan/atau jasa Unit Bisnis Korporasi kategori keuangan berkelanjutan. Assessment of Corporate Business Unit products and/or services of sustainable finance category • Mempersiapkan dan membuat produk dan/atau jasa Unit Bisnis Korporasi kategori keuangan berkelanjutan. To prepare and create Corporate Business Unit products and/or services of sustainable finance category. • Penyaluran pembiayaan produk dan/atau jasa Unit Bisnis Korporasi kategori keuangan berkelanjutan. Distribution of financing to Corporate Business products and/or services of sustainable finance category.
Marketing Development Retail Business Unit	• Pengkajian produk dan/atau jasa Unit Bisnis Ritel kategori keuangan berkelanjutan. Assessment of Retail Business Unit products and/or services of sustainable finance category. • Mempersiapkan dan membuat produk dan/atau jasa Unit Bisnis Ritel kategori keuangan berkelanjutan. To prepare and create Retail Business Unit products and/or services of sustainable finance category.

Pejabat Official	Tugas dan Wewenang Duties and Authorities
	• Penyaluran pembiayaan produk dan/atau jasa Unit Bisnis Ritel kategori keuangan berkelanjutan. Distribution of financing to Retail Business Unit products and/or services of sustainable finance category.
Branch Management	• Mengelola pelaksanaan Program Aksi Keuangan Berkelanjutan di Kantor Cabang Perseroan. To manage the implementation of Sustainable Finance Action Program in Branch Office the Company.
Compliance	• Mengkaji penyusunan Pedoman & *Standard Operating Procedure* (SOP) Program Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan. To assess the preparation of Guidelines and Standard Operating Procedures (SOP) for the Sustainable Finance Action Program of the Company.
	• Melakukan pembaharuan RAKB dengan melibatkan berbagai departemen terkait untuk realisasi rencana yang berhubungan dengan RAKB. To conduct the updating of SFAP by involving various relevant departments for realization of the plan related to the SFAP.
	• Melakukan penelaahan dan rekomendasi terkait aspek kepatuhan terhadap Program Aksi Keuangan Berkelanjutan. To conduct review and recommendation related to the compliance aspect with the Sustainable Finance Action Program.
Risk Management	• Mengkaji integrasi aspek risiko dalam kegiatan usaha dalam rangka penerapan keuangan berkelanjutan. To study the integration of risk aspects into business activities in term of sustainable finance implementation.
	• Melakukan pemantauan risiko kredit dan risiko lainnya terkait penerapan keuangan berkelanjutan. To monitor the credit risk and other risks related to implementation of sustainable finance.
Business Process	• Menyusun *draft* dan penyesuaian pedoman terkait penerapan keuangan berkelanjutan. Prepare draft and adjustments to the guidelines related to the implementation of sustainable finance.
Finance and Accounting	• Pelaporan bulanan terkait realisasi penyaluran pembiayaan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan. • Monthly report related to realization of distribution of financing for sustainable finance products and/or services.
Human Resources	• Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi terkait program penerapan keuangan berkelanjutan. • To conduct competency improvement training related to sustainable finance implementation program.
Internal Audit	• Melakukan pengendalian internal pada pelaksanaan program keuangan berkelanjutan. • To conduct internal control on the implementation of sustainable finance program.

Pengembangan Kompetensi

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan aktivitas yang mendukung keuangan keberlanjutan sebagai berikut:
Telah dilakukan pelatihan kepada karyawan/ti tentang keuangan berkelanjutan dengan materi pelatihan antara lain :

Materi pelatihan antara lain :

1. Peran Taksonomi Untuk Keuangan Berlanjutan (TKBI) Dalam Mendorong Transisi Energi Menuju *Net Zero Emission* Indonesia
2. *How To Prevent Greenwashing In Sustainable Finance*

Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko yang dilakukan Perseroan yaitu :

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi melalui rapat-rapat secara berkala
b. Penyusunan Pedoman dan SOP Keuangan Berkelanjutan
c. Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kompetensi karyawan pada unit kerja terkait
d. Kecukupan pengendalian internal

Pemangku Kepentingan

Perseroan senantiasa menerapkan strategi komunikasi yang tepat kepada seluruh pemangku kepentingan hal ini untuk mendukung terciptanya hubungan baik dan terjalinnya komunikasi yang berkesinambungan dengan menerapkan komunikasi dua arah yang efektif meliputi komunikasi dengan internal dan eksternal.

Kendala

Dalam menerapkan keuangan berkelanjutan Perseroan menghadapi permasalahan dan tantangan, antara lain :

1. Pemahaman terhadap integrasi LST (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola) masih belum merata. Untuk itu Perseroan senantiasa berupaya terus meningkatkan kapasitas internal melalui pelatihan terkait keuangan berkelanjutan baik oleh pihak internal maupun eksternal.
2. Tantangan untuk Perseroan mememberikan pembiayaan berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek risiko dan kehati-hatian, terutama dalam hal risiko kredit, *cyber security* dan keamanan data debitur.

Competency Development

In 2024 the following activities have been carried out to support the sustainable finance:
Training has been conducted to the employees about the sustainable finance with the training subjects such as :

Training materials include:

1. The Role Of Taxonomy For Sustainable Finance (TKBI) In Promoting The Energy Transition Towards Net Zero Emissions In Indonesia
2. How To Prevent Greenwashing In Sustainable Finance

Risk Mitigation

The risk mitigation to be carried out by the Company includes:

a. Active supervision by the Board of Commissioners in regards to the implementation of Sustainable Financial Action by the Board of Directors through regular meetings
b. Preparation of Sustainable Finance Guidelines and SOPs
c. Improving the capacity, quality and competency of employees in related work units
d. Internal control adequacy

Stakeholders

The Company always implements proper communication strategy to all stakeholders, this is to support the creation of good relation and the establishment of continuous communication by implementing effective two-way communication including internal and external communication.

Obstacles

In implementing sustainable finance, the Company faces problems and challenges, including:

1. Understanding of ESG (Environmental, Social and Governance) integration is still uneven. For this reason, the Company always strives to increase internal capacity through training related to sustainable finance by both internal and external parties.
2. The challenge for the Company is to provide sustainable financing without ignoring risk and precautionary aspects, especially in terms of credit risk, cyber security and data debtor security.

Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
Follow Up of Sustainable Finance Action Plan

Penanggung Jawab Terhadap *Monitoring* dan Evaluasi Aksi Keuangan Berkelanjutan

Penanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Aksi Keuangan Berkelanjutan di Perseroan akan diemban oleh Unit Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Unit ini akan bekerja sama secara erat dengan masing-masing penanggung jawab program yang relevan, guna memastikan bahwa seluruh program yang tercantum dalam Aksi Keuangan Berkelanjutan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Pengukuran realisasi terhadap Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan akan dilaksanakan setiap semester. Proses pengukuran ini mencakup evaluasi terhadap sejauh mana pencapaian target yang telah ditetapkan, dengan membandingkan antara hasil yang tercapai dan target yang direncanakan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Perseroan berkomitmen penuh terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang telah disusun dengan memperhatikan berbagai aktivitas, jadwal, dan indikator yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, Perseroan menyadari adanya kemungkinan hambatan yang dapat muncul selama proses implementasi. Setiap hambatan tersebut akan dievaluasi dan tercermin dalam hasil evaluasi serta pengukuran kinerja. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau perubahan terhadap Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, Perseroan akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melakukan kaji ulang terhadap aktivitas yang tidak sesuai dengan rencana awal, dengan disertai analisis mendalam mengenai penyebab hambatan serta solusi yang diusulkan untuk mengatasi kendala tersebut di masa mendatang.
b. Melakukan revisi terhadap Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan berdasarkan hasil kajian ulang dan solusi yang telah disepakati, guna memastikan keselarasan dan efektivitas pelaksanaan yang lebih optimal.

Person in Charge for Monitoring and Evaluation of Sustainable Finance Action

The Risk Management and Compliance Unit will be responsible for monitoring and evaluating the implementation of the Sustainable Finance Action in the Company. This unit will work closely with each person in charge of the relevant program, to ensure that all programs listed in the Sustainable Finance Action are running according to plan and achieve the set objectives.

Timing for Measuring the Realization of Sustainable Finance Action Plan

Measurement of the realization of the Sustainable Finance Action Plan will be carried out every semester. This measurement process includes an evaluation of the extent to which the targets have been achieved, by comparing the results achieved and the targets planned in the Sustainable Finance Action Plan.

Follow Up To Sustainable Finance Action Plan

The Company is fully committed to the implementing the Sustainable Finance Action Plan, that has been prepared with consideration of the specified activities, schedules, and indicators that have been set. However, the Company recognizes the possibility of obstacles that may arise during the implementation process. Any such obstacles will be evaluated and reflected in the evaluation results and performance measurement. If there are any discrepancies or changes to the Sustainable Finance Action Plan, the Company will take the following steps:

a. Conduct a review of activities that are not in line with the original plan, with an in-depth analysis of the causes of obstacles and proposed solutions to overcome these obstacles in the future.
b. Revise the Sustainable Finance Action Plan based on the results of the review and agreed solutions, to ensure optimal alignment and effectiveness of implementation.

Kinerja Keberlanjutan
Sustainability Performance

Kegiatan Membangun Kinerja Keberlanjutan

Perseroan memahami bahwa setiap bisnis harus selalu menyesuaikan perkembangan zaman. Karena itu Perseroan selalu berusaha menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Bagi Perseroan, hal ini adalah kunci kelangsungan bisnis sambil menjaga kontribusi positif kepada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Perseroan juga menyadari bahwa dukungan semua pihak, termasuk seluruh pemangku kepentingan, juga merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja yang optimal di era globalisasi ini. Berbagai capaian kinerja yang baik hanya dapat terwujud jika Perseroan bersama seluruh pemangku kepentingan mampu berkolaborasi dan bahu-membahu untuk mendorong keberlanjutan.

Selama tahun 2024, Perseroan melanjutkan inisiatif dan komitmen pada bisnis yang mengedepankan prinsip dan nilai berkelanjutan. Dalam praktiknya, Perseroan berpartisipasi dalam berbagai kolaborasi yang melibatkan Pemangku Kepentingan untuk mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sesuai dengan TPB.

Perseroan juga melanjutkan beberapa langkah strategis untuk mempersiapkan tantangan bisnis dan kondisi pasar saat ini, yang salah satunya diwujudkan melalui inisiatif dan transisi bisnis menuju digitalisasi. Melalui transformasi digital, Perseroan akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.

Perseroan juga menerapkan RAKB sesuai dengan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 untuk menerapkan pembiayaan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik.

Kinerja Ekonomi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Perseroan melakukan kegiatan usaha pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna dan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan OJK.

Izin usaha sebagai lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.994/ KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993 yang kemudian telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010 Jo. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.KEP-806/NB.11/2022 tanggal 12 Desember 2022.

Segmen usaha Perseroan terdiri dari 2 (dua) segmen yaitu Pembiayaan Ritel dan Pembiayaan Korporasi. Pembiayaan Ritel adalah pembiayaan yang lebih fokus terhadap kebutuhan yang bersifat konsumtif dan Pembiayaan Korporasi adalah pembiayaan yang lebih fokus terhadap kebutuhan yang bersifat produktif.

Activities to Build Sustainability Performance

The Company’s understands that every business must always adapt to the times. Therefore, the Company always tries to adapt itself to the needs of the times. For the Company, this is the key to business continuity while maintaining a positive contribution to economic, social and environmental aspects. The Company also realizes that the support of all parties, including all stakeholders, is also an important factor to achieve optimal performance in this globalization era. Various good performance achievements can only be realized if the Company and all Stakeholders are able to collaborate and work together to encourage sustainability.

During 2024, the Company will continue its initiatives and commitment to a business that promotes sustainable principles and values. In practice, the Company participates in various collaborations involving Stakeholders to achieve a balance between economic, social and environmental aspects, in accordance with the SDG.

The Company also continues several strategic steps to prepare for business challenges and current market conditions, one of which is realized through initiatives and business transitions towards digitalization. Through digital transformation, the Company will continue to provide the best service to customers.

The Company also implements a SFAP in accordance with OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 to implement sustainable financing for financial service institutions, issuers and public companies.

Economic Performance

As previously explained, the Company carries out investment, working capital, multipurpose and other business activities based on the approval of the OJK.

The business license as a financial institution owned by the Company is as stated in the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.994/KMK.017/1993 dated December 30, 1993 which has subsequently been amended by the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. Kep-161/KM.6/2004 dated 4 May 2004 and Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. Kep-654/KM.10/2010 dated December 9, 2010 in conjunction with the Copy of the Decision of the Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (“OJK”) No. KEP-806/NB.11/2022 dated December 12, 2022.

The Company’s business segment consists of 2 (two) segments, namely Retail Financing and Corporate Financing. Retail Financing is financing that is more focused on consumptive needs and Corporate Financing is financing that is more focused on productive needs.

Saat ini, tantangan persaingan di industri pembiayaan meningkat, seiring dengan kondisi pasar otomotif yang mengalami perlambatan karena pengaruh perekonomian nasional.

Currently, the challenge of competition in the finance company industry is increasing, in line with the condition of the automotive market which is experiencing a slowdown due to the influence of the national economy.

Di tengah kelesuan ekonomi yang melanda, Perseroan dapat membukukan Piutang Pembiayaan sebesar Rp3,094.02 miliar pada tahun 2024.

In the midst of the economic downturn, the Company was able to book Financing Receivables of Rp3,094.02 billion in 2024.

Menjadi nilai kontrak berdasarkan komposisi jenis pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2024, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 terlihat pada tabel di bawah ini.

The contract value based on the composition of the type of financing as of December 31, 2024, December 31, 2023 and December 31 2022 is shown in the table below.

Total Piutang Pembiayaan / Total Financing Receivables

Keterangan Description	2022	2023	2024
Piutang Pembiayaan (dalam miliar Rupiah) Financing Receivables (in billion Rupiah)	2,183.49	2,615.29	3,094.02
Volume (dalam unit) Volume (units)	17,089	18,327	19.596
Pendapatan Pembiayaan (dalam miliar Rupiah) Revenues from Financing (in billion Rupiah)	270.35	320.91	385.70

Pembiayaan Konsumen / Consumer Financing

Keterangan Description	2022	2023	2024
Piutang Pembiayaan Konsumen (dalam miliar Rupiah) Consumer Financing Receivables (in billion Rupiah)	1,472.68	1,764.76	2137.77
Volume (dalam unit) Volume (units)	16,768	18,069	19.245
Pendapatan Pembiayaan Konsumen (dalam miliar Rupiah) Consumer Financing Income (in billion Rupiah)	224.00	265.37	320.99

Sewa Pembiayaan / Finance Lease

Keterangan Description	2022	2023	2024
Puitang Sewa Pembiayaan (dalam miliar Rupiah) Finance Lease Receivables (in billion Rupiah)	710.81	850.53	956.25
Volume (dalam unit) Volume (units)	321	258	351
Pendapatan Sewa Pembiayaan (dalam miliar Rupiah) Finance Lease Income (in billion Rupiah)	46.35	55.54	64.71

Rasio Keuangan yang Relevan Lainnya

Perseroan secara konsisten menjalankan aktivitas bisnis pembiayaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan taat kepada peraturan OJK serta perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mampu memenuhi rasio-rasio keuangan yang diatur oleh regulator.

Other Relevant Financial Ratios

The Company consistently runs financing business activities in accordance with the principle of prudence and obedience to the OJK regulations and applicable laws. The Company is able to meet financial ratios set by the regulator.

Perbandingan kinerja rasio keuangan utama Perseroan dibandingkan dengan kinerja industri pembiayaan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The comparison of the performance of the Company's main financial ratios compared to the performance of the industry in 2024 is as follows:

Rasio Ratio	Industri Industry	Perseroan The Company
Financing Asset Ratio (FAR)	85.48%	92.25%
Rasio *Gearing* / Gearing Ratio	2.31x	3.14x
Rasio Modal Sendiri – Modal Disetor / Paid-up Capital - Equity Ratio	319.77%	131.50%
NPF- Net	2.70%	0.42%
Rasio Laba (Rugi) Bersih terhadap aset Return on Asset (ROA)	5.02%	(0.16%)
Rasio Laba (Rugi) bersih terhadap ekuitas Return on Equity (ROE)	13.78%	(0.28%)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) / Operational Cost Ratio to Operating Income	79.36%	101.56%

Target dan Realisasi Tahun Buku

Di tengah perlambatan ekonomi global, meningkatnya tensi geopolitik, risiko inflasi, dan perubahan iklim, ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tumbuh 5,03%, lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2023 yang tumbuh 5,05%. Industri pembiayaan juga tumbuh lebih rendah pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Pencapaian target dan proyeksi kinerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

Targeted and Realization for the Fiscal Year

Amid global economic slowdown, rising geopolitical tension, inflation risk, and climate change, Indonesia's economy in 2024 grew by 5.03%, lower than the achievement in 2023, which grew by 5.05%. The financing industry also experienced slower growth in 2024 compared to 2023. Target achievement and projections of the Company's performance are as follows:

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Keterangan Information	Target 2024	Realisasi 2024 2024 Realization
Piutang Pembiayaan - Bersih / Financing Receivables - Net	3,127.98	2,961.57
Total Aset / Total Assets	3,463.05	3,210.52
Total Liabilitas / Total Liabilities	2,698.04	2,466.53
Pendapatan / Income	496.89	468.65
Laba (rugi) tahun berjalan / Net (loss) profit for the year	14.51	(2.16)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for The Year	14.51	(6.49)
Modal Ditempatkan & Disetor / Paid-up Capital	568.74	568.74
Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-up Capital	97.59	97.59
Total Ekuitas / Total Equity	765.01	743.99

Target 2025

Manajemen Perseroan telah menyusun rencana untuk tahun 2025 dengan mempertimbangkan perkembangan industri otomotif, kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian baik dari segi makro maupun mikro.

2025 Targets

The Company's management has drawn up a plan for 2025 by considering the development of the automotive industry, current economic conditions and economic projections both in macro and micro terms.

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Keterangan Information	Target 2025
Piutang Pembiayaan - Bersih / Financing Receivables - Net	3,019.72
Total Aset / Total Assets	3,254.19
Total Liabilitas / Total Liabilities	2,509.66
Pendapatan / Income	463.51
Laba (rugi) tahun berjalan / Net (loss) profit for the year	1.88

Keterangan Information	Target 2025
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for The Year	1.88
Modal Ditempatkan & Disetor / Paid-up Capital	568.74
Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-up Capital	97.59
Total Ekuitas / Total Equity	744.54

Kinerja Lingkungan Hidup

Perseroan senantiasa mengoptimalkan efisiensi penggunaan listrik dan air dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal tersebut disosialisasikan dalam berbagai kesempatan secara internal. Adapun paparan penggunaan listrik dan air sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Environmental Performance

The Company always optimizes the efficiency of using electricity and water in carrying out its business activities. This was socialized on various occasions internally. The disclosure to electricity and water usage throughout 2024 is as follows:

No	Jaringan Kantor Office Network	PAM Water (m^3)	PLN Electricity (kWh)
1.	Bandung	63	16,158
2.	Bekasi	-	25,213
3.	Bogor	199	15,864
4.	Cikarang	605	27,472
5.	Jakarta Barat	-	10,144
6.	Jakarta Pusat	-	41,671
7.	Jakarta Selatan	-	18,949
8.	Jakarta Timur	-	25,203
9.	Jakarta Utara	185	33,135
10.	Kabupaten Lamongan	360	14,834
11.	Kota Balikpapan	136	20,398
12.	Kota Bandar Lampung	-	19,699
13.	Kota Banjarmasin	151	18,917
14.	Kota Cimahi	418	9,816
15.	Kota Denpasar	-	13,385
16.	Kota Depok	392	22,787
17.	Kota Jambi	-	20,049
18.	Kota Kediri	-	18,086
19.	Kota Pontianak	135	12,256
20.	Kota Samarinda	111	22,766
21.	Kota Semarang	78	10,299
22.	Kota Surakarta	161	13,997
23.	Kota Yogyakarta	-	4,671
24.	Makassar	-	20,713
25.	Malang	246	14,479
26.	Medan	232	22,224
27.	Palembang	629	25,183
28.	Pekanbaru	-	37,629
29.	Surabaya	159	19,972

No	Jaringan Kantor Office Network	PAM Water	PLN Electricity
30.	Tangerang	497	27,827
31.	Tangerang (Gading Serpong)	302	22,578
32.	Serang*	-	8,862
33.	Kantor Pusat / Head Office	-	69,449

*) Perseroan menerima Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-135/PL.021/2024 Tanggal 07 November 2024 Perihal Pencabutan Izin Pembukaan Cabang PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Serang.
The Company received a Copy of the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. Kep-135/PL.021/2024 dated November 7, 2024, regarding the Revocation of the Branch Opening License of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Serang."

Mekanisme Pengolahan Limbah dan Efluen

Sebagai Perusahaan Pembiayaan, kegiatan usaha yang dikelola Perseroan sehari-hari tidak menghasilkan efluen atau limbah yang mencemari lingkungan.

Sosialisasi ESG

Sebagai Perusahaan Pembiayaan, kegiatan usaha yang dikelola Perseroan sehari-hari tidak menghasilkan emisi yang mencemari lingkungan. Perseroan akan terus mengimplementasikan kegiatan yang ramah lingkungan dan penghematan.

Kinerja Sosial

Perseroan melihat Sumber Daya Manusia ("SDM") sebagai aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan operasi dan bisnis yang dijalankan. Sebagai perusahaan di sektor pembiayaan, kualitas SDM yang baik senantiasa menjadi penentu dari kualitas produk dan layanan yang diberikan Perseroan. Terkait hubungan kerja dengan karyawan, Perseroan berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik terkait ketenagakerjaan, maupun kesehatan dan keselamatan kerja.

Perseroan juga memberikan kesempatan bekerja yang sama kepada mereka yang kompeten dan memiliki integritas tinggi yang selalu menjunjung etos kerja dan kejujuran. Pada tahun 2024, Perseroan telah merekrut 198 orang karyawan baru untuk berbagai posisi. Dalam proses rekrutmen, Perseroan fokus pada kualifikasi berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan serta rencana yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan agar Perseroan memiliki SDM yang berkualitas serta dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara baik.

Tingkat perputaran karyawan tahun 2024 dan perbandingannya dengan tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Waste and Effluent Treatment Mechanism

As a Financing Company, the daily business activities managed by the Company do not produce effluent or waste that pollutes the environment.

ESG Socialization

As a Financing Company, the daily business activities managed by the Company do not produce emissions that pollute the environment. The Company will continue to implement environmentally friendly and conservation-oriented activities.

Social Performance

The Company believes that Human Resources ("HR") is an important aspect that cannot be separated from the growth of its operations and business. As a Company in the financing sector, the quality of good HR has always been the determinant of the quality of products and services provided by the Company. Regarding work relations with employees, the Company adheres to the prevailing laws and regulations, both related to employment, as well as occupational health and safety.

The Company also provides equal opportunities to work for those with competence and high integrity who always uphold the work ethic and honesty. In 2024, the Company has recruited 198 new employees for various positions. In the recruitment process, the Company focuses on competency-based qualifications that are tailored to the needs and plans that have been determined. This is done so that the Company has competent HR that could carry out its responsibilities properly.

The employee turnover rate for 2024 and its comparison with 2023 and 2022 is as follows:

Tingkat Perputaran Karyawan / Employee Turnover Rate

Keterangan Information	2022	2023	2024
Jumlah Karyawan awal Tahun (Orang) Total Employees at the beginning of Year (People)	614	664	711
Rekrutmen Karyawan Baru (Orang) New Employees Recruitment (People)	195	198	189
Karyawan yang Berakhir Hubungan Kerjanya (Orang) Employees Who Have Ended Their Employment Relationship (People)	145	151	134
Jumlah Karyawan Akhir Tahun (Orang) Total Employees at the End of the year (People)	664	711	767
Tingkat Perputaran Karyawan (%) Employees Turnover Rate (%)	1.90	1.83	1.49

Kesetaraan Kesempatan Bekerja

Perseroan senantiasa memastikan kesetaraan kesempatan bekerja tanpa adanya diskriminasi atas *gender*, golongan, suku maupun ras tertentu. Perseroan menjalankan proses rekrutmen secara transparan, independen dan didasarkan pada kualifikasi serta kompetensi. Prinsip kesetaraan kesempatan bekerja merupakan pedoman utama Perseroan dalam memilih individu terbaik untuk bergabung menjadi karyawan Perseroan.

Komposisi karyawan berdasarkan jenis kelamin dapat ditemukan pada halaman 65.

Equal Employment Opportunity

The Company always ensures equal opportunity in employment with no discrimination on gender, class, or ethnicity. The Company carries out the recruitment process in a transparent, independent manner and is solely based on qualifications and competence. The principle of equal employment opportunities is the main guideline for the Company in selecting the best individuals to join in as Company employees.

Employee composition by gender can be found on page 65.

Perbandingan Gaji Pokok di Level Terendah dengan Upah Miminum Kabupaten/Kota (UMK)

Besaran remunerasi yang diberikan Perseroan kepada pekerja telah memenuhi peraturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Selain itu, besaran gaji pokok dari pekerja tetap baik wanita maupun pria di level terendah masih lebih besar dari besaran UMK yang berlaku di seluruh wilayah Kantor Cabang di Indonesia.

Persentase gaji pokok pekerja tetap pada tingkat terendah terhadap UMK.

Comparison of Basic Salary at the Lowest Level with The Regency/City Minimum Wages (UMK)

The amount of remuneration given by the Company to employees had met the employment regulations in Indonesia. Furthermore, the amount of the basic salary of permanent workers, both women and men at the lowest level, was still greater than the UMK which applied in all Branch Offices in Indonesia.

Percentage of basic salary for permanent workers at the lowest level against the UMK.

No	Lokasi Kantor Office Location	UMK 2024 (Rp)	Persentase Percentage
1	Bandung	4,209,309	102.40%
2	Bekasi	5,343,430	101.53%
3	Bogor	4,813,988	103.33%
4	Cikarang	5,219,263	103.95%
5	Jakarta Barat	5,067,381	101.35%
6	Jakarta Pusat	5,067,381	101.35%
7	Jakarta Selatan	5,067,381	101.35%
8	Jakarta Timur	5,067,381	101.35%
9	Jakarta Utara	5,067,381	101.35%
10	Kabupaten Lamongan	2,828,323	170.42%
11	Kota Balikpapan	3,475,595	109.74%
12	Kota Bandar Lampung	3,103,631	100.31%
13	Kota Banjarmasin	3,379,513	107.26%
14	Kota Cimahi	3,627,880	118.81%
15	Kota Denpasar	3,096,823	117.06%
16	Kota Depok	4,878,612	101.96%
17	Kota Jambi	3,387,064	107.02%
18	Kota Kediri	2,415,362	104.37%
19	Kota Pontianak	2,840,206	101.40%
20	Kota Samarinda	3,497,124	109.08%
21	Kota Semarang	3,243,969	107.75%
22	Kota Surakarta	2,269,070	107.10%
23	Kota Yogyakarta	2,492,997	101.12%

No	Lokasi Kantor Office Location	UMK 2024 (Rp)	Persentase Percentage
24	Makassar	3,643,321	107.69%
25	Malang	3,309,144	109.54%
26	Medan	3,769,082	104.10%
27	Palembang	3,677,592	106.69%
28	Pekanbaru	3,451,585	113.67%
29	Surabaya	4,725,479	102.00%
30	Tangerang	4,760,289	103.88%
31	Tangerang (Gading Serpong)	4,670,791	105.87%
32	Kantor Pusat / Head Office	5,067,381	101.35%

Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman

Perseroan percaya bahwa tempat kerja yang layak dan lingkungan yang kondusif akan mendorong iklim kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja ("K3") didukung oleh manajemen dan seluruh karyawan mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Keselamatan kerja tercermin dari penataan ruang kantor yang mengacu pada beberapa hal, seperti kelengkapan dan kelayakan sarana seperti ruangan kerja, tempat ibadah, ruangan tunggu konsumen dan toilet, maupun lingkungan kerja yang nyaman seperti suhu ruangan kerja yang diatur serta ventilasi udara yang di jaga agar kesejukan dan kesegarannya dapat dinikmati oleh seluruh karyawan. Perseroan juga mengajak partisipasi seluruh karyawan didalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan cara menjalankan program 5R , yang terdiri dari :

1. Ringkas : Selalu memilah dan memilih lalu membuang barang – barang yang telah tidak dipergunakan
2. Rapi : Selalu menetapkan tata letak barang – barang untuk tujuan mudah dijangkau apabila diperlukan
3. Resik : Selalu membersihkan tempat kerja
4. Rawat : Selalu merawat kebiasaan diri dan kondisi lingkungan kerja yang telah baik untuk menjadi semakin baik
5. Rajin : Selalu mematuhi seluruh aturan yang ada dan rajin menerapkan 4 komponen R yang lain

Untuk menjaga nihil kecelakaan serta potensi kerugian maka Perseroan menyiapkan perangkat pemadam kebakaran yang sesuai standar dan dengan jumlah yang memadai di ruangan kantor. Perawatan peralatan pemadam secara berkala dilakukan sesuai standar dan pada masa waktu pakai peralatan tersebut.

Pengembangan Kompetensi Karyawan

Perseroan senantiasa mengembangkan materi dan sarana pelatihan untuk semua karyawan. Beberapa metode yang digunakan dalam penyampaian materi-materi pelatihan, yaitu melalui *video learning, video conference* dan *e-learning.*

Decent and Safe Work Environment

The Company believes that providing a decent workplace and conducive environment will foster a working climate that ultimately enhances employee productivity. The implementation of occupational health and safety ("K3") programs is supported by management and all employees, in accordance with the prevailing Labor Laws.

Work safety is reflected in the arrangement of office space which refers to several things, such as the completeness and appropriateness of facilities such as workspaces, prayer rooms, consumer waiting rooms and toilets, as well as a comfortable working environment such as regulated work room temperature and air ventilation that is kept cool and its freshness can be enjoyed by all employees. The Company also invites the participation of all employees in creating a safe and healthy work environment by running the 5R program, which consists of:

1. Simple : Always sort and choose then throw away items that are not used
2. Organized : Always set item layout - goods for easy-to-reach purposes if needed
3. Clean : Always clean the workspace
4. Maintain : Taking care of work environment and always focus for betterment
5. Diligent : Always comply with all existing rules and diligently apply the other 4 R

To maintain zero accidents and potential losses, the Company prepares fire extinguisher equipment according to standards and with an adequate number office space. Periodic maintenance of extinguisher equipment is carried out according to standards and during the life of the equipment.

Employee Development Trainings

The Company continues to develop training materials and tools for all employees. Several methods are used in the delivery of training materials, namely through video learning, video conferencing, e-learning. Human resource development

Pengembangan SDM tidak hanya dilakukan melalui pelatihan tatap muka, baik secara langsung maupun *virtual*, namun juga melalui *on the job training, tutoring, rotasi, coaching, counseling dan mentoring*. Materi-materi yang disiapkan tidak hanya berorientasi pada industri pembiayaan saja, namun juga materi *soft skills* seperti kepemimpinan, pengembangan kepribadian, dan komunikasi. Media *e-learning* menjadi salah satu solusi dan strategi yang ditempuh untuk pembelajaran yang berkelanjutan.

is not only done through face-to-face training, both in person and virtual, but also through on-job training, tutoring, rotation, coaching, counseling, and mentoring. The materials prepared are not only oriented towards the financing industry, but also soft skills materials such as leadership, personality development, and communication. E-learning media is one of the solutions and strategies adopted for continuous learning.

Perseroan senantiasa menyelenggarakan kegiatan alih Pengetahuan tenaga kerja asing ("TKA") kepada tenaga kerja lokal lainnya guna proses didalam alih pengetahuan (*transfer of knowledge*).

The Company always organizes knowledge transfer activities for foreign workers ("TKA") to other local workers for the process of transfer of knowledge.

Program pelatihan sepanjang 2024 dapat ditemukan pada halaman 66.

The training program throughout 2024 can be found on page 66.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sebagai bagian dari inisiatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, Perusahaan mengadakan kegiatan literasi keuangan yang melibatkan 250 siswa dan guru. Program ini juga mendukung implementasi ketentuan OJK sebagaimana tercantum dalam POJK No. 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat, dengan pendekatan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Corporate Social and Environmental Responsibility

As part of its efforts to improve public understanding of financial products and services, the Company conducted a financial literacy program involving 250 students and teachers. This initiative also supports the implementation of the POJK No. 3 of 2023 on Enhancing Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the General Public, through the utilization of information and communication technology.

Sebagai wujud nyata komitmen Perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024 di SMAN 91, Jakarta Timur. Dalam kegiatan tersebut, Perusahaan menyerahkan bantuan berupa sarana pendukung proses belajar mengajar. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Sekolah, Ibu Widyandari Eka Dhewadjanti, MPd. Perusahaan berharap kontribusi ini dapat memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan, memperkuat kualitas pembelajaran, serta mendukung pengembangan sumber daya manusia, khususnya di kalangan generasi muda. Perseroan merealisasikan anggaran biaya program Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan sebesar Rp11.952.980.

Demonstrating its strong commitment to social and environmental responsibility, the Company held the event on October 18, 2024, at SMAN 91, East Jakarta. During the event, the Company donated supporting facilities for the school's teaching and learning activities. The donation was received directly by the School Principal, Mrs. Widyandari Eka Dhewadjanti, MPd. Through this contribution, the Company hopes to make a positive impact on the community, enhance educational quality, and foster the development of human capital, particularly among the younger generation. The Company realized a budget expenditure for the Corporate Social and Environmental Responsibility program amounting to Rp11,952,980.

Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan
Responsibility for Sustainable Finance Product Developments and/or Services

Sesuai dengan RAKB 5 (Lima) Tahun yang telah disusun, maka Perseroan menargetkan untuk mulai melakukan beberapa kajian terkait permintaan pasar terhadap produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, kesesuaian produk dan/atau jasa yang sudah ada dengan kriteria kegiatan usaha berkelanjutan, dan pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan di tahun 2024.

In accordance with the 5 (Five) Year SFAP that has been prepared, the Company is targeting to start conducting several studies related to market demand for sustainable financial products and / or services, the suitability of existing products and / or services with the criteria for sustainable business activities, and development of sustainable financial products and / or services in 2024.

Perlakuan Setara untuk Konsumen

Konsumen merupakan salah satu pemangku kepentingan utama Perseroan. Kehadiran mereka sangat menentukan perkembangan dan keberlangsungan Perseroan.

Semakin banyak konsumen yang berhasil diraih dan kepercayaannya terjaga, apalagi dengan adanya konsumen setia yang telah menjadi pelanggan, maka akan semakin terjamin keberlangsungan usaha Perseroan dan demikian sebaliknya. Karena posisi konsumen yang strategis, Perseroan tetap berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan yang terbaik dan setara kepada seluruh konsumen tanpa terkecuali.

Equal Treatment for Customers

Customer are one of the main stakeholders of the Company. Their presence greatly determines the development and sustainability of the Company.

The more customer who are successfully achieved and their trust is maintained, especially with loyal customers who have become customers, the more the continuity of the Company's business will be guaranteed and vice versa. Due to the strategic position of customers and, the Company remains committed to providing the best and equal products and services to all costumer without exception.

Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan
Service and Complaint Resolution Report

Periode Period	Jenis Kegiatan Activities	Jenis Produk dan/atau Layanan Type of Products/Services	Kategori Permasalahan Issue Category	Jumlah Amount	Status Penyelesaian Resolution Status		
					Selesai Settled	Tidak Selesai Unsettled	Dalam Proses On Progress
Jan - Jun 2024	Konvensional Conventional	Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Multi-Purpose Financing with Installments	Lainnya: Perilaku Petugas Penagihan Others: Behavior of Collection Officers	1	1	0	0
		Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Multi-Purpose Financing with Installments	Lainnya: Unit Tarikan Others: Repossess Unit	1	1	0	0

Periode Period	Jenis Kegiatan Activities	Jenis Produk dan/atau Layanan Type of Products/Services	Kategori Permasalahan Issue Category	Jumlah Amount	Status Penyelesaian Resolution Status		
					Selesai Settled	Tidak Selesai Unsettled	Dalam Proses On Progress
		Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Multi-Purpose Financing with Installments	Lainnya: Klaim Garansi Others: Warranty Claim	1	1	0	0
		Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Multi-Purpose Financing with Installments	Jumlah Tagihan Bill Amount	1	1	0	0
		Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Multi-Purpose Financing with Installments	Lainnya: Keberatan untuk Pelunasan Others: Objection to Settlement	1	0	0	1
Jul - Dec 2024	Konvensional Conventional	Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Multi-Purpose Financing with Installments	Permasalahan Asuransi Objek Pembiayaan Insurances Issues	3	2	0	1
		Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Multi-Purpose Financing with Installments	Jumlah Tagihan Bill Amount	1	0	0	1
		Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Multi-Purpose Financing with Installments	Permasalahan Agunan/Jaminan Collateral Issues	4	3	0	1
		Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Multi-Purpose Financing with Installments	Kegagalan/ keterlambatan transaksi Transactions Failure/Delay	3	3	0	0

Survei Kepuasan Pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Customer Satisfaction Survey on Sustainable Financial Products and/or Services

Keterangan Description	2024
Jumlah Responden / Number of Respondents	140
Indeks Kepuasan Pelanggan / Customer Satisfaction Index	93,57%
Total Responden yang Menerima Survei Total Respondents Who Received The Survey	298

Keselarasan Laporan Keberlanjutan dengan Metrik ESG
Alignment of Sustainability Report with ESG Metrics

Kinerja Lingkungan
Environmental Performance

E-01 Laporan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) E-01 Greenhouse Gas (GHG) Emission Report	
Laporan Emisi GRK Konsolidasi? / Consolidated GHG Emission Report?	☐ Ya / Yes ☑ Tidak / No
Batasan Organisasi / Organizational Boundaries	Operasional/Finansial Operational/Financial
Adakah anak perusahaan yang tidak diikutsertakan dalam laporan ini? Any subsidiaries that are not included in the report?	☐ Ya / Yes ☑ Tidak / No

Nama Name	Total emisi Total emission (tCO_2e)
Kategori 1: Emisi GRK langsung dan pembuangan Category 1: Direct GHG emissions and removals	
Emisi langsung dari pembakaran stasioner / Direct emissions from stationary combustion	*
Emisi langsung dari pembakaran bergerak / Direct emissions from mobile combustion	*
Emisi langsung dari proses pengolahan / Direct emissions from processes	*
Emisi fugitive langsung / Direct fugitive emissions	*
Emisi langsung dari Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF) / Direct emissions from Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF)	*
Total Emisi Langsung (Scope 1) / Total Direct Emissions (Scope 1)	
Kategori 2: Emisi GRK tidak langsung dari energi yang diimpor/dibeli / Category 2: Indirect GHG emissions from imported energy	
Emisi tidak langsung dari konsumsi Listrik yang diimpor/dibeli / Indirect emissions from imported/purchased electricity consumption	*
Emisi tidak langsung dari konsumsi jaringan energi yang diimpor/dibeli (diluar listrik) / Indirect emissions from imported/purchased network energy consumption (excluding electricity)	*
Total Emisi Tidak Langsung (Scope 2) / Total Indirect Emissions (Scope 2)	
Kategori 3: Emisi GRK tidak langsung dari transportasi / Category 3: Indirect GHG emissions from transportation	
Transportasi dan distribusi hulu / Upstream transport and distribution	*
Perjalanan dinas / Business travels	*
Transportasi dari klien dan pengunjung / Transportation of clients and visitors	*
Transportasi dan distribusi hilir / Downstream transportation and distribution	*
Perjalanan Karyawan / Employee commuting	*
Kategori 4: Emisi GRK tidak langsung dari produk yang digunakan oleh perusahaan / Indirect GHG emissions from products used by Organization	
Kegiatan yang berhubungan dengan energi yang tidak termasuk dalam emisi langsung dan emisi energi tidak langsung Energy related activities not included in direct emissions and energy indirect emissions	*

Nama Name	Total emisi Total emission (tCO_2e)
Pembelian Barang dan Jasa / Purchased goods and services	*
Capital equipment/goods / Capital equipment/goods	*
Limbah yang dihasilkan dalam kegiatan operasional / Waste generated in operations	*
Aset Sewaan hulu / Upstream leased assets	*
Kategori 5: Emisi GRK tidak langsung yang terkait dengan penggunaan produk dari perusahaan Category 5: Indirect GHG Emissions associated with the use of products from the Organization	
Investasi / Investments	*
Penggunaan produk yang dijual / Use of sold products	*
Pembuangan akhir masa pakai produk yang dijual / End of life treatment of sold products	*
Waralaba hilir / Downstream franchises	*
Aset Sewaan Hilir / Downstream leased assets	*
Pengolahan produk yang dijual / Processing of sold products	*
Kategori 6: Emisi GRK tidak langsung dari sumber lainnya Category 6: Indirect GHG emissions from other sources	
Emisi atau pembuangan tidak langsung lainnya / Other indirect emissions or removals	*
Total Emisi Tidak Langsung (Scope 3) / Total GHG Emissions (Scope 3)	*
Total Emisi GRK (Scope 1 and 2) / Total GHG Emissions (Scope 1 and 2)	*
Total Emisi GRK (Scope 1, 2 and 3) / Total GHG Emissions (Scope 1, 2 and 3)	*
Offsets/Credits	*
Pembelian Renewable Energy Certificate (REC) (kWh) / REC Purchases (kWh)	*

* Perseroan hingga saat ini masih berada pada tahap wacana untuk dapat menyajikan data yang dimintakan secara akuntabel.
The Company is still at the conceptual stage of being able to present the requested data in an accountable manner.

E-02 Intensitas Emisi GRK E-02 GHG Emissions Intensity	Total emisi dari Scope 1 dan 2 per unit pendapatan Perusahaan Tercatat (tCO_2e/Rp) Total scope 1 and 2 emissions produced per revenue of listed compant (tCO2e/Rp)	*
E-03 Konsumsi Energi listrik E-03 Electricity Consumption	Jumlah total energi yang dikonsumsi secara langsung (kWh or J) Total amount of energy directly consumed (kWh or J)	*
	Jumlah total energi yang dikonsumsi secara tidak langsung (kWh or J) Total amount of energy indirectly consumed (kWh or J)	*
	Total konsumsi energi (kWh or J) / Total energy consumption (kWh or J)	*
E-04 Konsumsi Air E-04 Water Consumption	**Total konsumsi air (m^3) / Total water consumed (m3)**	*
E-05 Limbah yang dihasilkan E-05 Waste Generation	**Total limbah yang dihasilkan (ton) / Total waste generated (ton)**	*

* Perseroan hingga saat ini masih berada pada tahap wacana untuk dapat menyajikan data yang dimintakan secara akuntabel
The Company is still at the conceptual stage of being able to present the requested data in an accountable manner.

E-06 Komitmen Perusahaan untuk mencapai target Net Zero Emission E-06 Company commitment to Net Zero Emission Target	
Apakah Perusahaan memiliki komitmen pencapaian target net zero? Does the Company have a net zero emission target commitment?	☐ Ya / Yes ☑ Tidak / No
Tahun berapa Perusahaan menargetkan pencapaian Net Zero emission yang dipublikasi? What year is the Company's net zero emission published target?	null

Perseroan belum memiliki komitmen untuk mencapai Target Net Zero Emission

The Company does not yet have a commitment to achieve the Net Zero Emission Target

E-07 Komitmen Perusahaan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (Emission Reduction) E-07 Company Commitment to GHG Emission Reduction Target	
Apakah Perusahaan memiliki komitmen mengurangi emisi? Does the Company commit to reducing GHG emission?	☐ Ya / Yes ☑ Tidak / No
Target pengurangan emisi GRK What is the Company's GHG emission reduction target?	0 % 0 (tCO2e)
Tahun target untuk penurunan emisi GRK? Targeted year in achieving GHG reduction target?	null

Apakah perusahaan memiliki manajemen yang mengawasi pengendalian iklim?
Does the Listed Company has measures on monitoring in enacting climate policy?

☐ Ya / Yes ☑ Tidak / No

Langkah-langkah yang sudah dilakukan dan penurunan emisi yang telah dicapai dibandingkan tahun sebelumnya.
Steps that have been taken and emission reductions that have been achieved compared to the previous year

Perseroan belum memiliki komitmen untuk mencapai Target Net Zero Emission

The Company does not yet have a commitment to achieve the Net Zero Emission Target

Kinerja Sosial
Social Performance

S-01 Kesetaraan Gender
S-01 Gender Diversity

Level Jabatan Job positions	Laki-Laki Male		Perempuan Female	
	Jumlah pegawai Number of employees	Persentase pegawai (%) Percentage of employees	Jumlah pegawai Number of employees	Persentase pegawai (%) Percentage of employees
Entry-level	408	53.19%	106	13.82%
Mid-level	139	18.12%	40	5.22%
Senior-level	65	8.47%	6	0.78%
Executive- level	2	0.26%	1	0.13%
Total Pegawai / Total Employee	**614**	**80.05%**	**153**	**19.95%**

S-02 Jumlah level pegawai yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan kelompok umur
S-02 Employees Level by Gender and Age Group

Rentang Usia (tahun) Age Group (years)	Level Jabatan Job Levels								
	Entry-level		Mid-level		Senior-level		Executive-level		Jumlah Pegawai Number of employees
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
18-25	30	20	1	-	-	-	-	-	51
25-35	171	63	42	25	9	1	-	-	311
35-45	159	19	61	13	22	4	5	1	284
45-55	43	4	33	1	23	-	1	4	109
>55	5	-	2	1	2	-	2	-	12

S-03 Tingkat Pergantian Pegawai
S-03 Employees Turnover

Deskripsi Description	Jumlah Pegawai (dalam tahun pelaporan) Number of employees (in reporting year)	Percentage Pegawai (dalam tahun pelaporan) Percentage (in reporting year)
Jumlah Pegawai resign/Pemutusan Hubungan Kerja Number of employees resigned	134 Pegawai employees	17.47%
Jumlah Pegawai Baru/pengganti Number of newly appointed Employees	189 Pegawai employees	24.64%

S-04 Jumlah Pegawai Sementara
S-04 Temporary Worker

Deskripsi Description	Jumlah Pegawai (dalam tahun pelaporan) Number of employees (in reporting year)	Percentage Pegawai (dalam tahun pelaporan) Percentage (in reporting year)
Jumlah Pegawai perusahaan yang dipegang oleh kontraktor dan/atau konsultan Total company headcount held by contractors and/or consultants	50 Pegawai employees	6.52%

S-05 Pelatihan dan Pengembangan Pegawai
S-05 Employee Training and Development

Rata-rata jam pelatihan per pegawai dalam tahun Pelaporan Average training hour per employee (in reporting year)	Jumlah pegawai yang ikut serta dalam program pelatihan Total employee attending company training program	Persentase jumlah pegawai yang ikut serta dalam pelatihan (%) Percentage of employee attending company training program (%)
21 jam/pegawai hours/employee	3.261	100%

S-06 Jumlah Kecelakaan Kerja
S-06 Injury Rate

Frekuensi kecelakaan kerja dari total pegawai Frequency of work-related accidents of total Employees (in reporting year)	Persentase kecelakaan kerja serius yang berakibat cedera serius dan fatal dari total pegawai (%) Percentage of serious work-related accidents resulting in serious and fatal injuries from total employees (%)
3	0.39%

S-07 Jumlah Kejadian Pelanggaran Hak Asasi Manusia
S-07 Incidents Regarding Human Rights Abuse

Jumlah pelanggaran hak asasi manusia dalam tahun Pelaporan Number of incidents regarding human rights abuse (in reporting year)	0

Kebijakan Perusahaan Terkait Pekerja
Company Policy Regarding Employees

S-08 Perusahaan memiliki kebijakan terkait pelecehan seksual dan/atau non- diskriminasi?
S-08 Does the company has a policy regarding sexual harassment and/or non-discrimination?

☐ Ya / Yes ☑ Tidak / No

Perseroan belum memiliki kebijakan yang secara spesifik mengatur pelecehan seksual dan/atau non-diskriminasi. Namun demikian, hal tersebut terangkum dalam Peraturan Perseroan yang disosialisasikan secara berkala dalam berbagai kesempatan. Adapun, kebijakan ini bersifat internal dan disosialisasikan pada karyawan dan mitra kerja.

The Company does not yet have a policy that specifically regulates sexual harassment and/or non-discrimination. However, these matters are incorporated within the Company Regulations, which are regularly communicated on various occasions. This policy is internal in nature and is disseminated to employees and work partners.

S-09 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak asasi manusia?
S-09 Does the company has a policy regarding human rights?

☐ Ya / Yes ☑ Tidak / No

Perseroan belum memiliki kebijakan yang secara spesifik mengatur hak asasi manusia. Namun demikian, hal tersebut terangkum dalam Peraturan Perseroan yang disosialisasikan secara berkala dalam berbagai kesempatan. Adapun, kebijakan ini bersifat internal dan disosialisasikan pada karyawan dan mitra kerja.

The Company does not yet have a policy that specifically regulates human rights. However, these matters are incorporated within the Company Regulations, which are regularly communicated on various occasions. This policy is internal in nature and is disseminated to employees and work partners.

S-10 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai pekerja anak dan/atau pekerja paksa?
S-10 Does the company have a policy regarding child labor and/or forced labor?

☑ Ya / Yes ☐ Tidak / No

Pada peraturan perusahaan jelas tertuang bahwa syarat minimum usia karyawan tidak termasuk dalam kategori pekerja anak.

In the Company regulations, it is clearly stated that the minimum age requirement for employees does not fall under the category of child labor.

S-11 Perusahaan memiliki kebijakan perusahaan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja yang aman dan layak diberikan kepada seluruh karyawan?
S-11 Does the company have a company policy regarding occupational health and safety as well as a safe working environment for all employees?

☑ Ya / Yes ☐ Tidak / No

Mizuho Leasing Indonesia mengikuti ketentuan perundang-undangan perihal Jaminan Sosial bagi seluruh karyawan.

Selain itu perusahaan juga mengikutsertakan karyawan dalam program asuransi diluar Jaminan Sosial yang diatur oleh negara.

Mizuho Leasing Indonesia complies with the laws and regulations regarding Social Security for all employees.

In addition, the company also enrolls employees in an insurance program beyond the Social Security mandated by the government.

Corporate Social Responsibility (CSR)

S-12 Perusahaan memiliki aktivitas CSR, investasi atau sumbangan terhadap komunitas atau organisasi nirlaba terdaftar?
S-12 Does the company have CSR activities, investments or donations to the community or registered non-profit organizations?

☐ Ya / Yes ☑ Tidak / No

Pelaksanaan program CSR merupakan salah satu wujud tanggung jawab Perseroan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Program ini dirancang dengan mengoptimalkan sumber daya lokal guna memperkuat daya saing dan kinerja perusahaan melalui aspek lingkungan dan kemandirian masyarakat. Pelaksanaannya selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) serta terintegrasi dengan kegiatan bisnis Perseroan.

Sepanjang tahun 2024, dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, Perseroan belum memiliki kerja sama dengan organisasi nirlaba terdaftar.

The implementation of CSR programs is one of the Company's commitments in supporting the sustainable well-being of the community. These programs are designed by optimizing local resources to strengthen the Company's competitiveness and performance through environmental and community empowerment aspects. Their implementation is aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs) and integrated with the Company's business activities.

Throughout 2024, in carrying out its social and environmental responsibility programs, the Company has not yet established partnerships with any registered non-profit organizations.

Kinerja Tata Kelola
Governance Performance

G-01 Keberagaman Manajemen dan Independensi
G-01 Board Diversity and Independence

Tipe Manajemen Perusahaan Type of Company Board	Laki-laki Male	Perempuan Female	Pihak Independen Independent Party
Komisaris	2	1	1
Direksi	4	0	0

G-02 Total kehadiran direksi dan komisaris ke rapat dewan
G-02 Board Meeting Attendance

Deskripsi Description	Jumlah rapat dewan (di tahun pelaporan) Number of board meetings (in reporting year)	Rata-rata persentase kehadiran direksi/komisaris dalam rapat dewan (di tahun pelaporan) Percentage of board meeting attendances (in reporting year)
Jumlah kehadiran direksi ke rapat dewan Director Attendance to Board Meetings	19	90.53%
Jumlah kehadiran komisaris ke rapat dewan Comissioner Attendance to Board Meetings	12	56.25%

Kebijakan mengenai manajemen lainnya
Other governmental-related policy

G-03 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai pemisahan Chairman of The Board dan CEO?
G-03 Does the company has a policy regarding separation of the Chairman of the Board and CEO?

☐ Ya / Yes ☑ Tidak / No

Perseroan tidak memiliki kebijakan mengenai pemisahan Chairman of The Board dan CEO.

The Company does not have a policy regarding the separation of the Chairman of the Board and the CEO.

G-04 Perusahaan memiliki kebijakan penilaian dewan direksi dan komisaris
G-04 Does the company has a policy regarding board appraisal?

☑ Ya / Yes ☐ Tidak / No

Perseroan telah memiliki kebijakan penilaian Direksi dan Dewan Komisaris yang dijalankan melalui mekanisme yang dijalankan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

The Company has a policy for evaluating the Board of Directors and the Board of Commissioners, which is carried out through a mechanism managed by the Nomination and Remuneration Committee.

G-05 Perusahaan memiliki kebijakan pelatihan dewan direksi dan komisaris
G-05 Does the company has a policy regarding board training and development?

☐ Ya / Yes ☑ Tidak / No

Perseroan tidak secara spesifik memiliki kebijakan terkait pelatihan Direksi dan Dewan Komisaris. Namun demikian, sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris dan Direksi telah mengikuti berbagai pelatihan yang relevan dengan tuntutan serta dinamika industri.

The Company does not yet have a specific policy regulating training for the Board of Directors and the Board of Commissioners. However, throughout 2024, the Board of Commissioners and the Board of Directors had participated in various training programs relevant to industry demands and dynamics.

G-06 Kriteria khusus yang digunakan untuk pemilihan dewan direksi dan komisaris
G-06 Does the company has a criteria regarding board appointment and re-election?

☑ Ya / Yes ☐ Tidak / No

Perseroan telah memiliki kriteria khusus dalam proses pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris yang diterapkan melalui mekanisme yang dijalankan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

The Company has specific criteria in the process of selecting the Board of Directors and the Board of Commissioners, which are implemented through a mechanism managed by the Nomination and Remuneration Committee.

G-07 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai kode etik dan/atau anti-korupsi?
G-07 Does the company has a policy regarding ethics and/or anticorruption?

☑ Ya / Yes ☐ Tidak / No

Perseroan memiliki kebijakan terkait kode etik dan/atau anti-korupsi sebagai pedoman etika bekerja karyawan yang disosialisasikan secara berkala dalam berbagai kesempatan. Adapun, kebijakan ini bersifat internal dan disosialisasikan pada karyawan dan mitra kerja.

The Company has a policy related to the code of ethics and/or anti-corruption as a guideline for employee work ethics. This policy is regularly communicated on various occasions. It is an internal policy and is shared with employees and business partners.

G-08 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai perlakuan adil terhadap Pemegang Saham?
G-08 Does the company has a policy regarding equitable treatment of shareholders?

☑ Ya / Yes ☐ Tidak / No

Kebijakan terkait perlakuan adil terhadap Pemegang Saham termaktub secara prosedural, dimana Perseroan senantiasa menjalin komunikasi yang baik dengan para Pemegang Saham melalui berbagai publikasi dan menggunakan berbagai platform baik daring maupun luring.

The policy regarding fair treatment of Shareholders is embedded procedurally, whereby the Company consistently maintains good communication with the Shareholders through various publications and by using multiple platforms, both online and offline.

G-09 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai kewajiban direksi/komisaris untuk mencegah adanya konflik kepentingan?
G-09 Does the company have a policy regarding the obligations of directors/commissioners to prevent conflicts of interest?

☑ Ya / Yes ☐ Tidak / No

Perseroan memiliki kebijakan terkait konflik kepentingan yang tertuang dalam Kode Etik sebagai pedoman etika bekerja karyawan yang disosialisasikan secara berkala dalam berbagai kesempatan. Adapun, kebijakan ini bersifat internal dan disosialisasikan pada karyawan dan mitra kerja.

Untuk menghindari konflik kepentingan, Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan menandatangani Pakta Integritas yang selanjutnya didokumentasikan oleh Perseroan.

The Company has a policy on conflict of interest as outlined in the Code of Ethics, which serves as an ethical work guideline for employees and is regularly communicated on various occasions. This policy is internal in nature and is disseminated to employees and work partners.

To avoid conflicts of interest, the Board of Commissioners, Directors, and employees of the Company sign an Integrity Pact, which is subsequently documented by the Company.

Lain-Lain
Others

Keselarasan Laporan Keberlanjutan/Tahunan dengan Metrik ESG
Alignment of Sustainability/Annual Reports with ESG Metrics

Kinerja Performance	Kode Code	Nama Metrik Metric Name	Halaman di Laporan Keberlanjutan/Tahunan Pages in the Sustainability/ AnnualReport
Lingkungan Environment	E-01	Laporan Emisi Gas Rumah Kaca Greenhouse Gas Emission Report	null
	E-02	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Greenhouse Gas Emission Intensity	null
	E-03	Konsumsi Energi Listrik Electricity Consumption	211
	E-04	Konsumsi Air Water Consumption	211
	E-05	Limbah yang Dihasilkan Waste Generated	212
	E-06	Komitmen Perusahaan untuk Mencapai Target Net Zero Emission Company Commitment to Achieving Net Zero Emission Target	null
	E-07	Komitmen Perusahaan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca Company Commitment to Reduce Emission	null

Kinerja Performance	Kode Code	Nama Metrik Metric Name	Halaman di Laporan Keberlanjutan/Tahunan Pages in the Sustainability/ AnnualReport
Sosial Social	S-01	Kesetaraan Gender Gender Equality	65
	S-02	Pegawai Berdasarkan Gender dan Kelompok Umur Employees by Gender and Age Group	65
	S-03	Tingkat Pergantian Pegawai Employee Turnover Rate	192
	S-04	Jumlah Pegawai Sementara Number of Temporary Officers	65
	S-05	Pelatihan dan Pengembangan Pegawai Employee Training and Development	66
	S-06	Jumlah Kecelakaan Kerja Number of Work Accidents	null
	S-07	Kejadian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Human Rights Violation Incidents	null
	S-08	Kebijakan Pelecehan Seksual dan/atau Non- diskriminasi Sexual Harassment and/or Non-Discrimination Policy	null
	S-09	Kebijakan Mengenai Hak Asasi Manusia Policy on Human Rights	null
	S-10	Kebijakan Pekerja Anak dan/atau Pekerja Paksa Child Labor and/or Forced Labor Policy	null
	S-11	Kebijakan Mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan Kerja yang Aman dan Layak diberikan Kepada Seluruh Karyawan Occupational Health and Safety Policy and Safe and Secure Work Environment are provided to all employees.	214
	S-12	Corporate Social Responsibility	215
Tata-kelola Governance	G-01	Keberagaman Manajemen dan Independensi Management Diversity and Independence	343
	G-02	Total Kehadiran Direksi dan Komisaris ke Rapat Dewan Total Attendance of Directors and Commissioners to Board Meetings	169
	G-03	Kebijakan Pemisahan Chairman of the Board dan CEO Chairman of the Board and CEO Separation Policy	null
	G-04	Kebijakan Penilaian Dewan Direksi dan Komisaris Board of Directors and Commissioners Assessment Policy	99
	G-05	Kebijakan Pelatihan Dewan Direksi dan Komisaris Board of Directors and Commissioners Training Policy	null
	G-06	Kriteria Khusus Pemilihan Dewan Special Criteria for Election of the Board	95,105
	G-07	Kode Etik dan/atau Anti-Korupsi Code of Ethics and/or Anti-Corruption	155,163
	G-08	Kebijakan Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham Fair Treatment Policy for Shareholders	null
	G-09	Pencegahan Konflik Kepentingan Conflict of Interest Prevention Policy	98,111

Standar Internasional yang Diacu dan Verifikasi Pihak Ketiga
Referenced International Standards and Third Party Verification

Apakah pelaporan keberlanjutan perusahaan selaras dengan kerangka pelaporan keberlanjutan tertentu?
Is the Company's sustainability reporting aligned with a specific sustainability reporting framework?

☐ Ya / Yes ☑ Tidak / No

Apakah pelaporan keberlanjutan perusahaan dijamin atau divalidasi oleh pihak ketiga?
Is the Company's sustainability reporting assured or validated by a third party?

☐ Ya / Yes ☑ Tidak / No

Referensi Kriteria POJK No. 51/POJK.03/2017
Criteria Reference pursuant to POJK No. 51/POJK.03/2017

No	Uraian Description		Halaman Page
1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	Explanation of Sustainability Strategy	177
2	Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan	Performance Overview of Sustainability Aspect	192
	a. Aspek ekonomi, paling sedikit meliputi: 1. Kuantitas produksi atau jasa yang dijual; 2. Pendapatan atau penjualan; 3. Laba atau rugi bersih; 4. Produk ramah lingkungan; dan 5. Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan.	a. Economic aspect, at least includes: 1. Quantity of products and services sold; 2. Revenue or sales; 3. Net profit or loss; 4. Environment-friendly products; and 5. Engangement of local party related to business process of Sustainable Finance.	192
	b. Aspek Lingkungan Hidup, paling sedikit meliputi: 1. Penggunaan energi (antara lain listrik dan air); 2. Pengurangan emisi yang dihasilkan Perseroan yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan lingkungan hidup; 3. Pengurangan limbah dan efluen (limbah yang telah memasuki lingkungan) yang dihasilkan Perseroan yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup; atau 4. Pelestarian keanekaragaman hayati bagi Perseroan yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup.	b. Environmental aspect, at least includes: 1. Energy consumption (including electricity and water); 2. Reduction of emission generated by a Company in which its business process directly related to environment; 3. Reduction of waste and effluent (waste entering environment) generated by a Company in which its business process directly related to environment; or 4. Biodiversity conservation for a Company in which its business process directly related to environment.	192
	c. Aspek sosial yang merupakan uraian mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan (termasuk orang, daerah, dan dana).	c. Social aspect, which is a description of positive and negative impacts of implementing Sustainability Finance for community and environment (including people, area, and fund).	192
3	Profil Singkat Perseroan	Brief Company Profile	173
	a. Visi, misi, dan nilai keberlanjutan Perseroan;	a. Corporate vision, mission, and sustainable values;	173
	b. Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat surat elektronik (e-mail), dan situs web, serta kantor cabang dan/ atau kantor perwakilan Perusahaan;	b. E-mail address, website, and addresses of branch offices and/or representative office of the Company;	173
	c. Skala usaha Perusahaan secara singkat, meliputi:	c. Brief Company's business scale includes:	
	1. Total aset atau kapitalisasi aset, dan total liabilitas (dalam jutaan rupiah);	1. Total assets or asset capitalization, and total liabilities (in million rupiah);	5,73,210
	2. Jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan;	2. Total employees classified by gender, position, age, education, and employment status;	64,65
	3. Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah); dan	3. Percentage of shareholding (public and government); and	61
	4. Wilayah Operasional	4. Area of operations.	40,41
	d. Penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan;	d. Brief description of products, services, and business operations;	39
	e. Keanggotaan pada asosiasi;	e. Membership in associations;	69
	f. Perubahan Perusahaan yang bersifat signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan.	f. Significant changes of the Company, including those related to closing or opening branch(es), and ownership structure.	40,41,59

No	Uraian Description		Halaman Page
4	Penjelasan Direksi	Board of Directors' Explanation	194
	a. Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan, paling sedikit meliputi: 1. Penjelasan nilai keberlanjutan bagi Perusahaan; 2. Penjelasan respon Perusahaan terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan; 3. Penjelasan komitmen pimpinan Perusahaan dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan; 4. Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan 5. Tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan.	a. Policy to respond challenges to comply with a sustainability strategy, at least includes: 1. Explanation of sustainability values for the Company; 2. Explanation of the Company's responses to issues related to Sustainable Finance implementation; 3. Explanation of commitment of the Company's leaders to achieve targets of Sustainable Finance implementation; 4. Performance achievements of Sustainable Finance implementation; 5. Challenges on performance achievement of Sustainable Finance implementation;	195
	b. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, paling sedikit meliputi: 1. Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup) dibandingkan dengan target; dan 2. Penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan (bagi Perusahaan yang diwajibkan membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan).	b. Sustainable Finance implementation, at least includes: 1. Performance achievement of Sustainable Finance implementation (economic, social, and environmental aspects) compared with targets; and 2. Explanation of achievements and challenges, including important events during the reporting period (for a Company required to make an Sustainable Finance Action Plan).	197
	c. Strategi pencapaian target, paling sedikit meliputi: 1. Pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup; 2. Pemanfaatan peluang dan prospek usaha; dan 3. Penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan Perusahaan.	b. Strategy for achieving targets, at least includes: 1. Risk management of implementation Sustainable Finance related to economic, social, and environmental aspects; 2. Opportunities utilization and business prospect; and 3. Explanation of external economic, social, and environmental conditions potentially affecting the Company's sustainability.	199

No	Uraian Description		Halaman Page
5	Tata Kelola Keberlanjutan	Sustainability Governance	204
	a. Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/ atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.	a. Explanation of duties of the Board of Directors and the Board of Commissioners, employee, executive, and/or work unit to be responsible for Sustainable Finance implementation.	204
	b. Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/ atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.	b. Explanation of competence development for members of Board of Directors and Board of Commissioners, employee, executive, and/or work unit to be responsible for Sustainable Finance implementation.	206
	c. Penjelasan mengenai prosedur Perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur,memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko perusahaan.	c. Explanation of the Company's procedure in identifying, measuring, monitoring, and controlling risks of Sustainable Finance implementation related to economic, social, and environmental aspects, including roles of the Board of Directors and the Board of Commissioners in managing, reviewing periodically, and evaluating effectiveness of the Company's risk management process.	206
	d. Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi: 1. Keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian *(assessment)* manajemen, RUPS, surat keputusan atau lainnya; dan 2. Pendekatan yang digunakan Perusahaan dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain dalam bentuk dialog, survei, dan seminar.	d. Explanation of stakeholders, includes: 1. Engagement of stakeholders based on result of assessment on the management, GMS, decree, or others; and 2. Approach with used by the Company to engage stakeholders in Sustainable Finance implementation, among others, in the form of dialog, survey, and seminar.	206
	e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.	e. Problems encountered, developments, and influence toward implementing Sustainable Finance.	206
6	Kinerja Keberlanjutan	Sustainability Performance	208
	a. Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal Perseroan.	a. Explanation of activities in building the culture of sustainability within the Company.	208
	b. Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam 3 tahun terakhir meliputi: 1. Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dengan Laporan Tahunan; dan 2. Perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.	b. Explanation of economic performance in the last 3 years, includes: 1. Comparison between target and performance of production, portfolio, financing target, or investment, revenue and profit/loss in terms of the Sustainability Report are prepared separately from the Annual Report; and 2. Comparison between target and performance of portfolio, financing target, or investment of financial instruments or projects which are in line with the implementation of Sustainable Finance.	208

No	Uraian Description		Halaman Page
	c. Kinerja sosial dalam 3 tahun terakhir: 1. Komitmen Perusahaan untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen. 2. Ketenagakerjaan, paling sedikit memuat: a. Pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak; b. Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional; c. Lingkungan bekerja yang layak dan aman; dan d. Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai. 3. Masyarakat, paling sedikit memuat: a. Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan; b. Mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti; dan c. TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat.	c. Social performance in the last 3 years: 1. Company's commitment to providing consumers with equal products and/or services. 2. Employment, at least contains: a. Statement on equality of job opportunity and existence of forced labor and child labor; b. Percentage of permanent employee's lowest remuneration to regional minimum wage; c. Decent, safe workplace; and d. Training and development on employees' capability. 3. Community, at least contains: a. Information of activities or area of operations making positive and negative impacts on surrounding communities, including financial literacy and inclusion; b. Public complaint mechanism as well as total public complaints received and followed up; and c. Social and environmental responsibility which can be associated with support to the sustainable development goals, i.e. types and achievements of community empowerment programs.	212
	d. Kinerja Lingkungan Hidup, paling sedikit memuat: 1. Biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan; 2. Uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang; dan 3. Uraian mengenai penggunaan energi, paling sedikit memuat: a. Jumlah dan intensitas energi yang digunakan; dan b. Upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan.	d. Environmental performance, at least contains: 1. Environmental cost spent; 2. Explanation of use of environment-friendly material, e.g. use of recycled material; and 3. Explanation of energy consumption, at least contains: a. Total and intensity of energy consumed; and b. Effort and achievement of energy efficiency pmplemented, including use of renewable energy.	211

No	Uraian Description		Halaman Page
	e. Kinerja Lingkungan Hidup bagi Perusahaan yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup paling sedikit memuat: 1. Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d; 2. Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem; 3. Keanekaragaman hayati, paling sedikit memuat: a. Dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati; dan b. Usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna. 4. Emisi, paling sedikit memuat: a. Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya; dan b. Upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan. 5. Limbah dan efluen, paling sedikit memuat: a. Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis; b. Mekanisme pengelolaan limbah dan efluen; dan c. Tumpahan yang terjadi (jika ada). 6. Jumlah dan materi pengaduan Lingkungan Hidup yang diterima dan diselesaikan.	e. Environmental performance for a company in which its business process directly related to environment, at least contains: 1. Performance as referred to in item d; 2. Information of activities or area of operations making positive and negative impacts on surrounding environment, especially of effort for improving ecosystem carrying capacity. 3. Biodiversity, at least contains: a. Impacts from area of operations which is close to or located within a conservation area or an area having biodiversity; and b. Biodiversity conservation efforts, include flora or fauna species protection. 4. Emission, at least contains: a. Total and intensity of emission generated by type; and b. Efforts and achievements of emission reduction. 5. Waste and effluent, at least contains: a. Total waste and effluent generated by type; b. Mechanism of waste and effluent treatment; and c. Spills (if any). 6. Total and subjects of environmental complaints received and settled.	-
	f. Tanggung jawab pengembangan Produk dan/ atau Jasa Keuangan Berkelanjutan, paling sedikit memuat: 1. Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan; 2. Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan; 3. Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari Produk dan/ atau Jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif; 4. Jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya; atau 5. Survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan.	f. Responsibility for developing Products and/ or Services of Sustainable Finance, at least contains: 1. Innovations and development of Products and/ or Services of Sustainable Finance; 2. Total and percentage of products and services valuated in terms of their safety to customers; 3. Positive and negative impacts as the result of Products and/or Services of Sustainable Finance and their distribution processs, as well as mitigation measures taken to control negative impact; 4. Number of products withdrawn along with the reason; or 5. Customer satisfaction survey of Products and/or Services of Sustainable Finance.	216
7	Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada.	Written verification of independent party, if any.	-

Lembar Umpan Balik
Feedback Sheet

Laporan ini menyajikan informasi terkait kinerja Perseroan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perseroan sangat mengharapkan kritik, masukan, atau saran dari Bapak/Ibu/Saudara untuk meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan berikutnya.

This report presents information related to performance of the Company in economic, social, and environmental aspects. The Company welcomes your criticisms, feedback or suggestions for improving quality of the subsequent sustainable reports.

Pertanyaan Questions	Setuju Agree	Tidak setuju Disagree
Laporan Keberlanjutan ini telah memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan Perseroan. This Sustainability Report has provided useful information on economic, social, and environmental performance of the Company.		
Data dan informasi yang diungkapkan mudah dipahami, lengkap, transparan, dan berimbang. Data and information disclosed are easy to understand, complete, transparent, and balanced.		
Data dan informasi yang disajikan berguna dalam pengambilan keputusan. Data and information presented are useful for making decision.		
Laporan ini menarik dan mudah dibaca. This report is interesting and easy to read.		

Mohon berikan nilai mengenai aspek yang terdapat dalam Laporan ini. (1 = paling penting, 2 = penting, 3 = tidak penting, 4 = sangat tidak penting).

Please score on aspects presented in this Report. (1 = most important, 2 = important, 3 = not important, 4 = very important).

- ☐ Kinerja Ekonomi / Economic Performance
- ☐ Ketenagakerjaan / Employment
- ☐ Pengelolaan Limbah / Waste Treatment
- ☐ Portofolio Produk / Product Portfolio
- ☐ Penggunaan Energi / Energy Consumption
- ☐ Privasi Nasabah / Customer Privacy
- ☐ Pelatihan dan Pendidikan / Training and Education
- ☐ Kesetaraan *Gender* dan Kesempatan Kerja yang Adil / Gender Equality and Fair Job Opportunity
- ☐ Anti Korupsi dan Anti *Fraud* / Anti-Corruption and Anti-Fraud
- ☐ Teknologi Informasi / Information Technology
- ☐ Kesehatan dan Keselamatan Kerja / Work Health and Safety
- ☐ Pengurangan Emisi / Emission Reduction

Mohon berikan komentar/saran/usulan bagi laporan ini / Please give your comments/suggestions/proposals for this report

.....

.....

.....

.....

Profil Anda / Your Profile

Nama / Name :

Pekerjaan / Occupation :

Nama Lembaga/Perusahaan / Name of Institution/Company :

Kontak (telepon, email) / Contact (phone, e-mail) :

Kategori Pemangku Kepentingan / Category of Stakeholder

- ☐ Investor / Investor
- ☐ Nasabah / Customer
- ☐ Pegawai / Employee
- ☐ Distributor / Distributor
- ☐ Media / Media
- ☐ Masyarakat / Public
- ☐ Pemerintah / Government
- ☐ Lain-lain, sebutkan / Others, please specify

.....

Saran dan tanggapan yang Anda berikan atas informasi yang disajikan dalam Laporan ini mohon dikirimkan kepada:
Please send your suggestion and response to information presented in this Report to:

Kantor Pusat / Head Office
Menara Astra 32nd Floor
Jl. Jend Sudirman Kav. 5-6 Jakarta 10220
Telp: +62 21 5085.1848 Fax: +62 21 5085.1849

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2024
PT MIZUHO LEASING INDONESIA TBK

STATEMENT LETTER OF
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE 2024 ANNUAL REPORT
PT MIZUHO LEASING INDONESIA TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan.

We the undersign below hereby declare that all information in the 2024 Annual Report of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk has been provided completely and are fully responsible for the accuracy of the content of the Company's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, April 2025

The statement is made in truthfulness.
Jakarta, April 2025

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Bhindawati Gunawan
Komisaris
Commissioner

Yasuo Imaizumi
Komisaris Utama
President Commissioner

Mohammad Syahrial
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Direksi
Board of Directors

Konosuke Mizuta
Direktur Utama
President Director

Shunsuke Kojima
Direktur
Director

Yudi Gustiawan
Direktur
Director

Andi Harjono
Direktur
Director

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN YANG TELAH DIAUDIT /
AUDITED ANNUAL FINANCIAL STATEMENT

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk

LAPORAN KEUANGAN/FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023/
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2024 AND 2023

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

	Halaman/ Page	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		**DIRECTORS' STATEMENT LETTER**
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**
LAPORAN KEUANGAN - Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023		**FINANCIAL STATEMENTS** - For the years ended December 31, 2024 and 2023
Laporan Posisi Keuangan	1	Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas	4	Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas	5	Statements of Cash Flows
Catatan Atas Laporan Keuangan	6	Notes to Financial Statements
INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN - Rasio-Rasio Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (Tidak Diaudit)	95	**SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION** - Financial Ratio of Financial Services Authority (Unaudited)

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Menara Astra 32nd Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6
Jakarta - 10220
t: +62 21 5085.1848
f: +62 21 5085.1849

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini/ We, the undersigned:

1.	Nama/ Name	: Konosuke Mizuta
	Alamat kantor/ Office address	: Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220
	Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ Domicile as stated in ID card	: Veranda Private Villa Unit O. Jl. H Saidi I No 57A RT. 14 RW. 07, Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru. Jakarta Selatan
	Nomor telepon/ Phone number	: (021) 50851848
	Jabatan/ Position	: Direktur Utama/ President Director
2.	Nama/ Name	: Shunsuke Kojima
	Alamat kantor/ Office address	: Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220
	Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ Domicile as stated in ID card	: Apartemen Plaza Senayan, Unit No C#026 Tower C Level 2, Jl. Tinju No. 1, Gelora Bung Karno, Tanah Abang Jakarta Pusat
	Nomor telepon/ Phone number	: (021) 50851848
	Jabatan/ Position	: Direktur/ Director

Menyatakan bahwa/ State that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024;
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

1. We are responsible for the preparation and presentation of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk's financial statements for the year ended December 31, 2024;
2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in the financial statements is complete and correct;
   b. The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;
4. We are responsible for the Company's internal control system.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 17 Maret 2025 / March 17, 2025

METERAI TEMPEL
45ECCAMX143263871

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk

Konosuke Mizuta
Direktur Utama/President Director

Shunsuke Kojima
Direktur/Director

Deloitte.

Liana Ramon Xenia & Rekan
Registered Public Accountants
License No. 432/KM.1/2024
The Plaza Office Tower 32nd Floor
Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30
Jakarta 10350
Indonesia

Tel: +62 21 5081 8000
Fax: +62 21 2992 8300
Email: iddttl@deloitte.com
www.deloitte.com/id

Laporan Auditor Independen

No. 00048/2.1460/AU.1/09/1626-3/1/III/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

No. 00048/2.1460/AU.1/09/1626-3/1/III/2025

To the Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

Opinion

We have audited the financial statements of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (the "Company"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Liana Ramon Xenia & Rekan ("LRX") is a member (as such term is used in Regulation of the Ministry of Finance Number 186/PMK.01/2021 and Regulation of the Financial Services Authority Number 9 of 2023 (the "Relevant Law")) of Deloitte Southeast Asia Limited ("DSEAL"). DSEAL is the registered Foreign Audit Organisation ("Organisasi Audit Asing" or "OAA") to LRX for the purposes of the Relevant Law.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") pada piutang pembiayaan (piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen)

Mengacu pada Catatan 3e Informasi kebijakan akuntansi material - Instrumen keuangan; Catatan 6 Piutang pembiayaan konsumen; Catatan 7 Piutang sewa pembiayaan; dan Catatan 37 Manajemen risiko - risiko kredit.

Pada 31 Desember 2024, Perusahaan memiliki piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan masing-masing sebesar Rp 2.138 miliar dan Rp 956 miliar. Cadangan KKE terhadap piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan masing-masing sebesar Rp 56 miliar dan Rp 76 miliar. Perusahaan mengimplementasikan ketentuan PSAK 109 Instrumen Keuangan untuk menghitung estimasi KKE atas eksposur kredit piutang pembiayaan.

Kami berfokus pada area ini karena besarnya nilai tercatat piutang pembiayaan setelah nilai KKE yang mewakili 92,25% dari total aset Perusahaan. Penentuan KKE didasarkan pada beberapa asumsi yang kompleks dan subjektif dan juga pertimbangan yang digunakan oleh Manajemen. Lebih jauh, kondisi ekonomi dan geopolitik saat ini turut meningkatkan tingginya ketidakpastian atas estimasi dan tingkat pertimbangan yang dibutuhkan untuk digunakan dalam mengestimasi KKE. Dengan melihat faktor-faktor ini, kami mengidentifikasi KKE sebagai hal audit utama.

Perusahaan menghitung KKE untuk piutang pembiayaan yang tidak mengalami penurunan nilai maupun untuk yang mengalami penurunan nilai. Untuk piutang pembiayaan yang tidak mengalami penurunan nilai dan yang mengalami penurunan nilai, yang tidak dianggap signifikan secara individual, Perusahaan menilai KKE secara kolektif. Untuk piutang pembiayaan yang mengalami penurunan nilai, yang nilainya signifikan secara individual, Perusahaan menilai KKE secara individual.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows:

Expected credit losses ("ECL") on financing receivables (finance lease receivables and consumer financing receivables)

Refer to Note 3e Material accounting policy information - Financial instruments; Note 6 Consumer financing receivables; Note 7 Finance lease receivables; and Note 37 Risk management - credit risk.

As at December 31, 2024, the Company has financing receivables comprising of consumer financing receivables and finance lease receivables amounting to Rp 2,138 billion and Rp 956 billion, respectively. Allowance for ECL against these consumer financing receivables and finance lease receivables amounted to Rp 56 billion and Rp 76 billion, respectively. The Company applies PSAK 109 Financial Instruments requirements to calculate the ECL for its financing receivables exposures.

We focused on this area due to the significance of the carrying value of financing receivables after its ECL representing 92.25% of the total assets of the Company. The determination of ECL is based on a number of complex and subjective assumptions and judgments used by Management. Further, the current economic and geopolitical condition have increased the uncertainty of these estimates and degree of judgment required to be exercised in estimating the ECL. In view of these factors, we identified ECL as a key audit matter.

The Company calculates ECL for both non-impaired and impaired financing receivables. For non-impaired and impaired financing receivables, which are not considered individually significant, the Company assesses ECL on a collective basis. For impaired financing receivables, which are considered individually significant, the Company assesses ECL on an individual basis.

a. KKE kolektif atas piutang pembiayaan

KKE kolektif atas piutang pembiayaan dihitung dengan mempertimbangkan probability of *default ("PD"), loss given default ("LGD"), exposure at default ("EAD")*. Perusahaan menggunakan model yang bergantung pada data internal dan eksternal. Perhitungan KKE kolektif menggunakan pertimbangan dan asumsi yang signifikan; termasuk di dalamnya:

- Penilaian atas peningkatan risiko kredit secara signifikan dan kredit *default;*
- Ekspektasi atas faktor makro ekonomi masa depan dan skenario, termasuk penentuan bobot pertimbangannya; dan
- Asumsi model yang digunakan.

b. KKE individual atas piutang pembiayaan

KKE individual atas piutang pembiayaan dihitung dengan estimasi arus kas yang akan diterima di masa depan, dengan mengombinasikan beberapa skenario dan asumsi probabilitas tertimbang. Perhitungan KKE individual menggunakan pertimbangan manajemen dan asumsi yang signifikan, termasuk di dalamnya:

- Perkiraan atas arus kas yang diterima;
- Penilaian aset yang dijaminkan; dan
- Estimasi atas skenario, waktu untuk menerima pembayaran di masa depan dan bobot pertimbangannya.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespon hal audit utama:

a. KKE kolektif atas piutang pembiayaan

Kami memeroleh pemahaman mengenai pengendalian yang berhubungan dengan audit kami dan menilai desain dan implementasi dari pengendalian yang relevan atas KKE kolektif atas piutang pembiayaan.

Kami melibatkan spesialis internal kami untuk membantu kami dalam melakukan prosedur berikut ini dengan dasar sampel:

- Mengevaluasi kelayakan penilaian Perusahaan atas kriteria peningkatan risiko kredit secara signifikan;
- Menguji pendekatan Perusahaan dalam pemilihan skenario ekonomi untuk menilai kewajaran atas skenario ekonomi dan bobot pertimbangan yang diaplikasikan oleh Perusahaan;

a. Collective ECL on financing receivables

Collective ECL on financing receivables is calculated by considering the probability of default ("PD"), loss given default ("LGD") and exposure at default ("EAD"). The Company utilizes modelling which are reliant on internal and external data. The measurement of collective ECL involves significant management judgments and assumptions, including, among others:

- Assessment of significant increase in credit risk and default criteria;
- Expectations of forward-looking macroeconomic factors and scenarios, including in determining the probability weightings; and
- The model assumptions used.

b. Individual ECL on financing receivables

Individual ECL on financing receivables is assessed by the estimation of future cash flows, combining scenarios and probability weightings assumptions. The measurement of individual ECL involves significant management judgments and assumptions, including, among others:

- Expected amount of cash flows;
- Collateral valuations; and
- Estimations of the scenarios, timing to collect the future cash flows and the weighting.

How our audit addressed the key audit matter

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

a. Collective ECL on financing receivables

We obtained an understanding of the controls relevant to our audit and assessed the design and implementation of such relevant controls over the collective ECL on financing receivables.

We involved our internal specialist to assist us in performing the following procedures on a sampling basis:

- Evaluated the appropriateness of the Company's assessment of its SICR criteria;
- Challenged the Company's approach for the selection of economic scenario to assess the reasonableness of the economic scenarios and corresponding weightages applied by the Company;

- Menilai kewajaran atas pertimbangan dan asumsi utama yang dibuat oleh Manajemen pada model dan parameter dalam *probabilities of default (PD)* dan *loss given default (LGD)*;
- Melakukan validasi independen atas model KKE dan penilaian hasil validasi model oleh Manajemen.

Kami juga melakukan prosedur substantif berikut ini:

- Mengevaluasi masukan dan asumsi relevan yang digunakan oleh Perusahaan dalam model KKE secara basis sampel;
- Menghitung ulang KKE secara independen.

Kami telah menilai ketepatan atas pengungkapan terkait yang dibuat di dalam laporan keuangan.

b. KKE individual atas piutang pembiayaan

Kami memeroleh pemahaman tentang pengendalian yang relevan terhadap audit kami dan menilai desain dan implemetasi pengendalian yang relevan atas KKE atas piutang pembiayaan.

Untuk sampel kami atas piutang pembiayaan yang dinilai secara individual, kami melakukan prosedur berikut:

- Mengkritisi asumsi utama manajemen yang diterapkan dalam ekspektasi arus kas masa depan termasuk jumlah, waktu, dan probabilitas tertimbang yang digunakan;
- Melakukan perhitungan ulang KKE individual.

Kami telah menilai ketepatan atas pengungkapan terkait yang dibuat di dalam laporan keuangan.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak mencantumkan laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

- Assessed the reasonableness of key judgments and assumptions made by management in the probabilities of default (PD) and loss given default (LGD) models and parameters;
- Performed independent validation of the ECL models and assessment of model validation results by management.

We also performed the following substantive testing:

- Evaluated relevant inputs and assumptions used by the Company in the ECL models, on a sampling basis;
- Independently recalculated the ECL.

We have assessed appropriateness of the related disclosures made in the financial statements.

b. Individual ECL on financing receivables

We obtained an understanding of the controls relevant to our audit and assessed the design and implementation of the controls of such relevant controls over the individual ECL on financing receivables.

For our selected samples of financing receivables that are individually assessed, we performed the following procedures:

- Challenged management's key assumptions applied on the expected future cash flows of the debtor, including amounts, timing, and probability-weighted outcome used;
- Recalculated the individual ECL

We have assessed appropriateness of the related disclosures made in the financial statements.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above, when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya manjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

LIANA RAMON XENIA & REKAN

Bayu M. Dayat, CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP. 1626

17 Maret 2025/*March 17, 2025*

00048

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
		Rp'000	Rp'000	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	5			Cash and cash equivalents
Pihak berelasi	33	5.687.837	15.959.589	Related parties
Pihak ketiga		34.969.863	34.401.613	Third parties
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi cadangan kerugian kredit ekspektasian sebesar Rp 56.000.586 pada 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: Rp 34.579.910)	6	2.081.769.148	1.730.181.413	Consumer financing receivables - net of allowance for expected credit losses of Rp 56,000,586 at December 31, 2024 (December 31, 2023: Rp 34,579,910)
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian kredit ekspektasian sebesar Rp 76.451.006 pada 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: Rp 37.269.504)	7	879.800.794	813.258.674	Finance lease receivables - net of allowance for expected credit losses of Rp 76,451,006 at December 31, 2024 (December 31, 2023: Rp 37,269,504)
Piutang lain-lain - bersih	8			Other receivables - net
Pihak berelasi	33	2.652.802	814.930	Related parties
Pihak ketiga		94.572.910	81.663.691	Third parties
Biaya dibayar dimuka	9			Prepaid expenses
Pihak berelasi	33	-	919	Related parties
Pihak ketiga		2.949.220	2.611.973	Third parties
Aset pajak tangguhan	19	15.758.424	11.655.658	Deferred tax assets
Aset tetap - bersih	11	48.322.103	51.804.948	Property and equipment - net
Aset derivatif	12	3.767.652	7.953.302	Derivative assets
Aset hak-guna - bersih	10	29.344.088	32.112.821	Right-of-use assets - net
Aset lain-lain	13			Other assets
Pihak berelasi	33	73.175	74.175	Related parties
Pihak ketiga		10.855.060	11.088.144	Third parties
JUMLAH ASET		3.210.523.076	2.793.581.850	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

	Catatan/ *Notes*	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang usaha				Trade payables
Pihak ketiga	15	4.490.658	967.812	Third parties
Biaya masih harus dibayar	17			Accrued expenses
Pihak berelasi	33	937.028	3.301.360	Related parties
Pihak ketiga		8.424.336	8.601.448	Third parties
Utang pajak	18	751.117	2.054.169	Taxes payables
Liabilitas derivatif	12	-	231.106	Derivative liabilities
Liabilitas sewa	20	24.620.644	27.301.101	Lease liabilities
Utang bank	14			Bank loans
Pihak berelasi	33	1.864.742.184	1.352.214.146	Related parties
Pihak ketiga		482.675.377	587.592.116	Third parties
Utang lain-lain	16			Other payables
Pihak ketiga		58.225.524	46.367.903	Third parties
Liabilitas imbalan pasca-kerja	21	21.660.141	14.465.851	Post-employment benefits liabilities
Jumlah Liabilitas		2.466.527.009	2.043.097.012	Total Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham				Share capital - par value Rp 100 (in full Rupiah) per share
Modal dasar - 10.000.000.000 saham				Authorized capital - 10,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.687.353.997 saham	22	568.735.400	568.735.400	Issued and fully paid - 5,687,353,997 shares
Tambahan modal disetor	23	97.585.106	97.585.106	Additional paid-in capital
Komponen ekuitas lain		(3.867.512)	465.594	Other equity components
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya		1.800.000	1.500.000	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		79.743.073	82.198.738	Unappropriated
Jumlah Ekuitas		743.996.067	750.484.838	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		3.210.523.076	2.793.581.850	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

	Catatan/ *Notes*	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
PENDAPATAN				INCOME
Pembiayaan konsumen	24	320.987.712	265.366.992	Consumer financing
Sewa pembiayaan	25	64.713.504	55.537.525	Finance leases
Administrasi dan provisi	26	53.010.206	45.414.855	Administration and provision
Penalti	27	19.734.034	20.747.410	Penalty
Bunga		351.787	327.809	Interest
Pendapatan lain-lain	28	9.856.463	13.946.045	Other income
Jumlah Pendapatan		468.653.706	401.340.636	Total Income
BEBAN				EXPENSES
Bunga dan keuangan	29	(134.316.036)	(105.225.739)	Interest and financing charges
Kepegawaian	30	(126.182.821)	(112.200.741)	Personnel
Umum dan administrasi	31	(60.684.352)	(69.639.710)	General and administrative
Penyisihan kerugian penurunan nilai	6,7,8	(152.059.696)	(52.164.322)	Provision for impairment losses
Beban lain-lain		(447.074)	(875.327)	Other expenses
Jumlah Beban		(473.689.979)	(340.105.839)	Total Expenses
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(5.036.273)	61.234.797	PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX
Kini		-	-	Current
Tangguhan	19	2.880.608	(84.969)	Deferred
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan		2.880.608	(84.969)	Income Tax (Expense) Benefit
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		(2.155.665)	61.149.828	PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	21	(3.426.553)	225.804	Loss on defined benefit actuarial program
Pajak penghasilan terkait	19	753.842	(49.677)	Income tax related
Jumlah		(2.672.711)	176.127	Total
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:
Rugi dari lindung nilai arus kas	12	(2.128.711)	(947.193)	Loss from cash flow hedge
Pajak penghasilan terkait	19	468.316	208.383	Income tax related
Jumlah		(1.660.395)	(738.810)	Total
Jumlah Rugi Komprehensif Lain		(4.333.106)	(562.683)	Total Other Comprehensive Loss
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(6.488.771)	60.587.145	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	32	(0,38)	10,75	BASIC EARNING (LOSS) PER SHARE (in full Rupiah)

Lihat Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

	Catatan/ *Notes*	Modal Saham/ *Share Capital*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Komponen Ekuitas Lain/ *Other equity components*: (Kerugian) Keuntungan Aktuarial/ *(Loss) Gain on Actuarial*	Komponen Ekuitas Lain/ *Other equity components*: Lindung Nilai Arus Kas/ *Cash Flows Hedge*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*: Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*: Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
		Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo per 1 Januari 2023		568.735.400	97.585.106	(1.669.034)	2.697.311	1.200.000	21.348.910	689.897.693	Balance as of 1 January 2023
Pencadangan saldo laba	22	-	-	-	-	300.000	(300.000)	-	General reserve
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	61.149.828	61.149.828	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain		-	-	176.127	(738.810)	-	-	(562.683)	Other comprehensive income
Saldo 31 Desember 2023		568.735.400	97.585.106	(1.492.907)	1.958.501	1.500.000	82.198.738	750.484.838	Balance as of 31 December 2023
Pencadangan saldo laba	22	-	-	-	-	300.000	(300.000)	-	General reserve
Rugi tahun berjalan		-	-	-	-	-	(2.155.665)	(2.155.665)	Loss for the year
Penghasilan komprehensif lain		-	-	(2.672.711)	(1.660.395)	-	-	(4.333.106)	Other comprehensive income
Saldo 31 Desember 2024		568.735.400	97.585.106	(4.165.618)	298.106	1.800.000	79.743.073	743.996.067	Balance as of 31 December 2024

Lihat Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

	Catatan/ *Notes*	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan		2.188.748.492	1.985.638.276	Cash receipts from consumer financing and finance lease
Penerimaan kas sehubungan dengan pembiayaan bersama		1.034.281	13.671.384	Cash receipts in connection with joint financing
Penerimaan operasional lainnya		28.758.730	23.996.128	Other operating received
Penerimaan tagihan pajak		1.505.723	39.070.270	Claims for tax refund received
Penerimaan bunga		351.787	327.809	Interest received
Pembayaran kas untuk:				Cash paid for:
Pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan		(2.253.900.653)	(2.101.507.590)	Consumer financing and finance lease
Beban operasional		(169.411.464)	(162.652.632)	Operational expenses
Pembayaran kas sehubungan dengan pembiayaan bersama		(62.928.000)	-	Cash payment in connection with joint financing
Pembayaran operasional lainnya		(10.156.850)	(5.222.536)	Payment for other operating activities
Pembayaran bunga		(131.582.396)	(104.306.869)	Payment of interest
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi		(407.580.350)	(310.985.760)	Net Cash Flows Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	11	(8.109.386)	(10.463.707)	Acquisition of property and equipments
Hasil penjualan aset tetap	11	1.055.392	889.114	Proceed from sale of property and equipments
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(7.053.994)	(9.574.593)	Net Cash Flows Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang bank	14	1.068.345.947	1.120.732.594	Receipts of bank loans
Pembayaran utang bank	14	(660.734.648)	(842.303.949)	Payments for bank loans
Pembayaran pendanaan lainnya		(2.680.457)	(10.106.826)	Other funding payments
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		404.930.842	268.321.819	Net Cash Flows Provided by Financing Activities
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(9.703.502)	(52.238.534)	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	5	50.361.202	102.599.736	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	5	40.657.700	50.361.202	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Lihat Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk ("Perusahaan") didirikan dengan nama PT Maxima Perdana Finance berdasarkan Akta No. 43 tanggal 21 Juli 1993 dari Sri Nanning, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-11503.HT.01.01.Th.93 tanggal 29 Oktober 1993 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 4 November 1994, Tambahan No. 8832. Perusahaan telah melakukan perubahan nama beberapa kali, terakhir dari PT Verena Multi Finance Tbk menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Verena Multi Finance Tbk No. 8 tanggal 19 September 2022 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Otoritas Jasa Keuangan, masing-masing dengan surat No AHU-0068946.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 24 September 2022 dan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-806/NB.11/2022 tanggal 12 Desember 2022.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir adalah sebagaimana tersebut dalam Akta No. 8 tanggal 19 September 2022 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068946.AH.01.02.Tahun 2022 Tanggal 24 September 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan utama Perusahaan meliputi usaha pembiayaan:

a. Pembiayaan investasi

b. Pembiayaan modal kerja

c. Pembiayaan multiguna

d. Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (the "Company") was established under the name of PT Maxima Perdana Finance based on Deed No. 43 dated July 21, 1993 from Sri Nanning, S.H., Notary in Jakarta. The Deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. C2-11503.HT.01.01.Th.93 dated October 29, 1993, and was published in Supplement No. 8832 of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 88 dated November 4, 1994. The Company has changed its name several times, the latest from PT Verena Multi Finance Tbk to become PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk based on the Deed of Shareholders' Extraordinary Meeting of PT Verena Multi Finance Tbk No. 8 dated September 19, 2022 from Notary Fathiah Helmi, S.H. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as well as the Financial Services Authority, in letter No. AHU-0068946.AH.01.02 YEAR 2022 dated September 24, 2022 and Copy of Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-806/NB.11/2022 dated December 12, 2022, respectively.

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment to the Company's Articles of Association is as stated in Deed No. 8 dated September 19, 2022 from Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta, have received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0068946.AH.01.02. Year 2022 dated September 24, 2022 concerning Approval of Amendments to the Limited Liability Company Articles of Association.

Based on Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of activities of the Company comprises of financing activities:

a. Investment financing

b. Working capital financing

c. Multipurpose financing

d. Other Financing Business Activities Based on Approval from OJK.

Selain kegiatan usaha utama di atas, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa (*fee*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

In addition to the above main business activities, the Company can carry out supporting business activities to perform operating leases and/or fee-based activities as long as the Company does not violate the laws and regulations in the financial services sector.

Perusahaan, dengan nama sebelumnya, PT Maxima Perdana Finance, memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 994/KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993. Perusahaan mulai beroperasi pada tanggal 21 Juni 2003, dengan izin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 Jo. No. KEP-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010 Jo. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.KEP-806/NB.11/2022 tanggal 12 Desember 2022.

The Company, under its former name of PT Maxima Perdana Finance, obtained its license to operate as a financing company from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia based on Decision Letter No. 994/KMK.017/1993 dated December 30, 1993. The Company started operating on June 21, 2003 with operating license based on the Decision Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-161/KM.6/2004 dated May 4, 2004 Jo. No. KEP-654/KM.10/2010 dated December 9, 2010 Jo. Copy of Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-806/NB.11/2022 dated December 12, 2022.

Saat ini, Perusahaan menjalankan usaha utamanya dibidang pembiayaan konsumen dan aktivitas sewa pembiayaan dan mempunyai 31 (tiga puluh satu) Kantor Cabang yang terletak di kota Bandar Lampung, Balikpapan, Bandung, Banjarmasin, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cikarang, Denpasar, Depok, Jakarta, Jambi, Kediri, Lamongan, Makassar, Malang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Surabaya, Surakarta, Tangerang dan Yogyakarta. Kantor Pusat Perusahaan beralamat di Menara Astra Lantai 32, Jl Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Jakarta Pusat 10220.

Currently, the Company is engaged in consumer financing and finance lease activities and has 31 (thirty-one) Branch Offices located in the city of Bandar Lampung, Balikpapan, Bandung, Banjarmasin, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cikarang, Denpasar, Depok, Jakarta, Jambi, Kediri, Lamongan, Makassar, Malang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Surabaya, Surakarta, Tangerang, and Yogyakarta. The Head Office is located at Menara Astra, 32nd Floor, Jl Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Central Jakarta 10220.

Perusahaan berada dalam pengendalian Mizuho Leasing Co., Ltd. (dahulu IBJ Leasing, Co., Ltd.) Jepang.

The Company is under control of Mizuho Leasing Co., Ltd. (formerly IBJ Leasing, Co., Ltd.) Japan.

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan

b. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2 tanggal 7 November 2024 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.09-0276667 tanggal 18 November 2024 dan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023

The composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2024 based on the Company's Extraordinary Shareholders Meeting, which was notarized by Fathiah Helmi, S.H., No. 2 dated November 7, 2024, which the notification of the company data change has been received and recorded in the Administration System of Legal Entities of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, No. AHU-AH.01.09-0276667, dated November 18, 2024 and The composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2023 based on the Company's

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 30 tanggal 23 November 2022 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.09-0079225 tanggal 24 November 2022. Berikut adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut:

Extraordinary Shareholders Meeting, which was notarized by Fathiah Helmi, S.H., No. 30 dated November 23, 2022, which the notification of the company data change has been received and recorded in the Administration System of Legal Entities of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, No.AHU-AH.01.09-0079225, dated November 24, 2022 are as follows:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *Desember 31, 2023*	
Dewan Komisaris			**Board of Commissioners**
Komisaris Utama	Yasuo Imaizumi	Takeshi Sasaki	President Commissioner
Komisaris	Bhindawati Gunawan	Roosniati Salihin*)	Commissioner
Komisaris Independen	Mohammad Syahrial	Mohammad Syahrial	Independent Commissioner
Direksi			**Board of Directors**
Direktur Utama	Konosuke Mizuta	Konosuke Mizuta	President Director
Direktur	Andi Harjono	Andi Harjono	Director
Direktur	Shunsuke Kojima	Shunsuke Kojima	Director
Direktur	Yudi Gustiawan	Yudi Gustiawan	Director
	-	Ade Rafida Saulina S.	Director

*) Masa jabatan Beliau berakhir pada tanggal 5 November 2023 dikarenakan telah meninggal dunia /
Her term of office ended on November 5, 2023 due to She has passed away

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Direktur Utama mencakup memastikan proses manajemen risiko, kepatuhan, audit internal, penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, legal korporasi, *corporate strategic planning*, *business processing*, sekretaris perusahaan dan hubungan investor. Direktur Utama juga bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan berkelanjutan serta program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

The scope of duties and responsibilities of the President Director include ensuring the process of risk management, compliance, internal audit, anti-money laundering, prevention of terrorism financing and prevention of financing proliferation of mass destruction weapon, customer protection, personal data protection, corporate legal, corporate strategic planning, business processing, corporate secretary and investor relations. President Director also responsible of the implementation of sustainable finance and corporate social and environmental responsibility program.

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Direktur mencakup pengembangan bisnis dan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis, menjalankan fungsi pemasaran, pemberian pembiayaan, manajemen aset, analisa kredit, pencarian sumber dana, proses dan pelaporan keuangan dan akuntansi, teknologi informasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, legal litigasi, memastikan semua fungsi dan tanggung jawab kepada pemangku kepentingan, membuat pelaporan kepada otoritas terkait secara lengkap dan tepat waktu dan menjalankan program literasi dan inklusi keuangan.

The scope of duties and responsibilities of the Director covers business development and achievement of targets set in the business plan, carrying out marketing functions, financing provision, asset management, credit analysis, finding sources of funds, financial and accounting processes and reporting, information technology, human resources, procurement of goods and services, legal litigation, ensuring all functions and responsibilities to Stakeholders, making full and timely reporting to relevant authorities and carrying out financial inclusion and literacy.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 tertanggal 31 Maret 2023, susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Based on the Resolution of the Board of Commissioners No. 003/BOC-MLI/LEGAL/III/23 dated March 31, 2023, the composition of the Company's Audit Committee as of December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	31 Desember 2024 dan 2023/ *December 31, 2024 and 2023*	
Komite Audit		**Audit Committee**
Ketua	Mohammad Syahrial	Chairman
Anggota	Gregory O.K Ongko	Member
Anggota	Brantas	Member

Sekretaris Perusahaan dan Kepala Audit Internal Perusahaan masing-masing dijabat oleh Fransisca Y. Gunawan dan Nicholas Joshua Lawrence F.

The Corporate Secretary and Head of Internal Audit of the Company is held by Fransisca Y. Gunawan and Nicholas Joshua Lawrence F, respectively.

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah 767 dan 711 karyawan (tidak di audit).

As of December 31, 2024 and 2023, the Company had a total of 767 and 711 employees, respectively (unaudited).

c. Penawaran Umum Efek Perusahaan

c. Public Offering of the Company's shares

Penawaran Umum Saham Perdana

Initial Public Offering of Shares

Pada tanggal 13 Juni 2008, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) berdasarkan surat BAPEPAM-LK No. S-3825/BL/2008 untuk melakukan penawaran umum atas 460.000.000 saham Perusahaan kepada masyarakat dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 100 (dalam Rupiah penuh) dan harga penawaran per saham sebesar Rp 100 (dalam Rupiah penuh). Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 25 Juni 2008. Penawaran umum saham perdana ini disertai dengan penerbitan 46.000.000 Waran Seri I.

On June 13, 2008, the Company received the effective statement from the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK") based on the BAPEPAM-LK's letter No. S 3825/BL/2008 to carry out an Initial Public Offering of 460,000,000 shares with par value and offering price of Rp 100 (in full Rupiah) and the offering price per share of Rp 100 (in full Rupiah). On June 25, 2008, the Company's shares were listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). Along with the Initial Public Offering, the Company also issued 46,000,000 Series I Warrants.

Penawaran Umum Saham Terbatas I

Limited Public Offering of Shares I

Pada tanggal 27 April 2017, Perusahaan telah memperoleh surat pernyataan efektif dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No. S-204/D.04/2017 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD") sebanyak 1.583.160.556 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) setiap lembar saham yang ditawarkan dengan harga Rp 112 (dalam Rupiah penuh) setiap lembar sahamnya atau sebesar Rp 177.313.982 ribu dan biaya emisi saham sebesar Rp 6.180.220 ribu.

On April 27, 2017, the Company obtained the notice of effectivity from the Board of Commissioners of Financial Service Authority Chief Executive of Capital Market Supervision No. S-204/D.04/2017 to conduct a Limited Public Offering ("PUT I") in accordance of issuing pre-emptive rights ("HMETD") of 1,583,160,556 common shares with par value of Rp 100 (in full Rupiah) per share with an offering price of Rp 112 (in full Rupiah) per shares or equivalent to Rp 177,313,982 thousand and issuance cost of Rp 6,180,220 thousand.

Penawaran Umum Saham Terbatas II

Pada tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan telah memperoleh surat pernyataan efektif dari Dewan Komisioner OJK Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No. S-193/D.04/2018 untuk melakukan PUT II dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak 3.102.193.089 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) setiap lembar saham yang ditawarkan dengan harga Rp 140 (dalam Rupiah penuh) setiap lembar sahamnya atau sebesar Rp 434.307.033 ribu dengan biaya emisi saham sebesar Rp 3.945.083 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah saham Perusahaan yang tercatat di BEI sebanyak 5.687.353.997 lembar.

Ikthisar penerbitan dan pencatatan saham Perusahaan di BEI adalah sebagai berikut:

Limited Public Offering of Shares II

On December 28, 2018, the Company obtained the notice of effectivity from the Board of Commissioners of Financial Service Authority Chief Executive of Capital Market Supervision No. S-193/D.04/2018 to conduct PUT II in accordance of issuing HMETD of 3,102,193,089 common shares with par value of Rp 100 (in full Rupiah) per share with an offering price of Rp 140 (in full Rupiah) per share or equivalent to Rp 434,307,033 thousand with issuance cost of Rp 3,945,083 thousand.

As of December 31, 2024 and 2023, the Company's outstanding shares listed on the BEI were 5,687,353,997 shares.

Summary of the issuance and listing of the Company's shares in BEI are as follows:

Keterangan	Tahun/ *Year*	Jumlah Saham Ditempatkan dan Beredar/ *Number of Shares Issued and Outstanding*	Akumulasi Jumlah Saham Tercatat/ *Accumulated Number of Listed Shares*	Nilai Nominal/ *Par Value*	Descriptions
Sebelum Penawaran Umum Perdana	-	542.000.000	542.000.000	100	Before Initial Public Offering
Penawaran Umum Perdana	2008	460.000.000	1.002.000.000	100	Initial Public Offering
Konversi Waran	2009	20	1.002.000.020	100	Conversion of Warrant
Konversi Waran	2010	332	1.002.000.352	100	Conversion of Warrant
Penawaran Umum Terbatas I	2017	1.583.160.556	2.585.160.908	100	Limited Public Offering I
Penawaran Umum Terbatas II	2018	3.102.193.089	5.687.353.997	100	Limited Public Offering II

d. Transaksi Akuisisi dan Penggabungan Usaha

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan memiliki 20% saham pada PT IBJ Verena Finance (IBJV), entitas asosiasi, yang seperti halnya Perusahaan juga menjalankan usaha sebagai perusahaan pembiayaan.

d. Acquisiton and Merger Transaction

As of December 31, 2018, the Company owned 20% shares in PT IBJ Verena Finance (IBJV), an associate, which like the Company also engaged business activities as financing company.

Berdasarkan Akta No. 24 tanggal 25 Januari 2019 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., seluruh saham IBJV sebanyak 141.000 saham yang dimiliki oleh Mizuho Leasing, Co., Ltd., (dahulu IBJ Leasing, Co., Ltd.,) entitas induk Perusahaan (Catatan 23), telah dialihkan kepada Perusahaan. Sehubungan dengan pengalihan ini, maka kepemilikan Perusahaan atas saham IBJV meningkat dari semula sebesar 20% menjadi 100% dan dengan demikian Perusahaan memperoleh pengendalian penuh atas IBJV dan bagi Perusahaan IBJV merupakan entitas anak. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0085595 tanggal 12 Februari 2019.

Based on Notarial Deed No. 24 dated January 25, 2019 from Notary Fathiah Helmi, S.H., all of 141,000 IBJV's shares which owned by Mizuho Leasing, Co., Ltd., (formerly IBJ Leasing Co., Ltd.,) parent entity of the Company (Note 23), have been transferred to the Company. Pertinent to this transfer, the Company's share ownership in IBJV then increased from previously 20% to become 100% and therefore the Company obtained full control over IBJV and for the Company, IBJV then considered as a subsidiary. This Deed has been received and registered in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0085595 dated February 12, 2019.

Transaksi pengalihan saham di atas termasuk dalam lingkup kombinasi bisnis entitas sepengendali sebagaimana diatur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 338 tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", mengingat bahwa baik sebelum ataupun setelah terjadinya transaksi, seluruh entitas yang bergabung pada akhirnya tetap dikendalikan oleh pihak yang sama, yaitu Mizuho Leasing Co., Ltd. (dahulu IBJ Leasing, Co., Ltd.) (Catatan 1a), dan pengendalian tersebut tidak bersifat sementara. Efektif 25 Januari 2019, Mizuho Leasing Co., Ltd., (dahulu IBJ Leasing, Co., Ltd.) adalah entitas yang mengendalikan Perusahaan, menggantikan PT Bank Pan Indonesia Tbk. Sesuai dengan PSAK No. 338, penggabungan tersebut dilakukan sejak awal periode di mana entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian, yang dalam hal ini sejak awal bulan Januari 2019.

Such transfer of shares are within the scope of business combination for entities under common control as prescribed in the Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 338 on "Business Combination of Entities Under Common Control", considering prior or post transaction occurred, all of combined entities ultimately still under the common control of the same party, which is Mizuho Leasing, Co., Ltd. (formerly IBJ Leasing Co., Ltd) (Note 1a), and such control is not temporarily. Efective January 25, 2019, Mizuho Leasing Co., Ltd,. (formerly IBJ Leasing Co., Ltd) is an entity which control over the Company, replacing PT Bank Pan Indonesia Tbk. In accordance with PSAK No. 338, such combination shall carried out since the beginning of period where combined entities are under common control, which since the beginning of January 2019.

Imbalan yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada Mizuho Leasing Co., Ltd., (dahulu IBJ Leasing, Co., Ltd.) atas 80% saham IBJV yang diambil alih tersebut, adalah sebesar Rp 214.307.032 ribu dan arus kas neto yang dibayarkan, setelah dikurangi kas IBJV yang diperoleh, adalah sebesar Rp 117.134.966 ribu. Adapun selisih yang timbul dari jumlah tercatat perolehan Perusahaan terhadap seluruh saham IBJV dengan porsi kepemilikan Perusahaan atas aset neto IBJV pada tanggal pengalihan tersebut adalah sebesar Rp 32.990.607 ribu yang seluruhnya dicatat pada ekuitas sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" (Catatan 23).

Consideration paid by the Company to Mizuho Leasing., Co., Ltd., (formerly IBJ Leasing Co., Ltd) for 80% of IBJV acquired shares amounted to Rp 214,307,032 thousand and net cash flow paid, net of IBJV's acquired cash, amounted to Rp 117,143,966 thousand. The difference arise from the total carrying amount of the Company's acquisition cost for the all IBJV shares with the Company's ownership portion over the net assets of IBJV on such transfer date amounted to Rp 32,990,607 thousand which entirely accounted for in equity as part of "Additional Paid-in Capital" account (Note 23).

Selanjutnya berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan No. 23 tanggal 17 Juli 2019 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan Akta Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkular IBJV No. 24 pada tanggal dan dari Notaris yang sama, seluruh pemegang saham, baik dari Perusahaan ataupun IBJV, telah menyetujui rencana penggabungan usaha antara Perusahaan dengan IBJV, entitas anak. Rancangan dan konsep penggabungan tersebut telah dinyatakan dalam Akta Penggabungan Usaha No. 25 pada tanggal dan dari Notaris yang sama. Dalam akta tersebut disepakati bahwa IBJV merupakan pihak yang menggabungkan diri, dan sebagai akibatnya keberadaan IBJV akan berakhir secara hukum tanpa melalui proses likuidasi, dan Perusahaan, sebagai entitas yang dipertahankan, akan menerima penggabungan tersebut terhitung sejak tanggal efektifnya penggabungan usaha. Pada tanggal efektif penggabungan usaha, secara hukum, seluruh aset dan liabilitas IBJV serta seluruh perjanjian dan kontrak antara IBJV dengan pihak ketiga akan beralih kepada Perusahaan. Oleh karena penggabungan usaha ini merupakan pengabungan secara vertikal, yang terjadi di antara Perusahaan sebagai entitas induk dan IBJV sebagai entitas anak (100%), maka tidak menimbulkan konversi saham ataupun mengakibatkan perubahan struktur permodalan pada Perusahaan. Setelah penggabungan usaha, seluruh kegiatan usaha pembiayaan yang dijalankan oleh IBJV tetap dilanjutkan oleh Perusahaan.

Moreover, based on Notarial Resolution Deed of Extraordinary Shareholders Meeting (RUPSLB) of the Company No. 23 dated July 17, 2019 from Notary Fathiah Helmi, S.H., and Notarial Circular Resolution Deed of Shareholders of IBJV No. 24 on the same date and from the same Notary, all of the shareholders, both of the Company or IBJV, have approved the merger plan between the Company and IBJV, a subsidiary. The merger draft and concept have been notarized in the Merger Deed No. 25 on the same date and from the same Notary. In such deed, both parties have agreed that IBJV shall become the party who merged, and as a result, IBJV shall no longer legally exist without through liquidiation process, and the Company, as a surviving entity, shall accept such merger on the effective merger date. On the effective merger date, legally, all of the IBJV's assets and liabilities as well as the all agreements and contracts between IBJV and third parties shall be transferred to the Company. Since such merger is a vertical merger, occurred between the Company as parent entity and IBJV as a subsidary (100% owned), therefore neither rise a share conversion nor affect to the Company's capital structure. Post-merger, all of the financing business activities carried out by IBJV still continue by the Company.

Perusahaan telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan dengan penggabungan usaha tersebut berdasarkan Surat yang diterbitkan oleh Dewan Komisioner OJK Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No. S-110/D.04/2019 tanggal 10 Juli 2019. Akta Penggabungan Usaha di atas juga telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.10-0008953 tanggal 23 Juli 2019. Di samping itu, sesuai dengan Keputusan yang diterbitkan oleh Dewan Komisioner OJK Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya No. 113/KD.05/2019 tanggal 20 November 2019, izin usaha IBJV sebagai perusahaan pembiayaan telah dicabut terhitung sejak tanggal 23 Juli 2019.

The Company has obtained effective statement from Financial Services Authority (OJK) regarding with such merger based on Letter issued by OJK Board of Commissioners - Chief Executive of Capital Market Supervisor No. S-110/D.04/2019 dated July 10, 2019. The Merger Deed have also been received and registered in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-0008953 dated July 23, 2019. In addition, pursuant to Decision issued by OJK Board of Commissioners - Chief Executive of Insurance, Pension Fund, Financial Institution, and Other Financial Institution Supervisor No. 113/KD.05/2019 dated November 20, 2019, IBJV's business license as financing company has been cancelled effective July 23, 2019.

Pada tanggal 5 Agustus 2019, Perusahaan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk mengumumkan hasil penggabungan usaha di atas melalui surat kabar.

On August 5, 2019, the Company has complied with the statutory law provision to announce its merger result through a newspaper.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Amendemen/Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK telah diubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK - IAI").

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan sejumlah amendemen/ penyesuaian PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024.

PSAK 116 (amendemen) *Sewa: Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik*

Perusahaan telah mengadopsi amandemen PSAK 116 untuk pertama kalinya pada tahun berjalan. Amandemen PSAK 116 menambahkan persyaratan pengukuran selanjutnya untuk transaksi jual dan sewa-balik yang memenuhi persyaratan dalam PSAK 115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan untuk dicatat sebagai penjualan. Amandemen tersebut mengharuskan penjual-penyewa untuk menentukan 'pembayaran sewa' atau 'pembayaran sewa yang direvisi' sehingga penjual-penyewa tidak mengakui keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak penggunaan yang dimiliki oleh penjual-penyewa, setelah tanggal dimulainya.

Amandemen tersebut tidak memengaruhi keuntungan atau kerugian yang diakui oleh penjual-penyewa terkait dengan penghentian sebagaian atau seluruh sewa. Tanpa persyaratan baru ini, penjual-penyewa bisa mengakui keuntungan atas hak penggunaan yang dimilikinya semata-mata karena pengukuran ulang liabilitas sewa (misalnya, setelah modifikasi sewa atau perubahan jangka waktu sewa) dengan menerapkan persyaratan umum dalam PSAK 116. Hal ini khususnya dapat terjadi dalam sewa-balik yang mencakup pembayaran sewa variable yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga.

Sebagai bagian dari amandemen, DSAK-IAI mengubah Contoh Ilustrasi dalam PSAK 116 dan menambahkan contoh baru untuk mengilustrasikan pengukuran selanjutnya atas aset hak-guna dan liabilitias sewa dalam transaksi jual dan sewa-balik dengan pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga. Contoh ilustrasi tersebut juga mengklarifikasi bahwa liabilitas yang timbul dari transaksi jual dan sewa-balik yang memenuhi syarat sebagai penjualan dengan menerapkan PSAK 115 adalah liabilitas sewa.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")

a. Amendments/Improvements to Standards Effective in the Current Year

Beginning January 1, 2024, references to the individual PSAKs and ISAKs have been changed as published by Financial Accounting Standards Board of Institute of Indonesia Chartered Accountants ("DSAK - IAI").

In the current year, the Company has applied a number of amendments/improvements to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2024.

PSAK 116 (amendment) *Lease Liability in a Sale and Leaseback*

The Company has adopted the amendments to PSAK 116 for the first time in current year. The amendments to PSAK 116 add subsequent measurement requirements for sale and leaseback transactions that satisfy the requirements in PSAK 115 Revenue from Contracts with Customers to be accounted for as a sale. The amendments require the seller-lessee to determine 'lease payments' or 'revised lease payments' such that the seller-lessee does not recognize a gain or loss that relates to the right of use retained by the seller-lessee, after the commencement date.

The amendments do not affect the gain or loss recognised by the seller-lessee relating to the partial or full termination of a lease. Without these new requirements, a seller-lessee may have recognized a gain on the right of use it retains solely because of a remeasurement of the lease liability (for example, following a lease modification or change in the lease term) applying the general requirements in PSAK 116. This could have been particularly the case in a leaseback that includes variable lease payments that do not depend on an index or rate.

As part of the amendments, the DSAK-IAI amended an Illustrative Example in PSAK 116 and added a new example to illustrate the subsequent measurement of a right-of-use asset and lease liability in a sale and leaseback transaction with variable lease payments that do not depend on an index or rate. The illustrative examples also clarify that the liability that arises from a sale and leaseback transaction that qualifies as a sale applying PSAK 115 is a lease liability.

Penjual-penyewa menerapkan amandemen secara retrospektif sesuai dengan PSAK 208 terhadap transaksi jual dan sewa-balik yang dilakukan setelah tanggal penerapan awal, yang didefinisikan sebagai awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan PSAK 116.

Penerapan atas PSAK baru/revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

b. Standar dan Amendemen/Penyesuaian Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar, interpretasi dan amandemen-amandemen atas PSAK yang relevan bagi Perusahaan, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

- PSAK 117 *Kontrak Asuransi*
- PSAK 117 (amandemen) *Kontrak Asuransi: Penerapan awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif*
- PSAK 221 (amandemen) *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing: Kekurangan Ketertukaran*

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

A seller-lessee applies the amendments retrospectively in accordance with PSAK 208 to sale and leaseback transactions entered into after the date of initial application, which is defined as the beginning of the annual reporting period in which the entity first applied PSAK 116.

The adoption of these new/revised PSAKs does not result in changes to the Company's accounting policies and has no material effect on the amounts reported in these financial statements.

b. Standard and Amendments/Improvements to Standards Issued not yet Adopted

At the date of authorization of these consolidated financial statements, the following standard, interpretation and amendments to PSAKs relevant to the Company were issued but not effective, with early application permitted:

Effective for periods beginning on or after January 1, 2025

- PSAK 117 *Insurance Contracts*
- PSAK 117 (amendment) *Insurance Contracts: Initial application of PSAK 117 and PSAK 109 – Comparative Information*
- PSAK 221 (amendment) *The effects of changes in foreign exchange rates: Lack of Exchangeability*

As of the issuance date of the financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretations on the financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

a. Statement of Compliance

These financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI).

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (”BAPEPAM-LK”), yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) sejak tanggal 1 Januari 2013) No.VIII.G.7 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.KEP-347/BL/2012 tanggal 25 September 2012 tentang ”Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (”BAPEPAM-LK”), whose function has been transferred to the Financial Services Authority (”OJK”) starting January 1, 2013), rule No.VIII.G.7, Appendix of the Decree of the Chairman of the BAPEPAM-LK No.KEP-347/BL/2012 dated September 25, 2012 regarding ”Financial Statements Presentation and Disclosure of the Issuer or Public Company”.

b. Dasar Penyusunan

b. Basis of Preparation

Dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

The measurement basis used in the financial statements is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases as described in the related accounting policies.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, terlepas dari apakah harga tersebut dapat diamati secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengestimasi nilai wajar dari suatu aset atau liabilitias, Perusahaan memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Nilai wajar untuk tujuan pengukuran dan/atau pengungkapan pada laporan keuangan ditentukan atas dasar tersebut kecuali untuk transaksi sewa yang merupakan ruang lingkup PSAK 116, dan pengukuran yang memiliki kemiripan dengan nilai wajar namun bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai pakai dalam PSAK 113.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Company takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. Fair value for measurement and/or disclosure purposes in these financial statements is determined on such a basis, except for leasing transactions that are within the scope of PSAK 116, and measurements that have some similarities to fair value but are not fair value, such as net realizable value in PSAK 113.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The statement of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

Direksi memiliki, pada saat persetujuan laporan keuangan, suatu ekspektasi yang memadai bahwa Perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan keberadaan operasinya untuk di masa yang akan datang. Sehingga, mereka melanjutkan penerapan dasar akuntansi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan.

The directors have, at the time of approving the financial statements, a reasonable expectation that the Company has adequate resources to continue in operational existence for the foreseeable future. Thus, they continue to adopt the going concern basis of accounting in preparing the financial statements.

c. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam mata uang fungsional (Rupiah) dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disajikan ke dalam mata uang fungsional berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Nilai tukar kurs mata uang asing ke dalam Rupiah yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

c. Transactions and Foreign Currency Translation of Financial Statements

Transactions in foreign currencies are translated into functional currency (Rupiah) using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. In the statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are presented in the functional currency using Bank Indonesia middle rate prevailing at that date. Any resulting gains or losses from foreign exchanges are credited or charged to current operations.

The foreign exchange rates into Rupiah as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
1 Dolar Amerika Serikat	16.162	15.416	United States Dollar 1
100 Yen	10.236	10.955	Yen 100

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

1) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

2) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

3) merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

1) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).

2) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

d. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company (reporting entity):

a) A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:

1) has control or joint control over the reporting entity;

2) has significant influence over the reporting entity; or

3) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

1) the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).

2) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).

3) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

4) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

5) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.

6) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

7) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

8) entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

3) both entities are joint ventures of the same third party.

4) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

5) the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity.

6) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).

7) a person identified in (a) (1) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

8) the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are dislosed in the financial statements.

e. Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan pada saat Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan dan liabilitas keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika diperlukan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi diakui langsung pada laba rugi.

Semua pembelian atau penjualan reguler aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya berdasarkan tanggal perdagangan. Pembelian atau penjualan reguler adalah pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau konvensi di pasar.

e. Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are recognized on the statement of financial position when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities are added to or deducted from the fair value of the financial assets and financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

All regular way purchases or sales of financial assets are recognized and derecognized on a trade date basis. Regular way purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the time frame established by regulation or convention in the marketplace.

Semua aset keuangan yang diakui selanjutnya diukur secara keseluruhan pada biaya perolehan yang diamortisasi atau nilai wajar, tergantung pada klasifikasi aset keuangan tersebut.

All recognized financial assets are measured subsequently in their entirety at either amortized cost or fair value, depending on the classification of the financial assets.

Klasifikasi aset keuangan

Classification of financial assets

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at amortized cost:

- The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

Instrumen utang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), jika memenuhi kedua kondisi berikut ini:

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI"):

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

- the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets; and

- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

- the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Seluruh aset keuangan lain selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

By default, all other financial assets are subsequently measured at fair value through profit or loss ("FVTPL").

Meskipun telah disebutkan sebelumnya, Perusahaan dapat menetapkan pilihan tak terbatalkan pada saat pengakuan awal aset keuangan sebagai berikut:

Despite the foregoing, the Company may make the following irrevocable election/designation at initial recognition of a financial asset:

- menyajikan perubahan selanjutnya nilai wajar investasi pada instrumen ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain jika kriteria tertentu dipenuhi; dan

- irrevocably elect to present subsequent changes in fair value of an equity investment in other comprehensive income if certain criteria are met; and

- menetapkan aset keuangan yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI sebagai diukur pada FVTPL, jika penetapan itu mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan *(accounting mismatch)*.

- irrevocably designate a debt investment that meets the amortized cost or FVTOCI criteria as measured at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch.

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah nilai aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Pendapatan bunga diakui dalam laba rugi dan dimasukkan dalam pos “Penghasilan bunga”.

Aset keuangan pada FVTPL

Aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI diukur pada FVTPL, khususnya:

- investasi dalam instrumen ekuitas diklasifikasi sebagai FVTPL, kecuali Perusahaan menetapkan investasi ekuitas yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan dan bukan merupakan imbalan kontinjen dari kombinasi bisnis, sebagai FVTOCI pada pengakuan awal.

- instrumen utang yang tidak memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI diklasifikasi sebagai FVTPL. Sebagai tambahan, instrumen utang yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi dan FVTOCI dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan (yang disebut “inkonsistensi akuntansi”) pengukuran dan pengakuan yang timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian dengan basis berbeda. Perusahaan tidak menetapkan instrumen utang sebagai FVTPL.

Amortized cost and effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period.

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition minus the principal repayments, plus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for any loss allowance. On the other hand, the gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any loss allowance.

Interest income is recognized in profit or loss and is included in the "Interest income" line item.

Financial assets at FVTPL

Financial assets that do not meet the criteria for being measured at amortized cost or FVTOCI are measured at FVTPL, specifically:

- investments in equity instruments are classified as at FVTPL, unless the Company designates an equity investment that is neither held for trading nor a contingent consideration arising from a business combination as at FVTOCI on initial recognition.

- debt instruments that do not meet the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria are classified as at FVTPL. In addition, debt instruments that meet either the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria may be designated as at FVTPL upon initial recognition if such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (so called ‘accounting mismatch’) that would arise from measuring assets or liabilities or recognizing the gains and losses on them on different bases. The Company has not designated any debt instruments as at FVTPL.

Aset keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi sepanjang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditetapkan (lihat kebijakan akuntansi terkait lindung nilai). Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi termasuk dividen atau bunga yang diperoleh atas aset keuangan dan dimasukkan dalam pos "Keuntungan dan kerugian lain-lain". Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 35.

Financial assets at FVTPL are measured at fair value at the end of each reporting period, with any fair value gains or losses recognized in profit or loss to the extent they are not part of a designated hedging relationship (see hedge accounting policy). The net gain or loss recognized in profit or loss includes any dividend or interest earned on the financial asset and is included in the "Other gains and losses" line item (Note 48). Fair value is determined in the manner described in Note 35.

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing

Jumlah tercatat aset keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang tersebut dan dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada setiap tanggal pelaporan.

- Untuk aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs diakui dalam laba rugi pada pos "Pendapatan lain-lain" pada saat mengalami keuntungan dan diakui pada pos "Beban lain-lain" pada saat mengalami kerugian.

- Untuk aset keuangan diukur pada FVTPL yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs diakui dalam laba rugi pada pos "Pendapatan lain-lain" pada saat mengalami keuntungan dan diakui pada pos "Beban Bunga dan Keuangan" pada saat mengalami kerugian.

Foreign exchange gains and losses

The carrying amount of financial assets that are denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the Bank Indonesia middle rate at the end of each reporting period.

- for financial assets measured at amortized cost that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are recognized in profit or loss in the "Other Income" line item when the Company incurred gains and recognized in "Other Expenses" when the Company incurred losses.

- for financial assets measured at FVTPL that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are recognized in profit or loss in the "Other Income" line item when the Company incurred gains and recognized in "Interest and Financing Charges" when the Company incurred losses.

Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen dan piutang lainnya. Nilai kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal masing-masing instrumen keuangan.

Perusahaan mengakui ECL 12 bulan dan/atau sepanjang umurnya untuk sewa pembiayaan, pembiayaan konsumen, dan piutang lainnya. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan diestimasi menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan, disesuaikan untuk faktor spesifik debitur, kondisi ekonomi umum serta penilaian atas arah kondisi kini dan perkiraan masa depan pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu atas uang jika tepat.

Impairment of financial assets

The Company recognizes a loss allowance for expected credit losses ("ECL") on finance lease receivables, consumer finance receivables, and other receivables. The amount of expected credit losses is updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition of the respective financial instrument.

The Company recognizes 12 months and/or lifetime ECL for finance lease receivables, consumer finance receivables, and other receivables. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Company's historical credit loss experience, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions and an assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date, including time value of money where appropriate.

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur instrumen keuangan. Sebaliknya, ECL 12 bulan mewakili porsi ECL sepanjang umur yang timbul dari peristiwa gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Lifetime ECL represents the expected credit losses that will result from all possible default events over the expected life of a financial instrument. In contrast, 12-month ECL represents the portion of lifetime ECL that is expected to result from default events on a financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan baik informasi kuantitatif maupun kualitatif yang wajar dan mendukung, termasuk pengalaman historis dan informasi bersifat perkiraan masa depan, yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Informasi masa depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri di mana debitur Perusahaan beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analis keuangan, badan pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan berbagai sumber eksternal aktual dan prakiraan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Perusahaan.

Significant increase in credit risk

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Company compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition. In making this assessment, the Company considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort. Forward-looking information considered includes the future prospects of the industries in which the Company's debtors operate, obtained from economic expert reports, financial analysts, governmental bodies, relevant think-tanks and other similar organizations, as well as consideration of various external sources of actual and forecast economic information that relate to the Company's core operations.

Secara khusus, informasi berikut diperhitungkan ketika menilai apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal:

In particular, the following information is taken into account when assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition:

- memburuknya kondisi usaha, keuangan atau ekonomi yang terjadi saat ini atau prakiraan yang akan menyebabkan penurunan signifikan atas kemampuan peminjam untuk menyelesaikan kewajiban utangnya;
- existing or forecast adverse changes in business, financial or economic conditions that are expected to cause a significant decrease in the debtor's ability to meet its debt obligations;

- terdapat penurunan yang signifikan terhadap hasil operasi debitur, baik secara aktual atau yang diperkirakan akan terjadi; dan
- an actual or expected significant deterioration in the operating results of the debtor; and

- aset keuangan yang telah mengajukan program restrukturisasi.
- financial assets that has been proposed restructured program.

Terlepas dari hasil penilaian di atas, Perusahaan membuat praduga risiko kredit aset keuangan telah meningkat signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari, kecuali jika Perusahaan memiliki informasi yang wajar dan terdukung yang menunjukkan hal sebaliknya.

Irrespective of the outcome of the above assessment, the Company presumes that the credit risk on a financial asset has increased significantly since initial recognition when contractual payments are more than 30 days past due, unless the Company has reasonable and supportable information that demonstrates otherwise.

Meskipun demikian, Perusahaan mengasumsikan bahwa risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika instrumen keuangan tersebut ditetapkan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Instrumen keuangan bertekad memiliki risiko kredit rendah jika:

1. instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah;
2. debitur memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam waktu dekat; dan
3. memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka panjang dapat, tetapi tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

Perusahaan menganggap aset keuangan memiliki risiko kredit rendah ketika aset memiliki peringkat kredit eksternal '*investment grade*' sesuai dengan definisi yang dipahami secara global atau jika peringkat eksternal tidak tersedia, aset tersebut memiliki peringkat internal '*performing*'. *Performing* berarti bahwa rekanan memiliki posisi keuangan yang kuat dan tidak ada jumlah yang tertunggak.

Perusahaan secara teratur memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya jika perlu untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlahnya jatuh tempo.

Definisi gagal bayar

Perusahaan menganggap hal-hal berikut ini merupakan peristiwa gagal bayar untuk tujuan manajemen risiko kredit internal karena pengalaman historis menunjukkan bahwa aset keuangan yang memenuhi salah satu kriteria berikut umumnya tidak dapat dipulihkan:

- ketika terdapat pelanggaran persyaratan keuangan oleh debitur; atau
- Informasi yang dikembangkan secara internal atau diperoleh dari sumber eksternal menunjukkan bahwa debitur kemungkinan tidak akan membayar kreditornya, termasuk Perusahaan, secara penuh (tanpa memperhitungkan jaminan yang dimiliki oleh Perusahaan).

Perusahaan menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 90 hari kecuali jika Perusahaan memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

Despite the foregoing, the Company assumes that the credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition if the financial instrument is determined to have low credit risk at the reporting date. A financial instrument is determined to have low credit risk if:

1. the financial instrument has a low risk of default;
2. the debtor has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term; and
3. adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations.

The Company considers a financial asset to have low credit risk when the asset has external credit rating of 'investment grade' in accordance with the globally understood definition or if an external rating is not available, the asset has an internal rating of 'performing'. Performing means that the counterparty has a strong financial position and there is no past due amounts.

The Company regularly monitors the effectiveness of the criteria used to identify whether there has been a significant increase in credit risk and revises them as appropriate to ensure that the criteria are capable of identifying significant increase in credit risk before the amount becomes past due.

Definition of default

The Company considers the following as constituting an event of default for internal credit risk management purposes as historical experience indicates that financial assets that meet either of the following criteria are generally not recoverable:

- when there is a breach of financial covenants by the debtor; or.
- Information developed internally or obtained from external sources indicates that the debtor is unlikely to pay its creditors, including the Company, in full (without taking into account any collateral held by the Company).

The Company considers that default has occurred when a financial asset is more than 90 days past due unless the Company has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

Aset keuangan memburuk

Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak buruk pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai termasuk data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau tunggakan;
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif untuk aset keuangan itu akibat kesulitan keuangan; atau
- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Kebijakan penghapusan

Perusahaan menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan, atau ketika jumlahnya sudah lebih 180 hari tertunggak, mana yang terjadi lebih dulu. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas paksaan dalam prosedur pemulihan Perusahaan, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Credit-impaired financial assets

A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of that financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- significant financial difficulty of the issuer or the borrower;
- a breach of contract, such as a default or past due event;
- the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider;
- it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.

Write-off policy

The Company writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings, when the amounts are over 180 days past due, whichever occurs sooner. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Company's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

Pengukuran dan pengakuan atas kerugian kredit ekspektasian

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian merupakan fungsi dari *probability of default*, *loss given default* (yaitu besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar) dan eksposur pada gagal bayar. Penilaian *probability of default* dan *loss given default* berdasarkan data historis yang disesuaikan dengan informasi masa depan seperti dijelaskan di atas. Adapun eksposur atas gagal bayar, untuk aset keuangan, diwakili oleh nilai tercatat bruto aset pada tanggal pelaporan.

Untuk aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian diestimasi sebagai selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada Perusahaan sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diekspektasi akan diterima oleh Perusahaan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal. Untuk piutang sewa, arus kas yang digunakan untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian konsisten dengan arus kas yang digunakan dalam mengukur piutang sewa berdasarkan PSAK 116.

Apabila kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur diukur secara kolektif untuk kasus dimana bukti kenaikan signifikan risiko kredit pada level instrumen invidual tidak tersedia, instrumen keuangan dikelompokkan dengan dasar sebagai berikut:

- Status jatuh tempo; dan
- Jenis jaminan untuk piutang sewa pembiayaan, pembiayaan konsumen, dan piutang jual dan sewa-balik.

Pengelompokan ditelaah secara teratur oleh manajemen untuk memastikan setiap kelompok mempunyai karakteristik risiko yang sama.

Jika Perusahaan telah mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan sebesar ECL sepanjang umurnya pada periode pelaporan sebelumnya, tetapi menentukan pada tanggal pelaporan kini bahwa kondisi untuk ECL sepanjang umurnya tidak lagi terpenuhi, Perusahaan mengukur cadangan kerugian sejumlah ECL 12 bulan pada tanggal pelaporan kini.

Perusahaan mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan penyesuaian terkait ke jumlah tercatat melalui akun cadangan kerugian.

Measurement and recognition of expected credit losses

The measurement of expected credit losses is a function of the probability of default, loss given default (i.e. the magnitude of the loss if there is a default) and the exposure at default. The assessment of the probability of default and loss given default is based on historical data adjusted by forward-looking information as described above. As for the exposure at default, for financial assets, this is represented by the assets' gross carrying amount at the reporting date.

For financial assets, the expected credit loss is estimated as the difference between all contractual cash flows that are due to the Company in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at the original effective interest rate. For a lease receivable, the cash flows used for determining the expected credit losses is consistent with the cash flows used in measuring the lease receivable in accordance with PSAK 116.

Where lifetime ECL is measured on a collective basis to cater for cases where evidence of significant increases in credit risk at the individual instrument level may not yet be available, the financial instruments are Companyed on the following basis:

- Past-due status; and
- Classification of collaterals for finance lease receivables, consumer financing receivables, and sale and leaseback receivables.

The Companying is regularly reviewed by management to ensure the constituents of each Company continue to share similar credit risk characteristics.

If the Company has measured the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to lifetime ECL in the previous reporting period, but determines at the current reporting date that the conditions for lifetime ECL are no longer met, the Company measures the loss allowance at an amount equal to 12-month ECL at the current reporting date.

The Company recognizes an impairment gain or loss in profit or loss for all financial instruments with a corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance account.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan asset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Pembelian kembali instrumen ekuitas Perusahaan (saham treasuri) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

Derecognition of financial assets

The Company derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Company are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Company are recorded at the proceeds received net of direct issue costs.

Repurchase of the Company's own equity instruments (treasury shares) is recognized and deducted directly in equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company's own equity instruments.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan tersebut, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dimana beban bunga diakui berdasarkan tingkat pengembalian yang efektif, kecuali untuk liabilitas jangka pendek dimana pengakuan bunganya tidak material.

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL

Liabilitas keuangan diklasifikasi FVTPL ketika liabilitas keuangan merupakan 1) imbalan kontinjen yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 103 diterapkan, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL.

Liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola Perusahaan secara bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang diperdagangkan dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau

Financial liabilities

The Company financial liabilities was classified as FVTPL or at amortized cost.

Financial liabilities at amortized cost

At initial recognition, financial liabilities measured at amortized cost are recognized at fair value net of transaction costs which are directly attributable to the issuance of such, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, where interest expense is recognized based on the rate of effective return, except for short-term liabilities when the recognition of interest would be immaterial.

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liability is 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination to which PSAK 103 applies, 2) held for trading, or 3) it is designated as at FVTPL.

A financial liability is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of repurchasing in the near term; or
- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the Company manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

A financial liability other than a financial liability held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or

- liabilitas keuangan membentuk bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal.

- merupakan bagian kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 239 atau PSAK 109 mengizinkan seluruh kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.

- the financial liability forms part of a group of financial assets or financial liabilities or both which is managed and its performance is evaluated on a fair value basis in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the grouping is provided internally on that basis.

- it forms part of a contract containing one or more embedded derivatives, and PSAK 239 or PSAK 109 permits the entire combined contract (asset or liability) to be designated as at FVTPL.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing

Untuk liabilitas keuangan dalam mata uang asing dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan, keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing ditentukan berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dari instrumen. Keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing diakui dalam laba rugi untuk liabilitas keuangan yang tidak merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan. Untuk yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai untuk lindung nilai atas risiko mata uang asing, keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah.

Nilai wajar liabilitas keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang asing tersebut dan dijabarkan pada kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL, komponen nilai tukar mata uang asing merupakan bagian dari keuntungan atau kerugian nilai wajar dan diakui dalam laba rugi untuk liabilitas keuangan yang tidak merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan.

Foreign exchange gains and losses

For financial liabilities that are denominated in a foreign currency and are measured at amortized cost as at each reporting date, the foreign exchange gains and losses are determined based on the amortized cost of the instruments. These foreign exchange gains and losses are recognized in profit or loss for financial liabilities that are not part of a designated hedging relationship. For those which are designated as a hedging instrument for a hedge of foreign currency risk, foreign exchange gains and losses are recognized in other comprehensive income and accumulated in a separate component of equity.

The fair value of financial liabilities denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the spot rate at the end of the reporting period. For financial liabilities that are measured as at FVTPL, the foreign exchange component forms part of the fair value gains or losses and is recognized in profit or loss for financial liabilities that are not part of a designated hedging relationship.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognizes financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

f. Saling apus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan poisisi keuangan jika Perusahaan tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini dan tidak bersifat kontinjen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dapat dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

f. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when the Company has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

g. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

g. Cash and Cash Equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

h. Piutang Pembiayaan Konsumen

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penurunan nilai dan penghentian pengakuan piutang pembiayaan konsumen mengacu pada Catatan 3e.

Pendapatan administrasi yang diperoleh dari konsumen pada saat perjanjian pembiayaan pertama kali ditandatangani, dibukukan sebagai pendapatan pada laba rugi tahun berjalan.

h. Consumer Financing Receivables

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, impairment and derecognition of consumer financing receivables are discussed in Note 3e.

Administration income earned from customers at the time the consumer financing is signed is recorded as income in the current year.

i. Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

i. Property and Equipment

Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Penyusutan diakui dengan menggunakan metode garis lurus setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets less residual values using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/Years	
Bangunan	20	Building
Prasarana	4 - 8	Leasehold improvement
Kendaraan	4 - 8	Motor vehicles
Perabot dan peralatan kantor	4 - 8	Fixtures and office equipment
Komputer	4	Computer

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and is not depreciated.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of Property and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

An item of Property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of Property and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in profit or loss.

j. Sewa

j. Lease

Perusahaan sebagai penyewa

The Company as lessee

Perusahaan menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal insepsi kontrak. Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perusahaan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Company recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Company recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Company uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan.

The lease liability is presented as a separate line in the statement of financial position.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

Perusahaan mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

The Company remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;

- the lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;

- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau

- the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used); or

- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

- a lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Jika Perusahaan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 237. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Whenever the Company incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 237. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Company expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan.

The right-of-use assets are presented as a separate line in the statement of financial position.

Perusahaan menerapkan PSAK 236 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

The Company applies PSAK 236 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

Perusahaan sebagai penyewa

Sewa dimana Perusahaan sebagai penyewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

The Company as lessor

Leases for which the Company is a lessor are classified as finance leases. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease.

Dalam sewa pembiayaan, jumlah terutang oleh penyewa diakui sebagai piutang sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto Perusahaan. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih penyewa.

Amounts due from lessees under finance leases are recognized as receivables at the amount of the Company's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the Company's net investment outstanding in respect of the leases.

Ketika suatu kontrak mencakup komponen sewa dan non-sewa, Perusahaan menerapkan PSAK 115 untuk mengalokasikan imbalan berdasarkan kontrak bagi setiap komponen.

When a contract includes lease and non-lease components, the Company applies PSAK 115 to allocate the consideration under the contract to each component.

k. Instrumen keuangan derivatif

k. Derivative financial instruments

Perusahaan melakukan berbagai transaksi instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur atas risiko suku bunga dan risiko perubahan nilai tukar mata uang asing menggunakan kontrak nilai tukar mata uang asing (*cross currency*) dan *swap* suku bunga.

Company enters into a variety of derivative financial instruments to manage its exposure to interest rate and foreign exchange rate risks, using foreign exchange contracts (cross currency) and interest rate swaps.

Derivatif awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak dilakukan dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajarnya pada setiap akhir periode pelaporan. Dampak keuntungan atau kerugian diakui segera di laba rugi kecuali jika derivatif ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai di mana saat pengakuan di laba rugi bergantung pada sifat dari hubungan lindung nilai.

Derivatif dengan nilai wajar positif diakui sebagai aset keuangan sedangkan derivatif dengan nilai wajar negatif diakui sebagai liabilitas keuangan. Derivatif tidak saling hapus dalam laporan keuangan kecuali Perusahaan memiliki hak yang memiliki kekuatan hukum dan intensi untuk saling hapus.

Akuntansi lindung nilai

Perusahaan menerapkan akuntansi lindung nilai arus kas. Pada penetapan awal lindung nilai, Perusahaan secara formal mendokumentasikan hubungan antara instrumen lindung nilai dengan item yang dilindung nilai, termasuk tujuan manajemen risiko dan strategi dalam melakukan transaksi lindung nilai, bersamaan dengan metode yang akan digunakan untuk menilai efektifitas dari hubungan lindung nilai tersebut. Perusahaan melakukan penilaian, baik pada awal hubungan lindung nilai maupun secara berkelanjutan, untuk menentukan apakah instrumen lindung nilai tersebut dapat secara sangat efektif menutupi perubahan arus kas dari item yang dilindung nilai.

Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai dicatat dalam laba rugi tahun berjalan. Jika instrumen derivatif dirancang dan memenuhi syarat akuntansi lindung nilai, perubahan nilai wajar yang berkaitan dengan lindung nilai diakui sebagai penyesuaian terhadap item yang dilindungi nilainya dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan atau disajikan dalam ekuitas, tergantung pada jenis transaksi dan efektifitas dari lindung nilai tersebut.

Pada saat derivatif dirancang sebagai instrumen lindung nilai untuk melindungi perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu dari aset atau liabilitas yang diakui atau suatu prakiraan transaksi yang dapat mempengaruhi laba rugi, maka bagian efektif dari perubahan nilai wajar dari derivatif diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya. Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya direklasifikasi ke laporan laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tahun yang sama dimana arus kas yang dilindung nilai tersebut mempengaruhi laba rugi, dan pada baris item yang sama pada laporan laba rugi. Setiap bagian yang tidak efektif dalam perubahan nilai wajar derivatif diakui langsung pada laporan laba rugi.

Derivatives are initially recognized at fair value at the date the derivative contracts are entered into and are subsequently remeasured to their fair values at the end of each reporting period. The resulting gain or loss is recognized in profit or loss immediately unless the derivative is designated and effective as hedging instrument in which event the timing of the recognition in profit or loss depends on the nature of the hedge relationship.

A derivative with a positive fair value is recognized as a financial asset whereas a derivative with a negative fair value is recognized as a financial liability. Derivatives are not offset in the financial statements unless the Company have both a legally enforceable right and intention to offset.

Hedge accounting

Company applied cash flow hedge accounting. On initial designation of the hedge, the Company formally document the relationship between the hedging instruments and hedged items, including the risk management objective and strategy in undertaking the hedge transaction, together with the method that will be used to assess the effectiveness of the hedging relationship. Company make an assessment, both at the inception of the hedge relationship as well as on an ongoing basis, whether the hedging instruments are expected to be “highly effective” in offsetting the changes in the cash flows of the respective hedged items.

Changes in fair value of derivative instruments that do not qualify for hedge accounting are recognized to the current year profit or loss. If derivative instruments are designated and qualify for hedge accounting, changes in fair value of derivative instruments are recorded as adjustments to the hedged items in the current year other comprehensive income or in the equity, depending on the type of hedge transaction represented and the effectiveness of the hedge.

When a derivative is designated as the hedging instrument to hedge the variability in cash flows attributable to a particular risk associated with a recognized asset or liability or a highly probable forecast transaction that could affect profit or loss, the effective portion of changes in the fair value of the derivative is recognized in other comprehensive income. The amount recognized in other comprehensive income is reclassified to the profit or loss as a reclassification adjustment in the same year as the hedged cash flows affect profit or loss, and in the same line item in the statement of profit or loss. Any ineffective portion of changes in the fair value of the derivative is recognized immediately in the statement of profit or loss.

Jika derivatif lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan, atau pada saat lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai arus kas atau pada saat transaksi lindung nilai dibatalkan maka secara prospektif akuntansi lindung nilai dihentikan. Pada saat lindung nilai atas suatu prakiraan transaksi dihentikan, maka jumlah kumulatif yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya sejak tahun dimana lindung nilai tersebut efektif, direklasifikasi dari penghasilan komprehensif lainnya ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada saat prakiraan transaksi tersebut terjadi dan mempengaruhi laba rugi. Jika prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi, maka saldo di penghasilan komprehensif lainnya langsung direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

If the hedging derivative expires or is sold, terminated, or exercised, or when the hedge no longer meets the criteria for cash flow hedge accounting, or when the hedge designation is cancelled, then hedge accounting is discontinued prospectively. When the hedge of a forecast transaction is discounted, the cumulative amount recognized in other comprehensive income from the year when the hedge was effective, is reclassified from other comprehensive income to profit or loss as a reclassification adjustment when the forecast transaction occurs and affects profit or loss. If the forecast transaction is no longer expected to occur, then the balance in other comprehensive income is reclassified immediately to profit or loss as a reclassification adjustment.

l. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi kecuali aset relevan tersebut disajikan pada jumlah revaluasian, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

l. Impairment of Non Financial Asset

At the end of each reporting period, the Company reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss unless the relevant asset is carried at revaluation amount, in which the impairment loss is treated as revaluation decrease.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dibalik, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat ketika kerugian penurunan nilai tidak diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan disajikan pada jumlah revaluasian, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi (lihat Catatan 3e di atas).

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase (see Note 3e above).

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3e.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3e.

m. Jaminan yang Dikuasakan Kembali

Jaminan yang dikuasakan kembali dinyatakan sebesar nilai realisasi bersih pada saat jaminan ditarik. Selisih nilai realisasi bersih jaminan yang dikuasakan kembali diatas nilai piutang yang tidak tertagih akan dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi. Beban yang berhubungan dengan aset yang dikuasakan kembali dan pemeliharaannya akan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Pada saat akhir tahun, jaminan yang dikuasakan kembali akan direviu apabila terdapat penurunan nilai. Pada saat jaminan yang dikuasakan kembali dijual, nilai tercatatnya akan dikeluarkan dan hasil laba atau rugi akan dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi.

m. Foreclosed Collaterals

Foreclosed collaterals are stated at net realizable value at the time of foreclosure. The excess of net realizable value of the foreclosed collateral over the balance of uncollectible receivables is credited or charged to profit or loss. Expense related to the foreclosed assets and its maintenance are charged to profit or loss as incurred. At the end of the year, foreclosed collateral are reviewed for any impairment in value. When the foreclosed collaterals are disposed of, their carrying values are removed from the accounts and any resulting gains or losses are credited or charged to profit or loss.

n. Imbalan Kerja

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

n. Employee Benefits

The Company provides defined post-employment benefit plan for its employees in accordance with Labor Law No. 13/2003. No funding has been made to this defined benefit plan.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuaria yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas imbalan pasti neto.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognised in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognised in other comprehensive income as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognised in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability.

Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut: (i) biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian); (ii) beban atau pendapatan bunga neto; (iii) pengukuran kembali.

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Defined benefit costs are categorised as follows: (i) service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements); (ii) net interest expense or income; (iii) remeasurement.

The Company presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

o. Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor meliputi selisih antara agio saham (yaitu kelebihan setoran pemegang saham di atas nilai nominal) dengan biaya-biaya saham yang terkait langsung dengan penerbitan efek ekuitas Perusahaan dalam penawaran umum (Catatan 1c) serta selisih nilai transaksi restrukturisasi dengan entitas sepengendali.

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali adalah sebesar selisih antara harga pengalihan dengan proporsi jumlah tercatat aset neto entitas yang diakuisisi. Selisih ini terkait dengan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali yang merupakan kombinasi bisnis di mana seluruh entitas atau bisnis yang bergabung, pada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama (baik sebelum maupun sesudah kombinasi bisnis) dan pengendalian tersebut tidak bersifat sementara. Transaksi ini tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan dan oleh karenanya dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

o. Additional Paid-in Capital

Additional paid-in capital includes the difference between the excess of paid-up share capital made by shareholders over its par value and the direct costs incurred in respect of the issuance of the Company's shares in the public offering (Note 1c) and the difference from restructuring transactions with entities under common control.

Difference from restructuring transactions with entities under common control are the difference betwen transfer price and the proportionate of the carrying amount of acquired entity's net assets. This difference pertinent to transaction of business combination under common control entities which is a business combination where all the entities or business that combines, eventually control by the same party (whether before or after business combination) and in nature, the control is permanent. This transaction do not result substantive change in economical ownership on the exchanged business and accordingly accounted for using pooling of interest method.

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan pembiayaan konsumen, pendapatan sewa pembiayaan, pendapatan bunga dan beban bunga diakui secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 3e).

Pendapatan sewa pembiayaan dialokasi berdasarkan metode yang dijelaskan pada Catatan 3j.

Beban provisi sehubungan dengan pinjaman yang diterima diamortisasi dengan metode suku bunga efektif dan dibukukan sebagai bagian dari beban bunga dan beban pembiayaan lainnya.

Pendapatan dan beban lainnya

Pendapatan jasa administrasi yang tidak beratribusi secara langsung atas transaksi sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen dibukukan sebagai pendapatan pada laba rugi dan diakui pada saat diterima.

p. Income and Expenses Recognition

Consumer financing income, finance lease income, interest income and interest expense are recognized under the accrual basis accounting using the effective interest method (Note 3e).

Finance lease income is allocated based on method described in Note 3j.

Loan fees related to the borrowings are amortized using the effective interest method and recorded as part of interest expense and other financial charges.

Income and Other expenses

Administrative income that are not directly attributable to finance lease and consumer financing are recorded as income in profit or loss and recognized when incurred.

Pendapatan denda keterlambatan dan keuntungan penghentian kontrak diakui pada saat diterima.

Income from late charges and early termination are recognized when received.

Beban lainnya diakui pada saat terjadinya.

Other expenses are recognized when incurred.

q. Pajak Penghasilan

q. Income Tax

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini terutang dan pajak tangguhan.

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

Pajak kini

Current tax

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan di laba rugi karena tidak memperhitungkan penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan tidak memperhitungkan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Liabilitas Perusahaan untuk pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Company's liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengangkibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terhutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan professional pajak dalam Perusahaan yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut dan dalam kasus tertentu berdasarkan saran pakar pajak independen.

A provision is recognized for those matters for which the tax determination is uncertain but it is considered probable that there will be a future outflow of funds to a tax authority. The provisions are measured at the best estimate of the amount expected to become payable. The assessment is based on the judgment of tax professionals within the Company supported by previous experience in respect of such activities and in certain cases based on specialist independent tax advice.

Pajak tangguhan

Deferred tax

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi dan pada saat transaksi, tidak menimbulkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan dikenai pajak dalam jumlah yang sama. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arise from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit and at the time of transaction, does not give rise to equal taxable and deductible temporary differences. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi, atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam hal kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

r. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

r. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

s. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara regular direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a) Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

b) Yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

c) Dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada lokasi geografis.

s. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regulary reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

a) That engages in business activities from which it may earn income and incurred expense (including income and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);

b) Whose operating results are reviewed regulary by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and

c) For which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on geographic location.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

In the application of the Company's accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Peningkatan risiko kredit yang signifikan

Significant increase in credit risk

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai cadangan yang setara dengan ECL 12 bulan untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. PSAK 109 tidak menjelaskan apa yang merupakan peningkatan risiko kredit yang signifikan. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Perusahaan mempertimbangkan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

As explained in Note 3, expected credit losses are measured as an allowance equal to 12-month ECL for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. PSAK 109 does not define what constitutes a significant increase in credit risk. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Company takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward-looking information.

Sumber Ketidakpastian Estimasi

Key Sources of Estimation Uncertainty

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini.

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are discussed below.

Perhitungan Cadangan Kerugian

Calculation of Loss Allowance

KKE kolektif atas piutang pembiayaan

Collective ECL on financing receivables

KKE kolektif atas piutang pembiayaan dihitung dengan mempertimbangkan *probability of default* ("PD"), *loss given default* ("LGD"), *exposure at default* ("EAD"). Saat mengukur ECL, Perusahaan menggunakan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana penggerak ini akan saling mempengaruhi.

Collective ECL on financing receivables is calculated by considering the probability of default ("PD"), loss given default ("LGD") and exposure at default ("EAD"). When measuring ECL the Company uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar. Perhitungan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual terutang dan yang diharapkan akan diterima, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default merupakan input utama dalam mengukur ECL. *Probability of default* adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

KKE Individual atas piutang pembiayaan

KKE individual atas piutang pembiayaan dihitung dengan estimasi arus kas yang akan diterima di masa depan, dengan mengombinasikan beberapa skenario dan asumsi probabilitas tertimbang. Dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, manajemen membuat pertimbangan mengenai kondisi keuangan dari pihak lawan dan nilai neto yang dapat direalisasi dari agunan yang diterima. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dievaluasi, dan strategi penyelesaiannya serta estimasi arus kas yang dinilai dapat diperoleh kembali disetujui secara independen oleh Manajemen.

Imbalan kerja

Nilai kini atas kewajiban imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan dari basis aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi nilai tercatat atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga atas *Zero Coupon Bonds* yang mempunyai jatuh tempo yang mendekati jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Penilaian instrumen keuangan

Seperti dijelaskan dalam Catatan 35, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang meliputi input yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi untuk mengestimasi nilai wajar dari beberapa jenis instrumen keuangan. Catatan 35 memberikan informasi yang rinci mengenai asumsi utama yang digunakan dalam menentukan nilai wajar instrumen keuangan.

Direksi berpendapat bahwa teknik penilaian yang dipilih dan asumsi yang digunakan adalah tepat dalam menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan.

Individual ECL on financing receivables

Individual ECL on financing receivables is assessed by the estimation of future cash flows, combining scenarios, and probability weightings assumptions. In calculating allowance for impairment losses, management makes judgments about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable are independently approved by the Management.

Employee benefits

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost (income) for employee benefits include the discount rate. The Company determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to the required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of Zero Coupon Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liability.

Valuation of financial instruments

As described in Note 35, the Company uses valuation techniques that include inputs that are not based on observable market data to estimate the fair value of certain types of financial instruments. Note 35 provides detailed information about the key assumptions used in the determination of the fair value of financial instruments.

The Directors believe that the chosen valuation techniques and assumptions used are appropriate in determining the fair value of financial instruments.

5. KAS DAN SETARA KAS / 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Kas - Rupiah	463.408	298.909	Cash on hand - Rupiah
Bank			Bank
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	10.635.126	14.321.477	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.068.691	160.003	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	863.291	1.459.624	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	264.151	2.142	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Deutsche Bank AG	111.739	63.918	Deutsche Bank AG
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	66.473	98.278	PT Bank SMBC Indonesia Tbk
PT Bank Victoria Internasional Tbk	-	13.840.893	PT Bank Victoria Internasional Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	77.654	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 50 juta)	59.901	56.356	Others (each below Rp 50 million)
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
PT Bank Central Asia Tbk	1.735.275	2.735.486	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	1.147.765	830.800	PT Bank ANZ Indonesia
Deutsche Bank AG	442.657	422.225	Deutsche Bank AG
PT Bank DBS Indonesia	106.673	17.420	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	2.124	2.026	PT Bank SMBC Indonesia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	11.631	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Yen Jepang			Yen
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	2.589	2.771	PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Sub-jumlah	16.506.455	34.102.704	Sub-total
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related parties (Note 33)
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mizuho Indonesia	448.377	3.297.941	PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank Pan Indonesia Tbk	423.133	160.918	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
PT Bank Mizuho Indonesia	3.602.047	8.350.084	PT Bank Mizuho Indonesia
Yen Jepang			Yen
PT Bank Mizuho Indonesia	1.214.280	4.150.646	PT Bank Mizuho Indonesia
Sub-jumlah	5.687.837	15.959.589	Sub-total
Deposito Berjangka			Time Deposit
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	18.000.000	-	PT Bank SMBC Indonesia Tbk
Jumlah	40.657.700	50.361.202	Total

Tingkat bunga tahunan deposito berjangka sebesar 4,00% per tahun pada tahun 2024, dengan jatuh tempo antara 2 Januari 2025 - 3 Januari 2025.

Short-term time deposits earn interest rates of 4.00% per annum in 2024, with maturity date from January 2, 2025 - January 3, 2025.

Kas di bank memperoleh bunga dengan tingkat bunga mengambang berdasarkan tingkat bunga simpanan harian.

Cash in banks earn interest at floating rates based on daily bank deposits rate.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

As of December 31, 2024 and 2023, there are no cash and cash equivalents which restricted in use.

6. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN / 6. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Piutang pembiayaan konsumen	2.769.955.377	2.263.459.492	Consumer financing receivables
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(632.185.643)	(498.698.169)	Unearned income on consumer financing
Jumlah	2.137.769.734	1.764.761.323	Total
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(56.000.586)	(34.579.910)	Allowance for expected credit losses
Bersih	2.081.769.148	1.730.181.413	Net

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, suku bunga efektif piutang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2024 and 2023, annual effective interest rate for consumer financing receivables are as follows:

	2024	2023	
Rupiah	12,00% - 27,00%	13,00% - 27,00%	Rupiah

Pada tanggal 31 Desember 2024, pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui termasuk biaya transaksi yang belum diamortisasi yang terkait langsung sebesar Rp 92.859.414 ribu (31 Desember 2023: Rp 64.127.454 ribu).

As of December 31, 2024, unearned income on consumer financing receivables includes unamortized direct transaction costs amounting to Rp 92,859,414 thousand (December 31, 2023: Rp 64,127,454 thousand).

Ringkasan piutang pembiayaan konsumen berdasarkan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

Summary of consumer financing receivables based on business activities are as follows:

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Multiguna	2.461.615.628	2.061.800.342	Multipurpose
Modal Kerja	289.467.065	192.300.541	Working capital
Investasi	18.872.684	9.358.609	Investment
Jumlah	2.769.955.377	2.263.459.492	Total

Jumlah angsuran pembiayaan konsumen sesuai dengan jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Total consumer financing installments based on maturity date are as follows:

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Telah jatuh tempo	14.065.174	6.216.700	Overdue
Belum jatuh tempo			Not yet due
Dalam satu tahun	1.096.332.257	942.784.657	Within one year
Dalam dua tahun	748.448.501	622.764.985	Within two years
Dalam tiga tahun atau lebih	911.109.445	691.693.150	Within three years or more
Jumlah	2.769.955.377	2.263.459.492	Total

Jangka waktu rata-rata pembiayaan konsumen berkisar antara 1 - 5 tahun.

The average period of consumer financing is ranging from 1 - 5 years.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, piutang pembiayaan konsumen tidak digunakan sebagai jaminan atas utang bank.

As of December 31, 2024 and 2023, consumer financing receivables are not used as collateral for bank loans.

Rincian saldo piutang pembiayaan konsumen berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Details of consumer financing receivables based on maturity date are as follows:

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Belum jatuh tempo	1.993.814.231	1.702.369.443	Not past due
Telah jatuh tempo			Past due
Kurang dari 60 hari	97.845.239	45.989.332	Less than 60 days
61 - 180 hari	44.756.171	16.402.548	61 - 180 days
Lebih dari 180 hari	1.354.093	-	More than 180 days
	2.137.769.734	1.764.761.323	

Tabel berikut menunjukkan perubahan nilai tercatat bruto piutang pembiayaan konsumen:

The following tables show movement of the gross carrying amount of consumer financing receivables:

`	2024				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2024	1.746.513.878	12.170.520	6.076.925	1.764.761.323	Begining balance - January 1, 2024
Transfer ke tahap 1	1.215.488	(1.181.120)	(34.368)	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(35.556.531)	35.556.531	-	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(19.924.517)	(273.489)	20.198.006	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(939.993.392)	(18.564.548)	77.957.269	(880.600.671)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accured interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	1.340.958.554	-	-	1.340.958.554	New financial assets originated
Penghapusan	-	-	(87.349.472)	(87.349.472)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2024	2.093.213.480	27.707.894	16.848.360	2.137.769.734	Ending balance - December 31, 2024

	2023				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2023	1.446.114.757	15.425.369	11.137.726	1.472.677.852	Begining balance - January 1, 2023
Transfer ke tahap 1	1.706.593	(1.552.442)	(154.151)	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(16.660.626)	16.714.431	(53.805)	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(7.195.506)	(621.967)	7.817.473	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(831.839.834)	(17.794.871)	37.059.689	(812.575.016)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accured interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	1.154.388.494	-	-	1.154.388.494	New financial assets originated
Penghapusan	-	-	(49.730.007)	(49.730.007)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2023	1.746.513.878	12.170.520	6.076.925	1.764.761.323	Ending balance - December 31, 2023

Tabel berikut menunjukkan perubahan cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang pembiayaan konsumen:

The following tables show movement of the allowance for expected credit losses of consumer financing receivables:

	2024				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2024	29.025.750	2.329.581	3.224.579	34.579.910	Begining balance - January 1, 2024
Transfer ke tahap 1	246.735	(228.444)	(18.291)	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(849.006)	849.006	-	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(379.886)	(51.472)	431.358	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(12.845.749)	(1.817.122)	(3.206.287)	(17.869.158)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accured interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	30.714.330	-	-	30.714.330	New financial assets originated
Pengukuran kembali penurunan nilai-bersih	(5.303.489)	4.487.652	96.740.813	95.924.976	Remeasurement of loss allowance
Penghapusan	-	-	(87.349.472)	(87.349.472)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2024	40.608.685	5.569.201	9.822.700	56.000.586	Ending balance - December 31, 2024

	2023				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2023	24.128.927	3.879.900	6.408.101	34.416.928	Begining balance - January 1, 2023
Transfer ke tahap 1	446.509	(353.555)	(92.954)	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(448.403)	480.918	(32.515)	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(164.837)	(153.543)	318.380	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(8.427.849)	(3.139.602)	(6.282.631)	(17.850.082)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accured interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	20.717.181	-	-	20.717.181	New financial assets originated
Pengukuran kembali penurunan nilai-bersih	(7.225.778)	1.615.463	52.636.205	47.025.890	Remeasurement of loss allowance
Penghapusan	-	-	(49.730.007)	(49.730.007)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2023	29.025.750	2.329.581	3.224.579	34.579.910	Ending balance - December 31, 2023

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian credit ekspektasian dan agunan yang diterima dari konsumen telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

The management believes that the amount of allowance for expected credit losses and the value of collateral received from consumers are adequate to cover the possible losses that might arise from uncollectible receivables.

7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN / 7. FINANCE LEASE RECEIVABLES

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Piutang sewa pembiayaan	845.990.484	777.806.575	Finance lease receivables
Nilai sisa	53.664.182	44.620.559	Residual value
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(100.543.559)	(89.878.228)	Unearned finance lease revenues
Simpanan jaminan	(53.664.182)	(44.620.559)	Security deposit
Sub-jumlah	745.446.925	687.928.347	Sub-total
Dikurangi bagian yang dibiayai perusahaan pembiayaan lain sehubungan transaksi pembiayaan bersama - bersih	-	(572)	Less amounts financed by other finance company relating to the transactions joint financing - net
Sub-jumlah	745.446.925	687.927.775	Sub-total
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Pihak ketiga			Third parties
Piutang sewa pembiayaan	221.994.528	71.004.887	Finance lease receivables
Nilai sisa	18.542.707	8.452.309	Residual value
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(24.375.162)	(3.656.991)	Unearned finance lease revenues
Simpanan jaminan	(18.542.707)	(8.452.309)	Security deposit
Sub-jumlah	197.619.366	67.347.896	Sub-total
Dikurangi bagian yang dibiayai perusahaan pembiayaan lain sehubungan transaksi pembiayaan bersama - bersih (Catatan 36)	(39.953.165)	-	Less amounts financed by other finance company relating to the transactions joint financing - net (Note 36)
Sub-jumlah	157.666.201	67.347.896	Sub-total
Yen Jepang			Yen
Pihak ketiga			Third parties
Piutang sewa pembiayaan	54.567.438	98.293.486	Finance lease receivables
Nilai sisa	1.458.829	1.561.200	Residual value
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(1.428.764)	(3.040.979)	Unearned finance lease revenues
Simpanan jaminan	(1.458.829)	(1.561.200)	Security deposit
Sub-jumlah	53.138.674	95.252.507	Sub-total
Cadangan kerugian kredit ekpektasian	(76.451.006)	(37.269.504)	Allowance for expected credit losses
Jumlah	879.800.794	813.258.674	Total

Pada tahun 2024 dan 2023, kisaran suku bunga efektif piutang sewa pembiayaan dalam masing-masing mata uang adalah sebagai berikut:

In 2024 and 2023, the range of annual effective interest rate for finance lease in each currency are as follows:

	2024	2023	
Rupiah	7,00% - 17,00%	7,00% - 17,00%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	2,45% - 8,40%	2,45% - 9,15%	United States Dollar
Yen Jepang	1,28% - 3,17%	1,28% - 3,17%	Yen

Pada tanggal 31 Desember 2024, pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui termasuk biaya transaksi langsung yang belum diamortisasi sebesar Rp 431.386 ribu (31 Desember 2023: Rp 63.236 ribu).

As of December 31, 2024, unearned income on finance lease receivables includes unamortized direct transaction costs amounting to Rp 431,386 thousand (December 31, 2023: Rp 63,236 thousand).

Jumlah piutang sewa pembiayaan berdasarkan jenis produk dan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

Total finance lease receivables based on type of products and business activities are as follows:

a. Berdasarkan jenis produk / a. Based on type of products

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Mesin	537.192.657	448.176.549	Machinery
Alat berat	330.978.188	245.703.818	Heavy equipment
Kendaraan bermotor	254.381.605	253.224.581	Vehicles
Jumlah	1.122.552.450	947.104.948	Total

b. Berdasarkan kegiatan usaha / b. Based on business activities

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Investasi	1.122.552.450	947.083.591	Investment
Multiguna	-	21.357	Multipurpose
Jumlah	1.122.552.450	947.104.948	Total

Jumlah angsuran sewa pembiayaan sesuai dengan jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Total finance lease installments based on maturity date are as follows:

	Pembayaran minimum sewa pembiayaan/ *Minimum lease payment*		Nilai kini dari pembayaran minimum sewa pembiayaan/ *Present value of minimum lease payment*		
	2024 Rp'000	2023 Rp'000	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Angsuran sewa pembiayaan					**Lease installments**
Jatuh tempo dan sampai dengan satu tahun	443.480.873	415.419.920	393.570.790	373.059.576	Due and within one year
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	634.036.550	531.684.428	562.681.010	477.468.602	More than one year up to five years
Sub-jumlah	1.077.517.423	947.104.348	956.251.800	850.528.178	Sub-total
Pendapatan sewa pembiayaan belum diakui					**Unearned lease income**
Jatuh tempo dan sampai dengan satu tahun	(49.910.083)	(42.360.344)	-	-	Due and within one year
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	(71.355.540)	(54.215.826)	-	-	More than one year up to five years
Sub-jumlah	(121.265.623)	(96.576.170)	-	-	Sub-total
Jumlah	956.251.800	850.528.178	956.251.800	850.528.178	Total

Jangka waktu rata-rata pembiayaan adalah 2 sampai 5 tahun.

The average period of financing is 2 up to 5 years.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, piutang sewa pembiayaan tidak digunakan sebagai jaminan atas utang bank.

As of December 31, 2024 and 2023, finance lease receivables are not used as collateral for bank loans.

Tabel berikut menunjukkan perubahan nilai tercatat bruto piutang sewa pembiayaan:

The following tables show movement of the gross carrying amount of finance lease receivables:

	2024				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2024	817.617.256	462.289	32.448.633	850.528.178	Begining balance - January 1, 2024
Transfer ke tahap 1	3.071.593	-	(3.071.593)	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	-	-	-	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(44.207.862)	-	44.207.862	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(350.814.893)	(462.289)	(521.555)	(351.798.737)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accured interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	457.598.973	-	-	457.598.973	New financial assets originated
Penghapusan	-	-	(76.614)	(76.614)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2024	883.265.067	-	72.986.733	956.251.800	Ending balance - December 31, 2024

	2023				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2023	635.867.494	551.631	74.386.233	710.805.358	Begining balance - January 1, 2023
Transfer ke tahap 1	43.508.598	-	(43.508.598)	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(624.837)	624.837	-	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	-	-	-	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(319.724.532)	(714.179)	1.664.511	(318.774.200)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accured interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	458.590.533	-	-	458.590.533	New financial assets originated
Penghapusan	-	-	(93.513)	(93.513)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2023	817.617.256	462.289	32.448.633	850.528.178	Ending balance - December 31, 2023

Tabel berikut menunjukkan perubahan cadangan kerugian kredit ekspektasian atas piutang sewa pembiayaan:

The following tables show movement of the allowance for expected credit losses of finance lease receivables:

	2024				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2024	4.521.563	88.018	32.659.923	37.269.504	Begining balance - January 1, 2024
Transfer ke tahap 1	3.282.880	-	(3.282.880)	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	-	-	-	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	(4.398.618)	-	4.398.618	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(41.342)	(88.018)	-	(129.360)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accured interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	126.461	-	-	126.461	New financial assets originated
Pengukuran kembali penurunan nilai-bersih	(26.671)	-	39.287.686	39.261.015	Remeasurement of loss allowance
Penghapusan	-	-	(76.614)	(76.614)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2024	3.464.273	-	72.986.733	76.451.006	Ending balance - December 31, 2024

	2023				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Saldo awal - 1 Januari 2023	192.766	62.637	35.721.645	35.977.048	Begining balance - January 1, 2023
Transfer ke tahap 1	1.444.604	-	(1.444.604)	-	Transfer to stage 1
Transfer ke tahap 2	(12.893)	12.893	-	-	Transfer to stage 2
Transfer ke tahap 3	-	-	-	-	Transfer to stage 3
Aset keuangan yang telah dilunasi perubahan pada biaya transaksi dan piutang bunga pembiayaan	(13.281)	(62.637)	(9.200)	(85.118)	Financial assets that have been repaid, changes in transaction cost and accured interest
Aset keuangan yang baru diperoleh	57.613	-	-	57.613	New financial assets originated
Pengukuran kembali penurunan nilai-bersih	2.852.754	75.125	(1.514.405)	1.413.474	Remeasurement of loss allowance
Penghapusan	-	-	(93.513)	(93.513)	Written off
Saldo akhir - 31 Desember 2023	4.521.563	88.018	32.659.923	37.269.504	Ending balance - December 31, 2023

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian atas piutang sewa pembiayaan telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

The management believes that allowance for expected credit losses on finance lease receivables are adequate to cover the possible losses that might arise from uncollectible receivables.

Simpanan Jaminan

Pada saat perjanjian sewa pembiayaan dimulai, *lessee* memberikan simpanan jaminan yang akan digunakan sebagai pembayaran atas pembelian dari aset sewa pembiayaan pada akhir masa sewa, bila opsi dilaksanakan penyewa pembiayaan. Apabila opsi tidak dilaksanakan, simpanan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada *lessee* pada akhir masa sewa pembiayaan.

Security Deposits

At the inception of finance lease contract, the lessee rendered security deposits which will be used as payment of purchased leased assets at the end of the lease period, if the option is exercised. If the option is not exercised, such security deposits will be returned at the end of the lease period.

8. PIUTANG LAIN-LAIN / 8. OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE

	2024	2023	
	Rp'000	Rp'000	
Pihak berelasi (Catatan 33)	2.652.802	814.930	Related parties (Note 33)
Pihak ketiga			Third parties
Piutang yang jaminannya dalam proses diambil alih	100.556.145	88.238.435	Receivables which collateral under take over process
Cadangan kerugian kredit	(17.492.097)	(13.460.665)	Allowance for credit losses
Bersih	83.064.048	74.777.770	Net
Lainnya	11.508.862	6.885.921	Others
Sub-jumlah	94.572.910	81.663.691	Sub-total
Jumlah	97.225.712	82.478.621	Total

Piutang yang Jaminannya Dalam Proses Diambil Alih

Akun ini merupakan piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan yang jaminannya sedang dalam proses pengambilalihan oleh Perusahaan.

Receivables which Collateral Undertake Over Process

This account represents consumer financing receivables, financing lease receivables whose collateral is in the process of being taken over by the Company.

Mutasi cadangan kerugian kredit adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for credit losses are as follows:

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Saldo awal periode	13.460.665	12.575.301	Beginning balance
Penyisihan periode berjalan	4.031.432	885.364	Provision for the year
Saldo akhir periode	17.492.097	13.460.665	Ending Balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian kredit nilai piutang yang jaminannya dalam proses diambil alih adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tersebut.

Management believes that the allowance for credit losses of receivables which collateral undertake over process is adequate to cover potential losses.

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Akun ini merupakan pembayaran atas sewa, asuransi dan lainnya. Pada 31 Desember 2024, jumlah tercatat biaya dibayar dimuka adalah sebesar Rp 2.949.220 ribu (31 Desember 2023: Rp 2.612.892 ribu).

9. PREPAID EXPENSES

This account represents payment of rent, insurances and others. As of December 31, 2024, the carrying amount of prepaid expenses amounted to Rp 2,949,220 thousand (December 31, 2023: Rp 2,612,892 thousand).

10. ASET HAK-GUNA

10. RIGHT-OF-USE ASSETS

	1 Januari 2024/ *January 1, 2024* Rp'000	Penambahan/ Additions Rp'000	Pengurangan/ Deductions Rp'000	31 Desember 2024/ *December 31, 2024* Rp'000	
Biaya perolehan					**Cost**
Sewa bangunan	40.823.010	3.988.889	3.096.667	41.715.232	Rental building
Akumulasi penyusutan					**Accumulated depreciation**
Sewa bangunan	8.710.189	6.757.622	3.096.667	12.371.144	Rental building
Nilai tercatat	32.112.821			29.344.088	**Carrying amount**

	1 Januari 2023/ *January 1, 2023* Rp'000	Penambahan/ Additions Rp'000	Pengurangan/ Deductions Rp'000	31 Desember 2023/ *Desember 31, 2023* Rp'000	
Biaya perolehan					**Cost**
Sewa bangunan	53.428.418	4.954.444	17.559.852	40.823.010	Rental building
Akumulasi penyusutan					**Accumulated depreciation**
Sewa bangunan	19.664.966	6.605.075	17.559.852	8.710.189	Rental building
Nilai tercatat	33.763.452			32.112.821	**Carrying amount**

Beban penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada 31 Desember 2024 sebesar Rp 6.757.622 ribu (31 Desember 2023: Rp 6.605.075 ribu) dimana seluruhnya dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 31).

Depreciation expense charged to statement of profit or loss and other comprehensive income in December 31, 2024 amounted to Rp 6,757,622 thousand (December 31, 2023: Rp 6,605,075 thousand), which entirely charged to general and administrative expenses (Note 31).

11. ASET TETAP / 11. PROPERTY AND EQUIPMENT

	1 Januari 2024/ *January 1, 2024* Rp'000	Penambahan/ Additions Rp'000	Pengurangan/ Deductions Rp'000	31 Desember 2024/ *December 31, 2024* Rp'000	
Biaya perolehan					**Acquisition cost**
Tanah	13.069.791	-	-	13.069.791	Land
Bangunan	9.841.296	-	-	9.841.296	Building
Prasarana	15.766.212	1.789.927	-	17.556.139	Leasehold improvements
Kendaraan	13.679.259	3.728.162	2.126.236	15.281.185	Vehicles
Perabot dan peralatan kantor	7.060.430	516.586	-	7.577.016	Fixtures and office equipment
Komputer	36.951.000	2.074.711	-	39.025.711	Computer
Jumlah biaya perolehan	96.367.988	8.109.386	2.126.236	102.351.138	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan					**Accumulated depreciation**
Bangunan	5.107.192	492.065	-	5.599.257	Building
Prasarana	4.994.699	2.797.370	-	7.792.069	Leasehold improvements
Kendaraan	5.579.308	1.763.749	1.697.015	5.646.042	Vehicles
Perabot dan peralatan kantor	2.651.077	1.274.633	-	3.925.710	Fixtures and office equipment
Komputer	26.230.764	4.835.193	-	31.065.957	Computer
Jumlah akumulasi penyusutan	44.563.040	11.163.010	1.697.015	54.029.035	Total accumulated depreciation
Nilai tercatat	51.804.948			48.322.103	**Carrying amount**

	1 Januari 2023/ *January 1, 2023* Rp'000	Penambahan/ Additions Rp'000	Pengurangan/ Deductions Rp'000	31 Desember 2023/ *Desember 31, 2023* Rp'000	
Biaya perolehan					**Acquisition cost**
Tanah	13.069.791	-	-	13.069.791	Land
Bangunan	9.783.296	58.000	-	9.841.296	Building
Prasarana	13.512.574	2.253.638	-	15.766.212	Leasehold improvements
Kendaraan	13.023.273	2.341.736	1.685.750	13.679.259	Vehicles
Perabot dan peralatan kantor	6.165.696	894.734	-	7.060.430	Fixtures and office equipment
Komputer	32.041.951	4.915.599	6.550	36.951.000	Computer
Jumlah biaya perolehan	87.596.581	10.463.707	1.692.300	96.367.988	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan					**Accumulated depreciation**
Bangunan	4.616.094	491.098	-	5.107.192	Building
Prasarana	2.491.428	2.503.271	-	4.994.699	Leasehold improvements
Kendaraan	5.306.359	1.531.652	1.258.703	5.579.308	Vehicles
Perabot dan peralatan kantor	1.480.017	1.171.060	-	2.651.077	Fixtures and office equipment
Komputer	20.669.965	5.566.667	5.868	26.230.764	Computer
Jumlah akumulasi penyusutan	34.563.863	11.263.748	1.264.571	44.563.040	Total accumulated depreciation
Nilai tercatat	53.032.718			51.804.948	**Carrying amount**

Beban penyusutan aset tetap pada 31 Desember 2024 sebesar Rp 11.163.010 ribu (31 Desember 2023: Rp 11.263.748 ribu) dimana seluruhnya dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 31).

Depreciation expenses of property and equipment in December 31, 2024 amounted to Rp 11,163,010 thousand (December 31, 2023: Rp 11,263,748 thousand), which entirely charged to general and administrative expenses (Note 31).

Perhitungan laba penjualan aset tetap selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The computations of gain on sale of property and equipment during the year are as follows:

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Hasil penerimaan dari penjualan	1.055.392	889.114	Proceeds from sales
Nilai buku	(429.221)	(427.729)	Book value
Laba penjualan aset tetap	626.171	461.385	Gain on sale of property and equipment

Perusahaan memiliki 3 bidang tanah di Jakarta dan Medan dengan hak legal berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2035, 2036 dan 2042. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

The Company owns 3 pieces of land in Jakarta and Medan with Building Use Right (HGB) for 20 (twenty) until 30 (thirty) years expiring in the year of 2035, 2036 and 2042. Management believes that there are no problem with the extension of land right because the land was acquired legally and is supported by sufficient evidence of ownership.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tanah dan bangunan tersebut tidak digunakan sebagai jaminan atas utang bank.

As of December 31, 2024 and 2023, land and building are not used as collateral for bank loans.

Aset tetap selain tanah telah diasuransikan atas risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 52.144.471 ribu (31 Desember 2023: Rp 51.707.103 ribu). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang ditanggungkan.

Property and equipment except land are covered by insurance against losses by fire, theft and other risks with total coverage of Rp 52,144,471 thousand as of December 31, 2024 (December 31, 2023: Rp 51,707,103 thousand). The management believes that the above insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat dari seluruh aset tetap tersebut dapat dipulihkan dan tidak terdapat adanya peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai, sehingga tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai atas aset tetap.

Management believes that the carrying amount of property and equipment are recoverable and also there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment, therefore no provision for impairment of property and equipment were provided.

12. ASET (LIABILITAS) DERIVATIF

Perusahaan menggunakan instrumen derivatif, terutama kontrak *swap* suku bunga dan kontrak *swap cross currency*. Instrumen-instrumen ini meningkatkan kemampuan Perusahaan dalam mengelola risiko, terutama risiko atas fluktuasi suku bunga dan nilai tukar yang timbul sebagai bagian dari kegiatan operasi Perusahaan.

12. DERIVATIVE ASSETS (LIABILITIES)

The Company utilizes derivative instruments, principally interest rate swaps contracts, and cross currency swaps contracts. These instruments enhance the Company's ability to manage risks, primarily interest rates and exchange rates fluctuations, which exist as part of its ongoing business operations.

Estimasi nilai wajar dari instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The estimated fair values of the Company's derivative instruments as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024		2023		
	Nilai Nasional/ *Outstanding National*	Nilai Wajar Disajikan sebagai Aset (Liabilitas) Derivatif/*Fair Value Presented as Derivative Assets (Liabilities)*	Nilai Nasional/ *Outstanding National*	Nilai Wajar Disajikan sebagai Aset (Liabilitas) Derivatif/*Fair Value Presented as Derivative Assets (Liabilities)*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Aset					Assets
Swap Suku Bunga	146	30.557	558	264.353	Interest rate swap
Swap Cross Currency	2.867	3.737.095	6.589	7.688.949	Cross currency swap
Sub Jumlah	3.013	3.767.652	7.147	7.953.302	Sub-total
Liabilitas					Liabilities
Swap Suku Bunga	-	-	-	-	Interest rate swap
Swap Cross Currency	-	-	(1.752)	(231.106)	Cross currency swap
Sub Jumlah	-	-	(1.752)	(231.106)	Sub-total
Bersih	3.013	3.767.652	5.395	7.722.196	Net

Penurunan nilai wajar sebesar Rp 3.954.544 ribu pada 31 Desember 2024 (Penurunan nilai wajar pada 31 Desember 2023: Rp 9.809.971 ribu) adalah bagian dari cadangan lindung nilai bersih setelah efek pajak.

The corresponding decrease in fair value of Rp 3,954,544 thousand in December 31, 2024 (Decrease in fair value on December 31, 2023: Rp 9,809,971 thousand) are included as part of hedging reserve, net of the related tax effect.

Kontrak *swap* suku bunga mempertukarkan tingkat suku bunga mengambang dengan tingkat suku bunga tetap, di mana kontrak tersebut ditujukan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.

The interest rate swap contracts exchange floating rate interest for fixed rate interest and are designated and effective as cash flow hedge instruments.

Kontrak *swap cross currency* mempertukarkan pinjaman yang diterima dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang spesifik pada tanggal dimulainya transaksi, di mana kontrak tersebut ditujukan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.

The cross currency swap contracts exchange loan received in United States Dollar to Rupiah with a specified exchange rate at initial date and are designated and effective as cash flow hedge.

Kisaran jangka waktu kontrak derivatif adalah 2 - 4 tahun pada tahun 2024 (2023: 3 - 4 tahun)

The range of period for derivative are 2 - 4 years in 2024 (2023: 3 - 4 years).

Beban bunga kontrak *swap* suku bunga dan *swap cross currency* pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 248.476 ribu (31 Desember 2023: Rp 343.730 ribu) yang dicatat sebagai bagian dari "Beban Bunga dan Pembiayaan Lainnya" (Catatan 29).

Interest expenses for interest rate swap and cross currency swap in December 31, 2024 amounted to Rp 248,476 thousand (December 31, 2023: Rp 343,730 thousand), which recorded as part of "Interest and Other Financing Charges" (Note 29).

Pendapatan bunga kontrak *swap* suku bunga dan *swap cross currency* pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.147.994 ribu (31 Desember 2023: Rp 1.106.362 ribu) yang dicatat sebagai bagian dari "Pendapatan Lain-lain" (Catatan 28).

Interest income for interest rate swap and cross currency swap in December 31, 2024 amounted to Rp 1,147,994 thousand (December 31, 2023: Rp 1,106,362 thousand) which recorded as part of "Other Income" (Note 28).

Estimasi nilai wajar dari kontrak *swap* suku bunga dan *swap cross currency* dihitung berdasarkan nilai pasar. Perjanjian atas *swap* suku bunga dan *swap cross currency* digunakan untuk mengelola eksposur suku bunga dan nilai tukar dari pinjaman (Catatan 14).

The estimated fair values of the interest rate swap and cross currency swap contracts are calculated based on market rates. An interest rate swap and cross currency swap agreements are used to manage interest rate exposure and exchange rate exposure on the borrowings (Note 14).

Eksposur terhadap risiko kredit pihak lawan *(counterparty)* dianggap rendah karena perjanjian ini dibuat dengan lembaga keuangan terpercaya dengan peringkat kredit yang baik yang diharapkan memenuhi ketentuan sesuai dengan perjanjian.

Exposure to counterparty credit risk is considered low because these agreements have been entered into with major creditworthy institutions with good credit ratings, and they are expected to perform fully under the terms of the agreements.

Mutasi cadangan lindung nilai yang dimiliki oleh Perusahaan pada tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The movement of the Company's cash flow hedging reserve in 2024 and 2023 are as follows:

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Saldo awal	1.958.501	2.697.311	Beginning balance
Laba (rugi) perubahan nilai wajar	(3.954.544)	(9.809.971)	Gain (loss) on changes in fair value
Reklasifikasi ke laba rugi	1.825.833	8.862.778	Reclassified to profit or loss
Pajak penghasilan terkait yang diakui pada penghasilan komprehensif lain (Catatan 19)	468.316	208.383	Income tax related recognized in other comprehensive income (Note 19)
Saldo Akhir	298.106	1.958.501	Ending balance

13. ASET LAIN-LAIN / 13. OTHER ASSETS

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related parties (Note 33)
Rupiah			Rupiah
Beban ditangguhkan	50.000	50.000	Deferred charges
Uang jaminan	23.175	24.175	Security deposits
Sub-jumlah	73.175	74.175	Sub-total
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Jaminan yang dikuasakan kembali	920.619	749.745	Foreclosed collateral
Cadangan penurunan nilai	(262.619)	(415.745)	Allowance for impairment loss
Bersih	658.000	334.000	Net
Estimasi tagihan pajak (Catatan 19)	6.704.120	8.209.841	Estimated claims for tax refund (Note 19)
Uang jaminan	2.111.936	2.141.643	Security deposits
Uang muka	1.381.004	402.660	Advances
Sub-jumlah	10.197.060	10.754.144	Sub-total
Jumlah	10.928.235	11.162.319	Total

Beban amortisasi atas beban ditangguhkan atas biaya transaksi pinjaman bank untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp 75.000 ribu (31 Desember 2023: Rp 25.000 ribu).

Amortization expense of deferred charges of transaction cost for bank loan for the year ended December 31, 2024 amounted to Rp 75,000 thousand (December 31, 2023: Rp 25,000 thousand).

Jaminan yang dikuasakan kembali

Jaminan yang dikuasakan kembali merupakan jaminan piutang pembiayaan berupa kendaraan, alat berat dan mesin yang telah diambil alih oleh Perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai jaminan yang dikuasakan kembali cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tersebut.

Atas jaminan yang dikuasakan kembali, Perusahaan terus melakukan upaya penyelesaian.

Foreclosed collateral

Foreclosed collateral represents consumer financing collateral in the form of vehicles, heavy equipment and machineries that have been foreclosed by the Company.

Management believes that the allowance for impairment loss of foreclosed collateral is adequate to cover potential losses.

For the foreclosed collateral, the Company continues to make settlement efforts.

Lainnya

Lainnya terdiri dari uang jaminan sewa, uang jaminan lain-lain dan uang muka lain-lain.

Others

Others consist of rent refundable deposit, other refundable deposit and other advances.

14. UTANG BANK / 14. BANK LOANS

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Jangka Pendek			**Short-term**
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related parties (Note 33)
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mizuho Indonesia	1.798.000.000	1.191.000.000	PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank Pan Indonesia Tbk	5.000.000	5.000.000	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
PT Bank Mizuho Indonesia (USD 190 ribu)	3.070.780	-	PT Bank Mizuho Indonesia (USD 190 thousand)
Sub-jumlah	1.806.070.780	1.196.000.000	Sub-total
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	164.000.000	362.000.000	PT Bank SMBC Indonesia Tbk
PT Bank Resona Perdania	100.000.000	100.000.000	PT Bank Resona Perdania
Deutsche Bank AG Jakarta	43.000.000	-	Deutsche Bank AG Jakarta
Yen Jepang			Yen
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd., Singapore (JPY 275.000 ribu, 2023: JPY 425.000 ribu)	28.149.687	46.557.518	Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd., Singapore (JPY 275,000 thousand, 2023: JPY 425,000 thousand)
Sub-jumlah	335.149.687	508.557.518	Sub-total
Jumlah Jangka Pendek	2.141.220.467	1.704.557.518	**Total Short-term**

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Jangka Panjang			**Long-term**
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related party (Note 33)
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
PT Bank Mizuho Indonesia (USD 3.630 ribu, 2023: USD 10.133 ribu)	58.671.404	156.214.146	PT Bank Mizuho Indonesia (USD 3,630 thousand, 2023: USD 10,133 thousand)
Pihak ketiga			Third parties
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
The Hachijuni Bank, Ltd., Singapore (USD 5.652 ribu)	91.337.747	-	The Hachijuni Bank, Ltd., Singapore (USD 5,652 thousand)
The Chugoku Bank, Ltd., Hong Kong (USD 1.750 ribu)	28.283.500	-	The Chugoku Bank, Ltd., Hong Kong (USD 1,750 thousand)
The Chiba Bank, Ltd., Hong Kong (USD Nihil, 2023: USD 1.650 ribu)	-	25.436.400	The Chiba Bank, Ltd., Hong Kong (USD Nil, 2023: USD 1,650 thousand)
Yen Jepang			Yen
The Hachijuni Bank, Ltd., Singapore (JPY 272.604 ribu, 2023: JPY 423.854 ribu)	27.904.443	46.431.994	The Hachijuni Bank, Ltd., Singapore (JPY 272,604 thousand, 2023: JPY 423,854 thousand)
The Shizuoka Bank, Ltd., Hong Kong (JPY Nihil, 2023: JPY 65.416 ribu)	-	7.166.204	The Shizuoka Bank, Ltd., Hong Kong (JPY Nil, 2023: JPY 65,416 thousand)
Sub-jumlah	147.525.690	79.034.598	Sub-total
Jumlah Jangka Panjang	206.197.094	235.248.744	**Total Long-term**
Jumlah	2.347.417.561	1.939.806.262	**Total**

Berikut adalah fasilitas utang bank yang dimiliki Perusahaan:

The Company's bank loans facilities are as follows:

Bank	Fasilitas/ *Facilities*	Batas Kredit/ *Credit Limit* '000	Tanggal Perjanjian/ *Agreement Date*	Jatuh tempo fasilitas/ *Maturity date of the facility* 31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Pinjaman Cerukan/ *Overdraft Loan*	Rp 30.000.000	30/11/2010	10/09/2025	10/09/2024
	Money Market Line/ *Money Market Line*	Rp 100.000.000	31/10/2016	10/09/2025	10/09/2024
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Singapore	Kredit Berulang/ *Revolving Loan* Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan tanggal 29 September 2025/ *This agreement has term period until September 29, 2025*	JPY 1.500.000	31/03/2017	28/03/2025	28/03/2024
PT Bank Resona Perdania	Pinjaman Modal Kerja Bergulir/ *Working Capital Revolving Facility*	Rp 100.000.000	27/06/2024	27/06/2025	27/06/2024

Bank	Fasilitas/ *Facilities*	Batas Kredit/ *Credit Limit* '000	Tanggal Perjanjian/ *Agreement Date*	Jatuh tempo fasilitas/ *Maturity date of the facility* 31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	Pinjaman Revolving/ *Revolving Loan* Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan tanggal 30 April 2030/ *This agreement has term period until April 30, 2030*	Rp 750.000.000 (atau nilai yang setara dalam USD)/ *(or its equivalent in USD)*	07/06/2012	30/04/2025	30/04/2024
PT Bank Mizuho Indonesia	Pinjaman Revolving/ *Revolving Loan* Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan tanggal 30 April 2030/ *This agreement has term period until April 30, 2030*	USD 120.000 (atau nilai yang setara dalam IDR/JPY)/ *(or its equivalent IDR/JPY)*	07/02/2011	30/04/2025	30/04/2024
The Chiba Bank, Ltd., Hong Kong	Pinjaman Jangka Panjang dalam Mata Uang USD/ *Long-term Loan in USD Currency* Fasilitas ini telah berakhir pada tahun 2024/ *This facility has ended in 2024*	USD 11.000	15/02/2019	15/08/2024	15/08/2024
The Shizuoka Bank, Ltd., Hong Kong	Pinjaman Jangka Pendek Multikurs Berulang/ *Multi-currency Short-term Loan Revolving Facility* Fasilitas ini telah berakhir pada tahun 2023/ *This facility has ended in 2023*	USD 10.000 (atau nilai yang setara dalam Yen)/ *(or its equivalent in Yen)*	30/06/2011	-	24/07/2023
	Pinjaman Multikurs Berulang Jangka Panjang/ *Multi-currency Long-term Loan Revolving Facility* Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan tanggal 27 Juni 2028/ *This agreement has term period until June 27, 2028* Fasilitas ini telah berakhir pada tahun 2024 *This facility has ended in 2024*	USD 10.000 (atau nilai yang setara dalam Yen)/ *(or its equivalent in Yen)*	10/09/2018	09/09/2024	09/09/2024

Bank	Fasilitas/ *Facilities*	Batas Kredit/ *Credit Limit* '000	Tanggal Perjanjian/ *Agreement Date*	Jatuh tempo fasilitas/ *Maturity date of the facility* 31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023
The Hachijuni Bank, Ltd., Singapore	Pinjaman Berjangka/ *Term Loan* Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan tanggal 20 Januari 2028/ *This agreement has term period until January 20, 2028*	USD 5.000	20/01/2022	04/07/2026	04/07/2026
	Pinjaman Berjangka/ *Term Loan* Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan tanggal 3 Februari 2029/ *This agreement has term period until February 3, 2029*	USD 6.000 (atau nilai yang setara dalam Yen)/ *(or its equivalent in Yen)*	03/02/2023	27/09/2027	27/09/2027
	Pinjaman Berjangka/ *Term Loan* Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan tanggal 3 Februari 2030 *This agreement has term period until February 3, 2030*	USD 6.000 (atau nilai yang setara dalam mata uang Yen Jepang)/ *(or its equivalent in JPY currencies)*	02/02/2024	31/07/2028	31/07/2028
The Chugoku Bank, Ltd., Hong Kong	Pinjaman Jangka Panjang Mata Uang Tunggal/ *Single Currency Long-term Loan* Fasilitas ini telah berakhir pada tahun 2023 *This facility has ended in 2023*	USD 10.000	02/11/2017	-	09/11/2023
	Pinjaman Jangka Panjang Mata Uang Tunggal/ *Single Currency Long-term Loan* Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan tanggal 20 Juni 2029 *This agreement has term period until June 20, 2029*	USD 10.000	20/06/2023	28/04/2028	20/06/2024
Deutsche Bank AG Jakarta	Pinjaman cerukan dan Pinjaman Jangka Pendek/ *Overdraft and Short-term Loan*	USD 3.000	19/08/2019	30/06/2025	30/06/2024

Selama tahun 2024, seluruh fasilitas di atas dijamin dengan jaminan Perusahaan dari Mizuho Leasing Co., Ltd.

Seluruh utang bank yang diterima Perusahaan digunakan untuk kebutuhan modal kerja.

During 2024, all facilities above are guaranteed by the corporate guarantee from Mizuho Leasing Co., Ltd.

All of the bank loans obtained by the Company are used for working capital purposes.

Terkait dengan seluruh utang-utang bank yang diperoleh, Perusahaan wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada seluruh Bank jika terdapat perubahan susunan pengurus, merger dan akuisisi, perubahan bentuk perusahaan, komposisi permodalan. Perjanjian ini juga mencakup persyaratan rasio keuangan sebagai berikut:

- Menjaga kepemilikan saham Mizuho Leasing Co., Ltd. lebih besar dari 50% atau sebagai pemegang saham utama
- Untuk Bank Panin dan Bank Resona Perdania, Perusahaan wajib menjaga gearing ratio sebesar 10x
- Untuk Bank Resona Perdania Perusahaan wajib menjaga rasio *non-performing financing* untuk tunggakan lebih dari 90 hari tidak lebih dari 5% serta current ratio minimum 100%.

Perusahaan tidak memiliki tunggakan pembayaran pokok, bunga maupun pelanggaran lainnya berkaitan dengan utang bank selama tahun 2024 dan 2023.

In accordance with all bank loans obtained, the Company is obliged to provide written notification to all banks if there are any changes in management, mergers and acquisitions, changes in company structure, changes in composition of capital. The agreements also include the following financial ratio requirements as follows:

- Maintain share ownership of Mizuho Leasing Co., Ltd. more than 50% or as the main shareholder
- For Bank Panin and Bank Resona Perdania, The Company is required to maintain its gearing ratio at 10x
- For Bank Resona Perdania, the Company obliged to maintain non-performing financing ratio of overdue payment more than 90 days for no exceed than 5% also current ratio at minimum 100%.

The Company did not have any default in the principal or interest payment or breach any covenants with respect to the bank loans in 2024 and 2023.

15. UTANG USAHA

Akun ini merupakan utang kepada *dealer* kendaraan bermotor (pihak ketiga) serta *vendor* mesin dan alat berat sehubungan dengan kegiatan pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan yang tidak dikenakan bunga dan jangka waktu.

15. TRADE PAYABLES

This account represents payable to motor-vehicle dealer (third parties) along with machine and heavy equipment vendor in connection with the consumer financing and lease financing activities which do not bear interests and without any stated repayment terms.

16. UTANG LAIN-LAIN / 16. OTHER PAYABLES

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Pihak ketiga			Third parties
Pembayaran diterima di muka dari pelanggan	48.193.571	37.181.163	Customers' deposits
Utang asuransi	1.706.153	1.782.188	Insurance payables
Pendapatan ditangguhkan	4.778.739	6.125.687	Deferred income
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 1.000 juta)	3.547.061	1.278.865	Others (each below Rp 1,000 million)
Jumlah	58.225.524	46.367.903	Total

17. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR / 17. ACCRUED EXPENSES

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related parties (Note 33)
Bunga atas utang bank	937.028	3.301.360	Interest of bank loans
Pihak ketiga			Third parties
Bonus dan tunjangan	4.867.583	5.552.000	Bonuses and allowances
Jasa profesional	2.494.840	2.192.904	Professional fees
Bunga atas utang bank	723.707	564.502	Interest of bank loans
Telepon, internet dan listrik	325.852	203.107	Telephone, internet and electricity
Lain-lain	12.354	88.935	Others
Sub-jumlah	8.424.336	8.601.448	Sub-total
Jumlah	9.361.364	11.902.808	Total

18. UTANG PAJAK / 18. TAXES PAYABLE

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Pajak yang dipungut			Witholding taxes
Pasal 21	-	1.132.114	Article 21
Pasal 23	77.080	85.553	Article 23
Pasal 26	298.283	335.074	Article 26
Pasal 4(2)	164.363	234.992	Article 4(2)
Pajak Pertambahan Nilai	211.391	266.436	Value Added Tax
Jumlah	751.117	2.054.169	Total

19. PAJAK PENGHASILAN / 19. INCOME TAX

a. Pajak Penghasilan Badan / a. Corporate Income Tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal) untuk tahun berjalan:

The reconciliation between profit before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income (fiscal loss) for the year are as follows:

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(5.036.273)	61.234.797	Profit (loss) before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income
Beda temporer:			**Temporary differences:**
Kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan	8.019.171	1.362.206	Impairment losses on financing receivables
Penyisihan penurunan nilai jaminan yang dikuasakan kembali	(153.126)	(1.398.221)	Allowance for decline in value of foreclosed collateral
Bonus	(684.417)	(3.148.000)	Bonus
Imbalan pasca kerja	3.767.736	2.254.813	Post-employment benefits
Aset hak-guna	88.276	1.713.984	Right-of-use-asset
Penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain	4.031.433	885.363	Allowance for decline in value of other receivables
Penyusutan aset tetap	(1.290.060)	(1.371.026)	Depreciation of property and equipment
Amortisasi goodwill yang timbul atas transaksi penggabungan usaha	(685.343)	(685.343)	Amortization of goodwill arise from merger transaction
Jumlah	13.093.670	(386.224)	Total

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Beda Tetap			**Permanent differences:**
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal	2.630.202	2.481.775	Non-deductible expenses for fiscal purpose
Pendapatan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	(351.787)	(327.782)	Income already subjected to final tax
Jumlah	2.278.415	2.153.993	Total
Taksiran Penghasilan Kena Pajak Tahun Berjalan	10.335.812	63.002.566	**Estimated Taxable Income for Current Year**
Estimasi kompensasi rugi fiskal Tahun 2021	(21.556.859)	(23.215.957)	Estimated fiscal loss carryforward Year 2021
Koreksi sesuai hasil pemeriksaan pajak Tahun 2018	-	(61.343.468)	Adjustment according to tax assessment Year 2018
Akumulasi Rugi Fiskal Periode Berjalan	(11.221.047)	(21.556.859)	**Accumulated Fiscal Loss for the Period**

Jumlah taksiran penghasilan kena pajak (rugi fiskal) di atas menjadi dasar dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan ke kantor pajak.

The annual tax return (SPT) which submitted to the tax office are prepared based on the above estimated taxable income (fiscal loss).

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku terhadap laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income tax benefit (expense) included in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the amount computed by applying the applicable tax rates to profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya	(5.036.273)	61.234.797	Profit (loss) before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income
(Manfaat) beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku efektif	(1.107.980)	13.471.656	Income tax (benefit) expense calculated using effective rate
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal	578.644	545.991	Non-deductible expenses for fiscal purposes
Penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	(77.393)	(72.113)	Income already subjected to final tax
Beban pajak penghasilan yang di kompensasi dengan akumulasi rugi fiskal	(2.273.879)	(13.860.565)	Income tax expense compensated against accumulated fiscal loss
Beban (manfaat) pajak penghasilan -bersih	(2.880.608)	84.969	Income tax expense (benefit) - net

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak *(self-assessment)*. Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak dalam jangka waktu lima tahun sejak pajak terutang.

The determination of the tax liabilities is based on self-assessment. The tax office can perform examination of income taxes within five years after the tax becomes due.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya.

On October 29, 2021, the Government issue Law of the Republic of Indonesia No.7 Year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards.

Berdasarkan kriteria di atas, tarif pajak penghasilan Perusahaan untuk tahun pajak 2024 dan 2023 adalah sebesar 22%.

Based on criteria above, the Company's tax rate for the fiscal year 2024 and 2023 is 22%.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global ("Pilar Dua") telah diundangkan dan ditetapkan di Indonesia yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Perseroan menerapkan pengecualian PSAK 212 untuk mengakui dan mengungkapkan informasi tentang aset dan liabilitas pajak tangguhan yang terkait dengan pajak penghasilan pilar dua. Perseroan masih menilai dampak dari penerapan peraturan tersebut.

On 31 December 2024, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia's Regulation No. 136 Year 2024 concerning the Imposition of Global Minimum Tax ("Pillar Two") has been enacted and established in Indonesia with effective date starting 1 January 2025. The Company applies the SFAS 212 exception to recognise and disclose information on deferred tax assets and liabilities related to the Pillar Two income taxes. The Company is still assessing the impact on the implementation of such regulation.

b. Pajak Tangguhan

b. Deferred Tax

Rincian aset pajak tangguhan-bersih Perusahaan adalah sebagai berikut:

The details of the Company's deferred tax assets-net are as follows:

	1 Januari 2024/ *January 1, 2024*	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to profit or loss*	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited to other comprehensive income*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Cadangan kerugian kredit atas piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan	3.905.623	1.764.218	-	5.669.841	Allowance for credit losses on consumer financing receivables and finance lease receivables
Liabilitas imbalan pasca kerja	3.182.487	828.902	753.842	4.765.231	Post-employment benefit liabilities
Cadangan kerugian kredit atas piutang lain-lain	2.961.347	886.915	-	3.848.262	Allowance for credit losses on other receivables
Cadangan penurunan nilai jaminan yang dikuasakan kembali	91.463	(33.688)	-	57.775	Allowance for credit losses on foreclosed collateral
Appreciation Employee	1.221.440	(150.572)	-	1.070.868	Appreciation Employee
Lindung nilai arus kas	(552.397)	-	468.316	(84.081)	Cash flow hedges
Goodwill atas transaksi penggabungan usaha	540.280	(150.775)	-	389.505	Goodwill from merger transaction
Penyusutan aset tetap	(174.874)	(283.813)	-	(458.687)	Depreciation of fixed assets
Aset hak-guna	480.289	19.421	-	499.710	Right-of-use assets
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	11.655.658	2.880.608	1.222.158	15.758.424	Total deferred tax assets

	1 Januari 2023/ *January 1, 2023*	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to profit or loss*	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited to other comprehensive income*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Cadangan kerugian kredit atas piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan	3.605.938	299.685	-	3.905.623	Allowance for credit losses on consumer financing receivables and finance lease receivables
Liabilitas imbalan pasca kerja	2.736.105	496.059	(49.677)	3.182.487	Post-employment benefit liabilities
Cadangan kerugian kredit atas piutang lain-lain	2.766.566	194.781	-	2.961.347	Allowance for credit losses on other receivables
Cadangan penurunan nilai jaminan yang dikuasakan kembali	399.072	(307.609)	-	91.463	Allowance for credit losses on foreclosed collateral
Appreciation Employee	1.914.000	(692.560)	-	1.221.440	Appreciation Employee
Lindung nilai arus kas	(760.780)	-	208.383	(552.397)	Cash flow hedges
Goodwill atas transaksi penggabungan usaha	691.055	(150.775)	-	540.280	Goodwill from merger transaction
Penyusutan aset tetap	126.752	(301.626)	-	(174.874)	Depreciation of fixed assets
Aset hak-guna	103.213	377.076	-	480.289	Right-of-use assets
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	11.581.921	(84.969)	158.706	11.655.658	Total deferred tax assets

Perusahaan mencatat akumulasi rugi fiskal sebesar Rp 11.221.047 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: Rp 21.556.859 ribu). Rugi fiskal ini telah dicatat namun manajemen yakin diperlukan penyisihan sehubungan dengan sifat ketidakpastian estimasinya terutama berkaitan dengan peraturan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah perpajakan dalam 5 (lima) tahun sejak pajak tersebut terhutang. Secara konservatif, manajemen menghindari pengakuan pendapatan pajak tangguhan yang berasal dari rugi fiskal lebih awal sehingga aset pajak tangguhan belum diakui.

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan di atas dapat dipulihkan dengan penghasilan kena pajak Perusahaan di masa mendatang.

The Company has accumulated tax loss carry forward for the year ended December 31, 2024 amounting to Rp 11,221,047 thousand (December 31, 2023: Rp 21,556,859 thousand). These tax losses have been carried forward however management believes valuation allowance should be provided considering its nature of estimate uncertainty especially under the prevailing regulation, the Directorate General of Tax may assess or amend taxes within 5 (five) years of the time the tax becomes due. Conservatively, the management avoid to recognise deferred tax income from carry forward tax loss earlier and hence deferred tax assets have not been recognized.

Management believes that deferred tax assets are recoverable against the Company's future taxable income.

c. Estimasi tagihan pajak

c. Estimated claims for tax refund

	2024	2023	
	Rp'000	Rp'000	
Pajak Penghasilan Badan			Corporate Income Tax
Tahun 2014	5.124.955	5.124.955	Year 2014
Pajak Pertambahan Nilai			Value Added Tax
Tahun 2018	-	3.084.886	Year 2018
Tahun 2019	1.579.165	-	Year 2019
Jumlah	6.704.120	8.209.841	Total

d. Surat Ketetapan Pajak

Pajak Penghasilan 2014

Pada tanggal 28 Februari 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dari Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") atas kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) sebesar Rp 8.949.531 ribu. Perusahaan telah membayar kurang bayar PPh Badan tersebut pada tanggal 8 Mei 2019. Perusahaan menerima hasil ketetapan atas kurang bayar sebesar Rp 237.584 ribu, sedangkan Perusahaan mengajukan keberatan sebesar Rp 8.711.947 ribu kepada DJP pada tanggal 27 Mei 2019

Pada tanggal 16 Maret 2020, DJP menolak keberatan Perusahaan tersebut dan pada tanggal 15 Juni 2020, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas jumlah kurang bayar sebesar Rp 8.711.947 ribu.

Pada tanggal 1 November 2023, Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding Perusahaan sebesar Rp 3.586.992 ribu dan telah menerima pengembalian tersebut pada tanggal 6 Desember 2023.

Pada tanggal 24 Januari 2024, Perusahaan mengajukan surat Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk sisa pengembalian SKPKB tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, keputusan tersebut masih dalam proses.

Pajak Pertambahan Nilai 2018

Pada bulan Maret 2020, Perusahaan menerima SKPKB Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dari DJP untuk periode Januari 2018 sampai Desember 2018 sebesar Rp 25.103.606 ribu. Pada bulan Juni 2020, Perusahaan membayar kurang bayar tersebut dan mengajukan keberatan kepada DJP.

Pada bulan Juni 2021, DJP menolak keberatan Perusahaan tersebut dan pada bulan September 2021, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas jumlah kurang bayar tersebut.

Pada bulan November 2023, Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding Perusahaan sebesar Rp 21.995.576 ribu dari jumlah klaim pokok sebesar Rp 22.018.720 ribu dan telah menerima pengembalian tersebut pada bulan Desember 2023.

d. Tax Assessment Letters

Income Tax 2014

On February 28, 2019, the Company received the Tax Assessment Letter Underpayments ("SKPKB") from the Directorate General of Taxation ("DJP") for the underpayment of Corporate Income Tax ("CIT") amounting to Rp 8,949,531 thousand. The Company has paid the CIT underpayment on May 8, 2019. The Company accepted the tax assessment of underpayment amounting to Rp 237,584 thousand, while for the underpayment of Rp 8,711,947 thousand the Company filed an objection to the DJP on May 27, 2019.

On March 16, 2020, DJP rejected the objection of the Company and on June 15, 2020, the Company filed an appeal to the Tax Court against the underpayment of Rp 8,711,947 thousand.

On November 1, 2023, the Tax Court partially granted the Company's appeal amounting to Rp 3,586,992 thousand and has received the refunds on December 6, 2023.

On January 24, 2024, the Company submitted a request for Judicial Review and Memory of Judicial Review to the Supreme Court for the remaining claim of the SKPKB. As of the completion date of the financial statements, the decision is still on process.

Value Added Tax 2018

In March 2020, the Company received SKPKB of Value Added Taxes ("VAT") from DJP for January 2018 until December 2018 period amounting to Rp 25,103,606 thousand. On June 2020, the Company paid the underpayment and submitted an objection to DJP.

In June 2021, DJP rejected the objection of the Company and in September 2021, the Company filed an appeal to the Tax Court against the underpayments.

In November 2023, the Tax Court partially granted the Company's appeal amounting to Rp 21,995,576 thousand from principal claim balance of Rp 22,018,720 thousand and has received the refunds in December 2023.

Pada bulan Februari 2024, Perusahaan menerima Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari Pengadilan Pajak atas permohonan DJP untuk Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") periode Januari 2018 sampai Desember 2018.

In February 2024, the Company received the Request for Reconsideration and the Memory of Reconsideration from the Tax Court on the DJP request for Value Added Tax ("VAT") for the period January 2018 to December 2018.

Pada bulan Maret 2024, Perusahaan mengirimkan surat tanggapan kontra memori ke Pengadilan Pajak atas Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh DJP untuk Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") periode Januari 2018 sampai Desember 2018.

In March 2024, the Company sent a response letter of contra memory to the Tax Court on the Reconsideration Request and Reconsideration Memorandum filed by the DGT for Value Added Tax ("VAT") for the period January 2018 to December 2018.

Pada bulan September dan Oktober 2024, Perusahaan menerima sisa pengembalian atas kurang bayar PPN masing-masing sebesar Rp 2.290.707 ribu dan Rp 790.842 ribu dari jumlah klaim pokok sebesar Rp 3.084.886 ribu. Perusahaan menerima Keputusan tersebut dan membebankan selisih sebesar Rp 3.337 ribu ke laba rugi tahun berjalan sebagai bagian dari "Beban Umum dan Administrasi" (Catatan 31).

In September and October 2024, the Company received the remaining tax refund of underpayment of VAT each amounting to Rp 2,290,707 thousand and Rp 790,842 thousand from the total principal claim of Rp 3,084,886 thousand. The Company has accepted the decision and charged the difference of Rp 3,337 thousand to current year profit or loss as part of "General and Administrative Expenses" (Note 31).

Pajak Pertambahan Nilai 2019

Value Added Tax 2019

Pada bulan Oktober 2024, Perusahaan menerima SKPKB PPN dan STP PPN dari DJP untuk periode September 2019 sampai Desember 2019 masing-masing sebesar Rp 1.476.407 ribu dan Rp 102.757 ribu. Pada bulan Oktober 2024, Perusahaan melakukan pembayaran atas kurang bayar tersebut di membebankan SKPKB dan STP PPN tersebut.

In October 2024, the Company received SKPKB VAT and STP PPN from DGT for the period of September 2019 to December 2019 amounting to Rp 1,476,407 thousand and Rp 102,757 thousand, respectively. In October 2024, the Company has paid the underpayment in October 2024 and charged those SKPKB and STP VAT.

Pada bulan Desember 2024, Perusahaan mengajukan keberatan kepada DJP atas SKPKB dan STP PPN tersebut sebesar Rp 1.579.165 ribu.

In December 2024, the Company submitted an objection to DGT for those SKPKB and STP VAT amounting to Rp 1,579,165 thousand.

20. LIABILITAS SEWA / 20. LEASE LIABILITIES

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Analisis jatuh tempo			Maturity analysis
1 Tahun	1.880.844	1.472.253	1 year
Lebih dari 1 tahun	22.739.800	25.828.848	More than 1 year
Jumlah	24.620.644	27.301.101	Total

Jumlah biaya bunga yang dibebankan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 2.022.908 ribu (31 Desember 2023: Rp 2.203.138 ribu) (Catatan 29).

Interest expense charged for the year ended December 31 2024 amounted to Rp 2,022,908 thousand (December 31, 2023: Rp 2,203,138 thousand) (Note 29).

21. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 624 karyawan (31 Desember 2023: 558 karyawan).

Liabilitas imbalan pasca kerja imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

Risiko tingkat bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko harapan hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir dari liabilitas imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

21. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION

The Company calculates defined post-employment benefits for its employees in accordance with Labor Law No. 13/2003. The number of employees entitled to the benefits are 624 employees as of December 31, 2024 (December 31, 2023: 558 employees).

The defined employment benefit liabilities plan typically expose the Company to actuarial risks such as interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Interest risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Longevity risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Reconciliation between beginning and ending balance of post-employment benefits liabilities are as follows:

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Saldo awal tahun	14.465.851	12.408.918	Beginning balance
Biaya jasa lalu	62.486	-	Past services cost
Beban jasa kini	4.216.007	3.118.176	Current service cost
Beban bunga	998.144	918.260	Interest cost
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain:			Actuarial loss (gain) recognized in other comprehensive income:
Perubahan asumsi keuangan	3.426.553	(225.804)	Changes in financial assumption
Pembayaran manfaat	(1.508.900)	(1.753.699)	Benefits paid
Saldo akhir	21.660.141	14.465.851	Ending balance

Rincian beban imbalan pasca-kerja yang diakui di dalam laba rugi selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The details of post-employment benefits expenses recognized in profit or loss for the year are as follows:

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Beban jasa kini	4.216.007	3.118.176	Current service cost
Biaya jasa lalu	62.486	-	Past services cost
Beban bunga	998.144	918.260	Interest cost
Sub-jumlah	5.276.637	4.036.436	Sub-total
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	3.426.553	(225.804)	Actuarial loss (gain) recognized in other comprehensive income
Jumlah	8.703.190	3.810.632	Total

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, analisis sensitivitas dari perubahan tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diasumsikan, dimana variabel lain dianggap konstan akan memiliki dampak sebagai berikut:

As of December 31, 2024 and 2023, the sensitivity analysis of change in the assumed discount and salary rate, which other variables held constant would have the following effects:

	2024			
	Perubahan Asumsi/ *Change in Assumption*	Kenaikan Asumsi/ *Increase in Assumption* Rp'000	Penurunan Asumsi/ *Decrease in Assumption* Rp'000	
Tingkat diskonto	1%	(20.039.422)	23.496.097	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	23.446.384	(20.056.069)	Salary increase rate

	2023			
	Perubahan Asumsi/ *Change in Assumption*	Kenaikan Asumsi/ *Increase in Assumption* Rp'000	Penurunan Asumsi/ *Decrease in Assumption* Rp'000	
Tingkat diskonto	1%	(13.562.320)	15.519.970	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	15.617.953	(13.462.235)	Salary increase rate

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognised in the statement of financial position.

Analisis umur estimasi pembayaran liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Aging analysis of estimated payment of post-employment benefits as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Kurang dari 1 tahun	2.144.735	128.221	Less than a year
1 - 3 tahun	2.935.730	4.636.007	1 - 3 years
3 - 5 tahun	2.578.492	1.762.547	3 - 5 years
5 - 10 tahun	21.059.529	19.155.213	5 - 10 years
Lebih dari 10 tahun	125.200.152	217.141.757	Over 10 years
Jumlah	153.918.638	242.823.745	Total

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 15,73 tahun (31 Desember 2023: 20,07 tahun).

The average duration of the benefits obligation at December 31, 2024 is 15.73 years (December 31, 2023: 20.07 years).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan mencatat liabilitas imbalan pasca-kerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria ("KKA") Nandi Kusnadi, aktuaris independen, dalam laporannya tanggal 17 Januari 2025 (2023: KKA Marcel Pryadarshi Soepeno dalam laporannya tanggal 9 Januari 2024), dengan menggunakan metode aktuarial "*Projected Unit Credit*" dan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

As of December 31, 2024 and 2023, the Company accrued post-employment benefits liabilities based on the actuarial calculation prepared by Kantor Konsultan Aktuaria ("KKA") Nandi Kusnadi, an independent actuary, based on its report dated January 17, 2025 (2023: KKA Marcel Pryadarshi Soepeno based on its report dated January 9, 2024), which using actuarial "Projected Unit Credit" method and the following main assumptions:

	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	31 Desember 2023/ *Desember 31, 2023*	
Umur pensiun	57 tahun/57 years	57 tahun/57 years	Normal pension age
Tingkat diskonto	7,13% per tahun/7.13% per year	6,9% per tahun/6.90% per year	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	3,0% per tahun/3.0% per year	3,0% per tahun/3.0% per year	Salary increase rate
Tingkat kematian	TMI IV	TMI IV	Mortality rate

22. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan laporan yang di susun oleh PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

22. CAPITAL STOCK

The details of the Company's shareholders as of December 31, 2024 and 2023 based on the report prepared by PT Raya Saham Registra, Share Registrar, are as follows:

	2024			
Nama pemegang saham	Jumlah saham/ *Number of shares*	Persentase pemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah modal/ *Total paid-up capital stock*	Name of stockholders
			Rp'000	
Mizuho Leasing Co., Ltd	3.835.346.804	67,44	383.534.680	Mizuho Leasing Co., Ltd
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.425.455.604	25,06	142.545.560	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	426.551.589	7,50	42.655.160	Public (each below 5% ownership)
Jumlah	5.687.353.997	100,00	568.735.400	Total

Nama pemegang saham	2023 Jumlah saham/ *Number of shares*	2023 Persentase pemilikan/ *Percentage of ownership*	2023 Jumlah modal/ *Total paid-up capital stock* Rp'000	Name of stockholders
Mizuho Leasing Co., Ltd	3.835.346.804	67,44	383.534.680	Mizuho Leasing Co., Ltd
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.425.455.604	25,06	142.545.560	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	426.551.589	7,50	42.655.160	Public (each below 5% ownership)
Jumlah	5.687.353.997	100,00	568.735.400	Total

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) No. 11 tanggal 20 Juni 2024 dari Notaris R.M. Dendy Soebangil, S.H., M.Kn., bahwa Pemegang Saham menyetujui, Perusahaan membentuk dana cadangan umum sejumlah Rp 300.000 ribu. Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah cadangan umum Perusahaan sebesar Rp 1.800.000 ribu.

Based on the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) No. 11 dated June 20, 2024 from Notary R.M. Dendy Soebangil, S.H., M.Kn., that the Shareholders approved, the Company to establish a general reserve fund of Rp 300,000 thousand. As of December 31, 2024, the Company's total general reserves amounted to Rp 1,800,000 thousand.

23. TAMBAHAN MODAL DISETOR / 23. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

The details of this account are as follows:

	Rp'000	
Biaya emisi saham sehubungan dengan penawaran umum perdana saham pada tahun 2008	(2.384.634)	Share issuance cost in connection with initial public offering in 2008
Penawaran Umum Terbatas I pada tahun 2017		Limited Public Offering I in 2017
Agio saham	18.997.926	Share premium
Biaya emisi saham	(6.180.220)	Share issuance cost
Sub-jumlah	12.817.706	Sub-total
Penawaran Umum Terbatas II pada tahun 2019		Limited Public Offering II in 2019
Agio saham	124.087.724	Share premium
Biaya emisi saham	(3.945.083)	Share issuance cost
Sub-jumlah	120.142.641	Sub-total
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Catatan 1d)	(32.990.607)	Difference in value of transactions among entities under common control (Note 1d)
Neto	97.585.106	Total

Sehubungan dengan transaksi pengalihan (akuisisi) seluruh saham IBJV (Catatan 1d), Perusahaan telah mencatat selisih nilai restrukturisasi entitas sepengendali dengan rincian sebagai berikut:

In accordance with acquisition of the all shares of IBJV (Note 1d), the Company recognized difference in value of transactions among entities under common control with the detail as follows:

Investasi pada IBJV dengan kepemilikan sebelumnya setara 20%	45.329.107	Investment on IBJV with previous ownership equivalent to 20%
Imbalan tunai yang dialihkan untuk memperoleh 80% kepemilikan IBJV	214.307.032	Cash consideration that transferred to obtain 80% ownership on IBJV
Jumlah	259.636.139	Total
Jumlah tercatat aset neto IBJV pada tanggal akuisisi	226.645.532	The carrying amount of net assets of IBJV on acquisition date
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	32.990.607	Difference in value of transaction among entities under common control

Ikhtisar dari jumlah tercatat aset neto IBJV pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

The summary of carrying amount of IBJV net assets on acquisition date are as follows:

Aset		Assets
Kas dan setara kas	97.172.065	Cash and cash equivalents
Piutang sewa pembiayaan	1.250.524.595	Finance lease receivable
Aset keuangan lainnya	8.597.506	Other financial assets
Liabilitas	(1.129.648.634)	Liabilities
Neto	226.645.532	Net

Selisih di atas mencerminkan manfaat sinergi, perluasan pasar dan pencapaian skala ekonomis yang lebih baik sebagaimana diharapkan timbul dari transaksi pengalihan saham tersebut.

The above difference reflects the benefit of synergy, market extention and enhanced of economic scale as expected shall be arise from such shares transfer transaction.

24. PENDAPATAN PEMBIAYAAN KONSUMEN / 24. CONSUMER FINANCING INCOME

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Pendapatan pembiayaan konsumen	320.987.712	265.366.992	Consumer financing income

Pada tahun 2024, jumlah amortisasi biaya transaksi yang diakui sebagai pengurang dari pendapatan pembiayaan konsumen adalah sebesar Rp 63.401.884 ribu (2023: Rp 47.692.297 ribu).

In 2024, total amortization of transaction costs which are recognized as a deduction of consumer financing income amounted to Rp 63,401,884 thousand (2023: Rp 47,692,297 thousand).

Pada tahun 2024 dan 2023, tidak terdapat transaksi kepada satu pihak yang jumlahnya melebihi 10% dari pendapatan pembiayaan konsumen.

In 2024 and 2023, there were no transactions made to any single party whose the amount exceeding 10% of the consumer financing income.

25. PENDAPATAN SEWA PEMBIAYAAN

Pendapatan sewa pembiayaan merupakan pendapatan yang diperoleh dari transaksi sewa pembiayaan atas alat-alat berat, peralatan dan mesin-mesin produksi. Pendapatan sewa pembiayaan diperoleh dari piutang sewa pembiayaan yang berasal dari pihak ketiga.

Pada 31 Desember 2024 dan 2023, tidak ada transaksi kepada satu pihak yang jumlah pendapatannya melebihi 10% dari pendapatan sewa pembiayaan.

25. FINANCE LEASES INCOME

Finance leases income represent income earned from finance lease transactions from heavy equipment, equipment and production machines. Finance leases income arises from third parties.

In December 31, 2024 and 2023, there were no transactions made to any single party with related income exceeding 10% of finance lease income.

26. PENDAPATAN ADMINISTRASI

Akun ini merupakan pendapatan yang diterima Perusahaan dari pihak ketiga atas jasa administrasi kepada pelanggan dan pengurusan dokumen-dokumen pelanggan.

26. ADMINISTRATION INCOME

Administration income represents income earned by the Company from third parties for administration services to the customers and handling of the customers' documents.

27. PENDAPATAN PENALTI

27. PENALTY INCOME

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Pihak ketiga			Third parties
Penalti pelunasan dipercepat	10.781.224	7.605.606	Late charges
Keterlambatan penerimaan angsuran	8.952.810	13.141.804	Early termination
Jumlah	19.734.034	20.747.410	Total

28. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Merupakan pendapatan yang berasal dari piutang yang tertagih kembali, pendapatan bunga lainnya, pendapatan bunga pinjaman karyawan, pendapatan bunga kontrak *swap* suku bunga dan *swap cross currency,* keuntungan penjualan aset tetap dan lainnya.

28. OTHER INCOME

Represents income from recovered receivables, other interest income, interest income from employee loan, interest rate swaps and cross currency swaps contracts, gain on sales of Property and equipment and others.

29. BEBAN BUNGA DAN PEMBIAYAAN LAINNYA

29. INTEREST AND OTHER FINANCING CHARGES

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related parties (Note 33)
Beban bunga atas utang bank	97.154.296	73.816.850	Interest expenses on bank loans
Beban bunga transaksi swap	248.476	343.730	Interest expenses on swap transaction
Provisi dan administrasi bank	3.004.283	2.544.421	Provision fees and bank charges
Sub-jumlah	100.407.055	76.705.001	Sub-total
Pihak ketiga			Third parties
Beban bunga atas utang bank	31.565.806	26.109.475	Interest expenses on bank loans
Provisi dan administrasi bank	320.267	208.125	Provision fees and bank charges
Beban bunga atas liabilitas sewa	2.022.908	2.203.138	Interest expenses on lease liabilities
Sub-jumlah	33.908.981	28.520.738	Sub-total
Jumlah	134.316.036	105.225.739	Total

30. BEBAN KEPEGAWAIAN / 30. PERSONNEL EXPENSES

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Gaji, bonus dan tunjangan	120.906.184	108.164.305	Salaries, bonuses and allowances
Imbalan pasca-kerja (Catatan 21)	5.276.637	4.036.436	Post-employment benefits (Note 21)
Jumlah	126.182.821	112.200.741	Total

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / 31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Penyusutan (Catatan 10 dan 11)	17.920.632	17.868.823	Depreciation (Notes 10 and 11)
Pajak dan perijinan	7.857.739	5.619.931	Taxes and license
Honorarium	7.315.107	7.345.083	Honorarium
Biaya marketing	5.686.825	13.499.536	Marketing expenses
Perbaikan dan pemeliharaan	4.141.980	6.902.819	Repairs and maintenance
Komunikasi	3.769.858	3.917.704	Communication
Perjalanan dinas	2.718.810	2.760.244	Business travelling
Sewa	2.683.819	2.725.600	Rental
Jasa pekerjaan alih daya	1.908.641	1.858.100	Outsourcing services
Keamanan	1.726.874	1.465.794	Security
Prasarana	1.084.451	991.835	Utilities
Peralatan dan perlengkapan kantor	860.961	1.240.085	Office supplies and stationaries
Pendidikan dan pelatihan	836.011	716.118	Education and trainning
Representasi	669.475	1.258.289	Representation
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 500 juta)	1.503.169	1.469.749	Others (each below Rp 500 million)
Jumlah	60.684.352	69.639.710	Total

32. LABA PER SAHAM / 32. EARNINGS PER SHARE

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar/dilusian:

The computation of basic/diluted earnings per share is based on the following information:

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	(2.155.665)	61.149.828	Net profit (loss) for the year
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun berjalan	5.687.353.997	5.687.353.997	Outstanding weighted average number of shares during the year
Laba (rugi) per saham (dalam angka Rupiah penuh)	(0,38)	10,75	Earnings (loss) per shares (in full amount of Rupiah)

Pada tahun 2024 dan 2023, Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

In 2024 and 2023, the Company does not have any dilutive ordinary shares.

33. SIFAT DAN TRANSAKSI MATERIAL KEPADA PIHAK BERELASI

Ringkasan transaksi material dan sifat hubungan antara Perusahaan dan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

33. NATURE OF RELATIONSHIP AND MATERIAL TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Summary of material transactions and nature of relationships between the Company and related parties were as follows:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat transaksi/ Nature of transactions	Sifat hubungan/ Nature of relationships
Mizuho Leasing Co., Ltd	Piutang lain-lain atas beban operasional yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (Catatan 8) dan beban komisi atas penjaminan utang / *Other receivables for the operational expenses (Note 8) paid by the Company and fees for loan guarantee*	Pemegang saham pengendali/ *Controlling shareholder*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Penempatan dana dalam bentuk giro (Catatan 5), fasilitas kredit utang bank (Catatan 14), biaya masih harus dibayar atas beban bunga bank (Catatan 17), beban umum dan administrasi (Catatan 31)/ *Placement of fund in the form of current accounts (Note 5), credit facilities of bank loan (Note 14), accrued expenses of bank interest charges (Note 17), general and administrative expenses (Note 31)*	Pemegang saham/*Shareholder*
PT Bank Mizuho Indonesia	Penempatan dana dalam bentuk giro (Catatan 5), fasilitas kredit utang bank (Catatan 14), biaya masih harus dibayar atas beban bunga bank (catatan 17) (Catatan 17) / *Placement of fund in the form of current accounts (Note 5), credit facilities of bank loan (Note 14), accrued expenses of bank interest charges (Note 17)*	Pihak berelasi lainnya/ *Other related party*

Rincian saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The detail of balance arise from transactions with related parties are as follows:

			Persentase terhadap jumlah aset (liabilitas) atau akun terkait/ *Percentage to total assets (liabilities) or related account*		
	2024	2023	2024	2023	
	Rp'000	Rp'000	%	%	
Aset					**Assets**
Bank	5.687.837	15.959.589	0,18%	0,57%	Bank
Piutang lain-lain	2.652.802	814.930	0,08%	0,03%	Other receiveable
Biaya dibayar di muka	-	919	0,00%	0,00%	Prepaid expenses
Aset lain-lain-bersih	73.175	74.175	0,00%	0,00%	Other assets
Jumlah	8.413.814	16.849.613	0,26%	0,60%	Total
Liabilitas					**Liabilities**
Utang bank	1.864.742.184	1.352.214.146	75,63%	66,18%	Bank loan
Biaya masih harus dibayar	937.028	3.301.360	0,04%	0,16%	Accrued expenses
Jumlah	1.865.679.212	1.355.515.506	75,67%	66,34%	Total

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	Persentase terhadap jumlah Pendapatan (beban) atau akun terkait/ *Percentage to total income (liabilities) or related account* 2024 %	2023 %	
Pendapatan Bunga					**Interest Income**
PT Bank Pan Indonesia Tbk	3.386	9.978	0,00%	0,00%	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Mizuho Indonesia	59.830	91.300	0,01%	0,02%	PT Bank Mizuho Indonesia
Jumlah	63.216	101.278	0,01%	0,02%	**Total**

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	Persentase terhadap jumlah pendapatan (beban) atau akun terkait/ *Percentage to total income (liabilities) or related account* 2024 %	2023 %	
Beban					**Expenses**
Beban bunga dan pembiayaan lainnya					Interest and others financing charge
PT Bank Pan Indonesia Tbk	362.396	450.625	0,08%	0,13%	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Mizuho Indonesia	97.040.376	73.709.955	20,49%	21,67%	PT Bank Mizuho Indonesia
Sub-jumlah	97.402.772	74.160.580	20,57%	21,80%	Total
Provisi dan administrasi bank					Provision fees and bank charges
Mizuho Leasing Co., Ltd.	2.727.963	2.249.956	0,58%	0,66%	Mizuho Leasing Co., Ltd.
PT Bank Pan Indonesia Tbk	89.816	40.168	0,02%	0,01%	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Mizuho Indonesia	186.504	254.297	0,04%	0,07%	PT Bank Mizuho Indonesia
Sub-jumlah	3.004.283	2.544.421	0,64%	0,74%	Total
Beban umum dan administrasi					General and administrative expenses
PT Bank Pan Indonesia Tbk	919	11.263	0,00%	0,00%	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Sub-jumlah	919	11.263	0,00%	0,00%	Total
Jumlah	100.407.974	76.716.264	21,21%	22,54%	

Transaksi dengan Mizuho Leasing Co., Ltd.

- Pada tanggal 4 Desember 2019, Perusahaan dan Mizuho Leasing Co., Ltd. (“MLC”) menandatangani perjanjian pinjaman, di mana MLC menyetujui untuk memberikan pinjaman jangka panjang kepada Perusahaan dengan fasilitas maksimum sebesar US$ 2 juta. Pinjaman ini berjangka waktu selama 4 tahun dan dikenakan bunga ICE LIBOR 3 bulan ditambah dengan margin 0,82%. Pinjaman akan dibayarkan secara angsuran per kuartal sampai dengan tahun 2023. Pada tanggal 16 Desember 2023, saldo terutang atas fasilitas pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya oleh Perusahaan.

Transactions with Mizuho Leasing Co., Ltd.

- On December 4, 2019, the Company and Mizuho Leasing Co., Ltd. (“MLC”) entered into a loan agreement whereby MLC agreed to provide long-term loan to the Company with a maximum facility of US$ 2 million. This loan has a term of 4 years and bears interest at 3 month ICE LIBOR plus margin 0.82%. This loan will be repaid in quaterly basis until 2023. As of December 16, 2023, the outstanding payable of this loan facility has been fully paid by the Company.

- MLC juga memberikan jaminan atas utang yang dimiliki Perusahaan saat ini dan di masa depan kepada kreditur. Perjanjian pemberian jaminan utang ditandatangani pada tanggal 30 April 2020. yang telah mengalami beberapakali perubahan, terakhir dengan amandemen tanggal 30 April 2024. Sesuai ketentuan perjanjian pemberian jaminan, jika tanpa ada keberatan dari salah satu pihak, jangka waktu pemberian jaminan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu tambahan setiap satu tahun. Perusahaan akan membayar komisi penjaminan kepada MLC berdasarkan tarif komisi masing-masing yang berbeda atas Guarantee (LoG); Komitmen untuk Menjamin (LoU); dan Stand-by Letter of Credit ("SBLC"), dengan tarif berbeda yang dibayarkan setahun sekali.

  Pada tahun 2024 dan 2023, beban komisi atas penjaminan tersebut dicatat sebagai bagian dari “Beban Bunga dan Keuangan” (Catatan 29) pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

- MLC also provided guarantee against present and future loans of Company to creditors. The loan guarantee agreement was signed on April 30, 2020. which has been amended several times, most recently with amendment dated 30 April 2024. In accordance with loan guarantee agreement, without any objection from either party, the term guarantee period will be automatically extended for additional period of one year. The Company will pay guarantee commissions to MLC based on respective commission fees with different tariff for Guarantee (LoG); Commitment to Guarantee (LoU); and Stand-by Letter of Credits ("SBLC") that will be paid once a year.

  In 2024 and 2023, the commission fee expenses arising from this guarantee agreement recorded as part of “Interest and Financing Charges” (Note 29) in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Selama tahun 2024, jumlah kompensasi kepada manajemen kunci yang seluruhnya merupakan imbalan kerja jangka pendek adalah sebesar Rp 10.085.712 ribu (2023: Rp 9.969.104 ribu).

During 2024, total compensation to the key management which entirely represent short-term employee benefits amounted to Rp 10,085,712 thousand (2023: Rp 9,969,104 thousand).

34. SEGMEN OPERASI

Perusahaan bergerak dalam bidang usaha pembiayaan dengan aktivitas utama pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna.

34. OPERATING SEGMENT

The Company is engaged in the business of financial institution with main activities are investment financing, working capital financing and multifunction financing.

Organisasi Perusahaan tidak dikelompokkan per masing-masing segmen usaha, informasi segmen yang tersedia untuk pendapatan, beban, aset dan liabilitas Perusahaan dibagi berdasarkan segmen geografis. Perusahaan tidak mempunyai dasar memadai untuk mengalokasikan pendapatan, beban, aset dan liabilitas ke masing-masing segmen usaha. Berikut adalah segmen geografis Perusahaan:

The Company's organization is not separately classified into business segments, therefore the available segment information of income, expenses, assets and liabilities are divided by geographical segment. The Company has no adequate basis for allocating income, expenses, assets and liabilities to the respective business segments. The geographical segment information of the Company are as follows:

	2024			
	Jabodetabek	Luar Jabodetabek	Jumlah	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
PENDAPATAN				**INCOME**
Pendapatan segmen				Segment Income
Pendapatan pembiayaan konsumen	142.868.578	178.119.134	320.987.712	Consumer financing
Sewa pembiayaan	63.692.213	1.021.291	64.713.504	Finance lease
Pendapatan administrasi	22.793.398	30.216.808	53.010.206	Administration income
Jumlah pendapatan segmen	229.354.189	209.357.233	438.711.422	Total segment revenues
Beban segmen				Segment expenses
Beban bunga dan pembiayaan lainnya	(134.281.971)	(34.065)	(134.316.036)	Interest and other financing expense
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	(85.033.027)	(67.026.669)	(152.059.696)	Provision for credit
Jumlah beban segmen	(219.314.998)	(67.060.734)	(286.375.732)	Total segment expenses
Hasil segmen	10.039.191	142.296.499	152.335.690	Segment income
Pendapatan tidak dapat dialokasikan			29.942.284	Unallocated income
Beban tidak dapat dialokasikan			(187.314.247)	Unallocated expenses
Rugi sebelum pajak			(5.036.273)	Loss before tax
Manfaat (beban) pajak penghasilan			2.880.608	Income tax (expense) benefit
Rugi tahun berjalan			(2.155.665)	Loss during the year
ASET				**ASSETS**
Aset segmen	1.797.704.305	1.252.388.754	3.050.093.059	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasikan			160.430.017	Unallocated assets
Jumlah aset			3.210.523.076	Total assets
LIABILITAS				**LIABILITIES**
Liabilitas segmen	2.382.063.012	25.853.106	2.407.916.118	Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasikan			58.610.891	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas			2.466.527.009	Total liabilities

	2023			
	Jabotabek	Luar Jabotabek/ Non-Jabotabek	Jumlah/ Total	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
PENDAPATAN				**INCOME**
Pendapatan segmen				Segment Income
Pembiayaan konsumen	131.516.042	133.850.950	265.366.992	Consumer financing
Sewa pembiayaan	51.936.104	3.601.421	55.537.525	Finance lease
Pendapatan administrasi	21.811.589	23.603.266	45.414.855	Administration income
Jumlah pendapatan segmen	205.263.735	161.055.637	366.319.372	Total segment income
Beban segmen				Segment expenses
Bunga dan keuangan	(105.183.661)	(42.078)	(105.225.739)	Interest and other financing expense
Penyisihan kerugian kredit	(22.122.370)	(30.041.952)	(52.164.322)	Provision for credit
Jumlah beban segmen	(127.306.031)	(30.084.030)	(157.390.061)	Total segment expenses
Hasil segmen	77.957.704	130.971.607	208.929.311	Segment income
Pendapatan tidak dapat dialokasikan			35.021.266	Unallocated income
Beban tidak dapat dialokasikan			(182.715.780)	Unallocated expenses
Laba sebelum pajak			61.234.797	Profit before tax
Manfaat pajak penghasilan			(84.969)	Income tax expenses
Laba bersih			61.149.828	Profit for the year
ASET				**ASSETS**
Aset segmen	1.686.255.007	934.663.614	2.620.918.621	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasikan			172.663.229	Unallocated assets
Jumlah aset			2.793.581.850	Total assets
LIABILITAS				**LIABILITIES**
Liabilitas segmen	1.966.198.593	17.394.533	1.983.593.126	Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasikan			59.503.886	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas			2.043.097.012	Total liabilities

35. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Kecuali untuk yang disebutkan dalam tabel di bawah ini, manajemen menilai bahwa nilai tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan mendekati dengan nilai wajarnya:

35. FAIR VALUE MEASUREMENTS

Except as detailed in the following table, the management considers that the carrying amount of financial assets and financial liabilities approximate their fair values:

	2024		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
	Rp'000	Rp'000	
Aset Keuangan			**Financial Assets**
Biaya perolehan diamortisasi			Amortized cost
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	2.081.769.148	2.292.434.914	Consumer financing receivables - net
Piutang sewa pembiayaan - bersih	879.800.794	964.146.411	Finance lease receivables - net
Jumlah	2.961.569.942	3.256.581.325	Total
Liabilitas Keuangan			**Financial Liabilities**
Biaya perolehan diamortisasi lainnya			Amortized cost
Utang bank	2.347.417.561	2.336.407.606	Bank loans
Jumlah	2.347.417.561	2.336.407.606	Total

	2023		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
	Rp'000	Rp'000	
Aset Keuangan			**Financial Assets**
Biaya perolehan diamortisasi			Amortized cost
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	1.730.181.413	1.896.788.404	Consumer financing receivables - net
Piutang sewa pembiayaan - bersih	813.258.675	852.748.322	Finance lease receivables - net
Jumlah	2.543.440.088	2.749.536.726	Total
Liabilitas Keuangan			**Financial Liabilities**
Biaya perolehan diamortisasi lainnya			Amortized cost
Utang bank	1.939.806.262	1.923.738.765	Bank loans
Jumlah	1.939.806.262	1.923.738.765	Total

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk tujuan pengukuran nilai wajar

- Manajemen menganggap bahwa nilai tercatat kas dan setara kas, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain dan biaya masih harus dibayar mendekati nilai tercatatnya karena memiliki sifat jangka pendek dan atau sering dilaksanakan *re-pricing*.

- Estimasi nilai wajar piutang pembiayaan konsumen - bersih dan piutang sewa pembiayaan - bersih dengan suku bunga tetap tanpa kuotasi. Nilai wajar ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan menggunakan suku bunga untuk piutang baru dengan jangka waktu yang serupa.

- Estimasi nilai wajar dari utang bank dengan bunga tetap tanpa kuotasi. Nilai wajar didasarkan pada diskonto arus kas menggunakan suku bunga untuk utang baru dengan jangka waktu yang serupa.

- Nilai wajar dari aset dan liabilitas derivatif diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan dengan menggunakan metode diskonto arus kas dengan nilai *input* pasar yang dapat diobservasi.

Valuation techniques and assumptions applied for the purposes of measuring fair value

- Management considers that the carrying amount of cash and cash equivalents, other receivables, trade payables, other payables and accrued expenses approximate their carrying value because of short term maturities, and/or related instrument are repriced frequently.

- The estimated fair value of consumer financing receivables - net and finance lease receivables - net with fixed interest rate where quoted market prices are not available. The fair value is determined by discounting the estimated future cash flows using a current yield curve appropriate for similar term of the receivables.

- The estimated fair value of bank loans with fixed interest rate where quoted market prices are not available. The fair value is determined by discounting the estimated future cash flows using a current yield curve appropriate for similar term of bank loans.

- Fair value of these derivative assets and liabilities are measured at fair value at the end of each reporting period using discounted cash flow method with market observable inputs.

Hirarki pengukuran nilai wajar atas aset dan liabilitas Perusahaan

Tabel berikut ini merangkum nilai wajar aset dan liabilitas, yang dianalisis nilai wajarnya berdasarkan pada:

Pengukuran nilai wajar level 1 adalah yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik; yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran;

Pengukuran nilai wajar level 2 adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga); dan

Pengukuran nilai wajar level 3 adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Fair value measurement hierarchy of the Company's assets and liabilities

The following tables summarize the fair values of the assets and liabilities, analyzed among those whose fair value is based on:

Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date;

Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and

Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

	2024				
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					**Assets for which fair value are disclosed**
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	-	2.292.434.914	-	2.292.434.914	Consumer financing receivables - net
Piutang sewa pembiayaan - bersih	-	964.146.411	-	964.146.411	Finance lease receivables - net
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan					**Liabilities for which fair values are disclosed**
Utang bank	-	2.336.407.606	-	2.336.407.606	Bank loans
Aset/liabiltas keuangan yang diukur pada nilai wajar					**Financial asset/liability measured at fair value**
Aset derivatif	-	3.767.652	-	3.767.652	Derivative assets

	2023				
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					**Assets for which fair value are disclosed**
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	-	1.896.788.404	-	1.896.788.404	Consumer financing receivables - net
Piutang sewa pembiayaan - bersih	-	852.748.322	-	852.748.322	Finance lease receivables - net
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan					**Liabilities for which fair values are disclosed**
Utang bank	-	1.923.738.765	-	1.923.738.765	Bank loans
Aset/liabiltas keuangan yang diukur pada nilai wajar					**Financial asset/liability measured at fair value**
Aset derivatif	-	7.953.303	-	7.953.303	Derivative assets
Liabilitas derivatif	-	(231.106)	-	(231.106)	Derivative Liabilities

Pada tahun 2024 dan 2023, tidak terdapat perpindahan metode pengukuran nilai wajar dari Level 1 menjadi Level 2, dan sebaliknya.

In 2024 and 2023, there is no transfer in the measurement method of fair value from Level 1 to Level 2, and vice versa.

36. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN

Pada tangal 16 Oktober 2024, Perusahaan dan PT BOT Finance Indonesia telah menandatangani perjanjian pembiayaan bersama untuk membiayai piutang sewa pembiayaan dengan porsi masing-masing sebesar 60,6% dan 39,4% dari jumlah pembiayaan dengan jangka waktu 36 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah piutang pembiayaan tersebut sebesar Rp 39.953.165 ribu (Catatan 7).

36. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND AGREEMENTS

On October 16, 2024, the Company and PT BOT Finance Indonesia have entered into a joint finance agreement to finance lease receivables with a portion for each 60.6% and 39.4% of the total financing with a term of 36 months. As of December 31, 2024, the outstanding finance receivables arising from this agreement amounted to Rp 39,953,165 thousand (Note 7).

37. MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko:

- Risiko operasional
- Risiko pasar
- Risiko likuiditas
- Risiko kredit

Kerangka Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko Perusahaan disusun untuk memenuhi perkembangan yang pesat dalam industri jasa pembiayaan. Kebijakan manajemen risiko Perusahaan konsisten dengan Mizuho Leasing Co., Ltd., sebagai induk perusahaan (*parent company*) yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan.

Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kegiatan pembiayaan yang sehat dan berlandaskan tata kelola yang baik membutuhkan penerapan manajemen risiko yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Dalam penerapannya Perusahaan menyadari bahwa peran aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Senior Manajemen sangat menentukan efektivitas penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko yang baik dapat mendukung kinerja dari perusahaan pembiayaan, maka manajemen risiko menjadi elemen pendukung penting bagi Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Sasaran dan tujuan utama dari diterapkannya manajemen risiko di Perusahaan adalah untuk menjaga dan melindungi Perusahaan melalui pengelolaan risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul dari aktivitas Perusahaan serta menjaga tingkat risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

Kebijakan manajemen risiko merupakan salah satu upaya manajemen Perusahaan untuk menjamin adanya landasan yang kuat bagi pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan sehingga kegiatan usaha dapat berjalan dalam batas risiko yang terukur untuk mencapai target peningkatan *shareholder value*.

37. RISK MANAGEMENT

The Company has exposure to the following risks:

- Operational risk
- Market risk
- Liquidity risk
- Credit risk

Risk Management Framework

The Company's risk management policy designed to address the rapid growth in the financing services industry. Company's risk management policy is consistent with Mizuho Leasing Co., Ltd., as the holding company (parent company) which is engaged in financing services.

The Company realizes that the sound management of financial activities and sound corporate governance grounded in efficient management principles requires the application of risk management including the process of identification, measurement, monitoring and control of risk. In applying this risk management, the Company recognizes that the active role of the Board of Commissioners, Directors and Senior Management strongly determines the effectiveness of implementation the risk management. The implementation of good risk management can support the performance of the financing company, thus risk management is an important supporting element for the Company to operate the business. The target and main purpose of the implementation of the risk management in the Company is to guard and protect the Company through the risk management of possible losses that might arise from Company activities and to maintain the level of risk to comply with Company's policies.

The risk management policy is one of the Company's management efforts to ensure a strong foundation for the implementation of operational activities so that operations can be conducted within measurable limits of risk to achieve the target of increasing shareholder value.

Tujuan penerapan kebijakan manajemen risiko adalah:

- Untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis dan kegiatan pendukung Perusahaan telah memperhitungkan seluruh potensi risiko yang mungkin timbul.
- Untuk melakukan fungsi kontrol dan pengelolaan terhadap seluruh risiko yang melekat pada aktivitas bisnis dalam batas-batas toleransi risiko Perusahaan yang telah ditetapkan.
- Untuk mengoptimalkan penggunaan modal Perusahaan.
- Untuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan yang relevan, dari Otoritas Jasa keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan otoritas lain.
- Untuk meningkatkan *shareholder value* dalam jangka panjang.

Strategi untuk mendukung sasaran dan tujuan dari manajemen risiko diwujudkan dengan pembentukan dan pengembangan budaya risiko yang kuat, penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik, pelestarian nilai-nilai kepatuhan terhadap regulasi, infrastruktur yang memadai, serta proses kerja yang terstruktur dan sehat. Budaya risiko yang kuat ini diciptakan dengan membangun kesadaran risiko yang kuat dimulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai kepada seluruh karyawan Perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik disosialisasikan dan dikembangkan secara menyeluruh pada semua komponen dan aktivitas Perusahaan untuk memastikan bahwa dilaksanakan dengan tanpa kompromi.

Sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, manajemen Perusahaan memiliki komitmen penuh untuk menerapkan manajemen risiko secara komprehensif yang secara esensi mencakup kecukupan kebijakan, prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Perusahaan tetap dapat terarah dan terkendali pada batasan risiko yang dapat diterima, serta tetap menguntungkan Perusahaan. Departemen Manajemen Risiko yang berperan secara aktif dalam mengkoordinasikan tindakan-tindakan pencegahan, proaktif dan responsive dengan seluruh karyawan dari berbagai tingkatan yang ada di dalam Perusahaan untuk mendukung penerapan manajemen risiko ini, karena semua bagian di dalam Perusahaan masing-masing akan memainkan peranan penting.

The objectives of the risk management are:

- To ensure that all business and support activities in the Company's operations have taken into consideration all potential risks that may arise.
- To perform the function of supervision and management of all risks inherent in the Company's business activities within the specified risk tolerance limits.
- To optimize the use of the Company's capital.
- To ensure compliance with all relevant regulations, including regulations of Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, the Ministry of Finance and other authorities.
- To increase shareholder value over in the long run.

Strategies to support the goals and objectives of risk management is developed through the formation and development of a strong risk culture, the implementation of good corporate governance practices, preserving the values of compliance with regulations, adequate infrastructure, as well as structured and healthy working processes. This strong risk culture is created by building a strong awareness of risk starting from the Board of Commissioners, Board of Directors and to the entire employees of the Company. Good corporate governance is socialized and developed thoroughly in all components and activities within the Company to ensure that they are being implemented without compromise.

As the Company engages in financing activities, the Company's Management is fully committed to implement comprehensive risk management, which essentially covers the adequacy of policies, procedures and methodology of risks management; hence, the Company's business activities could remain to be directed and controlled at an acceptable risk limit, at the same time the Company can still be profitable. Risk Management Department is playing an active role in coordinating preventive, proactive and responsive actions with all employees from various levels within the Company in order to support the implementation of risk management, because all divisions of the Company will play their respective important roles.

Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan menyadari pentingnya untuk memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi oleh Perusahaan. Perusahaan memiliki mekanisme yang bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pilar 1: Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif tersebut tercermin sejak perencanaan bisnis tahunan, yang mencakup:

- Menyetujui dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala;
- Melakukan evaluasi dan menyetujui aktivitas yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Direksi;
- Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan otoritas dalam pemberian batasan serta tinjauan atas kualitas portofolio secara berkala;
- Terdapatnya Komite Audit dan Pemantau Risiko sebagai organ Dewan Komisaris dan Komite Manajemen Risiko serta Komite Pengarah Teknologi Informasi sebagai organ Direksi dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Pilar 2: Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Batasan

Perusahaan menyusun kebijakan-kebijakan terkait manajemen risiko yang diperiksa secara berkala dan selalu disesuaikan dengan keadaan usaha terkini. Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam Standar Operasional Prosedur dan Surat Edaran yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perusahaan juga memiliki kebijakan-kebijakan mengenai batasan persetujuan/otorisasi untuk transaksi kredit maupun yang bukan transaksi kredit.

Pilar 3: Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko di Perusahaan yang digunakan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Departemen Manajemen Risiko adalah pihak yang berfungsi memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah risiko.

In the application of risk management, the Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that rests on four (4) risk management pillars, which can be described as follows:

Pillar 1: Active Supervision by Board of Commissioners and Board of Directors

Active supervision is reflected starting from the annual business planning, which includes:

- Approving and evaluating risk management policies periodically;
- Evaluating and approving actions that require the approval of the Board of Commissioners or Board of Directors;
- Establishing risk management policies and strategies, including establishment of authority in setting limits and evaluation of the quality of the portfolio on a regular basis;
- The existence of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee as an organ of the Board of Commissioners and Risk Management Committee and Information Technology Steering Committee as organ of the Board of Directors in carrying out its oversight responsibilities.

Pillar 2: Adequacy of Policy, Procedure and Application of Limits Determination

The Company formulates policies related to risk management which are checked regularly and continually adapted to current business conditions. The policies are translated into the Standard Operating Procedures and Circular Letter which are distributed to all employees. The Company also has policies regarding restrictions approval/authorization limits for credit transactions and non-credit transactions.

Pillar 3: Adequacy of Identification Process, Assessment, Monitoring and Risks Control

The processes of identification, assessment, monitoring and risks control are the main components of the process of risks management implementation in the company which is used to analyze resources and potential risks along with the impacts. Risk Management Department is a division responsible to analyze the level, trend, and course of the risk.

Perusahaan memiliki perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengawasi risiko terutama risiko kredit dan risiko operasional melalui mekanisme pelaporan dan sistem informasi manajemen yang ada serta melalui pertemuan berkala Komite Audit dan Pemantau Risiko. Selain itu, sistem teknologi informasi utama Perusahaan mampu menyediakan data/informasi secara cepat, akurat dan *real time online* kepada pihak Manajemen.

The Company has tools to identify, assess and monitor risks, particularly credit risk and operational risk through the existing reporting mechanism and the management information systems also through regular meetings of Audit Committee and Risk Monitoring Committee. In addition, the Company's main information technology system is able to provide, quick, accurate and in real time online data/information for Management.

Pilar 4: Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Pillar 4: Comprehensive Internal Control

Perusahaan memiliki Divisi Audit Internal yang secara independen melaporkan proses dan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Akuntabilitas dari Divisi Audit Internal mencakup:

The Company has an Internal Audit Division, which independently reports the process and results of its investigations to the Board of Commissioners and the President Director. The accountability of the Internal Audit Division includes:

- Menyediakan penilaian atas kecukupan dan efektifitas dari semua proses yang ada di dalam Perusahaan;
- Melaporkan masalah-masalah penting yang terkait dengan proses pengendalian aktivitas-aktivitas di dalam Perusahaan termasuk perbaikan yang potensial terhadap proses-proses tersebut;
- Koordinasi dengan fungsi pengendali dan pengawasan lainnya (manajemen risiko, kepatuhan, hukum dan audit eksternal).

- Providing an assessment of the adequacy and effectiveness of all existing processes within the Company;
- Reporting on key issues related to the process of monitoring activities within the Company, including potential improvements to these processes;
- Coordinating with other control and oversight functions (risk management, compliance, legal and external audit).

Risiko Operasional

Operational Risk

Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan karena kekurangan dan kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem ataupun permasalahan-permasalahan yang berdampak pada operasi Perusahaan. Penanganan risiko operasional dalam Perusahaan dilakukan dengan 3 (tiga) langkah, yaitu:

Operational risk is the risk caused by shortcomings and failures of internal processes, human errors, system failures or problems that could bring impact to the Company's operations. The operational risks in the Company are handled through 3 (three) steps as follows:

- Pengidentifikasian risiko
- Pengukuran risiko
- Manajemen, pengawasan dan pengendalian risiko

- Risk identification
- Risk measurement
- Risk management, supervision and control

Ketiga langkah di atas merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan. Langkah di atas telah diterjemahkan Perusahaan dalam mekanisme manajemen risiko operasional sebagai berikut:

The three steps above are inseparable unified processes. The steps above have been converted to the Company's operational risk management mechanism as follows:

- Pengertian yang jelas oleh semua lini yang terkait terhadap risiko yang melekat pada setiap tahapan proses kegiatan operasional yang berhubungan terutama dengan persetujuan dan pencairan pembiayaan, pelayanan konsumen, pencatatan pembukuan dan penyusunan laporan.

- A clear understanding by all lines concerned regarding the risk inherent in each stage of the processes of operational activities relating primarily to the approval and disbursement of financing, customer service, accounting records and preparation of reports.

- Pembagian tugas yang jelas dan terpisah antara pelaksana dan kontrol. Sebagai pelaksana, aktivitas yang dikerjakan berdasarkan *Standard Operating Procedures* (SOP) baku Perusahaan, sedangkan fungsi kontrol memastikan aktivitas sudah memenuhi persyaratan yang digariskan oleh SOP.

- A clear separation of duties between executors and overseers. Executors, carry out activities based on the Company's Standard Operating Procedures (SOP), while the oversight functions ensure that the activities are done in accordance with the requirements outlined by the SOP.

- Perusahaan menggunakan Sistem Teknologi Informasi yang handal agar kelangsungan dan kelancaran pengoperasian sistem dapat terjamin. Perusahaan sudah menerapkan sistem *on-line* dan *real time* sehingga dengan demikian pihak manajemen dapat memonitor seluruh aktivitas operasional secara langsung, dan dengan cepat dapat mengambil keputusan strategis dan tepat untuk memitigasi kemungkinan risiko yang terjadi akibat kelalaian, tidak berfungsinya sistem, maupun penyimpangan dari pelaksanaan SOP dan/atau kebijakan Perusahaan.

- The Company uses a reliable Information Technology Systems so that the continuity and smooth operation of the system can ve guaranteed. The Company has implemented an online and real time system so that management can monitor all operational activities directly and can quickly make strategic and appropriate decisions to mitigate possible risks that occur sue to negligence, system malfunctions, or deviations from SOP implementation and/or Company policy.

- Perusahaan menerapkan *Risk Control Self Assessment* (RCSA), suatu konsep manajemen risiko yang dibentuk berdasarkan SOP yang berlaku dalam Perusahaan, untuk menelaah dan mengukur besarnya potensi risiko-risiko yang berlangsung selama proses internal untuk menghasilkan status risiko operasional, dan dilaporkan secara periodik.

- The Company implements a Risk Control Self Assessment (RCSA), a concept of risk management, which was established based on applicable Standard Operating Procedures in the Company, to examine and measure the extent of potential risk occurring throughout the internal processes in order to generate operational risk status, and is reported periodically.

- Perusahaan senantiasa mengembangkan kemampuan dan pengetahuan karyawannya dengan berbagai pelatihan melalui *MLI Learning Centre* agar dapat menekan seminimal mungkin frekuensi kesalahan manusia dan sistem operasional dan dampak kerugian finansial yang mungkin terjadi.

- The Company always develops the skills and knowledge of its employees with various training through MLI Learning Centre in order to minimize the frequency of human error and operational system as well as the impact of possible financial losses.

- Memastikan bahwa semua lini yang terkait telah memahami risiko pada setiap tahap kegiatan operasional terutama yang berhubungan dengan persetujuan dan pencairan kredit, pelayanan konsumen, pembukuan, dan penyusunan laporan.

- Ensure that all related lines understand the risks that may occur at every stage of operational activities, especially those related to credit approval and disbursement, customer service, bookkeeping, and reporting.

- Memisahkan tugas pelaksana dan kontrol secara tegas. Pelaksana bekerja berdasarkan SOP, sedangkan control memastikan bahwa aktivitas pelaksanaan telah sesuai dengan SOP.

- Strictly separate executive and supervision duties. The executors work according to the SOP, while the supervisors ensure that the activities are in accordance with the SOP

- Proses pencatatan transaksi keuangan (accounting) dilakukan melalui sistem built in control yang berjenjang dan terintegrasi.

- Membuat *back-up* melalui *Disaster Recovery Center* ("DRC") atas data-data operasional untuk menghindari terganggunya kegiatan operasional jika seluruh data hilang akibat gangguan sistem, kebakaran, banjir, huru-hara, atau gempa bumi.

- The process of recording financial transactions (accounting) is carried out through a tiered and integrated built-in control system.

- Make backups through the Disaster Recovery Center ("DRC") of operational data to avoid disruption of operational activities if all data is lost due to system disruption, fire, flood, riot or earthquake.

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administrative termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Risiko Pasar antara lain meliputi Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko ekuitas. Manajemen Risiko pada Risiko Pasar dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Perusahaan

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko kerugian pada akun aset ataupun liabilitas Perusahaan Pembiayaan akibat perubahan suku bunga. Perusahaan mengelola risiko suku bunga dengan menggunakan instrumen derivatif yaitu *swap* suku bunga. Melalui *swap* suku bunga, Perusahaan setuju untuk mempertukarkan selisih antara suku bunga tetap dengan suku bunga mengambang yang dihitung sesuai dengan nilai nosional yang telah disepakati. Nilai wajar dari *swap* suku bunga pada akhir periode pelaporan ditentukan dengan mendiskonto nilai arus kas di masa yang akan datang dengan menggunakan kurva pada akhir periode pelaporan dan risiko kredit yang melekat pada kontrak. Nilai rata-rata suku bunga ditentukan dari nilai saldo pada akhir periode pelaporan. Kontrak *swap* suku bunga mempertukarkan tingkat suku bunga mengambang dengan tingkat suku bunga tetap, dimana kontrak tersebut ditujukan dan efektif sebagai instrument lindung nilai arus kas.

Market Risk

Market Risk is Risk in the position of assets, liabilities, equity, and/or administrative accounts including derivative transactions due to overall changes in market conditions. Market Risk includes, among others, interest rate risk, exchange rate risk and equity risk. Market Risk Management is carried out to minimize the possibility of negative impacts due to changes in market conditions on the Company's assets and capital

Interest Risk

Interest risk is the risk of loss in the Company's financial assets or liabilities due to changes in interest rates. The Company manages interest rate risk using derivative instruments, which is interest rate swaps. Through an interest rate swap, the Company agrees to exchange the difference between a fixed interest rate and a floating interest rate calculated according to the agreed notional value. The fair value of interest rate swaps at the end of the reporting period is determined by discounting the value of future cash flows using a curve at the end of the reporting period and credit risk attached to the contract. The average value of the interest rate is determined from the balance value at the end of the reporting period. An interest rate swap contract exchanges a floating interest rate with a fixed rate, which is designated and effective as a cash flow hedge instrument.

Tabel berikut menggambarkan rincian berdasarkan suku bunga atas aset bruto dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal *repricing* atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga:

The following table summarizes the breakdown based on interest rates on gross assets and financial liabilities of the Company which are grouped according to which is earlier between the repricing date or contractual due date to see the impact of changes in interest rates:

	2024							
	Suku bunga variabel/*Variable interest*			Suku bunga tetap/*Fixed interest*				
	Sampai dengan 1 bulan/ Until 1 month	>1-12 bulan/ >1-12 months	>1-5 tahun/ >1-5 year	Sampai dengan 1 bulan/ Until 1 month	>1-12 bulan/ >1-12 months	>1-5 tahun/ >1-5 year	Jumlah/ Total	
	Rp 000	Rp 000	Rp 000	Rp 000	Rp 000	Rp 000	Rp 000	
Aset keuangan								Financial assets
Kas dan setara kas	22.194.292	-	-	18.000.000	-	-	40.194.292	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen	-	-	-	95.579.215	761.392.721	1.280.797.798	2.137.769.734	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	-	-	-	50.929.459	342.641.331	602.634.175	996.204.965	Finance lease receivables
Aset Derivatif	-	3.767.652	-	-	-	-	3.767.652	Derivative assets
Jumlah	22.194.292	3.767.652	-	164.508.674	1.104.034.052	1.883.431.973	3.177.936.643	Total
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
Utang bank	(1.716.330.226)	(55.669.774)	(120.289.028)	(336.113.260)	(33.107.207)	(85.908.066)	(2.347.417.561)	Bank loans
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	(1.660.735)	-	-	(1.660.735)	Accrued expense
Jumlah	(1.716.330.226)	(55.669.774)	(120.289.028)	(337.773.995)	(33.107.207)	(85.908.066)	(2.349.078.296)	Total
Bersih	(1.694.135.934)	(51.902.122)	(120.289.028)	(173.265.321)	1.070.926.845	1.797.523.907	828.858.347	Net

	2023							
	Suku bunga variabel/*Variable interest*			Suku bunga tetap/*Fixed interest*				
	Sampai dengan 1 bulan/ Until 1 month	>1-12 bulan/ >1-12 months	>1-5 tahun/ >1-5 year	Sampai dengan 1 bulan/ Until 1 month	>1-12 bulan/ >1-12 months	>1-5 tahun/ >1-5 year	Jumlah/ Total	
	Rp 000	Rp 000	Rp 000	Rp 000	Rp 000	Rp 000	Rp 000	
Aset keuangan								Financial assets
Kas dan setara kas	50.062.293	-	-	-	-	-	50.062.293	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen	-	-	-	75.449.171	664.462.851	1.024.849.301	1.764.761.323	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	-	-	-	48.596.385	324.463.763	477.468.602	850.528.750	Finance lease receivables
Aset Derivatif	-	7.953.303	-	-	-	-	7.953.303	Derivative assets
Jumlah	50.062.293	7.953.303	-	124.045.556	988.926.614	1.502.317.903	2.673.305.669	Total
Liabilitas keuangan								Financial liabilities
Utang bank	(1.250.642.698)	(118.357.302)	(55.963.269)	(313.796.443)	(21.761.075)	(179.285.475)	(1.939.806.262)	Bank loans
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	(3.865.862)	-	-	(3.865.862)	Accrued expense
Liabilitas derivatif	-	(231.106)	-	-	-	-	(231.106)	Derivative liabilities
Jumlah	(1.250.642.698)	(118.588.408)	(55.963.269)	(317.662.305)	(21.761.075)	(179.285.475)	(1.943.903.230)	Total
Bersih	(1.200.580.405)	(110.635.105)	(55.963.269)	(193.616.749)	967.165.539	1.323.032.428	729.402.439	Net

Perusahaan terpapar risiko suku bunga terutama karena utang bank memiliki suku bunga tetap dan mengambang.

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar dan risiko suku bunga atas arus kas dijelaskan dalam Catatan 5, 6, 7, 8, 12 dan 14.

Companies are exposed to interest rate risk mainly because of bank loans have fixed and floating interest rates.

The Company's financial assets and liabilities that are exposed to fair value interest rate risk and cash flow interest rate risk are detailed in Notes 5, 6, 7, 8, 12 and 14.

Risiko Mata Uang

Perusahaan terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama karena transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing seperti penyaluran piutang pembiayaan dan penerimaan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Perusahaan mengelola eksposur mata uang asing dengan mencocokkan, sebisa mungkin, penerimaan dan pembayaran dalam masing-masing individu mata uang.

Risiko nilai tukar terhadap mata uang asing adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas di masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi dikarenakan adanya perubahan nilai tukar terhadap mata yang asing. Eksposur risiko Perusahaan terhadap nilai tukar berasal dari kas di bank, piutang sewa pembiayaan, aset lain lain, utang bank dan biaya yang masih harus dibayar.

Pada risiko ini, Perusahaan mengelola risiko dengan menyesuaikan kondisi mata uang piutang sewa pembiayaan dengan mata uang pendanaan pinjaman yang ditetapkan oleh bank. Perusahaan mengelola risiko nilai tukar dengan menggunakan instrumen derivatif yaitu *swap cross currency*. Melalui *swap cross currency*, Perusahaan setuju untuk mempertukarkan pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dengan pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang spesifik pada tanggal dimulainya transaksi, di mana kontrak tersebut memenuhi kriteria dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.

Currency Risk

The Company is exposed to the effects of fluctuations in foreign exchange rates mainly due to transactions of denominated foreign currencies such as distribution of finance lease receivables and receipt of loans denominated in foreign currencies. The Company manages foreign currency exposure by matching receipts and payments in each individual currency, as much as possible.

Exchange rate risk against foreign currencies is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in the exchange rate of foreign currencies. The Company's risk exposure to the exchange rate comes from cash in banks, finance lease receivables, other assets, bank loans, and accrued expenses.

At this risk, the Company manages risk by adjusting the condition of the finance lease receivables with the loan funding currency specified by the bank. The Company manages exchange rate risk by using a derivative instrument, namely cross currency swap. Through cross currency swaps, the Company agrees to exchange loans received in foreign currencies for loans in Rupiah using a specific exchange rate at the date of commencement of the transaction, where the contract meets the criteria and is effective as a cash flow hedge instrument.

	2024		
	Rp'000		
Mata uang asing	Kenaikan (penurunan)/ *Increase (decrease)*	Sensitivitas laba rugi/ *Profit (loss) sensitivity*	Foreign Currency
Dolar Amerika Serikat	0,91%	(34.775)	United States Dollar
Yen	0,80%	(15.304)	Yen

	2023		
	Rp'000		
Mata uang asing	Kenaikan (penurunan)/ *Increase (decrease)*	Sensitivitas laba rugi/ *Profit (loss) sensitivity*	Foreign Currency
Dolar Amerika Serikat	0,66%	(606.820)	United States Dollar
Yen	1,17%	(13.011)	Yen

Aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang dimiliki Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Company's assets and liabilities denominated in foreign currency are as follows:

		2024		2023			
		Mata uang asing/ *Foreign currency*	Ekuivalen Rupiah/ *Equivalent Rupiah*	Mata uang asing/ *Foreign currency*	Ekuivalen Rupiah/ *Equivalent Rupiah*		
			Rp'000		Rp'000		
Kas dan setara kas	USD	435.376	7.036.541	802.392	12.369.671	USD	Cash and cash equivalents
	Yen	11.888	1.216.870	37.914	4.153.417	Yen	
Piutang sewa pembiayaan	USD	9.755.364	157.666.201	4.368.701	67.347.896	USD	Finance lease receivables
	Yen	519.122	53.138.674	869.512	95.252.508	Yen	
Jumlah			219.058.286		179.123.492	Total	
Utang bank	USD	11.221.596	181.363.431	11.783.248	181.650.546	USD	Bank loan
	Yen	547.604	56.054.130	914.271	100.155.716	Yen	
Jumlah			237.417.561		281.806.262	Total	

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabillitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.

Manajemen risiko pada risiko likuiditas dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.

Pada awal bulan Perusahaan menetapkan tingkat suku bunga dan juga *spread* yang akan diterapkan pada bulan tersebut. Penetapan dilakukan setelah melakukan analisa pasar. *Funding cost* ditetapkan dengan memperhatikan *spread* dan suku bunga pinjaman kreditur serta suku bunga pasar yang diperoleh dari Bloomberg. Dengan demikian, pergerakan suku bunga pinjaman tetap dapat tertutup oleh suku bunga piutang sewa pembiayaan. Perusahaan juga berusaha menetapkan suku bunga tetap atau mengambang dalam kegiatan pendanaan disesuaikan dengan suku bunga tetap atau mengambang pada piutang sewa pembiayaan. Pada akhir bulan akan dibuat laporan yang melaporkan jumlah pinjaman selama bulan tersebut. Laporan tersebut berisi total jumlah pinjaman, bunga, dan *spread*.

Liquidity Risk

Liquidity Risk is the risk due to the inability of the Company to meet maturing liabilities from cash flow funding sources and / or from liquid assets that can be easily converted into cash, without disrupting the Company's activities and financial condition.

Risk management on liquidity risk is carried out to minimize the possibility of the Company's inability to obtain cash flow funding sources.

At the beginning of the month, the Company sets the interest rate and spread that will be applied for the month. The determination is made after conducting a market analysis. Funding costs are determined by taking into account the spread and interest rates on creditors' loans as well as market interest rates obtained from Bloomberg. Thus, the movement in loan interest rates can still be covered by the interest rates on finance lease receivables. The Company also seeks to set a fixed or floating interest rate in its financing activities at a fixed or floating rate on finance lease receivables. At the end of the month, a report will be generated that reports the loan amount during the month. The report contains the total loan amount, interest, and spread.

Analisis Sensitivitas

Untuk utang bank suku bunga mengambang, analisis sensitivitas disusun dengan asumsi jumlah utang bank terutang pada tanggal laporan posisi keuangan adalah yang terutang untuk sepanjang tahun. Perubahan dari 100 basis poin suku bunga pada tanggal laporan keuangan akan meningkatkan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 22.615.095 ribu (31 Desember 2023: Rp 15.506.505 ribu). Analisis ini mengasumsikan bahwa semua variabel lainnya tetap konstan. Perubahan terutama disebabkan oleh tingkat suku bunga pinjaman variabel.

Untuk modal kerja, utang dan pinjaman investasi, Perusahaan berusaha dengan mengurangi risiko tingkat suku bunganya dengan cara mendapatkan struktur pinjaman dengan suku bunga kompetitif.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaannya, selain menggunakan dana sendiri, Perusahaan juga membina kerjasama dengan beberapa bank nasional dan bank pemerintah maupun bank asing dalam bentuk *demand loan* dan *term loan*.

Saldo kas setiap hari cukup untuk minimal menutupi kebutuhan dana pembiayaan satu hari. Perusahaan juga mempunyai fasilitas Pinjaman Rekening Koran yang dapat ditarik setiap waktu dengan limit minimal menutup kebutuhan dana 5 hari kerja.

Perbandingan liabilitas terhadap ekuitas Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar 331,52% (31 Desember 2023: 272,20%). Dalam hal perbandingan liabilitas terhadap jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar 76,83% (31 Desember 2023: 73,13%).

Sensitivity Analysis

For floating rate bank loans, the sensitivity analysis is prepared assuming the amount of bank loans outstanding at the statement of financial position date was outstanding for the whole year. A change of 100 basis points in interest rates at the reporting dates would have increased or decreased profit before income tax for the year then ended December 31, 2024 by Rp 22,615,095 thousand (December 31, 2023: Rp 15,506,505 thousand). This analysis assumes that all other variables remain constant. The movement is mainly attributable to interest rates on its variable rate borrowings.

For working capital, investment loans and borrowings, the Company may seek to mitigate its interest rate risk by obtaining loans structure with competitive interest rate.

In its financing activities the Company does not only rely on their own funds, the Company is also able to use other sources of funds from several banks by agreement in the forms of demand loan and term loan.

An adequate cash balance is maintained every day to cover financing needs for one day. The Company also has a current account loan facility that may be withdrawn at any time with a minimum limit to cover financing needs for 5 business days.

The comparison of the Company's liabilities to equity is 331.52% as of December 31, 2024 (December 31, 2023: 272.20%). Meanwhile, the ratio of liabilities to total assets is 76.83% as of December 31, 2024 (December 31, 2023: 73.13%).

Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

The following table shows the differences in the maturity profile of the Company's financial assets and liabilities as of December 31, 2024 and 2023:

	2024					
	Sampai dengan 1 bulan/ Until 1 month	> 1 bulan s.d 3 bulan/ > 1 month until 3 months	> 3 bulan s.d 12 bulan/ > 3 months until 12 months	> 1 tahun s.d 5 tahun/ > 1 year until 5 years	Jumlah/ Total	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Aset keuangan						**Financial assets**
Tanpa suku bunga:						Non bearing interest:
Kas dan setara kas	463.408	-	-	-	463.408	Cash and cash equivalents
Piutang lain-lain - bersih						Other receivables - net
Pihak berelasi	-	-	2.652.802	-	2.652.802	Related parties
Pihak ketiga	67.215.536	499.104	1.344.079	43.006.288	112.065.007	Third parties
Suku bunga variabel						Variable interest
Kas dan setara kas	22.194.292	-	-	-	22.194.292	Cash and cash equivalents
Aset derivatif	-	3.767.652	-	-	3.767.652	Derivative assets
Suku bunga tetap						Fixed interest
Kas dan setara kas	18.000.000	-	-	-	18.000.000	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen	95.579.215	153.041.498	608.351.223	1.280.797.798	2.137.769.734	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	50.929.459	67.773.118	274.868.213	602.634.175	996.204.965	Finance lease receivables
Jumlah	254.381.910	225.081.372	887.216.317	1.926.438.261	3.293.117.860	Total
Liabilitas keuangan						**Financial liabilities**
Tanpa suku bunga:						Without interest:
Utang usaha	4.490.658	-	-	-	4.490.658	Trade accounts payable
Utang lain-lain	3.065.312	47.695.078	805.550	6.659.584	58.225.524	Other accounts payable
Suku bunga variabel:						Variable interest:
Utang bank	1.716.330.226	13.576.190	42.093.584	120.289.028	1.892.289.028	Bank loans
Suku bunga tetap:						Fixed interest:
Utang bank	336.113.260	3.070.780	30.036.427	85.908.066	455.128.533	Bank loans
Liabilitas Sewa	481.748	498.493	900.603	22.739.800	24.620.644	Lease Liability
Jumlah	2.060.481.204	64.840.541	73.836.164	235.596.478	2.434.754.387	Total
Bersih	(1.806.099.294)	160.240.831	813.380.153	1.690.841.783	858.363.473	Net

	2023					
	Sampai dengan 1 bulan/ Until 1 month	> 1 bulan s.d 3 bulan/ > 1 month until 3 months	> 3 bulan s.d 12 bulan/ > 3 months until 12 months	> 1 tahun s.d 5 tahun/ > 1 year until 5 years	Jumlah/ Total	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Aset keuangan						**Financial assets**
Tanpa suku bunga:						Non-interest bearing:
Kas dan setara kas	298.909	-	-	-	298.909	Cash and cash equivalents
Piutang lain-lain						Other receivables
Pihak berelasi	-	-	814.930	-	814.930	Related parties
Pihak ketiga	69.851.581	503.610	1.291.196	23.477.969	95.124.356	Third parties
Suku bunga variabel						Variable interest
Kas dan setara kas	50.062.293	-	-	-	50.062.293	Cash and cash equivalents
Aset derivatif	-	7.953.302	-	-	7.953.302	Derivative assets
Fixed interest:						Fixed interest:
Piutang pembiayaan konsumen	75.449.172	130.516.733	533.946.118	1.024.849.300	1.764.761.323	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	48.596.385	62.478.410	261.985.353	477.468.602	850.528.750	Finance lease receivables
Jumlah	244.258.340	201.452.055	798.037.597	1.525.795.871	2.769.543.863	Total
Liabilitas keuangan						**Financial liabilities**
Tanpa suku bunga:						Non-interest bearing:
Utang usaha	967.812	-	-	-	967.812	Trade payables
Utang lain-lain	873.054	36.760.447	1.136.464	7.597.938	46.367.903	Other payables
Suku bunga variabel:						Variable interest:
Utang bank	1.250.642.698	26.524.103	91.833.199	55.963.269	1.424.963.269	Bank loans
Liabilitas derivatif	-	231.106	-	-	231.106	Derivatives liabilities
Suku bunga tetap:						Fixed interest:
Utang bank	313.796.443	4.952.442	16.808.633	179.285.475	514.842.993	Bank loans
Liabilitas sewa	405.813	420.716	645.724	25.828.848	27.301.101	Lease liability
Jumlah	1.566.685.820	68.888.814	110.424.020	268.675.530	2.014.674.184	Total
Bersih	(1.322.427.480)	132.563.241	687.613.577	1.257.120.341	754.869.679	Net

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur antara lain risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan settlement risk.

Risiko kredit merupakan risiko utama karena Perusahaan bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan. Secara langsung, Perusahaan menghadapi risiko seandainya konsumen tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dengan Perusahaan. Oleh karenanya Perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip "Benar dari Awal" yang diterapkan oleh Perusahaan merupakan pencerminan dari sikap kehati-hatian ini. Perusahaan menerapkan proses pemberian kredit yang ketat, antara lain survei calon konsumen, verifikasi data konsumen, dan persyaratan uang muka yang berlaku. Prinsip 5C dan 1P *(Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral dan Purpose)* sudah merupakan standar dalam setiap analisa kelayakan konsumen. Juga pemilihan dan analisa *Dealer*/*Showroom* atau vendor merupakan kesatuan dari analisa persetujuan proses pembiayaan.

Analisis calon konsumen dan pemantauan Konsumen secara menyeluruh, Perusahaan menggunakan survei internal untuk validasi informasi calon konsumen dan survei yang telah dilakukan oleh *Credit Marketing Officer* (CMO) tanpa mengurangi kecepatan dalam mengambil keputusan persetujuan pembiayaan. Perusahaan pun melakukan pemantauan karakteristik pembayaran angsuran dari konsumen, status jaminan dan kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi sumber penghasilan konsumen sehingga konsumen yang akan bermasalah dapat diantisipasi lebih awal.

Untuk pembiayaan korporasi, Perusahaan menerapkan kebijakan hanya akan bertransaksi dengan rekanan yang memiliki kelayakan kredit dan mendapatkan jaminan yang memadai, bila sesuai, sebagai sarana mengurangi risiko kerugian atau tunggakan. Perusahaan hanya bertransaksi dengan entitas, tergantung pada rating kreditnya, yang mana pemegang saham melakukan bisnis, entitas yang memberikan jaminan memadai, induk perusahaan, pelanggan prospektif dan entitas-entitas yang ditunjuk oleh Mizuho Leasing Co., Ltd. Perusahaan meminimalkan biaya kredit dengan mengoptimalkan struktur manajemen kredit. Pada tahap awal pelaksanaan kesepakatan, Perusahaan memberikan peringkat kredit untuk setiap debitur dan melakukan seleksi kredit yang ketat. Oleh karena itu, Perusahaan menilai kelayakan kredit untuk menandatangani perjanjian dengan melakukan pemeriksaan kredit masing-masing debitur secara ketat. Sistem rating kredit

Credit Risk

Credit risk is the risk due to failure of other parties to fulfill obligations to the Company, including credit risk due to debtor failure, including credit concentration risk, counterparty credit risk, and settlement risk.

Credit risk is a major risk because the Company is engaged in consumer financing and finance lease. The Company faces risks directly when consumers are not able to fulfill their obligations in paying off loans already agreed upon in the contract between consumers and the Company. Therefore the Company applies the precautionary principle. The "Right from the Beginning" principle adopted by the Company is a reflection of this attitude of prudence. The Company applies a rigorous credit process, including surveys of potential customers, verification of customer data, and applicable requirements for down payments. The 5C and 1P (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral dan Purpose) principles have become standard in every consumer feasibility analysis. Selection and analysis Dealer/Showroom or vendor is also an integral part of the financing process analysis.

In its analysis of prospective consumers and monitoring of consumers as a whole, the Company uses an internal survey service to validate information on prospective consumers and a survey conducted by Credit Marketing Officer (CMO) without reducing the speed of financing approval decisions. The Company also monitors the characteristics of consumer installment payments, insurance status, and other conditions that may affect the consumer's income sources so that consumers who might pose problems can be recognized early.

For corporate financing, the Company implements a policy of only transacting with partners who are creditworthy and receive adequate collateral, if appropriate, as a means of reducing the risk of loss or arrears. The Company only transacts with entities, depending on its credit rating, in which shareholders do business, entities that provide adequate guarantees, parent company, prospective customers and entities designated by Mizuho Leasing Co., Ltd. The Company minimizes the cost of credit by optimizing the credit management structure. In the early stages of execution of the agreement, the Company assigns a credit rating to each debtor and conducts a strict credit selection. Therefore, the Company assesses the credit worthiness of signing the agreement by closely examining each debtor's credit. The credit rating system consists of ratings for Japanese and non-Japanese companies, and will be classified into ranks 1 to 10 which are divided into 2

terdiri atas rating untuk Perusahaan Jepang dan non-Jepang, dan akan diklasifikasikan dalam peringkat 1 sampai dengan 10 yang terbagi dalam 2 kategori yaitu untuk perusahaan bermutu baik dalam rating 1 sampai 7 dan perusahaan bermutu buruk, menunggak ataupun Perusahaan dalam kebangkrutan dalam rating 7E sampai dengan 10. Prosedur dan keputusan rating kredit diatur dan disediakan oleh Mizuho Leasing Co., Ltd. Eksposur kelompok usaha dan rating kredit dari pihak lawan dimonitor terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar diantara pihak lawan yang telah disetujui.

categories, namely good quality companies in ratings 1 to 7 and companies with bad quality, arrears or companies in bankruptcy. rating 7E to 10. Credit rating procedures and decisions are regulated and provided by Mizuho Leasing Co., Ltd. The exposure of the business group and the credit rating of the counterparty are monitored continuously and the aggregate value of the related transactions is spread out among the agreed counter parties.

Berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit dan analisa konsentrasi risiko kredit Perusahaan.

The following are the Company's maximum exposure to credit risk and credit risk concentration analysis.

I. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit hampir seluruhnya berasal dari piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan, dimana eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat dengan menggunakan nilai gross

I. Maximum exposure to credit risk

The Company's credit risk exposure is almost entirely derived from consumer financing and finance lease receivables, where the maximum credit risk exposure is equal to the carrying amount with gross amount.

II. Analisis konsentrasi risiko kredit

Konsentrasi risiko kredit timbul ketika sejumlah konsumen bergerak dalam aktivitas usaha yang sama atau aktivitas dalam wilayah geografis yang sama, atau ketika mereka memiliki karakteristik yang sejenis yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi liabilitas kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.

II. Credit risk concentration analysis

Concentration of credit risk arises when a number of consumers operate in the same business activity or in activities within the same geographic area, or when they have similar characteristics that would cause the ability to meet contractual obligations to be equally affected by changes in economic or other conditions.

Perusahaan bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen yang pelanggannya mayoritas adalah individu dan tidak terkonsentrasi pada wilayah geografis tertentu, kecuali untuk sewa pembiayaan. Untuk usaha pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, proses pemberian kredit dijalankan sangat ketat, mulai dari survei calon konsumen, verifikasi data konsumen serta pemberian uang muka sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga risiko yang mungkin timbul dapat dikendalikan dengan baik.

The Company is engaged in the consumer financing business the majority of whose clients are individuals and not concentrated in any certain geographic areas, except for finance lease. For consumer finance and finance lease business, the process for extending credit is very strict, with the survey of prospective customers, verification of customer data, and down payments based on conditions applied, so the risks that might arise can be controlled properly.

Perusahaan juga menerapkan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.

The Company is also implementing Anti-Money-Laundering, Terrorism-Funding-Prevention Programs and Prevention of Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in respect to the regulation based on Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Art. 8 year 2023 regarding on the Implementation of Anti-Money Laundering Program, Prevention of Financing of Terrorism, and Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction by Financial Service Providers in the Non-Bank Financial Industry Sector.

Tabel berikut menggambarkan jumlah risiko kredit dan konsentrasi risiko atas piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan yang dimiliki Perusahaan:

The following table illustrates the amount of credit risk and concentration risk on consumer financing receivables and finance lease receivables held by the Company:

	2024 Rp'000	2023 Rp'000	
Piutang pembiayaan konsumen			Consumer financing receivables
Korporasi	118.090.434	89.573.765	Corporate
Individu	2.651.864.943	2.173.885.727	Individual
Sub-jumlah	2.769.955.377	2.263.459.492	Sub-total
Piutang sewa pembiayaan			Finance lease receivables
Korporasi	1.076.214.450	940.676.427	Corporate
Individu	46.338.000	6.428.521	Individual
Sub-jumlah	1.122.552.450	947.104.948	Sub-total
Jumlah	3.892.507.827	3.210.564.440	Total

Berdasarkan laporan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan BMPP.

Based on the maximum financing limit (BMPP) reports as of December 31, 2024 and 2023, there is no financing receivables exceeding the BMPP regulation.

Tabel berikut merupakan rincian nilai dari agunan yang dimiliki oleh Perusahaan pada tanggal tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

The following tables detail the Company's collateral held as security as of December 31, 2024 and 2023:

	2024					
	Pembiayaan konsumen/ *Consumer finance* Rp'000	Sewa pembiayaan/ *Finance lease* Rp'000	Piutang lain-lain/ *Other receivable* Rp'000	Kredit karyawan/ *Employee loan* Rp'000	Jumlah/ *Total* Rp'000	
Eksposur kredit	2.137.769.734	956.251.800	100.556.145	1.147.292	3.195.724.971	Credit exposure
Nilai jaminan	2.517.844.426	1.095.253.937	114.924.143	-	3.728.022.506	Collateral value
Total eksposur tanpa jaminan kredit	-	-	-	1.147.292	1.147.292	Total Unsecured credit exposure
Porsi eksposur kredit tanpa jaminan kredit	-	-	-	100%	0,04%	Unsecured portion of credit exposure
Tanah dan bangunan	5.578.015	-	69.395.716	-	74.973.731	Land and building
Kendaraan	2.510.513.445	327.273.013	45.528.427	-	2.883.314.885	Vehicle
Mesin dan alat berat	1.752.966	592.201.737	-	-	593.954.703	Machine and heavy equipment
Lainnya	-	175.779.187	-	-	175.779.187	Others
Jumlah	2.517.844.426	1.095.253.937	114.924.143	-	3.728.022.506	Total

	2023					
	Pembiayaan konsumen/ *Consumer finance*	Sewa pembiayaan/ *Finance lease*	Piutang lain-lain/ *Other receivable*	Kredit karyawan/ *Employee loan*	Jumlah/ *Total*	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Eksposur kredit	1.764.802.154	850.487.347	88.238.435	1.809.727	2.705.337.663	Credit exposure
Nilai jaminan	2.159.727.622	977.950.169	98.958.929	-	3.236.636.720	Collateral value
Total eksposur tanpa jaminan kredit	-	-	-	1.809.727	1.809.727	Total Unsecured credit exposure
Porsi eksposur kredit tanpa jaminan kredit	-	-	-	100%	0,07%	Unsecured portion of credit exposure
Tanah dan bangunan	6.317.668	-	73.876.871	-	80.194.539	Land and building
Kendaraan	2.152.893.493	252.644.818	25.082.058	-	2.430.620.369	Vehicle
Mesin dan alat berat	516.461	524.828.783	-	-	525.345.244	Machine and heavy equipment
Lainnya	-	200.476.568	-	-	200.476.568	Others
Jumlah	2.159.727.622	977.950.169	98.958.929	-	3.236.636.720	Total

38. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Perusahaan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

38. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

The table below details changes in the Company's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Company's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	2024				
	1 Januari/ *Januari 1,* 2024	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ *Financing cash flows*	Perubahan non-kas/ *Non-cash changes*	31 Desember/ *December 31,* 2024	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Utang bank	1.939.806.262	407.611.299	-	2.347.417.561	Bank loans
Liabilitas sewa	27.301.101	(4.703.365)	2.022.908	24.620.644	Lease liabilities
	1.967.107.363	402.907.934	2.022.908	2.372.038.205	

	2023				
	1 Januari/ *Januari 1,* 2023	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ *Financing cash flows*	Perubahan non-kas/ *Non-cash changes*	31 Desember/ *December 31,* 2023	
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000	
Utang bank	1.661.377.617	278.428.645	-	1.939.806.262	Bank loans
Utang lain-lain	7.865.500	(7.865.500)	-	-	Other payables
Liabilitas sewa	29.542.427	(4.444.464)	2.203.138	27.301.101	Lease liabilities
	1.698.785.544	266.118.681	2.203.138	1.967.107.363	

39. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN

Pada tanggal 28 Februari 2025, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman baru dari Hachijuni Bank Ltd, Singapore Branch sebesar US$ 5.000 ribu yang akan tersedia sampai dengan tanggal 26 Februari 2026.

39. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

On February 28, 2025, the Company received a new loan facility from Hachijuni Bank Ltd, Singapore Branch amounting to US$ 5,000 thousand which has term period up to February 26, 2026.

40. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan pada halaman 1 sampai dengan 94 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi Perusahaan untuk diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2025.

40. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the financial statements on pages 1 to 94 are the responsibilities of the management and are approved and authorized for issue by the Company's Directors on March 17, 2025.

LAMPIRAN 1 - PENGUNGKAPAN RASIO BERDASARKAN PERATURAN OJK NO.35/POJK.05/2018

Berdasarkan POJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi sejumlah rasio keuangan tertentu. Rasio-rasio ini dibuat oleh Perusahaan berdasarkan formula sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK untuk tujuan kepatuhan terhadap peraturan.

Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan berdasarkan Peraturan OJK:

APPENDIX 1 – RATIOS DISCLOSURES PURSUANT TO OJK REGULATION NO. 35/POJK.05/2018

Based on POJK No. 35/POJK.05/2018 dated December 28, 2018 regarding the Organisation of Financing Company Business, the Company is required to comply with several financial ratios. These ratios have been prepared by the Company based on the formula as prescribed in the said OJK regulation for regulatory compliance purposes.

The following are the financial ratios based on OJK Regulations (OJK):

	2024	2023	
Rasio piutang pembiayaan neto terhadap total aset	92,25%	91,05%	Financing to asset ratio
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total pendanaan yang diterima	126,16%	131,12%	Net financing receivables to funding ratio
Rasio saldo piutang pembiayaan neto untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan	38,58%	38,20%	Net financing receivables for investment and working capital Financing to total financing receivables ratio
Rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPF)	0,42%	0,19%	Non-performing financing (NPF) ratio
Rasio permodalan	69,15%	77,41%	Capital ratio
Gearing ratio	3,14	2.59	Gearing ratio
Rasio ekuitas terhadap modal disetor	131,50%	131,87%	Equity to paid up capital ratio

MIZUHO **Mizuho Leasing Indonesia**

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Menara Astra 32nd Floor
Jl. Jend Sudirman Kav. 5-6 Jakarta 10220
Telp: +62 21 5085.1848
Fax: +62 21 5085.1849
www.mizuho-ls.co.id

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan